

Regional Investment Attractiveness A Survey of Business Perception



TIM PENELITIAN

Research Team

Koordinator Peneliti/*Principal Investigator:*

P. Agung Pambudhi, MM

Nara Sumber/*Resource Persons:*

Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro

Dr. Hadi Soesastro

Dr. Djisman Simanjuntak

Anggota Peneliti/*Research Associates:*

Sigit Murwito, S.Sos

Robert EndiJaweng S.IP

Sri Mulyono, MSs

Agus Widodo, S.Sos

Peneliti Lapangan/*Area Researchers:*

Dr. Paulus Kindangen; Murbanto Sinaga, MA; M. Ridwan, ME

Idham Cholid, ME; Tauhid Achmad, ME; Gumpita, Msi

Imam Bachtiar, Msi; La Ode Asadi, Msi; Ir. Aris Yunanto

Erric Wijaya, ME; Zulfahmi, Msi; Westri Kekalih, ME

Ir. Dahri Tanjung; Yose Rizal Damuri, MA; Ari Perdana M.Ec.Dev

Ir. M. Rizal Farid; Aan Eko Widiarto, SH; M. Amir Arham, Msi

Yosefina Anggraini, S.Sos; Sukasmanto, SE;

Asisten Peneliti/*Research Assistants:*

Regina Retno Budiastuti, SH

F. Sundoko

Kurniawaty Septiany Musdar

KATA PENGANTAR

Acknowledgement

Tiga tahun perjalanan otonomi daerah (otda) ditandai dengan berbagai peristiwa penting, positif maupun negatif, yang dapat digunakan sebagai acuan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan otda. Dari segi positif, terlihat adanya *political will* beberapa daerah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, juga muncul upaya perbaikan pelayanan publik (usaha) dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap/terpadu. Sayangnya sisi negatif otonomi daerah justru lebih mendominasi, diantaranya tentang perebutan kewenangan antar daerah-daerah otonom dengan pemerintah pusat, hubungan tidak harmonis antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, politik uang dalam pemilihan kepala daerah, pertentangan eksekutif dan legislatif, arogansi pimpinan daerah, pemekaran wilayah yang sangat pesat dan kontroversial, kebijakan daerah yang mendorong ekonomi biaya tinggi, dan berbagai peristiwa lainnya.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) yang hadir sepanjang usia otda tersebut, berusaha mewujudkan visinya untuk ikut serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di era otonomi ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya. Dalam salah satu kegiatan tahunannya, KPPOD mengadakan penelitian mengenai "Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2003" yang meliputi 156 Kabupaten dan 44 Kota di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan pemeringkatan ketiga, setelah sebelumnya melaksanakannya di 90 Kabupaten/Kota di tahun 2001 dan 134 Kabupaten/Kota di tahun 2002.

Selain untuk referensi para pelaku usaha dalam mempertimbangkan keputusan investasinya, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong kompetisi yang sehat antar daerah-daerah otonom dalam memfasilitasi

The three-year journey of regional autonomy (otda) is characterized by a range of important events, negative or positive, which can be used as reference for evaluation of decentralization for better implementation. On the positive side, we can see the growing political will in some regions to involve the public in planning the development of their areas. Likewise, there are efforts to improve public service by applying one-stop/integrated license and permit systems. Unfortunately, the negative aspects of regional autonomy are indeed more dominant, such as, among others, competition over authority between autonomous regions and the central government, inharmonious relationship between District/Municipality and Provinces, money politics in the election of heads of regions, conflict between the executive and legislative, arrogance of regional leaders, speedy and controversial expansion of territory, local regulation creating high-cost economics, and other numerous effects.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/Regional Autonomy Watch), which has existed for as long as regional autonomy, is seeking to realize its vision of partaking in the creation of a conducive business climate in the era of autonomy through various activities. As one of its annual activities, KPPOD conducted a "Rating on Investment Attractiveness of Districts/Municipalities for Year 2003" covering 156 Districts and 44 Municipalities in Indonesia. The study is the third rating; the first was in 2001 covering 90 Districts/Municipalities while the second was in 2002 with 134 Districts/Municipalities.

Apart from being a reference for investors in weighing investment decisions, this activity is intended to induce healthy competition among autonomous regions in facilitating economic activities. Likewise, the activity is expected to become one of the means to assist prin-

aktivitas perekonomian. Antusiasme kalangan dunia usaha untuk mempelajari hasil penelitian tersebut di tahun-tahun sebelumnya dan beragam tanggapan dari daerah-daerah otonom, serta liputan media yang luas semakin mendorong KPPOD untuk melakukan kegiatan tersebut secara reguler. Dari kegiatan itu diharapkan menjadi salah satu alat bantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otda yang sedang dan akan terus berlangsung.

Dalam penelitian di tahun 2003 ini, kriteria yang digunakan untuk menilai daya tarik investasi daerah dipertahankan sama dengan kriteria yang digunakan tahun 2002 yang terdiri dari 5 faktor, 14 variabel dan 42 indikator; demikian juga dengan bobot masing-masing kriteria. Hal itu dimaksudkan untuk dapat melihat perkembangan daya tarik investasi daerah dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan studi tersebut yang dilaksanakan oleh tim peneliti tetap KPPOD juga didukung sejumlah nara sumber dan para koordinator peneliti daerah dari berbagai institusi penelitian dan perguruan tinggi, serta para *Interviewer* di masing-masing daerah penelitian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil studi (evaluasi internal maupun adopsi dari berbagai kritik dan saran pada pemeringkatan tahun sebelumnya), kelemahan-kelemahan masih sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu kami akan sangat berterimakasih apabila ada masukan dari para pembaca untuk tujuan perbaikan kualitas studi, dan terutama agar hasil pemeringkatan yang disosialisasikan secara luas dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada para responden pelaku usaha yang memberikan input utama dalam penelitian ini, pemerintah daerah di daerah penelitian yang telah memberikan data-data pendukung yang diperlukan, begitu juga kepada Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Otonomi Daerah yang mendukung kegiatan tahunan KPPOD ini.

cial parties to evaluate the regional autonomy. The enthusiasm of the business community regarding the research in previous years and a mixture of comments from autonomous regions, as well as the wide media coverage spurred by the study, drive KPPOD to do the same activity regularly.

In this year's research, the criteria used to assess the investment attractiveness of regions is the same as the criteria used in year 2002 consisting of 5 factors, 14 variables and 42 indicators; the same applies to the weight of each criterion. This was done purposely to show the development of investment attractiveness of regions from year to year.

This study, which is conducted by the same research team from KPPOD, is supported by a number of resource persons, area researchers/coordinators from various research institutions and research academe, as well as interviewers from each research area. Even though various efforts have been made to increase the quality of the result of this study (responding to internal evaluation and suggestions and critics over the rating of previous years), weaknesses are still inevitable. Accordingly, we appreciate it very much if there are inputs from our readers to enhance the quality of this study, and if there are efforts to widely disseminate this study as a positive contribution to society.

We express our deep gratitude to our respondents from the business community who provided us first-hand input, to local governments that shared supporting data with us, and to the Ministry of Home Affairs, especially the Directorate General for Regional Autonomy, that supported the activity of KPPOD this year.

Atas Nama Tim Peneliti/On behalf of the Research Team
Koordinator/Principal Investigator
P. Agung Pambudhi

DAFTAR ISI

Table of Contents

i	JUDUL PENELITIAN / Title
iii	TIM PENELITI / Research Team
v	KATA PENGANTAR / Acknowledgement
vii	DAFTAR ISI / Table of Contents
ix	DAFTAR GAMBAR / List of Diagram
xi	DAFTAR LAMPIRAN / List of Appendix
1	BAB.I PENDAHULUAN / Introduction
1	A. LATAR BELAKANG / Background
3	B. TUJUAN PENELITIAN / Purpose of Study
3	C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN / Significance of Study
5	BAB. II KERANGKA PEMIKIRAN / Analytical Framework
6	A. FAKTOR KELEMBAGAAN / Regulation and Government Service
9	B. FAKTOR SOSIAL POLITIK / Socio-Political Factor
10	C. FAKTOR EKONOMI DAERAH / Factor of Regional Economic Dynamism
11	D. FAKTOR TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS / Factor of Labor & Productivity
12	E. FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK / Factor of Physical Infrastructure
15	BAB. III METODOLOGI / Research Methodology
15	A. RUANG LINGKUP PENELITIAN / Research Scope
16	B. DATA PENELITIAN / Research Data
16	B.1. Jenis Data / Types of Data
17	B.2. Pengumpulan Data / Data Collection
19	B.3. Pengolahan dan Analisis Data / Data Processing and Analysis
23	BAB. IV PEMAPARAN HASIL PENELITIAN
23	A. PERINGKAT DAYA TARIK INVESTASI DAERAH
24	A.1. Peringkat Daerah Berdasarkan Nilai Total / General Ranking of Regions
24	A.1.1. Peringkat Kabupaten Secara Umum / General Ranking of District
27	A.1.2. Peringkat Kota Secara Umum / General Ranking of Municipalities
29	A.2. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Kelembagaan / The Regulation & Government Service Factor
30	A.2.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan / Ranking of District Based on The Regulation & Government Service Factor
32	A.2.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan / Ranking of Municipalities Based on The Regulation & Government Service Factor
34	A.3. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Sosial Politik / The Socio-Political Factor
35	A.3.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik / Ranking of Districts Based on The Socio-Political Factor
37	A.3.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik / Ranking of Municipalities Based on Socio-Political Factor
39	A.4. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah / The Regional Economic Dynamism Factor
40	A.4.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah / Ranking of District Based on The Regional Economic Dynamism Factor

42	A.4.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah / <i>Ranking of Municipalities Based on The Regional Economic Dynamism Factor</i>
43	A.5. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas / <i>The Labor & Productivity Factor</i>
44	A.5.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas / <i>Ranking of District Based on The Labor & Productivity Factor</i>
46	A.5.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas / <i>Ranking of Municipalities Based on The Labor & Productivity Factor</i>
47	A.6. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik / <i>The Physical Infrastructure</i>
48	A.6.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik / <i>Ranking of District Based on The Physical Infrastructure</i>
51	A.6.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik / <i>Ranking of Municipalities Based on The Physical Infrastructure</i>
52	B. PERUBAHAN PERINGKAT 2002 – 2003
53	B.1. Perubahan Peringkat Kabupaten / <i>Changes to the Ranking of Districts</i>
53	B.1.1. Kelompok 10 Daerah Kabupaten Peringkat Teratas / <i>Districts in the Top Ten Ranks</i>
57	B.1.2. Kelompok 10 Daerah Kabupaten Peringkat Terbawah / <i>Districts in the Bottom Ten Ranks</i>
60	B.2. Perubahan Peringkat Kota / <i>Changes to the Rankings of Municipalities</i>
61	B.2.1. Kelompok 5 Daerah Kota Peringkat Teratas / <i>Municipalities in the Top Five Ranks</i>
62	B.2.2. Kelompok 10 Daerah Kota Peringkat Bawah / <i>Municipalities in the Bottom Five Ranks</i>
66	C. PERMASALAHAN DILUAR PERINGKAT
66	C.1. PERMASALAHAN PADA FAKTOR KELAMBAGAN / <i>Problems Related to the Regulation & Government Services Factor</i>
66	C.1.1. Biaya-Biaya Tidak Resmi / <i>Illegal Fees</i>
69	C.1.2. Pelayanan Birokrasi / <i>The Quality of the Civil Service</i>
71	C.1.3. Peraturan Daerah / <i>Local Regulations</i>
72	C.2. PERMASALAHAN PADA FAKTOR SOSIAL POLITIK / <i>Problems Related to the Socio-Political Factor</i>
72	C.2.1. Pelibatan Pelaku Usaha dalam Perumusan Kebijakan Daerah / <i>The Involvement of the Business Community in Formulating Local Policies</i>
73	C.2.2. Mekanisme Pengawasan Kebijakan Pemda Oleh Masyarakat / <i>The Mechanism for Public Oversight of Local Policy</i>
73	C.2.3. Keamanan / <i>Security</i>
75	C.2.4. Konflik Sosial / <i>Social Conflicts</i>
75	C.2.5. Konflik Politik / <i>Political Conflicts</i>
76	C.2.6. Keterbukaan Masyarakat / <i>Public Openness</i>
77	C.2.7. Intensitas Unjuk Rasa / <i>Strikes</i>
77	C.3. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI DAERAH / <i>Problems Related to the Regional Economic Dynamism Factor</i>
78	C.4. PERMASALAHAN TENAGA KERJA / <i>Problems Related to the Labor & Productivity Factor</i>
78	C.4.1. Kualitas Tenaga Kerja / <i>The Quality of the Labor Force</i>
79	C.4.2. Produktivitas Tenaga Kerja / <i>Labor Productivity</i>
80	C.5. PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR FISIK / <i>Problems Related to the Physical Infrastructure Factor</i>
80	C.5.1. Jalan Darat / <i>Roads</i>
82	C.5.2. Listrik / <i>Electricity</i>
82	C.5.3. Telpon / <i>The Telephone System</i>
83	BAB V. PENUTUP
83	A. KESIMPULAN / <i>Conclusions</i>
83	A.1. PERINGKAT DAYA TARIK INVESTASI / <i>Ranking of Investment Attractiveness</i>
85	A.2. IKLIM INVESTASI / <i>The Investment Climate</i>
87	B. SARAN / <i>Recommendations</i>
91	LAMPIRAN / <i>Appendix</i>

DAFTAR GAMBAR

List of Diagram

Daftar Gambar

- 6 Diagram 1. Hirarki Faktor, Variabel, Indikator, dan Intensitas Pemeringkatan/*Rating Variable and Factors*
Figure 1.
- 24 Diagram 2. Bobot Indikator Faktor Pemeringkatan/*Weight of Rating Factors*
Figure 2.
- 30 Diagram 3. Bobot Indikator Faktor Kelembagaan / *Regulation & Government Service*
Figure 3.
- 34 Diagram 4. Bobot Indikator Faktor Sosial Politik /*Socio-Political Factor*
Figure 4.
- 39 Diagram 5. Bobot Indikator Faktor Ekonomi Daerah/*Regional Economic Dynamism*
Figure 5.
- 44 Diagram 6. Bobot Indikator Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/*Labor & Productivity*
Figure 6.
- 48 Diagram 7. Bobot Indikator Faktor Infrastruktur Fisik/*Physical Infrastructure*
Figure 7.
- 25 Grafik IV.1 : Peringkat Kabupaten Secara Umum /*General Ranking of District* (1.a. 10 Teratas/
Chart IV.1. *The Highest Ten Districts* & 1.b. 10 Terbawah/*The Lowest Ten Districts*)
- 28 Grafik IV.2 : Peringkat Kota Secara Umum/*General Ranking of Municipalities* (2.a. 5 Teratas/
Chart IV.2. *The Highest Five Municipalities* & 2.b. 5 Terbawah/*The Lowest Five Municipalities*)
- 31 Grafik IV.3 : Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan/*Rating of Districts Based*
Chart IV.3. *on Region Regulation & Government Services* (1.a. 10 Teratas/*The Highest Ten Districts* & 1.b. 10 Terbawah/*The Lowest Ten Districts*)
- 33 Grafik IV.4 : Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan /*Rating of Municipalities Based*
Chart IV.4. *on Region Regulation & Government Services* (2.a. 5 Teratas/*The Highest Five Municipalities* & 2.b. 5 Terbawah/*The Lowest Five Municipalities*)
- 36 Grafik IV.5 : Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik/*Rating of Districts Based*
Chart IV.5. *on Socio-Political Factor* (1.a. 10 Teratas/*The Highest Ten Districts* & 1.b. 10 Terbawah/*The Lowest Ten Districts*)
- 38 Grafik IV.6 : Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik/*Rating of Municipalities Based*
Chart IV.6. *on Socio-Political Factor* (2.a. 5 Teratas/*The Highest Five Municipalities* & 2.b. 5 Terbawah/*The Lowest Five Municipalities*)
- 40 Grafik IV.7 : Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/*Rating of Districts Based*
Chart IV.7. *on Regional Economic Dynamism* (1.a. 10 Teratas/*The Highest Ten Districts* & 1.b. 10 Terbawah/*The Lowest Ten Districts*)
- 42 Grafik IV.8 : Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/*Rating of Municipalities*
Chart IV.8. *Based on Regional Economic Dynamism* (2.a. 5 Teratas/*The Highest Five Municipalities* & 2.b. 5 Terbawah/*The Lowest Five Municipalities*)
- 45 Grafik IV.9 : Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/*Rating*
Chart IV.9. *of Districts Based on Labor & Productivity* (1.a. 10 Teratas/*The Highest Ten Districts* & 1.b. 10 Terbawah/*The Lowest Ten Districts*)

- 47 Grafik IV.10 : Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/*Rating of Chart IV.10. Municipalities Based on Labor & Productivity* (2.a. 5 Teratas/*The Highest Five Municipalities* & 2.b. 5 Terbawah/*The Lowest Five Municipalities*)
- 50 Grafik IV.11 : Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/*Rating of Districs Chart IV.11. Based on Physical Infrastructure* (1.a. 10 Teratas/*The Highest Ten Districts* & 1.b. 10 Terbawah/*The Lowest Ten Districts*)
- 51 Grafik IV.12 : Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/*Rating of Municipalities Chart IV.12. Based on Physical Infrastructure* (2.a. 5 Teratas/*The Highest Five Municipalities* & 2.b. 5 Terbawah/*The Lowest Five Municipalities*)

Daftar Tabel

- 54 Tabel IV.1. Perubahan Peringkat 5 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2003/*Changes in the Rankings of Five of the Top Ten Districts in the 2003 Rating.*
- 55 Tabel IV.2. Perubahan Peringkat 6 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2002/*Changes in the Rankings of Six of the Top Ten Districts in the 2002 Rating.*
- 58 Tabel IV.3. Perubahan Peringkat 6 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2003/*Changes in the Rankings of Six of the Bottom Ten Districts in the 2003 Rating.*
- 59 Tabel IV.4. Perubahan Peringkat 4 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2002/*Changes in the Rankings of Four of the Bottom Ten Districts in the 2002 Rating.*
- 61 Tabel IV.5. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2003/*Changes in the Rankings of Four of the Top Five Municipalities in the 2003 Rating.*
- 63 Tabel IV.6. Perubahan Peringkat 4 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2002/*Changes in the Rankings of Four of the Top Five Municipalities in the 2002 Rating.*
- 64 Tabel IV.7. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2003/*Changes in the Rankings of the Bottom Five Municipalities in the 2003 Rating.*
- 65 Tabel IV.8. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2002/*Changes in the Rankings of Three of the Bottom Five Municipalities in the 2002 Rating.*
- 80 Tabel IV.9. Ketersediaan dan Kualitas Jalan Darat 200 Kabupaten dan Kota di Indonesia/*Accessibility and Quality of Roads in 200 Districts and Municipalities in Indonesia.*

DAFTAR LAMPIRAN

List of Appendix

Lampiran 1. Hasil Pemeringkatan

1.1. Peringkat Kabupaten

- 91 Lampiran 1.1.1. Peringkat Daya Tarik Investasi 156 Kabupaten di Indonesia
- 92 Lampiran 1.1.2. Neraca Peringkat Faktor & Variabel Daya Tarik Investasi 156 Kabupaten di Indonesia.
- 95 Lampiran 1.1.3. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan
- 96 Lampiran 1.1.4. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik
- 97 Lampiran 1.1.5. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah
- 98 Lampiran 1.1.6. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas
- 99 Lampiran 1.1.7. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

1.2. Peringkat Kota

- 100 Lampiran 1.2.1. Peringkat Daya Tarik Investasi 44 Kota di Indonesia
- 101 Lampiran 1.2.2. Neraca Peringkat Faktor & Variabel Daya Tarik Investasi 44 Kota di Indonesia
- 102 Lampiran 1.2.3. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan
- 103 Lampiran 1.2.4. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik
- 104 Lampiran 1.2.5. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah
- 105 Lampiran 1.2.6. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas
- 106 Lampiran 1.2.7. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

1.3. Perubahan Peringkat Kabupaten

- 107 Lampiran 1.3.1. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2003
- 109 Lampiran 1.3.2. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2002
- 111 Lampiran 1.3.3. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2003
- 113 Lampiran 1.3.4. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2002

1.4. Perubahan Peringkat Kota

- 114 Lampiran 1.4.1. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2003
- 116 Lampiran 1.4.2. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2002
- 118 Lampiran 1.4.3. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2003
- 120 Lampiran 1.4.4. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2002

Lampiran 2. Daerah Penelitian

- 123 Lampiran 2.1 Statistik Daerah Pemeringkatan Kabupaten dan Kota (Propinsi, Sektor Ekonomi Dominan; PDRB Perkapita)
- 124 Lampiran 2.2 Daftar 156 Kabupaten Pemeringkatan
- 127 Lampiran 2.3 Daftar 44 Kota Pemeringkatan

Lampiran 3. Data Penelitian

128	Lampiran 3.1	Daftar Data, Jenis Data, dan Sumber Data Pemeringkatan
	Lampiran 4.	Faktor, Variabel, dan Indikator , Intensitas Pemeringkatan :
130	Lampiran 4.1.	Daftar Faktor, Variabel, dan Indikator Pemeringkatan
133	Lampiran 4.2.	Metode Klasifikasi Intensitas Indikator Pemeringkatan
	Lampiran 4.3.	Hasil Klasifikasi Indikator Pemeringkatan
	Lampiran 4.3.1.	Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Kelembagaan
136	Lampiran 4.3.1.1.	Indikator Rasio Retribusi thd Pajak
140	Lampiran 4.3.1.2.	Indikator Rasio Anggaran Pembangunan thd APBD
	Lampiran 4.3.2.	Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Ekonomi Daerah
	Lampiran 4.3.2.1.	Variabel Potensi Ekonomi
144	Lampiran 4.3.2.1.1.	Indikator PDRB Perkapita
148	Lampiran 4.3.2.1.2.	Indikator Pertumbuhan PDRB
156	Lampiran 4.3.2.1.3.	Indikator Indeks Pembangunan Manusia
160	Lampiran 4.3.2.2.	Variabel Struktur Ekonomi
	Lampiran 4.3.3.	Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas
	Lampiran 4.3.3.1.	Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja
164	Lampiran 4.3.3.1.1.	Indikator Penduduk Usia Produktif
168	Lampiran 4.3.3.1.2.	Indikator Tenga Kerja Berijasah SLTP Berpengalaman
172	Lampiran 4.3.3.1.3.	Indikator Rasio Pencari Kerja terhadap Angkatan Kerja
	Lampiran 4.3.3.2.	Variabel Biaya Tenaga Kerja
176	Lampiran 4.3.3.2.1.	Indikator Biaya Tenaga Kerja Berdasarkan Aturan Formal
180	Lampiran 4.3.3.2.2.	Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual
184	Lampiran 4.3.3.3.	Variabel Produktivitas Tenaga Kerja
188	Lampiran 4.4.	Hirarki dan Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkatan
193	Lampiran 4.5.	Penghitungan Nilai/Score Intensitas dengan Metode AHP
	Lampiran 4.6.	Hasil Pembobotan (Score) Intensitas Indikator dengan Metode AHP
	Lampiran 4.6.1	Hasil Pembobotan (Score) Intensitas Indikator dengan Metode AHP 156 Kabupaten di Indonesia
195	Lampiran 4.6.1.1.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Kelembagaan 156 Kabupaten di Indonesia
201	Lampiran 4.6.1.2.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Sosial Politik 156 Kabupaten di Indonesia
207	Lampiran 4.6.1.3.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Ekonomi Daerah 156 Kabupaten di Indonesia
213	Lampiran 4.6.1.4.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas 156 Kabupaten di Indonesia
219	Lampiran 4.6.1.5.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Infrastruktur Fisik 156 Kabupaten di Indonesia
	Lampiran 4.6.2	Hasil Pembobotan (Score) Intensitas Indikator dengan Metode AHP 44 Kota di Indonesia
225	Lampiran 4.6.2.1.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Kelembagaan 44 Kota di Indonesia
227	Lampiran 4.6.2.2.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Sosial Politik 44 Kota di Indonesia
229	Lampiran 4.6.2.3.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Ekonomi Daerah 44 Kota di Indonesia
231	Lampiran 4.6.2.4.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas 44 Kota di Indonesia
233	Lampiran 4.6.2.5.	Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Infrastruktur Fisik 44 Kota di Indonesia

Lampiran 5. Kajian Peraturan Daerah

- 235 Lampiran 5.1. Panduan Kajian Peraturan Daerah
238 Lampiran 5.2. Contoh Kajian Peraturan Daerah

Appendix

- Appendix 3** **Research Data**
239 *Appendix 3.1* *List of Data, Type of Data, and Source of Data Used in Rating*
- Appendix 4** **Factor, Variables, and Indicators, Rating Intensity**
241 *Appendix 4.1* *List of Factors - VariableS - Indicators*
244 *Appendix 4.2* *Intensity Classification Method*
247 *Appendix 4.5* *Calculation of the Score of Indicators Using AHP Method*
248 *Appendix 5.1* *Guideline in Analyzing Regional Regulation*

I. PENDAHULUAN

Introduction

A. Latar Belakang

Indikator makro ekonomi Indonesia selama tahun 2002 hingga awal semester pertama tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang cukup memberikan harapan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4%, konsumsi yang terus meningkat, ekspor yang terus tumbuh secara positif, kecenderungan penurunan laju inflasi, nilai tukar rupiah yang semakin menguat dan stabil, dan cadangan devisa yang terus meningkat, serta membaiknya indeks harga saham gabungan. Sementara untuk investasi, selama periode Januari-Mei 2003 mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan sebesar 84,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2002, dengan persetujuan investasi penanaman modal asing sebesar US\$ 4 miliar.

Melihat pada beberapa perbaikan indikator ekonomi di atas diharapkan tingkat *country risk* Indonesia akan membaik secara bertahap. Berdasarkan laporan Badan Pemeringkat Internasional (*Standart & Poor's*) tahun 2002, peringkat utang luar negeri jangka panjang Indonesia meningkat dari CCC+ menjadi B-, dan peringkat utang dalam negeri jangka panjang meningkat dari B- menjadi B. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik, dan lebih jauh juga dapat dijadikan cermin bahwa Indonesia akan diminati investor.

Data BKPM menyebutkan selama Januari – Februari 2003, investasi asing langsung (FDI) yang disetujui adalah 146 proyek dengan nilai investasi US\$2,2857 miliar. Persetujuan BKPM tersebut lebih tinggi 138,4% dibandingkan dua bulan pertama

A. Background

Macro-economic indicators in Indonesia for the entire year of 2002 until the beginning of the first semester of year 2003 signify some encouraging developments as they show economic growth of 4%, sustainable increase in consumption, continuing positive growth of exports, tendency of inflation rate to plummet, a stronger and more stable exchange rate of rupiah, and expanding foreign exchange reserve, as well as improvement in the price of consolidated index and shares. While on investment, for the whole period of January-May 2003, we experience a growth rate of 84.8% compared with the same period in the year 2002, with foreign capital investment approval amounting to US\$ 4 billion.

Looking at improvement of some economic indicators above we expect that the *country risk* ranking of Indonesia is gearing towards a gradual improvement. Based on the report of an International Rating Board (*Standard & Poor's*) for the year 2002, the ranking of long-term foreign debt of Indonesia climbs from CCC+ to B-, and the ranking of long-term domestic debt rises from B- to B. This indicates that the Indonesian economy is strengthening, and moreover it reflects that Indonesia can attract investors.

The Data from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM) shows that from January – February 2003, the approved foreign direct investment (FDI) numbers were 146 projects with investment value of US\$2,2857 billion. The approval from BKPM is more

2002 yang tercatat hanya sebanyak US\$958,8 juta dengan jumlah proyek yang disetujui sebanyak 159 proyek. Sementara untuk persetujuan perluasan usaha adalah sebanyak 42 proyek PMA yang sudah ada, dengan nilai investasi US\$148,4 juta. Data jumlah izin usaha tetap yang diberikan kepada PMA Januari adalah sebanyak 33 proyek dengan realisasi investasi US\$63,3 juta. Izin usaha tetap adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan sebelumnya.

Sementara nilai investasi dalam negeri (PMDN) yang disetujui pada Januari-Februari 2003 turun 10% dibandingkan periode sama 2002, dari Rp. 1,532 triliun (31 proyek) menjadi Rp. 1,385 triliun yang berasal dari 19 proyek. Jumlah proyek yang disetujui itu terdiri atas 15 proyek baru dan 4 proyek yang beralih status. Menurut data BKPM tersebut, terdapat 17 persetujuan perluasan usaha bagi perusahaan PMDN yang telah ada dengan nilai investasi Rp. 758,7 miliar. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap direncanakan sebanyak 6.575 orang tenaga kerja Indonesia dan 47 orang tenaga kerja asing. Sementara potensi ekspornya diperkirakan sebesar US\$129,9 juta dengan jumlah proyek sebanyak 9 proyek.¹ Sekilas data-data di atas dapat memberikan optimisme akan adanya indikasi perbaikan daya tarik investasi di Indonesia. Optimisme dari indikasi perbaikan daya tarik Indonesia secara makro, diharapkan juga akan terjadi di tingkat regional.

Dalam pemeringkatan daya tarik investasi 134 kabupaten/kota tahun 2002, ditemukan sejumlah persoalan yang masih mengganjal dalam daya tarik investasi di daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia. Melanjutkan upaya yang telah dibuatnya tahun 2001 dan 2002 KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) kembali melakukan pemeringkatan daya tarik investasi daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2003, yang dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Seperti apakah peringkat daya tarik daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi dalam persepsi dunia usaha di tahun 2003 ?
2. Apakah ada perubahan peringkat daya tarik investasi kabupaten/kota tahun 2003 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan tersebut ?

than 138.4% higher compared with the first two months of 2002 that recorded only of US\$958.8 million with the number of approved projects totaling 159. While for business expansion there are 42 projects from Foreign Direct Investment Companies (PMA), with an investment value amounting to US\$148.4 million. The number of permanent operating licenses that were granted to PMA in January accounts for 33 projects with actual investment value of US\$63.3 million. Permanent operating licenses are the license that must be obtained by a company to enter into actual commercial production either of goods or service or prior capital investment approval that was granted to companies.

Meanwhile the domestic investment value (PMDN) that was approved for January-February 2003 dropped to 10% compared with the same period in 2002; from Rp 1.532 trillion (31 projects) it becomes Rp. 1.385 trillion originating from 19 projects. These projects consist of 15 new projects and 4 status-shifting projects. According to the data from BKPM, there were 17 business expansion approvals for existing Domestic Direct Investment Companies (PMDN) with investment value of Rp758.7 billion. The number of workers that can be absorbed is 6,575 Indonesian workers and 47 foreign workers. Meanwhile, export potential is estimated at US\$129.9 million from 9 projects.¹ A glance at the data above provides us with optimism that there is an indication of improvements in attracting investment in Indonesia. The optimism from these signs of improvement in the macroclimate for investment in Indonesia can also be expected to have a positive impact at regional level.

In the rating on investment attractiveness of 134 districts/municipalities in the year 2002, it was found that there are still a number of issues in the field to be overcome in attracting investment to district/municipal areas in Indonesia. As a follow-up to the effort made in the year 2001 and 2002, the Regional Autonomy Watch (KPPOD/Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) once again conducted a rating of investment attractiveness of Districts/Municipalities in Indonesia for the year 2003, which is intended to provide answers to several questions as follows:

1. What is the level of attractiveness of Districts/Municipalities for investment as perceived by the business community in the year 2003?
2. Is there any change in the rating on investment attractiveness of Districts/Municipalities for the year 2003 in comparison with previous years and what are the factors that cause such change?

¹ Bisnis Indonesia, 22 Maret 2003

¹ Bisnis Indonesia, 22 March 2003

B. Tujuan Penelitian

1. Membuat pemeringkatan daya tarik investasi daerah terhadap investasi berdasarkan persepsi dunia usaha.
2. Melihat perubahan peringkat daya tarik investasi daerah kabupaten/kota, dan faktor-faktor yang menyebabkan.

C. Signifikansi Penelitian

1. Dapat membantu daerah-daerah dalam melihat daya tariknya terhadap investasi ditinjau dari berbagai aspek.
2. Sebagai suatu panduan bagi kalangan dunia usaha atau investor dalam membuat keputusan berinvestasi.

B. Purpose of Study

1. To make a rating on attractiveness of regions toward investment based on the perception of the business community.
2. To see whether there is a change in investment ranking of Districts/Municipalities, and the factors that cause such change.

C. Significance of Study

1. This study is intended to help local governments examine how their areas are perceived in terms of investment attractiveness.
2. As a reference for the international business community or local investor in making investment decisions.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Analytical Framework

Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara atau daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Dalam penelitian ini, sejumlah variabel - konsep yang mempunyai variasi nilai / intensitas

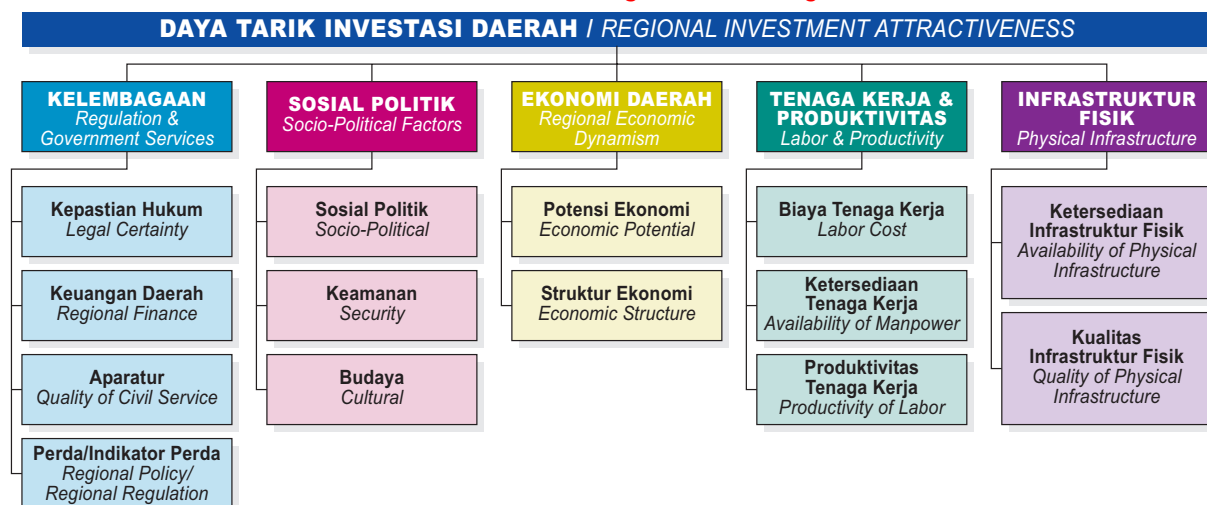
In the context of regional development, investment plays an important role for the economic growth. In general, domestic and foreign investment requires favorable business climate and easy and clear investment procedures. By and large, the flow of investment into the region depends on investment attractiveness of that region and favorable investment climate. The success of a region in increasing its attractiveness to investment, for one thing, depends on its ability to formulate policies on investment and business community as well as increasing service quality for the people. The ability of region to determine factors that can be used as measurement of its regional economic competitiveness vis-à-vis other regions is also very important to increase attractiveness and win the competition. One of the very important factors that should be considered in attracting investors, besides favorable macro-economy, is the development of human resource and infrastructure in broad sense. This demands a shift in orientation of government role as regulator into supervisor, to optimally develop the role of private sectors in the economy.

In this research, several variables -concepts that have variability in value/intensity/number

/ jumlah yang menggambarkan atribut dari variabel tersebut; - digunakan untuk menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemeringkatan daya tarik daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi, serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini; dari pemahaman studi literatur, opini para pelaku usaha, masukan para ahli dan hasil pemeringkatan yang dilakukan KPPOD sebelumnya; variabel-variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor sebagai berikut : I. Kelembagaan, II. Sosial Politik, III. Perekonomian Daerah, IV. Tenaga Kerja dan Produktivitas, V. Infrastruktur Fisik. Untuk pemeringkatan daya tarik investasi 200 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2003 ini masih menggunakan variabel-variabel yang digunakan untuk pemeringkatan tahun 2002, seperti terlihat pada Diagram 1. di bawah ini.

attributable to such variables- are used to determine investment attractiveness of any region. Study of related literature, opinion of business actors, input from experts, and results of rating previously done by KPPOD are the guides in identifying the levels and elements of variables, so as to ensure proper application of those variables in answering the research questions and meeting the objectives of rating on investment attractiveness of Regency/City. At the end, the variables that influence regional investment attractiveness applied here can be classified into 5 (five): I. Regulation & Government Services, II. Socio-Political Condition, III. Regional Economic Dynamism, IV. Labor and Productivity, and V. Physical Infrastructure. The elaboration and development of the five groups of variables/factors into indicators for every variable is also done based on study of related literature, and discussion with experts and business community. The elaboration of variables used in this research is explained in

Diagram/Figure 1.
Hirarki Faktor & Variabel Pemeringkatan/Rating Variable and Factors



Penjabaran dan pengembangan kelima faktor/kelompok variabel tersebut ke dalam masing-masing indikator dari setiap variabel, dilakukan juga atas dasar studi literatur, diskusi dengan para ahli dan kalangan dunia usaha dapat dijelaskan seperti uraian dibawah ini :

the enclosed hierarchical diagram, but the following explanation can provide their more operational definitions. (Appendix 1.)

A. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan, mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah. Dalam

A. Regulation and Government Service

Regulation and Government factor includes government capacity in performing governmental functions in terms of providing legal certainty and law enforcement, public service, policy formulation, and local development. In this

penelitian ini, faktor kelembagaan terbagi dalam 4 (empat) variabel, yaitu :

A1. Variabel Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan kepastian hukum disini adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan. Sedangkan penegakan hukum dilihat dari kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan peraturan dan keputusan sesuai dengan peraturan tanpa membedakan subyek hukum. Termasuk dalam variabel kepastian hukum adalah keberadaan pungutan liar diluar birokrasi yang dapat terjadi baik di jalur distribusi maupun tempat produksi. Indikator lain dalam variabel ini adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif. Bilamana hubungan kedua unsur pemerintahan itu terjalin baik maka akan kondusif bagi kepastian hukum dalam pengertian luas (dalam praktik dunia usaha, aturan formal bisa terabaikan ketika terjadi perselisihan antar kedua unsur pemerintahan tersebut yang berimbas ke dunia usaha).

A.2. Variabel Aparatur dan Pelayanan

Yang dimaksud dengan aparatur di sini adalah orang/pejabat atau pegawai pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintah daerah, yaitu menyediakan pelayanan publik, infrastruktur fisik, serta merumuskan peraturan berupa aturan main dari aktivitas dunia usaha dan investasi. Indikator aparatur pemda dalam pemeringkatan ini adalah penggunaan wewenang aparat pemda dalam menjalankan peraturan. Sedangkan dari sisi pelayanan yang diberikan aparatur pemda dilihat kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan hal-hal lain terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan.

A.3. Variabel Kebijakan Daerah / Peraturan Daerah

Pada prinsipnya peraturan/kebijakan daerah adalah kerangka acuan / aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi. Kebijakan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur pelayanan kepada masyarakat,

research, institutional factor is divided into 4 (four) variables, namely:

A.1. Variable of Legal Certainty

Legal certainty here refers to the consistency of rules and law enforcement in the region. This means that there are rules that can be used as guidance for enough length of time, which is not subject to frequent change due to succession of official. Whereas law enforcement is viewed from the capacity of law enforcers to enforce rules and court verdicts without discriminating law subjects. Included in the variable of legal certainty observed here is the presence of illegal levy that operate both in distribution and production places. Another indicator under this variable is the relationship between executive and legislative governmental bodies. If the relation of said governmental branches is good, legal certainty would be more apparent in broad sense (in business practice, formal rules are easily ignored if there is conflict between governmental branches which interfere business).

A.2. Variable of Apparatus and Service

Apparatus here refers to the person/official or regional government employee responsible in the administration of regional government in providing public service, physical infrastructure, and formulating regulations on business activities and investment. The indicators under regional government apparatus measured in this rating include the use of authority of regional government apparatus to enforce rules, regardless of the existence of abuse of authority or its absence; and in terms of provision of service by regional government apparatus, the clarity of bureaucracy chain in permit handling and other things related with business community and the behavior of regional government apparatus in providing such service.

A.3. Variable of Local Regulation

Basically, local regulation/policy refers to all formal policies or implementing rules that are stipulated and established by local government in regulating the activity of business community and investment. This Local Policy can be in the form of Local Regulation (Perda) and Decision of the Regent/Mayor (SK Bupati/Walikota) that regulate Local Tax and Retribution/User-charges, public service procedures, etc. Local Regulations

perizinan, dan lain-lain. Perda yang mengatur mengenai prosedur pelayanan terhadap dunia usaha/investasi yang menarik para investor antara lain yang memberikan kemudahan dalam birokrasi pelayanan usaha, konsistensi kebijakan, harmonisasi antar produk hukum, tidak adanya hambatan-hambatan birokrasi dan sebagainya.

Peraturan yang memuat pungutan yang baik semestinya tidak hanya sekedar ditujukan untuk peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, filosofi pungutan dan dampak terhadap perekonomian berkelanjutan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut merupakan distorsi bagi kegiatan usaha dan investasi. Distorsi dari pungutan tersebut bisa terjadi pada harga komoditas, hambatan lalu lintas perdagangan antar daerah, biaya produksi, ekonomi biaya tinggi akibat pungutan berganda atau yang melampaui kewajiban, dan sebagainya.

A.4. Variabel Keuangan Daerah

Yang dimaksud Keuangan Daerah dalam penelitian ini adalah kebijakan, strategi, dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh dana, serta pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan, dan lain-lain). Kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dana dan mengelola dana yang telah mereka peroleh untuk peningkatan perekonomian daerahnya tersebut tertuang dalam APBD.

Variabel keuangan daerah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur pungutan, dan komitmen pemda dalam pembangunan. Struktur pungutan digunakan untuk melihat upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dana yang berasal dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakat, seperti melalui pajak dan retribusi daerah serta pungutan lainnya. Dalam penelitian ini dilihat rasio antara retribusi terhadap pajak daerah, dengan asumsi bahwa rasio retribusi yang lebih kecil dari pajak akan mendukung dunia usaha, karena pada umumnya struktur pungutan dalam pajak relatif lebih jelas dibanding pungutan dalam retribusi. Sementara struktur pembelanjaan APBD digunakan untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik. Rasio anggaran pembangunan terhadap pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi komitmen pemerintah daerah

regulating service procedure for business community/investment that attract investors are usually those which provide ease in business service procedure, consistency of local government policy, harmony among legal products, absence of bureaucratic barriers, etc.

In terms of tariff, focus was directed to various mandatory levies applied to public and business communities regulated in local regulation regarding tax and retribution intended only for increasing PAD without considering the principles of economy, philosophy in application of levies, and its impact in terms of economic sustainability, which are distorting business and investment activities. The levies may be distorting the price of commodity, hampering inter-regional trade traffic, local regulation regulating manpower, and producing high cost economy due to double or multiple levies applied based on very weak justification. Guidance for study of Local Regulation is reflected in **Appendix 5.1**.

A.4. Variable of Local Finance

Local Finance encompasses all policies, strategies, and techniques applied by local government to generate fund, and in allocating the fund to finance its function or duty as local government (service delivery, development initiatives, etc.). The policy of local government in generating and managing fund to boost local economy is stipulated in APBD (Local Budget). This variable of local finance is grouped into two, namely levy structure, and the commitment of local government for development.

Levy structure is used to see the efforts of the local government in generating fund from the public through tax and local retribution and other charges. In this research, the ratio between local retribution and local tax is considered, with the assumption that a lower ratio of retribution than that of tax supports business community, because the levy structure in tax is by and large relatively clearer than levy from retribution. While the structure of Local Budget is used to observe the commitment of local government in public service delivery. The ratio between development budget and local operational budget to fund development activities is considered. This is an indication of local government's commitment in developing physical infrastructure needed to support business activity, and to promote local economy.

dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, dan mendorong perekonomian daerah.

B. Faktor Sosial Politik

Yang dimaksud dengan kondisi sosial politik daerah adalah berbagai dampak atau akibat dari hubungan timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi hukum dan segi kehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan dan sebagainya. Kelompok variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa kondusif aspek sosial, politik, keamanan, dan budaya dalam mendukung perekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah.

B.1. Variabel Keamanan

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta. Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

B.2. Variabel Sosial Politik

Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat. Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

B.3. Variabel Budaya Masyarakat

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut. Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap

B. Socio-Political Factor

Local socio-political condition refers to various impacts or results of reciprocal relationship between economy and politics, between law and religion, between politics and security, and so forth. This variable group is used to measure how conducive is the aspects of social, politics, security, and culture in supporting local economy and local investment attractiveness.

B.1. Variable of Security

Local security situation influences business/investment activity, either as support or impediment for the business/investment activity and security of life and property. Security condition can be measured from the sense of security and level of security disturbance toward business community and social environment where the business is, as well as the pace of apparatus in dealing with security disturbance.

B.2. Variable of Socio-Political Condition

Socio-political condition relates to the situation in the region as a result of relationship among institutions in one social system in a region, either among formal institutions in the government, among social institutions, or between formal institutions and social institutions. Several aspects that form local socio-political condition are among others: openness of bureaucracy for the participation of business community in formulating policy concerning their interest, social conflicts, political stability, and demonstration activity.

B.3. Variable of Society's Culture

Culture is defined as a set of ideas possessed by a group of people in a certain area, on which behavior or attitude of the group, individually or collectively, is based. To determine regional investment attractiveness for investors, society's value that can support the influx of investment to a region is divided at least into 4 (four) aspects, namely community's openness/receptiveness toward business community,

masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

C. Faktor Ekonomi Daerah

Merupakan ukuran kinerja sistem ekonomi daerah secara makro. Perekonomian daerah mencakup beberapa hal, antara lain variabel utama makro ekonomi (seperti total output / PDRB, tingkat harga, dan kesempatan kerja) yang membentuk struktur ekonomi daerah. Perekonomian daerah digunakan untuk mengukur daya dukung potensi ekonomi, (ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain), serta struktur ekonomi terhadap kegiatan usaha / investasi.

C.1. Variabel Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi daerah : mencakup potensi fisik dan non fisik suatu daerah/wilayah seperti penduduk/manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Faktor penduduk yang dianalisis dalam kaitannya dengan daya tarik investasi daerah pertama adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dilihat dari PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah. Kedua, potensi ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, yaitu rata-rata pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai identifikasi potensi ekonomi yang menggambarkan kemampuan masyarakat setempat dalam cakupan yang luas.

non-discriminative community, community's working ethos, and community's custom. Investors who are planning to come into a region need a culture that is open to the incoming business community, a condition in which the society is not antipathy toward any business investment. Beside openness, investors need non-discriminating attitude of the local community with the same treatment toward all people without discriminating the origin, race, religion, and gender in every business sector. In opening a business in a certain area, investors also consider the community's working ethos – reflected in their willingness to work hard – competition for achievement, honesty and willingness/flexibility to develop. If the surrounding community has good working ethos, investors will find it easy to recruit employees without importing workers from outside the area. Another thing considered by investors is custom, especially local community's custom that does not disturb business productivity.

C. Factor of Regional Economic Dynamism

Regional Economic Dynamism measures the performance of macro local economic system. Regional Economic Dynamism includes several aspects, such as macro economic main variables (like total output/PDRB, price level, and job opportunity) that form local economic structure. Local economy is used to measure the capacity of the local economy (natural resources, etc), and economic structure toward business/ investment activities.

C.1. Variable of Economic Potential

Local economic potential includes the potential of physical and non-physical resources of any area like population/human resources, natural resources, man-made resources, and social resources. The population factor analyzed in relation to regional investment attractiveness is the society's capability to meet their need, which can be seen from Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita. GRDP per capita is the value of GRDP based on prevailing market price divided by the population of the region. Moreover, economic potential can also be seen from economic growth, that is the average of PDRB growth value based on constant price of a certain period/year against the previous period/year. Human Development Index (HDI) indicator is also used as one of the indications of economic potential that describes the local community's ability in a broad scope.

C.2. Variabel Struktur Ekonomi

Nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Basis struktur perekonomian terlihat dari kontribusi sektor-sektor ekonomi tertentu terhadap nilai bruto seluruh sektor yang ada di daerah tersebut (nilai tambah sektoral). Berdasarkan kontribusi sektoral tersebut dapat dilihat apakah struktur ekonomi daerah yang bersangkutan berbasis sumber daya alam (primer), sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif dan industrialisasi (sekunder), dan pada perdagangan, jasa, dan perbankan (tersier). Indikator-indikator struktur ekonomi tersebut penting bagi investor untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang telah berkembang di daerah yang bersangkutan.

C.2. Variable of Economic Structure

The amount of gross value-added of all economic activities that transpired in a certain area is used to analyze the economic structure of a region, all of which are measured in GRDP. Economic structure is seen from the contribution of certain economic sectors to the gross value of all sectors in the area (value-added by sector). Based on this contribution by sector we can see whether the relevant local economic structure is based on natural resources (primary), accustomed to productive economic activities and industrialization (secondary), and on service and banking (tertiary). The mentioned economic structure indicators are important for investors to identify the economic activity that has developed in the relevant region.

D. Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Selain itu pekerja yang merupakan sumber daya manusia adalah komponen utama dari pembangunan karena pelaku utama pembangunan adalah manusia. Untuk melihat gambaran tentang berapa besar nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yang diberikan oleh setiap pekerja pada suatu kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan menghitung produktivitas tenaga kerja. Beberapa hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi daya tarik terhadap investasi adalah :

D. Factor of Labor and Productivity

Manpower constitutes a very important production factor in the formation of value-added of an economic activity. Furthermore, human resource in the form of labor is the main component of development because the main agent of development is human being. The value-added of an economic activity (as provided by every worker in any economic activity) can be measured by counting labor productivity. Several things that have relationship with manpower, and which can influence investment attractiveness, are as follows:

D.1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja

Untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia, baik yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman. Tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan atau dengan mendatangkan dari daerah lain. Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan usaha dilihat dari rasio jumlah penduduk usia produktif; rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basis pendidikan minimal SLTP yang sudah memiliki pengalaman kerja.

D.1. Variable of Manpower Availability

Investment/business activity needs the availability of manpower, whether experienced or not. The labor can be obtained from the relevant region or by importing from other regions. The availability of manpower needed in a business activity can be measured by calculating the ratio of the productive age population, ratio of people looking for a job and work force, and labor of at least junior high school with work experience.

D.2. Variabel Biaya Tenaga Kerja

Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Pedoman normatif

D.2. Variable of Labor Cost

Labor cost refers to the compensation for the entire workers as the cost expended by businessman, in the form of wage or salary. Normative guidance on wages established by the

pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/UMK menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya. Selain panduan normatif yang ada, investor juga membutuhkan 'pasar' upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterima oleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor.

D.3. Variabel Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Secara makro hanya dapat diperoleh produktivitas rata-rata pada sektor-sektor ekonomi agregatif, bukan besarnya produksi barang dan jasa tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi (PDRB). Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode ini banyak kelemahan dan kurang akurat, namun demikian cara pengukuran seperti ini masih memadai untuk menunjukkan kecenderungan produktivitas kesempatan kerja.

E. Faktor Infrastruktur Fisik

Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik adalah berbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi, komunikasi, dan listrik), yang diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu daerah ke daerah lain atau ke negara lain dalam suatu kegiatan usaha. Faktor infrastruktur fisik untuk penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu :

E.1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik

Untuk kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi (telpon), dan sumber energi (listrik).

E.2. Kualitas dan Akses terhadap Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Untuk itu infrastruktur yang tersedia juga harus berada dalam kondisi baik. Kualitas infrastuktur selain memperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layak untuk digunakan, juga ditunjukkan dengan

government in the form of Provincial Minimum Wage (UMP) or City Minimum Wage (UMK) becomes an important factor for businessman in calculating his business. In addition to the existing normative guidance, investor also needs wage 'market' effective in the relevant region or the wage actually accepted by workers that may be higher or lower than UMP/UMK. The assumption is that the lower the wage the more interesting the business is to the investors.

D.3. Variable of Labor Productivity

Essentially labor productivity is one of the indicators of labor that is closely related to economic factor. In macro level, we can only obtain average productivity on the aggregate economic sectors, that is the amount of economic growth (PDRB) and not the amount of goods and services produced. Productivity is measured based on the amount of PDRB in certain sector divided by the number of workers in such sector. This method has many disadvantages and is less accurate, but this way of measurement is still sufficient to compare tendency in productivity increase and job opportunity.

E. Factor of Physical Infrastructure

Physical infrastructure encompasses various installations and basic facilities (especially transportation system, communication, and electricity), which are very much needed by the society in trading activity and to ease the mobilization of people, goods and service from one region to other regions or states. Physical infrastructure factor for this research is divided into two variables:

E.1. Variable of Physical Infrastructure Availability

A smooth business activity requires support of the availability of facility or physical infrastructures like road, railway, harbor and airport, communication facility (telephone), energy source or electricity.

E.2. Quality and Access to Physical Infrastructure

Besides the availability of physical infrastructure, a smooth production factors' movement in business activity should also be supported by good quality infrastructure. Infrastructure quality can, apart from its physical condition ready to use, also be measured by assessing

kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada.

Berdasarkan studi literatur dan pendapat para ahli (ekonom dan pelaku usaha), variabel-variabel sebagaimana dijabarkan di atas merupakan variabel-variabel yang membentuk daya tarik investasi daerah. (*Lihat Lampiran 4.1. Daftar Faktor, Variabel dan Indikator Pemeringkatan*)

Bobot pengaruh masing-masing faktor, variabel, dan indikator terhadap daya tarik investasi suatu daerah bervariasi / berbeda. Dengan menggunakan metode *The Analytic Hierarchy Process* (AHP) terlebih dahulu akan dilakukan pembobotan terhadap masing-masing variabel-variabel serta indikator-indikator sebagaimana dijelaskan di atas untuk menentukan bobot pengaruh tiap variabel dan indikator tersebut dalam membentuk daya tarik investasi daerah.

the accessibility toward the relevant infrastructure.

Variables elaborated above are those that form regional investment attractiveness (**Appendix 4. Factors, variables, and indicators of the research**). Employing the method of The Analytic Hierarchy Process (AHP), each variable as well as indicator as explained above is measured to obtain its magnitude in the framework of determining the influence of each variable and indicator on regional investment attractiveness.

III. METODOLOGI

Research Methodology

A. Ruang Lingkup Penelitian

Pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota di Indonesia dilakukan terhadap 200 daerah (156 Kabupaten dan 44 Kota) di 29 Propinsi dari 416 daerah (328 Kabupaten dan 88 Kota) di seluruh Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada daerah-daerah Kabupaten dan Kota, dengan pertimbangan bahwa otonomi daerah menempatkan daerah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Selain itu dalam kerangka AFTA, adanya pembebasan atau pengurangan tarif perdagangan barang dan jasa antar negara, menempatkan daerah Kabupaten/Kota pada posisi strategis dalam persaingan antar negara karena persaingan menjadi bergeser pada level daerah Kabupaten/Kota.

Penentuan atau pemilihan daerah-daerah yang diteliti didasarkan pada tahapan sebagai berikut :

1. Dipilih daerah-daerah yang kontribusi salah satu atau lebih PDRB sektoral terhadap total PDRB minimal sebesar 20%. Sektor-sektor tersebut adalah :
 - (1). Kontribusi Pertanian Pangan.
 - (2). Pertanian Non Pangan (Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan),
 - (3). Industri Pengolahan (Manufaktur),
 - (4). Pertambangan, dan
 - (5). Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar, Eceran, Hotel dan Restoran).Pertimbangan memilih sektor-sektor tersebut sebagai dasar penarikan sampel karena sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor utama dalam mendukung perekonomian daerah-

A. Research Scope

The rating on investment attractiveness of District/Municipality in Indonesia covers 200 regions (156 districts and 44 municipalities) in 28 provinces from 416 regions (328 districts and 88 municipalities) all over Indonesia. The research focuses on the districts and municipalities, since regional autonomy emphasizes districts and municipalities as front liners in service delivery to the people and in the process of development. Apart from that, in the AFTA framework on tariff exemption and reduction of international goods and service trade barriers, districts and municipalities are placed in strategic position in the competition among nations, in the sense that competition is expected to happen more at the district and municipality level.

The regions were chosen for this rating following these considerations and phases:

1. Regions were selected on the basis that one or more of the following sectors recorded at least 20% of the total GRDP:
 - (1) Food Agricultural Sector
 - (2) Non-food Agricultural Sector (Plantation, Fishery and Forestry),
 - (3) Manufacture,
 - (4) Mining, and
 - (5) Trading Sector (Groceries, Retailing, Hotel and Restaurant).

Those sectors are chosen as sample to observe their economic capacity and as investment target. Each sector must have a contribution of at least 20%, because it is assumed that the

daerah di Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk melihat daya dukung perekonomian daerah. Selain itu sektor-sektor tersebut juga merupakan sasaran investasi. Sedangkan pertimbangan besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor minimal sebesar 20%, diasumsikan bahwa dengan kontribusi sebesar 20% memperlihatkan bahwa di daerah yang bersangkutan telah terjadi aktivitas ekonomi produktif (terutama pada sektor-sektor yang bersangkutan) yang dapat menunjang kegiatan investasi. Dengan pembatasan seperti ini dari 416 daerah (Kabupaten/Kota yang tercatat pada tahun 2003) diperoleh 259 daerah Kabupaten/Kota.

contribution of at least 20% indicates the presence of productive economic activities in particular area (especially for the related sectors), which can support investment activities. There are 259 selected areas arranged through this selection method.

2. Dari 259 daerah yang terpilih pada tahap pertama, selanjutnya dilihat ketersediaan data pendukung untuk analisis (variabel dan indikator) daya tarik daerah terhadap investasi dalam penelitian ini; seperti data PDRB, APBD, Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah dan sebagainya. Terdapat 200 daerah (156 Kabupaten dan 44 Kota) yang berasal dari 28 Propinsi yang mempunyai kelengkapan data pendukung (variabel/indikator) untuk dapat dianalisis, dan yang akhirnya dijadikan obyek penelitian untuk pemeringkatan. Daftar Kabupaten dan Kota yang diperingkat pada tahun 2003, dapat dilihat pada *Lampiran 2. Daerah Penelitian*.

2. The selected 259 regions were then further analyzed using supporting data available for the regional investment attractiveness analysis (variables and indicators) in this research; like GRDP, APBD (Local Budget), manpower, Local Regulation and the like. There are 200 regions (156 regencies and 44 municipalities) in 28 provinces with complete supporting data (variables/ indicators) for analysis, and finally decided as research objects for this rating (**Appendix 2**).

B. Data Penelitian

B.1. Jenis Data

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan gabungan antara data primer kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan, serta data sekunder berupa *existing statistic data*.

B.1.1. Data Primer,

- Data bobot faktor, variabel, dan indikator yang mempengaruhi daya tarik terhadap investasi, berdasarkan persepsi dunia usaha.
- Data persepsi dunia usaha berkaitan dengan daya tarik investasi suatu daerah, yang diperoleh melalui survei lapangan (*face to face interview*) maupun *mailing*.

B.1.2. Data Sekunder

Berupa data-data statistik daerah (*existing statistic data*) yang dikumpulkan pada penelitian

B. Research Data

B.1. Types of Data

Data used in this research are a combination of qualitative and quantitative primary data obtained from survey and field research, and secondary data in the form of existing statistical data.

B.1.1. Primary Data

- Data on the magnitude of factors, variables and indicators determining investment attractiveness based on business communities' perception.
- Data on business community's perception related to investment attractiveness of a region that was collected by face-to-face interview and mailing questionnaire.

B.1.2. Secondary Data

in the form of existing statistical data collected from our previous research and reports

terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya adalah Perda, Statistik Ekonomi, Ketenagakerjaan, Infrastruktur, Demografi dan sebagainya. Daftar data secara lengkap bisa dilihat pada *Lampiran 3. Data Penelitian*.

provided by the government, including, among others, local regulation, Economic Data, Manpower, Infrastructure Demography etc. (See **Appendix 3. List of Data and Types of Data**)

B.2. Pengumpulan Data

B.2. Data Collection

B.2.1. Teknik Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data yang berupa *existing statistic* (data sekunder). Dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh lembaga pemerintah (seperti BPS, BI, Depdagri, Pemda, dll), serta berbagai laporan penelitian sebelumnya.
- (2) Data Bobot Faktor, Variabel, dan Indikator. Agar dapat dilakukan perbandingan dan perkembangan hasil pemeringkatan dari tahun ke tahun, untuk pemeringkatan tahun 2003 ini masih menggunakan hasil pembobotan tahun 2002. Data pembobotan masing-masing faktor, variabel dan indikator dilakukan melalui wawancara (*face to face interview*) dengan bantuan kuesioner *The Analytic Hierarchy Proccess* (AHP) kepada 2 sampai dengan 3 orang responden pengusaha daerah di setiap daerah penelitian dari 20 daerah penelitian, dan 8 orang pengusaha nasional, serta 3 orang pengamat ekonomi dari Jakarta. Hasil Pembobotan Faktor, Variabel dan Indikator, secara lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 4.4. Hirarkhi dan Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkatan*.
- (3) Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang daya tarik investasi daerah dilakukan dengan survei *face to face interviews* dan sebagian dengan *mailling questionnaires* maupun, dengan menggunakan kuesioner yang sama. Jumlah daerah yang dilakukan survei secara *face to face interview* sebanyak 190 daerah, dengan melibatkan kurang lebih 200 interviewer dari daerah-daerah yang bersangkutan. *Sebanyak 10 daerah survei dilakukan secara mailing questionnaire karena tidak ada jaringan KPPD di sana*. Untuk *mailing questioner* dikirim ke 80 responden di setiap daerah penelitian, sementara untuk *face to face interviews* dilakukan ke minimal 20 responden dan maksimal 40 responden. Responden penelitian ini adalah kalangan dunia usaha baik pemilik usaha
- (1) Data on existing statistical data (secondary data) were taken from local statistical reports from different government institutions such as Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesia Central Bank, Ministry of Home Affairs, Local Governments etc.), and from other previous research reports.
- (2) In order to be able to compare with the rating result in 2002, this 2003 rating uses the same weight of the factors, variables and indicators of the 2002 rating. Data on the weight of each factor, variable and indicator are collected through interview (face-to-face interview) with the help of The Analytic Hierarchy Process (AHP) with 2 to 3 local business respondents in each research area for 20 research areas, and 7 national businessmen along with 3 economists from Jakarta.
- (3) The data on the perception of business community regarding regional investment attractiveness were collected through survey using questionnaire (structured question list), collected through face-to-face interview and mailing questionnaire. Of 200 areas, face-to-face interview was conducted in 190 areas, while mailing questionnaire was done in 10 areas. For the mailing questionnaire, it was distributed through mail to 80 respondents in the research areas; while the face-to-face interview was done by interviewing of at least 20 respondents to maximum 40 respondents in research areas. The respondents (business owner and managerial level) being interviewed are 5,140 businessmen from 200 Districts/ Municipalities; in average 26 respondents per area.

maupun pengelola usaha (level manager). Jumlah seluruh responden yang berhasil diwawancara untuk pemeringkatan tahun 2003 adalah sebanyak 5.140 orang yang tersebar di 200 daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, atau rata-rata 26 responden di setiap daerah.

- | | |
|---|--|
| <p>(4) Kuesioner yang digunakan untuk survei dirumuskan secara terstruktur, sistematis serta pemilihan responden yang representatif memungkinkan data yang diisi dalam kuesioner merupakan suatu data yang telah mempunyai nilai obyektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan/pengertian/kepercayaan individu tentang obyek sikap (<i>kognitif</i>) karena pengalaman, lamanya seseorang mengalami aktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalan yang diteliti.</p> <p>(5) Penentuan responden yang disurvei dengan <i>purposive sampling</i> didasarkan pada kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kalangan dunia usaha yang mewakili perusahaan yang bergerak di bidang, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Industri Pengolahan (Manufaktur), dan Perdagangan (tergantung dari keterwakilan karakteristik masing-masing daerah), ● Mewakili perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, berdasarkan modal usaha/ jumlah tenaga kerja. ● Perusahaan yang berasal dari daerah yang bersangkutan (investor daerah setempat), dan ● Perusahaan yang berasal dari luar daerah (cabang perusahaan, investor dari luar daerah, PMA, dlsb); | <p>(4) With the use of said structured and systematically designed questionnaire, and the selection of respondents based on strong representativeness consideration, it is likely that data gathered through the questionnaire are highly objective in terms of knowledge, comprehension and reliance of individual respondent. This research makes it sure that the respondents are knowledgeable in their area due to their individual experience.</p> <p>(5) The following criteria are the bases in the selection of respondents:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Businessmen representing companies operating in the field of Plantation, Forestry, Animal Husbandry, Fishery, Mining, Manufacturing and Trading (depending on the representativeness of the characteristics of respective region), ● Representing small, medium and big-scale corporation in terms of business capital or size of man power, ● Local companies (local investor), and ● Companies from other regions (branch, investor from outside the region, foreign investor, etc.); |
|---|--|

B.2.2. Profil Responden

- Responden berdasarkan status di perusahaan : terdiri dari 3.224 orang (58,5%) pemilik usaha, dan 2.286 (41,5%) pengelola usaha (level manager).
- Responden berdasarkan skala usaha (jumlah tenaga kerja) : 3.644 (76,3%) merupakan perusahaan kecil dengan pegawai kurang dari 20 orang, 897 (17,5%) perusahaan menengah dengan karyawan 20 s/d 100

B.2.2. Profile of Respondents

- Based on the position in the company: 3,224 of business owner (58.5%) and 2,286 of managers (41.4%)
- Based on size of man power: 3,644 (76.3%) of small enterprises with employees less than 20 people, 897 (17.5%) of medium enterprises with 20-100 employees, 319 (6.2%) of big enterprises employing more

orang, dan 319 (6,2%) perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, sementara 280 (5,4%) tidak menjawab.

- Responden berdasarkan asal investor : 3.778 (73,5%) merupakan perusahaan lokal (dari daerah setempat), 376 (7,3%) perusahaan swasta dari luar daerah, 134 (2,6%) BUMN/ BUMD, dan 90 (1,8%) PMA, sementara 762 (14,8%) tidak menjawab.
- Responden berdasarkan bidang usaha : 1.005 (19,6%) Manufaktur, 60 (1,2%) Pertambangan, 76 (1,5%) Perkebunan, 3.371 (65,6%) Perdagangan dan Jasa, 230 (4,5%) Pertanian Pangan, 35 (0,7%) Kehutanan, 75 (1,5%) Perikanan, 226 (4,4%) bidang usaha lainnya.
- Responden berdasarkan Status Badan Hukum Usaha : 1.621 (31,5%) tidak Berbadan Hukum, 3.493 (68%) Berbadan Hukum.

than 100 people; whereas 280 respondents (5.4%) did not answer.

- Based on where the investor come from: 3,778 (73.5%) of local companies, 376 (7.3%) of private companies coming from other districts/municipalities, 134 (2.6%) of local government owned companies and state owned companies.
- Based on business sector: 1,005 (19.6%) Manufacture, 60 (1.2%) Mining, 76 (1.5%) Plantation, 3,371 (65.6%) Trade and Services, 230 (4.5%) Food-agriculture, 35 (0.7%) Forestry, 75 (1.5%) Fishery, and 226 (4.4%) Others.
- Based on legal status: 3,493 (68%) respondents have legal status, and 1,621 (31.5%) respondents have no legal status.

B.3. Pengolahan Data dan Analisis Data

B.3. Data Processing and Analysis

B.3.1. Pembobotan Faktor, Variabel, dan Indikator

B.3.1. Weighing of Factors, Variables and Indicators

Penentuan bobot faktor, variabel, dan indikator yang telah ditentukan untuk pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/ Kota dilakukan dengan metode AHP (*The Analytic Hierarchy Proccess*) dengan bantuan perangkat lunak yang disebut '*Expert Choice*'.

The weight of factors, variables and indicators used in ranking the investment attractiveness of Regency/City were determined through AHP (The Analytical Hierarchy Process) with the help of a software program called '*Expert Choice*'.

AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarkhi fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarkhi; memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Atau dengan kata lain, prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan daya tarik investasi suatu daerah.

AHP is an instrument that aides people in making decision. The main tool of this instrument is a functional hierarchy with human perception as its main input. Basically, AHP is a method used to simplify a complex and unstructured problem, dividing said problem into smaller organized groups of problems and arranging the groups in a hierarchy, assigning a numeric value as substitute for human perception for the purpose of relative comparison, and finally through a synthetical process the highest priority can be determined. Or in other word, the underlying principle in AHP is giving a weight to every factor, variable and indicator in comparison with other factors, variables and indicators. The higher the weight of an indicator the more important it is compared to other indicator in determining investment attractiveness of a region.

Pembobotan dengan model AHP untuk faktor, variabel, dan indikator ditentukan melalui dua tahap, yaitu :

- Pertama pembobotan terhadap faktor, variabel dan indikator, pemeringkatan oleh 42 orang responden pengusaha daerah yang berasal dari 20 daerah penelitian lapangan (tahun 2002) dengan menggunakan kuesioner AHP. Hasil pembobotan 40 responden ini diolah dengan rata-rata geometris sehingga menghasilkan suatu '*bobot pengusaha daerah*'. Selain dilakukan oleh para pelaku usaha di daerah, pembobotan terhadap faktor, variabel, dan indikator pemeringkatan juga dilakukan oleh 8 orang pengusaha nasional dan 3 orang pengamat ekonomi. Hasil pembobotan oleh para pengusaha nasional, dan pengamat ekonomi, tersebut juga diolah dengan rata-rata geometris sehingga menghasilkan '*bobot pengusaha nasional, dan pengamat ekonomi*'.
- Tahap selanjutnya adalah dilakukan rata-rata geometris atas '*bobot pengusaha daerah*' dan '*bobot pengusaha nasional, dan pengamat ekonomi*' untuk menghasilkan bobot akhir faktor, variabel, dan indikator pemeringkatan.

B.3.2. Klasifikasi Intensitas Tiap Indikator

Sebelum diolah dengan '*expert choice*', setiap indikator baik yang berasal dari data primer maupun sekunder diklasifikasikan untuk memperoleh intensitas masing-masing.

- Data-data primer yang diperoleh dari kuesioner persepsi responden dari 200 daerah diolah dengan bantuan SPSS atau Exel sehingga diperoleh tabulasi yang menunjukkan intensitas tiap-tiap indikator pemeringkatan. Intensitas tersebut berupa skala *likert* 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan ukuran dari kondisi yang paling buruk sampai kondisi yang paling baik.
- Indikator-indikator kuantitatif berupa data sekunder (*existing statistik data*), masing-masing juga diklasifikasikan dengan menggunakan '*metode rata-rata*' dan '*metode distribusi*' sehingga diperoleh intensitasnya ke dalam skala *likert* yang sama.

Through AHP model, the weight of factors, variables and indicators was determined following these two stages:

- 42 regional respondents (businessmen) from 20 regional field research areas were asked to rank the factor, variable and indicator using AHP questionnaire. The result of this weighing is then processed with geometrical average to produce a "local businessmen weight". In addition to the above respondents, the 7 national businessmen and 3 economic analysts were requested to rank the factor, variable and indicator. The ranking done by national businessmen and economic analysts was further processed through geometrical average producing a "national businessman and economic analyst weight"
- The next step done is calculating the geometrical average for the "local businessmen weight" and "national businessmen and economic analyst weight" to produce final weight of factors, variables and indicators for ranking purpose.

B. 3. 2. Classification of Intensity for Each Indicator

Before an indicator is processed with 'Expert Choice', every indicator either from primary or secondary data was classified to determine its intensity.

- Primary data collected through the questionnaire for respondents' perception of 200 areas were then processed using SPSS or Exel for tabulation showing the intensity of each indicator. The intensity was determined using the likert scale of 1-5, one as the worst condition and five as the best condition.
- The quantitative indicator in the form of secondary data (existing statistical data) was also classified using "average method" and "distribution method" to get the intensity to be put in the same likert scale.

B.3.3. Penentuan Nilai Intensitas Tiap Indikator dan Peringkat

Intensitas masing-masing indikator kemudian dimasukkan ke dalam *data base* perangkat lunak '*expert choice*' berdasar hirarki dan bobot pemeringkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Olahan perangkat lunak tersebut menghasilkan nilai masing-masing indikator yang secara kumulatif membentuk urutan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah diantara 200 daerah pemeringkatan. Metode penghitungan intensitas tiap-tiap Indikator dijelaskan pada *Lampiran 4.2. Metode Klasifikasi Intensitas Indikator Pemeringkatan*.

B. 3.3. Determination of Intensity Weight of Each Indicator and Rank

The intensity of every indicator was then used as input in the database of 'Expert Choice' software following the previous hierarchy and ranking weight. The processing of the software results in the weight of each indicator, cumulatively forming the hierarchy of weight from the highest to the lowest for 134 ranking areas. Enclosed is the procedure in calculation of the rank based on calculation principles in 'Expert Choice' software. **(See Appendix 4.2. Classification Methode of Intensity of the Rating Indicator)**

IV. PEMAPARAN HASIL PENELITIAN

Research Findings

Survei ini dilakukan terhadap 200 Kabupaten / Kota (156 kabupaten dan 54 Kota) yang tersebar di 28 Propinsi yang ada di Indonesia. Survei dilakukan dalam kurun waktu Agustus 2003 sampai dengan pertengahan November 2003. Dalam penelitian tentang Pemeringkatan Daya Tarik Invesatasi Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2003 ini, selain peringkat daya tarik investasi daerah, juga ditemukan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha di Indonesia pada era otonomi daerah. Persoalan-persoalan tersebut dapat mempengaruhi kinerja dunia usaha secara keseluruhan, dan daya tarik tiap-tiap daerah, bahkan Indonesia secara keseluruhan terhadap investasi. Berikut ini pemaparan temuan-temuan penelitian ini.

A. Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah

Hasil pemeringkatan daya tarik investasi 200 Kabupaten/Kota (156 Kabupaten dan 54 Kota) disajikan berdasarkan peringkat secara umum dan berdasarkan peringkat masing-masing faktor (5 faktor). Penyajian seperti ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran lengkap terhadap hasil akhir secara total, serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah. Dalam pemeringkatan daya tarik investasi daerah untuk tahun 2003 dipisahkan antara peringkat kabupaten dan peringkat kota, karena pada dasarnya antara kabupaten dan kota mempunyai perbedaan karakteristik secara spesifik. Dalam pembahasan lamporan penelitian ini hanya ditampilkan hasil pemeringkatan kabupaten maupun kota yang menempati peringkat teratas dan terbawah (10 kabupaten dan 5 kota yang menempati peringkat teratas dan terbawah berdasarkan peringkat

This survey, which consists of 5,140 interviews with business operators, was conducted from August 2003 to November 2003 and covers 200 administrative areas (156 districts and 54 municipalities) in 28 provinces in Indonesia. Entitled "Investment Attractiveness Ratings of Districts and Municipalities in Indonesia in 2003," the study not only offers rankings of regions based on their levels of investment attractiveness, but also presents some of the problems business operators in Indonesia encounter in the era of regional autonomy. These factors influence the overall performance of the business community and the relative attractiveness of each region, and of Indonesia as a whole, to investors. Below is a description of the findings of this survey.

A. Rating Result

Each set of results for the investment attractiveness rating of 200 districts and municipalities is presented in two parts: a general rating, and a rating for each of five factors. This presentation is intended to give a complete picture of the final result, as well as to pinpoint the strengths and weaknesses of each region. Districts and municipalities are discussed separately, since each of these administrative area types has its own distinct characteristics. The discussion of research findings, however, focuses on the rating results for districts and municipalities that fall in the highest and lowest positions (the top and bottom ten districts and the top and bottom five municipalities), and their respective general ratings and ratings per factor. A detailed breakdown of the ratings of districts and municipalities in general, and by factor, variable

umum dan per faktor). Peringkat Kabupaten dan Peringkat Kota secara keseluruhan - berdasarkan peringkat umum maupun per faktor - ditampilkan pada bagian lampiran laporan (Lampiran 1. Hasil Pemeringkatan).

A.1. Peringkat Daerah Secara Umum (Berdasarkan Nilai Total)

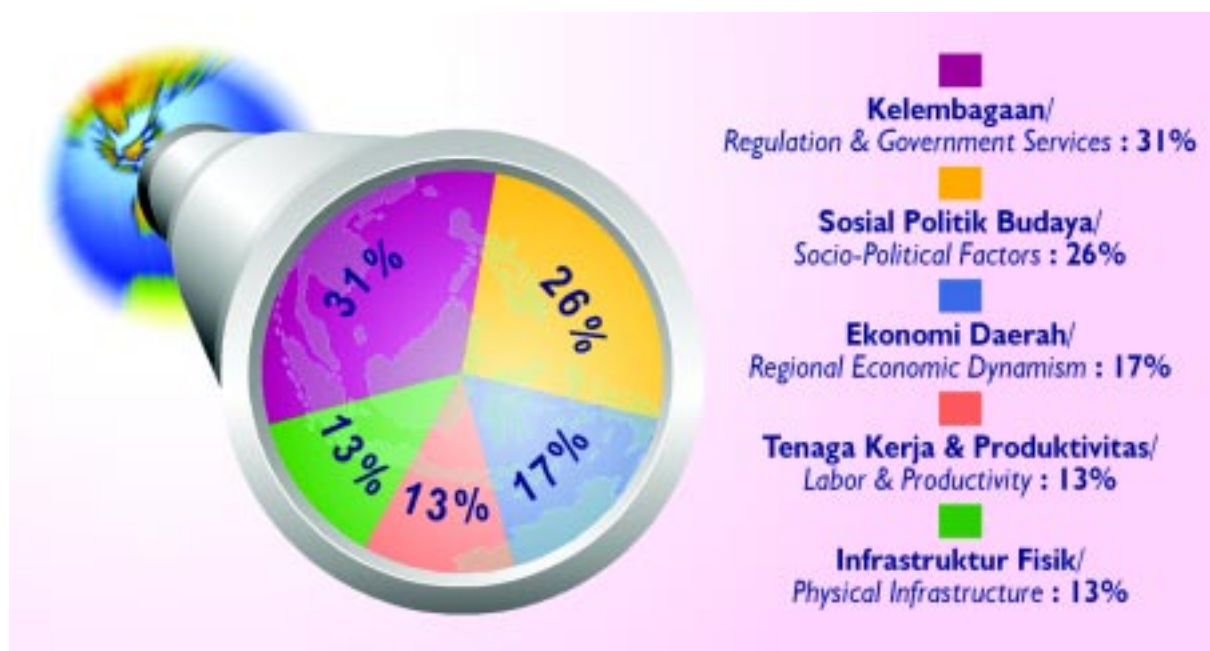
Peringkat daya tarik investasi daerah secara umum diperoleh dari akumulasi seluruh faktor pemeringkatan (5 Faktor, 14 Variabel, dan 42 Indikator). Dari 5 faktor pembentuk daya tarik investasi daerah, faktor Kelembagaan mempunyai bobot paling besar yakni sebesar 31%, disusul faktor Sosial Politik sebesar 26%, faktor Ekonomi Daerah 17%, dan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas dan faktor Infrastruktur Fisik masing-masing sebesar 13% (Lihat Diagram 2. Bobot Faktor Pemeringkatan). Melihat struktur bobot masing-masing faktor pembentuk daya tarik investasi daerah tersebut tampak bahwa kondisi Kelembagaan dan Sosial Politik suatu daerah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investasinya (peringkatnya).

and indicator are shown in the attachments.

A.1. General Ranking of Regions

The general ranking of regions according to their investment attractiveness is obtained by accumulating all the rating factors (5 factors, 14 variables and 42 indicators). Of the five factors that shape the attractiveness of regions towards investment, the most important are the Regulation & Government Service factor, which has a weighting of 31%, and the Socio-Political factor, with 26%. Regional Economic Dynamism accounts for 17% of the general rating, while Labor & Productivity and Physical Infrastructure make up 13% each (see diagram 2. Weight of Rating Factors)

Diagram/Figure 2.
Bobot Faktor Pemeringkat/Weight of Rating Factors



A.1.1. Peringkat Kabupaten Secara Umum

Dari 156 Kabupaten yang diperingkat diperoleh 146 peringkat daya tarik investasi daerah berdasarkan kategori umum, artinya ada beberapa daerah yang menempati peringkat yang sama (Lihat Lampiran 1.1.1. Peringkat Daya Tarik Investasi 156 Kabupaten di Indonesia dan Lampiran 1.1.2. Neraca

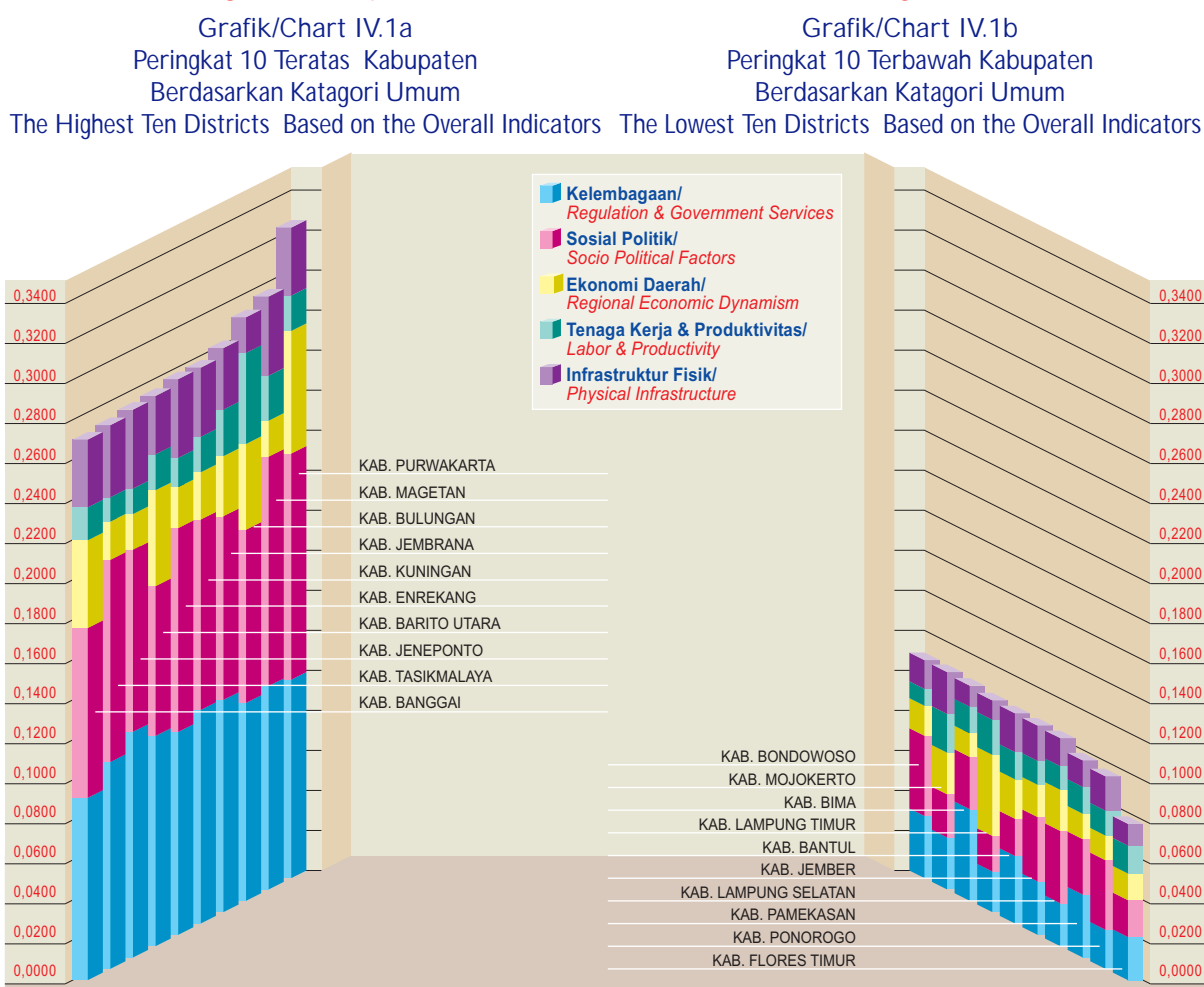
A.1.1. General Ranking of District

The 156 rated districts form 146 ranks under the general rating on investment attractiveness of regions, i.e. there are some instances where two or more regions occupy the same rank (see appendix 1.1.1. Ranking of Investment Attractiveness of 156 Districts, and appendix. 1.1.2. Strength and

Peringkat Faktor & Variabel Daya Tarik Investasi 156 Kabupaten di Indonesia). Grafik IV.1. memperlihatkan 10 Kabupaten yang berhasil menempati peringkat atas, dan 10 Kabupaten yang menempati peringkat bawah berdasarkan kategori umum. Dari 10 kabupaten yang menempati peringkat 10 teratas secara umum, 4 diantaranya merupakan daerah baru yang pada pemeringkatan tahun 2002 belum diperingkat, yakni : Kab. Purwakarta, Kab. Bulungan, Kab. Enrekang dan Kab. Jenepono. Peringkat pertama diduduki oleh Kab. Purwakarta yang baru pertama kali ikut rating, disusul oleh Kab. Magetan peringkat ke-2, Kab. Bulungan ke-3, Kab. Jembrana ke-4, Kab. Kuningan ke-5 dan Kab. Enrekang ke-6, dan seterusnya.

Weaknesses of 156 Districts by Factors and Variables). Graph IV.1. shows the ten districts that fill the top slots, and the ten districts at the bottom of the table. Four of the ten leading districts in the general category (Purwakarta, Bulungan, Enrekang and Jenepono) are new entrants, meaning that they were not included in the 2002 rating. The top position is held by Purwakarta (with a score of 0.3273), followed, in descending order, by Magetan (0.2983), Bulungan (0.2936) and Jembrana (0.2838), and Enrekang and Kuningan in joint fifth place with 0.2797.

Grafik/Chart IV.1 Peringkat Kabupaten Secara Umum/General Ranking of District



Walupun secara umum Kab. Purwakarta menduduki peringkat pertama, namun jika dilihat per faktor, dari kelima faktor pembentuk daya tarik investasi tidak satupun yang berada pada peringkat pertama dari 156 kabupaten yang diperingkat. Kab. Purwakarta berada pada

Even though Purwakarta District comes out on top in the general rating, it failed to gain that position in any of the five factors. Purwakarta leads the ranking thanks to its good ratings –number 14, two and three, respectively – in the three factors that carry the heaviest weightings. Its scores in

peringkat teratas karena secara rata-rata kelima faktor pemeringkatan yang dimilikinya termasuk dalam kategori baik - masuk dalam peringkat 20 ke atas - kecuali untuk faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas yang menempati peringkat ke 70. Dari kelima faktor tersebut hanya Faktor Ekonomi Daerah Kab. Purwakarta yang lebih baik dibandingkan 9 daerah lain di peringkat atas, sementara empat faktor lainnya masih kalah dibandingkan dengan 9 daerah lainnya. Terhadap Kab. Magetan yang berada di peringkat ke-2 secara umum, Kab. Purwakarta hanya unggul pada faktor ekonomi daerah, sementara empat faktor lainnya kalah. Pada Faktor Kelembagaan, Kab. Purwakarta masih berada di bawah 8 daerah lainnya (Kab. Magetan, Kab. Jember, Kab. Kuningan dan Enrekang, Kab. Jember, Kab. Jember, Kab. Jember), dan hanya lebih baik dari Kab. Bulungan dan Kab. Banggai. Untuk faktor Sosial Politik Kab. Purwakarta berada pada posisi ke-2 di bawah Kab. Magetan. Tampaknya Kab. Purwakarta perlu memperhatikan masalah ketenagakerjaan, karena untuk faktor ini Purwakarta termasuk pada peringkat bawah (ke-70 dari 117 peringkat untuk faktor ini). Rendahnya peringkat Purwakarta untuk faktor ini disebabkan terutama oleh variabel biaya tenaga kerja yang dinilai kurang kompetitif. Namun untuk ketersediaan dan produktivitas tenaga kerja dinilai baik yakni berada pada peringkat ke-17.

Kabupaten-kabupaten yang menempati peringkat 10 terbawah karena rata-rata kelima faktor daya tarik investasi yang mereka miliki tidak baik, terutama untuk faktor kelembagaan dan sosial politik (keamanan) yang mempunyai bobot besar. Namun jika dilihat lebih dalam, beberapa daerah di peringkat bawah ini masih mempunyai keunggulan di beberapa variabel. Kab. Bondowoso yang secara umum menempati peringkat ke 139 (dari 148 peringkat), untuk variabel sosial politik (konflik sosial, unjuk rasa, dsb) berada pada peringkat ke-1, dan untuk variabel struktur ekonomi pada peringkat ke-5 dari 25 peringkat untuk variabel ini. Kab. Lampung Selatan yang menempati peringkat 145 secara umum, untuk variabel struktur ekonomi berada pada peringkat ke-4. Kab. Ponorogo dan Kab. Pamekasan, untuk variabel sosial politik masing-masing menempati peringkat ke-10 dan ke-20. Kab. Flores Timur yang tahun ini berada pada peringkat terbawah (148), karena secara rata-rata kelima faktor pemeringkatan yang dimilikinya tidak baik. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Kab. Flores Timur adalah pada faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, yaitu untuk variabel biaya tenaga

the other two factors are less impressive, however: it ranks 26th for Physical Infrastructure and 70th for Labor & Productivity. Of the five factors, Regional Economic Dynamism is the only one where this district is able to rate well above the other ten regions that occupy the top ten ranks. For example, when compared with Magetan District, which is in second place overall, Purwakarta prevails only for the Regional Economic Dynamism factor, while for the other four it gets a lower rating. For Regulation & Government Service, Purwakarta ranks below eight of the other regions in the overall top ten, i.e. Jember, Sawahlunto, Sijunjung, Enrekang, Jember, Barito Utara, Tasikmalaya, Magetan and Kuningan Districts, and outshines only Bulungan and Banggai. For the Socio-Political factor, Purwakarta is in second position below Magetan. Purwakarta evidently needs to pay more attention to labor issues, since this is its lowest-ranking factor (70th out of 117 for Labor & Productivity). Its low rank in this factor is caused mainly by labor cost variable considered less competitive. Nevertheless for labor availability and productivity factor the region was rated well placing her to the 17th spot.

The districts that occupy the ten lowest places in the general ranking tend to have poor ratings for all five-investment attractiveness factors, and in particular for the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, which have heavy weightings. However, it is worth noting that some of these regions do score well for selected variables. Bondowoso District, which is in the 137th spot (out of 146) in the general rating, leads the field for the Socio-Political variable (which consists of the Political Stability, Social Conflict, Strikes and Public Participation indicators) that forms part of the Socio-Political factor, and takes fifth place out of 25 for the Economic Structure variable (part of the Regional Economic Dynamism factor). Lampung Selatan District, which places at number 143 in the general rating, ranks fourth for the Economic Structure variable. Meanwhile, Ponorogo and Pamekasan occupy tenth and 20th place, respectively, for the Socio-Political variable. Flores Timur is the lowest-ranked (146th) district, owing to its poor overall scores in all five factors. One of Flores Timur's strengths is, however, its low labor cost; the Labor Cost variable therefore gains it high marks, placing

kerja yang dinilai cukup murah, dan untuk variabel ini Flores Timur menduduki peringkat ke-4 dari 17 peringkat.

Daerah-daerah yang berada pada peringkat bawah ini dapat menaikkan daya tarik investasinya dengan perbaikan-perbaikan untuk variabel-variabel dan indikator-indikator yang oleh para pelaku usaha diberi bobot baik, yakni terutama pada variabel yang bersifat *policy*. Dengan perbaikan kinerja pelayanan aparatur pemerintah, perbaikan kondisi sosial politik, keamanan, kepastian hukum, dan sebagainya daerah-daerah ini akan dapat meningkatkan daya tariknya terhadap investasi.

A.1.2. Peringkat Kota Secara Umum

Kota Batam Propinsi Riau menempati peringkat pertama secara umum dari 44 Kota yang diperingkat dengan perolehan total score 0,2805 dari score seluruh faktor, variabel, dan indikator yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan. Score ini berbeda cukup jauh dengan peringkat kedua kategori ini yang diraih Kota Cirebon (0.2684) dan peringkat ketiga Kota Kediri (0.2641). Perolehan score Kota Batam tersebut tidak mengherankan karena Batam ada pada peringkat lima tertinggi di 3 (tiga) faktor yaitu faktor Ekonomi Daerah (4) Sosial Politik (3), dan Infrastruktur Fisik (5); sedangkan di faktor Tenaga Kerja & Produktivitas di peringkat 6 (enam) serta peringkat 9 (sembilan) di faktor Kelembagaan.

Peringkat pertama Kota Batam tersebut cukup jauh meninggalkan peringkat kedua Kota Cirebon yang hanya menempati posisi 5 (lima) peringkat teratas di 2 (dua) faktor yaitu faktor Ekonomi Daerah (1) dan Tenaga Kerja & Produktivitas (2). Demikian juga, peringkat ketiga yang didapat Kota Kediri tertinggal dari Kota Batam karena hanya menempati posisi peringkat 5 (lima) teratas di 3 (tiga) faktor yaitu faktor Sosial Politik (5), Ekonomi Daerah (5) dan Tenaga Kerja & Produktivitas (1).

Kalau dilihat sepiantas, dimana Kota Kediri yang ada di posisi peringkat 5 (lima) teratas dari 3 (tiga) faktor dan Kota Cirebon yang ada di posisi peringkat 5 (lima) teratas hanya dari 2 (dua) faktor, mestinya Kota Kediri yang berada di peringkat kedua. Namun hal lain yang mesti diperhatikan adalah bobot masing-masing faktor pemeringkatan tersebut yang memberi bobot besar pada faktor kelembagaan (31%), dimana Kota Cirebon pada faktor Kelembagaan ini menduduki peringkat 15 (score 0.0536) sementara Kota Kediri ada di posisi 22 (score 0.0487). Perbedaan score

the region in the fourth rank out of 17.

The regions with the lowest scores can increase their investment attractiveness by improving the variables and indicators that are given large weightings by business players – these are mainly related to policymaking. By improving the performance of the government apparatus, as well as the socio-political climate, security, legal certainty and other conditions, the administrations of these regions can help ensure that they become more attractive to investors.

A.1.2. General Ranking of Municipalities

The 44 municipalities in the survey form 43 ranks in the general rating, as two municipalities share the number 17 position. Batam Municipality in Riau Province takes first place, with a total score of 0.2805. Cirebon is the number two-ranked municipality, with a score of 0.2684 and Kediri is the number three, with 0.2641. It is not surprising to see Batam at the head of the list, given that it ranks in the top five for three factors, namely Socio-Political (third), Regional Economic Dynamism (fourth) and Physical Infrastructure (fifth), and has the sixth highest score for Labor & Productivity and the ninth for the Regulation & Government Service factor.

Cirebon Municipality is in the top five for just two factors; however, it gets very high scores for those factors, namely Regional Economic Dynamism (first place) and Labor & Productivity (second). Kediri, which is in the third spot, ranks in the top five in three factors: Socio-Political (fifth), Regional Economic Dynamism (fifth) and Labor & Productivity (first).

With top-five ratings in three categories, it might, at first glance, appear that Kediri should be placed second overall, rather than Cirebon. However, it is important to remember that the five factors are given different weightings. For the Regulation & Government Service factor, which has the highest weighting (31%), Cirebon ranks 15th (with a score of 0.0536) while Kediri is in 22nd place (with 0.0487). The difference between these scores, and also between scores gained for some other indicators, (details can be seen in the attachment) puts Cirebon in a better position than Kediri.

tersebut, dan juga pada beberapa indikator lainnya (lihat score lengkap pada lampiran), menyebabkan posisi Kota Cirebon lebih baik dari Kota Kediri.

Bila kita lihat score tiap faktor untuk Kota Cilegon (peringkat 4) dan Kota Sawahlunto (peringkat 5), kedua kota ini mempunyai peluang untuk mencapai peringkat yang lebih baik karena pada faktor kelembagaan yang mempunyai bobot terbesar, keduanya lebih baik dibandingkan kota-kota peringkat I, II, dan III. Namun karena score faktor-faktor lainnya kurang mendukung, maka kedua kota tersebut harus puas di peringkat 4 (empat) dan 5 (lima); Kota Cilegon faktor Sosial Politik yang berada di peringkat kedua dari bawah (39) sangat tidak mendukung perolehan score total, begitu juga dengan Kota Sawahlunto yang hanya mendapat score rata-rata menengah untuk 3 (tiga) faktor yaitu Infrastruktur Fisik, Tenaga Kerja & Produktivitas, dan Ekonomi Daerah.

Cilegon Municipality (which is in fourth place) and Sawahlunto Municipality (fifth) both receive high scores for the Regulation & Government Service factor; in both cases, the scores are higher than those gained by the municipalities in the top three positions. Sawahlunto takes first place for the Socio-Political factor, but is held back the fact that its Regulation & Government Service factor ranking is lower than Cilegon's, and by its middling scores for the remaining three factors – Physical Infrastructure, Labor & Productivity and Regional Economic Dynamism – and ends up at number five in the general rating. Cilegon, meanwhile, is dragged down by its poor performance in the Socio-Political factor, for which it receives the second lowest ranking, and comes in at number four overall.

Grafik/Chart IV.2 Peringkat Kota Secara Umum/General Ranking of Municipalities

Grafik/Chart IV.2a
Peringkat 5 Teratas Kota
Berdasarkan Katagori Umum
The Highest Municipalities
Based on the Overall Indicators

Grafik/Chart IV.2b
Peringkat 5 Terbawah Kota
Berdasarkan Katagori Umum
The Lowest Five Municipalities
Based on the Overall Indicators



Dalam urutan 5 (lima) peringkat terbawah terdapat Kota Bekasi di peringkat paling bawah (peringkat 43 score 0,1366), kemudian disusul Kota

In the lowest five slots we find the municipalities of Bekasi (in 43rd and last place, with a score of 0.1366), Pekalongan (0.1426), Pangkal

Pekalongan (peringkat 42 score 0,1426), Kota Pangkal Pinang (peringkat 41 score 0,1442), Kota Bengkulu (peringkat 40 score 0,1521), dan Kota Sukabumi (peringkat 39 score 0,1524). Dibandingkan dengan score peringkat terbaik yaitu 0,2805 yang dicapai Kota Batam, peringkat 5 (lima) kota terendah sangat jauh perbedaan score-nya. Perbedaan score yang terlihat mencolok antara lima kota peringkat teratas dibandingkan dengan score lima kota peringkat terbawah secara merata terdapat pada faktor Tenaga Kerja & Produktivitas serta Infrastruktur Fisik. Sedangkan untuk faktor-faktor lainnya juga terdapat perbedaan signifikan, namun tingkat perbedaan antara kelompok lima kota teratas dan lima kota terbawah - diluar faktor Tenaga Kerja & Produktivitas dan Infrastruktur Fisik - sangat bervariasi. Misalnya untuk faktor Sosial Politik; Kota Pekalongan, Pangkal Pinang dan Bengkulu masih lebih baik score-nya bila dibandingkan peringkat keempat Kota Cilegon. Kota Pangkal Pinang untuk score faktor Ekonomi Daerah juga tidak kalah dengan Kota Gorontalo yang ada di peringkat 6 (enam) dengan score sama 0,0361. Dalam hal Kelembagaan, Kota Sukabumi, Pekalongan dan Bengkulu, walaupun kalah dibandingkan kelompok kota lima teratas, namun masih lebih baik dibandingkan Kota Surabaya yang ada di peringkat 12.

Untuk Kota Bekasi, tidak mengherankan bila berada di peringkat paling rendah karena untuk 3 (tiga) faktor yaitu faktor Kelembagaan, Sosial Politik, dan Tenaga Kerja & Produktivitas ada dalam kelompok 5 (lima) peringkat terendah. Karena besarnya bobot faktor Kelembagaan (31%) dan Sosial Politik (26%), score yang didapat dari indikator lainnya tidak membantu daerah ini untuk mendapat peringkat yang lebih baik. Dengan menelusuri asal muasal score total yang menempatkan posisi peringkat masing-masing kota, posisi peringkat tersebut menunjukkan kekuatan maupun kelemahan masing-masing kota yang berguna untuk fokus perbaikan. Peringkat 44 Kota Berdasarkan Score Total dapat dilihat pada Lampiran 1.2.1; Lampiran 1.2.2; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.2.

A.2. Faktor Kelembagaan

Peringkat daerah berdasarkan Faktor Kelembagaan diperoleh dari akumulasi score tiap indikator yang tergabung dalam faktor tersebut. Indikator-indikator dalam faktor Kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 4 variabel; yakni

Pinang (0.1442), Bengkulu (0.1521) and Sukabumi (0.1524). At 0.2805, the score achieved by Batam, which is the highest-ranked municipality, is more than twice as high as that given to Bekasi. However, a municipality's scores for each of the five factors do not necessarily correlate well with its overall rating. For example, for the Socio-Political factor, Pekalongan, Pangkal Pinang, Bengkulu and Sukabumi (all of which have very low overall ratings) boast better score than Cilegon, which receives the fourth-highest general rating. For the Regional Economic Dynamism factor, Pangkal Pinang gets the same score as Gorontalo (0.0361), which ranks sixth overall. Although Sukabumi, Pekalongan and Bengkulu receive lower marks than the top five municipalities for the Regulation & Government Service factor, these three municipalities do beat Surabaya, which comes in at number 12 in the general rating.

It is not surprising to see Bekasi Municipality occupy the lowest rank overall, given that its scores for three factors (Regulation & Government Service, Socio-Political and Labor & Productivity) are all in the bottom five. Because of the heavy weightings of the first two of these factors, this region is unable to use its relatively reasonable scores in the Regional Economic Dynamism and Physical Infrastructure factors to obtain a better ranking. By examining the scores achieved for each of the variables and indicators that make up the five factors for which the municipalities are rated, we can pinpoint the individual strengths and weaknesses of each region (see appendix 1.2.1. Ranking of Investment Attractiveness of 44 Municipalities, appendix 1.2.2. Strength and Weaknesses of 44 Municipalities by Factors and Variables, and appendix 4.6.2. Score of Factor, Variable and Indicator of 44 Municipalities). This information can, in turn, help the administrations of these regions to determine which areas to focus their efforts on.

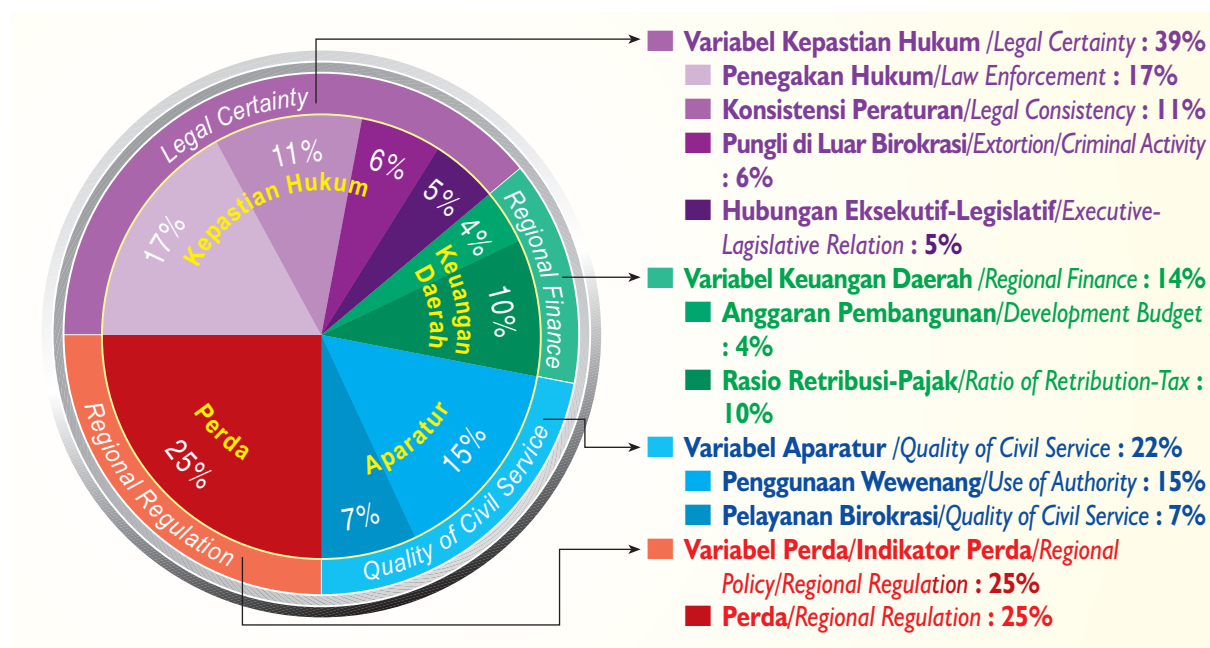
A.2. The Regulation & Government Service Factor

Rankings for the Regulation & Government Service factor are determined by the scores gained for each of the variables and indicators it comprises. This factor consists of four variables: Legal Certainty (which has a 39% weighting),

variabel Aparatur dan Pelayanan, variabel Kepastian Hukum, variabel Keuangan Daerah, dan variabel Peraturan Daerah (Perda). Dari keempat variabel tersebut variabel Kepastian Hukum mempunyai bobot yang paling besar yakni 39%, disusul variabel Perda 25%, Aparatur dan Pelayanan 22%, dan terakhir variabel Keuangan Daerah sebesar 14%. Bila dilihat lebih dalam ke tiap-tiap indikator, bobot terbesar adalah indikator Perda (yang juga merupakan variabel) yakni sebesar 25%, diikuti oleh indikator Penegakan Hukum sebesar 17%, dan Pelayanan Birokrasi sebesar 10% (*Lihat Diagram 3. Bobot Indikator Faktor Kelembagaan*). Terlihat bahwa indikator Perda dan indikator Penegakan Hukum di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap peringkat daerah berdasarkan faktor Kelembagaan ini.

Regional Regulation (25%), Quality of Civil Service (22%) and Regional Finance (14%). The four variables are made up of a total of nine indicators, of which Local Regulation (which is also a variable) is the most significant, accounting for 25% of the score for this factor. The Law Enforcement indicator is also important, with 17% of the factor, while Quality of Civil Service represents 15% (see diagram 3: Weight of Indicators and Variables in the Regulation & Government Service factor).

Diagram/Figure 3.
Faktor Kelembagaan/ Regulation & Government Service



A.2.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan

Peringkat Daya Tarik Investasi Berdasarkan Faktor Kelembagaan diperoleh dari total score 4 variabel dan 9 indikator dalam faktor kelembagaan ini. Dari 156 Kabupaten yang diperingkat, untuk faktor kelembagaan menghasilkan 138 peringkat, artinya ada beberapa daerah yang menempati peringkat yang sama. Bobot faktor Kelembagaan yang besar (31%) sangat berpengaruh terhadap peringkat daerah secara umum. Hal ini terbukti dari 10 daerah yang menempati peringkat teratas pada faktor Kelembagaan, untuk peringkat secara

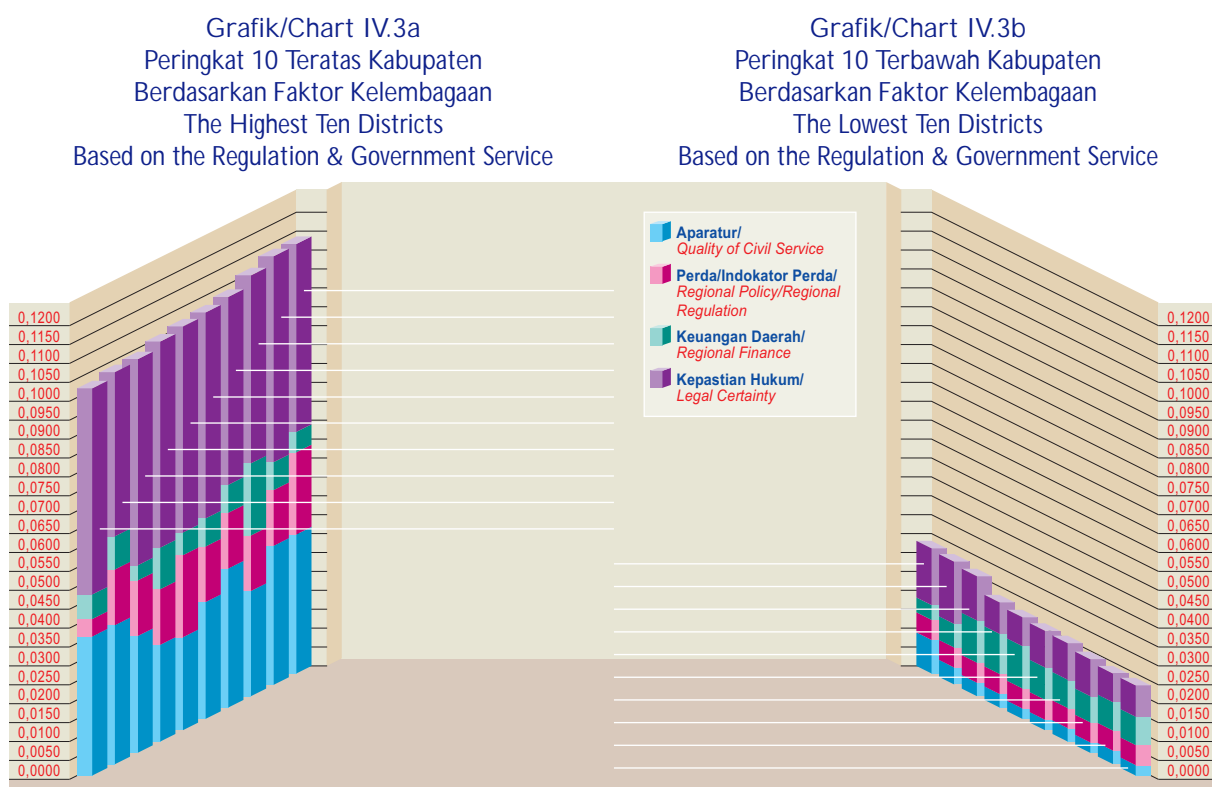
A.2.1. Ranking of District Based on The Regulation & Government Service Factor

For the Regulation & Government Service factor, the 156 rated districts are arranged in 138 ranks, meaning that in some instances, a single rank is held by more than one region. This factor's heavy weighting (31%) means that it is the single most important determinant of the general ranking of regions. This is borne out by the fact that the ten regions with the highest ratings for the Regulation & Government Service factor are also among the top 25 regions in the general rating. For this factor, Jeneponto District heads the rating

umum juga berada pada kelompok atas yakni termasuk dalam 25 besar teratas. Untuk faktor Kelembagaan Kab. Jeneponto berhasil menduduki peringkat pertama, disusul Kab. Sawahlunto, Cianjur, Enrekang, Jembrana, Barito Utara, Tasikmalaya, Tanjung Jabung Timur, dan Magetan (Grafik.IV.3). Sepuluh daerah di atas berhasil menempati peringkat 10 teratas untuk faktor kelembagaan, karena secara rata-rata indikator-indikator pembentuk faktor ini dinilai baik oleh para pelaku usaha yang ada di daerah yang bersangkutan.

list, followed by Sawahlunto Sijunjung, Cianjur, Pelalawan, Enrekang, Jembrana, Barito Utara, Tasikmalaya, Tanjung Jabung Timur and Magetan (Graph V.3). In other words, business operators in these ten districts have a relatively favorable view of the indicators that constitute the Regulation & Government Service factor.

Grafik/Chart IV.3
Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan/
Rating of Districts Based on Region Regulation & Government Services



Ke-10 daerah yang menempati peringkat atas untuk faktor Kelembagaan, tidak secara otomatis setiap indikatornya baik. Kab. Jeneponto yang menempati peringkat pertama untuk kategori ini memiliki kelemahan pada variabel Keuangan Daerah. Dilihat dari struktur APBD, Kab. Jeneponto dan Kab. Tasikmalaya (ke-9), memperlihatkan potensi permasalahan di masa yang akan datang. Untuk indikator struktur pungutan daerah dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan fisik, kedua daerah ini mempunyai nilai kurang. Dari indikator rasio retribusi terhadap pajak - untuk melihat struktur pungutan daerah - terlihat ada indikasi bahwa struktur pungutan daerah tidak

Nevertheless, these ten regions do not manage to score well in every indicator. Jeneponto District, which takes first place in this category, has a weak Regional Finance variable. This indicates that Jeneponto, along with Tasikmalaya (which is in eighth position, and also gets a poor score for this variable), could encounter problems with the regional budget (APBD) in the future. These two districts receive low ratings for both the User Charges-Tax Ratio indicator and the Development Budget-Regional Budget Ratio indicator.

Across the country, the business operators who took part in the survey said that they prefer to make payments to their respective local administrations in

jelas dengan banyaknya pungutan retribusi dibandingkan pajak daerah. Selanjutnya dari rasio anggaran pembangunan terhadap APBD, tampaknya komitmen pemerintah daerah Kab. Jeneponto dan Tasikmalaya, untuk pembangunan infrastruktur fisik masih kurang, yang terlihat dari sebagian besar APBD dianggarkan untuk kegiatan rutin. Hal ini berpotensi terjadi penyimpangan dan sulit dalam mengukur pertanggungjawabannya. Pada peringkat ke-3, Kab. Pelalawan harus lebih memperhatikan kinerja aparaturnya, karena para pelaku usaha di Kab. Pelalawan menilai bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemda masih cukup tinggi. Untuk itu pemda harus segera membenahinya, agar tidak mengganggu kinerja pelaku usaha, dan daya tarik investasi daerahnya.

Kabupaten-kabupaten yang menempati peringkat terbawah untuk faktor Kelembagaan disebabkan nilai-nilai indikator untuk faktor Kelembagaan secara rata-rata rendah. Rendahnya peringkat untuk faktor Kelembagaan ini berdampak langsung terhadap peringkat secara umum daerah-daerah yang bersangkutan. Kesepuluh daerah yang menempati peringkat terbawah untuk faktor Kelembagaan ini, secara umum juga berada pada peringkat bawah. Kab. Ponorogo yang menempati peringkat terendah, hampir semua indikator kelembagaannya juga rendah. Peringkat terbawah yang diperoleh Kab. Ponorogo terutama disebabkan rendahnya indikator pelayanan birokrasi, penyalahgunaan wewenang, perda, konsistensi peraturan, dan penegakan hukum. Sementara Kab. Lampung Timur memperoleh nilai terendah untuk indikator komitmen pemda dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik. Dampak dari rendahnya komitmen Pemda Lampung Timur terhadap pembangunan infrastruktur fisik, tercermin dari penilaian para pelaku usaha di sana yang menilai infrastruktur fisik di Kab. Lampung Timur, baik dari segi ketersediaan maupun kualitasnya, dinilai kurang memadai. Peringkat 156 Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan dapat dilihat pada Lampiran 1.1.2; Lampiran 1.1.3; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.1.1.

A.2.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan

Kategori ini menghasilkan 42 peringkat dari 44 Kota karena terdapat kota yang sama di 2 (dua) peringkat masing-masing diisi 2 (dua) kota. Kota Mojokerto di Jawa Timur menempati peringkat teratas dengan score 0,0801 disusul Kota Tegal

the form of taxes, rather than as user charges and other levies that are not transparent. In both Jeneponto and Tasikmalaya, the low User Charges-Tax Ratio indicators show that user charges make up a larger share of these districts' revenues than do taxes, and thus that their local government revenue structures have poor transparency. Meanwhile, it appears that the local governments of Jeneponto and Tasikmalaya are poorly committed to physical infrastructure development, as can be seen from their low Development Budget-Regional Budget Ratio indicators. This also implies that deviation is likely, and that accountability could be difficult to measure.

Pelalawan District, which is in third place for the Regulation & Government Service factor, must pay more attention to the behavior of its government apparatus, since the business players in the area believe that it has a tendency to abuse its authority. Therefore, the Pelalawan administration must take immediate steps to eliminate these practices in order to avoid any erosion of the region's currently high level of attractiveness to both potential investors and existing business operators.

Just as the districts that score well on the Regulation and Government Service factor tend to also gain high general ratings, those that get low marks for this important factor are usually found at the lower end of the general ratings table. Ponorogo District, which occupies the lowest rank for this factor, gets particularly poor scores for the Quality of Civil Service, Use of Authority, Regional Regulation, Legal Consistency and Law Enforcement indicators. Lampung Timur, which is ranked number 136 out of 138, has the lowest value for the Development Budget-Regional Budget Ratio indicator. This district also gets a low score for its government's commitment to physical infrastructure development, as well as for the Physical Infrastructure variables for both availability and quality that make up the Physical Infrastructure factor. See appendix 1.1.3. Ranking of Investment Attractiveness of Regulation and Government Service Factor of 156 Districts, appendix 1.1.2. Strength and Weaknesses of 156 Districts by Factors and Variables, and appendix 4.6.1.1. Score of Factor, Variable and Indicator of Regulation and Government Service factor of 156 Districts).

A.2.2. Ranking of Municipalities Based on The Regulation & Government Service Factor

This category produces 42 ranks for 44 municipalities, since there are two instances where two municipalities share the same rank. Mojokerto Municipality in East Java ranks first with a score

(0,0731) dan Kota Bandung (0,0703). Score yang baik dalam variabel Aparatur & Pelayanan Birokrasi dan Kepastian Hukum menempatkan Mojokerto pada peringkat pertama kategori ini. Sayangnya untuk variabel Keuangan Daerah masih agak lemah, jauh dibawah Kota Cilegon yang menempati posisi kelima. Pelayanan Birokrasi terhadap aktivitas usaha yang dipersepsikan baik oleh para pelaku usaha dan kecilnya penyalahgunaan wewenang mengangkat score Mojokerto.

of 0.0801. While Mojokerto gets good scores for the Quality of Civil Service and Legal Certainty variables, its rating for the Regional Financial variable is far below that given to Cilegon, which is at number five for the Regulation & Government Service factor.

Grafik/Chart IV.4 Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan/ Rating of Municipalities Based on Region Regulation & Government Services

Grafik/Chart IV.3a
Peringkat 5 Teratas Kota
Berdasarkan Faktor Kelembagaan
The Highest Five Municipalities
Based on the Regulation & Government Service

Grafik/Chart IV.3b
Peringkat 5 Terbawah Kota
Berdasarkan Faktor Kelembagaan
The Lowest Five Municipalities
Based on the Regulation & Government Service



Sedangkan Kota Tegal dan Kota Bandung menempati posisi kedua dan ketiga terutama karena variabel (sekaligus sebagai indikator tunggal) Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap baik oleh para pelaku usaha di daerah tersebut, lebih baik daripada 3 (tiga) kota kota lain di kelompok peringkat lima teratas kategori Kelembagaan. Sayangnya Kota Tegal memiliki kelemahan pada variabel Keuangan Daerah karena struktur pungutan di daerah tersebut menunjukkan bahwa rasio retribusi terhadap pajak lebih besar dibanding daerah-daerah lain. Dalam hal ini, meskipun bukan merupakan suatu kemutlakan namun ada potensi Kota Tegal lemah struktur pungutan daerahnya karena pada umumnya pajak lebih jelas struktur pungutannya dibandingkan retribusi. Sedangkan Kota Bandung mempunyai kelemahan utama dalam variabel Aparatur dan Pelayanan yang dinilai kurang baik. Kota Tebing Tinggi memiliki peluang peringkat lebih baik di kategori ini karena score variabel Aparatur & Pelayanan Birokrasi sama dengan

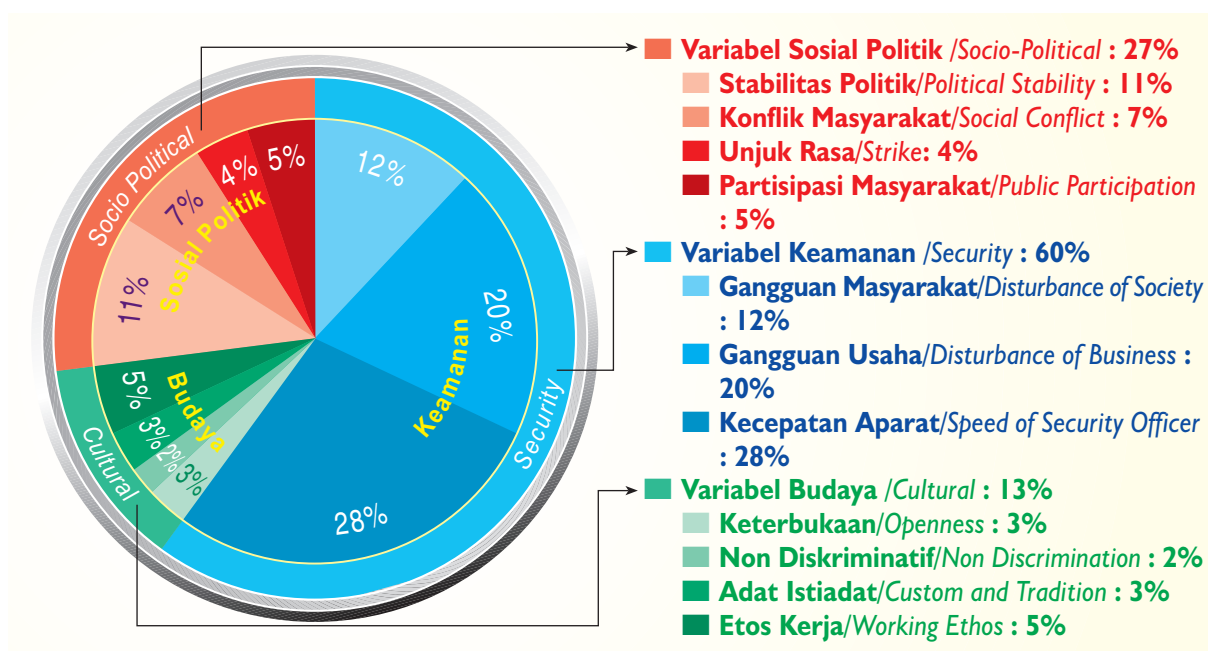
Tegal and Bandung are in second and third place with 0.0731 and 0.0703, respectively, mainly because they both get top-ranking scores for the Regional Regulation variable (which consists of a single indicator). Tegal, however, has a weak Regional Financial variable owing to its poor User Charges-Tax Ratio indicator. The low score for this indicator implies that the greater part of the municipality's revenue comes from user charges, which are often applied in an arbitrary manner and can be hard to trace. Bandung's rating is primarily checked by its poor showing for the Quality of Civil Service variable. In contrast, Tebing Tinggi Municipality does well in this variable, and gains the same score as the top-ranked Mojokerto. Its low value for the Regional Regulation variable pushes Tebing Tinggi down into fourth place, however.

peringkat terbaik Kota Mojokerto; namun karena tidak didukung score baik di variabel Perda menyebabkan posisinya ada di peringkat keempat.

Sementara itu, peringkat 5 (lima) kota terbawah diisi oleh Kota Mataram (peringkat 41 score 0,0279), Pangkal Pinang (peringkat 40 score 0,0293), Bekasi (peringkat 39 score 0,0325), Bitung (peringkat 38 score 0,0327), dan Samarinda (peringkat 37 score 0,0347). Kota Mataram berada di posisi terendah karena rendahnya score variabel Perda dan Aparatur & Pelayanan Birokrasi. Meskipun dalam hal Aparatur & Pelayanan Birokrasi, Kota Mataram masih lebih baik daripada Kota Bekasi, yaitu dua tingkat di atas Kota Mataram, namun Kota Bekasi jauh lebih unggul di faktor Perda dibandingkan Kota Mataram. Peringkat 44 Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan dapat dilihat pada Lampiran 1.2.2; Lampiran 1.2.3; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.2.1.

The five lowest ranks are filled by Mataram (ranked number 42, with a score of 0.0279), Pangkal Pinang (0.0293), Bekasi (0.0325), Bitung (0.0327) and Samarinda (0.0347). Mataram's low scores in the Regional Regulation and Quality of Civil Service variables put it at the bottom of the list for this factor. Nonetheless, Mataram does manage to gain a better score for the Quality of Civil Service variable than Bekasi, which is ranked second for the Local Regulation variable. See appendix 1.2.3 Ranking of Investment Attractiveness of Regulation and Government Service Factor of 44 Municipalities, appendix 1.2.2. Strength and Weaknesses of 44 Municipalities by Factors and Variables, and appendix 4.6.2.1. Score of Factor, Variable and Indicator Regulation and Government Service factor of 44 Municipalities)

Diagram/Figure 4.
Faktor Sosial Politik/Socio-Political Factor



A.3. Faktor Sosial Politik

Terhadap peringkat secara umum faktor Sosial Politik memiliki bobot sebesar 26%, dengan demikian score faktor Sosial Politik cukup banyak berpengaruh terhadap peringkat daerah tersebut berdasarkan kategori umum. Peringkat Kabupaten berdasarkan Faktor Sosial Politik terbentuk dari akumulasi score 3 variabel (Keamanan, Sosial

A.3. The Socio-Political Factor

With a weighting of 26%, the Socio-Political factor also has a significant influence on the ranking of regions under the general category. The Socio-Political factor is an accumulation of scores in three variables (Security, Socio-Political, and Cultural), which in turn consist of 11 indicators. Of the three variables under this factor, Security has by far the

Politik, dan Budaya), yang terbagi lagi dalam 11 indikator. Dari 3 variabel pada faktor Sosial Politik ini, variabel Keamanan memiliki bobot terbesar yakni sebesar 60%, disusul oleh variabel Sosial Politik (27%), dan Budaya (13%) (Lihat Diagram 4. Bobot Indikator Faktor Sosial Politik). Melihat struktur bobot variabel dan indikator pada faktor Sosial Politik ini, dapat dipastikan bahwa peringkat Kabupaten berdasarkan faktor Sosial Politik sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan daerah yang bersangkutan.

A.3.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik

Berdasarkan faktor Sosial Politik, dari 156 kabupaten yang di peringkat diperoleh 122 peringkat, artinya ada beberapa daerah yang berada pada peringkat yang sama. 10 kabupaten berhasil menempati peringkat teratas berdasarkan faktor Sosial Politik, karena rata-rata nilai variabel Sosial Politik baik. Untuk peringkat kabupaten berdasarkan faktor Sosial Politik, peringkat pertama diraih oleh Kab. Magetan, disusul oleh Purwakarta ke-2, Kab. Belu ke-3, dan seterusnya hingga peringkat ke-122 adalah Kab. Deliserdang (Lampiran 1.1.4. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik). Dari 10 Kabupaten yang menempati peringkat 10 teratas, secara umum masih berada pada peringkat yang cukup baik yakni minimal berada pada peringkat ke-41 untuk kategori umum, yaitu Kab. Tegal (Grafik IV.5).

Kab. Magetan berhasil menduduki peringkat pertama untuk kategori ini, karena untuk variabel keamanan dan variabel budaya juga berada pada peringkat pertama, sementara untuk variabel Sosial Politik juga masih termasuk baik yakni berada pada peringkat ke-12 dari 63 peringkat untuk variabel Sosial Politik. Kab. Purwakarta berada di peringkat ke-2, karena untuk variabel budaya berada di peringkat ke-3, lebih rendah dibandingkan Magetan yang berada di peringkat ke-1.

Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas untuk faktor Sosial Politik ini bukan berarti sempurna untuk seluruh variabel dan indikator yang mereka miliki. Ada beberapa kelemahan di sejumlah variabel dan indikator daerah-daerah peringkat atas ini. Sebagai gambaran Kab. Tasikmalaya yang berada di peringkat ke-7 untuk faktor Sosial Politik, mempunyai kelemahan pada variabel Sosial Politik (peringkat ke-48 dari 63 peringkat). Kelemahan Kab. Tasikmalaya pada variabel Sosial Politik terutama pada indikator intensitas unjuk rasa dan potensi konflik

greatest weighting, at 60%, followed by the Socio-Political variable (27%) and the Cultural variable (13%) (see diagram 4: Weight of Indicators and Variables in the Socio-Political factor)

A.3.1. Ranking of Districts Based on The Socio-Political Factor

The 156 rated districts form 130 ranks for the Socio-Political factor, meaning that several ranks are shared. This category is led by Magetan District, while Purwakarta takes second place, and Belu ranks third. Deli Serdang brings up the rear at number 130 (see appendix 1.1.4. Ranking of Districts Based on the Socio-Political Factor).

Magetan District receives the top ranking for the Security and Cultural variables, but comes in at number 12, out of 63 ranks, for the Socio-Political variable. Purwakarta District shares Magetan's ratings for the Socio-Political and Security variables, but is in third place for the Cultural variable.

The top ten districts in the Socio-Political factor rating do not necessarily score well in all variables or indicators. For instance, Tasikmalaya, which is in seventh place for the Socio-Political factor, has a weak Socio-Political variable (ranked 48 out of 63) on account of its poor performance in all indicators except Public Participation. However, Tasikmalaya makes up for its low score in this variable with its superior performance in the Security and Cultural variables. Tegal District, meanwhile, ranks tenth for the Socio-Political factor, but 15th for the Socio-Political variable.

masyarakat. Jika dibandingkan dengan Kab. Tegal yang berada pada peringkat ke-10 untuk faktor Sosial Politik, peringkat variabel Sosial Politik yang dimiliki Tasikmalaya (48) lebih rendah dibandingkan dengan peringkat Kab. Tegal yang berada di peringkat 15 untuk variabel yang bersangkutan. Kelebihan Kab. Tasikmalaya dibandingkan dengan Kab. Tegal untuk faktor Sosial Politik adalah pada variabel Keamanan dan Budaya.

Grafik/Chart IV.5

Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik/
Rating of Districts Based on Socio-Political Factor

Grafik/Chart IV.5a

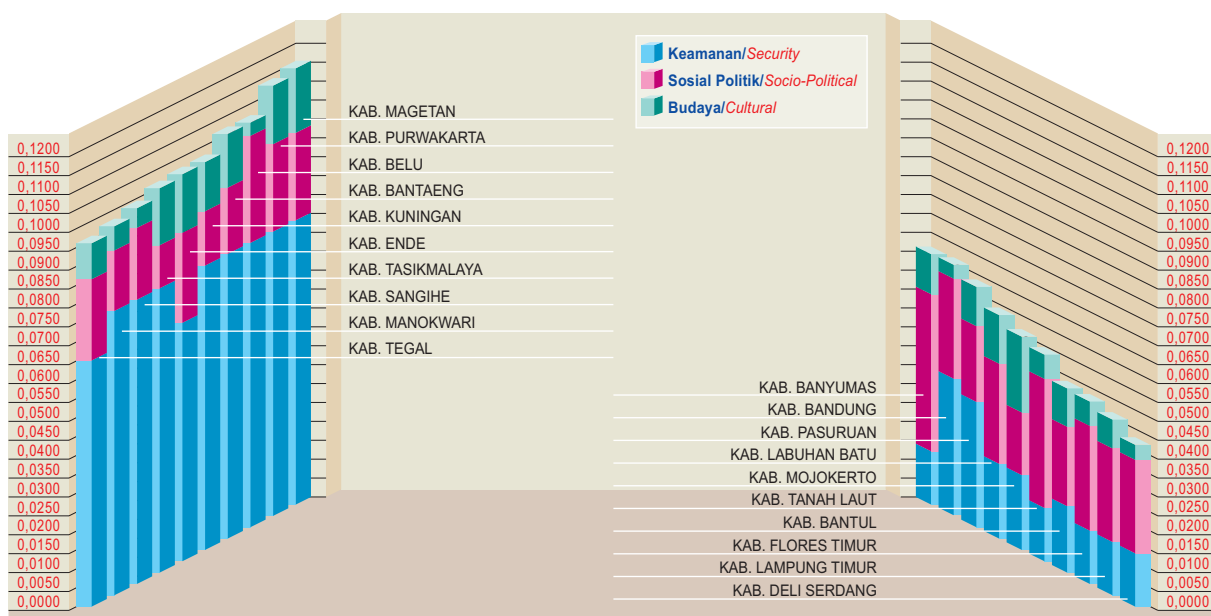
Peringkat 10 Teratas Kabupaten
Berdasarkan Faktor Sosial Politik

The Highest Ten Districts Based on Socio-Political Factors

Grafik/Chart IV.5b

Peringkat 10 Terbawah Kabupaten
Berdasarkan Faktor Sosial Politik

The Lowest Ten Districts Based on Socio-Political Factors



Dengan membandingkan hasil yang diperoleh Kab. Tegal (peringkat 10) dengan Kab. Sangihe (peringkat 8), tampak bahwa variabel Keamanan sangat menentukan peringkat daerah berdasarkan faktor Sosial Politik. Untuk variabel Sosial Politik, Kab. Sangihe berada pada peringkat ke-20 dan untuk variabel Budaya pada peringkat ke-40, lebih rendah dibandingkan dengan Kab. Tegal yang berada di peringkat ke-15 untuk variabel Keamanan dan peringkat ke-22 untuk Budaya. Namun untuk peringkat berdasarkan faktor Sosial Politik, Kab. Tegal berada di bawah Kab. Sangihe. Hal ini terjadi karena untuk variabel Keamanan, Kab. Sangihe lebih baik dibandingkan Kab. Tegal, yakni berada pada peringkat ke-1 dari 48 peringkat, sementara Kab. Tegal berada pada peringkat 2. Sedikit perubahan pada variabel

If we compare the Socio-Political factor ratings gained by Tegal (tenth) and Sangihe (eighth), we can see the extent to which the Security variable influences the rankings. Sangihe comes in at number 20 for the Socio-Political variable, and at number 40 for the Cultural variable, while Tegal gets higher scores for both (15th place for the Socio-Political variable and 22nd place for the Cultural variable). Even so, Tegal ranks below Sangihe for the Socio-Political factor since, for the Security variable, Sangihe takes first place above Tegal, which ranks second out of 48. Thanks to its hefty 60% weighting, a small change in the Security variable has a big effect on the Socio-Political factor rating – it is, in fact, the single most important variable in the overall rating, with close to 16%.

Keamanan akan berpengaruh besar pada daya tarik daerah secara keseluruhan.

Kabupaten-kabupaten yang berada pada peringkat bawah berdasarkan faktor Sosial Politik, secara umum peringkatnya juga berada di bawah. Dari 10 kabupaten peringkat bawah berdasarkan faktor Sosial Politik, semuanya berada pada peringkat antara 130 hingga 148. Peringkat ke-120 untuk faktor Sosial Politik yang diperoleh Kab. Flores Timur, mengakibatkan daerah ini secara umum berada pada peringkat ke-148, Kab. Deliserdang yang berada pada peringkat ke-122 (peringkat terendah) untuk faktor Sosial Politik, untuk peringkat secara keseluruhan juga berada pada peringkat ke-131. Contoh di atas membuktikan bahwa kondisi Sosial, Politik, dan Budaya suatu daerah sangat berpengaruh terhadap daya tariknya terhadap investasi. Peringkat 156 Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik dapat dilihat pada Lampiran 1.1.2; Lampiran 1.1.4; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.1.2.

A.3.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik

Untuk faktor Sosial Politik yang meliputi variabel Keamanan, Sosial Politik, dan Budaya dari 11 (sebelas) indikator yang ada, menghasilkan 40 urutan peringkat dari 44 Kota; hal ini karena ada satu peringkat yang diduduki 2 (dua) kota dan ada satu peringkat lainnya yang diisi 4 (empat) kota dengan score yang sama.

Dari urutan 40 peringkat, didapati bahwa Kota Sawahlunto menempati urutan teratas dengan score 0,0830 diikuti peringkat kedua sampai kelima secara berurutan yaitu Kota Gorontalo (score 0,0810), Kota Batam (score 0,0708), Kota Manado (score 0,0637), dan Kota Kediri (score 0,0618). Dari variabel keamanan yang diindikasikan dari 3 (tiga) indikator yaitu Gangguan Keamanan terhadap Aktivitas Usaha, Gangguan Keamanan di Masyarakat dan Kecepatan Aparatur dalam Menangani Gangguan Keamanan; Kota Sawahlunto dan Kota Gorontalo sama-sama mendapat nilai tertinggi (0,0548). Keunggulan Sawahlunto terhadap Gorontalo yang menempatkannya di peringkat pertama adalah pada variabel Sosial Politik yang dinilai sedikit lebih baik daripada Gorontalo.

Variabel yang mendukung Kota Batam menempati peringkat ketiga dalam kategori faktor ini, mengungguli Kota Manado dan Kota Kediri, adalah variabel Keamanan; sedangkan score variabel Sosial Politik sama untuk ketiga kota ini.

The districts that receive the lowest rankings based on the Socio-Political factor generally also occupy the lowest positions in the overall rating. Flores Timur, which is in 128th place for the Socio-Political factor takes the lowest (146th) position in the general rating, while Deliserdang, which is 130th (the lowest rank) for the Socio-Political factor, occupies the 129th position overall. The above examples prove that social, political and cultural conditions have a lot of influence over the regions' investment attractiveness. (See appendix 1.1.4. Ranking of Investment Attractiveness of Socio-Political Factor of 156 Districts, appendix 1.1.2. Strength and Weaknesses of 156 Districts by Factors and Variables, and appendix 4.6.1.2. Score of Factor, Variable and Indicator of Socio Political Factor of 156 Districts)

A.2.2. Ranking of Municipalities Based on Socio-Political Factor

The Socio-Political factor, which comprises the Security, Socio-Political and Cultural variables and eleven indicators, produces 40 ranks for 44 municipalities; one rank is shared by two municipalities, and another is occupied by four municipalities with the same scores.

The top five municipalities in this category are Sawahlunto (with a score of 0.0830), Gorontalo (0.0810), Batam (0.0708), Manado (0.0637) and Kediri (0.0618). Sawahlunto and Gorontalo share the highest score (0.0548) for the Security variable, which consists of three indicators, namely Disturbances to Business Activities, Disturbances to Society, and Speed of Security Officers in Handling Security Disturbances. Although Sawahlunto's score for the Cultural variable is lower than Gorontalo's, it still manages to edge out Gorontalo for the top position thanks to its slightly higher rating for the Socio-Political variable, which carries the higher weighting.

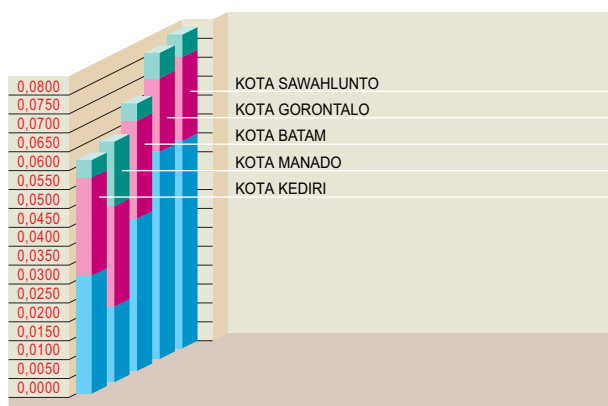
Although all three municipalities get similar scores for the Socio-Political variable, Batam beats Manado and Kediri to the third place in this category, thanks to its vastly superior performance in the Security variable. Manado, in particular,

Kota Manado terutama cukup jauh tertinggal dari sisi Keamanan, namun cukup baik untuk variabel Budaya. Sedangkan Kota Kediri meskipun lebih unggul dalam hal Sosial Politik dibanding Manado namun tidak didukung variabel Budaya sehingga menempatkan posisinya satu tingkat dibawah Manado.

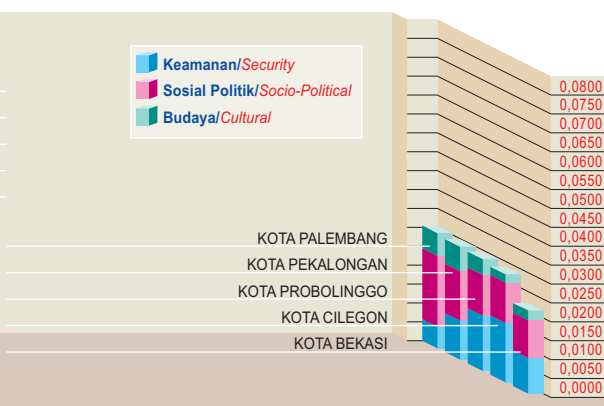
does quite poorly in the Security variable; however, it obtains the highest rating for the Cultural variable. Kediri, which has a higher rating than Manado for the Socio-Political variable, is let down by its Cultural variable score, and ends up one position below Manado.

Grafik/Chart IV.6 Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik/ Rating of Municipalities Based on Socio-Political Factor

Grafik/Chart IV.6a
Peringkat 5 Teratas Kota
Berdasarkan Faktor Sosial Politik
The Highest Five Municipalities Based on Socio-Political Factors



Grafik/Chart IV.6b
Peringkat 5 Terbawah Kota
Berdasarkan Faktor Sosial Politik
The Lowest Five Municipalities Based on Socio-Political Factors



Kota Bekasi yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta menempati urutan terakhir (40) untuk peringkat kategori Sosial Politik dengan score 0,0220. Urutan selanjutnya dalam kategori 5 (lima) peringkat terbawah adalah Kota Cilegon (peringkat 39 score 0,0286), Kota Probolinggo (peringkat 38 score 0,0296), Kota Pekalongan (peringkat 37 score 0,0299), dan Kota Palembang (peringkat 36 score 0,0305). Meskipun score dalam variabel Sosial Politik Kota Bekasi tidak terlalu berbeda dengan Kota Cilegon dan Probolinggo, namun score-nya yang rendah untuk variabel Keamanan yang berada di bawah Kota Cilegon, Probolinggo, dan Pekalongan, tidak mendukung score lainnya sehingga menempatkannya di peringkat terbawah kategori ini. Sementara itu, Kota Palembang sebetulnya mempunyai kemungkinan untuk lebih baik peringkatnya karena didukung score-nya yang baik dalam hal Sosial Politik, jauh di atas empat kota kelompok peringkat terbawah ini. Sayangnya kota ini tidak mampu menciptakan keamanan yang baik di daerahnya karena oleh pelaku usaha di Palembang score Keamanan dinilai sangat rendah, yang menyebabkannya berada dalam kelompok 5 (lima) peringkat terbawah ini. Peringkat 44 Kota

Bekasi Municipality, which is near the Special Capital Region of Jakarta, is ranked last (40th) for the Socio-Political factor, with a score 0.0220. Directly above Bekasi, we find Cilegon with a score of 0.0286, Probolinggo (0.0296), Pekalongan (0.0299) and Palembang (0.0305). Bekasi's total for the Socio-Political variable is only slightly lower than the scores achieved by Cilegon and Probolinggo, and its Cultural variable score is slightly above Cilegon's. However, its weak showing for the important Security variable puts Bekasi firmly in the lowest rank for this factor. Meanwhile, Palembang's score for the Socio-Political variable is far higher than the scores awarded to the four municipalities that rank below it for the Socio-Political factor. Unfortunately, this municipality is unable to create secure conditions, as reflected in the low Security variable it is given by the local business community. Thus, Palembang is unable to rise above the bottom five for this factor. (See appendix 1.2.4. Ranking of Investment Attractiveness of Socio-Political Factor of 44 Municipalities, appendix 1.2.2. Strength and Weaknesses of 44 Municipalities by Factors and Variables, and appendix 4.6.2.2. Score of Factor, Variable and Indicator of Socio Political Factor of 44 Municipalities)

Berdasarkan Faktor Sosial Politik dapat dilihat pada Lampiran 1.2.2; Lampiran 1.2.4; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.2.2.

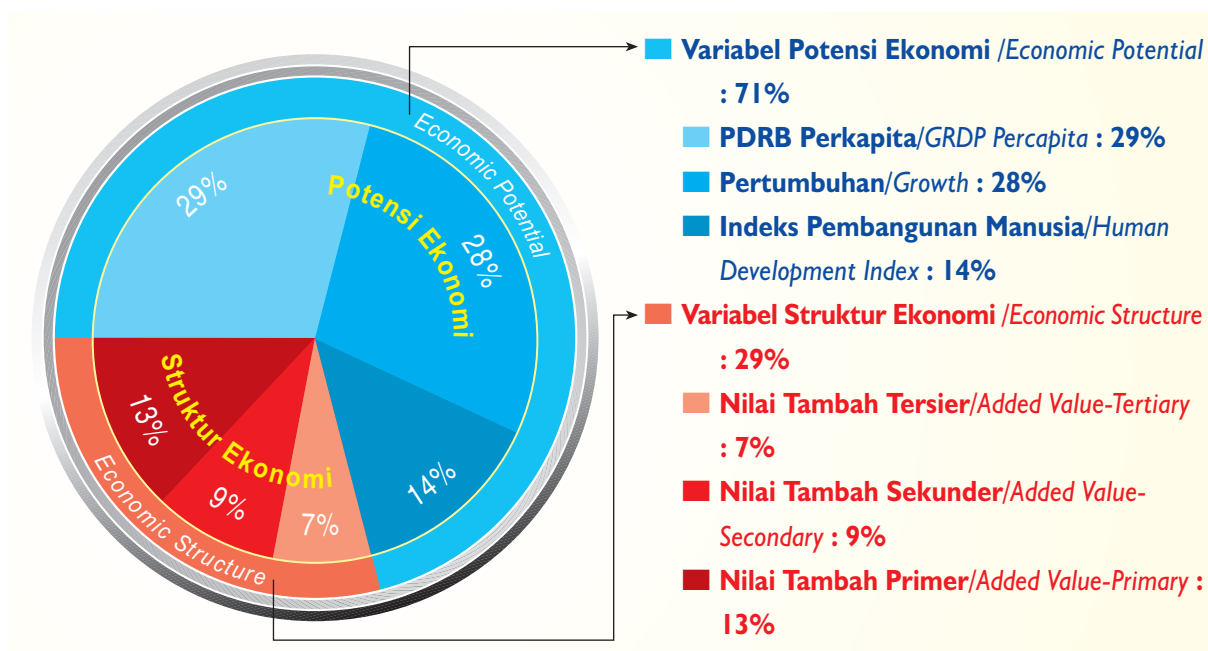
A.4. Faktor Ekonomi Daerah

Faktor Ekonomi Daerah memberikan kontribusi terhadap pembentukan daya tarik investasi sebesar 17%. Faktor Ekonomi Daerah terdiri dari dua variabel, yakni variabel Potensi Ekonomi dengan bobot 71%, dan variabel Struktur Ekonomi dengan bobot 29%. Variabel Potensi Ekonomi terdiri dari 3 indikator yaitu; PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan

A.4. The Regional Economic Dynamism Factor

The Regional Economic Dynamism factor accounts for 17% of the general rating of regional investment attractiveness. This factor consists of two variables, namely Economic Potential (with a weighting of 71%) and Economic Structure (with 29%). The Economic Potential variable consists of 3 indicators: Gross Regional Domestic Product Per Capita (GRDP Per Capita), with a 29% weighting

Diagram/Figure 5.
Faktor Ekonomi Daerah/Regional Economic Dynamism



PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara untuk variabel Struktur Ekonomi Daerah, juga terdiri dari 3 indikator yakni, Nilai Tambah Sektor Primer, Nilai Tambah Sektor Sekunder, dan Nilai Tambah Sektor Tersier. Dari 6 Indikator pembentuk faktor Ekonomi Daerah, indikator PDRB Perkapita mempunyai bobot paling besar yakni sebesar 29%, disusul Pertumbuhan Ekonomi 28%, IPM 14%, Nilai Tambah Primer 13%, Sekunder 9%, dan terakhir Nilai Tambah Tersier sebesar 7% (Lihat Diagram 5. Bobot Indikator Faktor Ekonomi Daerah). Dilihat dari bobot variabel dan indikator-indikator pada faktor Ekonomi Daerah ini, tampak bahwa variabel Potensi Ekonomi dan indikator-indikator di dalamnya mempunyai kontribusi terbesar dalam

within this factor; Economic Growth (GRDP Growth), at 28%; and Human Development Index (HDI), with 14%. The Economic Structure variable also comprises 3 indicators, namely Primary Sector Added Value, weighted at 13%; Secondary Sector Added Value, with 9%; and Tertiary Sector Added Value, at 7%. With its 71% weighting within the Regional Economic Dynamism factor, the Economic Potential variable is the largest variable in the of investment attractiveness ranking of Regional Economic Dynamism factor. (see diagram 5: Weight of Indicators and Variables in the Regional Economic Dynamism factor)

perolehan score daya tarik daerah terhadap investasi berdasarkan faktor Ekonomi Daerah.

A.4.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah

Dari 156 Kabupaten yang diperingkat, berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah diperoleh 114 peringkat. Indikator-indikator yang tergabung dalam variabel Potensi Ekonomi memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap peringkat daerah berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah. Dari daerah yang berada pada peringkat atas untuk kategori ini hampir semua indikator dalam variabel potensi ekonominya bisa dikatakan sempurna (Grafik IV.7).

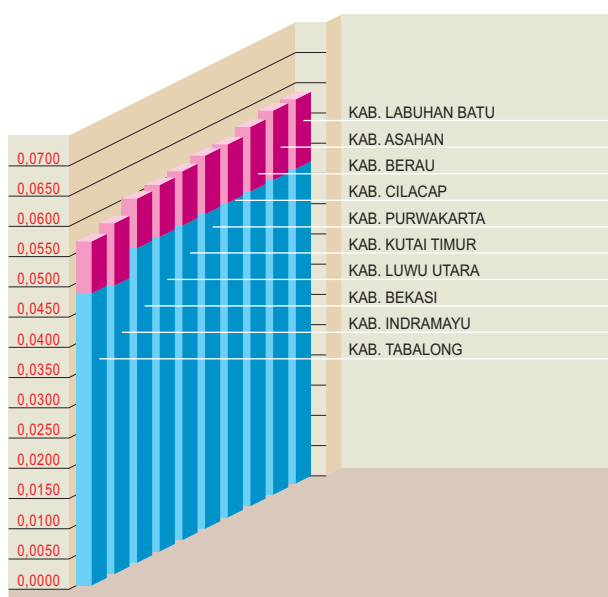
A.4.1. Ranking of District Based on The Regional Economic Dynamism Factor

When rated for the Regional Economic Dynamism factor, the 156 districts examined form 114 ranks. The indicators grouped under the Economic Potential variable make by far the largest contribution to the ranking of regions under this factor. Accordingly, the leading regions in this category have consistently high scores for the Economic Potential variable and its indicators. (Graph IV.7).

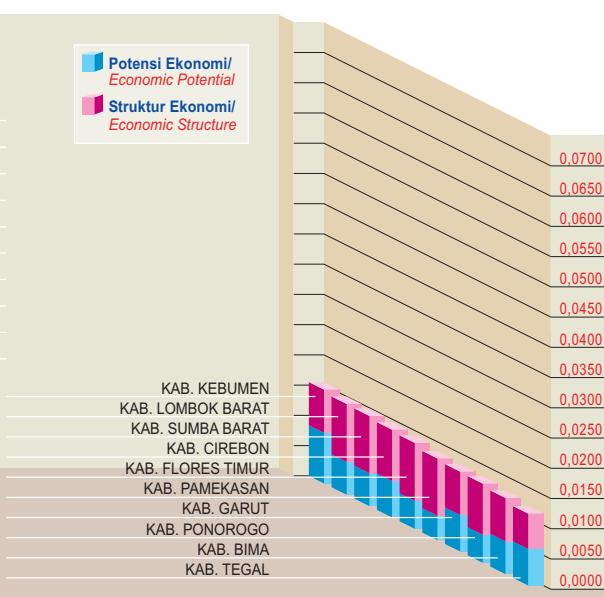
Grafik/Chart IV.7

Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/ Rating of Districts Based on Regional Economic Dynamism

Grafik/Chart IV.7a
Peringkat 10 Teratas Kabupaten
Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah
The Highest Ten Districts
Based on Regional Economic Dynamism



Grafik/Chart IV.7b
Peringkat 10 Terbawah Kabupaten
Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah
The Lowest Ten Districts
Based on Regional Economic Dynamism



Secara rata-rata daerah-daerah yang masuk dalam kelompok 10 peringkat teratas ini merupakan daerah yang makmur dengan pendapatan perkapita sangat tinggi (rata-rata diatas Rp.12.000.000,-). Selain pendapatan perkapita yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi di daerah ini juga sangat tinggi yakni di atas 5%. Untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir semua daerah tersebut sangat tinggi, yaitu diatas 68,5 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM secara Nasional yang hanya sebesar 65,8. Diantara 11 kabupaten

The 11 districts in the top ten ranks are among the richest in the country, as indicated by their high per capita incomes (generally above Rp 12 million per year). Economic growth in these regions is also at the high end of the scale, averaging above 5% in 2001. Most of them (nine out of 11) perform well in the Human Development Index (HDI) indicator, thanks to their above-average HDI scores. While the nationwide HDI score averages 65.8, these nine districts all have scores above 68.5. The two top-ten ranked districts that get low HDI

tersebut ada dua kabupaten yang nilai IPMnya rendah yakni Kab. Tabalong (peringkat ke-9) sebesar 63,60, dan Kab. Indramayu (peringkat ke-8), yang memiliki indikator IPM tergolong sangat rendah yakni sebesar 61,30. Rendahnya nilai IPM Kab. Indramayu dan Kab. Tabalong, tertutup oleh indikator Nilai Tambah Sektor Primer yang sangat tinggi, sehingga kedua daerah ini masih termasuk dalam kelompok 10 daerah peringkat atas berdasarkan faktor Ekonomi Daerah.

Peringkat pertama untuk kategori Ekonomi Daerah diperoleh Kab. Asahan dan Kab. Labuhan Batu secara bersama-sama dengan score 0,0635. Score variabel Potensi Ekonomi yang diperoleh Kab. Asahan dan Labuhan Batu, sama dengan 6 daerah lainnya pada kelompok peringkat atas ini. Yang membuat mereka lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya adalah karena kedua daerah ini mempunyai proporsi yang seimbang antara indikator Nilai Tambah Sektor Primer dan Sekunder. Kelemahan dari dua daerah ini terletak pada indikator Nilai Tambah Sektor Tersier yang tergolong sangat rendah.

Daerah-daerah yang berada pada peringkat bawah, memiliki nilai rata-rata indikator Ekonomi Daerah rendah, terutama untuk indikator-indikator dalam variabel Potensi Ekonomi. Namun demikian jika dilihat per indikator beberapa daerah masih memiliki paling tidak satu indikator yang tergolong baik. Kab. Kebumen pada peringkat ke-105, memiliki indikator IPM yang cukup tinggi yakni sebesar 64,90. Sementara Kab. Sumba Barat (ke-107) dan Kab. Pamekasan (110), memiliki keunggulan untuk indikator Nilai Tambah Sektor Primer yang tergolong tinggi. Sayangnya kelebihan-kelebihan indikator yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut tidak didukung dengan tingginya nilai indikator lainnya, terutama indikator PDRB Perkapita dan Pertumbuhan PDRB yang memiliki bobot yang paling besar. Akibatnya daerah-daerah tadi tetap berada di peringkat bawah berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah. Kelebihan indikator Nilai Tambah Sektor Primer yang dimiliki oleh Kab. Pamekasan dan Sumba Barat dapat dijadikan modal untuk menarik investor berinvestasi di sektor primer seperti, peternakan, atau perkebunan. Peringkat 156 Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.1.2; Lampiran 1.1.5; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.1.3.

scores are Tabalong (ranked ninth), at 63.60, and Indramayu (eighth), with just 61.30. Their top-ranking scores for the Primary Sector Added Value indicator nonetheless compensate for their low HDI indicator performance, and ensure that both districts rank in the top ten for the Regional Economic Dynamism factor.

Asahan and Labuhan Batu Districts tie for the top ranking in this factor, with a score of 0.0635 and identical marks for all six indicators. These two districts share the leading score for the Economic Potential variable with the six regions that rank directly below them. The two districts' top placement is attributable to their second-ranking scores for the Primary Sector Added Value indicator and their leading scores for the Secondary Sector Added Value indicator. Their weakness lies in the Tertiary Sector Added Value indicator, where they take the lowest rating.

While many of the lowest-ranked districts have poor indicator scores across the board, there are some instances where a district does disproportionately well in one or more indicator. Kebumen District, which is in 105th place for the factor as a whole, gains the second-highest score for the HDI indicator. Sumba Barat (ranked 107th) and Pamekasan (at number 110), meanwhile, share the top Primary Sector Added Value indicator rating with several other districts. Unfortunately, these three districts are unable to match these superior ratings with high scores for other indicators, including the heavily-weighted GRDP Per Capita and GRDP Growth. Consequently, they remain near the bottom of the rankings table for the Regional Economic Dynamism Factor. However, Pamekasan and Sumba Barat should be able to make use of their superior Primary Sector Added Value indicators to attract investors in primary-sector fields such as animal husbandry and plantations. (See appendix 1.1.5. Ranking of Investment Attractiveness of Regional Economic Dynamism Factor of 156 Districts, appendix 1.1.2. Strength and Weaknesses of 156 Districts by Factors and Variables, and appendix 4.6.1.3. Score of Factor, Variable and Indicator of Regional Economic Dynamism Factor of 156 Districts)

A.4.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah

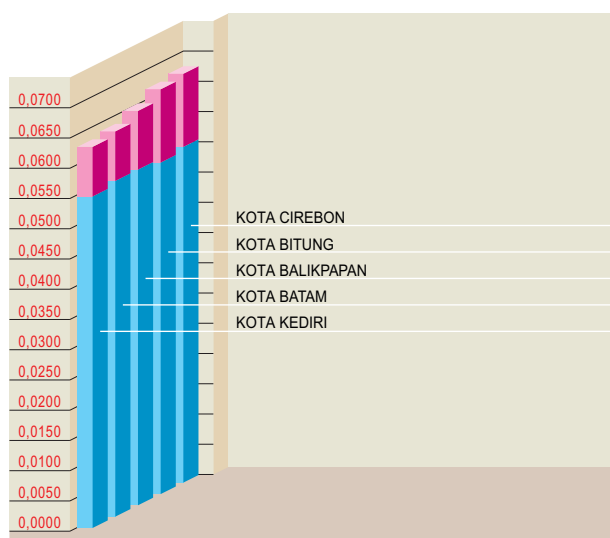
Faktor Ekonomi Daerah yang sebagian indikatornya merupakan anugerah alam, menghasilkan 35 urutan dari 44 Kota yang diperingkat karena ada 9 (sembilan) peringkat yang diisi oleh masing-masing 2 (dua) kota dengan nilai sama. Kota Cirebon yang merupakan daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta berada di jalur strategis perlintasan antar daerah di pantai utara Jawa menempati peringkat pertama dengan score 0,0676. Peringkat selanjutnya diisi secara berurutan oleh Kota Bitung (score 0,0669), Kota Balikpapan (score 0,0652), Kota Batam (score 0,0637), dan Kota Kediri (score 0,0630). Diantara kelima daerah tersebut hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal variabel Potensi Ekonomi yang diukur berdasarkan indikator PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia); dimana Kota Cirebon, Balikpapan, Batam mempunyai score sama (0,0555), sedangkan Bitung dan Kediri sama score 0,0548.

A.4.2. Ranking of Municipalities Based on The Regional Economic Dynamism Factor

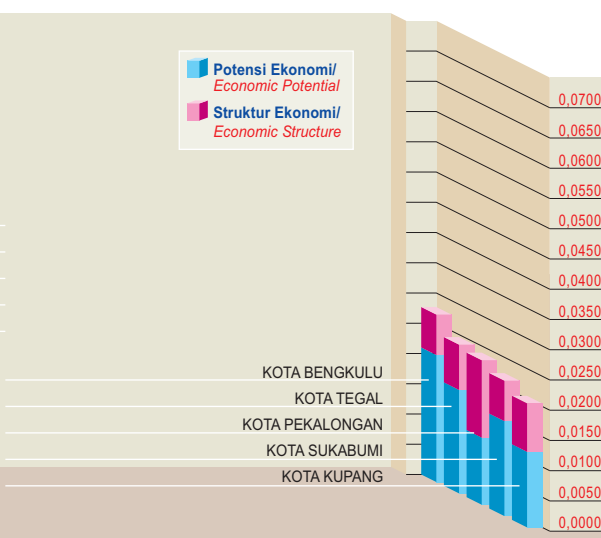
The Regional Economic Dynamism factor produces 35 ranks for the 44 rated municipalities, as there are nine instances where a position is shared by two municipalities with the same scores. Cirebon, which is located on the border between Java Barat and Java Tengah, on the inter-regional strategic line that runs along the North coast of Java, takes first place with a score of 0.0676. Bitung is at number two with 0.0669, followed by Balikpapan (0.0652), Batam (0.0637), and Cilegon and Kediri (both 0.0630). The six municipalities in the top five ranks all have similar ratings for the Economic Potential variable, which consists of the GRDP Per Capita, Economic Growth and HDI indicators. For this variable as a whole, Cirebon, Balikpapan and Batam receive the same score (0.0555), while Bitung, Cilegon and Kediri get 0.0548.

Grafik/Chart IV.8 Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah/ Rating of Municipalities Based on Regional Economic Dynamism

Grafik/Chart IV.8a
Peringkat 5 Teratas Kota
Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah
The Highest Five Municipalities
Based on Regional Economic Dynamism



Grafik/Chart IV.8b
Peringkat 5 Terbawah Kota
Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah
The Lowest Five Municipalities
Based on Regional Economic Dynamism



Demikian juga halnya dengan variabel Struktur Ekonomi yang dinilai dari indikator Nilai Tambah Primer, Sekunder, dan Tersier, tidak terdapat perbedaan mencolok, bahkan untuk Kota Cirebon, dan Bitung sama score-nya 0,0121;

For the Economic Structure variable, which is made up of the Primary Sector Added Value, Secondary Sector Added Value and Tertiary Sector Added Value indicators, Cirebon and Bitung both score 0.0121, while three of the other four

perbedaan score dengan 3 (tiga) kota lainnya pun sangat kecil, hampir tidak berarti. Yang penting diperhatikan disini adalah adanya pembobotan pada variabel Struktur Ekonomi yang ‘menguntungkan’ kota yang mempunyai keunggulan di sektor Primer karena bobotnya yang lebih besar dibanding Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Tersier. Hal ini menjadi catatan penelitian tentang adanya ‘kelemahan’ hasil pembobotan, yang berdasarkan pemahaman umum ‘seharusnya’ bobot indikator-indikatornya secara berurutan dari bobot besar adalah indikator Nilai Tambah Tersier, diikuti Nilai Tambah Sekunder, dan terakhir Nilai Tambah Primer untuk konteks daerah Perkotaan.

Peringkat terbawah kategori ini adalah Kota Kupang propinsi Nusa Tenggara Timur, suatu kawasan Indonesia bagian Timur yang relatif tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia bagian Barat. Score terendah Kota Kupang tersebut adalah 0,0205, diikuti Kota Sukabumi (0,0224), Kota Pekalongan (0,0239), Kota Tegal (0,0246), dan Kota Bengkulu (0,0277). Pertumbuhan Ekonomi yang sangat rendah di Kota Kupang dan Kota Sukabumi, serta score rendah di indikator-indikator lainnya seperti PDRB Perkapita dan IPM di 5 (lima) kota di atas, menyebabkan daerah-daerah ini berada di 5 (lima) peringkat terbawah, jauh lebih rendah dibanding daerah-daerah lainnya. Peringkat 44 Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.2.2; Lampiran 1.2.5; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.2.3.

A.5. Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas

Peringkat daya tarik investasi daerah berdasarkan faktor Tenaga Kerja & Produktivitas, terbentuk dari 3 variabel yakni variabel Produktivitas TK, Biaya Tenaga Kerja (Biaya TK), dan Ketersediaan TK. Bobot masing-masing variabel adalah 35% untuk variabel Ketersediaan TK, 24% untuk Produktivitas TK, dan 41% untuk Biaya TK (Lihat Diagram 6. dibawah)

Untuk pemeringkatan ini variabel Produktivitas TK juga berstatus sebagai indikator, sementara variabel Biaya TK terdiri dari dua indikator, yakni indikator Biaya TK sesuai aturan formal (UMP/UMK), dan indikator Biaya Tenaga Aktual yaitu upah total tenaga kerja yang berlaku dipasar tenaga kerja di suatu daerah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Sementara variabel Ketersediaan Tenaga Kerja terdiri dari 3 indikator yakni, indikator Pencari Kerja, Tenaga Kerja

municipalities share the same value (Batam, Cilegon and Kediri, all at 0.0082). The most important thing to note here is that the weightings within the Economic Structure variable favor regions (including cities) with strong primary industry sectors, with the Primary Sector Added Value indicator given a heavier weighting than the corresponding indicators for the secondary and tertiary sectors. This is noted in the research as a “weakness” of weighting, in that it runs counter to the general understanding that for urban areas, the tertiary sector is the most important, followed by the secondary and primary sectors. It is, however, a reflection of the state of industrial development in Indonesia as a whole.

For the Regional Economic Dynamism factor, the lowest rank is held by Kupang Municipality in Nusa Tenggara Timur Province, a territory in Eastern Indonesia that is generally less well developed than the rest of the country. Kupang gains a score of 0.0205, and is preceded by Sukabumi (at 0.0224), Pekalongan (0.0239), Tegal (0.0246), and Pare-Pare and Bengkulu (both 0.0277). Low economic growth in Kupang and Sukabumi, in combination with poor scores for other indicators such as GRDP Per Capita and HDI in these six municipalities put them in the lowest five ranks. See appendix 1.2.5. Ranking of Investment Attractiveness of Regional Economic Dynamism Factor of 44 Municipalities, appendix 1.2.2. Strength and Weaknesses of 44 Municipalities by Factors and Variables, and appendix 4.6.2.3. Score of Factor, Variable and Indicator of Regional Economic Dynamism Factor of 44 Municipalities)

A.5. The Labor & Productivity Factor

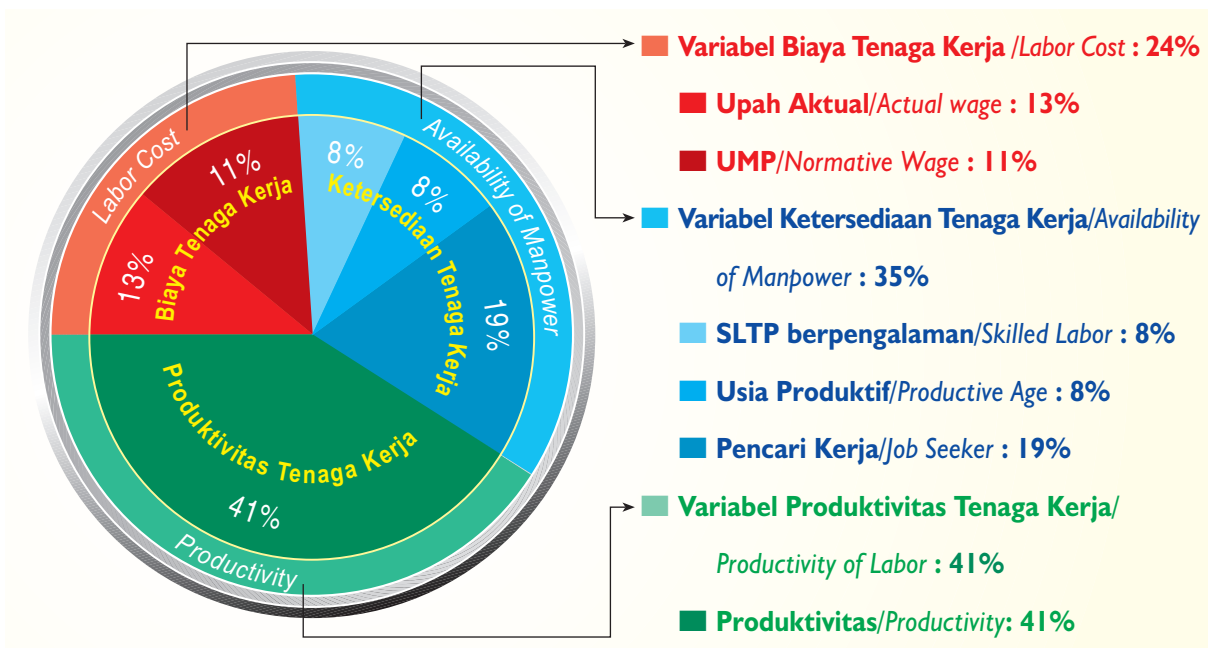
The regional investment attractiveness rating based on the Labor & Productivity factor is formed from three variables: Productivity (which has the highest weighting, at 41%), Availability of Manpower (35%) and Labor Cost (24%) (see diagram 6: Weight of Indicators and Variables in the Labor and Productivity factor).

The Productivity variable consists of a single indicator, while the Labor Cost variable comprises two indicators, namely Normative Wages – which takes account of the government-sanctioned Provincial Normative Wages/Municipal Normative Wages (UMP/UMK) – and Actual Wages, which are the real wages paid by employers in the region in question. The Availability of Manpower variable is made up of three indicators, namely Job Seekers, Productive

Berpengalaman berdasarkan Pendidikan Minimal SLTP, dan indikator Tenaga Kerja Usia Produktif. Untuk pemeringkatan ini variabel dan indikator Produktivitas Tenaga Kerja merupakan variabel dengan bobot terbesar yang akan banyak menentukan peringkat daya tarik investasi daerah berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas.

Age and Skilled Labor (who are educated to at least Junior High School, or SLTP, level).

Diagram/Figure 6.
Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/Labor & Productivity



A.5.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas.

Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas diperoleh 117 peringkat dari 156 daerah yang diperingkat. Daerah yang berada pada kelompok 10 Kabupaten Peringkat teratas berdasarkan faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, disebabkan karena rata-rata 6 indikatornya baik. Kontribusi terbesar dari peringkat Kabupaten berdasarkan faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas ini adalah indikator Produktivitas Tenaga Kerja yang mempunyai bobot paling besar diantara 6 indikator Tenaga Kerja dan Produktivitas lainnya, yaitu sebesar 41%.

Dari Kabupaten yang termasuk dalam kelompok 10 peringkat teratas, seluruhnya memiliki indikator produktivitas tenaga kerja sangat baik (Grafik IV.9). Di daerah-daerah tersebut biasanya telah berkembang dengan baik kegiatan industri pengolahan dan struktur ekonominya sebagian besar ditopang oleh sektor sekunder. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri mendorong produktivitas tenaga kerja di

A.5.1. Ranking of District Based on The Labor & Productivity Factor

When rated for the Labor & Productivity Factor, the 156 districts form 117 ranks. All of the top ten districts gain very good scores for the Productivity indicator (Graph IV.9), which, at 41%, is the most significant of the six indicators that make up this factor. These highly rated regions tend to host well-developed manufacturing activities, and to feature an economic structure that is underpinned by the secondary sector. The fact that many people are employed in the industrial sector translates into comparatively high productivity levels in these areas.

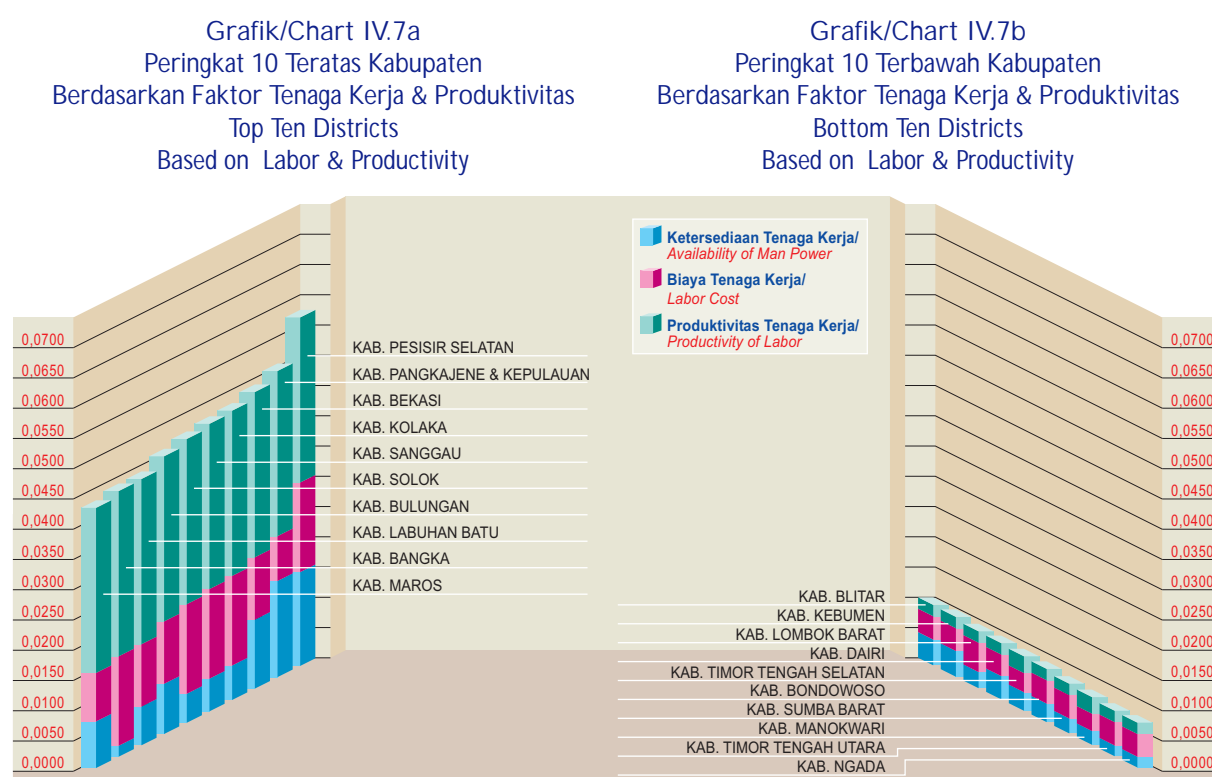
Pesisir Selatan, which takes first place for the Labor & Productivity factor, gets high ratings for every indicator except Productive Age. In other words, this district does not have enough people who are of working age. The number two-ranking Pangkajene & Kepulauan District, on the other hand, is handicapped by its relatively high actual wage cost, while it receives very high scores for all other indicators. In third place is Bekasi, where the

daerah tersebut secara umum lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang industrinya belum berkembang.

Kab. Pesisir Selatan yang berada pada peringkat pertama untuk faktor ketengakerjaan, secara rata-rata setiap indikatornya baik. Satu kelemahan dari Kab. Pesisir Selatan adalah kurangnya tersedianya tenaga kerja usia produktif. Sementara Kab. Pangkajene Kepulauan di peringkat dua memiliki kelemahan pada indikator upah tenaga kerja aktual yang relatif mahal. Di

high Municipal Normative Wage (UMK) puts it on a par with Bulungan (in seventh place) and Labuhan Batu (eighth) when it comes to the Normative Wages indicator. The latter two regions are also weak in terms of available labor reserves – whether job seekers or productive-age workers. Meanwhile, Kolaka (fourth), Sanggau (fifth), Solok (sixth) and Bangka (ninth) all receive unfavorable scores for the Availability of Manpower variable.

Grafik/Chart IV.9
Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/
Rating of Districts Based on Labor & Productivity



peringkat tiga Kab. Bekasi juga mempunyai kelemahan pada tingginya UMK, sama seperti pada Kab. Labuhan Batu (peringkat ke-7) dan Kab. Bulungan (peringkat ke-8). Dua daerah terakhir ini juga mempunyai kelemahan pada kurang tersedianya jumlah tenaga kerja baik yang berupa pencari kerja maupun tenaga kerja usia produktif. Sementara untuk Kab. Kolaka (ke-4), Kab. Sanggau (ke-5), Kab. Solok (ke-6), dan Kab. Bangka (ke-9) memiliki kelemahan pada variabel ketersediaan tenaga kerja yang dinilai kurang cukup memadai.

Daerah-daerah yang berada pada kelompok Kabupaten peringkat bawah, secara rata-rata 6 indikator Tenaga Kerja dan Produktivitasnya rendah, terutama untuk indikator produktivitas tenaga kerja. Pada kelompok 10 Kabupaten yang

In general, the lowest-ranked districts gain poor scores for all six Labor & Productivity indicators, and particularly for the weighty Productivity indicator. Six of the bottom ten districts are located in Eastern Indonesia. The lowest rank (number 117) is occupied by Ngada District in Nusa Tenggara Timur Province. In 116th place is Timor Tengah Utara, followed in ascending order by Manokwari, Sumba Barat and Bondowoso.

The high concentration of districts in Eastern Indonesia in the lower ranks indicates that the development of human resources in this part of the country remains comparatively poor. Another phenomenon that is apparent in the scores gained for the Labor & Productivity indicators is

berada di peringkat bawah berdasarkan faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, enam diantaranya adalah kabupaten-kabupaten yang berada di Kawasan Indonesia Timur. Peringkat paling bawah (peringkat ke-117) diduduki oleh Kab. Ngada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, diatasnya berturut-turut Kab. Timor Tengah Utara (ke-116), kab. Manokwari (115), Kab. Sumba Barat (ke-114) dan seterusnya.

Banyaknya daerah-daerah di Kawasan Indonesia Timur berada di peringkat bawah dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia, di kawasan tersebut masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Fenomena lain yang tertangkap dari faktor Tenagakerja ini, jika dilihat dari struktur ekonominya, di daerah-daerah tersebut belum menunjukkan adanya perkembangan yang baik pada kegiatan usaha sektor industri pengolahan dan sektor sekunder lainnya. Kurang berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah-daerah tersebut mengakibatkan tidak banyak tenaga kerja yang terlatih, karena sektor industri di daerah ini belum mampu menstimulir produktivitas tenaga kerja yang ada. Kekurangan tenaga kerja di daerah ini barangkali disebabkan tenaga kerja di daerah tersebut melakukan migrasi ke daerah-daerah lain dimana industrialisasi telah berkembang lebih maju. Peringkat 156 Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas dapat dilihat pada Lampiran 1.1.2; Lampiran 1.1.6; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.1.4.

A.5.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas

Penilaian dari faktor Tenaga Kerja & Produktivitas berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu Ketersediaan Tenaga Kerja, Biaya Tenaga Kerja, dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terjabarkan dalam 6 (enam) indikator. Dari penilaian faktor ini dihasilkan 40 peringkat dengan 3 (tiga) peringkat diantaranya masing-masing diisi 2 (dua) kota dengan nilai sama. Peringkat tertinggi dicapai Kota Kediri dengan score 0,0555 disusul secara berurutan Kota Cirebon (0,0554), Kota Palembang (0,0517), Kota Balikpapan (0,0472), dan Kota Cilegon (0,0465).

Dalam hal Produktivitas Tenaga Kerja tidak ada perbedaan score antara kelima kota tersebut. Kota Kediri dapat menduduki peringkat teratas karena keunggulannya di Biaya Tenaga Kerja, baik dari indikator Biaya Normatif UMP/K (Upah Minimum Propinsi/Kota) maupun Upah Riil Yang

that, bearing in mind their respective economic structures, these regions are not making any progress in managing the industrial sector and other secondary sectors. The fact that the manufacturing sector remains underdeveloped in these regions explains why the availability of skilled workers is limited. Firstly, the scarcity of skilled industrial jobs has meant that few people have been given the incentive to acquire the skills necessary for this type of position and, secondly, many of the people who could fill these jobs have migrated to other regions where the industrial sector is more advanced. See appendix 1.1.6. Ranking of Investment Attractiveness of Labor and Productivity Factor of 156 Districts, appendix 1.1.2. Strength and Weaknesses of 156 Districts by Factors and Variables, and appendix 4.6.1.4. Score of Factor, Variable and Indicator of Labor and Productivity Factor of 156 Districts)

A.5.2. Ranking of Municipalities Based on The Labor & Productivity Factor

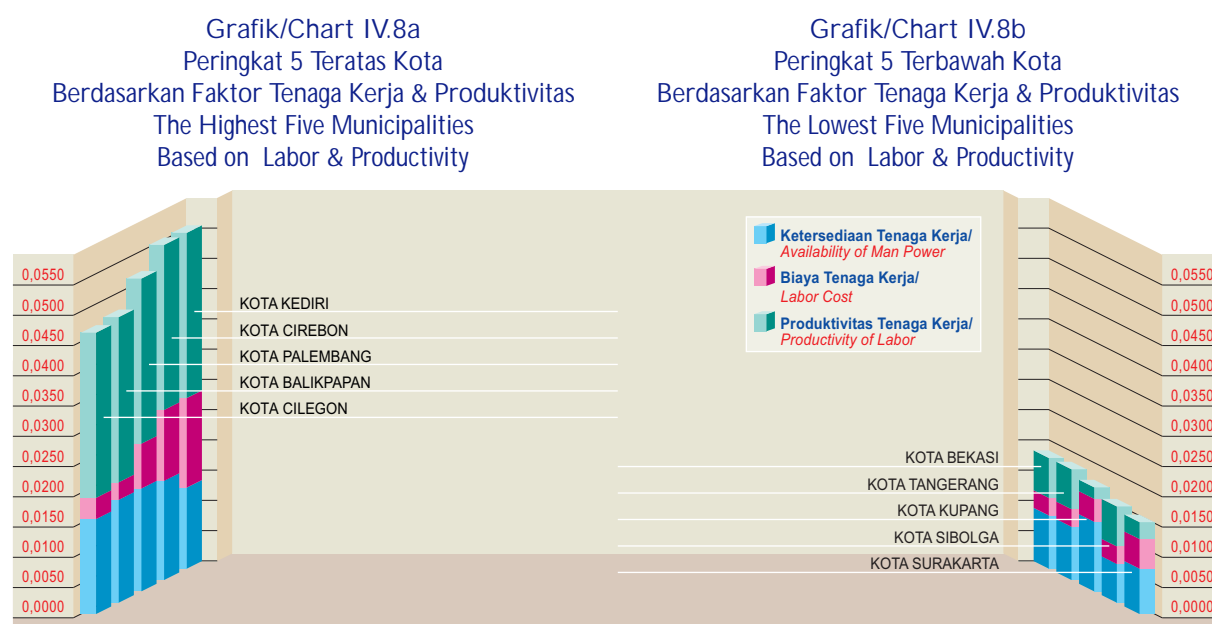
The 44 municipalities surveyed form 40 ranks for this factor; three ranks are occupied by two municipalities each. Kediri holds the highest position, with a score of 0.0555, and is closely followed by Cirebon (0.0554), and Palembang (0.0517), Balikpapan (0.0472), and Cilegon (0.0465).

The top five municipalities all have the same high scores for the Productivity variable (which is also a single indicator). Kediri is in the top position because of its competitive Labor Cost – it receives high marks for both the Normative Wage indicator and the Real Wage indicator. Nonetheless, Cirebon

Diterima Pekerja. Sedangkan Kota Cilegon dan Balikpapan sebenarnya mempunyai peluang di peringkat teratas karena variabel Ketersediaan Tenaga Kerjanya lebih baik dibanding Kota Kediri namun karena Biaya Tenaga Kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kediri, menjadikan daerah-daerah tersebut berada di peringkat di bawah Kediri.

and Palembang gain higher ratings than Kediri for the Availability of Manpower variable.

Grafik/Chart IV.10
Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas/
Rating of Municipalities Based on Labor & Productivity



Kota Surakarta di Propinsi Jawa Tengah berada pada peringkat terendah dari 44 Kota dengan score 0,0152; diikuti secara berurutan ke atas Kota Sibolga (0,0159), Kota Kupang (0,0172), Kota Tangerang (0,0189), dan Kota Bekasi (0,0183). Score kelima daerah ini sangat jauh dibawah score kota lima kelompok peringkat teratas. Dari lampiran score seluruh indikator, bisa dilihat bahwa secara keseluruhan score masing-masing indikator sangat tidak mendukung daerah-daerah ini untuk menduduki peringkat yang lebih baik. Peringkat 44 Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas dapat dilihat pada Lampiran 1.2.2; Lampiran 1.2.6; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.2.4.

Surakarta Municipality in Java Tengah Province is in 40th and last place with a score of 0.0152, and is preceded by Sibolga (0.0159), Kupang (0.0172), Bekasi (0.0183) and Tangerang (0.0189). In the attachment showing the scores for all indicators, we can see that these low-ranking municipalities generally perform poorly across the board. (See appendix 1.2.6. Ranking of Investment Attractiveness of Labor and Productivity Factor of 44 Municipalities, appendix 1.1.2. Strength and Weaknesses of 44 Municipalities by Factors and Variables, and appendix 4.6.2.4. Score of Factor, Variable and Indicator of Labor and Productivity Factor of 44 Municipalities)

A.6. Faktor Infrastruktur Fisik

Faktor Infrastruktur Fisik terbentuk dari 10 indikator, yang dapat dikelompokkan dalam dua variabel yaitu, variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik dan variabel Kualitas Infrastruktur Fisik. Vriable Ketersediaan Infrastruktur Fisik dan

A.6. The Physical Infrastructure

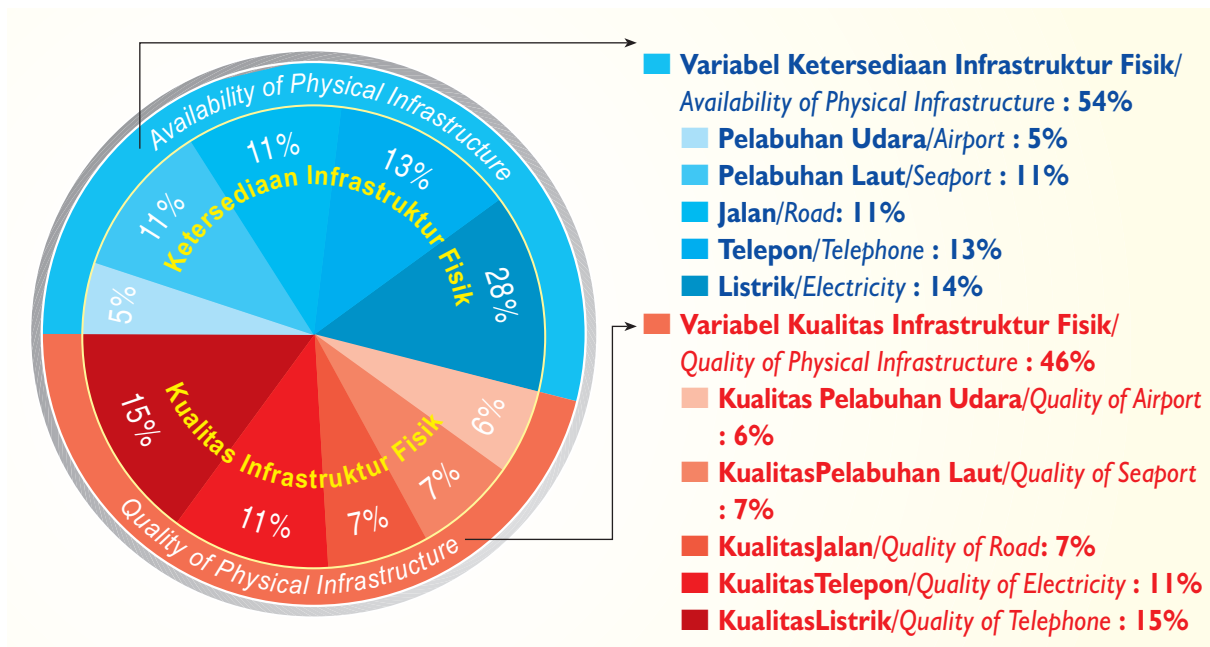
The Physical Infrastructure Factor is composed of 10 indicators that are arranged under two variables, namely Availability of Physical Infrastructure (at 54%) and Quality of Physical Infrastructure (46%). The weightiest indicator is

Kualitas Infrastruktur Fisik mempunyai bobot yang hampir berimbang yakni 56% untuk Ketersediaan dan 44% untuk Kualitas. Sementara jika dilihat dari bobot masing-masing indikator, Kualitas Sambungan Telpon mempunyai bobot paling besar yakni sebesar 15%, disusul Ketersediaan Listrik 14%, Ketersediaan Jaringan Telon 13%, Ketersediaan Jalan Darat, Ketersediaan/Akses ke Pelabuhan Laut, dan Kualitas Sambungan Listrik masing-masing 11%, Kualitas Jalan, Kualitas Pelabuhan Laut masing-masing 7%, dan bobot terkecil adalah Kualitas Pelabuhan Udara 6%, dan Ketersediaan/Akses ke Pelabuhan Udara 5% (Lihat Diagram 7. dibawah ini)

Hasil pembobotan tersebut dapat mencerminkan bawah saat ini, jaringan telpon masih menjadi persoalan bagi aktivitas usaha. Selisih bobot masing-masing indikator tidak terpaut jauh, menandakan bahwa antara indikator yang satu dengan lainnya mempunyai pengaruh yang relatif sama dalam menentukan daya tarik investasi daerah. Hal ini juga mencerminkan bahwa hasil pembobotan untuk faktor Infrastruktur Fisik ini dapat berlaku secara umum untuk berbagai bidang usaha yang mempunyai karakter yang berlainan.

Quality of Telephone, with 15%. It is followed by Availability of Electricity (at 14%), Availability of Telephone (13%), Availability/Accessibility of Roads, Availability/Accessibility of Seaport, and Quality of Electricity (11% each), Quality of Roads and Quality of Seaport (7% each), Quality of Airport (6%), and Availability/Accessibility of Airport (5%). (see diagram 7: Weight of Indicators and Variables in the Physical Infrastructure Productivity factor). It is apparent from these weightings that the telephone network is still a major concern for business operators. The fact there are a relatively large number of indicators, and that no single indicator dominates the weightings, implies that the same level of investment attractiveness can be produced by a number of different indicator score combinations.

Diagram/Figure 7.
Faktor Infrastruktur Fisik/Physical Infrastructure



A.6.1. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

Untuk peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik diperoleh 124 peringkat. Berada pada peringkat pertama adalah Kab. Gresik

A.6.1. Ranking of District Based on The Physical Infrastructure

The 156 districts are arranged into 124 ranks based on the Physical Infrastructure factor. Gresik District in Java Timur Province leads the field, while

di Propinsi Jawa Timur, sementara peringkat terbawah (ke-124) diduduki oleh Kab. Kutai Timur, di Propinsi Kalimantan Timur (Lihat Lampiran 1.1.7. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik, dan Lampiran 1.1.2).

Grafik IV.11, memperlihatkan daerah-daerah yang menempati peringkat teratas dan terbawah berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik. Keberhasilan kabupaten yang menempati peringkat atas berdasarkan faktor Infrastruktur Fisik, karena daerah-daerah tersebut tersedia infrastruktur secara lengkap atau paling tidak mempunyai kemudahan akses terhadap infrastruktur utama seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, disamping juga ditunjang oleh kualitas dari infrastruktur yang bersangkutan. Secara geografsis (geo-ekonomis) daerah-daerah yang berada pada peringkat atas untuk faktor Infrastruktur Fisik, berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi atau sebagai daerah penyangga kota-kota besar.

Kab. Gresik berhasil menempati peringkat pertama, karena infrastruktur yang ada tersedia secara lengkap dengan kualitas baik (antara ketersediaan dan kualitasnya seimbang). Kab. Gresik merupakan daerah penyangga bagi Kota Surabaya. Hal yang sama juga terjadi pada Kab. Bekasi di peringkat ke-2 dan Kab. Tangerang di peringkat ke-8, yang berbatasan langsung dan merupakan daerah penyangga Kota Jakarta, atau Kab. Gianyar (peringkat ke-3), yang juga berbatasan langsung dengan Kota Denpasar.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang telah memiliki infrastruktur secara lengkap dan kualitasnya juga baik, mendatangkan efek aglomerasi (*agglomeration effect*) bagi daerah-daerah di sekitarnya. Dengan demikian daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memperoleh *share* infrastruktur yang ada di daerah pusat pertumbuhan ekonomi. Selain daerah berada di dekat pusat pertumbuhan, daerah yang berada pada jalur distribusi juga dapat mencapai peringkat yang baik untuk infrastruktur fisik. Hal ini terlihat dari peringkat ke-4 berdasarkan faktor Infrastruktur Fisik, yakni Kab. Tegal, yang secara geografsis terletak di jalur pantura yang merupakan jalur distribusi/perdagangan utama di Pulau Jawa. Kabupaten ini juga berada di antara kota Jakarta dan Kota Semarang dua buah kota besar yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.. Keberhasilan Kab. Tegal ini barangkali juga disebabkan pmdanya mempunyai cukup komitmen dalam melakukan pembangunan

Kutai Timur in Kalimantan Timur Province brings up the rear at number 124. (See attachment 1.1.7. Ranking of 156 Districts based on Physical Infrastructure Factor, and appendix 1.1.2. Strength and Weaknesses of 156 Districts by Factors and Variables).

Graph IV.11 shows the top ten and bottom ten districts for the Physical Infrastructure Factor. The districts at the top end of the ranking are in these positions because they possess a relatively high level of infrastructure, or because their main infrastructure facilities such as seaports and airports are highly accessible, and are of good quality. In geographical and geo-economic terms, the top-rated districts are those that are located in economic growth centers, or serve as support zones to large urban areas.

Gresik is ranked first because it has the entire necessary infrastructure, which is of good quality (there is a proper balance between availability and quality). Gresik acts as a buffer region to Surabaya Municipality. The same conditions apply to Bekasi (which is in second place) and Tangerang (in eighth place), both of which directly border Jakarta and serve as buffer regions to the capital. They are also valid for Gianyar (third), which has a similar relationship with Denpasar.

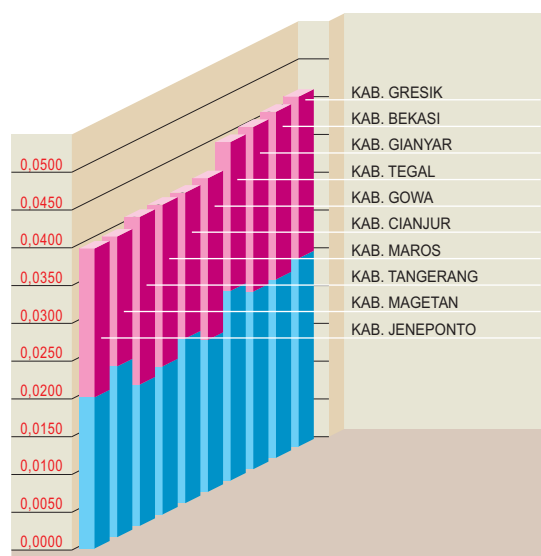
The centers of economic growth, which have comprehensive, good-quality infrastructure facilities, exert a so-called agglomeration effect on the surrounding regions; this enables the border zones to benefit from the superior infrastructure of the economic growth centers they serve. It is not only districts that lie adjacent to economic growth centers that stand to gain in this way. The regions that are located along major distribution lines also get good ratings for the Physical Infrastructure factor. This can be seen from the case of Tegal (in fourth position), which is situated on the main distribution/trade line in Java. This district also benefits from its position between Jakarta and Semarang, two major municipalities that are among the largest centers of economic growth in Indonesia. Tegal's high rating is not solely attributable to geography, however. The local government there also appears to be committed to developing the physical infrastructure of the region, as reflected in its relatively high Development Budget-Regional Budget Ratio

infrastruktur fisik. Hal ini terlihat dari besarnya rasio antara anggaran pembangunan dalam APBD-nya.

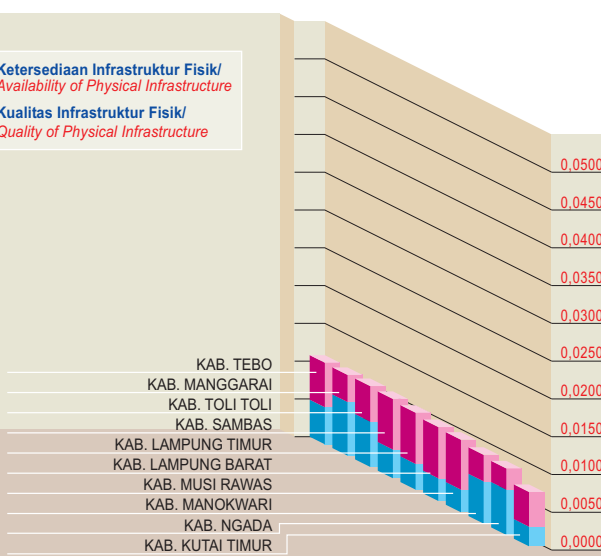
indicator (part of the Regulation & Government Service factor).

Grafik/Chart IV.11 Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/ Rating of Districts Based on Physical Infrastructure

Grafik/Chart IV.7a
Peringkat 10 Teratas Kabupaten
Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik
The Highest Ten Districts
Based on Physical Infrastructure



Grafik/Chart IV.7b
Peringkat 10 Terbawah Kabupaten
Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik
The Highest Ten Districts
Based on Physical Infrastructure



Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang berada pada peringkat bawah berdasarkan faktor infrastruktur fisik, secara geo-ekonomis berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki kelengkapan dan kualitas infrastruktur baik. Daerah-daerah yang berada di peringkat bawah berdasarkan faktor Infrastruktur Fisik ini biasanya cenderung terpencil, berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, dan tidak dilintasi oleh jalur distribusi/perdagangan antar daerah. Akibatnya daerah-daerah tersebut menjadi kurang berkembang. Kab. Lampung Timur (peringkat ke-119) dan Lampung Barat (peringkat ke-120), yang berada di Propinsi Lampung yang merupakan pintu gerbang jalur darat Pulau Sumatera dari Jawa, berada jauh dari jalan Lintas Sumatra yang merupakan jalur perdagangan utama Sumatera. Akibatnya kedua daerah ini dilihat dari infrastruktur fisiknya tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Propinsi Lampung, bahkan dari hasil pemeringkatan ini berada di peringkat bawah dari 156 Kabupaten di Indonesia. Hal yang sama juga dialami oleh Kab. Sambas peringkat ke-118, Musi Rawas (121), Ngada (123), Manokwari (122), Kutai Timur (124), dan daerah-

Conversely, the districts with the lowest rating for the Physical Infrastructure factor are geo-economically disadvantaged in that they are far away from centers of economic growth, where there is comprehensive, high-quality infrastructure. These regions are usually isolated and poorly developed, and located away from inter-regional distribution/trade lines. Lampung Timur (ranked number 119) and Lampung Barat (number 120), which are in Lampung Province, a province considered to be the gateway of the transportation line between the islands of Sumatra and Java, lie far from the main trade line in Sumatra. The physical infrastructure of these two districts is therefore inferior to that seen in the other regions in Lampung Province, and their ratings for this factor are among the lowest of the 156 districts. The same conditions apply to Sambas (at number 118), Musi Rawas (number 121), Manokwari (number 122), Ngada (number 123), Kutai Timur (number 124), and other regions that receive low scores for the Physical Infrastructure Factor. The advent of regional autonomy has, however, provided local governments the opportunity to cooperate with neighboring regions, and to allocate

daerah lainnya yang berada di peringkat bawah untuk Faktor Infrastruktur Fisik, secara geoekonomis merupakan daerah yang berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, dan secara geograferis tidak berada di jalur perdagangan utama antar daerah. Otonomi daerah memberikan peluang kepada pemda setempat untuk menjalin kerja sama dengan daerah sekitarnya serta untuk mengalokasikan lebih besar dana APBD untuk pembangunan infrastruktur fisik. Dengan demikian daerah-daerah ini dapat memperoleh akses yang lebih baik ke pusat pertumbuhan ekonomi, atau bahkan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peringkat 156 Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik dapat dilihat pada Lampiran 1.1.2; Lampiran 1.1.7; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.1.5.

more funds for physical infrastructure development. Thus, these regions will be able to gain better access to the centers of economic growth, or even to become new centers of economic growth (See appendix 4.6.1.5. Score of Factor, Variable and Indicator of Physical Infrastructure of 156 Districts)

A.6.2. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

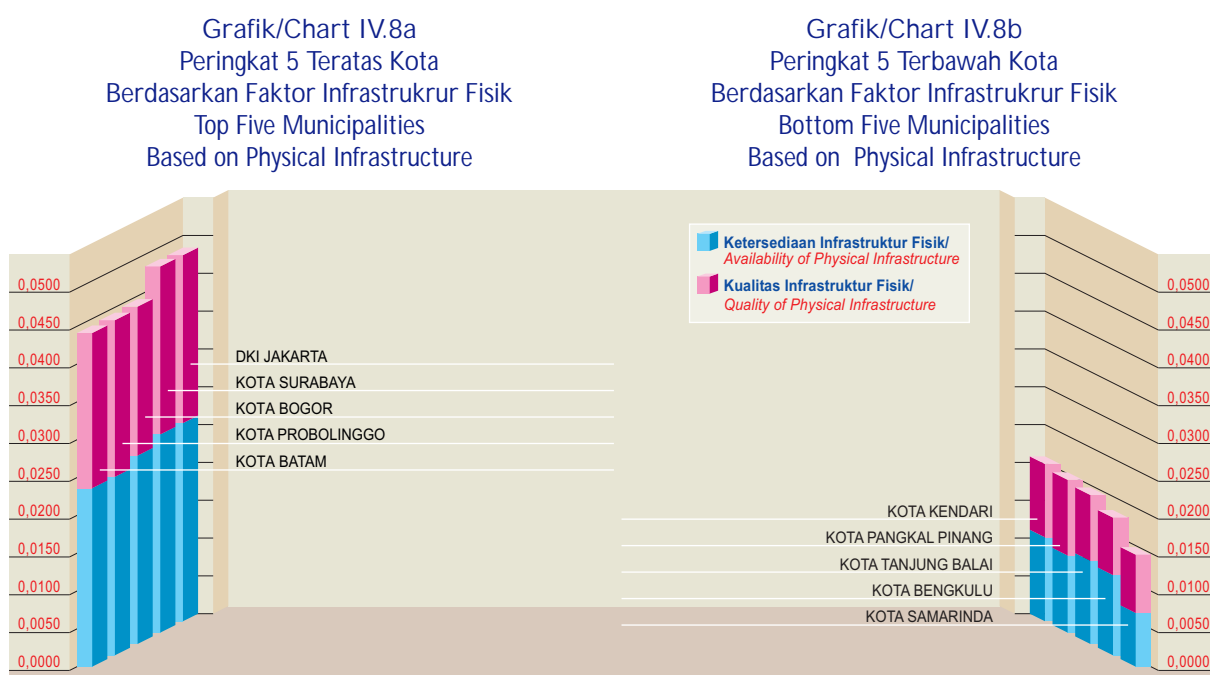
Dari 44 kota dihasilkan 42 peringkat karena ada 2 (dua) peringkat yang diisi oleh masing-masing 2 (dua) kota dengan nilai sama. Urutan 42 peringkat tersebut dihasilkan dari penilaian 10 (sepuluh) indikator yang dikelompokkan dalam variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik dan Kualitas Infrastruktur Fisik. Peringkat pertama diraih DKI Jakarta dengan score 0,0484, diikuti Kota Surabaya (0,0480), Kota Bogor (0,0446), Kota

A.6.2. Ranking of Municipalities Based on The Physical Infrastructure

For this factor, there are 42 ranks encompassing 44 municipalities; there are two pairs of municipalities with the same total values. The rankings are tabulated from the scores gained for the ten indicators grouped under the Availability of Physical Infrastructure and Quality of Physical Infrastructure variables. The leading municipality for this factor is the Special Capital Region of Jakarta, with a score of 0.0484, followed by Surabaya (0.0480), Bogor (0.0446),

Grafik/Chart IV.12

Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik/ Rating of Municipalities Based on Physical Infrastructure



Probolinggo (0,0443), dan Kota Batam (0,0441).

Dari kelima kota tersebut hampir tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal ketersediaan maupun kualitas infrastruktur Jalan, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, Telepon dan Listrik. Score sedikit lebih baik DKI dalam hal Pelabuhan Udara dibandingkan Kota Surabaya dan kota-kota lainnya, menempatkan DKI Jakarta dalam peringkat tertinggi kategori ini. Namun patut mendapat perhatian DKI Jakarta tentang kemacetan lalu lintas yang parah hampir di semua ruas jalan utama – yang tidak dinilai dalam pemeringkatan ini – mesti dibenahi dengan perbaikan yang mendasar sehingga kelak tidak akan mengakibatkan hambatan bagi masuknya investasi.

Urutan 5 (lima) kota peringkat terbawah tidak satupun diduduki kota di Pulau Jawa yang memang diuntungkan selama ini oleh proses pembangunan. Kota Samarinda di Kalimantan Timur menempati urutan terbawah dalam kategori ini dengan score 0,0148, disusul berurutan ke atas Kota Bengkulu (0,0182), Kota Tanjung Balai (0,0197), Kota Pangkal Pinang (0,0202), dan Kota Kendari (0,0208). Faktor Ketersediaan Jalan untuk transportasi darat masih menjadi kendala serius bagi Kota Samarinda untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di kota ini, demikian juga kurangnya Ketersediaan Telepon dan Listrik; hal yang hampir sama dialami Kota Bengkulu.

Dari perbedaan score yang mencolok antara 5 (lima) peringkat teratas dan terbawah semakin menegaskan adanya perbedaan perhatian pembangunan selama ini, karena pada dasarnya indikator-indikator dalam faktor Infrastruktur Fisik ini merupakan “anugerah” preferensi kekuasaan selama orde baru dalam kebijakan pembangunannya. Peringkat 44 Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik dapat dilihat pada Lampiran 1.2.2; Lampiran 1.2.7; dan untuk Score masing-masing Faktor, Variabel, dan Indikator dapat dilihat pada Lampiran 4.6.2.5.

B. Perubahan Peringkat 2002 - 2003

Faktor, Variabel, dan Indikator yang digunakan untuk pemeringkatan tahun 2003 sama dengan yang digunakan untuk pemeringkatan tahun 2002. Bobot masing-masing indikator, variabel, maupun faktornya juga tetap dipertahankan, dimaksudkan agar dapat diperbandingkan hasil pemeringkatan dari dua tahun ini. Perubahan yang dilakukan hanyalah

Probolinggo (0.0443) and Batam (0.0441).

There are no significant differences among these five municipalities in terms of their scores for either the availability or the quality of Road Infrastructure, Seaports, Airports, Telephone and Electricity. The Special Capital Region of Jakarta gains the same scores as Surabaya in all indicators apart from Quality of Airport, thus placing it in the top position. However, Jakarta must take action to rectify the worsening traffic conditions on almost every main road – something that is not evaluated in this rating – by conducting basic repair work so that this problem does not deter potential investors.

Not a single municipality in Java is ranked in the bottom five for the Physical Infrastructure factor. This is unsurprising, since Java has traditionally benefited the most from the development process. With a score of 0.0148, Samarinda Municipality in East Kalimantan occupies the lowest rank for this factor. Above Samarinda, we find Bengkulu (0.0182), Tanjung Balai (0.0197), Pangkal Pinang (0.0202), and Kendari (0.0208). The poor Availability of Roads, Telephone and Electricity indicators constitute serious obstacles to attracting investors to Samarinda. Similarly, Bengkulu has problems with its electricity service and with the quality of its seaport.

The striking gap between the scores gained by the top five and bottom five municipalities is testament to the fact that there has been partiality in the government's development policy over the years. For urban areas, high values for the Physical Infrastructure indicators show, at least in part, that the municipality in question was a beneficiary of the New Order regime's development policy. (See appendix 1.2.7. Ranking of 44 Municipalities based on Physical Infrastructure Factor, appendix 1.2.2. Strength and Weaknesses of 44 Municipalities by Factors and Variables, and appendix 4.6.2.5. Score of Factor, Variable and Indicator of Physical Infrastructure of 44 Municipalities).

B. Changes In Rating From 2002 to 2003

The factors, variables and indicators used to calculate the investment attractiveness ratings in 2003 are the same as those applied in 2002. The weights of all indicators, variables and factors have also been maintained to allow for a true comparison of the rating results from the two years. The only change that has been made is the addition of a further 66 regions to the 2003 survey. The 2003

penambahan jumlah daerah yang diperingkat, yakni pada tahun 2002 berjumlah 134 Kabupaten/Kota sementara untuk tahun 2003 bertambah 66 daerah menjadi 200 daerah. Penambahan daerah yang diperingkat inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab perubahan peringkat daerah dalam daya tarik investasi, selain score masing-masing daerah yang berubah.

B.1. Perubahan Peringkat Kabupaten

Dilihat dari rata-rata yang score masing-masing daerah, rata-rata score untuk Kabupaten pada pemeringkatan tahun 2003 lebih baik dibandingkan tahun 2002. Pada tahun 2002 rata-rata score adalah 0,1791, sementara untuk tahun 2003 sebesar 0,1828. Score tertinggi untuk tahun 2003 diraih oleh Kab. Purwakarta yakni sebesar 0,3273 lebih tinggi dibandingkan score tertinggi tahun sebelumnya yang diraih oleh Kab. Daiiri yakni sebesar 0,2796.

B.1.1. Kelompok 10 Daerah Kabupaten Peringkat Teratas

Pada kelompok daerah yang menempati peringkat 10 teratas pada pemeringkatan tahun 2003, empat Kabupaten diantaranya adalah daerah baru yang pada pemeringkatan tahun 2002 belum diperingkat yakni, Kab. Purwakarta, Kab. Bulungan, Kab. Enrekang dan Kab. Jeneponto. Selain kabupaten-kabupaten baru, kabupaten pada pemeringkatan lama yang pada tahun 2002 belum berada pada peringkat atas, menggeser posisi daerah-daerah yang tahun lalu berada pada peringkat atas. Keberhasilan daerah-daerah tersebut masuk dalam peringkat 10 teratas karena adanya perbaikan di beberapa variabel/indikator khususnya yang mempunyai bobot besar.

Kab. Magetan naik 60 peringkat dari peringkat ke-62 pada tahun 2002 menjadi peringkat ke-2 pada tahun 2003, dan Kab. Kuningan dari peringkat ke-76 naik ke peringkat ke-5. Peningkatan peringkat daerah-daerah tersebut ke kelompok daerah peringkat teratas disebabkan perubahan di sejumlah indikator pemeringkatan yang mereka miliki terutama pada indikator-indikator yang mempunyai bobot besar. Keberhasilan Kab. Magetan menaikkan peringkat disebabkan peningkatan pada 21 indikator dari 42 indikator untuk pemeringkatan ini. Peningkatan indikator-indikator pada faktor Kelembagaan dan Faktor Sosial Politik yang mempunyai bobot 31% dan 26% merupakan kontribusi terbesar perubahan peringkat daerah tersebut. Dari 42 indikator, penurunan hanya terjadi pada 4

rating therefore encompasses a total of 200 regions, compared with the 134 districts and municipalities that were assessed in the 2002 survey. The increase in the number of rated regions is one of the reasons why a given region might have moved up or down in the rankings table, while any changes to its scores will also have affected its position.

B.1. Changes to the Ranking of Districts

The average overall score for the districts included in the 2003 rating has risen to 0.1828, from the 0.1791 average recorded in 2002. At 0.3273, Purwakarta District receives the highest score in the 2003 general rating; the top district in 2002 was Daiiri, which scored 0.2796.

B1.1. Districts in the Top Ten Ranks

Of the eleven districts that fill the ten leading ranks in the 2003 rating, four (Purwakarta, Bulungan, Enrekang and Jeneponto) are new entrants, i.e. they were not included in the 2002 survey. The upper end of the 2003 ratings table also contains a number of districts that have managed to raise their ratings significantly since 2002. The success of these regions can be attributed to improvements in several different variables and indicators, and particularly to those that have substantial weightings.

Magetan District surges ahead by 60 places; having occupied the 62nd spot in 2002, it is now ranked second. Magetan's stellar performance is caused by a rise in its ratings for 21 out of the 42 indicators. Its increased scores for the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, which are weighted at 31% and 26%, respectively, are the most substantial contributors to the ranking. Only in four relatively small indicators – Strikes, Availability of Seaport, Quality of Roads and Quality of Seaport – does Magetan record a decrease in scores, while its score for the remaining 17 indicators are unchanged.

Tabel/Table IV.1.
Perubahan Peringkat 5 Kabupaten
dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2003/
Changes in the Rankings of Five of the Top Ten Districts in the 2003 Rating

Keterangan	Tahun	Kabupaten MAGETAN	Kabupaten JEMBRANA	Kabupaten KUNINGAN	Kabupaten BARITO UTARA	Kabupaten BANGGAI
	<i>Year</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>
Peringkat <i>Rankings</i>	2003	2	4	5	7	10
	2002	62	29	76	39	13
Kelembagaan/Regulation <i>& Government Service</i>	2003	0,1024	0,1068	0,1021	0,1058	0,0918
	2002	0,0369	0,0548	0,0502	0,0587	0,0783
Sosial Politik Budaya <i>Socio-Political</i>	2003	0,1154	0,0924	0,1026	0,0754	0,0854
	2002	0,0623	0,0596	0,0286	0,0389	0,0674
Ekonomi Daerah/Regional <i>Economic Dynamism</i>	2003	0,0181	0,0303	0,0206	0,0482	0,0442
	2002	0,0155	0,0275	0,0156	0,0525	0,0410
Ketenagakerjaan <i>Labor & Productivity</i>	2003	0,0226	0,0234	0,0148	0,0181	0,0165
	2002	0,0150	0,0268	0,0174	0,0200	0,0195
Infrastruktur Fisik <i>Physical Infrastructure</i>	2003	0,0398	0,0309	0,0396	0,0294	0,0342
	2002	0,0260	0,0293	0,0262	0,0138	0,0246
TOTAL SCORE	2003	0,2983	0,2838	0,2797	0,2769	0,2721
	2002	0,1557	0,1980	0,1380	0,1839	0,2308

Arti warna : **Hijau**: menandakan kenaikan score; **Merah**: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: **Green** signifies an increased score; **Red** signifies a decreased score; **White/No Color** signifies no change.

indikator dengan bobot yang kurang besar yakni indikator intensitas unjuk rasa, akses terhadap pelabuhan laut, kualitas jalan dan kualitas pelabuhan laut, sementara 17 indikator yang lain tidak mengalami perubahan.

Peringkat Kab. Kuningan naik karena dari 5 Faktor Pemeringkatan, 4 Faktor diantaranya mengalami peningkatan, yakni Faktor Kelembagaan, Faktor Sosial Politik, Faktor Ekonomi Daerah, dan Faktor Infrastruktur Fisik. Sementara satu faktor yang mengalami penurunan adalah Faktor Tenaga Kerja. Untuk Faktor Kelembagaan peningkatan terjadi pada variabel Aparatur dan Pelayanan dan variabel Kepastian Hukum, yakni dengan peningkatan pada 9 indikator dari 11 indikator yang ada. Penurunan pada faktor Ketenagakerjaan disebabkan oleh menurunnya intensitas indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif, indikator Biaya Tenaga Kerja berdasarkan aturan formal, dan indikator Produktivitas Tenaga Kerja. Indikator biaya tenaga kerja Kab. Kuningan menurun karena pada tahun 2003 daerah menaikkan UMP/UMK, dengan demikian biaya tenaga kerja menjadi

Similarly, Kuningan jumps from 76th position to fifth place in 2003, thanks to its increased ratings for four of the five factors: Regulation & Government Service, Socio-Political, Regional Economic Dynamism and Physical Infrastructure. The improved score for the important Regulation & Government Service factor is the result of increased marks for the Quality of Civil Service and Legal Certainty variables, which contain six of the nine indicators that make up this factor. The Labor & Productivity factor is the only one where Kuningan's performance has deteriorated. This is due to its reduced scores for the Productive Age, Normative Wage and Productivity indicators. In 2003, there was an increase in the UMP/UMK (Provincial/Municipal Normative Wage) in the area, which increased the cost of labor and reduced Kuningan's competitiveness vis-à-vis other regions.

meningkat sehingga menurunkan daya saingnya dibandingkan daerah lainnya.

Sementara beberapa daerah yang pada pemeringkatan tahun 2002 yang berada pada kelompok peringkat atas, juga mengalami perubahan di tahun 2003 ini. Perubahan yang terjadi pada kelompok 10 daerah kabupaten peringkat atas pada tahun 2002 tersebut terjadi karena adanya penurunan dan kenaikan di beberapa indikator pemeringkatan yang mereka miliki. Penurunan beberapa indikator penting pada daerah kelompok 10 teratas di tahun 2002, telah mengakibatkan penurunan score total yang mereka peroleh, sehingga peringkat daerah-daerah ini juga mengalami penurunan untuk tahun 2003.

Meanwhile, some of the districts that ranked in the top ten in 2002 also experience significant rating changes in 2003. Again, this is caused by decreased scores in several indicators, as well as by the entry of other, more competitive, districts to the ratings list.

Tabel/Table IV.2
Perubahan Peringkat 6 Kabupaten
dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2002/
Changes in the Rankings of Six of the Top Ten Districts in the 2002 Rating

KETERANGAN	Tahun	Kabupaten DAIRI	Kabupaten BEKASI	Kabupaten PEMALANG	Kabupaten GIANYAR	Kabupaten BADUNG	Kabupaten KUTAI KERTA- NEGARA
	<i>Year</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>
Peringkat	2002	1	2	4	5	8	10
<i>Rankings</i>	2003	55	31	132	29	33	80
Kelembagaan/ <i>Regulation</i> & <i>Government Service</i>	2002	0,0989	0,0437	0,0804	0,0724	0,0630	0,0617
	2003	0,0684	0,0437	0,0411	0,0815	0,0725	0,0523
Sosial Politik Budaya <i>Socio-Political</i>	2002	0,0947	0,0720	0,0973	0,0881	0,0753	0,0873
	2003	0,0511	0,0346	0,0322	0,0598	0,0470	0,0328
Ekonomi Daerah/ <i>Regional</i> <i>Economic Dynamism</i>	2002	0,0387	0,0602	0,0213	0,0297	0,0434	0,0485
	2003	0,0425	0,0602	0,0176	0,0321	0,0455	0,0404
Ketenagakerjaan <i>Labor & Productivity</i>	2002	0,0154	0,0453	0,0240	0,0243	0,0189	0,0172
	2003	0,0094	0,0490	0,0120	0,0168	0,0273	0,0209
Infrastruktur Fisik <i>Physical Infrastructure</i>	2002	0,0319	0,0396	0,0286	0,0319	0,0395	0,0222
	2003	0,0208	0,0458	0,0202	0,0453	0,0328	0,0228
TOTAL SCORE	2002	0,2796	0,2608	0,2516	0,2464	0,2401	0,2369
	2003	0,1922	0,2333	0,1231	0,2355	0,2251	0,1692

Arti warna : Hijau: menandakan kenaikan score; Merah: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: Green signifies an increased score; Red signifies a decreased score; White/No Color signifies no change.

Kab. Dairi yang pada tahun 2002 berada pada peringkat pertama untuk kelompok kabupaten, pada tahun 2003 turun ke peringkat 55. Penurunan peringkat ini terjadi terutama karena adanya kemerosotan indikator-indikator pada faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Fisik, sementara untuk faktor Ekonomi

Dairi, the number one district in 2002, plunges to the 55th slot in the 2003 rating. It suffers lower scores for the Regulation & Government Service, Socio-Political, Labor & Productivity and Physical Infrastructure factors, although it does see a somewhat improved Regional Economic

Daerah mengalami sedikit perbaikan. Sebagai gambaran, dari 42 indikator pemeringkatan, Kab. Dairi mengalami penurunan di 20 indikator, dan 13 diantaranya disumbang oleh indikator yang tergabung pada faktor Kelembagaan dan Sosial Politik. Sementara kenaikan hanya terjadi pada 6 indikator yang lebih banyak pada faktor infrastruktur fisik dan ketenagakerjaan. Penurunan score sejumlah indikator dengan bobot besar tersebut secara otomatis mengakibatkan penurunan score totalnya secara cukup tajam yakni dari 0,2796 di tahun 2002 menjadi 0,1922 di tahun 2003. Penurunan score di sejumlah indikator tersebut tidak disertai dengan peningkatan pada indikator lain secara signifikan.

Penurunan peringkat paling drastis dialami oleh Kab. Pematang, yakni dari peringkat ke-4 di tahun 2002 menjadi berada pada peringkat ke-132 di tahun 2003. Penurunan peringkat Kab. Pematang ini terjadi karena seluruh faktor pemeringkatan yang dimilikinya mengalami penurunan, sehingga score total yang dimilikinya pun turun dari 0,2516 menjadi 0,1231. Jika dilihat ke tiap-tiap indikatornya, ternyata 21 indikator yang dimiliki oleh Kab. Pematang mengalami penurunan, dan hanya ada 5 indikator yang mengalami perbaikan yakni 2 pada Faktor Tenaga Kerja dan 3 lainnya dari Faktor Infrastruktur Fisik. Dari 21 indikator yang mengalami penurunan 14 diantaranya merupakan indikator yang tergabung dalam faktor Kelembagaan dan Sosial Politik yang memiliki bobot besar, diantaranya yaitu, indikator aparatur dan pelayanan, kepastian hukum, keamanan, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Wajar sekali jika kemudian peringkat daerah ini mengalami penurunan secara drastis.

Perubahan yang tidak cukup banyak terjadi pada Kab. Bekasi, Gianyar dan Badung, sehingga peringkat ketiga daerah masih tergolong dalam peringkat atas yakni berada pada kisaran peringkat 30 teratas. Untuk faktor kelembagaan dan ekonomi daerah Kab. Bekasi tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada Kab. Bekasi adalah pada faktor sosial politik yang dinilai oleh para pelaku usaha di sana mengalami penurunan. Sementara untuk Faktor Tenaga Kerja dan infrastruktur fisik mengalami peningkatan. Menurut para pelaku usaha Kab. Bekasi, penurunan faktor sosial politik disebabkan adanya peningkatan gangguan keamanan terhadap kegiatan usaha maupun kepada masyarakat, sementara aparat keamanan dinilai kurang cepat dalam menangani gangguan keamanan. Walau demikian para pelaku usaha di Kab. Bekasi menilai

Dynamism factor. In a nutshell, out of 42 indicators, Dairi receives decreased scores for 20, 13 of which fall under the weighty Regulation & Government Service and Socio-Political factors. This district manages to improve its score, albeit only slightly, for just six indicators that belong to the Labor & Productivity and Physical Infrastructure factors. All in all, Dairi's total score drops from 0.2796 in 2002 to 0.1922 in 2003.

The most drastic ranking decline involves Pematang, which falls from fourth place in the 2002 rating to number 132 in 2003. Its ratings are lower for all five factors, and, at 0.2516, its overall score is less than half of the previous year's 0.1231. Pematang gets reduced marks for 21 indicators, and higher values for only five indicators – two of these come under the Labor & Productivity factor and three belong to the Physical Infrastructure factor. Of the 21 reduced indicators, 14 fall within the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, and represent a relatively large proportion of the scores used to tabulate the general ratings. They include Quality of Civil Service, Legal Certainty, Security and Political Stability. Hence, it is unsurprising that this region experiences such a dramatic loss of rank.

Bekasi, Gianyar and Badung also move down in the most recent rankings. Bekasi, which falls from second place to number 31, has unchanged scores for the Regulation & Government Service and Regional Economic Dynamism factors, and increased marks for the Labor & Productivity and Physical Infrastructure factors. The change in its rating is therefore wholly attributable to the local business community's sharply diminished view of some of the indicators that form the Socio-Political factor. According to the survey results, there has been an escalation of security disturbances affecting both business activities and the local community, and this problem has been amplified by the slow response of security officers. Nevertheless, business operators in Bekasi say that there were fewer strikes in 2003 than in 2002, that political stability in the area has improved, and

bahwa kegiatan unjuk rasa pada tahun 2003 berkurang dibandingkan dengan tahun 2002. Demikian juga dengan stabilitas politik daerah juga semakin baik, dan masyarakat lebih terbuka terhadap kegiatan usaha.

Kab. Gianyar mengalami sedikit peningkatan untuk faktor Kelembagaan, Ekonomi Daerah, dan Infrastruktur Fisik. Sementara penurunan terjadi pada faktor Sosial Politik dan Tenaga Kerja. Menurut para pelaku usaha di Kab. Gianyar, perubahan yang terjadi pada faktor Kelembagaan adalah dengan turunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan birokrasi, berkurangnya pungutan liar di luar birokrasi, serta adanya perubahan dalam pungutan daerah. Sementara pada faktor ekonomi daerah, terjadi peningkatan pada kontribusi sektor tersier terhadap perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan iklim usaha sektor perdagangan dan jasa pariwisata di daerah ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

that the local community shows a high degree of openness towards business activities.

Gianyar District sees modest gains in its ratings for the Regulation & Government Service, Regional Economic Dynamism and Physical Infrastructure factors, and falls in its Socio-Political and Labor factors. The rating for the Regulation & Government Services factor benefits from decreased use of authority in the provision of local government services, the reduction of levies sought by parties outside the bureaucracy, and an adjustment in local user charges. Under the Regional Economic Dynamism factor, the region obtains a higher score for the Tertiary Sector Added Value indicator, which points to an improvement in the business climate in the trade and tourism service sectors.

B.1.2. Kelompok 10 Daerah Kabupaten Peringkat Terbawah

Pada kelompok 10 daerah peringkat terbawah untuk rating tahun 2003, empat diantaranya merupakan daerah baru pada pemeringkatan tahun ini, yaitu Kab. Bondowoso, Kab. Bantul, Kab. Jember, dan Kab. Ponorogo. Empat daerah ini berada pada peringkat terbawah karena secara rata-rata nilai indikator untuk pemeringkatan ini rendah. Sementara daerah-daerah lain yang berada pada peringkat terbawah untuk tahun 2003 ini tidak banyak berubah. Sedikit perubahan yang terjadi pada kelompok 10 daerah peringkat terbawah untuk tahun 2003 jika dibandingkan dengan hasil pemeringkatan tahun 2002. Dengan mengabaikan kehadiran daerah-daerah baru pada pemeringkatan tahun ini, tampak bahwa diantara daerah-daerah yang berada pada kelompok bawah ini saling tukar posisi namun tidak beranjak ke peringkat yang lebih baik secara signifikan (Lihat Tabel IV.3. di bawah).

Kab. Bima yang pada pemeringkatan tahun 2002 berada pada peringkat terbawah (91), untuk tahun 2003 walaupun tidak berada pada peringkat paling bawah tetapi tetap berada pada kelompok 10 daerah peringkat terbawah. Secara keseluruhan Kab. Bima mengalami peningkatan score total dari 0,1117 pada tahun 2002 menjadi 0,1160 pada tahun 2003. Kenaikan score total Kab. Bima disumbang dengan sedikit perbaikan pada variabel aparatur

B.1.2. Districts in the Bottom Ten Ranks

The ten lowest ranks include four new entrants in 2003: Bondowoso, Bantul, Jember, and Ponorogo. These four districts get poor scores for most of the indicators assessed. The other six members of this grouping also held very low ranks in 2002. While they have made small shifts within the bottom ten, none of these regions has managed to move up to a significantly higher slot. (This can be seen in the table below.)

Bima, which in 2002 was in last place (number 91), remains near the bottom of the ratings table (139th out of 146) in 2003. Bima's overall score does, however, rise to 0.1138 from 0.1007 in 2002, thanks to small improvements in its scores for the important Quality of Civil Service, Legal Certainty, Security and Socio-Political variables. The scores of two other regions in the lowest ten ranks – Lombok Barat and

Tabel /Table IV.3.
Perubahan Peringkat 6 Kabupaten
dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2003
Changes in the Rankings of Six of the Bottom Ten Districts in the 2003 Rating

KETERANGAN	Tahun	Kabupaten LOMBOK BARAT	Kabupaten BIMA	Kabupaten LAMPUNG TIMUR	Kabupaten LAMPUNG SELATAN	Kabupaten PAMEKASAN	Kabupaten FLORES TIMUR
	<i>Year</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>
Peringkat	2003	136	139	140	143	144	146
<i>Rankings</i>	2002	89	91	90	87	85	85
Kelembagaan/Regulation & Government Service	2003	0,0338	0,0485	0,0215	0,0227	0,0332	0,0228
	2002	0,0302	0,0304	0,0237	0,0318	0,0404	0,0349
Sosial Politik Budaya	2003	0,0349	0,0276	0,0188	0,0383	0,0293	0,0195
<i>Socio-Political</i>	2002	0,0320	0,0260	0,0177	0,0357	0,0357	0,0431
Ekonomi Daerah/Regional	2003	0,0149	0,0125	0,0429	0,0218	0,0134	0,0141
<i>Economic Dynamism</i>	2002	0,0139	0,0177	0,0243	0,0204	0,0130	0,0159
Ketenagakerjaan	2003	0,0095	0,0141	0,0186	0,0125	0,0142	0,0148
<i>Labor & Productivity</i>	2002	0,0112	0,0141	0,0250	0,0145	0,0102	0,0126
Infrastruktur Fisik	2003	0,0229	0,0111	0,0102	0,0148	0,0140	0,0115
<i>Physical Infrastructure</i>	2002	0,0244	0,0125	0,0199	0,0178	0,0260	0,0188
TOTAL SCORE	2003	0,1160	0,1138	0,1120	0,1101	0,1041	0,0827
	2002	0,1117	0,1007	0,1106	0,1202	0,1253	0,1253

Arti warna : Hijau: menandakan kenaikan score; Merah: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: Green signifies an increased score; Red signifies a decreased score; White/No Color signifies no change.

dan pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, kepastian hukum, keamanan dan sosial politik. Peningkatan score ini juga dialami oleh dua daerah lainnya yang berada pada kelompok 10 bawah yaitu Kab. Lombok Barat dan Kab. Lampung Timur. Kedua daerah tersebut mengalami peningkatan untuk indikator-indikator yang tergabung dalam faktor Kelembagaan dan Sosial Politik, dimana kedua faktor ini memiliki bobot yang besar.

Pada kelompok 10 daerah peringkat terbawah ini yang mengalami penurunan score cukup drastis adalah Kab. Pamekasan dan Kab. Flores Timur, dimana kedua daerah ini pada tahun 2002 berada pada peringkat ke-85 - lebih baik dibandingkan dengan Kab. Bima, Lombok Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur - namun karena secara keseluruhan faktor pemeringkatan yang mereka mengalami penurunan, maka score akhir yang mereka capai turun cukup drastis. Kedua daerah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan pada indikator-indikator yang tergabung dalam kelompok faktor Kelembagaan dan Faktor Sosial Politik, disamping beberapa

Lampung Timur – also move up, albeit to a lesser extent. Both these districts gain better ratings for certain indicators within the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, which have heavy weightings.

Pamekasan and Flores Timur, which tied for number 85 in 2002, get sharply lower scores for some of the indicators included in the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, and drop to 144th (last) and 146th place, respectively.

indikator di kelompok faktor lainnya.

Perubahan positif yang sangat drastis terjadi pada Kab. Tasikmalaya, Kab. Ende, dan Kab. Pesisir Selatan. Pada pemeringkatan tahun 2002 yang lalu, ketiga daerah ini termasuk dalam kelompok 10 peringkat terbawah, namun pada pemeringkatan tahun 2003 ini mereka berhasil naik ke peringkat menengah bahkan masuk peringkat

In contrast, Tasikmalaya, Ende and Pesisir Selatan Districts manage to advance significantly in the 2003 rankings. While these three regions were in the lower ten ranks in 2002, they now appear in the upper quartile of the list, with Tasikmalaya in the top ten. (See the table below)

Tabel/Table IV.4.
Perubahan Peringkat 4 Daerah Kabupaten
dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2002
Changes in the Rankings of Four of the Bottom Ten Districts in the 2002 Rating

KETERANGAN	Tahun	Kabupaten ENDE	Kabupaten TASIKMALAYA	Kabupaten BENGKULU SELATAN	Kabupaten PESIR SELATAN
	<i>Year</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>	<i>District</i>
Peringkat <i>Rankings</i>	2002	82	84	86	88
	2003	15	9	125	35
Kelembagaan/Regulation & Government Service	2002	0,0497	0,0443	0,0382	0,0208
	2003	0,1003	0,1041	0,0532	0,0467
Sosial Politik Budaya <i>Socio-Political</i>	2002	0,0350	0,0258	0,0353	0,0369
	2003	0,1024	0,1017	0,0321	0,0819
Ekonomi Daerah/Regional <i>Economic Dynamism</i>	2002	0,0163	0,0195	0,0154	0,0227
	2003	0,0181	0,0193	0,0192	0,0251
Ketenagakerjaan <i>Labor & Productivity</i>	2002	0,0124	0,0121	0,0140	0,0246
	2003	0,0155	0,0122	0,0116	0,0576
Infrastruktur Fisik <i>Physical Infrastructure</i>	2002	0,0190	0,0293	0,0189	0,0131
	2003	0,0242	0,0363	0,0144	0,0134
TOTAL SCORE	2002	0,1324	0,1310	0,1218	0,1181
	2003	0,2605	0,2736	0,1305	0,2247

Arti warna : Hijau: menandakan kenaikan score; Merah: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: Green signifies an increased score; Red signifies a decreased score; White/No Color signifies no change.

atas. (lihat Tabel IV.4. di bawah).

Kab. Ende, mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada seluruh faktor pemeringkatan yang dimilikinya khususnya untuk faktor Kelembagaan dan Sosial Politik, hal ini mendorong score total yang diperolehnya dari 0,1324 menjadi 0,2605 dan menaikkan peringkatnya dari peringkat 82 pada tahun 2002 menjadi peringkat 15 pada tahun 2003 Untuk faktor Kelembagaan, dari 9 indikator yang ada, 6 diantaranya naik dari rata-rata cukup menjadi sangat baik, sementara dua indikatornya tetap dan satu indikator – peraturan daerah mengalami penurunan dari suportif menjadi bisa diterima.

Ende gets higher scores for all factors, and makes especially impressive gains in the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, which boosts its total score from 0.1324 to 0.2605 and brings its ranking up from 82nd in 2002 to 15th in 2003. Under the Regulation & Government Service factor, Ende's scores for six of the nine indicators are elevated from average to very good, while its ratings for two indicators remain the same, and for one indicator – Regional Regulation – it is demoted from supportive to satisfactory.

Perubahan yang luar biasa juga dialami oleh Kab. Tasikmalaya. Walaupun mengalami penurunan pada faktor Ekonomi Daerah, namun peningkatan pada keempat faktor lainnya mampu menaikkan score totalnya dari 0,1310 menjadi 0,2736 dan merubah peringkatnya dari peringkat ke-84, melonjak ke peringkat 9 di tahun 2003. Dari 42 indikator pemeringkatan, Kab. Tasikmalaya, mengalami peningkatan di 21 indikatornya, dan penurunan hanya di 8 indikator yang memiliki bobot kurang besar seperti dalam kelompok faktor ketenagakerjaan dan infrastruktur fisik.

B.2. Perubahan Peringkat Kota

Jumlah daerah kota yang diperingkat untuk tahun 2003 bertambah dari 36 Kota menjadi 44 Kota. Rata-rata score total untuk daerah kota mengalami penurunan dari sebesar 0,2239 pada tahun 2002 menjadi 0,1945 pada tahun 2003. Pada tahun 2002 score tertinggi sebesar 0,3146 diraih oleh Kota Semarang, sementara untuk tahun 2003 score tertinggi diraih Kota Batam sebesar 0,2805. Score yang diraih oleh Kota Batam pada rating 2003 ini masih lebih rendah dibandingkan yang diperoleh Kota Balikpapan dan Kota Sawahlunto pada rating 2002 yaitu sebesar 0,2851 dan berada pada peringkat ke-2. Penurunan score rata-rata yang diperoleh daerah-daerah kota di tahun 2003 ini mengindikasikan bahwa di tahun ini terjadi penurunan daya tarik investasi daerah-daerah Kota di Indonesia.

B.2.1. Kelompok 5 Daerah Kota Peringkat Teratas

Dari kelompok 5 Kota yang menempati peringkat teratas untuk rating 2003, satu diantaranya merupakan daerah baru yaitu Kota Cilegon. Dari 5 Kota yang berada di peringkat atas pada tahun 2003 ini hanya Kota Sawahlunto yang mengalami penurunan score total, sehingga peringkatnya turun dari peringkat ke-2 menjadi peringkat ke-5.

Kota Batam pada tahun 2002 menempati peringkat ke-4, pada tahun 2003 ini berhasil menduduki peringkat pertama. Score total yang diperoleh Kota Batam juga mengalami sedikit kenaikan dari 0,2767 di tahun 2002 menjadi 0,2805 pada tahun 2003 ini. Peningkatan score Kota Batam yang hanya sedikit ini karena dari 42 indikator pemeringkatan yang dimilikinya secara merata mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk variabel aparatur dan pelayanan, indikator pelayanan aparatur mengalami penurunan, tetapi untuk penyalahgunaan wewenang mengalami perbaikan. Penurunan pada pelayanan aparatur /

Tasikmalaya's ratings, meanwhile, undergo a sea-change in 2003. In spite of a slight decline in its result for the Regional Economic Dynamism factor, the region manages to more than double its total score from 0.1310 to 0.2736 thanks to its higher ratings for the other four factors. Thus, it leaps from the 84th spot to number nine in the latest rating. Out of 42 factors, Tasikmalaya achieves higher values for 21 indicators, and decreased scores for eight minor indicators under the Labor & Productivity and Physical Infrastructure factors.

B.2. Changes to the Rankings of Municipalities

The number of rated municipalities increases from 36 to 44 in 2003. Their average overall score declines to 0.1945 in 2003, from 0.2239 in 2002. In 2002, Semarang received the highest score (0.3146), while in 2003, Batam leads the rating with 0.2805. The score gained by Batam in 2003 is also below the previous year's total attained by Balikpapan and Sawahlunto (which ranked joint second with 0.2851). The decline in the average score of municipalities in 2003 indicates a slump in the investment attractiveness of municipalities around Indonesia.

B.2.1. Municipalities in the Top Five Ranks

Another new entrant, Cilegon, succeeds in joining the top five municipalities in the 2003 rating. Of the municipalities in the five highest ranks in 2002, only Sawahlunto get a lower rating in 2003, when it falls from second place to the fifth position.

Batam, which ranked fourth in 2002, moves up to first place in the latest rating. Its total score also improves slightly, from 0.2767 in 2002 to 0.2805 in 2003. Within the Quality of Civil Service variable, its score for the indicator of the same name falls, while its value for the Use of Authority indicator shows an increase. The downgrade of its Quality of Civil Service indicator rating probably occurs because of the ongoing transition of responsibility for providing government services to business players, from the Batam Authority to the municipal government of Batam. This also applies to the Legal Certainty variable, where

birokrasi terjadi barangkali karena saat ini sedang terjadi masa transisi dalam pelayanan birokrasi kepada pelaku usaha di Kota Batam dari pihak Otorita kepada Pemerintah Kota (pemkot) Batam. Hal ini juga berimplikasi pada variabel kepastian hukum dimana indikator konsistensi peraturan dinilai mengalami penurunan, namun untuk penegakan hukum mengalami perbaikan. Sayangnya untuk indikator-indikator keamanan mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan perbaikan pada indikator stabilitas sosial politik seperti konflik masyarakat, intensitas unjuk rasa. Untuk kondisi Ketenagakerjaan di Kota Batam mengalami penurunan baik dari sisi ketersediaan tenaga kerja maupun dari sisi biaya tenaga kerja yang dinilai mahal. Untuk faktor ekonomi daerah Kota Batam tidak mengalami

Batam's score for the Legal Consistency indicator is lower now, although its Law Enforcement indicator score has increased. The improvement in Batam's Socio-Political indicators, such as Social Conflict and Strikes, is cancelled out by its lower scores for some of the indicators under the heavily weighted Security variable. While the region's score for the Labor & Productivity factor is higher than in 2002, its ratings for the Availability of Manpower and Labor Cost variables have gone down.

Tabel/Table IV.5.
Perubahan Peringkat 5 Kota
dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2003
Changes in the Rankings of Four of the Top Five Municipalities in the 2003 Rating

KETERANGAN	Tahun Year	KOTA BATAM Municipality	KOTA CIREBON Municipality	KOTA KEDIRI Municipality	KOTA SAWAHLUNTO Municipality
Peringkat Rankings	2003	1	4	3	5
	2002	4	23	6	2
Kelembagaan/Regulation & Government Service	2003	0,0571	0,0536	0,0487	0,0590
	2002	0,0577	0,0376	0,0448	0,0922
Sosial Politik Budaya Socio-Political	2003	0,0708	0,0590	0,0618	0,0830
	2002	0,0681	0,0258	0,0680	0,0896
Ekonomi Daerah Economic Dynamism	2003	0,0637	0,0676	0,0630	0,0426
	2002	0,0630	0,0617	0,0602	0,0419
Ketenagakerjaan/Regional Labor & Productivity	2003	0,0448	0,0554	0,0555	0,0267
	2002	0,0412	0,0518	0,0517	0,0305
Infrastruktur Fisik Physical Infrastructure	2003	0,0441	0,0328	0,0351	0,0247
	2002	0,0467	0,0351	0,0347	0,0309
TOTAL SCORE	2003	0,2805	0,2684	0,2641	0,2360
	2002	0,2767	0,2120	0,2594	0,2851

Arti warna : Hijau: menandakan kenaikan score; Merah: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: Green signifies an increased score; Red signifies a decreased score; White/No Color signifies no change.

perubahan.

Kota yang pada tahun 2002 tidak masuk kelompok atas di tahun 2003 ini melesat ke peringkat atas adalah Kota Cirebon yakni dari peringkat ke-23 menjadi peringkat ke-2 di tahun 2003 ini. Score total yang diraih Kota Cirebon mengalami peningkatan dari 0,2120 di tahun 2002

A new entrant to the upper end of the ratings table is Cirebon, which jumps from the 23rd slot to second place in the 2003 rating. Cirebon's total score is 0.2684, a marked improvement on the 0.2120 it gained in 2002. Its results increase for 13 indicators, most of which carry heavy

menjadi 0,2684 di tahun 2003. Keberhasilan Kota Cirebon menembus peringkat atas ini karena peningkatan 13 indikator yang dimilikinya, terutama indikator-indikator dengan bobot besar. Sementara hanya mengalami sedikit penurunan pada 4 indikator dengan bobot kurang besar yakni, Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif, UMK, Ketersediaan Jalan, dan Telpon. Indikator-indikator yang secara signifikan mendongkrak score total Kota Cirebon adalah indikator pada variabel Aparatur dan Pelayanan, Penegakan Hukum, Keamanan dan Sosial Politik.

Kota-kota yang pada pemeringkatan tahun 2002 berada pada kelompok peringkat atas, untuk pemeringkatan tahun ini beberapa diantaranya mengalami penurunan peringkat. Penurunan peringkat ini disebabkan oleh turunnya beberapa indikator yang mereka miliki, sehingga score total mereka juga turun. Kota-kota yang tidak mengalami banyak penurunan adalah Kota Sawahlunto, dan Kota Balikpapan, yang pada pemeringkatan tahun 2002 secara bersama-sama menduduki peringkat ke-2. Kota Sawahlunto walupun mengalami penurunan namun masih berada pada kelompok 5 kota peringkat atas. Sementara Kota Balikpapan berada dua tingkat dibawahnya yakni turun 5 peringkat, dari peringkat 2 ke peringkat 7. Namun demikian score total yang diraih oleh Kota Sawahlunto dan Kota Balikpapan mengalami penurunan dibandingkan dengan yang mereka peroleh pada tahun 2002. Balikpapan turun karena empat faktor pemeringkatannya mengalami penurunan dan 1 faktor yakni faktor ekonomi daerah tetap.

Sementara itu, Kota Semarang yang pada rating 2002 berada pada peringkat pertama, pada tahun 2003 turun ke peringkat 10. Hal yang kurang baik dialami oleh Kota Tangerang dan Kota Tegal. Kota Tegal turun dari peringkat ke-3 ke peringkat ke-24, sementara Kota Tangerang dari peringkat ke-5 turun ke peringkat 33. Penurunan peringkat ketiga daerah ini karena total score yang mereka peroleh mengalami penurunan cukup besar yakni Kota Semarang dari 0,3146 menjadi 0,2134, Kota Tegal dari 0,2800 menjadi 0,1933, dan Kota Tangerang dari 0,2635 menjadi 0,1734. Penurunan score total daerah-daerah tersebut patut untuk disayangkan, karena sebagian besar terjadi akibat penurunan score pada variabel-variabel yang tergabung dalam faktor Kelembagaan dan Sosial Politik. Kedua faktor tersebut merupakan variabel yang berkaitan dengan policy pemerintah daerah, seperti dalam hal pelayanan oleh aparatur kepada

weightings and are found under the Quality of Civil Service, Law Enforcement, Security and Socio-Political variables. This municipality experiences a slight drop for four comparatively minor indicators, namely Productive Age Manpower, Normative Wages, Availability of Roads and Availability of Telephone.

Conversely, some of the municipalities that held high ranks in 2002 register substantial falls in 2003. Semarang, which placed first in 2002, drops to tenth position in the latest rating. Tangerang and Tegal, meanwhile, experience serious ratings declines. Tegal falls to the 24th slot from its former third place, while Tangerang, which was previously at number five, is now ranked 33rd. These three municipalities' rankings have dropped because they all receive significantly lower total scores in 2003 – Semarang falls from 0.3146 to 0.2134, Tegal goes from 0.2800 to 0.1933, and Tangerang drops from 0.2635 to 0.1734.

The deterioration of the overall scores of these regions is particularly regrettable in light of the fact that much of it derives from the Regulation & Government Service and Socio-Political factors. These factors are closely related to local government policy, in that they comprise indicators such as Quality of Civil Service, Law Enforcement, Extortion, Legal Consistency and Speed of Security Officers. We can therefore conclude that in each of these municipalities, the local government apparatus is failing to create a favorable investment climate.

Semarang gets lower scores in 2003 for 19 out of 42 indicators, and higher values for only three. Tegal's scores go up for six indicators, while its results for 25 indicators fall. For Tangerang, the story is much the same: improved scores in three indicators, and a decline in 23 indicators. These statistics prove conclusively that these formerly top-rated municipalities have made insufficient efforts to remain attractive to investors.

dunia usaha, penegakkan hukum, pungli oleh birokrasi, konsistensi peraturan, dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Two municipalities that have also slipped in the rankings, but to a lesser extent, are Sawahlunto and Balikpapan, which were ranked joint second in 2002. Although it is now in a lower position,

Tabel /Table IV.6.
Perubahan Peringkat 4 Kota
dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2002
Changes in the Rankings of Four of the Top Five Municipalities in the 2002 Rating

KETERANGAN	Tahun <i>Year</i>	KOTA SEMARANG <i>Municipality</i>	KOTA BALIKPAPAN <i>Municipality</i>	KOTA TEGAL <i>Municipality</i>	KOTA TANGERANG <i>Municipality</i>
Peringkat <i>Rankings</i>	2002	1	2	3	5
	2003	10	7	24	33
Kelembagaan/Regulation <i>& Government Service</i>	2002	0,0733	0,0645	0,0731	0,0551
	2003	0,0559	0,0401	0,0731	0,0433
Sosial Politik Budaya <i>Socio-Political</i>	2002	0,1033	0,0709	0,1023	0,0697
	2003	0,0358	0,0391	0,0442	0,0307
Ekonomi Daerah/Regional <i>Economic Dynamism</i>	2002	0,0488	0,0652	0,0308	0,0457
	2003	0,0495	0,0652	0,0246	0,0492
Ketenagakerjaan <i>Labor & Productivity</i>	2002	0,0436	0,0481	0,0377	0,0487
	2003	0,0310	0,0472	0,0192	0,0183
Infrastruktur Fisik <i>Physical Infrastructure</i>	2002	0,0456	0,0364	0,0361	0,0443
	2003	0,0412	0,0289	0,0322	0,0319
TOTAL SCORE	2002	0,3146	0,2851	0,2800	0,2635
	2003	0,2134	0,2205	0,1933	0,1734

Arti warna : Hijau: menandakan kenaikan score; Merah: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: Green signifies an increased score; Red signifies a decreased score; White/No Color signifies no change.

Penurunan score ketiga kota diatas terjadi karena hampir seluruh indikator yang mereka miliki mengalami penurunan. Kota Semarang mengalami penurunan 19 indikator dari 42 indikator permeringkatan, dan hanya meningkat di 3 indikator. Kota Tegal hanya meningkat di 6 indikator sedangkan penurunan terjadi pada 25 indikatornya. Kota Tangerang tidak jauh berbeda dengan Semarang dan Tegal, yakni dengan meningkat di 3 indikator dan turun di 23 indikatornya. Tampak sekali bahwa daya tarik daerah Kota terhadap investasi pada tahun 2003 ini secara rata-rata mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari kondisi tiap-tiap indikator daerah-daerah yang berada pada peringkat atas. Walaupun mereka berada pada peringkat atas namun banyak mengalami penurunan di sejumlah indikatornya.

Fenomena menarik dari kota-kota yang

Sawahlunto still features in the top five. Meanwhile, Balikpapan is now two places below Sawahlunto, at number seven. Both municipalities have experienced an erosion of their total scores, compared with 2002. Balikpapan now gets lower scores for four factors, while its score for the Regional Economic Dynamism factor remains unchanged.

It is interesting to note that some of the municipalities that occupied the top slots in the 2002 rating – and are now in lower positions – manage to improve their results for the Regional Economic Dynamism factor in 2003, thanks to their increased ratings for the Human Development Index (HDI). This also applies to several other municipalities across Indonesia.

tahun 2002 berada pada peringkat atas ini adalah adanya kenaikan pada faktor Ekonomi Daerah. Kenaikan faktor ini disumbang oleh adanya kenaikan pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti bahwa pada tahun 2003 ini rata-rata IPM kota-kota di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B.2.2. Kelompok 5 Daerah Kota Peringkat Bawah

Ada dua daerah yang pada tahun 2002 berada pada kelompok atas merosot ke peringkat bawah pada tahun 2003 ini. Dua daerah tersebut adalah Kota Pekalongan dari peringkat 10 di tahun 2002 turun ke peringkat 43, dan Kota Bekasi dari peringkat 13 turun ke peringkat 44. Pekalongan mengalami kemerosotan pada seluruh faktor pemeringkatan yang dimilikinya sehingga score total yang diraih juga turun drastis dari 0,2479 di tahun 2002 menjadi 0,1426 di tahun 2003. Untuk Kota Bekasi peningkatan pada faktor Ekonomi Daerah tidak mampu meningkatkan peringkatnya, bahkan karena penurunan tajam pada empat faktor yang lain mengakibatkan score total yang

B2.2. Municipalities in the Bottom Five Ranks

Two municipalities that were in the top 15 in 2002 drop to the bottom of the ratings table in 2003. Pekalongan, which ranked tenth in 2002, is now found at number 42, while Bekasi falls from 13th place to 43rd. With reduced scores for all factors, Pekalongan's total score drops from 0.2479 in 2002 to 0.1426 in 2003. Bekasi's score for the Regional Economic Dynamism factor increases, but this cannot compensate for its sharp losses in the other four factors, and its total score plunges from 0.2369 to 0.1366. Sukabumi, Bengkulu and Pangkal Pinang, meanwhile, remain at the lower end of the ratings list. Although their scores do rise for certain factors, this is counterbalanced by decreases for other factors.

Tabel /Table IV.7.
Perubahan Peringkat 5 Kota
dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2003
Changes in the Rankings of the Bottom Five Municipalities in the 2003 Rating

KETERANGAN	TAHUN	KOTA SUKABUMI	KOTA BENGKULU	KOTA PANGKAL PINANG	KOTA PEKA-LONGAN	KOTA BEKASI
	<i>Year</i>	<i>Municipality</i>	<i>Municipality</i>	<i>Municipality</i>	<i>Municipality</i>	<i>Municipality</i>
Peringkat	2003	40	41	42	43	44
<i>Rankings</i>	2002	28	34	36	10	13
Kelembagaan/Regulation & Government Service	2003	0,0397	0,0466	0,0293	0,0407	0,0325
	2002	0,0500	0,0483	0,0292	0,0690	0,0640
Sosial Politik Budaya	2003	0,0391	0,0343	0,0365	0,0299	0,0220
<i>Socio-Political</i>	2002	0,0538	0,0353	0,0389	0,0969	0,0695
Ekonomi Daerah/Regional Economic Dynamism	2003	0,0224	0,0277	0,0361	0,0239	0,0325
	2002	0,0196	0,0348	0,0359	0,0247	0,0290
Ketenagakerjaan	2003	0,0269	0,0253	0,0221	0,0222	0,0183
<i>Labor & Productivity</i>	2002	0,0324	0,0190	0,0258	0,0253	0,0348
Infrastruktur Fisik	2003	0,0243	0,0182	0,0202	0,0259	0,0313
<i>Physical Infrastructure</i>	2002	0,0365	0,0237	0,0192	0,0320	0,0396
TOTAL SCORE	2003	0,1524	0,1521	0,1442	0,1426	0,1366
	2002	0,1923	0,1611	0,1490	0,2479	0,2369

Arti warna : **Hijau**: menandakan kenaikan score; **Merah**: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: **Green** signifies an increased score; **Red** signifies a decreased score; **White/No Color** signifies no change.

diraiknya turun dari 0,2369 menjadi 0,1366. Hal tersebut mengakibatkan Kota Bekasi yang pada tahun 2002 berada di peringkat ke-13, merosot tajam ke peringkat paling bawah yakni ke-44.

Untuk tiga daerah lain – Kota Sukabumi, Kota Bengkulu, dan Kota Pangkal Pinang - yang berada pada peringkat bawah pada pemeringkatan tahun 2003 ini, pada tahun sebelumnya memang berada pada kelompok peringkat bawah. Ketiganya tidak banyak mengalami perubahan yang cukup berarti karena kenaikan pada variabel yang satu tidak jauh berbeda dengan penurunan pada variabel lainnya.

Pada kelompok peringkat bawah rating tahun 2002 yang mengalami peningkatan pesat di tahun 2003 hanya Kota Mojokerto, yakni dari peringkat 32 di tahun 2002 melonjak ke peringkat 8 pada tahun 2003. Kenaikan peringkat Kota Mojokerto, disebabkan oleh peningkatan pada faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, dan Infrastruktur Fisik. Peningkatan yang signifikan terjadi pada variabel Aparatur dan Pelayanan, Kepastian Hukum, dan Stabilitas Politik. Namun demikian untuk Faktor Tenaga Kerja, Kota Mojokerto mengalami penurunan

Mojokerto, which was one of the lowest-rated municipalities in 2002, experiences a swift ratings increase in 2003, and jumps from 32nd place to eighth in 2003. Mojokerto's impressive performance is attributable to its increased scores for the Regulation & Government Service, Socio-Political, Regional Economic Dynamism and Physical Infrastructure factors. It gains significantly higher marks for the Quality of Civil Service and Legal Certainty variables and the Political Stability indicator. However, its score for the Labor & Productivity factor falls because of an

Tabel /Table IV.8.
Perubahan Peringkat 3 Kota
dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2002
Changes in the Rankings of Three of the Bottom Five Municipalities in the 2002 Rating

KETERANGAN	Tahun Year	KOTA MOJOKERTO Municipality	KOTA BINJAI Municipality	KOTA PROBOLINGGO Municipality
Peringkat Rankings	2002	32	33	35
	2003	8	39	32
Kelembagaan/Regulation & Government Service	2002	0,0464	0,0441	0,0312
	2003	0,0801	0,0353	0,0407
Sosial Politik Budaya Socio-Political	2002	0,0365	0,0325	0,0365
	2003	0,0497	0,0349	0,0296
Ekonomi Daerah/Regional Economic Dynamism	2002	0,0255	0,0221	0,0300
	2003	0,0290	0,0324	0,0287
Ketenagakerjaan Labor & Productivity	2002	0,0310	0,0384	0,0369
	2003	0,0233	0,0324	0,0341
Infrastruktur Fisik Physical Infrastructure	2002	0,0238	0,0242	0,0262
	2003	0,0334	0,0222	0,0443
TOTAL SCORE	2002	0,1632	0,1613	0,1608
	2003	0,2155	0,1572	0,1774

Arti warna : Hijau: menandakan kenaikan score; Merah: menandakan penurunan score; Putih / Tidak Berwarna: menandakan tidak ada perubahan.

Note: Green signifies an increased score; Red signifies a decreased score; White/No Color signifies no change.

score. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan biaya tenaga kerja, baik berdasarkan upah tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UMK, maupun dari upah aktual. Sementara untuk Kota Binjai dan Kota Probolinggo dapat dikatakan tidak mengalami perubahan peringkat yang cukup berarti.

Adapun daerah-daerah lainnya tidak mengalami perubahan yang luar biasa. Kalaupun ada perubahan hanya terjadi sedikit kenaikan atau penurunan di sejumlah indikator, demikian juga dengan peringkatnya tidak terjadi perubahan besar. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada Kota Binjai dan Kota Probolinggo. Kota Binjai mengalami peningkatan di 10 indikator dan turun pada 12 indikatornya. Hal tersebut menyebabkan score total Kota Binjai mengalami sedikit penurunan dari 0,1613 menjadi 0,1572 di tahun 2003, dan peringkatnya juga turun dari 33 ke peringkat 39. Sebaliknya score total Probolinggo mengalami sedikit peningkatan dari 0,1608 menjadi 0,1774 di tahun 2003, dan menaikkan peringkatnya dari 35 di tahun 2002 menjadi peringkat 32 di tahun 2003. Kenaikan score dan peringkat Kota Probolinggo ini disebabkan oleh peningkatan 11 indikator yang mereka miliki dari rata-rata sedang-kurang menjadi baik-sangat baik, sementara indikator yang turun hanya ada 8 indikator, itupun bukan indikator yang memiliki bobot besar.

increase in labor costs, which is manifested in lower scores for the Actual Wage and Normative Wage indicators.

The overall scores gained by Binjai and Probolinggo, which were also in the lowest five ranks in 2002, show no significant changes, and they remain near the bottom of the list. Their gains and losses are also comparatively well balanced. Binjai receives better scores for ten indicators and lower score for 12 indicators. Its total score declines slightly from 0.1613 to 0.1572, while its ranking falls from 33 (out of 36) to 38 (out of 43). In contrast, Probolinggo's overall score increases from 0.1608 in 2002 to 0.1774 in 2003, while its ranking rises significantly from 35 in 2002 to 31 in 2003. The improvement in Probolinggo's score and ranking stem from its advances in 11 indicators; however, there are also eight relatively lightweight indicators where its score is lower in 2003.

C. Permasalahan Diluar Peringkat

C.1. Permasalahan Pada Faktor Kelembagaan

Pada pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/Kota untuk tahun 2003 ini ditemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor kelembagaan. Beberapa permasalahan yang berhasil ditangkap dalam penelitian ini diantaranya adalah berkaitan dengan biaya-biaya tidak resmi, pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi daerah kepada para pelaku usaha, dan peraturan daerah. Berikut ini adalah beberapa temuan yang berkaitan dengan faktor Kelembagaan.

C.1.1. Biaya-Biaya Tidak Resmi

Hasil penelitian terhadap pelaku usaha di 200 Kabupaten/Kota di Indonesia memperlihatkan bahwa hingga saat ini dunia usaha di Indonesia cukup terbebani dengan berbagai pungutan tidak resmi. Pungutan tidak resmi (pungli) yang dialami oleh pelaku usaha bisa

C. Problems that Fall Outside the Rating Results

C.1. Problems Related to the Regulation & Government Services Factor

In the process of conducting the 2003 survey of the investment attractiveness of 200 districts and municipalities around Indonesia, we uncovered a number of problems related to the Regulation & Government Service factor. Among them are problems connected with illegal fees, the quality of the civil service and local regulations. These findings are detailed below.

C.1.1. Illegal Fees

It can be seen from the research findings that the business community in Indonesia is quite heavily burdened by illegal levies and extortion of various kinds. These unlawful charges can be divided into two distinct origins: within the bureaucracy, and outside of it. The illegal levies

dibedakan menjadi dua, yakni pungutan tidak resmi di lingkungan birokrasi dan pungutan tidak resmi di luar birokrasi. Pungutan tidak resmi di lingkungan birokrasi dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, dan dalam proses peradilan. Pungutan tidak resmi di luar birokrasi dilakukan di lingkungan mereka melakukan kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh aparat keamanan, kelompok masyarakat sekitar, kelompok preman dan sebagainya.

Dilihat dari jenis pungutan tidak resmi yang biasa harus mereka bayar, biaya tidak resmi dalam proses peradilan merupakan biaya tidak resmi yang paling banyak dikeluhkan oleh para responden yakni 13,1% responden, disusul dengan biaya tidak resmi oleh aparat keamanan (11,5% responden), pungli oleh kelompok masyarakat (8,5%) responden, pungli oleh preman sebanyak 6,1% responden, sisanya adalah biaya tidak resmi lainnya. Dilihat dari bidang usahanya, diketahui bahwa responden yang menilai biaya-biaya tidak resmi tinggi bahkan sangat tinggi adalah responden yang bergerak di bidang usaha kehutanan, agroindustri/bisnis (perkebunan dan pertanian pangan), dan pertambangan. Bidang-bidang usaha tersebut rawan terhadap berbagai pungutan oleh banyak pihak selain karena berbasis lahan luas, juga dinilai oleh banyak kalangan sebagai usaha yang diuntungkan oleh “anugerah alam”. Pada sisi yang lain banyak kalangan juga merasa bahwa kegiatan usaha tersebut kurang memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pemerintah daerah setempat maupun bagi masyarakat sekitarnya. Karena basis usahanya yang merupakan “anugerah alam”, siapa saja merasa punya hak untuk memiliki, menguasai, dan paling tidak berhak memperoleh manfaat dari keberadaan “anugerah” tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai pungutan terhadap kegiatan usaha ini. Pungutan tersebut biasa terjadi baik ketika berhubungan dengan pihak birokrasi maupun pada jalur-jalur distribusi hasil produksi, yang dilakukan oleh aparat keamanan, kelompok masyarakat, hingga preman.

Pungutan Tidak Resmi dalam Proses Peradilan. Jika dilihat dari jenis-jenis pungutan tidak resmi, responden dunia usaha yang menilai biaya tidak resmi dalam proses peradilan tinggi hingga sangat tinggi, 35,9% diantaranya adalah pelaku usaha yang bergerak di sektor agroindustri / bisnis (perkebunan dan pertanian pangan), 29,7% responden yang bergerak di bidang kehutanan, 13,1% responden industri, dan 12,6% responden perdagangan dan jasa. Dari sektor-sektor usaha

within the bureaucracy are fees and other payments demanded by local government officials, and by other players in the judicial process. Illegal charges outside the bureaucracy, on the other hand, are usually extracted from the business community by security officers, groups from the surrounding community, gangsters and the like.

Of all the different types of illegal levies that business operators must pay, illegal fees within the judicial process are perceived by the respondents as the most onerous (13.1%), followed by illegal charges imposed by security officers (11.5%), extortion by community groups (8.5%) and extortion by gangsters (6.1%).

Companies that operate in the forestry, agro-industry (plantations and food crops) and mining sectors consider illegal fees to be high or very high. These sectors are vulnerable to the imposition of a multitude of levies by several parties since, aside from occupying large land areas, they are popularly seen as profitable business sectors thanks to their dependence on “nature’s bounty”. Moreover, there is a widespread perception that these firms are not making sufficient contributions to their respective local governments and communities. Given the common view that the local people are automatically entitled to own, control, or at least obtain benefit from, “nature’s bounty”, it is not surprising that companies that exploit these resources are subjected to a variety of unofficial fees and charges. These levies are usually imposed in dealings with the bureaucracy, or by security officers, community groups and gangsters during the distribution of output.

Illegal Levies in the Judicial Process. Of the respondents who consider unlawful fees levied in the judicial process to be high or very high, 35.9% are engaged in agro-industry (plantations and food crops), 29.7% are active in the forestry sector, 13.1% are from industry, and 12.6% are from the trading and service sector. Since many of these businesses depend on natural resources and require extensive land areas for their operations, they frequently face problems in areas such as land

yang menilai biaya tidak resmi dalam proses peradilan tinggi (perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) terdapat karakteristik yang hampir sama yakni merupakan usaha-usaha yang berbasis sumber daya alam dan memerlukan lahan yang luas. Hal ini mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha yang sering menghadapi permasalahan pada saat penguasaan lahan usaha mereka (sengketa tanah), maupun menghadapi isu-isu lingkungan hidup (pencemaran, pengrusakan ekosistem, dll). Penyelesaian permasalahan tersebut sering kali harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan juga biaya, termasuk didalamnya biaya tidak resmi yang jumlahnya oleh para pelaku usaha dinilai cukup tinggi.

Pungutan Tidak Resmi oleh Aparat Keamanan. Responden yang menilai pungutan tidak resmi oleh aparat keamanan tinggi hingga sangat tinggi adalah sebesar 11,5%. Dilihat dari bidang usaha responden yang terbesar adalah yang bergerak di bidang kehutanan yakni sebanyak 37,8%, disusul bidang usaha agroindustri / bisnis (perkebunan dan pertanian pangan) sebesar 32,8%, perikanan 17,4%, manufaktur 10,8%, pertambangan 9,8%, dan lainnya 8,3%. Pungutan tidak resmi oleh aparat keamanan biasa terjadi pada jalur-jalur pengangkutan komoditas hasil usaha sektor-sektor yang bersangkutan maupun untuk keamanan lingkungan. Sektor usaha dengan basis lahan luas seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan, biasanya juga rawan terhadap kejahatan, seperti pencurian, pengrusakan, ancaman keamanan, sengketa atau kriminalitas lainnya. Kondisi ini memunculkan pihak-pihak yang “menawarkan perlindungan keamanan”, dengan imbalan tertentu, dari sinilah muncul pungutan oleh aparat keamanan.

Pungutan Tidak Resmi oleh Kelompok Masyarakat. Pungutan tidak resmi yang juga meresahkan dunia usaha adalah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, baik yang terorganisasi secara formal (ormas), maupun organisasi yang tidak formal seperti kelompok pemuda kampung, pendekar/jawara (kelompok beladiri) dan sebagainya. Untuk pungutan tidak resmi oleh kelompok masyarakat ternyata sektor kehutanan juga merupakan sektor yang paling sering mengalami. Dari responden yang menilai pungutan jenis ini tinggi hingga sangat tinggi untuk bidang usaha kehutanan adalah sebesar 29,7%, disusul sektor pertambangan sebanyak 14,1%, dan perkebunan sebanyak 13%, perdagangan dan jasa 8,6%, industri 8,1%, dan

occupancy (land disputes) or the environment (pollution, destruction of ecosystems, etc.). Settling these problems often requires a court process that consumes a great deal of time and money. A considerable proportion of the cost of any judicial process of this nature consists of illegal fees.

Illegal Levies Imposed by Security Officers. 11.5% of respondents think illegal charges levied by security officers are high or very high. Of the respondents who hold this view, the largest group are engaged in the forestry sector (37.8%), followed by agro-industry (plantations and food crops) (32.8%), the fishery sector (17.4%), manufacturing (10.8%), mining (9.8%) and other sectors (8.3%). Security officers often impose these levies in situations where goods are being transported, and where the surrounding area “needs” to be made secure. Firms that operate over extensive land areas, such as plantations, farms and mining companies, are usually also vulnerable to criminal actions, such as theft, destruction, security threats or disputes. It is these conditions that spawned the emergence of parties offering “security protection” in exchange for compensation, which in turn led to the proliferation of fees charged by security officers.

Illegal Levies Imposed by Community Groups. The business community also reports that it is burdened by unofficial levies extracted by community groups, whether formal organizations or informal associations such as rural youth groups and martial arts clubs. It appears that the forestry sector is the most prone to this particular kind of illegal charge. Of the businesses that say they have to pay high or very high illegal levies to community groups, 29.7% are in the forestry sector. The mining sector represents 14.1% of respondents who concur with this statement, followed by the plantation sector (13.0%), trading and services (8.6%), industry (8.1%) and other sectors that range from 2% to 4%. Meanwhile, at 6.1%, the number of respondents who say they pay illegal

sektor usaha lainnya berkisar antara 2% – 4%. Sementara untuk pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok preman jumlahnya tidak terlalu signifikan, yakni hanya sebesar 6,1% responden yang menilai pungutan oleh preman cukup meresahkan. Walau nilainya kecil tetapi hal ini perlu mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah, karena akan dapat mengganggu kegiatan usaha.

Beban Pungutan Tidak Resmi. Dari berbagai pungutan tidak resmi, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan, birokrasi pemda, masyarakat, maupun preman, bila diakumulasikan besarnya pungutan tidak resmi yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan biaya produksi, diperoleh rata-rata sebesar 2%. Sebanyak 337 responden (7,3%) bahkan mengaku bahwa seluruh pungutan-pungutan tidak resmi yang harus mereka keluarkan mencapai antara 8% s/d 10% dari biaya produksi. Additional cost akibat pungutan tidak resmi sebesar 2% dari biaya produksi ini bagi para pelaku usaha sangat signifikan mempengaruhi jalannya usaha mereka, karena sangat membebani bagi pertumbuhan usaha mereka. Dalam perspektif persaingan global, adanya tambahan biaya-biaya yang semestinya tidak perlu dikeluarkan, tentunya dapat mengurangi daya saing dunia usaha Indonesia di tingkat internasional.

C.1.2. Pelayanan Birokrasi

Sektor-sektor usaha yang beroperasi di suatu wilayah administrasi daerah atau negara tertentu sangat wajar bila harus berhadapan dengan birokrasi pemerintahan. Hal ini sangat disadari oleh para pelaku usaha, bahwa sebuah dunia usaha yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan legalisasi dari otoritas pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemda) tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Konsekwensi dari menjalankan kegiatan usaha secara legal ini adalah, adanya sejumlah kewajiban yang harus mereka laksanakan, seperti pengurusan perizinan, maupun memberikan kontribusi bagi pemerintah setempat seperti membayar pajak, retribusi dan lain sebagainya.

Sebagian besar pelaku usaha tidak mempermasalahkan dan menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang memberatkan dengan catatan mereka juga mendapatkan hak serta pelayanan yang baik, seimbang dengan kewajiban yang telah mereka jalankan. Namun dalam praktiknya ketika mereka akan menjalankan kewajiban tersebut, seringkali dihadapkan pada pelayanan dengan kualitas yang tidak sesuai

charges to gangsters is comparatively modest, but is quite disturbing, even so. Therefore, this matter requires local government attention since it cause disruption to business activities.

The Burden of Illegal Levies. In total, these various illegal levies, whether imposed by security officers, local government officials, community groups or gangsters, amount to an average of 2% of a company's operating costs. As many as 337 respondents (7.3%) admit that illegal levies make up 8-10% of their operating costs. Even a 2% additional cost element is very significant to a business operator, and places a considerable burden on the growth of the company. From the perspective of global competition, these additional fees – which, being illegal, do not, strictly speaking, actually need to be paid – definitely reduce the international competitiveness of businesses operating in Indonesia.

C.1.2. The Quality of the Civil Service

It is perfectly normal for companies, wherever they operate, to have to deal with government officials. Business executives tend to take this for granted, since all responsible business players undergo a process of legalization by the relevant government authorities (central and/or local government). As a consequence of this legal requirement, businesses have certain obligations, such as to obtain licenses, and to make contributions to their respective local governments in form of taxes and user charges.

The majority of business operators do not regard this as an encumbrance, provided that they receive a level of service that corresponds to the requirements they are complying with, and that their rights are protected. However, in Indonesia, the reality is that even when they fulfill their obligations, business people are still faced with low-quality service – and their businesses suffer.

dengan yang mereka harapkan, bahkan justru menambah beban bagi kegiatan usaha mereka. Dalam pelayanan birokrasi oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha, seperti pada saat pengurusan perizinan, sertifikasi, pengawasan, maupun berbagai keperluan lainnya, selain harus membayar sejumlah uang sebagaimana ketentuan resmi yang berlaku di tiap-tiap daerah, para pelaku usaha juga masih harus membayar biaya-biaya tidak resmi. Biaya tidak resmi ini biasanya untuk memperlancar pelayanan yang mereka butuhkan.

Kejelasan Jalur Birokrasi. Dari hasil penelitian ini, berkaitan dengan kejelasan jalur birokrasi dalam pelayanan pemda terhadap dunia usaha, walaupun rata-rata para pelaku usaha menilai relatif jelas (37,5% menilai cukup jelas, dan 35,4% menilai jelas), namun masih ada 23,8% responden para pelaku usaha di daerah juga menilai kejelasan jalur birokrasi pelayanan pemda terhadap dunia usaha masih kurang baik. Para pelaku usaha yang menilai kejelasan jalur birokrasi kurang baik ini kebanyakan adalah para pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan (45,2% responden), kehutanan (11,9%), dan industri (7.3%).

Ketepatan Waktu Pelayanan. Dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan birokrasi sebagian besar pelaku usaha juga menilai cukup (40,2% responden), 29,9% responden menyatakan baik, namun demikian 26% responden yang lain menyatakan ketepatan waktu pelayanan birokrasi oleh pemda masih kurang baik. Responden-responden yang menilai ketepatan waktu pelayanan birokrasi kurang baik tersebut 46% bergerak di bidang usaha perkebunan dan kehutanan, 15% perdagangan dan jasa, 12% mereka yang bergerak di bidang industri.

Biaya Pelayanan. Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam pengurusan birokrasi pemda, dari 5.140 orang responden pelaku usaha 4.364 orang (84.9%) mengaku harus mengeluarkan biaya tidak resmi diluar biaya yang seharusnya mereka bayar, dan 776 responden (15,1) persen tidak menjawab. Dari 4.364 responden yang menjawab pertanyaan mengenai besarnya tambahan biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam pelayanan birokrasi, diperoleh kesimpulan bahwa untuk memperoleh pelayanan birokrasi, para pelaku usaha harus mengeluarkan tambahan biaya tidak resmi sebesar 60,62% dari biaya resmi / yang seharusnya dikeluarkan. Hanya ada 84 responden (1.9%), yang menyatakan bahwa tambahan biaya tidak resmi yang harus mereka bayar lebih dari

In order to obtain business-related services, such as licenses, certificates or supervision, from local government officials, they have to pay unofficial fees in addition to the official charges. These illegal levies usually help to speed up the processing of the services they need.

Clear Service Lines. We can see from the research findings that 23.8% of respondents believe that when it comes to providing services to the business community, the bureaucratic lines within the local government are unclear. 37.5% regard the service lines as fairly clear, and 35.4% think they are clear. A plurality of the business players who say government service lines are lacking in clarity (45.2%) operate in the farming and plantation sectors, while 11.9% are engaged in forestry, and 7.3% are involved in industry.

Punctuality of Service. 40.2% of respondents consider their local governments' punctuality in providing services to the business community to be satisfactory, while 29.9% think it is good and 26.0% find it unsatisfactory. Of those who are dissatisfied with the service providers' punctuality, 46% are involved in forestry and plantations, 15% engage in trading and services, and 12% in industry.

Service Fees. When we asked the 5,140 survey respondents about the fees they pay in conjunction with their dealings with local government officials, 4,364 (84.9%) admitted that they pay illegal charges in addition to the official fees, while 776 respondents (15.1%) did not provide an answer. The 4,364 respondents who answered the question pay an average of 60.62% of the official fees in illegal levies in order to obtain the government services they require to run their businesses. Only 84 respondents (1.9%) say that the additional unlawful fees they pay amount to more than 100% of the official charges. At any level, illegal fees constitute additional costs that reduce a firm's productivity and competitiveness.

100% dari biaya yang resmi yang semestinya mereka keluarkan. Tambahan biaya tidak resmi ini merupakan *high cost* bagi dunia usaha yang dapat menurunkan produktivitas dan daya saingnya.

C.1.3. Peraturan Daerah

Hal yang juga mendapat perhatian para pelaku usaha adalah regulasi yang mengatur kegiatan usaha mereka. Pada era otonomi daerah ini peraturan daerah merupakan regulasi di tingkat Kabupaten / Kota yang dampaknya langsung terkena pada para pelaku usaha. Dari hasil survei ini, rata-rata para pelaku usaha di daerah menilai perda-perda atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah cukup mendukung atau sekurangnya tidak mengganggu/menghambat kegiatan usaha mereka. Hal ini terlihat dari 5.140 responden yang diwawancarai, 44,8% responden menilai perda/kebijakan daerah cukup mendukung, 28,3% responden bahkan menilai mendukung sampai sangat mendukung. Namun demikian kita tidak dapat mengabaikan bahwa masih ada 20,2% responden yang menilai kurang mendukung bahkan tidak mendukung kegiatan usaha mereka, dan 6,8% responden tidak mengetahui mengenai perda-perda di daerahnya. Masih ada 20,2% yang menyatakan bahwa perda-perda di daerahnya kurang / tidak mendukung kegiatan usaha mereka memperlihatkan bahwa masih cukup banyak daerah yang mengeluarkan perda-perda yang kontraproduktif terhadap kegiatan dunia usaha.

Bila dibandingkan dengan hasil kajian tekstual KPPOD terhadap 896 dokumen perda yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh 200 pemda yang disurvei, diperoleh hasil 64 Daerah (32%) perdanya dinilai distortif, 107 daerah (53,5%) perdanya bisa diterima, 29 daerah (14,5%) dinilai suportif terhadap kegiatan usaha. Analisis tekstual perda oleh KPPOD walaupun menghasilkan jumlah daerah yang memiliki perda distortif lebih besar (32% daerah) dibandingkan dengan hasil survei pendapat responden yang hanya 20% responden, tetapi bisa dikatakan tidak jauh berbeda Hasil kajian tekstual perda memperoleh 32% daerah perdanya dinilai bermasalah menunjukkan potensi distorsi perda terhadap kegiatan usaha, sementara dari pendapat 20% responden menunjukkan bahwa telah terjadi distorsi perda atau kebijakan daerah terhadap kegiatan usaha mereka. Pada intinya kedua hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang mengeluarkan atau membuat perda-

C.1.3. Local Regulations

Member of the business community are also concerned about the regulations that govern their activities. In this era of regional autonomy, local regulations enacted at the district or municipal level have a direct impact on business. According to the results of this survey, most business people believe that the regulations and policies issued by local governments in the first three years of regional autonomy are sufficiently supportive, or at least do not disturb or obstruct their commercial activities. 44.8% of respondents stated in the interviews that they regard local regulations and policies as sufficiently supportive of their operations, while 28.3% see them as highly supportive. Nonetheless, we cannot ignore the fact that 20.2% of respondents think local regulations and policies do not support, or even constrain, their businesses, while 6.8% say they know nothing about local regulations.

The results of a textual study by KPPOD concerning 896 business activity-related local regulations issued by the 200 local governments surveyed show that, based on a set of criteria determined by the research team, 64 regions (32%) have issued distortive regulations, 107 regions (53.5%) have issued acceptable regulations, and 29 (14.5%) have issued regulations that are supportive of business. If we compare the findings related to regulations seen as detrimental to business in the two surveys, we see that the textual analysis shows that 32% of regions have distortive regulations, while in the investment attractiveness survey, 20% of respondents say local regulations or policies have a negative effect on their business activities. We can therefore conclude that many regions are indeed issuing regulations that are unfriendly towards business and investment activities.

perda yang kurang bersahabat dengan kegiatan usaha dan investasi.

C.2. Permasalahan Pada Faktor Sosial Politik

Berkaitan dengan faktor Sosial Politik, mengenai pemeringkatan daya tarik investasi daerah ini juga menemukan sejumlah permasalahan menyangkut hal-hal yang terkait erat dengan kondisi sosial politik suatu daerah maupun secara nasional. Persoalan-persoalan yang ditemukan tersebut antara lain mengenai; pelibatan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan daerah, mekanisme pengawasan kebijakan daerah oleh masyarakat, kondisi keamanan daerah, konflik sosial, konflik politik, keterbukaan masyarakat terhadap kegiatan usaha, serta aktivitas unjuk rasa berkaitan dengan kegiatan usaha.

C.2.1. Pelibatan Pelaku Usaha dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Kualitas kebijakan daerah yang tertuang dalam berbagai peraturan daerah tentunya berkaitan erat dengan proses perumusan kebijakan tersebut. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas kebijakan daerah / perda yang dihasilkan oleh daerah adalah adanya pelibatan *stakeholders* dalam proses perumusannya, terutama mereka yang berhubungan atau yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemda. Jika dilihat proses perumusan kebijakan daerah, dari 5.140 responden yang disurvei 4.344 orang (84,5%) diantaranya menyatakan bahwa proses perumusan perda di daerahnya tidak melibatkan kalangan dunia usaha, 1,8% responden menilai pelibatannya kurang baik atau tidak baik, 6,8% menilai cukup baik dan 4,4% menilai pelibatan dunia usaha dalam perumusan kebijakan daerah baik atau bahkan sangat baik.

Temuan di atas mempertegas jika kemudian banyak daerah yang menghasilkan perda-perda yang kurang akomodatif terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan pernyataan para pejabat pemda yang menyatakan bahwa selama ini pemda selalu melibatkan para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya dalam setiap perumusan kebijakan daerah. Hal yang biasa terjadi dalam proses perumusan kebijakan di berbagai daerah selama ini adalah hanya melibatkan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi, atau bahkan hanya para pengurusnya saja. Bentuk pelibatanpun hanya pasif sekedar formalitas agar dalam perumusan kebijakan daerah tampak

C.2. Problems Related to the Socio-Political Factor

A number of problems that are closely related to socio-political conditions that affect the investment attractiveness of a given region, as well as the country as a whole, come to light in this study. Some of these issues concern the involvement of the business community in formulating local regulations, while others are connected with the mechanisms of public oversight of local policies, security conditions in the region, social conflict, political conflict, public openness towards business activities, and strikes.

C.2.1. The Involvement of the Business Community in Formulating Local Policies

The quality of the policies that help to shape various local regulations is definitely closely related to the process of policy formulation. One of the factors that may affect the quality of local policies and regulations produced by a region is the involvement of stakeholders in the process of formulation – primarily those that are connected with, or will be affected by, local policies and regulations. Of the 5,140 respondents in this survey, 4,344 (84.5%) assert that the business community is never involved in the process of originating local regulations. 925 (1.8%) acknowledge that there is some participation, but say that it does not run well, 349 (6.8%) say that the business community's input plays quite a large role in the process and 226 (4.4%) put a very high value on the involvement of business players in the formulation of local policy.

On this basis, it is unsurprising that many regions routinely produce local regulations that are less than accommodative of the needs of the business community. Even so, local government officials have been claiming for years that they always involve business people and other stakeholders in this process. In practice, many regional administrations meet with only those business people who are members of a business association or its board when drafting policies. This represents a passive form of involvement, and is merely a formality that shows that the process is participative. In many cases, the “consultation” occurs only in the socialization phase, and so does not allow the business community to influencing

partisipatif, atau sekedar dalam sosialisasi tanpa dapat mempengaruhi bentuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan demikian perlu kiranya dilakukan perbaikan dalam proses pelibatan *stakeholder* pada perumusan kebijakan daerah agar lebih dapat mewakili masing-masing pihak.

C.2.2. Mekanisme Pengawasan Kebijakan Pemda Oleh Masyarakat

Dilihat dari sisi mekanisme pengawasan kebijakan pemda oleh masyarakat, ditemukan ada 26,1% responden yang menilai mekanisme pengawasan kebijakan pemda tidak baik bahkan tidak ada, sementara 49,8% menilai cukup baik, dan 21,2% menilai baik dan sangat baik. Dari 26,1% responden yang menilai kurang baik atau bahkan tidak baik, mempertegas bahwa pemerintah daerah juga kurang akomodatif terhadap pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah mereka tetapkan. Namun demikian jika dilihat dari penilaian responden terhadap konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan yang telah mereka buat sendiri, terlihat bahwa selama ini pemerintah daerah tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan-peraturan yang telah mereka buat. Dari hasil survei diperoleh bahwa 40,2% responden menilai cukup konsisten, 44,1% menilai konsisten dan sangat konsisten. Hanya 13,8% responden yang menilai kurang konsisten hingga tidak konsisten, dan sisanya sebanyak 1,8% tidak tahu.

C.2.3. Keamanan

Secara umum kondisi keamanan daerah-daerah di Indonesia relatif aman untuk kegiatan usaha. Hal ini bertentangan dengan pandangan banyak pihak khususnya investor asing yang menilai kondisi keamanan di Indonesia tidak kondusif untuk kegiatan usaha. Dari penelitian ini 43,9% pelaku usaha di 200 daerah kabupaten / kota di Indonesia menilai kondisi keamanan cukup aman, bahkan 48,1% pelaku usaha menyatakan aman dan sangat aman. Sementara pelaku usaha yang menyatakan kondisi keamanan untuk kegiatan usaha kurang aman dan tidak aman hanya sebanyak 6,1%, yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa daerah di Indonesia yang kurang aman untuk aktivitas usaha. Dilihat dari kondisi keamanan lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha juga dapat dikatakan relatif aman. Dari penilaian 45,4% responden pelaku usaha menilai kondisi keamanan lingkungan

the structure of the policy at all. Hence, there is an urgent need to expand the involvement of stakeholders in the process of formulating local policy.

C.2.2. The Mechanism for Public Oversight of Local Policy

This study shows that 26.1% of respondents regard the system of public oversight of local policy as poor or non-existent, 49.8% think it is fairly good, and 21.2% see it as good or very good. The fact that over a quarter of commercial players think that the public oversight system is poor or completely absent confirms that local governments are not very accommodative of public scrutiny of their policies. On the other hand, the findings show that local governments have for many years been consistent in enforcing their own policies and regulations. 40.2% of respondents say that their local governments are fairly consistent on this score, while 44.1% consider them consistent or very consistent, and 13.8% believe they are inconsistent.

C.2.3. Security

In contrast to what many people, especially potential foreign investors believe, Indonesia is generally seen as safe for commercial activities. According to 48.1% of business people operating in 200 districts and municipalities around the country, Indonesia is safe or very safe, while 43.9% of them say that conditions are fairly safe. Only 6.1% claim that security conditions for business are not safe in the regions where they operate. Security conditions in communities located adjacent to business areas are regarded as relatively good. 45.4% of respondents think the situation in the surrounding community is fairly safe, while 41% consider it safe, and 5.6% view it as very safe. However, 7.1% of respondents say that the condition of the surrounding community is not safe.

cukup aman, 41% menilai aman, dan 5,6% sangat menilai sangat aman. Walau demikian perlu juga untuk mendapat perhatian bahwa masih ada 7,1% responden yang menilai bahwa kondisi lingkungan mereka masih kurang aman dan tidak aman.

Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin besar skala usaha dari para responden memiliki rasa aman yang semakin kurang. Semakin besar perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja mereka rasa amannya semakin berkurang. Dari 5,3% responden dengan skala usaha kecil (TK s/d 20 orang) menilai kondisi keamanan kurang aman dan tidak aman, 6,9% dari pelaku usaha skala menengah (TK 21 s/d 100 orang), sementara untuk pelaku usaha skala besar (TK lebih dari 100 orang) menilai kurang aman dan tidak aman sebanyak 12,8%. Hal yang sama juga terjadi pada penilaian responden yang menilai kondisi keamanan lingkungan masyarakat sekitar kegiatan usaha kurang aman dan tidak aman, yakni 6,4% dari pelaku usaha skala kecil, 8,5% pelaku usaha skala menengah, dan 10,6% dari pelaku usaha skala besar.

Jika dilihat dari jawaban responden berdasarkan asal investor, memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa investor yang berasal dari luar daerah cenderung merasa kurang aman dibandingkan dengan investor dari daerah yang bersangkutan. Hal ini diperlihatkan oleh jawaban responden yang menilai gangguan keamanan lingkungan masyarakat kurang aman dan tidak aman adalah 3,7% dari responden BUMD/BUMN, 7% dari pengusaha lokal, sementara untuk pelaku usaha yang berasal dari luar daerah lebih besar, yakni dari responden PNDN luar daerah sebesar 10,1% dan dari responden PMA sebesar 10%. Hal yang sama juga terjadi untuk penilaian responden terhadap keamanan untuk kegiatan usaha, dimana untuk responden yang menilai kurang aman/tidak aman, untuk responden yang berasal dari PMDN luar daerah sebanyak 10,7% dan 12,2% dari responden PMA. Hal tersebut lebih besar dibandingkan dengan responden pelaku usaha yang berasal dari daerah setempat yakni sebesar 5,5%, dan 5,2% dari responden pelaku usaha BUMD/BUMN.

Namun demikian secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kondisi keamanan di berbagai daerah di Indonesia relatif aman. Rendahnya prosentase responden pelaku usaha di 200 daerah penelitian yang menyatakan keamanan kurang, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil daerah di Indonesia yang tidak kondusif untuk

This research also reveals that business people who run large-scale enterprises with a large number of employees tend to feel less safe than those who operate smaller firms with relatively few workers. 5.3% of the respondents with small-scale firms (with up to 20 employees) say security conditions are fairly poor or poor, as do 6.9% of those who operate medium-scale companies (21 to 100 employees), and 12.8% of those who run large businesses (more than 100 employees). Similarly, 6.4% of small business operators, 8.5% of those who run medium-sized businesses, and 10.6% of those who operate large-scale entities regard security conditions in neighboring communities as fairly poor or poor.

If we look at the origins of the respondents, we can see that investors from outside the regions where they operate tend to feel less safe than local investors. 3.7% of respondents from local government-owned enterprises and state-owned enterprises, 7.0% of those who operate local enterprises, 10.1% of people who run domestic direct investment companies (PMDNs) from other parts of Indonesia, and 10.0% of those in charge of foreign direct investment companies (PMAs) state that conditions in their neighboring communities are fairly unsafe or unsafe. The same pattern is seen in the assessment of the security situation in their immediate areas of operation. As many as 10.7% of respondents from PMDNs from outside the region and 12.2% of those from PMAs see the situation as fairly unsafe or unsafe. Only 5.5% of people who run local firms and 5.2% of those from state-owned and local government-owned enterprises concur with this view.

To sum up, it is clear that security conditions in most regions in Indonesia are considered to be relatively good. Only a small percentage of the respondents from business communities in 200 research areas indicate that there are security problems in the areas where they operate. Nonetheless, there should be serious efforts

kegiatan usaha. Perlu upaya-upaya serius dari para pihak, khususnya di daerah-daerah yang dirasakan kurang aman, untuk segera memperbaiki kondisi keamanan daerahnya. Harus ada upaya dari pihak-pihak yang berwenang untuk mensosialisasikan bahwa dilihat dari faktor keamanan, Indonesia cukup kondusif untuk melakukan investasi. Perlu adanya pemetaan daerah-daerah yang dinilai kurang aman agar tidak terjadi generalisasi terhadap kondisi keamanan Indonesia yang akan merugikan bagi upaya peningkatan investasi.

C.2.4. Konflik Sosial

Untuk kondusifitas usaha dilihat dari konflik sosial yang ada di daerah - seperti bentrokan antar kampung, antar etnis, dan sebagainya, sebagian besar responden menilai cukup kondusif. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan 61,6% responden pelaku usaha yang mengaku tidak ada konflik sosial. Sementara yang menyatakan ada konflik sosial yang mengganggu hanya sebanyak 11,2%, yang menilai konflik sosial sedang-sedang saja sebanyak 11,1%, dan yang menilai kurang / tidak mengganggu sebanyak 16,2%. Pelaku usaha yang mengaku terganggu dengan adanya konflik sosial yang terjadi di daerah dimana mereka melakukan kegiatan usaha adalah 11,3% dari responden yang memiliki skala usaha kecil, 13% dari responden dengan skala usaha menengah, sementara dari responden dengan skala usaha besar adalah 23,2% nya. Dari sini terlihat bahwa semakin besar skala usaha seseorang, mempengaruhi penilaian mereka terhadap kondusifitas lingkungan sosial dilihat dari konflik sosial yang terjadi di daerahnya.

C.2.5. Konflik Politik

Dari sisi politik secara umum daerah-daerah di Indonesia cukup kondusif. Hal ini terlihat dari jawaban 57% pelaku usaha yang menyatakan tidak ada konflik politik baik antar elit politik di daerah, anggota DPRD, maupun antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Sementara yang merasa konflik politik tidak mengganggu aktivitas usaha mereka sebanyak 14,4% responden, dan yang merasa konflik politik sedang sebanyak 10,3% responden, sedangkan yang merasa terganggu dengan adanya konflik politik sebanyak 8,2% responden.

Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa semakin besar skala usaha yang dilakukan oleh seseorang merasa bahwa gangguan konflik politik terhadap aktivitas usahanya semakin besar.

around the country, and especially in the regions that are considered unsafe, to strengthen security conditions. In the meantime, the authorities should disseminate the findings of this study to show that, in general, security conditions in Indonesia are conducive to investment. There is a need to map the unsafe regions to avoid generalization about security conditions, which may harm investment promotion efforts throughout the country.

C.2.4. Social Conflicts

In general, business people believe that social conflicts in their respective regions –clashes between villages or ethnic groups, and the like – do not pose a great challenge to their operations. A full 61.6% of respondents say that there are no social conflicts in their areas. Only 11.2% claim that social conflicts are disruptive to their businesses, while 11.1% say that social conflicts in their areas have a slight negative effect on their operations. 16.2% acknowledge that there are social conflicts in their regions, but say that they do not disturb their businesses. 11.3% of small-scale business operators say they experience disruption from social conflicts, as do 13.0% of medium-sized companies and 23.2% of large enterprises. These figures demonstrate that the larger the business, the greater the influence of social conflicts on its operations.

C.2.5. Political Conflicts

Political conflicts also cause few relatively problems for the business community. 57.0% of business people say there are no political conflicts among political elites in the region, among members of the local Regional Representatives' Council, or between the Regional Representatives' Council and the local government. Meanwhile, 14.4% of respondents feel unaffected by political conflicts and 10.3% feel moderately affected, while 8.2% of respondents say they that political conflicts do disturb their business activities.

We can also see from this research that large-scale businesses are more often affected by political conflicts than their smaller counterparts. 7.5% of the respondents from small-scale enterprises, 8.3%

Terlihat dari jawaban pelaku usaha yang menilai konflik politik mengganggu kegiatan usahanya, 7,5% dari responden skala usaha kecil, 8,3% dari responden skala menengah, 13,8% dari responden skala besar.

C.2.6. Keterbukaan Masyarakat

Dari indikator keterbukaan masyarakat terhadap kegiatan usaha / investasi, diketahui bahwa secara umum masyarakat terbuka terhadap kegiatan usaha / investasi yang ada di daerahnya. Dari 5.140 responden pelaku usaha, 5,8% diantaranya menilai sikap masyarakat tertutup / kurang terbuka, 44,6% menyatakan cukup terbuka, 48,3% menilai terbuka bahkan sangat terbuka. Walaupun sebagian besar responden menilai sikap masyarakat terbuka terhadap kegiatan usaha / investasi namun ada kecenderungan bahwa masyarakat di daerah kurang terbuka terhadap kegiatan usaha / investasi dari luar daerahnya.

Dari penilaian para pelaku usaha yang ada di daerah berdasarkan asal investornya, memperlihatkan ada kecenderungan prosentase responden pelaku usaha dari luar daerah yang menilai masyarakat daerah cukup terbuka hingga sangat terbuka lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha dari daerah yang bersangkutan (investor lokal). Responden yang menilai masyarakat cukup terbuka hingga sangat terbuka untuk pelaku usaha lokal sebesar 93,8%, BUMN/ BUMD sebesar 93,3%, responden PMDN luar daerah 89,1%, dan responden PMA sebesar 83,4%. Ada kecenderungan pelaku usaha dari luar daerah menilai masyarakat kurang terbuka terhadap kegiatan usaha mereka dibandingkan dengan pelaku usaha lokal. Dari penilaian pelaku usaha yang menilai masyarakat kurang terbuka/tertutup terhadap kegiatan usaha untuk pelaku usaha lokal (dari daerah yang bersangkutan) sebesar 5,2%, BUMN/ BUMD 6%, sementara dari PMDN luar daerah ada 9,9% responden, dan PMA ada 12,2% responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang terbuka dengan investor yang berasal dari luar daerahnya. Masyarakat lebih suka jika kegiatan usaha dilakukan oleh para pelaku usaha yang berasal dari daerahnya sendiri. Jika ada orang dari daerah yang mampu melakukan kegiatan usaha, mengelola potensi daerahnya, mereka akan lebih terbuka / lebih suka dibandingkan jika dilakukan oleh orang dari daerah lain. Tetapi yang harus dicatat bahwa hal ini merupakan penilaian dari sisi para pelaku usaha terhadap keterbukaan masyarakat atas kegiatan usaha yang mereka lakukan di daerah

of those from medium-sized firms and 13.8% of those from large-scale companies view political conflicts as disturbing to their operations.

C.2.6. Public Openness

The results of this study show that people are generally open to business and investment activities in their regions. Of the 5,140 respondents from the business community, only 5.8% regard the public as not at all open or not very open. 44.6% say that local people are fairly open to business and investment, and 48.3% think they are open or very open. While the majority of respondents believe the public displays a reasonable or good degree of acceptance towards business or investment activities, local communities are seen as less welcoming of business operations that are set up by investors from other regions or countries.

93.8% of respondents from local companies regard the local community as fairly open, open or very open, as do 93.3% of those from state-owned and local government-owned enterprises. 89.1% of those running PMDNs from outside the region and 83.4% of business people in charge of PMA companies share this view. In other words, business operators from other regions are more likely than local business people to judge local people as insufficiently open towards their business activities.

However, it is important to note that the survey findings portray the business community's impressions of how open local people are towards their business activities, rather than the opinions of the local people regarding the presence of business activities in their regions. Therefore, the findings should not be interpreted as direct evidence of a public preference for businesses operated by local sons and daughters.

yang bersangkutan, bukan merupakan pendapat dari masyarakat atas kehadiran aktivitas usaha di daerahnya. Jadi tidak dapat secara langsung diartikan sebagai preferensi masyarakat terhadap asal pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di daerahnya.

C.2.7. Intensitas Unjuk Rasa

Kegiatan unjuk rasa selama ini sering disebut sebagai salah satu persoalan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Dari penelitian ini ternyata sebagian besar pelaku usaha di daerah rata-rata merasa tidak terganggu oleh aktivitas unjuk rasa, baik itu unjuk rasa oleh buruh, mahasiswa, maupun kelompok masyarakat lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa 41% pelaku usaha menyatakan tidak ada kegiatan unjuk rasa di daerahnya. Pelaku usaha yang menyatakan ada unjuk rasa yang mengganggu aktivitas usaha mereka adalah sebesar 8,9%, sementara yang menilai unjuk rasa tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas usaha sebanyak 11,7%, dan yang menyatakan ada tetapi tidak merasa terganggu bahkan sangat tidak terganggu adalah sebesar 38,4%.

Jika dilihat dari skala usaha para responden, dapat diketahui bahwa ada kecenderungan semakin besar skala usaha yang mereka miliki, maka rasa aman dari aktivitas unjuk rasa semakin rendah. Terlihat dari responden yang merasa terganggu atas kegiatan unjuk rasa yaitu sebesar 6,7% dari responden pelaku usaha skala kecil, 12% dari skala usaha menengah, dan 28,5% dari responden pelaku usaha skala besar. Hal ini bisa dipahami bahwa semakin besar perusahaan baik dilihat dari permodalan maupun dari jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan, resiko yang mereka tanggung semakin besar pula, termasuk didalamnya adalah resiko menghadapi aksi unjuk rasa dari para buruh mereka.

C.3. Permasalahan yang Terkait dengan Ekonomi Daerah

Lembaga Keuangan di Daerah

Peran lembaga keuangan bagi kegiatan usaha sangat penting, disamping sebagai lembaga yang bertindak sebagai intermediasi - menarik dana dan menyalurkan dana dari masyarakat, termasuk didalamnya untuk penyediaan kredit permodalan bagi kegiatan usaha - lembaga keuangan seperti bank juga berfungsi sebagai penyaluran dana untuk kepentingan pembayaran antar dua pihak yang terkait kewajiban. Dari

C.2.7. Strikes

Strikes are commonly seen as one of the problems that can disturb economic activities. However, the study reveals that most companies do not experience disruption from strikes, whether initiated by labor unions, students or other community groups. 41.0% of business operators say that there are no strikes in their regions. 8.9% of respondents admit that strikes do interrupt their business activities from time to time, while 11.7% perceive this to be a common occurrence, and 38.4% acknowledge that strikes take place, but say that they do not disrupt their business activities.

Just as there is a correlation between the size of a business operation and the effect that social and political conflicts have on it, we find that large-scale enterprises are more susceptible to industrial action that disrupts their operations. 6.7% of small businesses experience interruptions because of strikes, as do 12.0% of medium-scale firms and 28.5% of large-scale enterprises. These findings reinforce the impression that large companies bear greater exogenous risks than their smaller counterparts.

C.3. Problems Related to the Regional Economic Dynamism Factor

Financial Institutions in the Regions

Financial institutions play a very important role in the business environment of a region as, apart from acting as intermediary institutions that collect and channel private savings and other funds, they also provide loans to finance business activities. Financial institutions such as banks also function as conduits for payments between two or more parties. The survey results show that most business people consider the number of banks to

penilaian para pelaku usaha di daerah diketahui bahwa dilihat dari ketersediaan (jumlah kantor bank) yang ada sekarang ini dinilai relatif cukup baik. Terlihat dari 38,9% pelaku usaha yang menilai cukup, dan 41,7% menilai memadai dan sangat memadai, sementara yang menilai kurang dan sangat kurang sebesar 17,2%. Masih adanya 17,2% pelaku usaha yang menilai ketersediaan bank kurang memadai menunjukkan bahwa keberadaan bank masih belum merata ke seluruh penjuru daerah di Indonesia.

Jika dilihat dari skala usahanya ternyata semakin besar skala usaha yang dilakukan semakin merasa kekurangan akan jumlah bank. Dari responden yang menyatakan jumlah kantor bank kurang memadai adalah, 19,1% dari pelaku usaha skala besar, 18,1% dari pelaku usaha skala menengah, dan 17,6% dari skala usaha kecil. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketersediaan bank yang ada di berbagai daerah ini cenderung hanya mampu untuk melayani skala usaha yang relatif kecil. Selanjutnya jika dilihat dari kemampuan bank untuk melakukan fungsi intermediasi dan penyediaan dana 40% responden menyatakan cukup memadai, 31,8% menyatakan memadai, sementara yang menilai kurang memadai masih ada sebesar 26,1%. Ini membuktikan bahwa disamping ketersediaan bank yang memang masih kurang merata ke berbagai daerah, kemampuan melakukan intermediasi juga relatif masih kurang.

C.4. Permasalahan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan satu faktor penting dalam suatu kegiatan usaha, karena merupakan penggerak utama kegiatan usaha. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja, dan pada akhirnya kualitas perekonomian, dan sosial budaya bangsa menjadi rendah. Sebagai alat ukur kualitas angkatan kerja tidak hanya cukup dilihat dari tingkat pendidikan formal saja. Hal tersebut terutama didasarkan pada alasan bahwa untuk bekerja, terutama di sektor non formal, sering tidak hanya membutuhkan pendidikan formal, melainkan pendidikan non formal, seperti keterampilan dan pengalaman kerja. Dengan demikian idealnya harus dilihat juga pendidikan non formal dari angkatan kerja yang ada.

C.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Dari penilaian para pelaku usaha di 200 daerah penelitian, diperoleh gambaran bahwa tenaga kerja di Indonesia secara rata-rata dikatakan mempunyai kualitas cukup untuk memasuki

be adequate. 38.9% of them say there are enough banks, while 41.7% believe the availability of banks is good or very good. However, 17.2% of respondents say that the number of banks is inadequate, which indicates that there is an uneven distribution of banks around the country.

It appears that large business operators are slightly more likely to feel that the number of banks is sufficient for their needs. 19.1% of respondents from large-scale enterprises, 18.1% of those from medium-sized companies, and 17.6% of small business operators say that the availability of banks is inadequate. This indicates that the banks operating in some regions tend to serve only relatively small-scale enterprises. When we asked business people about the capacity of the banks in their regions to perform intermediary and financing functions, 40.0% of them rated the banks' capacity to do so as adequate, 31.8% acknowledged that it is good, and 26.1% said it is inadequate. This proves that, on top of the uneven geographic distribution of banks, the banks' capacity to act as intermediary channels is relatively low.

C.4. Problems Related to the Labor & Productivity Factor

Labor is one of the most important aspects of any business operation. Low quality human resources lead to a low quality workforce, which in turn has a negative impact on the quality of a country's economy and socio-cultural environment. Formal education is not the only yardstick for assessing the quality of the labor force. This is because workers, especially in the informal sector, need not only a formal education, but also informal education and qualifications such as skills and work experience. Hence, informal education should also be viewed as a valid gauge of manpower quality.

C.4.1. The Quality of the Labor Force

The responses of 5,140 business people in 200 districts and municipalities around Indonesia indicate that the quality of the Indonesian labor force generally meets the needs of existing

lapangan kerja yang tersedia. Hal ini terlihat dari jawaban 5.140 pelaku usaha di 200 kabupaten/kota, dimana 61% menilai kualitas tenaga kerja di daerahnya cukup, sementara 21,2% yang lain menyatakan kurang berkualitas / rendah, dan 16,6% menilai tenaga kerja di daerahnya mempunyai kualitas tinggi.

Ada perbedaan persepsi antara pelaku usaha yang mempekerjakan sedikit karyawan dibandingkan dengan pelaku usaha yang mempekerjakan banyak karyawan dalam menilai kualitas tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat dari jawaban para pelaku usaha yang menilai kualitas tenaga kerja di daerahnya kurang baik. Dari pelaku usaha yang mempekerjakan karyawan lebih dari 100 orang, yang menilai kualitas tenaga kerja kurang baik sebesar 30,9%, sementara pelaku usaha yang mempekerjakan karyawan antara 20 s/d 100 orang hanya sebesar 20,7%, dan dari pelaku usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 20 orang hanya sebanyak 20,4%. Dari data ini tampak jelas bahwa para pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar dan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, cenderung mempunyai penilaian kurang baik terhadap kualitas tenaga kerja yang ada, dibandingkan dengan para pelaku usaha yang memiliki skala usaha kecil dan tenaga kerja sedikit.

C.4.2. Produktivitas Tenaga Kerja

Kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja tidak hanya dilihat dari kualitas yang tercermin dari keterampilan dan pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, melainkan juga dilihat dari sisi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas ini bisa diukur dari kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu output tertentu dalam satu satuan waktu tertentu. Secara rata-rata produktivitas tenaga kerja di 200 daerah penelitian juga dapat dikatakan cukup, terlihat dari jawaban 5.140 pengusaha, dimana 59,4% diantaranya menyatakan produktivitas tenaga kerja di daerahnya cukup. Sementara pelaku usaha yang menilai produktivitas tenaga kerja kurang baik/rendah sebanyak 20,2%, sebaliknya yang menilai produktivitas tenaga kerja tinggi adalah sebanyak 20%.

Perbedaan jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh para pelaku usaha yang menjadi responden penelitian ini, tampaknya mempengaruhi penilaian mereka terhadap kualitas tenaga kerja. Dari para pelaku usaha yang menilai produktivitas tenaga kerja rendah, untuk pelaku usaha dengan karyawan berjumlah kurang

commercial operations. 61.0% of respondents regard the quality of manpower in their regions as satisfactory, while 21.2% say it is unsatisfactory, and 16.6% consider the available workforce to be of high quality.

Business people who employ a small number of workers generally have a more positive view of the quality of the labor force than those who have large payrolls. 30.9% of respondents who employ more than 100 individuals, 20.7% of those who have 21 to 100 workers, and 20.4% of those who employ up to 20 people say that the quality of the labor force in their regions is unsatisfactory.

C.4.2. Labor Productivity

It is not only the skills and education of the labor force that are of concern to business leaders – productivity is another very important aspect of the quality and efficiency of a commercial operation. Productivity is defined as the capacity of an individual to achieve a certain output within a given length of time. The majority (59.4%) of the 5,140 respondents from different 200 regions assert that workers in their areas of operation display a satisfactory level of productivity. 20.2% believe that the productivity of the labor force is unsatisfactory, and almost the same percentage of business people (20.0%) consider it to be high.

Again, the size of a company has an impact on the opinion of its owners and management regarding the productivity of the labor force. 19.4% of those who employ up to 20 workers say that the labor force has an unsatisfactory level of productivity, while 20.9% of business operators with 21 to 100 workers, and 29.0% of those who

dari 20 orang adalah sebanyak 19,4%, pelaku usaha dengan jumlah karyawan sebanyak 20 s/d 100 orang yang menilai produktivitas karyawannya rendah sebanyak 20,9%, sedangkan pelaku usaha dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang sebesar 29%. Melihat data-data di atas, tampaknya ada indikasi bahwa tenaga kerja yang ada di berbagai daerah sekarang ini mendapat penilaian kurang produktif untuk perusahaan berskala besar dengan jumlah tenaga kerja besar. Tenaga kerja kita masih kurang kompetitif / kurang siap untuk memasuki lapangan kerja yang *full skill*.

employ more than 100 people agree with this view. This indicates that the labor force in a number of regions is seen as insufficiently productive by large-scale enterprises employing many workers. Our labor force is still uncompetitive, and is ill equipped to enter industries that require advanced skills.

C.5. Permasalahan Infrastruktur Fisik

C.5. Problems Related to the Physical Infrastructure Factor

C.5.1. Jalan Darat

C.5.1. Roads

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa menurut para pelaku usaha di daerah ketersediaan jalan darat saat ini dapat dikatakan cukup memadai, terbukti 56,7% dari responden pelaku usaha menilai ketersediaan jalan darat memadai hingga sangat memadai, sementara 29,1% menilai cukup memadai. Namun demikian

The business operators interviewed in this survey tend to be satisfied with the availability and/or accessibility of existing roads. 56.7% of them say that the level of access to roads in their regions is good or very good, and 29.1% say its is adequate. However, 16.3% of respondents are dissatisfied with road availability and/or

Tabel/Table IV.9.

Ketersediaan dan Kualitas Jalan Darat 200 Kabupaten dan Kota di Indonesia

Accessibility and Quality of Roads in 200 Districts and Municipalities in Indonesia

KETERANGAN	PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN LENGTH OF ROADS BY TYPE				
	ASPAL ASPHALT (Km)	KERIKIL PEBBLE (Km)	TANAH SOIL (Km)	TDK DIRINCI UNSPECIFIED (Km)	JUMLAH TOTAL (Km)
Kota/Municipality	11.809.722,30 92,32%	371.015,60 2,90%	392.527,88 3,07%	218.954,42 1,71%	12.792.220,19 100%
Kabupaten/District	30.298.806,14 66,94%	5.765.304,91 12,74%	6.344.583,81 14,02%	2.852.987,73 6,30%	45.261.682,59 100%
Total	42.108.528,44 72,53%	6.136.320,50 10,57%	6.737.111,69 11,60%	3.071.942,15 5,29%	58.053.902,78 100%

KETERANGAN	PANJANG JALAN MENURUT KONDISI/KUALITAS LENGTH OF ROADS BY CONDITION/QUALITY				
	BAIK GOOD (Km)	SEDANG AVERAGE (Km)	RUSAK DAMAGED (Km)	RUSAK BERAT BADLY DAMAGED (Km)	JUMLAH TOTAL (Km)
Kota/Municipality	8.496.330,47 62,59%	3.367.687,23 24,81%	1.269.083,74 9,35%	441.453,17 3,25%	13.574.568,34 100%
Kabupaten/District	13.620.226,16 30,09%	13.454.027,07 29,73%	11.528.763,65 25,47%	6.657.567,96 14,71%	45.260.582,39 100%
Total	22.116.556,63 37,59%	16.821.714,30 28,59%	12.797.847,39 21,75%	7.099.021,13 12,07%	58.835.150,73 100%

Sumber: Data Infrastruktur Jalan Kabupaten / Kota di Indonesia, BPS 2001, yang telah diolah.

Source: Data on Road Infrastructure in Districts/Municipalities in Indonesia, BPS 2001, already processed.

masih ada responden yang menilai ketersediaan jalan darat kurang bahkan sangat kurang memadai yaitu sebesar 16,3%. Jika dilihat dari kualitas jalan yang sudah tersedia 55% menilai baik dan sangat baik, sementara yang menilai cukup sebanyak 27,9%, dan yang menilai kurang baik hingga sangat tidak baik sebesar 16,2% dari responden.

Berdasarkan data ketersediaan jalan darat di 200 daerah Kabupaten / Kota di Indonesia (daerah pemeringkatan) diketahui bahwa dilihat dari jenis permukaan jalan 27,47% diantaranya merupakan jalan yang tidak beraspal. Untuk kondisi permukaan jalan, berdasarkan data panjang jalan darat 200 daerah Kabupaten / Kota di Indonesia, terlihat bahwa jalan dengan kondisi baik hanya 37,59%, sedang 28,59%, sedangkan jalan dengan kondisi rusak hingga rusak berat mencapai 33,83%.

Apabila kita lihat secara terpisah antara daerah kota dan daerah kabupaten terlihat bahwa daerah kota memiliki ketersediaan dan kualitas jalan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Untuk ketersediaan jalan, 92,32% jalan di daerah kota merupakan jalan beraspal, sementara untuk daerah kabupaten jalan yang beraspal hanya sebesar 66,94%. Jika dilihat dari kondisi permukaan atau kualitas jalan, daerah kota juga jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Untuk kondisi permukaan baik, rata-rata daerah kota sebesar 62,59%, sementara untuk daerah kabupaten hanya sebesar 30,09%. Sedangkan untuk jalan dengan kondisi rusak hingga rusak parah daerah kabupaten jauh lebih besar yaitu 40,18% sementara untuk daerah kota hanya sebesar 12,60%. Temuan di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara ketersediaan dan kualitas jalan di daerah kota dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur fisik khususnya jalan darat di Indonesia sebagai sarana transportasi utama untuk mendukung kegiatan usaha perlu mendapat perhatian yang serius. Apabila kondisi ini tidak segera dibenahi tentunya akan menghambat kegiatan usaha, dan pada gilirannya akan menurunkan daya tarik Indonesia terhadap investasi. Pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah yang memiliki ketersediaan jalan kurang perlu untuk mengalokasikan dana dalam APBD mereka untuk menambah jumlah jalan, serta untuk pemeliharaan jalan yang sudah ada.

accessibility. Meanwhile, 55.0% of business leaders maintain that the quality of existing roads is good or very good, while 27.9% think it is adequate, and 16.2% consider it to be inadequate or very bad.

Official data on the roads in the 200 districts and municipalities where the survey was conducted shows that 27.47% of them are not asphalted. We can also see that the condition of the roads in these regions is not ideal. Only 37.59% of the roads are classified as good, while 28.59% are considered average and 33.83% are damaged or badly damaged.

If we examine the data on municipalities and districts separately, we can see that the road systems in municipalities tend to be of better quality, as well as more accessible, than those found in districts. 92.32% of the roads in the municipalities we surveyed are asphalted, while in the districts the figure is 66.94%. 62.59% of roads in the municipalities are in average condition, compared with 30.09% of the districts' roads. Conversely, only 12.60% of the municipalities' roads and 40.18% of the districts' roads are damaged or badly damaged.

These figures indicate that the condition of Indonesia's physical infrastructure – particularly roads, which constitute the main means of transportation that supports business activities – needs serious attention. If this situation is not addressed quickly, it will hamper operations in many regions, and also lower the country's investment attractiveness. Local governments, particularly in those areas that lack sufficient accessible roads, need to allocate funds in their budgets to expand their road systems, and to maintain existing roads.

C.5.2 Listrik

Dilihat dari ketersediaan sebagian besar pelaku usaha menilai suplay listrik saat ini memadai (41,3% menilai memadai, 8,9% sangat memadai). Sementara yang menilai cukup memadai sebesar 32,4%. Sementara responden yang merasa bahwa suplay listrik kurang hingga sangat kurang memadai sebesar 20,7%, lebih besar dibandingkan dengan jumlah responden yang menilai ketersediaan jalan darat kurang dan sangat kurang. Dilihat dari kualitas sambungan listrik dilihat sebagian besar responden juga menilai baik (39,2%) dan sangat baik (6,7%). Sementara yang menilai sedang sebesar 32,9%, dan masih ada 21,2% responden yang menilai kualitas suplay listrik kurang baik dan sangat tidak baik. Kualitas suplay listrik yang kurang baik ini ditunjukkan dengan tegangan listrik yang tidak stabil dan bahkan sering terjadi pemadaman secara bergiliran. Kualitas sambungan listrik yang kurang baik ini, banyak diantara para pelaku usaha yang harus menyediakan sumber pembangkit listrik sendiri seperti generator. Namun demikian sebagian pelaku usaha mengaku bahwa untuk pembangkit listrik yang disediakan sendiri ini mereka juga harus membayar pajak kepada daerah berupa pajak penerangan jalan.

C.5.3. Telpon

Diantara jenis-jenis infrastruktur pendukung kegiatan usaha, ketersediaan dan kualitas sambungan telpon merupakan infrastruktur yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Untuk ketersediaan jaringan telepon 23,8% responden menilai jaringan telpon kurang bahkan sangat kurang. Sementara 30,7% pelaku usaha menilai cukup dan 44,5% menilai memadai hingga sangat memadai. Responden yang menilai sambungan telpon memadai dan sangat memadai kebanyakan adalah para responden yang kegiatan usahanya di wilayah perkotaan. Sementara responden yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang jauh dari perkotaan masih banyak yang mengeluhkan mengenai ketersediaan telpon. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sarana komunikasi ini. Jika dilihat dari kualitas sambungan telpon yang dilihat dari kejelasan suara kemudahan dalam melakukan sambungan pembicaraan, 21,3% responden menilai tidak baik hingga sangat tidak baik. Sementara yang menilai kualitas sambungan telpon cukup sebanyak 32%, dan yang menilai baik hingga sangat baik sebesar 46,8%.

C.5.2. Electricity

A plurality of business operators (41.3%) say that the availability of electricity in their regions is good, while 8.9% think it is very good. 32.4% say the availability of electricity is fairly good, and 20.7% deem it inadequate; in other words, business people are more likely to feel that there is a problem with the availability of electrical power than with roads. When it comes to the quality of the electricity supply, 39.2% of respondents consider it to be good, and 6.7% believe it is very good. 32.9% see it as reasonable, while 21.2% say it is poor or very poor. Those who class the quality of the electricity supply as poor or very poor are often subjected to fluctuations in the power supply, as well as brownouts. This has forced many business operators to invest in their own power resources, such as generators. Even if they generate their own electricity, these business people also have to pay road lighting tax to the local government.

C.5.3. The Telephone System

Of the different types of infrastructure required by business, the availability and quality of telephone lines cause the greatest problems. While 30.7% of respondents say that the availability of telephone lines is adequate and 44.5% state that it is good or very good, 23.8% of business people consider availability to be inadequate or very poor. It is primarily business operators in urban areas who deem telephone availability good or very good, whereas those who are unhappy with it tend to be running companies in locations that are far from urban areas. This shows that there are still many regions that do not have proper telecommunications coverage. The quality of telephone services can be measured by the clarity of the lines and the ease of connection. 21.3% of respondents consider the quality of telephone services to be inadequate or very bad. 32% think it is adequate, and 46.8% see it as good or very good.

V. PENUTUP

Closing

Daya tarik investasi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi berupa “anugerah alam” yang dimilikinya. Berbagai unsur lainnya juga mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerah, seperti birokrasi pelayanan, keamanan, kondisi sosial budaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Keseluruhan faktor tersebut tergabung menjadi satu dan membentuk daya tarik investasi bagi daerah yang bersangkutan. Permasalahan atau kelemahan di satu faktor, akan mempengaruhi daya tarik investasi secara keseluruhan. Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan pada kita bahwa meskipun secara rata-rata telah terjadi perbaikan dari sejumlah faktor pembentuk daya tarik investasi daerah, namun juga masih menyisakan beberapa persoalan. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan investasi dan keberadaan dunia usaha di daerah dalam menjalankan kegiatannya.

A. Kesimpulan

A.1. Peringkat Daya Tarik Investasi

- a) Tanpa merubah indikator dan bobot pemeringkatan dapat dilakukan perbandingan peringkat daerah dari tahun ke tahun, dan faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan tersebut.
- b) Selain perubahan score masing-masing indikator, variabel, dan faktor pemeringkatan, penambahan jumlah daerah yang diperingkat, juga menjadi salah satu penyebab perubahan peringkat daya tarik investasi daerah. Turun dan naiknya peringkat suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada

The investment attractiveness of a region is not only determined by its economic potential in the form of the “gifts of nature” it is blessed with. Various other elements, such as the quality of the civil service, security conditions, socio-cultural conditions and labor factors also play significant roles in shaping its appeal to investors. Problems or weaknesses in any one of these factors influence the region’s overall potential for attracting investment. The findings of this study show that although there have been improvements in a number of these elements, certain problems remain. These problems must also be addressed in order to safeguard the growth of investment and prosperity throughout Indonesia.

A. Conclusions

A.1. Ranking of Investment Attractiveness

- a) As the indicators, variables and factors used in the rating, and to their respective weightings, have remained unaltered, it is possible to compare the scores of a given region from one year to the next on a like-for-like basis, and to identify the reasons for any changes that occur.
- b) Movements in the ranking of a given region are greatly influenced by changes to the Regulation & Government Service and Socio-Political factors, given that they have heavier weightings than the other three factors. Aside from changes in the scores for each of the indicators, variables and factors in the rating, the addition of a

faktor kelembangaan dan sosial politik yang mempunyai bobot lebih besar dibandingkan faktor-faktor lainnya.

- c) Rata-rata score total Daya Tarik Investasi Kabupaten pada pemeringkatan tahun 2003 lebih baik dibandingkan tahun 2002. Pada tahun 2002 rata-rata score kabupaten sebesar 0,1791, sementara untuk tahun 2003 sebesar 0,1828. Score tertinggi untuk tahun 2003 diraih oleh Kab. Purwakarta yakni sebesar 0,3273 lebih tinggi dibandingkan score tertinggi tahun sebelumnya yang diraih oleh Kab. Dairi yakni sebesar 0,2796. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan daya tarik investasi kabupaten-kabupaten di Indonesia.
 - d) Rata-rata score total Daya Tarik Investasi Kota mengalami penurunan dari sebesar 0,2239 pada tahun 2002 menjadi 0,1945 pada tahun 2003. Pada tahun 2002 score tertinggi sebesar 0,3146 diraih oleh Kota Semarang, sementara untuk tahun 2003 score tertinggi diraih Kota Batam sebesar 0,2805. Penurunan score rata-rata yang diperoleh daerah-daerah kota di tahun 2003 mengindikasikan terjadi penurunan daya tarik investasi daerah-daerah Kota di Indonesia.
 - e) Perbandingan hasil pemeringkatan tahun 2002 dengan hasil tahun 2003 menunjukkan banyak daerah secara relatif bertahan pada kelompok peringkatnya (kelompok atas, menengah, dan bawah). Perubahan peringkat lebih banyak terjadi pada kelompok daerah peringkat atas dan kelompok daerah peringkat menengah. Beberapa daerah yang tahun 2002 berada pada kelompok menengah, pada tahun 2003 mampu naik peringkat ke kelompok peringkat atas, sebaliknya pada kelompok atas beberapa diantaranya mengalami penurunan ke kategori kelompok menengah. Pada kelompok daerah-daerah yang berada pada peringkat terbawah tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Daerah-daerah yang berada di peringkat bawah pada rating 2002 sebagian besar belum mampu beranjak pada peringkat yang lebih baik.
 - f) Dibandingkan tahun 2002, pada tahun 2003 secara rata-rata terjadi kenaikan score untuk faktor Ekonomi Daerah, khususnya pada daerah Kota. Fenomena ini disebabkan terutama oleh kenaikan pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti bahwa pada tahun 2003 ini rata-rata kualitas hidup masyarakat khususnya di perkotaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c) The average total score for the districts included in the 2003 rating increased to 0.1828, from the 0.1791 average recorded in 2002. With 0.3273, Purwakarta District receives the highest score in the 2003 general rating, beating the top district in 2002 (Dairi), which scored 0.2796. This suggests that there has been a general improvement in the investment attractiveness of districts in Indonesia.
 - d) In contrast, the average total score for municipalities fell from 0.2239 in 2002 to 0.1945 in 2003. In 2002, the highest score (0.3146) was given to Semarang, while in 2003, Batam leads the field with 0.2805. This indicates that, on the whole, municipalities in Indonesia have become less attractive to investors.
 - e) If we compare the results of the ratings for 2002 and 2003, we can see that many regions more or less maintain their relative positions in the rankings (top, middle or bottom). In particular, it appears to be difficult for the regions at the bottom of the ratings table to elevate themselves to higher positions, although, even here, there are some notable exceptions. Most of the movement has occurred in the high and middle ranks. Several districts and municipalities that were ranked around the middle of their respective tables in 2002 climb to high positions in 2003, while some previously top-ranked regions slip in the ratings.
 - f) Compared with 2002, the latest rating shows an overall improvement in scores for the Regional Economic Dynamism factor, particularly in municipalities. This phenomenon is attributable to an increase in Human Development Index (HDI) indicator scores, and points to a general improvement in the quality of life of Indonesians, especially those living in urban areas, in 2003.

A.2. Iklim Investasi

- a) Secara umum kondisi sosial politik berbagai daerah di Indonesia, - dilihat dari keamanan, konflik sosial (bentrokan antar kampung, antar etnis, dan sebagainya), kondisi politik, dan aktivitas unjuk rasa - oleh para pelaku usaha dinilai relatif kondusif untuk investasi. Hanya sebagian kecil pelaku usaha yang merasa terganggu oleh kondisi sosial politik di berbagai daerah. Adanya sebagian kecil pelaku usaha yang menyatakan kondisi keamanan, politik dan gangguan sopol lain mengganggu kegiatan usaha mereka, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil daerah di Indonesia yang kurang kondusif untuk kegiatan usaha. Ada kecenderungan, semakin besar skala usaha seseorang, mempengaruhi penilaian mereka terhadap kondusifitas faktor Sosial Politik terhadap kegiatan usaha.
- b) Dari aspek budaya, masyarakat di daerah dinilai cukup terbuka terhadap kegiatan kegiatan usaha/investasi yang ada di daerahnya. Namun ada kecenderungan bahwa masyarakat di daerah kurang terbuka terhadap kegiatan usaha dari luar daerahnya. Para pelaku usaha merasa bahwa masyarakat lebih suka jika kegiatan usaha dilakukan oleh para pelaku usaha yang berasal dari daerahnya sendiri.
- c) Hasil survei terhadap pelaku usaha di 200 daerah maupun hasil kajian perda yang dilakukan oleh tim peneliti KPPOD, menunjukkan bahwa perda-perda atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, cukup mendukung atau sekurangnya tidak menghambat kegiatan usaha. Namun demikian tidak dapat diabaikan bahwa dari kedua penelitian ini juga masih ditemukan perda-perda yang kurang/tidak mendukung kegiatan usaha sekitar (20-25%). Hal ini memperlihatkan bahwa masih cukup banyak daerah yang mengeluarkan perda-perda yang kontraproduktif terhadap kegiatan dunia usaha.
- d) Dilihat dari proses perumusan perda/kebijakan di berbagai daerah ternyata kurang melibatkan *stakeholders*-nya dalam hal ini para pelaku usaha. Hal tersebut barangkali yang menjadi salah satu penyebab munculnya perda-perda yang kontraproduktif terhadap kegiatan usaha di daerah.
- e) Pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh aparat pemda dinilai oleh sebagian besar responden kurang baik. Hal ini tercermin dari rata-rata pelaku usaha yang merasa tidak puas terhadap

A.2. The Investment Climate

- a) Most business people in Indonesia maintain that the socio-political conditions in their operating regions – security conditions, social conflicts (inter-village conflicts, ethnic wars, etc.), the political environment and strikes – are conducive to investment. The fact that only a relatively small number of business operators say they have problems with security, political and social conditions indicates that there are just a few areas in Indonesia where the environment is not so favorable for business. Large companies tend to be more exposed than their smaller counterparts to the effects of the socio-political conditions in their operating areas.
- b) Local communities are becoming more open towards business and investment activities in their areas. However, business people feel that local communities tend to be less welcoming of companies from other regions or countries, and that they prefer business activities to be run by local sons and daughters.
- c) In common with the textual study of local regulations conducted by the KPPOD research team, the survey conducted among business leaders in 200 regions shows that regulations and policies issued by local governments are sufficiently supportive of businesses, or that they at least do not hamper their activities. That said, these two studies also reveal that up to a third of regions have issued regulations that are considered detrimental to business operations.
- d) In the overwhelming majority of cases, the business community and other stakeholders are excluded from participating in the formulation of regional regulations and policies that have an impact on their activities. This perhaps explains why some regions are issuing regulations that are bad for business.
- e) Many business operators feel they obtain poor service from local government officials. This is reflected in the number of business people who feel dissatisfied with the clarity of service lines

pelayanan birokrasi oleh pemda, baik dari sisi kejelasan jalur birokrasi, ketepatan waktu pelayanan, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pelayanan. Pelaku usaha yang paling banyak mengeluhkan birokrasi pelayanan oleh aparatur pemda adalah pelaku usaha pertambangan dan perkebunan.

- f) Untuk mendapatkan pelayanan birokrasi oleh aparat pemda, sebagian besar pelaku usaha di berbagai daerah (84.9%) mengaku harus mengeluarkan biaya tidak resmi diluar biaya yang seharusnya mereka bayar. Besarnya tambahan biaya tidak resmi tersebut rata-rata sebesar 60,62% dari biaya resmi yang seharusnya dikeluarkan.
 - g) Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha harus mengeluarkan total biaya tambahan dari berbagai jenis pungutan tidak resmi rata-rata sebesar 2% dari total biaya produksi kegiatan usaha mereka. Pungutan tidak resmi tersebut dilakukan oleh aparat keamanan, kelompok masyarakat, kelompok pemuda, ormas, preman, dan lain-lain. Bahkan sebanyak 337 pelaku usaha mengaku bahwa seluruh pungutan-pungutan tidak resmi yang harus mereka keluarkan mencapai antara 8% s/d 10% dari biaya produksi mereka.
 - h) Biaya tidak resmi dalam proses peradilan merupakan biaya tidak resmi yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha yakni 13,1% responden, disusul biaya tidak resmi oleh aparat keamanan (11,5%), pungli oleh kelompok masyarakat (8,5%), dan terakhir pungli oleh preman sebanyak 6,1% dari responden, sisanya adalah biaya tidak resmi lainnya.
 - i) Bidang usaha kehutanan, agrobisnis (perkebunan dan pertanian pangan), dan pertambangan, merupakan bidang usaha yang rawan terhadap berbagai pungutan oleh banyak pihak. Hal itu terjadi karena bidang-bidang usaha tersebut dinilai oleh banyak kalangan sebagai usaha yang diuntungkan karena "anugerah alam". Dengan demikian siapa saja merasa punya hak untuk memiliki, menguasai, dan paling tidak berhak memperoleh manfaat dari keberadaan "anugerah" tersebut. Di sisi lain banyak kalangan juga merasa bahwa kehadiran kegiatan usaha tersebut kurang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sekitarnya. Hal-hal tersebut menjadi pendorong
- in local government offices, and with the punctuality and cost of service. Those who operate in the agro-industry and forestry sectors tend to be the most discontented with the quality of service from local government officials.
 - f) Most respondents (84.9%) acknowledge that they pay illegal charges on top of the official fees in order to obtain services from local government officials. On average, these additional unofficial charges amount to 60.62% of the official fees paid.
 - g) Typically, 2% of a company's total operating expenditure consists of illegal levies that have to be paid to local government officials, security officers, community groups, youth groups, mass organizations, gangsters and others. 7.3% of respondents say that illegal levies account for as much as 8% to 10% of their operating costs.
 - h) Illegal fees in the judicial process are seen as the most onerous (13.1% of respondents), followed by illegal fees imposed by security officers (11.5%), extortion by community groups (8.5%), and extortion by gangsters (6.1%).
 - i) Companies operating in the forestry, agro-industry (plantations and food crops) and mining sectors are the most prone to the imposition of various types of levies by many different parties. They are seen to be exploiting the "gifts of nature", which are commonly regarded as the property of the local people, who feel entitled to control and benefit from these resources. There is also a widespread perception that these firms are not making sufficient contributions to their respective local governments and communities. Thus, some members of the local community extract their "entitlement" from business operators in the form of unofficial fees and charges.

munculnya banyak pungutan terhadap kegiatan usaha ini.

- j) Para pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar yang membutuhkan tenaga kerja banyak, cenderung mempunyai penilaian kurang baik terhadap kualitas tenaga kerja yang ada, dibandingkan dengan para pelaku usaha yang memiliki skala usaha kecil dan tenaga kerja sedikit. Dilihat dari sisi produktivitas tenaga kerja, ada indikasi bahwa tenaga kerja yang ada di berbagai daerah sekarang ini mendapat penilaian kurang produktif oleh perusahaan berskala besar dengan jumlah tenaga kerja banyak. Tenaga kerja di berbagai daerah masih kurang kompetitif/kurang siap untuk memasuki lapangan kerja yang *full skill*.
- k) Secara rata-rata ketersediaan infrastruktur fisik (jalan, listrik, telepon, dan lain-lain) di Indonesia cukup tersedia, namun ketersediaannya tidak merata ke seluruh penjuru tanah air. Data infrastruktur fisik 200 daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik antar daerah. Hal ini didukung pula dari pernyataan banyak pelaku usaha yang menilai ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan usaha mereka kurang memadai. Kesenjangan tersebut terutama tampak jika diperbandingkan antara daerah kota dan kabupaten.
- l) Faktor geo-ekonomis sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Fisik suatu daerah. Daerah-daerah yang berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi atau daerah penyangga kota-kota besar, mendapatkan *agglomeration effect* dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang telah memiliki infrastruktur secara lengkap dan kualitasnya juga baik. Sebaliknya daerah-daerah secara geo-ekonomis berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi kurang mendapat *agglomeration effect* (*share* infrastruktur). Daerah yang berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dan tidak dilewati jalur distribusi/perdagangan antar daerah, menjadi terpencil dan menjadi kurang berkembang karena infrastruktur fisik karena akses ke daerah lain tidak lancar.
- j) Leaders of large-scale enterprises that employ a large number of workers tend to be less satisfied than those who run smaller companies with the quality of the available labor force. Similarly, management of large operations rate the productivity of the available labor force less highly than their counterparts in smaller firms. This indicates that the workforce in a number of regions is uncompetitive and poorly equipped for jobs that require advanced skills.
- k) While the availability and quality of physical infrastructure (roads, electricity, telephone services, etc.) in Indonesia is generally considered to be adequate, there are considerable geographical differences. The disparity becomes obvious if we compare the responses given by business people in the municipalities surveyed with those obtained from the districts.
- l) Geo-economic factors have a significant impact on the availability and quality of physical infrastructure. Regions that lie close to centers of economic growth, and particularly those that act as buffer areas to large municipalities, enjoy a so-called agglomeration effect from the centers of economic growth and their superior infrastructure. Conversely, regions that are located far from the country's centers of economic growth, and/or away from inter-regional distribution and trade lines, become isolated and poorly developed because they lack access to adequate physical infrastructure.

B. Saran

1. Bagi daerah-daerah yang mengalami penurunan peringkat daya tarik investasi, perlu mencermati dan mengevaluasi faktor-faktor

B. Recommendations

1. The regions whose ratings have declined need to evaluate the factors that have caused their ratings to fall, and to make improvements

yang menjadi penyebab perubahan peringkatnya, agar dapat melakukan perbaikan. Bagi daerah-daerah yang berhasil memperoleh peringkat baik, perlu upaya secara terus menerus agar dapat mempertahankan dan meningkatkan daya tarik investasinya.

2. Perlu upaya-upaya serius dari para pihak, khususnya di daerah-daerah yang dirasakan kurang kondusif dari sosial politik (keamanan, konflik sosial, politik dan sebagainya), untuk segera memperbaiki kondisi sosial politik daerahnya. Harus ada upaya dari pihak-pihak yang berwenang untuk mensosialisasikan bahwa secara umum kondisi sosial politik di Indonesia terutama keamanan, cukup kondusif untuk melakukan investasi. Perlu adanya pemetaan daerah-daerah berdasarkan tingkat keamanannya agar tidak terjadi generalisasi terhadap kondisi keamanan Indonesia yang akan merugikan bagi upaya peningkatan investasi.
3. Perlu dilakukan upaya-upaya secara serius untuk memperbaiki kinerja aparatur pelayanan birokrasi di daerah (khususnya kepada dunia usaha). Perbaikan dapat dilakukan dengan restrukturisasi instansi pelayanan, misalnya dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap dengan segala kewenangan yang menyertainya. Pemerintah pusat perlu membuat standar pelayanan birokrasi yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah harus mengupayakan pengurangan praktik-praktik pungutan liar yang dapat mengganggu kinerja dunia usaha terutama agar dunia usaha di Indonesia mampu menghadapi persaingan global. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha Indonesia di tingkat internasional.
5. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dan responsif terhadap keluhan dunia usaha atas banyaknya perda-perda yang mendistorsi kegiatan usaha mereka. Untuk menghindari pembuatan kebijakan yang berdampak negatif bagi kegiatan usaha, pemerintah daerah harus lebih transparan dan meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun kebijakan daerah, yakni dengan melibatkan dunia usaha dan *stakeholders* lainnya.
6. Pemerintah daerah, perlu untuk mengalokasikan lebih besar dana APBD untuk membangun dan memelihara infrastruktur fisik di daerahnya. Perlu dipikirkan untuk

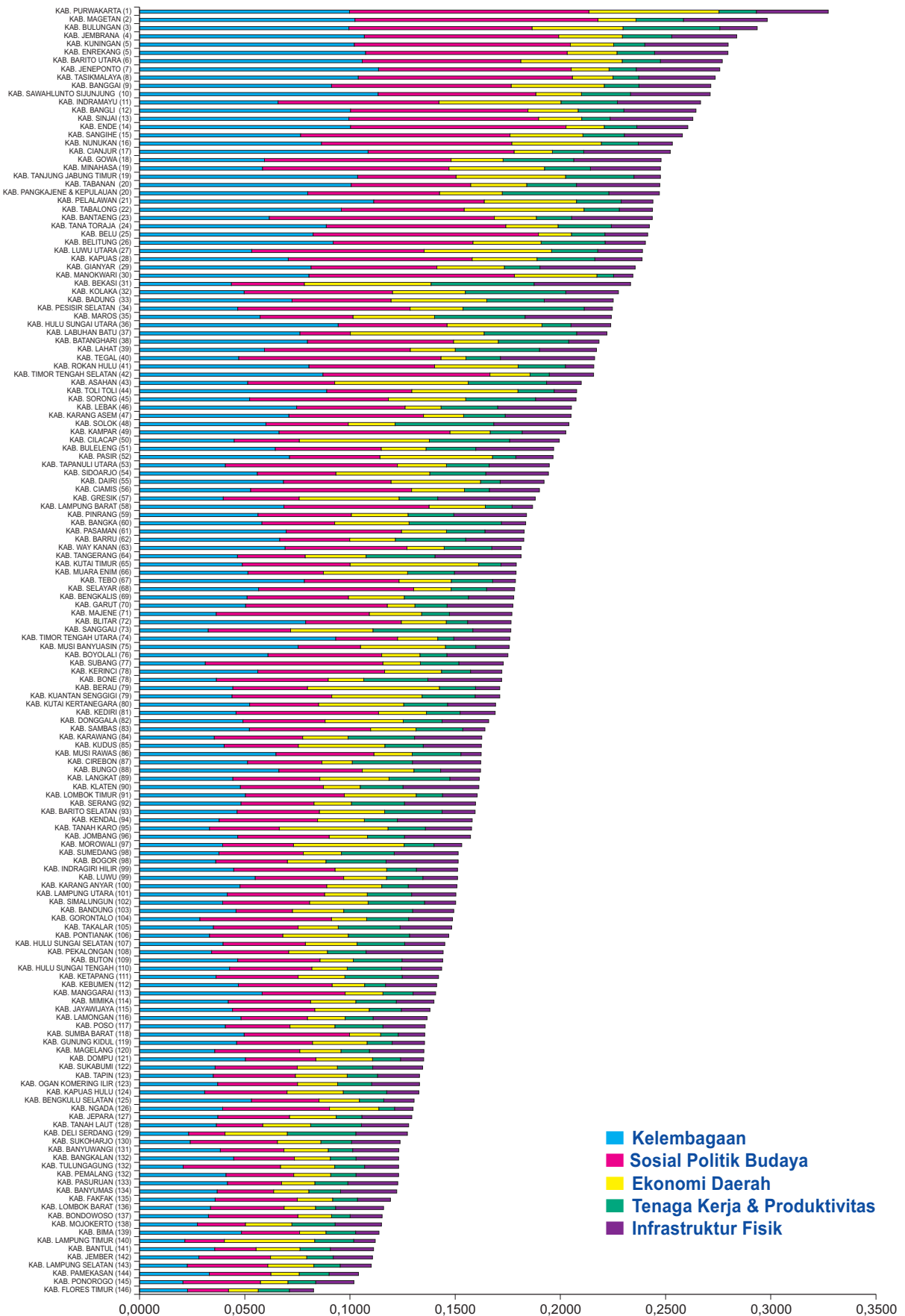
accordingly. Regions that have managed to obtain good ratings need to sustain their efforts to maintain and increase their investment attractiveness.

2. Concerted and focused efforts must be made to immediately improve socio-political conditions (security, social conflicts, political conflicts and similar concerns) in regions where these are seen as uncondusive to business operations. The relevant authorities must act to raise awareness of the fact that, in general, socio-political conditions in Indonesia – especially those related to security – are favorable for investment. There is a need to map the unsafe regions to avoid generalization about security conditions, which may harm investment promotion efforts throughout the country.
3. Serious efforts must also be made to improve the performance of local civil servants, especially in their dealings with the business community. The service agencies should be restructured, for instance by setting up one-stop service offices that have full authority to issue all permits and other documents needed by businesses. The central government also needs to establish service standards that can serve as guidelines for the regions.
4. Both the central government and local governments must reduce the practice of imposing levies that may hamper the performance of businesses, so that they can continue to compete in the global market. This will help to increase the attractiveness of Indonesia as an investment destination.
5. Local governments must be more proactive and responsive towards the concerns of business leaders regarding a number of local regulations that are distorting their operating environment. To avoid issuing policies that have a negative impact on business, local governments should be more transparent, and should encourage the participation of the the business community and other stakeholders in formulating local policies that affect their activities.
6. Local governments need to allocate more funds in their budgets to the development and maintenance of physical infrastructure in their regions. They also need to consider cooperating

melakukan kerjasama dengan daerah sekitarnya dalam rangka pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik, agar daerah-daerah semakin terintegrasi satu dengan lainnya sehingga terbentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

with neighboring regions to provide and maintain physical infrastructure, with a view to establishing new centers of economic growth that will increase prosperity in the regions concerned.

Lampiran 1. Hasil Pemeringkatan
 Lampiran 1.1. Peringkat Kabupaten
 Lampiran 1.1.1. Peringkat Daya Tarik Investasi 156 Kabupaten di Indonesia



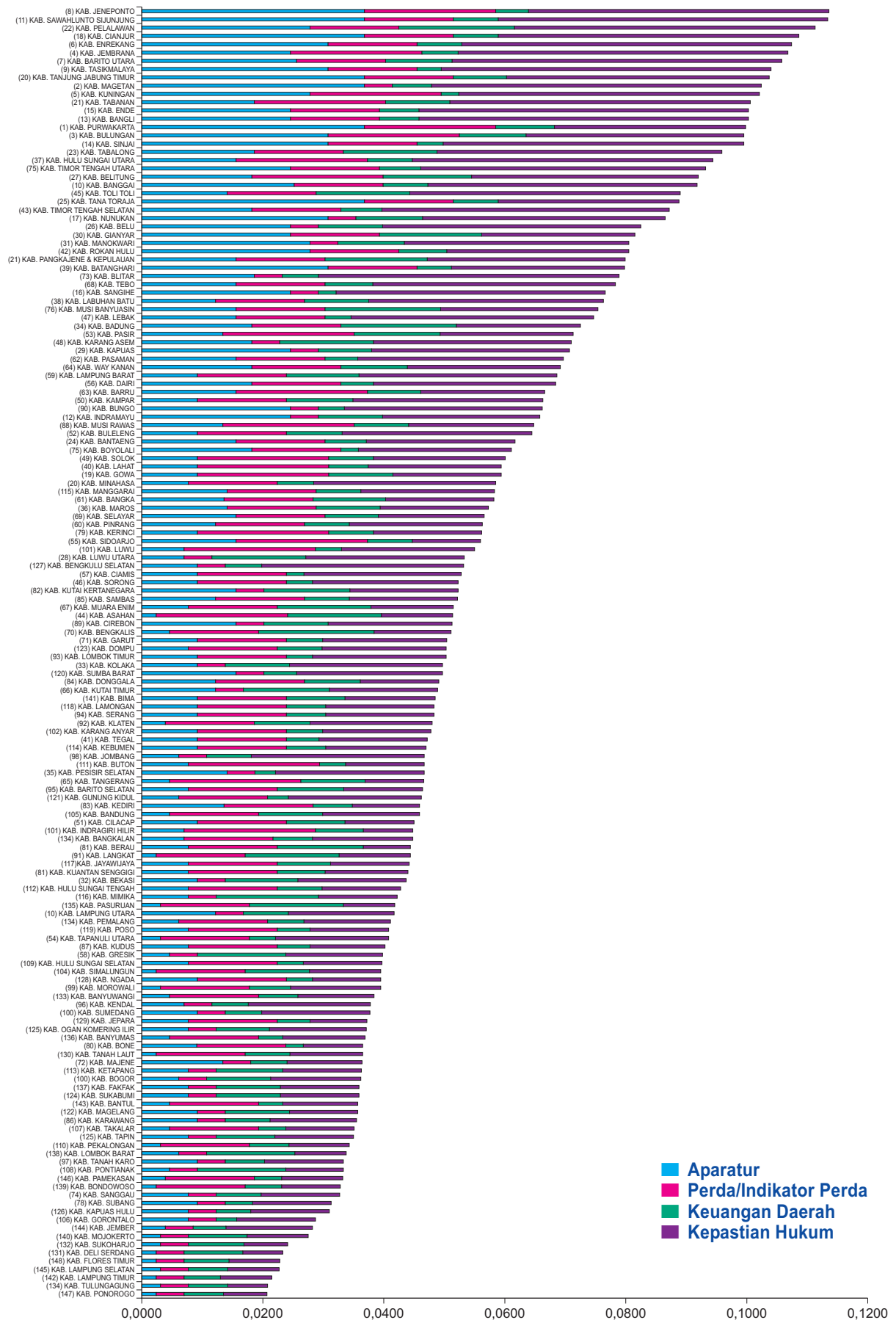
Lampiran 1.1.2. Neraca Peringkat Faktor dan Variabel Daya Tarik Investasi 156 Kabupaten di Indonesia

No.	Propinsi	Kabupaten	PERINGKAT TIAP INDIKATOR, VARIABEL, FAKTOR DAN SECARA TOTAL																					
			TOTAL SCORE	Aparatur & Pelayanan	Perda	Keuangan Daerah	Kepastian Hukum	TOTAL KELEMBAGAAN	Keamanan	Sosial Politik	Budaya	TOTAL SOSIAL POLITIK	Potensi Ekonomi	Struktur Ekonomi	TOTAL EKONOMI	Ketersediaan Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	TOTAL TENAGA KERJA	Ketersediaan Infrastruktur Fisik	Kualitas Infrastruktur Fisik	TOTAL INFRASTRUKTUR FISIK		
Jumlah Peringkat			146	22	3	53	61	138	48	63	69	130	143	25	114	52	17	5	117	92	79	124		
1	JAWA BARAT	PURWAKARTA (1)	1	1	1	8	16	14	1	11	3	2	1	10	3	17	15	3	70	18	17	26		
2	JAWA TIMUR	MAGETAN (2)	2	1	3	46	1	10	1	11	1	1	5	18	92	12	4	4	45	6	13	9		
3	KALIMANTAN TIMUR	BULUNGAN (3)	3	2	1	5	12	15	3	25	36	19	9	15	22	15	5	1	7	55	61	87		
4	BALI	JEMBRANA (4)	4	6	1	16	1	6	3	36	5	12	16	9	44	23	1	5	40	25	24	34		
5	SULAWESI SELATAN	ENREKANG (5)	5	2	2	27	1	5	3	9	24	11	18	12	64	17	8	4	69	19	13	24		
6	JAWA BARAT	KUNINGAN (5)	5	3	1	22	2	11	1	40	8	5	14	11	78	13	13	5	88	5	16	11		
7	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA (6)	6	4	2	20	1	7	9	32	31	29	13	12	14	42	8	3	68	31	25	38		
8	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO (7)	7	1	1	17	2	1	5	18	3	13	25	12	93	48	7	5	96	9	5	10		
9	JAWA BARAT	TASIKMALAYA (8)	8	2	2	36	1	8	1	47	4	7	15	19	84	24	13	5	101	12	11	18		
10	SULAWESI TENGAH	BANGGAI (9)	9	5	2	27	5	20	9	11	20	20	10	4	20	31	7	4	77	22	12	26		
11	SUMATERA BARAT	SAWAHLUNTO SIJUNJUNG (10)	10	1	2	27	1	2	13	41	1	30	39	18	70	31	1	4	41	16	5	15		
12	JAWA BARAT	INDRAMAYU (11)	11	6	3	41	22	47	7	35	41	28	6	7	7	33	1	3	32	20	1	12		
13	BALI	BANGLI (12)	12	6	2	29	1	13	3	63	3	23	27	11	63	34	1	5	49	24	10	26		
14	SULAWESI SELATAN	SINJAI (13)	13	2	2	34	2	15	2	50	6	15	24	12	79	45	7	5	93	10	5	13		
15	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE (14)	14	6	2	29	1	13	3	8	3	6	17	11	92	48	4	5	83	46	30	51		
16	SULAWESI UTARA	SANGIHE (15)	15	6	3	53	5	31	1	19	41	8	8	5	35	29	3	4	60	45	20	42		
17	KALIMANTAN TIMUR	NUNUKAN (16)	16	2	3	40	8	24	6	24	2	14	7	15	24	33	5	5	72	70	54	92		
18	JAWA BARAT	CIANJUR (17)	17	1	2	27	2	4	20	8	7	34	57	22	91	13	12	5	87	7	6	6		
19	SULAWESI SELATAN	GOWA (18)	18	15	1	6	33	53	3	42	14	16	22	5	60	1	1	4	14	8	3	5		
20	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR (19)	19	1	2	25	6	9	25	38	41	67	38	15	11	6	2	3	19	79	71	110		
21	SULAWESI UTARA	MINAHASA (19)	19	16	2	30	18	54	8	16	3	17	4	18	17	16	3	4	48	24	15	28		
22	BALI	TABANAN (20)	20	7	1	6	2	12	21	25	30	50	66	11	52	22	1	5	39	18	2	11		
23	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE & KEP. (20)	20	9	2	7	15	28	12	61	17	42	51	16	45	1	8	1	2	43	33	52		
24	RIAU	PELALAWAN (21)	21	3	2	4	2	3	28	27	3	54	46	7	21	38	1	5	51	73	62	99		
25	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG (22)	22	7	2	11	4	16	21	15	38	47	20	17	8	28	7	4	75	68	60	93		
26	SULAWESI SELATAN	BANTAENG (23)	23	9	2	28	24	50	1	25	7	4	11	12	82	29	7	4	76	14	5	14		
27	SULAWESI SELATAN	TANA TORAJA (24)	24	1	2	27	19	22	7	10	39	21	26	5	60	17	1	4	34	61	51	84		
28	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU (25)	25	6	3	41	7	25	1	2	55	3	12	22	104	46	4	5	81	55	39	71		
29	BANGKA BELITUNG	BELITUNG (26)	26	8	1	2	10	19	9	55	41	39	36	18	39	15	6	2	23	42	67	79		
30	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA (27)	27	17	3	32	21	63	13	15	1	24	2	17	5	20	7	3	48	77	26	66		
31	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS (28)	28	6	3	44	15	38	4	23	34	18	19	5	43	27	1	3	28	53	31	61		
32	BALI	GIANYAR (29)	29	6	2	7	23	26	12	52	41	45	50	19	40	22	7	5	75	4	2	3		
33	PAPUA	MANOKWARI (30)	30	3	3	40	11	27	1	32	37	9	3	4	29	51	17	4	115	85	78	122		
34	JAWA BARAT	BEKASI (31)	31	15	3	39	33	94	44	25	29	100	44	19	6	8	5	1	3	3	1	2		
35	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA (32)	32	15	3	41	23	74	9	39	50	33	31	4	36	31	1	1	4	36	34	48		
36	BALI	BADUNG (33)	33	8	2	4	30	35	21	57	32	65	47	23	16	10	1	4	29	17	24	29		
37	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN (34)	34	10	3	52	24	83	2	56	30	24	28	3	58	3	1	1	1	87	54	107		
38	SULAWESI SELATAN	MAROS (35)	35	10	2	21	33	57	21	56	48	75	60	25	31	17	7	1	10	10	3	7		
39	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA (36)	36	9	1	13	2	17	28	15	19	55	41	12	18	44	6	5	92	60	46	81		
40	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU (37)	37	14	2	21	9	32	45	50	41	124	62	2	1	25	5	1	8	81	57	102		
41	J A M B I	BATANGHARI (38)	38	2	2	31	20	28	13	13	49	34	53	18	73	17	2	2	15	62	72	102		
42	SUMATERA SELATAN	LAHAT (39)	39	15	1	15	27	53	14	35	12	35	54	18	73	38	6	1	11	44	22	43		
43	JAWA TENGAH	TEGAL (40)	40	15	2	32	33	81	2	14	23	10	23	24	114	14	10	4	78	1	5	4		
44	RIAU	ROKAN HULLU (41)	41	3	2	26	18	27	23	6	40	46	37	12	28	36	1	4	46	85	58	106		
45	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SEL. (42)	42	8	2	28	3	23	10	2	57	27	40	5	86	47	16	4	112	63	30	68		
46	SUMATERA UTARA	ASAHAN (43)	43	22	1	1	46	68	36	11	43	81	33	2	1	25	15	1	13	59	67	91		
47	SULAWESI TENGAH	TOLI TOLI (44)	44	10	2	11	4	21	37	12	41	82	58	5	13	25	7	4	73	83	73	117		
48	PAPUA	SORONG (45)	45	15	2	34	25	66	15	11	54	40	32	15	33	48	17	1	16	48	56	79		
49	BANTEN	LEBAK (46)	46	9	2	34	8	34	19	46	38	56	84	22	99	14	11	2	31	22	9	23		
50	BALI	KARANG ASEM (47)	47	8	3	32	15	37	19	25	9	41	67	14	86	47	1	5	59	29	18	33		
51	SUMATERA BARAT	SOLOK (48)	48	15	1	13	28	52	37	7	65	87	102	18	67	37	1	1	6	26	5	20		
52	R I A U	KAMPAR (49)	49	15	2	20	17	45	8	44	3	26	34	12	86	29	8	5	85	50	41	70		
53	JAWA TENGAH	CILACAP (50)	50	15	2	23	47	89	44	25	45	114	52	10	3	29	10	1	12	40	38	54		
54	BALI	BULELENG (51)	51	15	2	24	17	49	28	4	46	60	79	21	74	27	1	4	38	22	4	16		
55	KALIMANTAN TIMUR	PASIR (52)	52	12	1	3	27	36	28	20	49	77	45	7	9	37	15	4	106	72	42	88		
56	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA (53)	53	21	2	34	32	99	3	58	21	25	30	5	65	21	5	4	57	39	19	41		
57	JAWA TIMUR	SIDOARJO (54)	54	9	1	13	48	61	28	60	22	90	69	10	19	10	5	3	32	28	26	36		

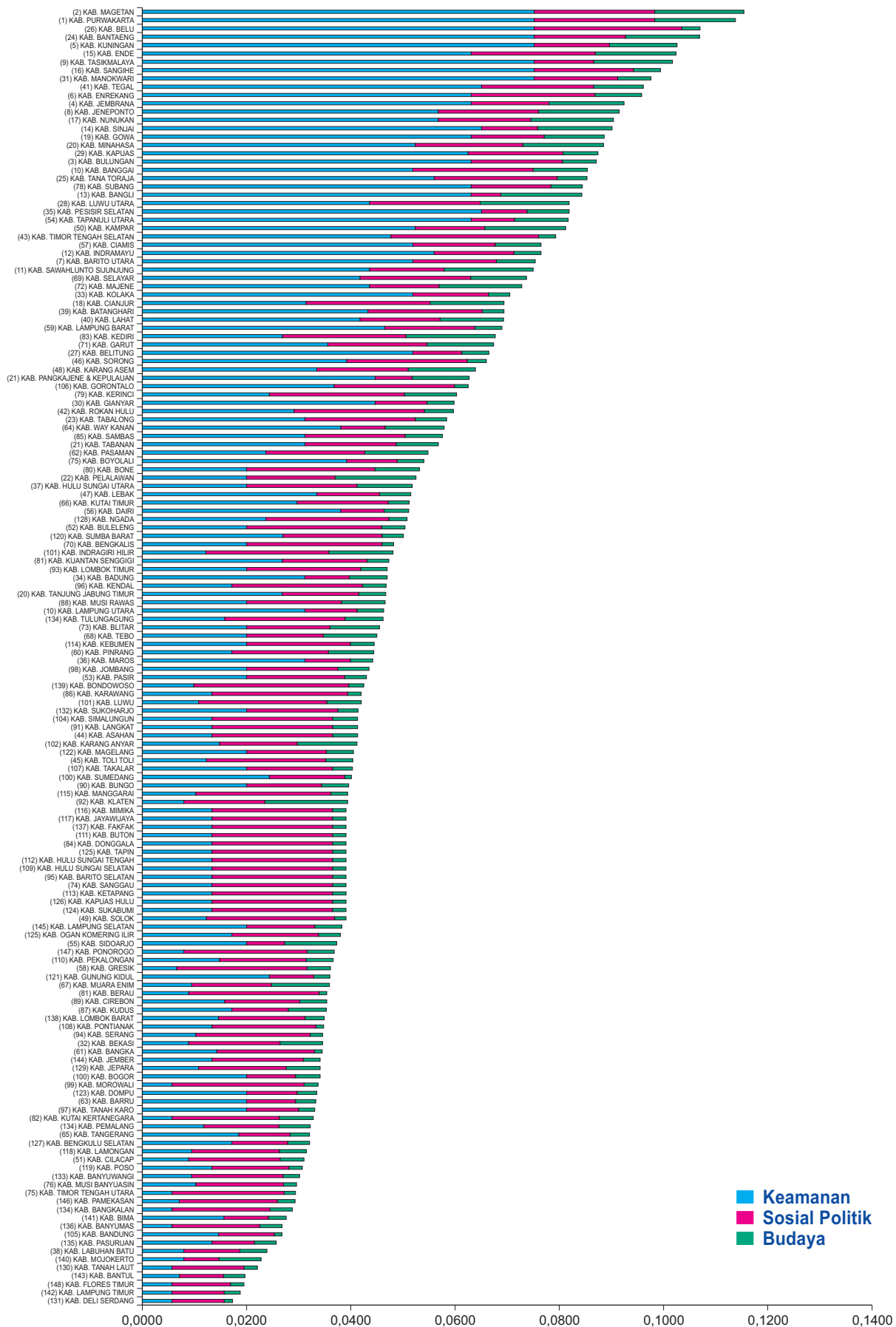
No.	Propinsi	Kabupaten	PERINGKAT TIAP INDIKATOR, VARIABEL, FAKTOR DAN SECARA TOTAL																							
			TOTAL SCORE	Aparatur & Pelayanan		Perda	Keuangan Daerah		Kepastian Hukum	TOTAL KELEMBAGAAN		Keamanan	Sosial Politik	Budaya	TOTAL SOSIAL POLITIK		Potensi Ekonomi	Struktur Ekonomi	TOTAL EKONOMI		Ketersediaan Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	TOTAL TENAGA KERJA		Ketersediaan Infrastruktur Fisik
Jumlah Peringkat			146	22	3	53	61	138	48	63	69	130	143	25	114	52	17	5	117	92	79	124				
58	SUMATERA UTARA	DAIRI (55)	55	8	2	32	18	43	16	58	44	58	48	15	24	43	14	5	111	46	50	70				
59	JAWA BARAT	CIAMIS (56)	56	15	2	38	22	65	9	33	25	28	35	3	59	28	12	5	104	59	27	53				
60	JAWA TIMUR	GRESIK (57)	57	19	3	33	36	101	47	6	46	93	64	17	15	15	15	3	65	2	3	1				
61	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT (58)	58	15	2	18	15	42	11	26	41	36	43	15	51	27	13	4	97	91	67	120				
62	SULAWESI SELATAN	PINRANG (59)	59	14	2	27	27	59	30	22	26	74	83	12	50	17	8	3	50	31	5	25				
63	BANGKA BELITUNG	BANGKA (60)	60	11	2	18	33	56	35	21	68	101	91	2	34	52	1	1	9	76	75	113				
64	SUMATERA BARAT	PASAMAN (61)	61	9	2	32	13	40	27	19	13	51	71	22	72	20	6	4	67	71	38	82				
65	SULAWESI SELATAN	BARRU (62)	62	9	1	10	30	44	28	55	52	107	123	5	70	1	1	4	14	30	29	42				
66	BANTEN	TANGERANG (63)	63	19	1	6	53	84	29	53	53	111	104	17	47	1	5	3	17	13	1	8				
67	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR (64)	64	14	3	35	33	76	22	25	51	57	21	15	4	29	17	5	107	92	74	124				
68	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM (65)	65	16	2	11	40	67	43	35	16	95	73	17	27	38	1	4	47	34	22	39				
69	JAMBI	TEBO (66)	66	9	2	26	8	30	28	37	21	72	89	5	60	27	2	5	61	88	71	116				
70	SULAWESI SELATAN	SELAYAR (67)	67	9	2	25	34	58	14	15	18	31	49	22	96	28	6	4	74	79	69	108				
71	R I A U	BENGKALIS (68)	68	19	2	4	42	70	28	3	65	62	80	3	53	7	1	4	21	56	35	65				
72	JAWA BARAT	GARUT (69)	69	15	2	30	30	71	18	19	10	38	68	22	111	14	13	4	84	35	11	33				
73	SULAWESI SELATAN	MAJENE (70)	70	12	3	47	44	112	13	44	2	32	42	5	60	51	6	4	95	31	23	37				
74	JAWA TIMUR	BLITAR (71)	71	7	3	47	2	29	28	32	23	71	87	22	72	40	12	5	108	47	46	72				
75	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU (72)	72	16	3	45	41	125	36	11	62	87	72	13	30	33	1	1	5	66	44	85				
76	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA (73)	73	6	2	28	4	18	48	14	66	118	134	5	86	52	12	5	116	56	16	45				
77	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN (74)	74	9	2	4	22	33	41	28	63	117	85	15	26	45	7	4	90	69	59	93				
78	JAWA TENGAH	BOYOLALI (75)	75	8	2	38	23	51	15	54	42	52	81	18	92	27	10	5	96	27	28	40				
79	LAMPUNG	WAY KANAN (76)	76	8	2	20	23	41	16	57	15	48	76	12	96	33	4	5	80	84	55	104				
80	JAWA BARAT	SUBANG (77)	77	15	3	50	41	126	3	35	38	22	29	22	96	19	6	4	66	30	70	67				
81	J A M B I	KERINCI (78)	78	15	1	13	33	60	26	4	22	44	59	11	49	27	10	4	92	71	65	100				
82	SULAWESI SELATAN	BONE (78)	78	15	2	38	52	110	28	7	27	53	86	12	100	13	1	3	22	15	14	22				
83	RIAU	KUANTAN SENGGIGI (79)	79	16	2	26	39	93	25	31	49	64	56	12	23	17	1	4	34	91	51	111				
84	KALIMANTAN TIMUR	BERAU (79)	79	16	2	14	59	91	44	6	68	96	41	4	2	17	17	3	73	86	70	112				
85	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KERTANEGARA (80)	80	9	3	35	33	66	48	16	36	109	79	15	26	8	17	3	53	46	38	58				
86	JAWA TIMUR	KEDIRI (81)	81	11	2	29	49	88	25	9	1	37	55	18	66	27	7	5	80	69	51	90				
87	SULAWESI TENGAH	DONGGALA (82)	82	13	2	24	41	75	36	11	62	87	75	12	32	17	7	4	64	55	32	62				
88	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS (83)	83	14	2	27	33	66	21	18	33	49	70	18	70	38	1	4	47	89	68	118				
89	JAWA BARAT	KARAWANG (84)	84	15	3	45	38	117	36	3	62	79	96	20	70	4	5	3	20	23	21	31				
90	JAWA TENGAH	KUDUS (85)	85	16	2	32	44	100	30	49	32	97	74	10	25	23	10	3	67	30	29	42				
91	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS (86)	86	12	1	9	29	48	28	23	28	68	96	15	90	32	1	4	42	91	69	121				
92	JAWA BARAT	CIREBON (87)	87	9	3	41	30	69	31	40	41	96	129	18	108	6	2	4	27	15	27	30				
93	J A M B I	BUNGO (88)	88	6	3	51	15	46	28	40	41	85	92	22	61	35	10	4	97	64	40	81				
94	SUMATERA UTARA	LANGKAT (89)	89	22	2	11	46	91	36	11	43	81	78	15	38	2	5	4	26	59	75	103				
95	JAWA TENGAH	KLATEN (90)	90	20	2	24	31	79	45	34	2	86	114	20	98	23	2	5	56	21	8	19				
96	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR (91)	91	15	2	34	26	73	28	13	42	65	65	22	37	32	9	5	100	68	53	91				
97	BANTEN	SERANG (92)	92	15	2	29	33	78	41	13	64	100	125	17	95	15	5	3	35	33	7	27				
98	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN (93)	93	16	2	20	41	85	36	11	62	87	82	22	42	29	1	3	29	66	63	94				
99	JAWA TENGAH	KENDAL (94)	94	17	3	47	31	105	30	6	45	66	88	13	67	41	10	3	82	15	12	21				
100	SUMATERA UTARA	TANAH KARO (95)	95	15	3	46	41	122	28	51	59	108	63	15	12	38	5	4	71	46	41	63				
101	JAWA TIMUR	JOMBANG (96)	96	18	3	45	20	83	28	25	38	76	101	18	92	17	7	5	72	27	20	32				
102	SULAWESI TENGAH	MOROWALI (97)	97	21	2	28	37	103	48	5	61	105	61	12	10	46	7	4	92	82	65	109				
103	JAWA BARAT	BOGOR (98)	98	18	3	41	37	114	28	55	44	103	125	17	89	3	5	4	27	11	21	26				
104	JAWA BARAT	SUMEDANG (98)	98	15	3	47	33	106	26	40	69	84	111	18	92	7	5	5	36	32	19	35				
105	R I A U	INDRAGIRI HILIR (99)	99	17	1	12	58	90	38	10	11	63	77	22	61	43	8	4	91	54	49	77				
106	SULAWESI SELATAN	LUWU (99)	99	17	1	19	27	62	40	7	35	79	107	4	80	25	7	4	73	77	45	91				
107	JAWA TENGAH	KARANG ANYAR (100)	100	15	2	30	33	80	33	36	14	81	93	6	54	36	10	4	98	38	41	55				
108	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA (101)	101	14	3	45	34	97	21	51	42	69	95	5	81	17	4	4	52	57	36	69				
109	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN (102)	102	22	2	21	46	103	36	11	43	81	90	7	48	9	5	3	32	59	72	101				
110	JAWA BARAT	BANDUNG (103)	103	19	2	21	36	87	34	50	68	122	127	17	62	1	5	3	17	49	52	77				
111	GORONTALO	GORONTALO (104)	104	16	3	52	41	128	17	11	62	43	70	18	101	13	6	4	58	51	40	70				
112	SULAWESI SELATAN	TAKALAR (105)	105	19	2	33	48	118	28	30	53	83	109	18	87	20	6	2	24	46	29	49				
113	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK (106)	106	19	3	33	54	122	36	17	68	99	97	6	41	17	1	3	25	61	47	82				
114	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SEL.(107)	107	16	2	34	41	102	36	11	62	87	94	22	61	27	1	5	44	59	46	89				

No.	Propinsi	Kabupaten	PERINGKAT TIAP INDIKATOR, VARIABEL, FAKTOR DAN SECARA TOTAL																			
			TOTAL SCORE	Aparatur & Pelayanan		Perda	Keuangan Daerah		Kepastian Hukum	TOTAL KELEMBAGAAN	Keamanan	Sosial Politik	Budaya	TOTAL SOSIAL POLITIK	Potensi Ekonomi	Struktur Ekonomi	TOTAL EKONOMI	Ketersediaan Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	TOTAL TENAGA KERJA	Ketersediaan Infrastruktur Fisik
Jumlah Peringkat			146	22	3	53	61	138	48	63	69	130	143	25	114	52	17	5	117	92	79	124
115	JAWA TENGAH	PEKALONGAN (108)	108	21	2	29	51	120	33	29	41	92	121	20	88	44	2	4	66	18	8	17
116	SULAWESI TENGGARA	BUTON (109)	109	16	1	19	41	83	36	11	62	87	122	18	103	25	1	5	42	60	43	78
117	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH (110)	110	16	2	27	41	95	36	11	62	87	115	22	100	1	7	5	33	59	46	80
118	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG (111)	111	16	3	40	41	113	36	11	62	87	102	18	67	11	1	4	30	64	52	89
119	JAWA TENGAH	KEBUMEN (112)	112	15	2	29	35	82	28	17	45	73	103	22	105	40	13	5	109	41	33	50
120	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI (113)	113	10	2	27	26	55	41	4	58	86	118	12	93	52	4	5	91	76	77	117
121	PAPUA	MIMIKA (114)	114	16	3	28	41	96	36	11	62	87	106	17	71	5	17	5	62	59	55	86
122	PAPUA	JAYAWIJAYA (115)	115	16	2	25	41	92	36	11	62	87	98	8	56	47	5	5	84	80	66	105
123	JAWA TIMUR	LAMONGAN (116)	116	15	2	29	33	78	43	28	41	113	132	5	94	18	13	5	94	32	37	47
124	SULAWESI TENGAH	POSO (117)	117	16	2	32	41	99	36	37	62	115	126	18	73	15	7	3	43	51	46	75
125	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT (118)	118	9	3	49	25	74	24	19	50	61	97	12	107	50	10	5	114	74	72	110
126	DI. YOGYA	JUNUNG KIDUL (119)	119	18	2	37	27	86	26	57	59	94	100	18	55	41	12	4	103	67	64	96
127	JAWA TENGAH	MAGELANG (120)	120	15	3	41	48	116	28	35	41	81	108	18	83	23	10	5	93	27	41	46
128	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU (121)	121	16	2	27	30	72	28	54	53	106	110	5	50	25	9	5	94	76	79	115
129	JAWA BARAT	SUKABUMI (122)	122	16	3	41	41	115	36	11	62	87	112	18	87	13	10	4	75	37	39	54
130	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR (123)	123	16	3	44	36	108	30	29	49	89	116	18	87	33	7	4	79	37	45	59
131	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN (123)	123	16	3	42	41	119	36	11	62	87	94	22	61	39	6	5	90	59	40	76
132	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU (124)	124	16	3	48	41	127	36	11	62	87	102	1	51	27	7	3	54	79	52	97
133	BENGKULU	BENGKULU SELATAN (125)	125	15	3	47	14	64	30	50	49	112	128	11	85	29	13	5	105	73	67	102
134	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA (126)	126	15	2	34	48	103	27	10	55	59	81	5	65	52	13	5	117	83	79	123
135	JAWA TENGAH	JEPARA (127)	127	16	2	32	55	107	40	28	36	102	117	20	68	33	10	5	101	39	38	53
136	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT (128)	128	22	2	27	45	111	48	43	62	126	137	18	66	24	1	4	37	51	32	60
137	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG (129)	129	22	3	42	61	133	48	51	67	130	135	13	46	2	5	3	18	46	29	49
138	JAWA TENGAH	SUKOHARJO (130)	130	21	3	43	60	131	28	25	52	80	99	20	77	22	10	4	89	39	41	56
139	JAWA TIMUR	BANYUWANGI (131)	131	19	2	29	43	104	43	25	58	116	130	5	75	30	12	5	105	43	44	64
140	JAWA TIMUR	BANGKALAN (132)	132	17	2	29	35	90	48	20	48	120	133	22	99	33	10	5	101	52	44	74
141	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG (132)	132	21	3	46	61	137	31	11	32	70	81	19	57	18	13	4	92	65	61	92
142	JAWA TENGAH	PEMALANG (132)	132	18	2	30	38	98	39	40	38	110	129	18	97	40	10	4	102	62	38	74
143	JAWA TIMUR	PASURUAN (133)	133	21	2	11	56	97	36	59	49	123	142	6	103	30	7	5	82	40	38	54
144	JAWA TENGAH	BANYUMAS (134)	134	19	2	36	40	109	48	28	48	122	138	18	101	15	10	5	86	46	23	44
145	PAPUA	FAKFAK (135)	135	16	3	41	41	115	36	11	62	87	120	18	101	26	17	4	103	65	66	95
146	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT (136)	136	18	3	33	56	121	34	29	54	98	131	11	106	49	10	5	110	48	33	57
147	JAWA TIMUR	BONDOWOSO (137)	137	22	2	30	53	124	42	1	60	78	119	5	102	47	12	5	113	78	53	98
148	JAWA TIMUR	MOJOKERTO (138)	138	21	3	42	50	130	45	62	30	125	136	20	68	23	3	4	55	39	48	62
149	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA (139)	139	15	2	23	37	77	32	57	56	121	140	22	113	20	10	5	91	75	76	114
150	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR (140)	140	22	3	47	56	136	48	51	59	129	105	12	23	27	4	5	63	90	67	119
151	D.I. YOGYAKARTA	BANTUL (141)	141	19	2	36	44	116	46	57	50	127	141	18	76	18	10	5	90	54	41	73
152	JAWA TIMUR	JEMBER (142)	142	20	3	49	38	129	36	25	58	104	124	22	99	30	10	5	98	60	48	82
153	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN (143)	143	21	3	46	56	135	28	45	41	88	113	4	69	29	13	4	99	69	67	101
154	JAWA TIMUR	PAMEKASAN (144)	144	20	2	33	50	123	46	20	56	119	139	12	110	40	7	5	92	78	64	103
155	JAWA TIMUR	PONOROGO (145)	145	22	3	46	60	138	45	10	41	91	129	18	112	19	12	5	95	58	53	83
156	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR (146)	146	22	3	45	57	134	48	48	62	128	143	11	109	51	4	5	88	73	76	112

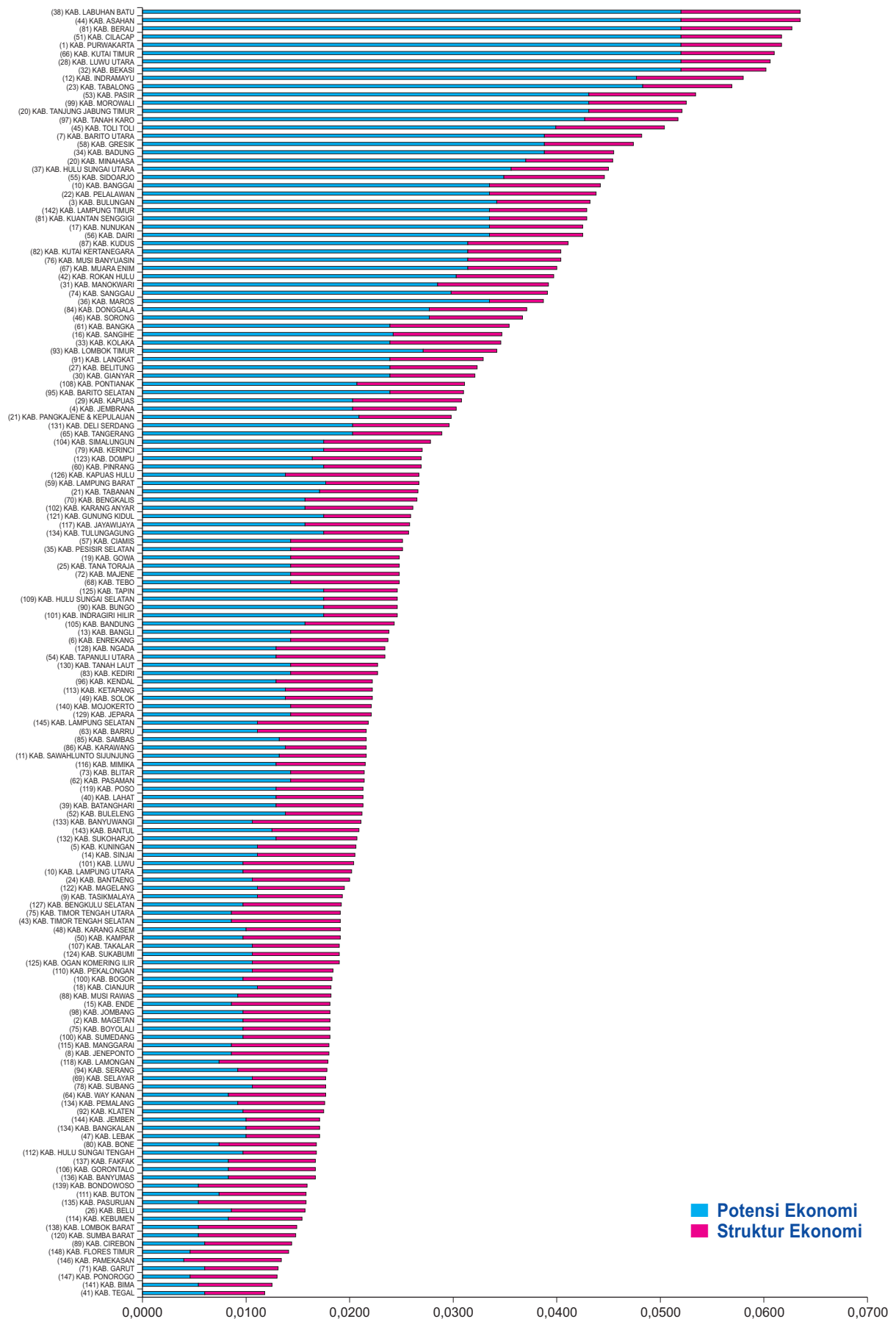
Lampiran 1.1.3. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan



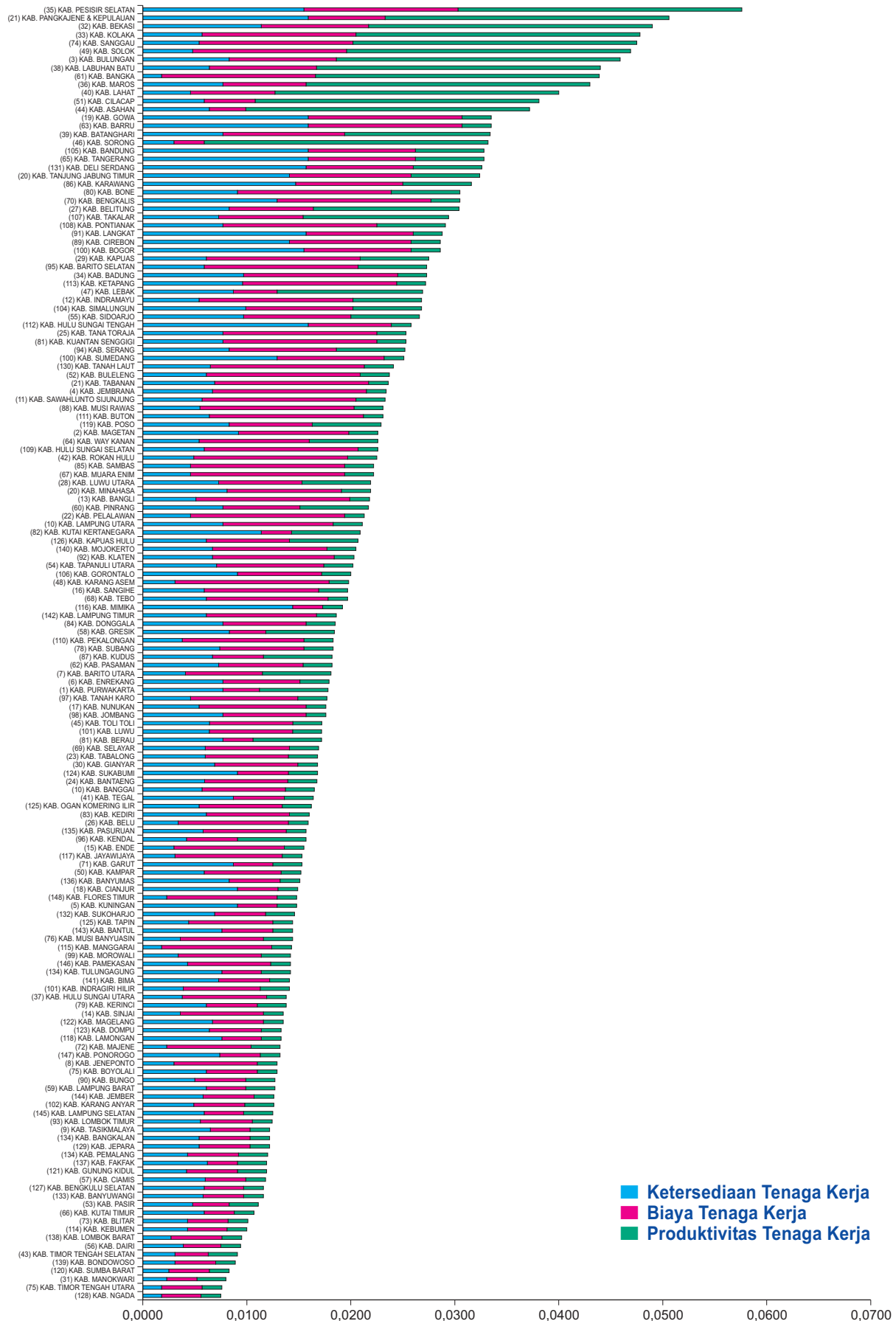
Lampiran 1.1.4. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Sosial Politik



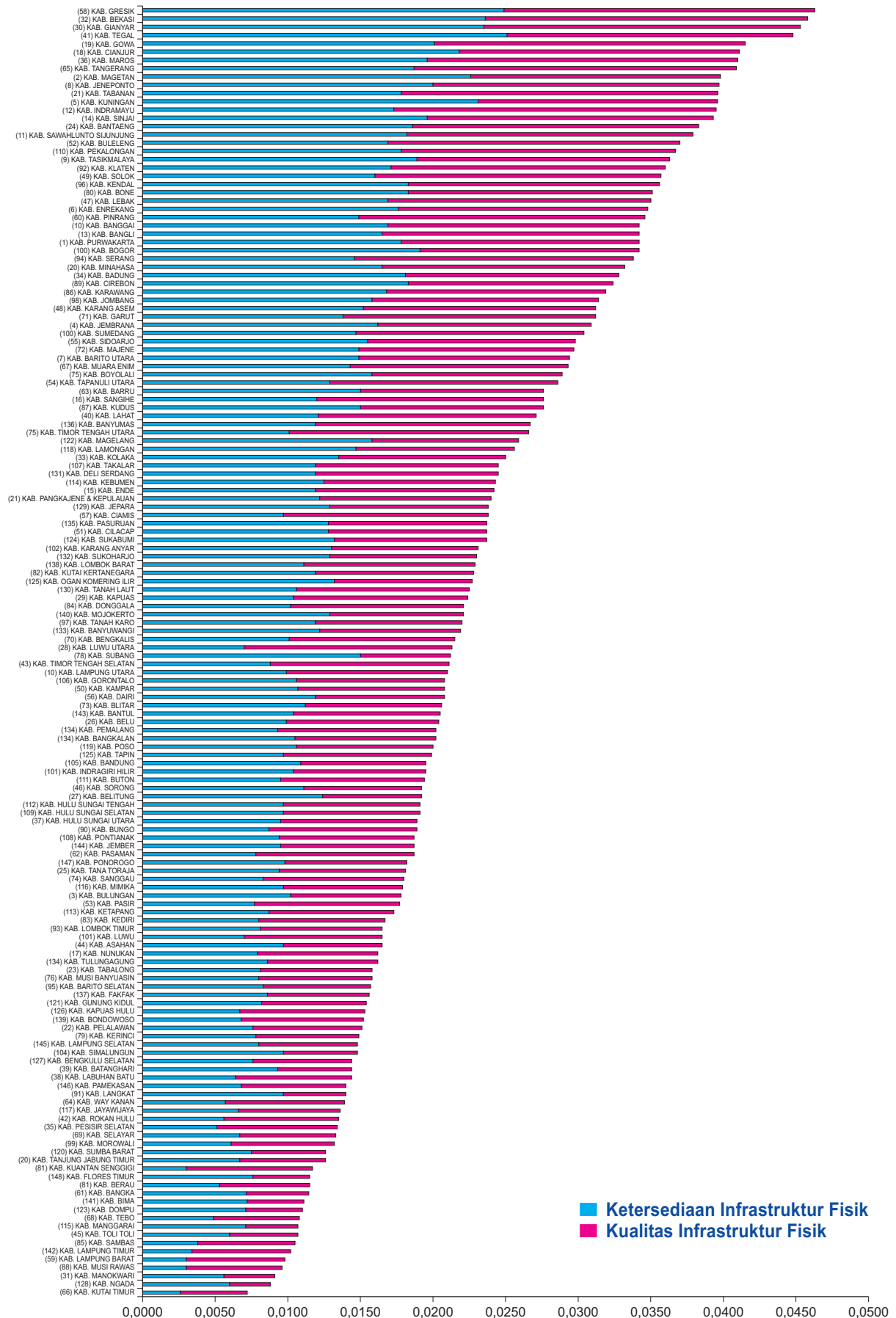
Lampiran 1.1.5. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah



Lampiran 1.1.6. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas

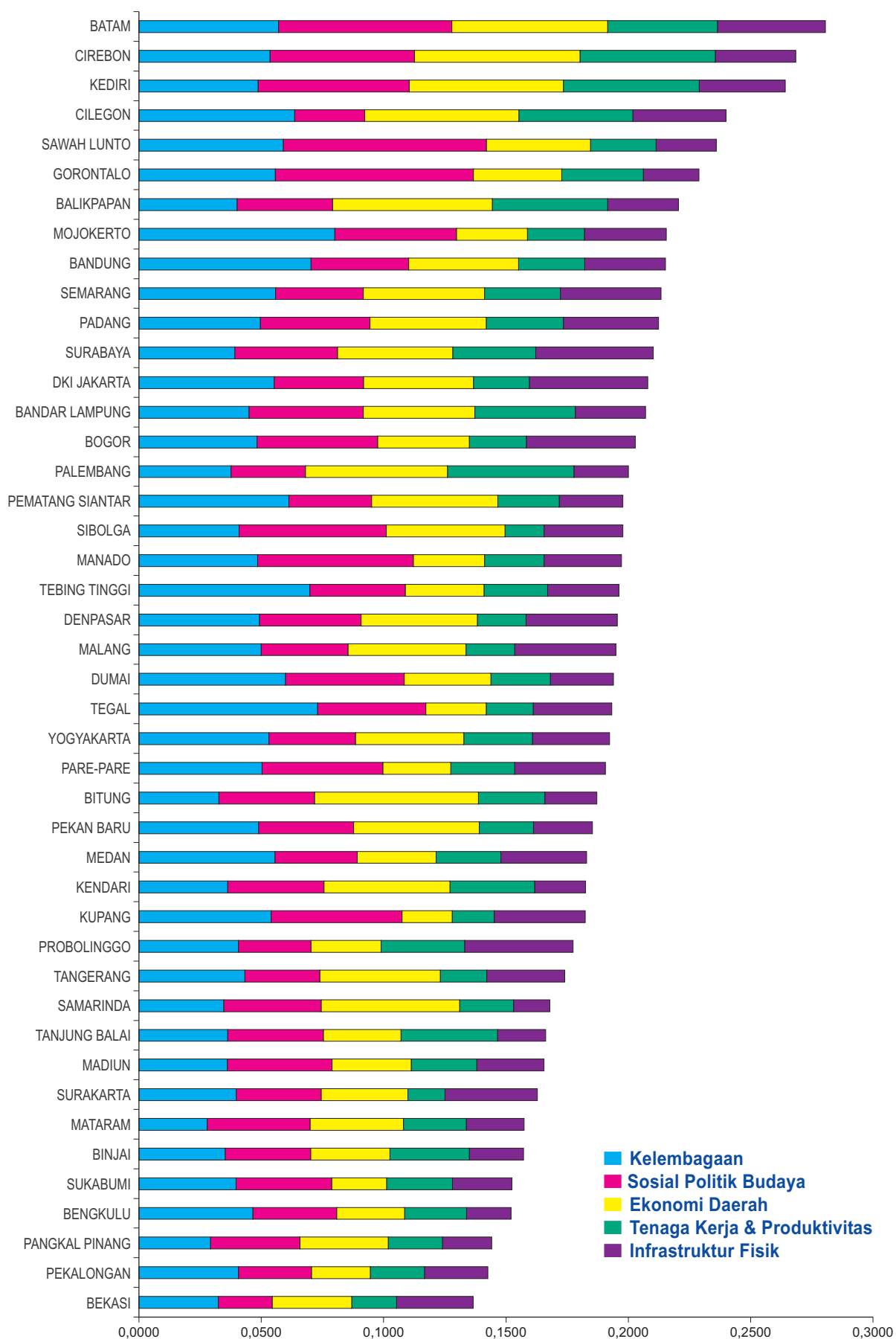


Lampiran 1.1.7. Peringkat Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik



Lampiran 1.2. Peringkat Kota

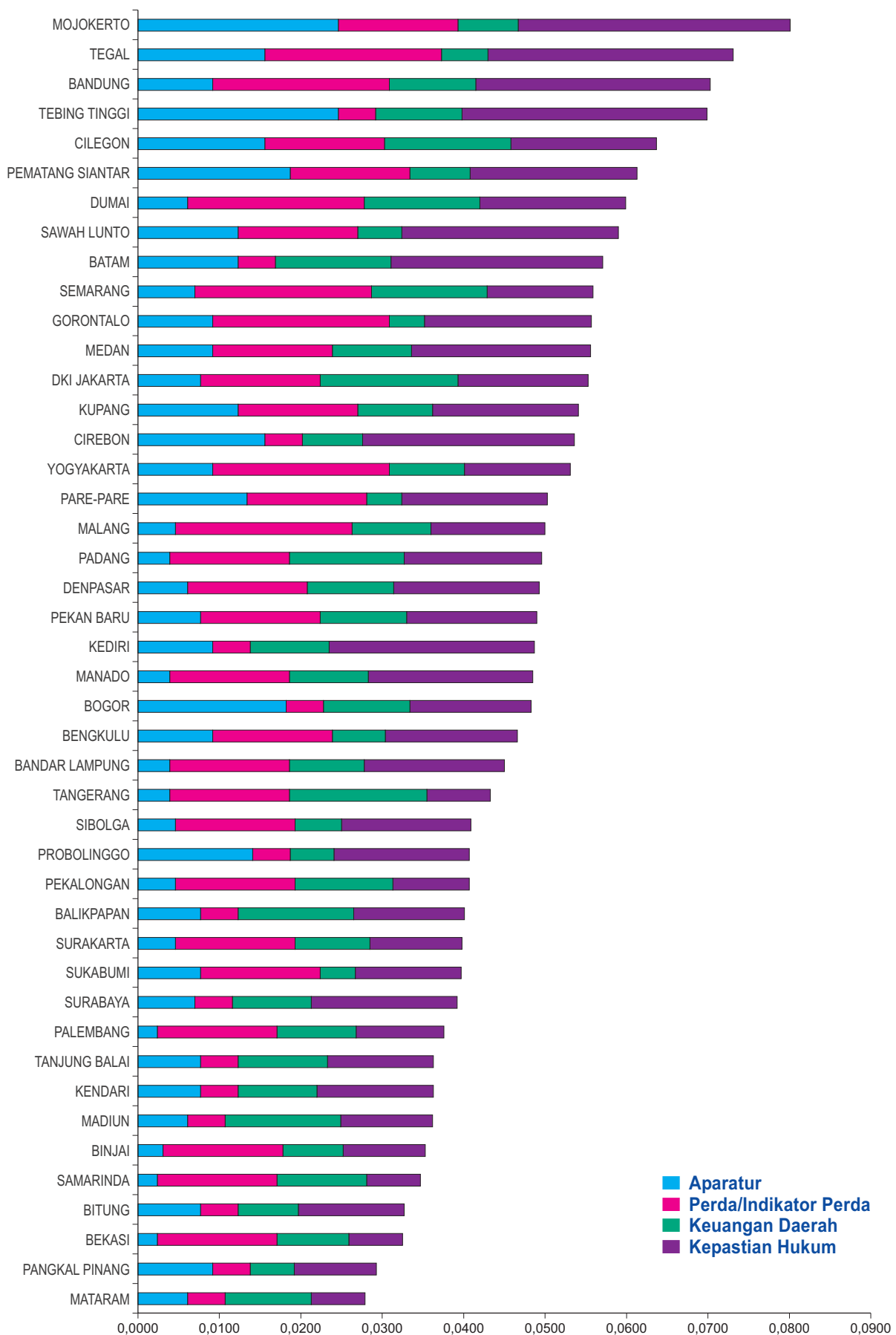
Lampiran 1.2.1. Peringkat Daya Tarik Investasi 44 Kota di Indonesia



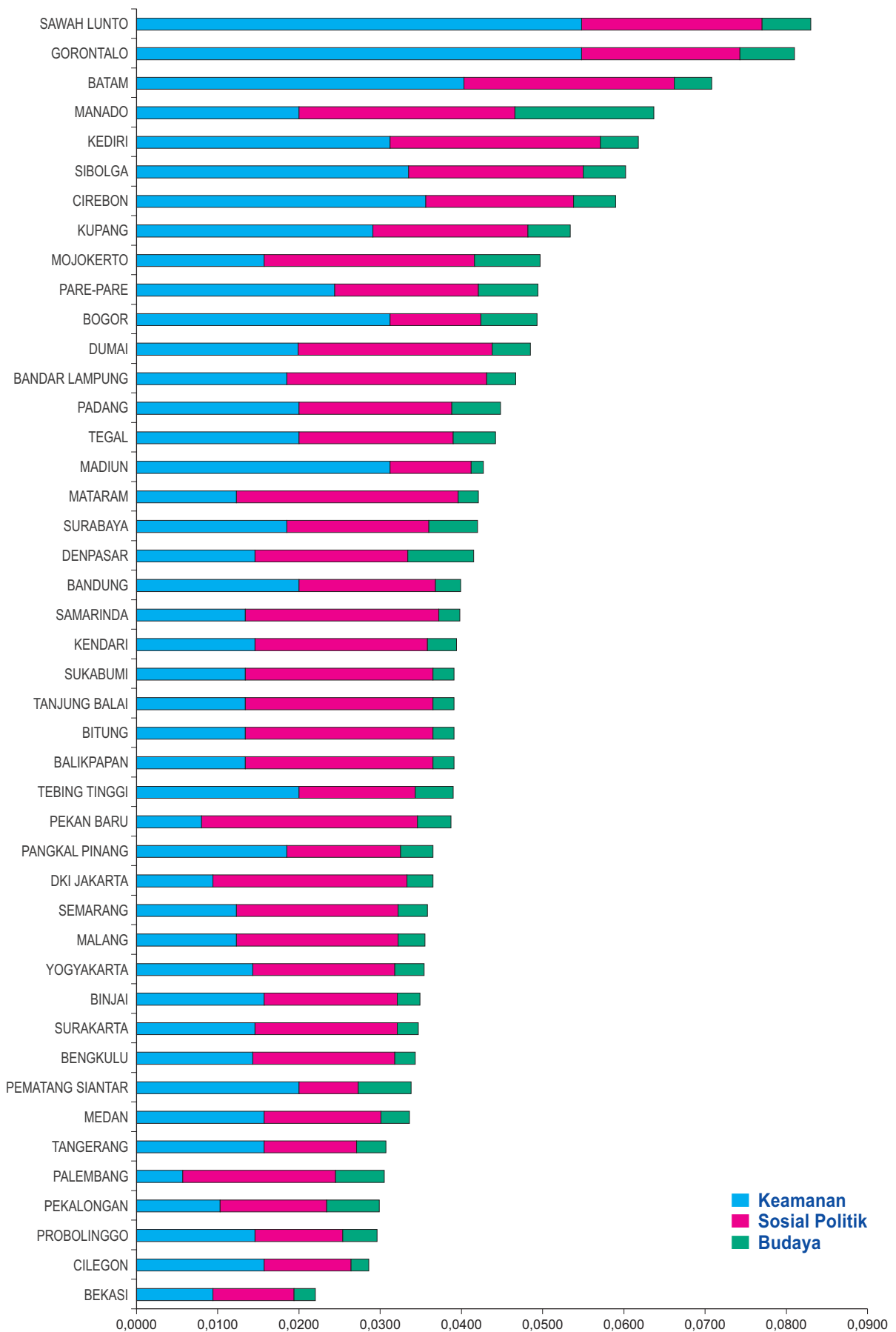
Lampiran 1.2.2. Neraca Peringkat Faktor dan Variabel Daya Tarik Investasi 44 Kota di Indonesia

No.	Propinsi	Kota	PERINGKAT TIAP INDIKATOR, VARIABEL, FAKTOR DAN SECARA TOTAL																	
			TOTAL SCORE	Aparatur & Pelayanan	Perda	Keuangan Daerah	Kepastian Hukum	TOTAL KELEMBAGAAN	Keamanan	Sosial Politik	Budaya	TOTAL SOSIAL POLITIK	Potensi Ekonomi	Struktur Ekonomi	TOTAL EKONOMI	Ketersediaan Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	TOTAL TENAGA KERJA	Ketersediaan Infrastruktur Fisik
Jumlah Peringkat			43	15	3	15	27	42	19	30	23	40	26	14	35	22	15	5	40	28
1	R I A U	KOTA BATAM	1	7	3	3	5	9	2	3	10	3	1	9	4	21	4	1	6	3
2	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	2	4	3	11	5	15	3	16	8	7	1	4	1	4	2	1	2	8
3	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	3	8	3	8	6	22	5	3	9	5	2	9	5	9	1	1	1	10
4	BANTEN	KOTA CILEGON	4	4	2	2	10	5	11	28	22	39	2	9	5	7	12	1	5	9
5	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	5	7	2	14	4	8	1	8	7	1	12	8	19	6	6	4	21	23
6	GORONTALO	KOTA GORONTALO	6	8	1	15	8	11	1	12	5	2	14	14	22	7	1	4	12	27
7	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	7	9	3	3	20	30	14	7	20	23	1	6	3	3	15	1	4	14
8	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	8	1	2	11	1	1	11	3	2	9	20	10	29	2	9	5	29	15
9	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	9	8	1	7	3	3	8	19	18	20	11	5	17	3	12	3	18	14
10	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	10	10	1	3	21	10	15	11	14	27	7	5	10	9	1	4	15	9
11	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	11	13	2	4	12	19	8	15	7	14	7	10	14	3	6	3	14	7
12	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	12	10	3	8	10	33	10	18	7	18	11	4	15	15	4	2	11	1
13	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	13	9	2	1	15	13	17	5	17	26	11	5	17	9	15	3	30	1
14	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	14	13	2	9	11	26	10	4	14	13	9	5	16	4	3	2	7	16
15	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	15	3	3	7	17	24	5	26	4	11	15	5	21	3	12	4	29	2
16	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	16	15	2	8	23	34	19	15	7	36	4	4	6	3	7	1	3	25
17	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	17	2	2	11	8	6	8	30	6	33	7	4	8	17	4	3	27	21
18	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	17	12	2	13	16	28	4	9	8	6	6	14	12	22	15	3	39	16
19	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	18	13	2	8	9	23	8	2	1	4	20	10	29	1	11	4	29	12
20	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	19	1	3	7	2	4	8	22	9	24	19	5	27	6	12	3	24	18
21	BALI	KOTA DENPASAR	20	11	2	7	10	20	12	15	2	19	7	10	14	15	7	4	34	4
22	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	21	12	1	8	19	18	15	11	16	28	10	2	13	15	11	3	34	5
23	R I A U	KOTA DUMAI	22	11	1	3	10	7	9	5	9	12	15	10	23	19	1	5	28	20
24	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	23	4	1	13	2	2	8	14	8	15	23	12	32	19	8	3	35	6
25	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	24	8	1	9	21	16	13	18	14	29	8	10	18	15	2	3	16	11
26	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	25	6	2	15	10	17	7	17	3	10	20	13	31	5	7	4	23	16
27	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	26	9	3	11	21	39	14	7	20	23	2	4	2	3	11	3	17	25
28	R I A U	KOTA PEKAN BARU	27	9	2	7	15	21	18	2	12	25	5	10	9	12	7	4	32	23
29	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	28	8	2	8	7	12	11	21	15	34	16	10	26	4	12	3	22	16
30	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	29	9	3	8	18	35	12	10	14	22	6	7	9	3	1	4	9	24
31	NTT	KOTA KUPANG	30	7	2	9	10	14	6	13	8	8	25	10	35	13	10	5	38	19
32	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	31	5	3	14	13	29	12	27	11	38	21	10	30	11	5	2	10	3
33	BANTEN	KOTA TANGERANG	32	13	2	1	26	27	11	25	14	35	7	6	11	16	13	3	36	11
34	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	33	15	2	6	27	38	14	6	20	21	3	5	7	10	15	3	33	28
35	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	34	9	3	6	21	35	14	7	20	23	17	11	28	8	4	2	8	25
36	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	35	11	3	3	22	36	5	29	23	16	22	4	25	3	14	3	20	17
37	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	36	12	2	9	22	31	12	18	20	31	18	3	23	20	8	4	40	5
38	NTB	KOTA MATARAM	37	11	3	7	27	42	15	1	21	17	13	13	20	14	2	4	25	24
39	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	38	14	2	11	23	37	11	20	19	30	22	4	25	18	4	2	13	23
40	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	39	9	2	15	21	32	14	7	20	23	24	13	34	3	6	5	19	22
41	BENGKULU	KOTA BENGKULU	40	8	2	12	14	25	13	18	21	32	20	13	31	12	3	4	26	26
42	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	41	8	3	14	24	41	10	23	13	25	15	7	22	18	7	3	32	27
43	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	42	12	2	5	25	29	16	24	6	37	26	1	33	19	2	4	31	13
44	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	43	15	2	10	27	40	17	29	20	40	18	6	24	16	15	3	37	14

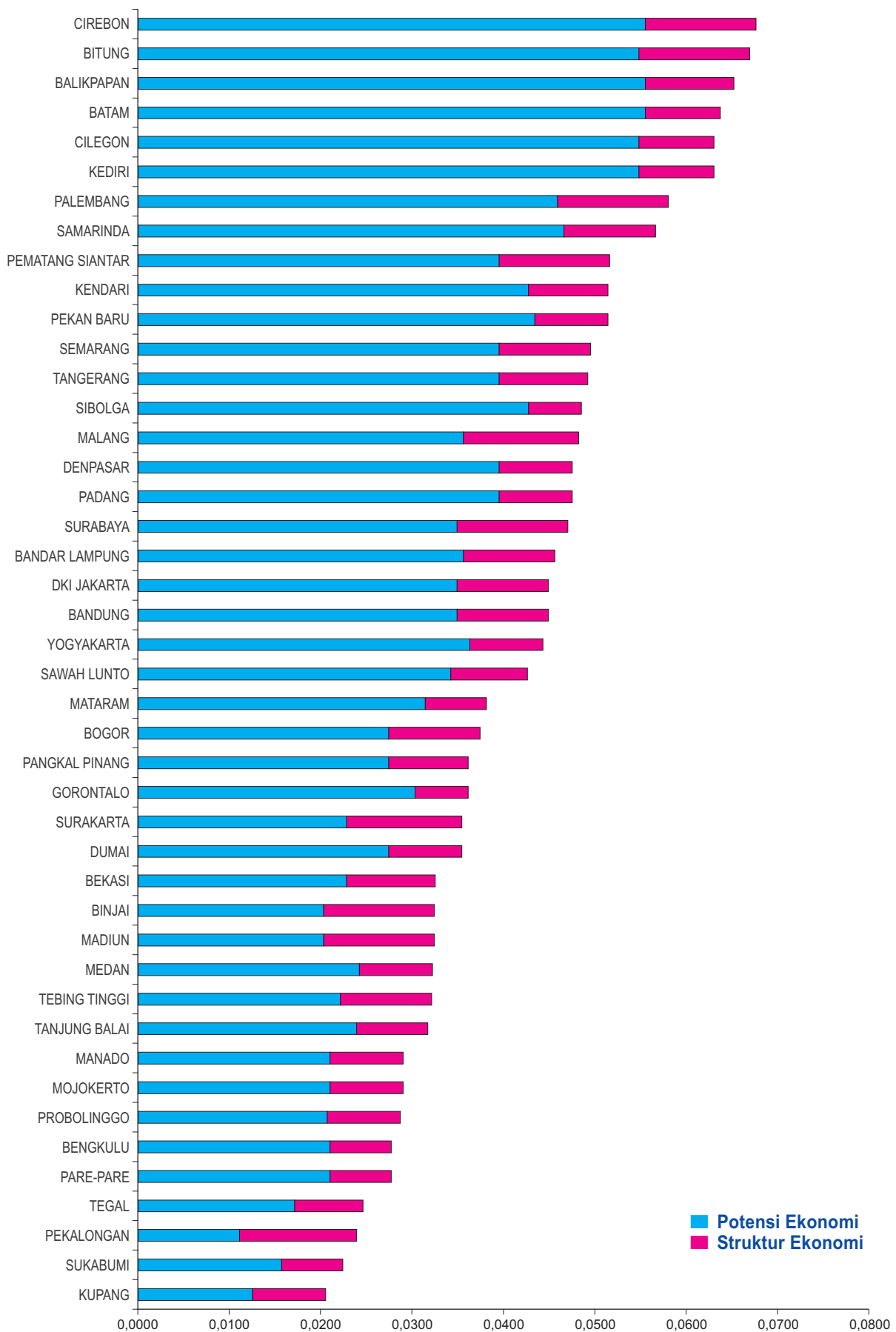
Lampiran 1.2.3. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan



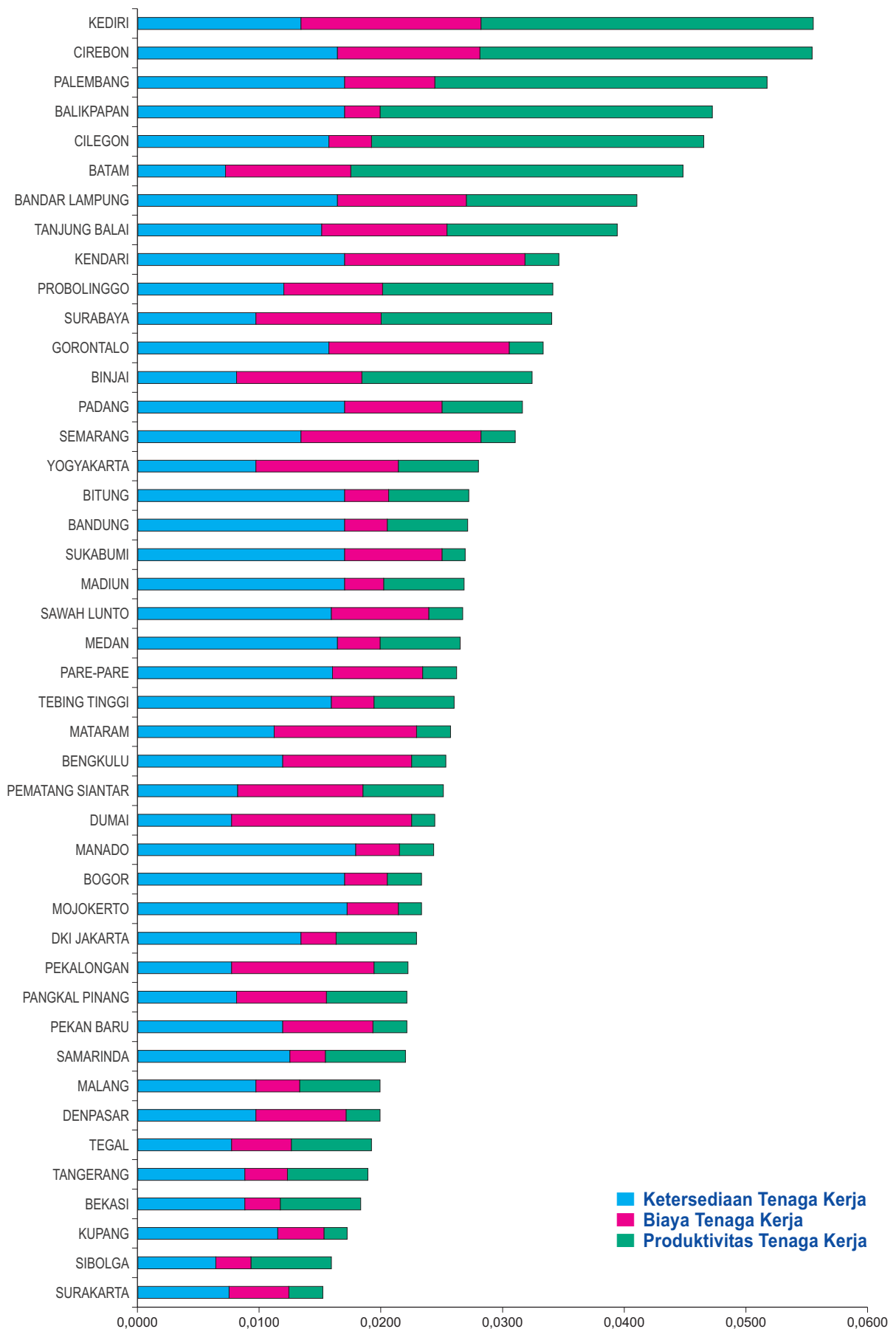
Lampiran 1.2.4. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Sosial Politik



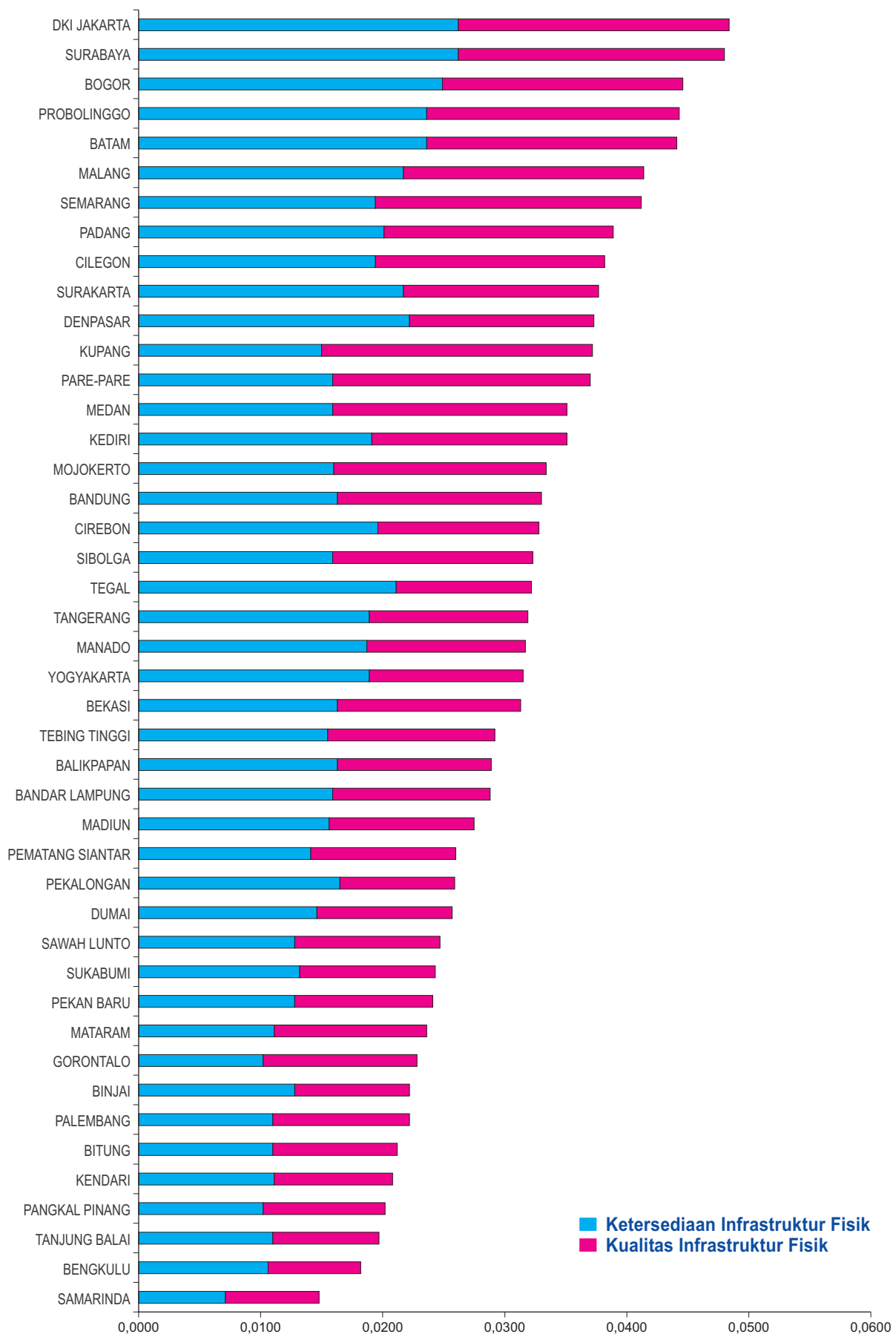
Lampiran 1.2.5. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah



Lampiran 1.2.6. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas



Lampiran 1.2.7. Peringkat Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik



Lampiran 1.3. Perubahan Peringkat Kabupaten

Lampiran 1.3.1. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2003

PROPINSI				JAWA BARAT	JAWA TIMUR		KALIMANTAN TIMUR	BALI		JAWA BARAT	SULAWESI SELATAN	KALIMANTAN TENGAH		SULAWESI SELATAN	JAWA BARAT	SULAWESI TENGAH		SUMATERA BARAT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. PURWAKARTA	KAB. MAGETAN		KAB. BULUNGAN	KAB. JEMBRANA		KAB. KUNINGAN	KAB. ENREKANG	KAB. BARITO UTARA		KAB. JENEPONTO	KAB. TASIKMALAYA		KAB. BANGGAI	KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2002
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Birokrasi	0,0483	A	A	C	A	B	C	A	C	A	A	C	A	A	C	B	C
		P. Wewenang	0,0235	A	A	C	B	A	C	C	D	B	E	D	A	B	D	A	B
	Perda		0,0771	B	D	D	B	B	B	B	B	C	C	C	B	C	C	C	C
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	B	C	C	C	C	C	E	E	C	C	C	D	D	D	C	C
		Anggaran Pemb.	0,0141	D	D	D	A	E	E	E	E	C	A	A	C	E	E	C	C
	Kepastian Hukum	Konsistensi Per.	0,0350	A	A	C	C	A	C	A	C	A	A	C	A	A	C	A	A
		Penegakan Hk.	0,0524	C	A	C	A	A	C	A	C	A	A	C	A	A	C	B	B
		Pungli LB	0,0194	B	A	D	C	A	C	B	C	A	A	A	B	A	C	A	B
		Eks-Leg	0,0167	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Total Lembaga			0,0998	0,1024	0,0369	0,0996	0,1068	0,0548	0,1021	0,0502	0,1075	0,1058	0,0587	0,1136	0,1041	0,0443	0,0918	0,0783
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangg. Usaha	0,0523	A	A	B	A	A	B	A	C	A	A	C	B	A	D	A	B
		Gangg. Masya.	0,0311	A	A	B	A	A	B	A	C	A	A	B	B	A	C	A	B
		Kec. Aparatur	0,0724	A	A	C	B	B	B	A	D	B	C	C	A	A	D	C	C
	Sosial Politik	Ptsp.Msy.	0,0120	A	A	C	C	C	C	C	D	C	A	D	A	A	D	A	A
		KonflikMsy	0,0184	A	A	B	C	E	C	C	D	A	C	B	A	C	D	A	C
		Stabilitas Politik	0,0289	B	B	B	A	A	C	C	C	B	B	D	C	C	C	B	B
		Unjuk Rasa	0,0095	D	D	A	C	E	C	A	C	B	D	B	C	D	C	D	B
	Budaya	Terbuka	0,0086	B	A	B	B	A	C	C	C	C	E	C	B	A	C	E	A
		Non Diskriminasi	0,0064	A	A	B	C	A	C	A	C	B	E	C	A	A	C	E	A
		Adat Istiadat	0,0071	A	A	C	C	A	C	B	C	B	E	D	A	C	C	A	B
		Etos Kerja	0,0141	A	A	C	C	B	D	A	C	B	A	D	A	A	C	A	A
	Total Sospolbud			0,1138	0,1154	0,0623	0,0871	0,0924	0,0596	0,1026	0,0286	0,0958	0,0754	0,0389	0,0915	0,1017	0,0258	0,0854	0,0674

PROPINSI				JAWA BARAT		JAWA TIMUR		KALIMANTAN TIMUR		BALI		JAWA BARAT		SULAWESI SELATAN		KALIMANTAN TENGAH		SULAWESI SELATAN		JAWA BARAT		SULAWESI TENGAH		SUMATERA BARAT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. PURWAKARTA		KAB. MAGETAN		KAB. BULUNGAN		KAB. JEMBRANA		KAB. KUNINGAN		KAB. ENREKANG		KAB. BARITO UTARA		KAB. JENEPONTO		KAB. TASIKMALAYA		KAB. BANGGAI		KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	A	D	D	A	C	C	D	D	D	A	A	E	D	D	C	D	C	C				
		Pertumbuhan	0,0463	A	E	E	E	C	C	D	D	C	C	B	C	D	D	A	A	C	C				
		IPM	0,0239	C	C	C	B	B	C	C	C	C	B	C	E	C	C	C	C	E	C				
	Struktur Ekonomi	NT Primer	0,0219	E	C	D	B	C	C	C	D	B	B	B	B	D	C	B	B	C	B				
		NT Sekunder	0,0151	A	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C				
		NT Tersier	0,0123	C	C	C	E	A	A	B	C	D	D	D	D	B	C	D	D	C	C				
	Total Ekonomi			0,0617	0,0181	0,0155	0,0432	0,0303	0,0275	0,0206	0,0156	0,0237	0,0482	0,0525	0,0180	0,0193	0,0195	0,0442	0,0410	0,0216	0,0293				
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	C	A	B	B	B	A	C	B	C	E	C	E	B	C	D	C	D	E				
		SLTP	0,0097	B	B	B	B	B	B	E	E	B	B	B	D	D	E	B	B	B	D				
		Pencari Kerja	0,0235	C	C	C	C	D	C	B	B	C	E	E	D	C	C	D	D	D	E				
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	E	D	D	E	A	A	D	B	A	A	A	A	D	D	A	D	A	C				
		Upah Aktual/IHK	0,0163	D	B	C	B	B	B	D	D	E	E	D	D	D	C	D	B	B	D				
	Produktivitas		0,0525	C	D	D	A	E	D	E	D	D	C	C	E	E	D	D	D	D	D				
	Total Tenaga Kerja			0,0178	0,0226	0,0150	0,0459	0,0234	0,0268	0,0148	0,0174	0,0179	0,0181	0,0200	0,0129	0,0122	0,0121	0,0165	0,0195	0,0233	0,0093				
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	B	A	B	D	B	A	B	B	E	E	E	D	C	B	E	D	C	D				
		Pelabuhan Laut	0,0141	C	D	C	B	B	B	C	C	D	D	D	C	D	C	C	C	C	C				
		Pelabuhan Udara	0,0058	C	D	C	C	C	C	C	C	C	E	E	C	C	C	E	D	C	C				
		Telepon	0,0160	C	A	A	C	D	C	A	B	A	A	E	A	A	B	A	C	B	B				
		Listrik	0,0175	B	A	D	E	B	D	A	B	A	B	E	A	A	B	B	C	A	D				
	Kualitas	Jalan	0,0095	C	C	B	E	B	B	C	C	C	D	C	B	B	C	C	D	B	C				
		Pelabuhan Laut	0,0089	A	D	C	C	B	C	C	C	D	D	B	C	D	C	C	C	C	B				
		Pelabuhan Udara	0,0073	A	B	C	B	A	A	D	C	B	D	C	B	D	C	C	B	B	B				
		Telepon	0,0204	C	B	D	C	C	C	B	D	B	B	C	B	B	C	B	B	B	C				
		Listrik	0,0139	B	B	D	E	C	C	B	D	B	B	D	B	B	C	B	C	B	C				
	Total Infrastruktur			0,0342	0,0398	0,0260	0,0178	0,0309	0,0293	0,0396	0,0262	0,0348	0,0294	0,0138	0,0397	0,0363	0,0293	0,0342	0,0246	0,0379	0,0240				
TOTAL SCORE			1,0000	0,3273	0,2983	0,1557	0,2936	0,2838	0,1980	0,2797	0,1380	0,2797	0,2769	0,1839	0,2757	0,2736	0,1310	0,2721	0,2308	0,2712	0,1635				
PERINGKAT				1/B	2	62	3/B	4	29	5	76	5/B	6	39	7/B	8	84	9	13	10	55				

Lampiran 1.3.2. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Atas Pada Rating 2002

PROPINSI				SUMATERA UTARA		JAWA BARAT		JAWA TENGAH		JAWA TENGAH		BALI		JAWA TIMUR		JAWA TENGAH		BALI		KALIMANTAN TIMUR		KALIMANTAN TIMUR	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. DAIRI		KAB. BEKASI		KAB. KENDAL		KAB. PEMALANG		KAB. GIANJAR		KAB. SIDOARJO		KAB. PEKALONGAN		KAB. BADUNG		KAB. BERAU		KAB. KUTAI KERTANEGARA	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Birokrasi	0,0483	A	C	C	C	B	C	B	D	A	B	B	B	C	E	B	C	B	C	B	B
		P. Wewenang	0,0235	C	A	C	C	D	E	B	C	C	A	E	C	B	D	C	A	C	D	C	C
	Perda		0,0771	C	C	D	D	D	D	C	C	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	D	D
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	D	D	B	B	C	C	C	C	B	A	C	C	C	C	A	A	B	B	B	B
		Anggaran Pemb.	0,0141	C	C	B	B	E	E	E	E	B	B	C	C	E	D	A	A	A	A	A	A
	Kepastian Hukum	Konsistensi Per.	0,0350	A	B	C	C	A	C	A	C	C	C	B	D	B	D	D	C	C	D	C	C
		Penegakan Hk.	0,0524	A	B	C	C	A	C	B	D	C	C	B	D	B	D	C	C	C	E	B	C
		Pungli LB	0,0194	B	C	C	C	B	E	B	C	C	A	C	C	C	D	D	B	C	E	C	C
		Eks-Leg	0,0167	B	C	C	C	B	A	B	C	C	C	C	C	B	C	C	C	B	C	B	C
	Total Lembaga			0,0989	0,0684	0,0437	0,0437	0,0757	0,0378	0,0804	0,0411	0,0724	0,0815	0,0726	0,0560	0,0644	0,0343	0,0630	0,0725	0,0637	0,0444	0,0617	0,0523
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangg. Usaha	0,0523	A	D	B	E	C	D	A	D	A	B	C	C	A	D	A	C	C	E	B	E
		Gangg. Masya.	0,0311	A	E	B	E	A	C	A	C	A	B	B	C	A	E	B	C	B	E	A	E
		Kec. Aparatur	0,0724	B	A	B	D	B	C	B	D	B	B	C	C	B	C	B	B	C	D	B	E
	Sosial Politik	Ptsp.Msy.	0,0120	A	C	C	C	C	A	B	C	C	A	B	A	C	C	C	C	B	A	C	A
		KonflikMsy	0,0184	A	E	B	C	A	B	A	C	B	D	A	D	A	C	C	D	C	B	A	B
		Stabilitas Politik	0,0289	C	C	B	A	B	A	B	B	B	C	C	D	B	A	B	C	B	A	B	A
		Unjuk Rasa	0,0095	C	D	D	C	A	A	B	E	C	E	B	D	A	E	C	E	C	A	A	D
	Budaya	Terbuka	0,0086	A	C	B	A	A	D	A	C	C	C	B	C	A	C	C	C	B	E	B	B
		Non Diskriminasi	0,0064	A	D	B	E	B	C	B	C	C	C	D	C	A	C	C	C	B	E	B	C
		Adat Istiadat	0,0071	C	C	B	B	A	C	B	B	C	C	C	C	B	C	C	C	C	D	B	C
		Etos Kerja	0,0141	B	C	B	C	A	C	C	C	B	C	C	A	A	C	C	B	C	E	C	C
	Total Sospolbud			0,0947	0,0511	0,0720	0,0346	0,0858	0,0468	0,0973	0,0322	0,0881	0,0598	0,0502	0,0373	0,1051	0,0366	0,0753	0,0470	0,0478	0,0354	0,0873	0,0328

				SUMATERA UTARA		JAWA BARAT		JAWA TENGAH		JAWA TENGAH		BALI		JAWA TIMUR		JAWA TENGAH		BALI		KALIMANTAN TIMUR		KALIMANTAN TIMUR	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. DAIRI		KAB. BEKASI		KAB. KENDAL		KAB. PEMALANG		KAB. GIANYAR		KAB. SIDOARJO		KAB. PEKALONGAN		KAB. BADUNG		KAB. BERAU		KAB. KUTAI KERTANEGARA	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	C	C	A	A	C	C	E	E	B	B	A	A	C	C	A	A	A	A	B	A
		Pertumbuhan	0,0463	A	A	A	A	E	E	C	C	C	C	E	E	E	D	C	C	A	A	A	E
		IPM	0,0239	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	B	A	C	D	C	B	C	C	C	C
	Struktur Ekonomi	NT Primer	0,0219	C	B	E	E	C	D	C	C	D	D	D	E	D	D	D	E	B	B	B	B
		NT Sekunder	0,0151	E	D	A	A	A	A	C	C	C	C	A	A	B	B	D	D	C	C	E	D
		NT Tersier	0,0123	E	E	E	E	D	D	C	C	C	B	C	C	C	C	A	A	E	D	E	E
	Total Ekonomi			0,0387	0,0425	0,0602	0,0602	0,0248	0,0222	0,0213	0,0176	0,0297	0,0321	0,0446	0,0446	0,0207	0,0184	0,0434	0,0455	0,0623	0,0627	0,0485	0,0404
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	E	E	C	C	C	B	D	C	A	A	A	A	D	C	A	A	B	C	C	C
		SLTP	0,0097	C	C	B	B	D	D	E	D	C	B	A	A	D	E	A	A	B	B	B	B
		Pencari Kerja	0,0235	D	E	C	B	C	E	A	D	E	E	C	C	C	D	D	C	C	C	C	B
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	A	E	E	E	B	B	A	B	A	A	A	E	A	B	A	A	E	E	E	E
		Upah Aktual/IHK	0,0163	D	C	B	B	D	D	D	D	B	D	B	B	D	B	D	B	B	E	E	E
	Produktivitas		0,0525	D	E	A	A	B	C	D	D	D	E	C	C	D	D	D	D	A	C	C	C
	Total Tenaga Kerja			0,0154	0,0094	0,0453	0,0490	0,0248	0,0157	0,0240	0,0120	0,0243	0,0168	0,0311	0,0266	0,0163	0,0183	0,0189	0,0273	0,0459	0,0172	0,0172	0,0209
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	A	D	A	B	A	B	A	B	A	A	A	B	A	B	A	A	D	E	B	D
		Pelabuhan Laut	0,0141	C	C	B	A	B	B	C	D	C	B	B	B	C	C	B	B	B	C	B	C
		Pelabuhan Udara	0,0058	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	C	C
		Telepon	0,0160	C	C	A	A	A	C	B	E	B	B	A	C	B	C	B	C	D	E	C	C
		Listrik	0,0175	D	C	B	B	B	B	D	C	C	A	C	C	B	B	C	C	D	E	D	C
	Kualitas	Jalan	0,0095	D	D	B	B	C	B	C	B	B	B	B	B	C	B	B	B	C	D	C	C
		Pelabuhan Laut	0,0089	C	D	B	A	C	B	C	C	C	B	B	B	C	D	C	B	C	C	C	C
		Pelabuhan Udara	0,0073	C	B	A	A	B	B	C	B	A	A	A	B	C	B	A	A	B	B	C	B
		Telepon	0,0204	B	C	C	B	B	C	D	D	C	B	B	C	C	B	B	C	C	D	D	C
		Listrik	0,0139	B	C	C	B	B	B	B	C	C	B	B	C	B	B	B	C	C	E	C	C
Total Infrastruktur			0,0319	0,0208	0,0396	0,0458	0,0429	0,0356	0,0286	0,0202	0,0319	0,0453	0,0439	0,0298	0,0349	0,0367	0,0395	0,0328	0,0194	0,0115	0,0222	0,0228	
TOTAL SCORE			1,0000	0,2796	0,1922	0,2608	0,2333	0,2540	0,1581	0,2516	0,1231	0,2464	0,2355	0,2424	0,1943	0,2414	0,1443	0,2401	0,2251	0,2391	0,1712	0,2369	0,1692
PERINGKAT				1	55	2	31	3	94	4	132	5	29	6	54	7	108	8	33	9	79	10	80

Lampiran 1.3.3. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2003

PROPINSI				NTB		JAWA TIMUR	NTB		LAMPUNG	DIY		JAWA TIMUR	LAMPUNG		JAWA TIMUR	JAWA TIMUR		NTT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. LOMBOK BARAT		KAB. BONDOWOSO	KAB. BIMA		KAB. LAMPUNG TIMUR	KAB. BANTUL		KAB. JEMBER	KAB. LAMPUNG SELATAN		KAB. PAMEKASAN	KAB. PONOROGO		KAB. FLORES TIMUR	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2002
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Birokrasi	0,0483	D	D	E	C	D	E	D	D	D	E	C	D	D	E	E	D
		P. Wewenang	0,0235	C	C	E	C	D	E	D	D	E	D	C	E	D	E	E	C
	Perda		0,0771	D	D	C	C	D	D	D	C	D	D	D	C	C	D	D	D
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	A	B	C	B	B	C	C	D	D	C	C	D	D	C	C	C
		Anggaran Pemb.	0,0141	D	D	E	D	D	E	E	E	C	D	D	D	D	D	C	B
	Kepastian Hukum	Konsistensi Per.	0,0350	E	D	D	D	C	E	D	C	C	E	D	E	C	E	D	C
		Penegakan Hk.	0,0524	E	D	E	C	D	E	D	D	D	E	C	D	C	E	E	D
		Pungli LB	0,0194	C	C	C	C	D	C	D	E	D	C	E	C	D	D	D	B
		Eks-Leg	0,0167	C	D	C	C	D	C	D	C	B	C	D	C	C	C	C	D
	Total Lembaga			0,0338	0,0302	0,0328	0,0485	0,0304	0,0215	0,0237	0,0357	0,0282	0,0227	0,0318	0,0332	0,0404	0,0207	0,0228	0,0349
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangg. Usaha	0,0523	C	C	C	D	C	E	D	D	E	C	C	D	C	D	E	B
		Gangg. Masya.	0,0311	C	E	E	E	E	E	E	E	E	C	E	E	C	E	E	B
		Kec. Aparatur	0,0724	D	D	E	C	D	E	D	E	C	C	C	E	C	E	E	D
	Sosial Politik	Ptsp.Msy.	0,0120	C	D	A	C	D	C	D	C	C	C	E	C	D	C	A	D
		KonflikMsy	0,0184	C	D	A	D	D	C	D	D	C	D	C	C	C	B	C	B
		Stabilitas Politik	0,0289	B	C	A	C	D	C	D	C	A	B	C	A	D	A	C	D
		Unjuk Rasa	0,0095	B	D	A	E	C	D	D	E	C	E	C	B	A	A	E	C
	Budaya	Terbuka	0,0086	C	B	C	E	C	D	E	D	D	C	B	E	C	C	E	C
		Non Diskriminasi	0,0064	D	A	C	E	B	D	D	D	D	C	B	C	D	C	E	E
		Adat Istiadat	0,0071	C	C	E	B	B	C	D	C	E	C	C	E	C	C	C	B
		Etos Kerja	0,0141	D	B	E	D	C	D	D	C	C	C	C	C	C	C	D	C
	Total Sospolbud			0,0349	0,0320	0,0425	0,0276	0,0260	0,0188	0,0177	0,0197	0,0341	0,0383	0,0357	0,0293	0,0357	0,0368	0,0195	0,0431

PROPINSI				NTB		JAWA TIMUR	NTB		LAMPUNG		DIY	JAWA TIMUR	LAMPUNG		JAWA TIMUR		JAWA TIMUR	NTT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. LOMBOK BARAT		KAB. BONDOWOSO	KAB. BIMA		KAB. LAMPUNG TIMUR		KAB. BANTUL	KAB. JEMBER	KAB. LAMPUNG SELATAN		KAB. PAMEKASAN		KAB. PONOROGO	KAB. FLORES TIMUR	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2002	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2002
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	D	D	E	D	D	C	E	D	D	D	D	E	E	E	E	E
		Pertumbuhan	0,0463	E	D	D	E	C	A	B	E	C	D	E	E	E	E	E	C
		IPM	0,0239	E	E	E	E	D	C	C	B	E	C	C	E	E	D	D	D
	Struktur Ekonomi	NT Primer	0,0219	C	C	B	C	C	B	B	C	C	B	B	B	B	C	C	C
		NT Sekunder	0,0151	D	D	D	D	D	D	D	C	D	C	C	D	E	C	D	E
		NT Tersier	0,0123	B	C	C	C	C	D	D	C	C	D	D	D	D	C	B	C
	Total Ekonomi			0,0149	0,0139	0,0159	0,0125	0,0177	0,0429	0,0243	0,0209	0,0171	0,0218	0,0204	0,0134	0,0130	0,0130	0,0141	0,0151
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	D	D	C	D	E	C	A	A	A	C	E	C	B	A	E	E
		SLTP	0,0097	E	E	E	B	B	B	A	B	D	D	D	E	D	D	E	E
		Pencari Kerja	0,0235	E	D	E	C	C	D	A	D	D	C	D	D	D	C	E	E
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	B	B	D	B	B	D	B	B	B	D	B	A	D	D	D	A
		Upah Aktual/IHK	0,0163	D	C	C	D	D	B	E	D	D	D	D	D	C	C	B	D
	Produktivitas		0,0525	E	D	E	E	D	E	D	E	E	D	C	E	E	E	E	D
	Total Tenaga Kerja			0,0095	0,0112	0,0089	0,0141	0,0141	0,0186	0,0250	0,0144	0,0126	0,0125	0,0145	0,0142	0,0102	0,0132	0,0148	0,0121
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	C	A	C	E	C	D	B	B	B	D	B	C	B	B	D	C
		Pelabuhan Laut	0,0141	B	C	D	B	D	E	C	D	D	B	C	D	C	D	B	C
		Pelabuhan Udara	0,0058	C	D	E	C	D	E	D	C	E	C	C	E	C	D	C	E
		Telepon	0,0160	C	B	E	E	E	E	C	E	D	E	D	E	A	D	E	E
		Listrik	0,0175	E	E	C	E	E	D	D	C	C	D	D	C	D	C	E	E
	Kualitas	Jalan	0,0095	B	C	C	D	D	C	C	B	C	C	C	D	B	C	D	C
		Pelabuhan Laut	0,0089	B	C	C	C	C	B	C	D	C	B	C	C	C	D	C	C
		Pelabuhan Udara	0,0073	C	C	B	D	C	D	C	B	B	D	C	B	C	B	D	B
		Telepon	0,0204	C	C	E	E	C	E	D	D	D	E	D	E	D	D	E	D
		Listrik	0,0139	E	D	C	E	D	E	E	C	C	E	E	C	D	C	E	B
	Total Infrastruktur			0,0229	0,0244	0,0152	0,0111	0,0125	0,0102	0,0199	0,0205	0,0187	0,0148	0,0178	0,0140	0,0260	0,0182	0,0115	0,0181
TOTAL SCORE			1,0000	0,1160	0,1117	0,1153	0,1138	0,1007	0,1120	0,1106	0,1112	0,1107	0,1101	0,1202	0,1041	0,1253	0,1019	0,0827	0,1251
PERINGKAT				136	89	137/B	139	91	140	90	141/B	142/B	143	87	144	85	145/B	146	85

Lampiran 1.3.4. Perubahan Peringkat 10 Kabupaten dari Kelompok 10 Kabupaten Peringkat Bawah Pada Rating 2002

PROPINSI				N T T		JAWA BARAT		JAWA BARAT		JAWA TIMUR		N T T		BENGKULU		LAMPUNG		SUMATERA BARAT		N T B		LAMPUNG		N T B	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. ENDE		KAB. SUMEDANG		KAB. TASIMALAYA		KAB. PAMEKASAN		KAB. FLORES TIMUR		KAB. BENGKULU SELATAN		KAB. LAMPUNG SELATAN		KAB. PESISIR SELATAN		KAB. LOMBOK BARAT		KAB. LAMPUNG TIMUR		KAB. BIMA	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Birokrasi	0,0483	D	B	C	C	C	A	D	D	D	E	C	C	C	E	D	B	D	D	D	E	D	C
		P. Wewenang	0,0235	C	A	D	C	D	B	D	E	C	E	C	C	C	D	D	D	C	C	D	E	D	C
	Perda		0,0771	B	C	D	D	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	C	C	C	C	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	E	E	B	A	C	C	B	B
		Anggaran Pemb.	0,0141	D	D	E	E	E	E	D	D	B	C	D	E	D	D	C	D	D	D	E	E	D	D
	Kepastian Hukum	Konsistensi Per.	0,0350	C	A	B	C	C	A	C	E	C	D	C	C	D	E	E	B	D	E	D	E	C	D
		Penegakan Hk.	0,0524	D	A	C	C	C	A	C	D	D	E	C	B	C	E	D	C	D	E	D	E	D	C
		Pungli LB	0,0194	B	A	C	C	C	A	D	C	B	D	C	A	E	C	D	B	C	C	D	C	D	C
		Eks-Leg	0,0167	D	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
	Total Lembaga			0,0497	0,1003	0,0403	0,0377	0,0443	0,1041	0,0404	0,0332	0,0349	0,0228	0,0382	0,0532	0,0318	0,0227	0,0208	0,0467	0,0302	0,0338	0,0237	0,0215	0,0304	0,0485
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangg. Usaha	0,0523	B	A	C	C	D	A	C	D	B	E	C	D	C	C	C	B	C	C	D	E	C	D
		Gangg. Masya.	0,0311	C	A	C	B	C	A	C	E	B	E	C	C	E	C	C	A	E	C	E	E	E	E
		Kec. Aparatur	0,0724	D	B	D	C	D	A	C	E	D	E	C	C	C	C	C	A	D	D	D	E	D	C
	Sosial Politik	Ptsp.Msy.	0,0120	D	A	D	C	D	A	D	C	D	A	D	C	E	C	D	C	D	C	D	C	D	C
		KonflikMsy	0,0184	D	A	D	C	D	C	C	C	B	C	C	D	C	D	C	D	D	C	D	C	D	D
		Stabilitas Politik	0,0289	D	B	C	C	C	C	D	A	D	C	C	C	C	B	C	C	C	B	D	C	D	C
		Unjuk Rasa	0,0095	C	C	C	A	C	D	A	B	C	E	C	B	C	E	B	D	D	B	D	D	C	E
	Budaya	Terbuka	0,0086	C	B	C	E	C	A	C	E	C	E	C	C	B	C	B	A	B	C	E	D	C	E
		Non Diskriminasi	0,0064	E	A	C	E	C	A	D	C	E	E	C	C	B	C	C	C	A	D	D	D	B	E
		Adat Istiadat	0,0071	B	A	D	E	C	C	C	E	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	C	B	B
		Etos Kerja	0,0141	C	A	C	E	C	A	C	C	C	D	C	D	C	C	D	C	B	D	D	D	C	D
	Total Sospolbud			0,0350	0,1024	0,0279	0,0401	0,0258	0,1017	0,0357	0,0293	0,0431	0,0195	0,0353	0,0321	0,0357	0,0383	0,0369	0,0819	0,0320	0,0349	0,0177	0,0188	0,0260	0,0276

PROPINSI				N T T		JAWA BARAT		JAWA BARAT		JAWA TIMUR		N T T		BENGKULU		LAMPUNG		SUMATERA BARAT		N T B		LAMPUNG		N T B		
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KAB. ENDE		KAB. SUMEDANG		KAB. TASIMALAYA		KAB. PAMEKASAN		KAB. FLORES TIMUR		KAB. BENGKULU SELATAN		KAB. LAMPUNG SELATAN		KAB. PESISIR SELATAN		KAB. LOMBOK BARAT		KAB. LAMPUNG TIMUR		KAB. BIMA		
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	E	E	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	D	D	C	C	D	D	E	C	D	D	
		Pertumbuhan	0,0463	C	C	E	E	D	D	E	E	C	E	E	D	E	D	D	D	D	E	E	B	A	C	E
		IPM	0,0239	D	E	C	C	C	C	E	E	D	D	C	C	C	C	C	C	E	E	C	C	D	E	
	Struktur Ekonomi	NT Primer	0,0219	C	C	D	C	C	D	B	B	C	C	C	C	B	B	C	C	C	C	B	B	C	C	
		NT Sekunder	0,0151	D	D	C	C	C	C	E	D	E	D	D	D	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	
		NT Tersier	0,0123	C	B	C	C	C	B	D	D	C	B	C	B	D	D	C	B	C	B	D	D	C	C	
	Total Ekonomi			0,0163	0,0181	0,0155	0,0181	0,0195	0,0193	0,0130	0,0134	0,0159	0,0141	0,0154	0,0192	0,0204	0,0218	0,0227	0,0251	0,0139	0,0149	0,0243	0,0429	0,0177	0,0125	
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	E	E	C	A	C	B	B	C	E	E	D	C	E	C	E	D	D	D	A	C	E	D	
		SLTP	0,0097	E	D	D	B	E	D	E	D	E	D	D	C	D	D	B	B	E	E	A	B	B	B	
		Pencari Kerja	0,0235	D	D	C	B	C	C	D	D	E	E	E	D	D	C	C	A	D	E	A	D	C	C	
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	A	D	C	E	D	D	D	A	A	D	A	D	B	D	C	A	B	B	B	D	B	B	
		Upah Aktual/IHK	0,0163	D	B	B	B	C	D	C	D	D	B	D	D	D	D	D	B	C	D	E	B	D	D	
	Produktivitas		0,0525	E	E	D	E	D	E	E	E	D	E	D	E	C	D	B	A	D	E	D	E	D	E	
	Total Tenaga Kerja			0,0124	0,0155	0,0197	0,0251	0,0121	0,0122	0,0102	0,0142	0,0126	0,0148	0,0140	0,0116	0,0145	0,0125	0,0246	0,0576	0,0112	0,0095	0,0250	0,0186	0,0141	0,0141	
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	B	D	B	B	B	C	B	C	C	D	C	D	B	D	D	D	A	C	B	D	C	E	
		Pelabuhan Laut	0,0141	D	A	C	D	C	D	C	D	C	B	C	C	C	B	C	D	C	B	C	E	D	B	
		Pelabuhan Udara	0,0058	E	C	C	D	C	C	C	E	E	C	D	C	C	C	C	C	D	C	C	E	D	C	
		Telepon	0,0160	E	C	B	C	B	A	A	E	E	E	C	D	D	E	D	E	B	C	C	E	E	E	
		Listrik	0,0175	E	D	B	B	B	A	D	C	E	E	E	E	D	D	E	E	E	E	D	D	E	E	
	Kualitas	Jalan	0,0095	C	D	C	C	C	B	B	D	C	D	C	B	C	C	C	B	C	B	C	C	D	D	
		Pelabuhan Laut	0,0089	C	C	C	D	C	D	C	C	C	C	D	D	C	B	D	C	C	B	C	B	C	C	
		Pelabuhan Udara	0,0073	B	D	C	D	C	D	C	B	B	D	C	C	C	D	D	B	C	C	C	D	C	D	
		Telepon	0,0204	D	B	C	B	C	B	D	E	D	E	C	E	D	E	D	E	C	C	D	E	C	E	
		Listrik	0,0139	B	C	D	B	C	B	D	C	B	E	C	E	E	E	D	E	D	E	E	E	D	E	
Total Infrastruktur			0,0190	0,0242	0,0279	0,0304	0,0293	0,0363	0,0260	0,0140	0,0188	0,0115	0,0189	0,0144	0,0178	0,0148	0,0131	0,0134	0,0244	0,0229	0,0199	0,0102	0,0125	0,0111		
TOTAL SCORE			1,0000	0,1324	0,2605	0,1313	0,1514	0,1310	0,2736	0,1253	0,1041	0,1253	0,0827	0,1218	0,1305	0,1202	0,1101	0,1181	0,2247	0,1117	0,1160	0,1106	0,1120	0,1007	0,1138	
PERINGKAT			82	14	83	98	84	8	85	144	85	146	86	125	87	143	88	34	89	136	90	140	91	139		

Lampiran 1.4. Perubahan Peringkat Kota

Lampiran 1.4.1. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2003

PROPINSI				RIAU		JAWA BARAT		JAWA TIMUR		BANTEN	SUMATERA BARAT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA BATAM		KOTA CIREBON		KOTA KEDIRI		KOTA CILEGON	KOTA SAWAH LUNTO	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2002
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Pelayanan Birokrasi	0,0483	C	B	B	C	C	D	B	C	B
		Penggunaan Wewenang	0,0235	B	C	C	D	C	D	C	B	E
	Perda		0,0771	D	D	D	D	D	D	C	C	C
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	B	B	C	C	B	B	A	C	C
		Anggaran Pembangunan	0,0141	A	A	C	C	D	D	C	C	C
	Kepastian Hukum	Konsistensi Perundangan	0,0350	C	B	C	C	B	B	C	C	A
		Penegakan Hukum	0,0524	B	C	B	C	D	C	C	C	A
		Pungli di Luar Birokrasi	0,0194	C	C	C	C	B	B	C	A	A
		Hubungan Esekutif-Legeslatif	0,0167	C	B	C	C	A	B	C	B	A
	Total Lembaga			0,0571	0,0577	0,0536	0,0376	0,0487	0,0448	0,0637	0,0590	0,0922
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangguan Usaha	0,0523	B	B	C	D	C	B	D	A	B
		Gangguan Masya.	0,0311	C	B	B	C	C	A	D	B	A
		Kecepatan Aparatur	0,0724	B	B	B	D	B	C	C	B	B
	Sosial Politik	Partisipasi Masyarakat	0,0120	C	C	B	D	C	B	C	B	B
		Konflik Masyarakat	0,0184	A	B	C	D	A	A	D	A	A
		Stabilitas Politik	0,0289	A	C	A	C	A	D	C	C	C
		Unjuk Rasa	0,0095	B	C	C	C	B	A	B	A	A
	Budaya	Terbuka	0,0086	D	B	C	C	C	B	E	B	A
		Non Diskriminatif	0,0064	C	B	C	C	D	D	E	B	A
		Adat Istiadat	0,0071	C	B	C	C	C	B	C	C	A
		Etos Kerja	0,0141	C	B	C	C	C	C	E	E	B
	Total Sospolbud			0,0708	0,0681	0,0590	0,0258	0,0618	0,0680	0,0286	0,0830	0,0896

PROPINSI				RIAU		JAWA BARAT		JAWA TIMUR		BANTEN	SUMATERA BARAT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA BATAM		KOTA CIREBON		KOTA KEDIRI		KOTA CILEGON	KOTA SAWAH LUNTO	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2003	2002
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		Pertumbuhan	0,0463	A	A	A	A	A	A	A	E	E
		IPM	0,0239	A	B	A	C	B	C	B	B	C
	Struktur Ekonomi	Nilai Tambah Primer	0,0219	E	E	E	E	E	E	E	C	B
		Nilai Tambah Sekunder	0,0151	A	A	A	A	A	A	A	C	D
		Nilai Tambah Tersier	0,0123	E	E	B	C	E	E	E	C	C
	Total Ekonomi			0,0637	0,0630	0,0676	0,0617	0,0630	0,0602	0,0630	0,0426	0,0419
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	B	A	C	A	A	A	C	C	D
		SLTP	0,0097	A	A	A	A	A	C	C	B	C
		Pencari Kerja	0,0235	D	C	A	C	B	B	A	A	D
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	E	C	B	A	A	B	E	A	C
		Upah Aktual/IHK	0,0163	B	D	B	B	B	B	D	D	B
	Produktivitas		0,0525	A	A	A	A	A	A	A	D	B
	Total Tenaga Kerja			0,0448	0,0412	0,0554	0,0518	0,0555	0,0517	0,0465	0,0267	0,0305
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	B	A	B	A	B	A	A	C	A
		Pelabuhan Laut	0,0141	A	B	B	B	C	C	A	C	C
		Pelabuhan Udara	0,0058	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		Telepon	0,0160	A	A	B	A	B	A	C	C	E
		Listrik	0,0175	B	B	B	B	B	D	C	C	D
	Kualitas	Jalan	0,0095	C	B	C	C	C	B	B	B	B
		Pelabuhan Laut	0,0089	A	B	C	C	B	C	A	C	B
		Pelabuhan Udara	0,0073	A	A	C	C	C	C	B	C	A
		Telepon	0,0204	B	B	C	C	B	C	B	C	C
		Listrik	0,0139	B	B	B	C	C	B	C	C	B
	Total Infrastruktur			0,0441	0,0467	0,0328	0,0351	0,0351	0,0347	0,0382	0,0247	0,0309
TOTAL SCORE			1,0000	0,2805	0,2767	0,2684	0,2120	0,2641	0,2594	0,2400	0,2360	0,2851
PERINGKAT				1	4	2	23	3	6	4	5	2

Lampiran 1.4.2. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Atas Pada Rating 2002

PROPINSI				JAWA TENGAH		KALIMANTAN TIMUR		SUMATERA BARAT		JAWA TENGAH		RIAUI		BANTEN	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA SEMARANG		KOTA BALIKPAPAN		KOTA SAWAH LUNTO		KOTA TEGAL		KOTA BATAM		KOTA TANGERANG	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Pelayanan Birokrasi	0,0483	B	C	B	C	B	C	B	B	B	C	C	D
		Penggunaan Wewenang	0,0235	C	E	C	D	E	B	B	C	C	B	C	E
	Perda		0,0771	B	B	D	D	C	C	C	B	D	D	C	C
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	B	B	B	B	C	C	E	E	B	B	B	A
		Anggaran Pembangunan	0,0141	A	A	A	A	C	C	B	B	A	A	B	B
	Kepastian Hukum	Konsistensi Perundangan	0,0350	C	C	B	D	A	C	B	B	B	C	C	D
		Penegakan Hukum	0,0524	C	D	B	C	A	C	B	B	C	B	C	E
		Pungli di Luar Birokrasi	0,0194	B	D	C	D	A	A	B	C	C	C	C	E
		Hubungan Esekutif-Legeslatif	0,0167	B	C	C	C	A	B	B	C	B	C	B	C
	Total Lembaga			0,0733	0,0559	0,0645	0,0401	0,0922	0,0590	0,0731	0,0731	0,0577	0,0571	0,0551	0,0433
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangguan Usaha	0,0523	A	C	B	E	B	A	A	C	B	B	B	D
		Gangguan Masya.	0,0311	A	C	C	E	A	B	A	C	B	C	B	D
		Kecepatan Aparatur	0,0724	B	E	B	C	B	B	B	C	B	B	B	C
	Sosial Politik	Partisipasi Masyarakat	0,0120	B	C	C	A	B	B	B	C	C	C	C	B
		Konflik Masyarakat	0,0184	A	B	B	A	A	A	B	C	B	A	B	C
		Stabilitas Politik	0,0289	B	A	B	B	C	C	B	B	C	A	C	C
		Unjuk Rasa	0,0095	C	C	B	D	A	A	A	A	C	B	C	C
	Budaya	Terbuka	0,0086	A	D	B	E	A	B	A	C	B	D	A	D
		Non Diskriminatif	0,0064	A	C	A	E	A	B	A	C	B	C	B	C
		Adat Istiadat	0,0071	A	C	B	C	A	C	A	C	B	C	B	C
		Etos Kerja	0,0141	A	D	B	D	B	E	A	C	B	C	B	D
	Total Sospolbud			0,1033	0,0358	0,0709	0,0391	0,0896	0,0830	0,1023	0,0442	0,0681	0,0708	0,0697	0,0307

PROPINSI				JAWA TENGAH		KALIMANTAN TIMUR		SUMATERA BARAT		JAWA TENGAH		RIAU		BANTEN	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA SEMARANG		KOTA BALIKPAPAN		KOTA SAWAH LUNTO		KOTA TEGAL		KOTA BATAM		KOTA TANGERANG	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	A	A	A	A	A	A	C	D	A	A	A	A
		Pertumbuhan	0,0463	C	C	A	A	E	E	C	C	A	A	C	C
		IPM	0,0239	B	A	B	A	C	B	C	B	B	A	C	A
	Struktur Ekonomi	Nilai Tambah Primer	0,0219	E	E	D	E	B	C	C	E	E	E	E	E
		Nilai Tambah Sekunder	0,0151	B	B	A	A	D	C	B	C	A	A	A	A
		Nilai Tambah Tersier	0,0123	A	A	C	C	C	C	A	B	E	E	C	C
	Total Ekonomi			0,0488	0,0495	0,0652	0,0652	0,0419	0,0426	0,0308	0,0246	0,0630	0,0637	0,0457	0,0492
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	A	A	A	B	D	C	B	C	A	B	A	B
		SLTP	0,0097	A	A	A	A	C	B	C	B	A	A	A	A
		Pencari Kerja	0,0235	A	B	A	A	D	A	A	C	C	D	A	C
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	B	A	E	E	C	A	A	B	C	E	E	E
		Upah Aktual/IHK	0,0163	B	B	E	E	B	D	B	D	D	B	D	E
	Produktivitas		0,0525	B	D	A	A	B	D	C	C	A	A	A	C
	Total Tenaga Kerja			0,0436	0,0310	0,0481	0,0472	0,0305	0,0267	0,0377	0,0192	0,0412	0,0448	0,0487	0,0183
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	A	A	A	A	A	C	A	A	A	B	A	A
		Pelabuhan Laut	0,0141	A	B	B	B	C	C	C	B	B	A	B	C
		Pelabuhan Udara	0,0058	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	B	B
		Telepon	0,0160	A	B	B	C	E	C	B	B	A	A	A	B
		Listrik	0,0175	C	C	D	D	D	C	D	B	B	B	C	C
	Kualitas	Jalan	0,0095	B	B	B	B	B	B	C	B	B	C	B	B
		Pelabuhan Laut	0,0089	A	B	B	C	B	C	B	C	B	A	A	C
		Pelabuhan Udara	0,0073	A	A	A	B	A	C	C	D	A	A	A	A
		Telepon	0,0204	B	B	B	C	C	C	B	C	B	B	B	C
		Listrik	0,0139	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B	C
	Total Infrastruktur			0,0456	0,0412	0,0364	0,0289	0,0309	0,0247	0,0361	0,0322	0,0467	0,0441	0,0443	0,0319
TOTAL SCORE			1,0000	0,3146	0,2134	0,2851	0,2205	0,2851	0,2360	0,2800	0,1933	0,2767	0,2805	0,2635	0,1734
PERINGKAT			1	10	2	7	2	5	3	24	4	1	5	33	

Lampiran 1.4.3. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2003

PROPINSI				JAWA BARAT		BENGKULU		BANGKA BELITUNG		JAWA TENGAH		JAWA BARAT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA SUKABUMI		KOTA BENGKULU		KOTA PANGKAL PINANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA BEKASI	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Pelayanan Birokrasi	0,0483	C	C	C	C	C	C	D	C	E	B
		Penggunaan Wewenang	0,0235	D	D	C	C	C	C	D	B	E	C
	Perda		0,0771	C	C	C	C	D	D	C	C	C	B
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	E	E	C	C	C	C	B	B	C	C
		Anggaran Pembangunan	0,0141	C	C	D	D	C	C	B	C	B	B
	Kepastian Hukum	Konsistensi Perundangan	0,0350	D	B	D	C	E	D	D	B	E	C
		Penegakan Hukum	0,0524	C	C	C	C	D	D	D	B	E	C
		Pungli di Luar Birokrasi	0,0194	E	C	C	C	C	D	E	C	E	C
		Hubungan Esekutif-Legeslatif	0,0167	C	B	B	C	C	C	C	B	C	C
	Total Lembaga			0,0397	0,0500	0,0466	0,0483	0,0293	0,0292	0,0407	0,0690	0,0325	0,0640
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangguan Usaha	0,0523	E	B	E	C	C	C	D	A	D	B
		Gangguan Masya.	0,0311	E	B	D	C	D	C	D	A	E	B
		Kecepatan Aparatur	0,0724	C	C	C	C	C	C	D	B	D	B
	Sosial Politik	Partisipasi Masyarakat	0,0120	A	D	C	D	C	C	C	C	C	C
		Konflik Masyarakat	0,0184	A	B	C	C	D	C	D	A	C	B
		Stabilitas Politik	0,0289	B	C	A	C	B	C	B	E	C	B
		Unjuk Rasa	0,0095	D	B	C	C	C	C	E	A	D	D
	Budaya	Terbuka	0,0086	E	B	D	C	C	B	B	A	C	E
		Non Diskriminatif	0,0064	E	C	C	C	B	B	C	A	E	B
		Adat Istiadat	0,0071	C	C	D	C	D	B	C	B	C	B
		Etos Kerja	0,0141	D	C	E	C	E	C	C	A	D	B
	Total Sospolbud			0,0391	0,0538	0,0343	0,0353	0,0365	0,0389	0,0299	0,0969	0,0220	0,0695

PROPINSI				JAWA BARAT		BENGKULU		BANGKA BELITUNG		JAWA TENGAH		JAWA BARAT	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA SUKABUMI		KOTA BENGKULU		KOTA PANGKAL PINANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA BEKASI	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	C	C	C	C	C	C	D	C	B	B
		Pertumbuhan	0,0463	E	E	C	B	B	B	D	D	E	E
		IPM	0,0239	B	C	A	B	B	C	C	C	A	C
	Struktur Ekonomi	Nilai Tambah Primer	0,0219	E	E	E	D	D	C	C	C	E	E
		Nilai Tambah Sekunder	0,0151	D	D	D	D	C	C	B	B	A	A
		Nilai Tambah Tersier	0,0123	A	A	A	A	A	A	B	C	C	C
	Total Ekonomi			0,0224	0,0196	0,0277	0,0348	0,0361	0,0359	0,0239	0,0247	0,0325	0,0290
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	B	A	C	C	B	C	C	C	B	A
		SLTP	0,0097	A	A	A	A	C	C	B	B	A	A
		Pencari Kerja	0,0235	A	A	B	C	C	C	C	C	C	A
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	A	B	D	A	A	B	B	A	E	E
		Upah Aktual/IHK	0,0163	D	B	B	D	E	B	B	B	E	E
	Produktivitas		0,0525	E	D	D	D	C	C	D	D	C	B
	Total Tenaga Kerja			0,0269	0,0324	0,0253	0,0190	0,0221	0,0258	0,0222	0,0253	0,0183	0,0348
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	B	A	C	A	C	E	A	A	B	A
		Pelabuhan Laut	0,0141	C	C	C	C	A	C	C	C	C	B
		Pelabuhan Udara	0,0058	B	B	B	D	B	B	D	B	B	B
		Telepon	0,0160	C	A	C	C	E	C	C	B	B	A
		Listrik	0,0175	D	C	E	E	D	D	C	D	C	B
	Kualitas	Jalan	0,0095	B	B	B	C	B	C	C	B	C	B
		Pelabuhan Laut	0,0089	D	C	D	D	B	C	C	C	C	B
		Pelabuhan Udara	0,0073	C	C	C	C	B	B	D	C	B	A
		Telepon	0,0204	C	C	D	C	E	C	C	C	B	C
		Listrik	0,0139	C	B	E	C	E	D	C	B	C	C
	Total Infrastruktur			0,0243	0,0365	0,0182	0,0237	0,0202	0,0192	0,0259	0,0320	0,0313	0,0396
TOTAL SCORE			1,0000	0,1524	0,1923	0,1521	0,1611	0,1442	0,1490	0,1426	0,2479	0,1366	0,2369
PERINGKAT				39	28	40	34	41	36	42	10	43	13

Lampiran 1.4.4. Perubahan Peringkat 5 Kota dari Kelompok 5 Kota Peringkat Bawah Pada Rating 2002

PROPINSI				JAWA TIMUR		SUMATERA UTARA		BENGKULU		JAWA TIMUR		BANGKA BELITUNG	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA MOJOKERTO		KOTA BINJAI		KOTA BENGKULU		KOTA PROBOLINGGO		KOTA PANGKAL PINANG	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
KELEMBAGAAN	Aparatur & Pelayanan	Pelayanan Birokrasi	0,0483	C	B	C	E	C	C	D	B	C	C
		Penggunaan Wewenang	0,0235	D	A	D	D	C	C	D	D	C	C
	Perda		0,0771	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D
	Keuangan Daerah	Retribusi-Pajak	0,0316	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		Anggaran Pembangunan	0,0141	C	C	C	C	D	D	C	C	C	C
	Kepastian Hukum	Konsistensi Perundangan	0,0350	C	C	C	E	C	D	C	C	D	E
		Penegakan Hukum	0,0524	C	B	D	D	C	C	C	C	D	D
		Pungli di Luar Birokrasi	0,0194	D	A	C	C	C	C	D	D	D	C
		Hubungan Esekutif-Legeslatif	0,0167	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C
	Total Lembaga			0,0464	0,0801	0,0441	0,0353	0,0483	0,0466	0,0312	0,0407	0,0292	0,0293
SOSIAL POLITIK BUDAYA	Keamanan	Gangguan Usaha	0,0523	C	D	D	D	C	E	C	C	C	C
		Gangguan Masya.	0,0311	C	D	C	D	C	D	C	C	C	D
		Kecepatan Aparatur	0,0724	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C
	Sosial Politik	Partisipasi Masyarakat	0,0120	C	C	D	A	D	C	C	A	C	C
		Konflik Masyarakat	0,0184	C	A	C	A	C	C	C	D	C	D
		Stabilitas Politik	0,0289	C	A	C	D	C	A	C	C	C	B
		Unjuk Rasa	0,0095	B	B	C	C	C	C	B	C	C	C
	Budaya	Terbuka	0,0086	C	C	C	E	C	D	C	C	B	C
		Non Diskriminatif	0,0064	C	C	C	D	C	C	C	C	B	B
		Adat Istiadat	0,0071	D	B	C	C	C	D	D	C	B	D
		Etos Kerja	0,0141	C	B	C	D	C	E	C	D	C	E
	Total Sospolbud			0,0365	0,0497	0,0325	0,0349	0,0353	0,0343	0,0365	0,0296	0,0389	0,0365

PROPINSI				JAWA TIMUR		SUMATERA UTARA		BENGKULU		JAWA TIMUR		BANGKA BELITUNG	
KETERANGAN		KABUPATEN/KOTA		KOTA MOJOKERTO		KOTA BINJAI		KOTA BENGKULU		KOTA PROBOLINGGO		KOTA PANGKAL PINANG	
FAKTOR	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
EKONOMI DAERAH	Potensi Ekonomi	PDRB Per Kapita	0,0481	C	C	C	C	C	C	B	B	C	C
		Pertumbuhan	0,0463	C	C	D	C	B	C	E	D	B	B
		IPM	0,0239	C	A	C	B	B	A	C	C	C	B
	Struktur Ekonomi	Nilai Tambah Primer	0,0219	E	E	D	E	D	E	D	E	C	D
		Nilai Tambah Sekunder	0,0151	C	C	B	A	D	D	B	C	C	C
		Nilai Tambah Tersier	0,0123	A	A	C	B	A	A	A	A	A	A
	Total Ekonomi			0,0255	0,0290	0,0221	0,0324	0,0348	0,0277	0,0300	0,0287	0,0359	0,0361
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS	Ketersediaan T.K.	Usia Produktif	0,0099	A	A	B	B	C	C	B	B	C	B
		SLTP	0,0097	A	C	A	C	A	A	C	B	C	C
		Pencari Kerja	0,0235	B	A	A	C	C	B	C	B	C	C
	Biaya T.K.	UMP/IHK	0,0144	A	C	A	E	A	D	A	A	B	A
		Upah Aktual/IHK	0,0163	B	D	B	B	D	B	B	C	B	E
	Produktivitas		0,0525	D	E	C	B	D	D	B	B	C	C
	Total Tenaga Kerja			0,0310	0,0233	0,0384	0,0324	0,0190	0,0253	0,0369	0,0341	0,0258	0,0221
INFRASTRUKTUR FISIK	Ketersediaan	Jalan	0,0138	C	B	A	C	A	C	C	B	E	C
		Pelabuhan Laut	0,0141	C	D	C	C	C	C	C	B	C	A
		Pelabuhan Udara	0,0058	B	D	B	B	D	B	B	B	B	B
		Telepon	0,0160	A	B	C	C	C	C	A	A	C	E
		Listrik	0,0175	D	B	E	C	E	E	D	A	D	D
	Kualitas	Jalan	0,0095	B	B	C	E	C	B	B	B	C	B
		Pelabuhan Laut	0,0089	C	D	C	C	D	D	B	B	C	B
		Pelabuhan Udara	0,0073	C	D	C	B	C	C	B	C	B	B
		Telepon	0,0204	D	B	C	C	C	D	D	B	C	E
		Listrik	0,0139	D	B	D	C	C	E	D	B	D	E
	Total Infrastruktur			0,0238	0,0334	0,0242	0,0222	0,0237	0,0182	0,0262	0,0443	0,0192	0,0202
TOTAL SCORE			1,0000	0,1632	0,2155	0,1613	0,1572	0,1611	0,1521	0,1608	0,1774	0,1490	0,1442
PERINGKAT				32	8	33	38	34	40	35	31	36	41

Lampiran 2. Daerah Penelitian

Lampiran 2.1 Statistik Daerah Peningkatan Kabupaten dan Kota (Propinsi, Sektor Ekonomi Dominan; PDRB Perkapita)

1. Berdasarkan Propinsi, Kabupaten, dan Kota

NO	PROPINSI	KABUPATEN		KOTA		JUMLAH	
		Jumlah	% Total	Jumlah	% Total	Jumlah	% Total
1	SUMATERA UTARA	8	5,1	6	13,6	14	7,0
2	SUMATERA BARAT	4	2,6	2	4,5	6	3,0
3	R I A U	6	3,8	3	6,8	9	4,5
4	J A M B I	5	3,2	0	0,0	5	2,5
5	SUMATERA SELATAN	5	3,2	1	2,3	6	3,0
6	BANGKA BELITUNG	2	1,3	1	2,3	3	1,5
7	BENGKULU	1	0,6	1	2,3	2	1,0
8	LAMPUNG	5	3,2	1	2,3	6	3,0
9	BANTEN	3	1,9	2	4,5	5	2,5
10	DKI. JAKARTA	0	0,0	1	2,3	1	0,5
11	JAWA BARAT	15	9,6	5	11,4	20	10,0
12	JAWA TENGAH	14	9,0	4	9,1	18	9,0
13	D.I. YOGYAKARTA	2	1,3	1	2,3	3	1,5
14	JAWA TIMUR	16	10,3	6	13,6	22	11,0
15	BALI	7	4,5	1	2,3	8	4,0
16	KALIMANTAN BARAT	5	3,2	0	0,0	5	2,5
17	KALIMANTAN TENGAH	3	1,9	0	0,0	3	1,5
18	KALIMANTAN SELATAN	6	3,8	0	0,0	6	3,0
19	KALIMANTAN TIMUR	6	3,8	2	4,5	8	4,0
20	SULAWESI UTARA	2	1,3	2	4,5	4	2,0
21	GORONTALO	1	0,6	1	2,3	2	1,0
22	SULAWESI TENGAH	5	3,2	0	0,0	5	2,5
23	SULAWESI TENGGARA	2	1,3	1	2,3	3	1,5
24	SULAWESI SELATAN	16	10,3	1	2,3	17	8,5
25	NUSA TENGGARA BARAT	4	2,6	1	2,3	5	2,5
26	NUSA TENGGARA TIMUR	8	5,1	1	2,3	9	4,5
27	IRIAN JAYA BARAT	3	1,9	0	0,0	3	1,5
28	PAPUA	2	1,3	0	0,0	2	1,0
JUMLAH (Total)		156	100	44	100	200	100

2. Propinsi yang Tidak Terwakili

1	NAGRO ACEH DARUSALAM
2	MALUKU
3	MALUKU UTARA

3. Berdasarkan Basis Sektor Ekonomi

NO	PDRB PERKAPITA	KABUPATEN		KOTA		JUMLAH	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PERDAGANGAN DAN JASA	54	27,0	32	16,0	86	43,0
2	MANUFAKTUR	19	9,5	17	8,5	36	18,0
3	PERTAMBANGAN	16	8,0	1	0,5	17	8,5
4	PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	26	13,0	0	0,0	26	13,0
5	PERTANIAN NON PANGAN (Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, & Perikanan)	56	9,5	4	2,0	36	18,0
Jumlah Keseluruhan :		156	78,0	44	22,0	200	100,0

Nilai % = prosentase terhadap 134 daerah

3. Berdasarkan PDRB Perkapita

NO	PDRB PERKAPITA	KABUPATEN		KOTA		JUMLAH	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PDRB Perkapita < 2.5 Juta	54	40,3	0	0,0	54	40,3
2	2.5 Juta <= PDRB Perkapita < 5 Juta	60	44,8	12	9,0	72	53,7
3	5 Juta <= PDRB Perkapita < 7.5 Juta	26	19,4	18	13,4	44	32,8
4	PDRB Perkapita >= 7.5 Juta	16	11,9	14	10,4	30	22,4
Jumlah Keseluruhan :		156	78,00	44	32,84	200	149,3


Lampiran 2.2 Daftar 156 Kabupaten Pemeringkatan

No.	PROPINSI	No.	KABUPATEN
1	SUMATERA UTARA	1	KAB. ASAHAN
		2	KAB. DAIRI
		3	KAB. DELI SERDANG
		4	KAB. LANGKAT
		5	KAB. SIMALUNGUN
		6	KAB. TANAH KARO
		7	KAB. LABUHAN BATU
		8	KAB. TAPANULI UTARA
2	SUMATERA BARAT	1	KAB. PESISIR SELATAN
		2	KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
		3	KAB. PASAMAN
		4	KAB. SOLOK
3	RIAU	1	KAB. BENGKALIS
		2	KAB. INDRAGIRI HILIR
		3	KAB. KAMPAR
		4	KAB. KUANTAN SINGINGI
		5	KAB. PELALAWAN
		6	KAB. ROKAN HULU
4	JAMBI	1	KAB. BATANG HARI
		2	KAB. BUNGO
		3	KAB. KERINCI
		4	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
		5	KAB. TEBO
5	SUMATERA SELATAN	1	KAB. MUARA ENIM
		2	KAB. MUSI BANYUASIN
		3	KAB. MUSI RAWAS
		4	KAB. OGAN KOMIRING ILIR
		5	KAB. LAHAT
6	BANGKA BELITUNG	1	KAB. BANGKA
		2	KAB. BELITUNG
7	BENGKULU	1	KAB. BENGKULU SELATAN
8	LAMPUNG	2	KAB. LAMPUNG BARAT
		3	KAB. LAMPUNG SELATAN
		4	KAB. LAMPUNG TIMUR
		5	KAB. LAMPUNG UTARA
		6	KAB. WAYKANAN
9	BANTEN	1	KAB. LEBAK
		2	KAB. SERANG
		3	KAB. TANGERANG
10	JAWA BARAT	1	KAB. BEKASI
		2	KAB. BOGOR
		3	KAB. CIAMIS
		4	KAB. CIREBON
		5	KAB. GARUT
		6	KAB. INDRAMAYU
		7	KAB. KARAWANG
		8	KAB. KUNINGAN
		9	KAB. SUKABUMI
		10	KAB. SUMEDANG
		11	KAB. TASIKMALAYA
		12	KAB. BANDUNG
		13	KAB. CIANJUR
		14	KAB. PURWAKARTA

No.	PROPINSI	No.	KABUPATEN
11	JAWA TENGAH	15	KAB. SUBANG
		1	KAB. KENDAL
		2	KAB. MAGELANG
		3	KAB. PEKALONGAN
		4	KAB. PEMALANG
		5	KAB. SUKOHARJO
		6	KAB. TEGAL
		7	KAB. BANYUMAS
		8	KAB. BOYOLALI
		9	KAB. CILACAP
		10	KAB. JEPARA
		11	KAB. KARANGANYAR
		12	KAB. KLATEN
		13	KAB. KUDUS
		14	KAB. KEBUMEN
12	D.I. YOGYAKARTA	1	KAB. BANTUL
		2	KAB. GUNUNG KIDUL
13	JAWA TIMUR	1	KAB. BANGKALAN
		2	KAB. BANYUWANGI
		3	KAB. BLITAR
		4	KAB. KEDIRI
		5	KAB. MAGETAN
		6	KAB. MOJOKERTO
		7	KAB. PAMEKASAN
		8	KAB. PASURUHAN
		9	KAB. SIDOARJO
		10	KAB. BONDOWOSO
		11	KAB. GRESIK
		12	KAB. JEMBER
		13	KAB. JOMBANG
		14	KAB. LAMONGAN
		15	KAB. PONOROGO
		16	KAB. TULUNGAGUNG
14	BALI	1	KAB. BADUNG
		2	KAB. BANGLI
		3	KAB. BULELENG
		4	KAB. GIANYAR
		5	KAB. JEMBRANA
		6	KAB. TABANAN
		7	KAB. KARANGASEM
15	KALIMANTAN BARAT	1	KAB. KAPUAS HULU
		2	KAB. KETAPANG
		3	KAB. PONTIANAK
		4	KAB. SAMBAS
		5	KAB. SANGGAU
16	KALIMANTAN TENGAH	1	KAB. BARITO SELATAN
		2	KAB. BARITO UTARA
		3	KAB. KAPUAS
17	KALIMANTAN SELATAN	1	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
		2	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
		3	KAB. HULU SUNGAI UTARA
		4	KAB. TABALONG
		5	KAB. TANAH LAUT

No.	PROPINSI	No.	KABUPATEN
18	KALIMANTAN TIMUR	6	KAB. TAPIN
		1	KAB. BERAU
		2	KAB. KUTAI KERTANEGARA
		3	KAB. PASIR
		4	KAB. BULUNGAN
		5	KAB. KUTAI TIMUR
		6	KAB. NUNUKAN
19	SULAWESI UTARA	1	KAB. MINAHASA
		2	KAB. SANGIHE
20	GORONTALO	1	KAB. GORONTALO
21	SULAWESI TENGAH	1	KAB. BANGGAI
		2	KAB. TOLITOLI
		3	KAB. DONGGALA
		4	KAB. MOROWALI
		5	KAB. POSO
22	SULAWESI TENGGARA	1	KAB. BUTON
		2	KAB. KOLAKA
23	SULAWESI SELATAN	1	KAB. LUWU
		2	KAB. MAJENE
		3	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
		4	KAB. PINRANG
		5	KAB. TANA TORAJA
		6	KAB. BANTAENG
		7	KAB. BARRU
		8	KAB. BONE
		9	KAB. ENREKANG
		10	KAB. GOWA
		11	KAB. JENEPONTO
		12	KAB. LUWU UTARA
		13	KAB. MAROS
		14	KAB. SELAYAR
		15	KAB. SINJAI
		16	KAB. TAKALAR
24	NUSA TENGGARA BARAT	1	KAB. BIMA
		2	KAB. LOMBOK BARAT
		3	KAB. DOMPU
		4	KAB. LOMBOK TIMUR
25	NUSA TENGGARA TIMUR	1	KAB. ENDE
		2	KAB. FLORES TIMUR
		3	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
		4	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
		5	KAB. BELU
		6	KAB. MANGGARAI
		7	KAB. NGADA
		8	KAB. SUMBA BARAT
26	IRIAN JAYA BARAT	1	KAB. FAKFAK
		2	KAB. MANOKWARI
27	PAPUA	1	KAB. SORONG
		2	KAB. JAYAWIJAYA
		3	KAB. MIMIKA

Keterangan :

 Daerah yang baru ikut rating tahun 2003

Lampiran 2.3 Daftar 44 Kota Pemeringkatan

No.	PROPINSI	No.	KOTA
1	SUMATERA UTARA	1	KOTA BINJAI
		2	KOTA MEDAN
		3	KOTA PEMATANG SIANTAR
		4	KOTA SIBOLGA
		5	KOTA TANJUNG BALAI
		6	KOTA TEBING TINGGI
		7	KOTA PADANG
		8	KOTA SAWAHLUNTO
2	RIAU	9	KOTA BATAM
		10	KOTA PEKANBARU
		11	KOTA DUMAI
3	SUMATERA SELATAN	12	KOTA PALEMBANG
4	BANGKA BELITUNG	13	KOTA PANGKAL PINANG
5	BENGKULU	14	KOTA BENGKULU
6	LAMPUNG	15	KOTA BANDAR LAMPUNG
7	BANTEN	16	KOTA TANGERANG
		17	KOTA CILEGON
8	D.K.I. JAKARTA	18	KOTA D.K.I. JAKARTA
9	JAWA BARAT	19	KOTA BEKASI
		20	KOTA BOGOR
		21	KOTA CIREBON
		22	KOTA SUKABUMI
		23	KOTA BANDUNG
10	JAWA TENGAH	24	KOTA PEKALONGAN
		25	KOTA SEMARANG
		26	KOTA TEGAL
		27	KOTA SURAKARTA
11	D.I. YOGYAKARTA	28	KOTA YOGYAKARTA
12	JAWA TIMUR	29	KOTA KEDIRI
		30	KOTA MALANG
		31	KOTA MOJOKERTO
		32	KOTA PROBOLINGGO
		33	KOTA SURABAYA
		34	KOTA MADIUN
13	BALI	35	KOTA DENPASAR
14	KALIMANTAN TIMUR	36	KOTA BALIKPAPAN
		37	KOTA SAMARINDA
15	SULAWESI UTARA	38	KOTA BITUNG
		39	KOTA MANADO
16	GORONTALO	40	KOTA GORONTALO
17	SULAWESI TENGGARA	41	KOTA KENDARI
18	SULAWESI SELATAN	42	KOTA PAREPARE
19	NUSA TENGGARA BARAT	43	KOTA MARATAM
20	NUSA TENGGARA TIMUR	44	KOTA KUPANG

Keterangan :

Daerah yang baru ikut rating tahun 2003

Lampiran 3. Data Penelitian

Lampiran 3.1 Daftar Data, Jenis Data, dan Sumber Data Pemeringkat

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR	JENIS DATA	SUMBER DATA
A. FAKTOR KELEMBAGAAN			
1. Variabel Kepastian Hukum			
1	Konsistensi Peraturan	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
2	Penegakan Hukum	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
3	Pungli di luar Birokrasi	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
4	Hubungan Eksekutif - Legislatif	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
2. Variabel Aparatur dan Pelayanan			
5	Birokrasi Pelayanan	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
6	Penyalahgunaan Wewenang	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
3. Variabel Keuangan Daerah			
7	Rasio Penerimaan Retribusi terhadap Pajak	Data Sekunder	APBD Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2002
8	Rasio Anggaran Pembangunan terhadap APBD	Data Sekunder	APBD Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2002
4. Variabel Perda			
9	Peraturan Produk Hukum Daerah (Pajak dan Retribusi)	Analisis Perda	Perda, SK Kepala Daerah Kabupaten Kota
B. FAKTOR KONDISI SOSPOL			
1. Variabel Keamanan			
10	Gangguan Keamanan terhadap Dunia Usaha	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
11	Gangguan Keamanan terhadap Masyarakat	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
12	Kecepatan Aparat Menanggulangi Gangguan Keamanan	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
2. Variabel Sospol			
13	Partisipasi Masyarakat	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
14	Potensi Konflik di masyarakat	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
15	Stabilitas Politik	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
16	Intensitas Unjuk Rasa	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
3. Variabel Budaya Masyarakat			
17	Keterbukaan Masyarakat terhadap Dunia Usaha	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
18	Non Diskriminasi (Perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa melihat perbedaan yang ada)	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
19	Adat Istiadat Masyarakat Daerah	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
20	Etos Kerja Masyarakat Daerah	Data Primer	Persepsi Dunia Usaha dan
C. FAKTOR EKONOMI DAERAH			
1. Variabel Potensi Ekonomi			
21	PDRB Perkapita	Data Sekunder	PDRB Perkapita Kabupaten / Kota Th. 2001
22	Laju Pertumbuhan PDRB	Data Sekunder	PDRB Kabupaten / Kota atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996 s/d 2001
23	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Data Sekunder	IPM Kabupaten / Kota Tahun 2002
2. Variabel Struktur Ekonomi			
24	Nilai Tambah Sektor Primer	Data Sekunder	PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001
25	Nilai Tambah Sektor Sekunder	Data Sekunder	PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001
26	Nilai Tambah Sektor Tersier	Data Sekunder	PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR	JENIS DATA	SUMBER DATA
D. FAKTOR KETENAGAKERJAAN			
1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja			
27	Rasio Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Jumlah Penduduk	Data Sekunder	BPS Pusat : Susenas Kor Tahun 2002
28	Rasio Jumlah Tenaga Kerja Berpengalaman dengan pendidikan SLTP terhadap Jumlah Tenaga Kerja	Data Sekunder	BPS Pusat : Susenas Kor Tahun 2002
29	Rasio Penduduk Pencari Kerja Terhadap Jumlah Angkatan Kerja	Data Sekunder	BPS Pusat : Susenas Kor Tahun 2002
2. Variabel Biaya Tenaga Kerja			
30	UMP/UMK	Data Sekunder	APINDO : Daftar UMP dan UMK Daerah Di Indonesia Tahun 2003
31	Rasio Upah Yang Diterima Pekerja terhadap IHK	Data Sekunder	BPS Pusat : Susenasker Kor 2002
3. Variabel Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja			
32	Produktivitas (Rasio Nilai Tambah Sektor Manufaktur terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur)	Data Sekunder	BPS Pusat dan Daerah : PDRB Atas Harga Konstan Th. 2001, Susenasker Kor Th. 2001
E. FAKTOR INFRASTRUKTUR			
1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur			
33	Ketersediaan Jalan	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Dalam Angka
34	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
35	Ketersediaan Pelabuhan Udara	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
36	Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpon	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
37	Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
2. Variabel Kualitas Infrastruktur			
38	Kualitas Jalan	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
39	Akses & Tipe Pelabuhan Laut	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
40	Akses & Tipe Pelabuhan Udara	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
41	Kualitas Sambungan Telpon	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka
42	Kualitas Suplai Listrik	Data Primer & Sekunder	Data Primer : Persepsi Pelaku Usaha ; Data Sekunder : BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kab./Kota dan Propinsi Dalam Angka

Lampiran 4. Faktor, Variabel, dan Indikator, Intensitas Pemeringkatan

Lampiran 4.1 Daftar Faktor, Variabel, dan Indikator Pemeringkatan

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR	KETERANGAN	UKURAN DAN DATA YANG DIGUNAKAN
A. FAKTOR KELEMBAGAAN			
1. Variabel Kepastian Hukum			
1	Konsistensi Peraturan yang Mengatur Kegiatan Usaha	Mengukur kepastian, kejelasan, dan konsistensi pemberlakuan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mengatur kehidupan berusaha.	Persepsi Dunia Usaha
2	Penegakan Hukum	Mengukur kepastian hukum seperti perlindungan atas pelaksanaan kontrak kerja dan hak kepemilikan, konsistensi keputusan peradilan, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha.	Persepsi Dunia Usaha
3	Pungli di luar Birokrasi terhadap Kegiatan Usaha	Melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai praktik-praktik pungutan ilegal yang dilakukan oleh orang, kelompok orang/ masyarakat di luar birokrasi, yang mengganggu kegiatan usaha.	Persepsi Dunia Usaha
4	Hubungan Eksekutif - Legislatif	Melihat hambatan yang ditimbulkan oleh kondisi hubungan antara DPRD dan Pemda	Persepsi Dunia Usaha
2. Variabel Aparatur dan Pelayanan			
5	Birokrasi Pelayanan terhadap Dunia Usaha	Mengukur kemudahan pelayanan birokrasi dan profesionalisme aparat pemda dalam melakukan pelayanan terhadap dunia usaha.	Persepsi Dunia Usaha
6	Penyalahgunaan Wewenang	Mengukur distorsi perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan terhadap dunia usaha.	Persepsi Dunia Usaha
3. Variabel Keuangan Daerah			
7	Struktur Pungutan oleh Pemerintah Daerah terhadap Dunia Usaha	Untuk melihat struktur berbagai pungutan yang berlaku di daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah.	Rasio Penerimaan Retribusi terhadap Pajak dalam APBD Kabupaten/Kota
8	Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Sarana Pendukung Kegiatan Usaha	Mengukur komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, yang tercermin dari pengalokasian dana untuk anggaran pembangunan.	Rasio Anggaran Pembangunan terhadap APBD Kabupaten /Kota
4. Variabel Perda			
9	Peraturan Produk Hukum Daerah (Pajak dan Retribusi)	Mengukur kualitas kebijakan / produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah (Perda, SK Bupati/ Wali Kota dan Sebagainya) khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha. Beberapa aspek yang dinilai dari peraturan / kebijakan daerah tersebut adalah aspek yuridis, filosofi, substansi, maupun prinsip dan dampak yang mungkin ditimbulkan dari pemberlakuan produk hukum tersebut. Beberapa hal yang dilihat adalah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan, pungutan, penetapan harga, ketenagakerjaan dan sebagainya.	Analisis Tingkat Keber- masalahan Perda Daerah Kabupaten/ Kota
B. FAKTOR KONDISI SOSPOL			
1. Variabel Keamanan			
10	Gangguan Keamanan terhadap Aktivitas Dunia Usaha	Mengukur hambatan kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha.	Persepsi Dunia Usaha
11	Gangguan Keamanan terhadap Masyarakat Lingkungan Sekitar Tempat Kegiatan Usaha	Mengukur hambatan keamanan dan rasa aman masyarakat di lingkungan kegiatan usaha.	Persepsi Dunia Usaha
12	Kecepatan Aparat Menanggulangi Gangguan Keamanan	Mengukur kualitas aparat keamanan dalam menangani gangguan keamanan / ketertiban umum, serta jaminan dan perlindungan keamanan yang dapat diberikan oleh aparat keamanan di daerah.	Persepsi Dunia Usaha
2. Variabel Sospol			
13	Partisipasi Masyarakat / Dunia Usaha dalam Perumusan	Mengukur keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi masyarakat / dunia usaha dalam	Persepsi Dunia Usaha

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR	KETERANGAN	UKURAN DAN DATA YANG DIGUNAKAN
	Kebijakan Pemerintah Daerah	perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya (dunia usaha). Mengukur keterbukaan / peluang masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.	
14	Potensi Konflik di masyarakat	Mengukur potensi hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik sosial di lingkungan usaha.	Persepsi Dunia Usaha
15	Stabilitas Politik	Mengukur hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik politik yang ada di daerah.	Persepsi Dunia Usaha
16	Intensitas Unjuk Rasa	Mengukur intensitas kegiatan unjuk rasa yang dapat menghambat / mengganggu kelancaran kegiatan usaha.	Persepsi Dunia Usaha
3. Variabel Budaya Masyarakat			
17	Keterbukaan Masyarakat terhadap Dunia Usaha	Mengukur daya dukung masyarakat terhadap kegiatan usaha dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kegiatan usaha, masuknya investasi dari luar daerah dan para pendatang yang melakukan kegiatan usaha / bekerja di daerahnya.	Persepsi Dunia Usaha
18	Perilaku Masyarakat yang Non Diskriminasi	Mengukur daya dukung masyarakat sekitar tempat usaha dilihat dari perlakuannya terhadap orang lain dari luar secara sama tanpa melihat perbedaan yang ada (suku, agama, ras, gender dan sebagainya)	Persepsi Dunia Usaha
19	Adat Istiadat Masyarakat Daerah	Melihat daya dukung nilai-nilai dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat yang mendukung produktivitas.	Persepsi Dunia Usaha
20	Etos Kerja Masyarakat Daerah	Mengukur daya dukung penduduk, masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja di daerah yang menunjukkan etos kerja dan semangat kerja keras dan dapat bersaing secara sehat.	Persepsi Dunia Usaha
C. FAKTOR EKONOMI DAERAH			
1. Variabel Potensi Ekonomi			
21	Daya Beli Masyarakat	Mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari penghasilan rata-rata masyarakat.	PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota
22	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Melihat potensi ekonomi daerah dari proyeksi perkembangan atau pertumbuhan perekonomian di daerah.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten / Kota tahun 1996 s/d 2001
23	Kesejahteraan dan Produktivitas Masyarakat	Mengukur kesejahteraan dan produktivitas, kualitas hidup penduduk di daerah.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
2. Variabel Struktur Ekonomi			
24	Nilai Tambah Sektor Primer	Untuk melihat struktur perekonomian daerah dan yang berbasis pada SDA	Nilai Tambah Sektor Primer (Rasio PDRB Sektor Primer diluar Pertanian Pangan terhadap total PDRB)
25	Nilai Tambah Sektor Sekunder	Mengukur struktur perekonomian daerah yang sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif, dan industrialisasi.	Nilai Tambah Sektor Sekunder (Rasio PDRB Sektor Sekunder terhadap total PDRB)
26	Nilai Tambah Sektor Tersier	Mengukur Kemampuan Jasa Lembaga Keuangan dalam perekonomian daerah.	Nilai Tambah Sektor Tersier (Rasio PDRB Sektor Tersier terhadap total PDRB)
D. FAKTOR KETENAGAKERJAAN			
1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja			
27	Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif	Mengukur besarnya penduduk usia produktif yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja pada kegiatan usaha.	Rasio Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Jumlah Penduduk Daerah Kab./ Kota
28	Ketersediaan Tenaga Kerja Berpengalaman Berpendidikan Minimal SLTP	Mengukur ketersediaan tenaga kerja yang sudah berpengalaman sebagai tenaga kerja pada sektor kegiatan usaha secara formal.	Rasio Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan SLTP terhadap Jumlah Tenaga Kerja di

NO.	FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR	KETERANGAN	UKURAN DAN DATA YANG DIGUNAKAN
			Kabupaten/Kota
29	Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja	Mengukur ketersediaan pencari kerja untuk mengisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.	Rasio Penduduk Pencari Kerja Terhadap Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten / Kota
2. Variabel Biaya Tenaga Kerja			
30	Biaya Tenaga Kerja berdasarkan Aturan Formal	Mengukur tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan berdasarkan aturan formal sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha.	Rasio Upah Minimum Propinsi atau Kabupaten terhadap IHK
31	Biaya Tenaga Kerja Aktual	Mengukur biaya tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor usaha yang sesungguhnya akan dikeluarkan oleh pengusaha.	Rasio Upah Yang Diterima Pekerja terhadap IHK
3. Variabel Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja			
32	Produktivitas Tenaga Kerja	Mengukur Produktivitas pekerja sektor manufaktur.	Rasio Nilai Tambah PDRB Sektor Manufaktur terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur
E. FAKTOR INFRASTRUKTUR			
1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur			
33	Ketersediaan Jalan	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur untuk Transportasi Darat	Rasio Panjang Jalan Yang ada di Kabupaten/Kota terhadap Luas Wilayah, Persepsi Pelaku Usaha
34	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur Transportasi Laut	Keberadaan atau Jarak dengan Pelabuhan Laut (Km), Persepsi Pelaku Usaha
35	Ketersediaan Pelabuhan Udara	Mengukur Ketersediaan Infrastruktur Transportasi Udara.	Keberadaan atau Jarak dengan Pelabuhan Udara (Km), Persepsi Pelaku Usaha
36	Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpon	Mengukur Ketersediaan Sarana Komunikasi.	Jumlah Sambungan Telpon Perkapita dan Persepsi Pelaku Usaha
37	Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik	Mengukur Ketersediaan Listrik untuk Sebagai sumber Energi untuk Aktivitas Usaha.	Produksi Listrik / KWH listrik yang tersedia dan Persepsi Pelaku Usaha
2. Variabel Kualitas Infrastruktur			
38	Kualitas Jalan	Mengukur kualitas infrastruktur fisik yang tersedia di daerah, sebagai penunjang kegiatan usaha.	Rasio Panjang Jalan dengan kualitas baik terhadap total panjang jalan, Persepsi Pelaku Usaha
39	Akses & Tipe Pelabuhan Laut	Mengukur kemudahan akses, kelancaran, dan kapasitas sarana transportasi laut, sebagai penunjang kegiatan usaha.	Tipe dan Kapasitas Pelabuhan Laut serta Rata-rata Pemberangkatan Kapal Per-minggu, Persepsi Pelaku Usaha
40	Akses & Tipe Pelabuhan Udara	Mengukur kemudahan dan kelancaran sarana transportasi udara yang tersedia di daerah untuk mempermudah aktivitas bisnis / usaha.	Tipe Pelabuhan Udara dan Rata-rata Penerbangan Pesawat Perminggu, Persepsi Pelaku Usaha
41	Kualitas Sambungan Telpon	Mengukur kualitas kelancaran sarana komunikasi di daerah	Persepsi Pelaku Usaha, Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Dalam Angka
42	Kualitas Suplai Listrik	Mengukur kualitas sumber energi sarana pendukung kegiatan usaha.	Persepsi Pelaku Usaha, Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Dalam Angka

Lampiran 4.2. Metode Klasifikasi Intensitas Indikator Pemeringkatan

Sebelum diproses dengan perangkat lunak 'expert choice' untuk memperoleh skor intensitas tiap indikator berdasarkan metode AHP, setiap indikator yang berupa *existing statistic data* harus diklasifikasikan ke dalam intensitas yang sudah ditentukan (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah, dan sebagainya). Pengklasifikasian indikator ke dalam intensitas-intensitasnya dilakukan dengan menggunakan metode yang berikut ini :

A. Sistem Klasifikasi Intensitas untuk Indikator

Dalam melakukan penilaian untuk menentukan daya tarik daerah terhadap investasi terlebih dahulu dilakukan klasifikasi intensitas setiap indikator, misalnya Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Pengklasifikasian setiap sub indikator tersebut dilakukan dengan 2 macam pendekatan yaitu: (1) Metode A (Metode Rata-rata), dan (2) Metode B (Metode Distribusi).

Metode A

(Metode Rata-rata) adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap daerah terhadap nilai rata-rata keseluruhan daerah. Semakin dekat dengan nilai rata-rata tertimbang keseluruhan daerah yang diperingkat, semakin besar klasifikasi intensitasnya, yang berarti kesenjangan antar daerah semakin berkurang.

Metode B

(Metode Distribusi) adalah metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data. Penghitungan klasifikasi intensitas dengan metode ini disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan kurva sebaran data.

Pada dasarnya kedua metode tersebut

menggunakan nilai acuan tertentu sebagai dasar menentukan klasifikasi intensitas masing-masing indikator. Semakin kecil nilai indikator dibandingkan nilai acuannya, semakin kecil pula klasifikasi intensitas yang didapat. Sedangkan semakin besar nilai indikator dibandingkan nilai acuannya semakin besar pula klasifikasi intensitas yang didapat.

B. Nilai Acuan

Nilai acuan untuk setiap indikator berbeda tergantung dari metode yang digunakan.

Metode A, misalnya, nilai acuan didasarkan pada nilai rata-rata dari indikator. Sebagai contoh, untuk menghitung klasifikasi intensitas indikator PDRB per kapita suatu daerah kabupaten, nilai acuan dihitung berdasarkan rata-rata indikator PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota.

Pada metode B, nilai acuan didasarkan pada rata-rata nilai indikator dengan memperhatikan sebaran dan bentuknya yaitu *standar deviasi*, *kurtosis* (keruncingan), dan *skewness* (kemencengan).

C. Alasan Penggunaan Metode

- 1 Alasan pemilihan metode A adalah bahwa:
 - Jika nilai indikator (misalnya : Nilai PDRB Perkapita atau Nilai Laju Pertumbuhan PDRB) suatu daerah mendekati nilai rata-rata, berarti bahwa persebaran nilai antar daerah semakin berkurang.
 - Dalam distribusi/keadaan normal, rata-rata = median = modus.
- 2 Alasan pemilihan metode B adalah bahwa distribusi nilai setiap indikator yang diteliti untuk menentukan daya tarik daerah terhadap invesatasi sangat beragam.

Sebagian indikator distribusi nilainya berbentuk menceng ke kiri, sebagian menceng kanan, dan beberapa diantaranya ada yang berpola mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, untuk membuat klasifikasi intensitas tidak hanya didasarkan pada standar deviasi saja, tetapi juga melihat kemencengan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*)

D. Sistem Klasifikasi Intensitas Berbagai Macam Metode B

Dalam aplikasinya, metode B dikembangkan dalam beberapa bentuk yaitu B, B1, B2, B3, dan B4. Sistem klasifikasi intensitas untuk setiap metode B adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Sangat Tinggi	$\bar{d} \geq X + SD$	$\bar{d} \leq X - SD$
Tinggi	$X + \frac{1}{2} SD \leq \bar{d} < X + SD$	$X - \frac{1}{2} SD \leq \bar{d} < X - SD$
Sedang	$X - \frac{1}{2} SD \leq \bar{d} < X + \frac{1}{2} SD$	$X - \frac{1}{2} SD < \bar{d} \leq X + \frac{1}{2} SD$
Rendah	$X - \frac{1}{2} SD < \bar{d} \leq X - SD$	$X + \frac{1}{2} SD < \bar{d} \leq X + SD$
Sangat Rendah	$\bar{d} < X - SD$	$\bar{d} > X + SD$

Keterangan : \bar{d} = Nilai Indikator ; \bar{X} = Rata-rata ; SD = Standar Deviasi

Tabel 2 :
Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B1

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Sangat Tinggi	$\bar{d} \geq X + \alpha_4 SD$	$\bar{d} \leq X - \alpha_4 SD$
Tinggi	$X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD \leq \bar{d} < X + \alpha_4 SD$	$X - \frac{1}{2} SD \leq \bar{d} < X - \alpha_4 SD$
Sedang	$X - \frac{1}{2} \alpha_4 SD \leq \bar{d} < X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD$	$X - \frac{1}{2} \alpha_4 SD < \bar{d} \leq X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD$
Rendah	$X - \frac{1}{2} \alpha_4 SD < \bar{d} \leq X - \alpha_4 SD$	$X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD < \bar{d} \leq X + \alpha_4 SD$
Sangat Rendah	$\bar{d} < X - \alpha_4 SD$	$\bar{d} > X + \alpha_4 SD$

Keterangan : \bar{d} = Nilai Indikator ; \bar{X} = Rata-rata ; α_4 = Keruncingan ; SD = Standar Deviasi

Tabel 3 :
Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B2

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Sangat Tinggi	$\bar{d} \geq X + \alpha_3 SD$	$\bar{d} \leq X - \alpha_3 SD$
Tinggi	$X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD \leq \bar{d} < X + \alpha_3 SD$	$X - \frac{1}{2} SD \leq \bar{d} < X - \alpha_3 SD$
Sedang	$X - \frac{1}{2} \alpha_3 SD \leq \bar{d} < X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD$	$X - \frac{1}{2} \alpha_3 SD < \bar{d} \leq X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD$
Rendah	$X - \frac{1}{2} \alpha_3 SD < \bar{d} \leq X - \alpha_3 SD$	$X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD < \bar{d} \leq X + \alpha_3 SD$
Sangat Rendah	$\bar{d} < X - \alpha_3 SD$	$\bar{d} > X + \alpha_3 SD$

Keterangan : \bar{d} = Nilai Indikator ; \bar{X} = Rata-rata ; α_3 = Kemencengan ; SD = Standar Deviasi

Tabel 4 :
Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B3

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Sangat Tinggi	$\bar{d} \geq X + \text{Met}$	$\bar{d} \leq X - \text{Met}$
Tinggi	$X + \frac{1}{2} \text{Met} \leq \bar{d} < X + \text{Met}$	$X - \frac{1}{2} \text{Met} \leq \bar{d} < X - \text{Met}$
Sedang	$X - \frac{1}{2} \text{Met} \leq \bar{d} < X + \frac{1}{2} \text{Met}$	$X - \frac{1}{2} \text{Met} < \bar{d} \leq X + \frac{1}{2} \text{Met}$
Rendah	$X - \frac{1}{2} \text{Met} < \bar{d} \leq X - \text{Met}$	$X + \frac{1}{2} \text{Met} < \bar{d} \leq X + \text{Met}$
Sangat Rendah	$\bar{d} < X - \text{Met}$	$\bar{d} > X + \text{Met}$

Keterangan : \bar{d} = Nilai Indikator ; X = Rata-rata ; $\text{Met} = (\alpha_4 * \text{SD})$ jika $\alpha_4 \leq 3$, dan $\text{Met} = (\alpha_3 * \text{SD})$ jika $\alpha_4 > 3$,

Tabel 5 :
Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B4

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Sangat Tinggi	$\bar{d} \geq X + \text{Rat}$	$\bar{d} \leq X - \text{Rat}$
Tinggi	$X + \frac{1}{2} \text{Rat} \leq \bar{d} < X + \text{Rat}$	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} \leq \bar{d} < X - \text{Rat}$
Sedang	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} \leq \bar{d} < X + \frac{1}{2} \text{Rat}$	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} < \bar{d} \leq X + \frac{1}{2} \text{Rat}$
Rendah	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} < \bar{d} \leq X - \text{Rat}$	$X + \frac{1}{2} \text{Rat} < \bar{d} \leq X + \text{Rat}$
Sangat Rendah	$\bar{d} < X - \text{Rat}$	$\bar{d} > X + \text{Rat}$

Keterangan : \bar{d} = Nilai Indikator ; X = Rata-rata ; $\text{Met} = ((\alpha_3 + \alpha_4)/2 \text{ R SD})$

E. Rumus-rumus yang digunakan

1. Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \qquad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2. Standar Deviasi

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

3. Keruncingan

$$\alpha_4 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

4. Kemencengan

$$\alpha_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3}$$

Lampiran 4.3. Hasil Klasifikasi Indikator Pemeringkatan
 Lampiran 4.3.1. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Kelembagaan
 Lampiran 4.3.1.1.A. Indikator Rasio Retribusi Terhadap Pajak

No.	Propinsi	Kabupaten	Pos Pajak Daerah	Pos Retribusi Daerah	Rasio Retribusi thd Pajak	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	15.877,64	3.487,35	21,96	KKRSR
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	941,00	2.717,30	288,77	KKRT
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	19.824,00	9.959,00	50,24	KKRR
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	7.687,55	3.292,02	42,82	KKRSR
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	10.102,50	5.453,72	53,98	KKRR
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	2.339,80	3.761,95	160,78	KKRSD
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	3.989,00	4.023,68	100,87	KKRR
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	1.046,25	4.682,83	447,58	KKRST
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	977,13	3.335,98	341,41	KKRST
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	2.377,00	5.049,90	212,45	KKRSD
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	1.296,00	3.547,26	273,71	KKRT
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	1.400,00	2.074,50	148,18	KKRSD
13	Riau	Kab. Bengkalis	7.773,00	1.777,46	22,87	KKRSR
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	2.535,00	11.232,06	443,08	KKRST
15	Riau	Kab. Kampar	2.734,57	4.535,73	165,87	KKRSD
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	487,50	2.229,15	457,26	KKRST
17	Riau	Kab. Pelalawan	2.314,00	1.000,00	43,22	KKRSR
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	560,00	2.070,14	369,67	KKRST
19	Jambi	Kab. Batanghari	918,50	5.084,61	553,58	KKRST
20	Jambi	Kab. Bungo	873,37	6.722,77	769,75	KKRST
21	Jambi	Kab. Kerinci	1.296,20	2.748,18	212,02	KKRSD
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	578,10	1.392,90	240,94	KKRSD
23	Jambi	Kab. Tebo	331,08	4.845,05	1.463,41	KKRST
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	9.335,15	2.301,97	24,66	KKRSR
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	6.397,30	1.158,27	18,11	KKRSR
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	1.876,03	5.271,12	280,97	KKRT
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	1.492,00	2.040,17	136,74	KKRSD
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	2.350,68	3.011,89	128,13	KKRSD
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	7.230,00	3.920,41	54,22	KKRR
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	10.899,37	2.166,93	19,88	KKRSR
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	2.484,75	3.488,24	140,39	KKRSD
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	540,67	611,39	113,08	KKRR
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	2.162,50	3.439,72	159,06	KKRSD
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	1.427,50	1.652,50	115,76	KKRSD
35	Jawa Barat	Kab. Bandung	32.475,00	24.671,44	75,97	KKRR
36	Lampung	Kab. Lampung Utara	1.880,00	3.342,79	177,81	KKRSD
37	Lampung	Kab. Way Kanan	189,90	400,59	210,94	KKRSD
38	Banten	Kab. Lebak	880,73	7.037,24	799,03	KKRST
39	Banten	Kab. Serang	15.600,00	22.732,75	145,72	KKRSD
40	Banten	Kab. Tangerang	58.820,00	29.663,00	50,43	KKRR
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	23.925,14	15.723,74	65,72	KKRR
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	59.310,00	34.807,48	58,69	KKRR
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	3.115,00	11.707,00	375,83	KKRST
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	7.135,00	14.325,36	200,78	KKRSD
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	9.586,60	10.750,49	112,14	KKRR
46	Jawa Barat	Kab. Garut	7.487,60	18.510,79	247,22	KKRSD
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	16.694,38	11.289,93	67,63	KKRR
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	15.170,00	29.971,46	197,57	KKRSD
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	2.763,08	11.508,03	416,49	KKRST
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	15.819,15	17.894,47	113,12	KKRR
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	12.218,00	7.853,48	64,28	KKRR
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	11.087,50	16.173,52	145,87	KKRSD
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	1.376,13	4.000,53	290,71	KKRT
54	Jawa Barat	Kab. Subang	5.550,00	15.577,78	280,68	KKRT
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	8.640,00	10.912,50	126,30	KKRSD
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	12.340,00	10.334,09	83,74	KKRR

No.	Propinsi	Kabupaten	Pos Pajak Daerah	Pos Retribusi Daerah	Rasio Retribusi thd Pajak	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	2.503,42	2.909,54	116,22	KKRSD
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	3.903,44	8.918,78	228,49	KKRSD
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	7.677,00	6.762,21	88,08	KKRR
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	4.719,50	12.771,49	270,61	KKRT
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	5.880,68	16.411,89	279,08	KKRT
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	3.134,05	12.884,81	411,12	KKRST
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	14.360,00	12.658,54	88,15	KKRR
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	3.719,00	11.498,94	309,19	KKRT
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	6.047,00	8.721,16	144,22	KKRSD
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	5.805,00	6.371,60	109,76	KKRR
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	5.626,74	18.262,01	324,56	KKRT
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	2.608,00	6.486,47	248,71	KKRSD
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	4.115,11	12.219,62	296,95	KKRT
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	1.407,91	7.802,78	554,21	KKRST
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	2.577,82	6.046,16	234,55	KKRSD
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	7.326,00	11.048,63	150,81	KKRSD
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	2.320,50	4.467,59	192,53	KKRSD
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	4.289,79	6.687,80	155,90	KKRSD
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	2.439,50	3.604,15	147,74	KKRSD
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	8.324,20	7.650,20	91,90	KKRR
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	1.755,50	4.851,29	276,35	KKRT
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	18.050,00	8.124,00	45,01	KKRSR
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	28.100,00	39.194,13	139,48	KKRSD
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	3.627,03	4.504,93	124,20	KKRSD
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	18.849,00	5.647,00	29,96	KKRSR
82	Jawa Timur	Kab. Jember	6.325,50	17.269,76	273,02	KKRT
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	3.942,00	5.064,05	128,46	KKRSD
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	4.289,79	6.687,80	155,90	KKRSD
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	2.405,59	5.211,53	216,64	KKRSD
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	4.165,00	8.995,55	215,98	KKRSD
87	Bali	Kab. Badung	220.625,00	3.364,00	1,52	KKRSR
88	Bali	Kab. Bangli	1.541,00	3.562,45	231,18	KKRSD
89	Bali	Kab. Buleleng	6.629,00	5.109,05	77,07	KKRR
90	Bali	Kab. Gianyar	40.046,67	14.346,16	35,82	KKRSR
91	Bali	Kab. Jembrana	1.348,95	3.245,55	240,60	KKRSD
92	Bali	Kab. Tabanan	11.390,19	13.023,70	114,34	KKRR
93	Bali	Kab. Karangasem	14.233,10	2.999,51	21,07	KKRSR
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	385,00	1.399,50	363,51	KKRST
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1.107,04	2.418,43	218,46	KKRSD
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	2.651,07	948,15	35,76	KKRSR
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	1.084,00	2.722,65	251,17	KKRSD
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	1.607,22	2.053,63	127,78	KKRSD
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	2.107,50	3.341,00	158,53	KKRSD
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	637,98	1.330,15	208,49	KKRSD
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	1.158,54	1.489,50	128,57	KKRSD
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	770,88	2.677,18	347,29	KKRST
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	781,72	1.751,63	224,07	KKRSD
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	1.577,00	1.838,50	116,58	KKRSD
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	11.640,50	934,95	8,03	KKRSR
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	1.048,00	1.860,00	177,48	KKRSD
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	729,70	348,50	47,76	KKRR
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	3.859,70	3.831,84	99,28	KKRR
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	4.503,00	3.225,00	71,62	KKRR
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	23.310,17	12.195,07	52,32	KKRR
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	321,50	664,15	206,58	KKRSD
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	2.083,00	1.150,00	55,21	KKRR

No.	Propinsi	Kabupaten	Pos Pajak Daerah	Pos Retribusi Daerah	Rasio Retribusi thd Pajak	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	301,00	559,50	185,88	KKRSD
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	2.763,38	4.958,11	179,42	KKRSD
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	988,10	4.309,12	436,10	KKRST
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	1.146,81	4.172,92	363,87	KKRST
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	2.032,00	2.686,40	132,20	KKRSD
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	9.259,65	883,98	9,55	KKRSR
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	2.402,00	2.203,69	91,74	KKRR
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	455,98	1.168,14	256,18	KKRT
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	757,32	2.234,58	295,07	KKRT
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	748,79	3.365,54	449,46	KKRST
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	8.485,50	5.645,00	66,53	KKRR
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	2.002,91	8.586,54	428,70	KKRST
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	506,15	838,53	165,67	KKRSD
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	11.380,08	2.936,38	25,80	KKRSR
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	1.948,65	2.870,29	147,30	KKRSD
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	3.936,06	5.999,42	152,42	KKRSD
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	514,94	1.537,60	298,60	KKRT
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	1.040,80	1.698,61	163,20	KKRSD
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	2.266,45	7.546,98	332,99	KKRST
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	1.097,40	1.301,55	118,60	KKRSD
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	5.210,31	5.984,17	114,85	KKRR
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	795,10	2.450,98	308,26	KKRT
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	20.721,73	5.509,76	26,59	KKRSR
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	6.017,08	4.315,01	71,71	KKRR
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	735,00	1.070,92	145,70	KKRSD
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	649,28	3.203,42	493,38	KKRST
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	852,50	2.308,18	270,75	KKRT
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	6.905,30	5.153,90	74,64	KKRR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	13.605,00	4.287,97	31,52	KKRSR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	1.206,04	2.134,13	176,95	KKRSD
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	1.814,29	8.062,40	444,38	KKRST
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1.108,79	2.668,49	240,67	KKRSD
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	693,80	1.519,20	218,97	KKRSD
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	1.139,98	3.279,09	287,64	KKRT
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	572,18	1.842,10	321,94	KKRT
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	2.367,00	2.560,32	108,17	KKRR
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1.412,83	3.472,49	245,78	KKRSD
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	539,50	2.142,26	397,08	KKRST
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	547,30	1.760,08	321,59	KKRT
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	482,00	381,10	79,07	KKRR
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	377,50	695,85	184,33	KKRSD
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	195,90	1.391,30	710,21	KKRST
155	Papua	Kab. Jayawijaya	432,50	896,00	207,17	KKRSD
156	Papua	Kab. Mimika	7.658,80	1.210,69	15,81	KKRSR

Keterangan :

KKR : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Retribusi/Pajak
Dibelakang **KKR** - **ST** : Sangat Tinggi
T : Tinggi
SD : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

Rata-rata	185,63	
Stand. Dev	140,15	
KKRST	325,78	
KKRT	255,71	325,78
KKRSD	115,56	255,71
KKRR	115,56	45,49
KKRSR	45,49	

Lampiran 4.3.1.1.B. Indikator Rasio Retribusi Terhadap Pajak

No.	Propinsi	Kota	Pos Pajak Daerah	Pos Retribusi Daerah	Rasio Retribusi thd Pajak	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	1.857,50	2.954,41	159,05	KKRSD
2	Sumatera Utara	Kota Medan	70.800,00	52.276,21	73,84	KKRR
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	4.200,00	5.830,66	138,83	KKRSD
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	526,80	1.951,31	370,41	KKRST
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	2.271,86	3.419,23	150,50	KKRSD
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	1.830,79	2.018,09	110,23	KKRR
7	Sumatera Barat	Kota Padang	35.680,00	14.772,43	41,40	KKRSR
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	310,24	800,86	258,14	KKRT
9	Riau	Kota Batam	23.050,00	22.105,00	95,90	KKRR
10	Riau	Kota Pekanbaru	17.145,00	18.243,04	106,40	KKRR
11	Riau	Kota Dumai	3.004,15	2.302,49	76,64	KKRR
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	18.053,77	17.161,48	95,06	KKRR
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	1.837,65	4.857,90	264,35	KKRT
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	1.865,00	2.916,07	156,36	KKRSD
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	19.275,00	9.978,00	51,77	KKRR
16	Banten	Kota Tangerang	39.525,00	17.039,50	43,11	KKRSR
17	Banten	Kota Cilegon	32.695,00	1.687,60	5,16	KKRSR
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	3.101.000,00	251.550,07	8,11	KKRSR
19	Jawa Barat	Kota Bandung	85.000,00	61.654,90	72,54	KKRR
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	24.959,79	29.648,38	118,78	KKRSD
21	Jawa Barat	Kota Bogor	13.306,70	12.874,55	96,75	KKRR
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	5.135,88	6.947,50	135,27	KKRSD
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	1.328,00	12.735,72	959,02	KKRST
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	4.008,48	2.993,94	74,69	KKRR
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	51.922,30	30.717,27	59,16	KKRR
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	3.372,11	11.529,45	341,91	KKRST
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	20.450,00	20.967,28	102,53	KKRR
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	20.196,23	12.698,67	62,88	KKRR
29	Jawa Timur	Kota Kediri	3.097,00	3.043,86	98,28	KKRR
30	Jawa Timur	Kota Malang	11.810,00	10.999,12	93,13	KKRR
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	2.191,10	3.450,47	157,48	KKRSD
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	2.834,93	7.290,67	257,17	KKRT
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	129.500,00	80.232,41	61,96	KKRR
34	Jawa Timur	Kota Madiun	2.119,37	2.443,38	115,29	KKRR
35	Bali	Kota Denpasar	60.350,00	26.137,00	43,31	KKRSR
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	22.310,17	12.195,07	54,66	KKRR
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	11.950,00	18.502,50	154,83	KKRSD
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	3.152,75	4.756,36	150,86	KKRSD
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	15.486,00	12.116,62	78,24	KKRR
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	1.381,90	5.137,00	371,73	KKRST
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	5.188,45	3.455,60	66,60	KKRR
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	1.468,52	5.863,66	399,29	KKRST
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	6.465,00	5.614,92	86,85	KKRR
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	4.271,00	2.686,86	62,91	KKRR

Keterangan :

KKR : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Retribusi/Pajak
Dibelakang **KKR** - **ST** : Sangat Tinggi
T : Tinggi
SD : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

Rata-rata	185,63	
Stand. Dev	140,15	
KKRST	325,78	
KKRT	255,71	325,78
KKRSD	115,56	255,71
KKRR	115,56	45,49
KKRSR	45,49	

Lampiran 4.3.1.2.A. Indikator Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap APBD

No.	Propinsi	Kabupaten	Total Pengeluaran Rutin dan Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Total Pengeluaran Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	326.154,80	95.616,40	29,32	KKASD
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	167.177,17	47.892,43	28,65	KKASD
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	506.551,61	95.066,52	18,77	KKAR
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	327.160,14	84.495,01	25,83	KKASD
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	367.084,04	114.871,99	31,29	KKASD
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	180.999,80	40.200,00	22,21	KKAR
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	278.091,88	64.288,36	23,12	KKASD
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	256.771,62	80.842,22	31,48	KKASD
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	185.355,58	40.085,82	21,63	KKAR
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	204.528,61	65.808,64	32,18	KKASD
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	220.853,84	64.210,55	29,07	KKASD
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	227.909,93	63.428,70	27,83	KKASD
13	Riau	Kab. Bengkalis	1.433.679,95	1.028.503,35	71,74	KKAST
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	397.063,85	218.946,89	55,14	KKAST
15	Riau	Kab. Kampar	577.179,01	299.625,42	51,91	KKAST
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	298.060,13	179.466,53	60,21	KKAST
17	Riau	Kab. Pelalawan	332.580,68	222.592,74	66,93	KKAST
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	281.844,63	137.041,56	48,62	KKAST
19	Jambi	Kab. Batanghari	151.125,61	58.801,14	38,91	KKAT
20	Jambi	Kab. Bungo	165.519,46	46.797,23	28,27	KKASD
21	Jambi	Kab. Kerinci	199.292,75	57.204,70	28,70	KKASD
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	138.602,79	55.221,34	39,84	KKAT
23	Jambi	Kab. Tebo	143.148,27	72.868,19	50,90	KKAST
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	362.514,95	114.517,39	31,59	KKASD
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	470.556,31	231.267,48	49,15	KKAST
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	312.078,36	139.475,38	44,69	KKAST
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	343.507,20	142.185,92	41,39	KKAT
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	230.129,38	49.114,01	21,34	KKAR
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	244.583,08	99.714,28	40,77	KKAT
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	150.184,52	24.888,44	16,57	KKAR
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	214.066,01	34.148,97	15,95	KKASR
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	170.983,82	64.161,70	37,53	KKAT
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	309.537,04	52.811,96	17,06	KKAR
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	250.029,94	23.977,01	9,59	KKASR
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	246.413,38	63.486,69	25,76	KKASD
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	874.915,64	248.033,06	28,35	KKASD
37	Lampung	Kab. Way Kanan	143.190,23	74.033,93	51,70	KKAST
38	Banten	Kab. Lebak	238.440,24	70.939,19	29,75	KKASD
39	Banten	Kab. Serang	346.371,89	60.647,27	17,51	KKAR
40	Banten	Kab. Tangerang	589.381,94	190.867,18	32,38	KKASD
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	473.843,59	193.629,73	40,86	KKAT
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	716.407,10	210.187,37	29,34	KKASD
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	433.024,79	35.520,20	8,20	KKASR
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	406.840,70	94.925,80	23,33	KKASD
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	403.028,07	95.780,51	23,77	KKASD
46	Jawa Barat	Kab. Garut	473.624,97	50.661,49	10,70	KKASR
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	366.695,89	104.083,97	28,38	KKASD
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	427.730,90	129.415,50	30,26	KKASD
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	270.287,56	23.015,50	8,52	KKASR
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	239.228,35	46.244,81	19,33	KKAR
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	394.419,54	117.637,94	29,83	KKASD
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	322.011,70	33.867,46	10,52	KKASR
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	381.700,07	29.143,02	7,64	KKASR
54	Jawa Barat	Kab. Subang	327.045,49	69.478,93	21,24	KKAR
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	240.916,65	13.989,60	5,81	KKASR
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	427.470,76	98.830,68	23,12	KKASD

No.	Propinsi	Kabupaten	Total Pengeluaran Rutin dan Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Total Pengeluaran Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Rasio	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	251.161,12	51.876,96	20,65	KKAR
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	268.239,83	40.962,66	15,27	KKASR
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	251.570,46	29.759,88	11,83	KKASR
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	343.401,32	92.940,57	27,06	KKASD
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	366.052,74	46.641,68	12,74	KKASR
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	288.274,51	39.062,81	13,55	KKASR
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	382.151,77	66.409,27	17,38	KKAR
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	270.403,55	73.855,58	27,31	KKASD
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	266.943,82	39.700,65	14,87	KKASR
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	375.244,56	37.536,90	10,00	KKASR
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	167.246,78	56.593,26	33,84	KKASD
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	321.918,74	52.225,06	16,22	KKAR
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	340.608,13	53.714,78	15,77	KKASR
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	240.216,55	39.091,80	16,27	KKAR
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	227.607,56	49.237,92	21,63	KKAR
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	387.867,20	77.119,54	19,88	KKAR
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	301.460,68	24.896,09	8,26	KKASR
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	322.726,22	55.490,55	17,19	KKAR
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	267.055,89	43.208,76	16,18	KKAR
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	296.638,82	62.281,00	21,00	KKAR
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	229.012,57	43.799,23	19,13	KKAR
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	565.664,97	150.049,93	26,53	KKASD
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	438.912,63	104.209,13	23,74	KKASD
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	250.675,43	26.141,54	10,43	KKASR
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	250.675,43	52.414,95	20,91	KKAR
82	Jawa Timur	Kab. Jember	508.141,15	143.755,66	28,29	KKASD
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	311.654,31	87.942,39	28,22	KKASD
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	298.657,57	65.628,20	21,97	KKAR
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	275.771,44	60.412,65	21,91	KKAR
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	295.306,64	51.341,94	17,39	KKAR
87	Bali	Kab. Badung	455.605,82	242.602,72	53,25	KKAST
88	Bali	Kab. Bangli	137.310,05	31.291,82	22,79	KKAR
89	Bali	Kab. Buleleng	261.099,68	40.098,93	15,36	KKASR
90	Bali	Kab. Gianyar	351.123,31	137.928,82	39,28	KKAT
91	Bali	Kab. Jembrana	159.962,80	20.431,01	12,77	KKASR
92	Bali	Kab. Tabanan	266.158,98	74.411,77	27,96	KKASD
93	Bali	Kab. Karangasem	229.191,30	70.280,33	30,66	KKASD
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	209.460,63	83.978,39	40,09	KKAT
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	303.795,27	131.483,88	43,28	KKAST
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	226.245,70	47.442,89	20,97	KKAR
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	214.126,80	69.169,16	32,30	KKASD
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	234.556,67	65.773,45	28,04	KKASD
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	83.995,70	55.378,17	65,93	KKAST
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	208.167,23	93.602,76	44,97	KKAST
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	329.484,67	116.605,30	35,39	KKAT
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	155.258,62	47.195,61	30,40	KKASD
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	159.655,40	48.872,38	30,61	KKASD
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	164.411,80	42.147,22	25,64	KKASD
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	145.347,10	44.812,72	30,83	KKASD
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	157.337,06	47.138,36	29,96	KKASD
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	108.205,65	23.808,11	22,00	KKAR
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	418.068,51	236.940,49	56,68	KKAST
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	1.693.031,01	1.089.168,79	64,33	KKAST
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	486.593,39	294.463,54	60,52	KKAST
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	463.952,77	239.306,05	51,58	KKAST
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	837.710,00	548.570,00	65,48	KKAST

No.	Propinsi	Kabupaten	Total Pengeluaran Rutin dan Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Total Pengeluaran Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Rasio	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	334.483,89	209.193,25	62,54	KKAST
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	342.174,43	-	-	KKASR
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	176.580,25	18.356,81	10,40	KKASR
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	207.252,41	44.036,83	21,25	KKAR
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	171.432,08	49.941,21	29,13	KKASD
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	136.185,09	45.294,43	33,26	KKASD
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	21.572,79	250,00	1,16	KKASR
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	146.769,70	53.610,78	36,53	KKAT
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	238.173,64	76.575,99	32,15	KKASD
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	210.505,01	52.064,78	24,73	KKASD
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	192.077,41	54.122,41	28,18	KKASD
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	211.712,14	58.463,29	27,61	KKASD
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	125.986,57	40.630,19	32,25	KKASD
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	158.648,66	59.229,89	37,33	KKAT
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	165.612,59	45.352,43	27,38	KKASD
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	198.412,13	52.519,41	26,47	KKASD
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	108.785,89	41.027,42	37,71	KKAT
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	127.842,72	47.804,73	37,39	KKAT
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	246.297,45	21.073,56	8,56	KKASR
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	129.457,73	44.584,51	34,44	KKASD
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	217.986,40	64.995,63	29,82	KKASD
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	167.959,99	43.120,95	25,67	KKASD
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	234.080,24	80.546,29	34,41	KKASD
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	199.786,52	69.320,45	34,70	KKASD
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	114.922,77	45.359,12	39,47	KKAT
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	129.118,96	33.160,96	25,68	KKASD
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	143.802,46	27.917,32	19,41	KKAR
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	270.912,52	57.099,71	21,08	KKAR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	232.637,86	42.865,53	18,43	KKAR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	150.356,54	40.164,67	26,71	KKASD
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	287.686,49	84.980,34	29,54	KKASD
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	148.407,25	25.203,88	16,98	KKAR
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	150.632,49	48.098,83	31,93	KKASD
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	208.658,13	75.786,79	36,32	KKAT
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	173.614,69	63.535,51	36,60	KKAT
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	184.320,46	52.209,12	28,33	KKASD
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	225.890,05	55.188,64	24,43	KKASD
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	159.173,07	50.664,49	31,83	KKASD
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	156.007,57	52.921,39	33,92	KKASD
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	225.435,62	68.747,97	30,50	KKASD
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	274.852,85	122.924,93	44,72	KKAST
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	345.403,89	85.524,55	24,76	KKASD
155	Papua	Kab. Jayawijaya	413.312,80	177.463,27	42,94	KKAT
156	Papua	Kab. Mimika	312.115,63	132.348,90	42,40	KKAT

Keterangan :

KKA : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Anggaran Pembangunan/APBD

Huruf Setelah **KKA** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	29,62	
Stand. Dev	13,64	
KKAST	43,25	
KKAT	36,43	43,25
KKASD	22,80	36,43
KKAR	22,80	15,98
KKASR	15,98	
KKRSR	45,49	

Lampiran 4.3.1.2.B. Indikator Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap APBD

No.	Propinsi	Kota	Total Pengeluaran Rutin dan Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Total Pengeluaran Pembangunan (tidak termasuk UKP)	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	155.047,17	54.467,01	35,13	KKASD
2	Sumatera Utara	Kota Medan	663.506,57	138.852,89	20,93	KKAR
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	165.944,00	45.643,52	27,51	KKASD
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	106.126,78	39.658,31	37,37	KKAT
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	162.727,11	100.000,28	61,45	KKAST
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	134.677,76	45.247,23	33,60	KKASD
7	Sumatera Barat	Kota Padang	338.909,25	47.605,76	14,05	KKASR
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	86.875,85	23.506,73	27,06	KKASD
9	Riau	Kota Batam	358.633,72	189.246,32	52,77	KKAST
10	Riau	Kota Pekanbaru	364.020,42	115.505,77	31,73	KKASD
11	Riau	Kota Dumai	258.900,45	115.537,39	44,63	KKAST
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	453.648,16	100.792,36	22,22	KKAR
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	110.051,46	33.188,19	30,16	KKASD
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	146.214,40	24.981,18	17,09	KKAR
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	279.253,89	41.207,28	14,76	KKASR
16	Banten	Kota Tangerang	378.476,21	159.248,60	42,08	KKAT
17	Banten	Kota Cilegon	165.339,07	55.379,24	33,49	KKASD
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	9.345.516,87	3.628.875,25	38,83	KKAT
19	Jawa Barat	Kota Bandung	902.793,03	226.727,89	25,11	KKASD
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	396.051,55	161.113,10	40,68	KKAT
21	Jawa Barat	Kota Bogor	244.511,39	59.118,11	24,18	KKASD
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	187.703,43	46.628,15	24,84	KKASD
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	155.163,97	42.885,90	27,64	KKASD
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	130.573,44	47.682,73	36,52	KKAT
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	363.419,12	296.240,45	81,51	KKAST
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	245.722,15	103.622,12	42,17	KKAT
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	247.785,50	38.603,42	15,58	KKASR
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	242.199,60	23.845,76	9,85	KKASR
29	Jawa Timur	Kota Kediri	147.529,42	29.552,90	20,03	KKAR
30	Jawa Timur	Kota Malang	257.105,55	55.031,98	21,40	KKAR
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	125.144,33	38.627,25	30,87	KKASD
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	146.346,62	48.797,08	33,34	KKASD
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	931.794,48	208.952,87	22,42	KKAR
34	Jawa Timur	Kota Madiun	263.917,43	146.125,88	55,37	KKAST
35	Bali	Kota Denpasar	334.034,86	102.186,13	30,59	KKASD
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	422.969,07	219.577,71	51,91	KKAST
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	550.129,11	273.170,01	49,66	KKAST
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	132.151,57	42.550,00	32,20	KKASD
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	194.930,92	31.530,00	16,17	KKAR
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	127.572,32	37.290,10	29,23	KKASD
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	145.761,85	27.238,10	18,69	KKAR
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	113.093,85	31.134,18	27,53	KKASD
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	156.858,79	50.461,65	32,17	KKASD
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	132.898,46	19.645,00	14,78	KKASR

Keterangan :

KKA : Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Anggaran Pembangunan/APBD

Huruf Setelah **KKA** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	29,62	
Stand. Dev	13,64	
KKAST	43,25	
KKAT	36,43	43,25
KKASD	22,80	36,43
KKAR	22,80	15,98
KKASR	15,98	
KKRSR	45,49	

Lampiran 4.3.2. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Ekonomi Daerah

Lampiran 4.3.2.1. Variabel Potensi Ekonomi

Lampiran 4.3.2.1.1.A Indikator PDRB Perkapita

No.	Propinsi	Kabupaten	PDRB Perkapita		Intensitas
			1999	2000	
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	7.049.808,85	8.773.138,32	EPPST
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	3.964.214,62	4.575.689,39	EPPSD
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	3.235.494,56	3.647.018,11	EPPSD
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	4.561.009,95	5.214.906,27	EPPT
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	4.142.181,45	4.159.249,79	EPPSD
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	5.486.651,02	6.100.890,94	EPPT
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	6.653.471,85	8.011.739,91	EPPST
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	3.402.431,17	-	EPPSD
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	2.855.977,198	3.346.230,10	EPPSD
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	4.001.696,877	4.720.544,88	EPPSD
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	2.646.639,607	2.999.635,59	EPPT
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	3.050.767,982	3.717.069,99	EPPSD
13	Riau	Kab. Bengkalis 1)	-	3.114.789,45	EPPSD
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	3.836.636,15	4.243.380,74	EPPSD
15	Riau	Kab. Kampar 1)	-	2.883.150,59	EPPT
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	-	4.228.285,21	EPPSD
17	Riau	Kab. Pelalawan	-	4.469.009,15	EPPSD
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	-	2.741.683,91	EPPT
19	Jambi	Kab. Batanghari	-	3.553.253,32	EPPSD
20	Jambi	Kab. Bungo	-	3.143.385,10	EPPSD
21	Jambi	Kab. Kerinci	2.803.148,089	3.125.261,82	EPPSD
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	6.900.723,76	EPPST
23	Jambi	Kab. Tebo	-	2.132.411,17	EPPT
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	8.375.040,85	12.063.770,91	EPPST
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	5.211.567,52	6.939.632,72	EPPST
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	3.471.870,84	3.946.251,07	EPPSD
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	2.774.513,70	2.987.774,77	EPPT
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	3.102.114,56	3.386.188,91	EPPSD
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	-	6.286.532,84	EPPT
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	-	5.754.538,21	EPPT
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	1.735.015,08	1.615.909,23	EPPSR
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	2.597.816,80	2.838.991,61	EPPT
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	3.054.640,29	2.984.281,51	EPPT
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	-	3.417.039,71	EPPSD
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	1.789.617,54	2.842.809,28	EPPT
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	4.125.936,24	4.817.477,43	EPPSD
37	Lampung	Kab. Way Kanan	-	1.977.539,04	EPPSR
38	Banten	Kab. Lebak	-	2.679.538,64	EPPT
39	Banten	Kab. Serang	3.264.695,14	3.425.393,95	EPPSD
40	Banten	Kab. Tangerang	-	4.060.669,56	EPPSD
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	16.346.027,79	18.422.454,88	EPPST
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	-	3.036.828,10	EPPT
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	3.020.024,70	3.265.432,46	EPPSD
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	2.507.632,04	2.782.721,75	EPPT
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1.956.436,45	2.175.816,26	EPPT
46	Jawa Barat	Kab. Garut	2.565.562,97	2.863.146,83	EPPT
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	7.544.833,83	8.836.496,79	EPPST
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	3.442.665,80	4.143.817,99	EPPSD
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	1.871.895,80	2.172.587,73	EPPT
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	5.704.981,12	6.374.628,18	EPPST
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	2.299.258,19	2.738.835,90	EPPT
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	2.439.711,30	2.730.491,43	EPPT
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	2.481.410,90	2.705.074,48	EPPT
54	Jawa Barat	Kab. Subang	3.916.236,02	3.511.485,40	EPPSD
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	3.988.885,55	4.323.476,64	EPPSD
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	2.230.489,88	2.544.710,61	EPPT

No.	Propinsi	Kabupaten	PDRB Perkapita		Intensitas
			1999	2000	
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	2.892.180,87	3.243.406,40	EPPSD
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	1.614.585,05	1.828.700,31	EPPSR
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	3.041.846,79	3.345.171,44	EPPSD
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	1.393.848,83	1.520.767,04	EPPSR
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	1.601.776,66	1.837.228,79	EPPSR
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	2.588.093,37	2.872.779,98	EPPR
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap 1)	8.365.732,99	9.397.528,86	EPPST
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	2.589.588,25	2.922.786,98	EPPR
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	3.026.210,28	3.285.867,87	EPPSD
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	2.416.473,88	2.628.412,21	EPPR
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	10.405.575,67	11.163.955,54	EPPST
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	1.628.218,04	1.801.778,35	EPPSR
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	2.597.778,78	2.892.842,92	EPPR
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	2.998.831,00	3.316.721,95	EPPSD
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	2.099.870,08	2.278.420,18	EPPR
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	2.737.582,73	3.001.358,33	EPPR
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	2.139.838,29	2.336.666,79	EPPR
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	1.995.665,22	2.286.163,01	EPPR
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	2.337.814,54	2.534.185,32	EPPR
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	2.585.257,81	3.242.109,23	EPPSD
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	1.436.045,20	1.587.610,94	EPPSR
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	2.284.374,28	2.547.203,32	EPPR
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	6.355.734,87	6.920.821,85	EPPST
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	1.860.494,84	1.726.980,24	EPPSR
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	8.469.500,29	9.390.959,15	EPPST
82	Jawa Timur	Kab. Jember	2.128.210,45	2.385.703,27	EPPR
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	2.526.612,97	2.856.415,87	EPPR
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	2.137.205,78	2.331.851,37	EPPR
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	1.810.168,51	2.012.849,84	EPPSR
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	3.177.752,31	3.254.677,15	EPPSD
87	Bali	Kab. Badung	8.936.956,45	9.856.992,62	EPPST
88	Bali	Kab. Bangli	3.589.047,32	3.934.904,67	EPPSD
89	Bali	Kab. Buleleng	3.105.078,55	3.483.670,44	EPPSD
90	Bali	Kab. Gianyar	4.985.924,85	5.575.472,14	EPPT
91	Bali	Kab. Jembrana	4.306.098,26	4.744.383,28	EPPSD
92	Bali	Kab. Tabanan	3.706.700,52	4.057.993,38	EPPSD
93	Bali	Kab. Karangasem	2.829.819,67	3.092.249,11	EPPSD
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	3.163.186,44	3.473.354,94	EPPSD
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	3.059.823,87	3.244.509,81	EPPSD
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	-	6.267.958,95	EPPT
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	-	3.823.182,19	EPPSD
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	3.367.584,17	3.717.308,21	EPPSD
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	5.256.500,24	5.792.881,57	EPPT
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	7.509.286,38	9.121.977,66	EPPST
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	3.569.751,14	3.983.510,44	EPPSD
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.072.214,68	3.602.911,07	EPPSD
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.402.350,03	2.619.732,30	EPPR
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	4.623.686,47	5.294.909,14	EPPT
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	7.043.374,12	8.213.066,82	EPPST
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	4.732.984,87	4.726.113,10	EPPSD
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	3.957.680,86	4.327.417,03	EPPSD
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	16.329.999,54	18.695.196,84	EPPST
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	-	42.964.897,30	EPPST
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	6.330.546,47	7.194.899,37	EPPST
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	-	6.578.534,64	EPPST
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	-	24.745.033,79	EPPST

No.	Propinsi	Kabupaten	PDRB Perkapita		Intensitas
			1999	2000	
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	-	4.640.802,39	EPPSD
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	4.075.803,96	4.231.477,48	EPPSD
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	2.672.360,09	3.061.258,72	EPPR
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	-	1.610.808,98	EPPSR
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	-	3.338.745,80	EPPSD
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	-	5.696.246,97	EPPT
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	22.457.529,92	24.735.973,81	EPPST
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	-	6.908.653,83	EPPST
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	-	3.922.586,17	EPPSD
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	2.040.822,45	2.423.045,42	EPPR
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	4.452.062,75	5.581.064,24	EPPT
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	-	2.287.818,96	EPPR
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	2.862.530,91	3.005.076,31	EPPR
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	3.847.799,45	4.785.812,30	EPPSD
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	3.603.046,59	4.204.544,34	EPPSD
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1.905.258,24	2.047.143,81	EPPR
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	2.089.957,40	2.511.937,19	EPPR
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	2.312.872,62	2.505.995,90	EPPR
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	2.909.507,79	3.051.300,42	EPPR
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	2.167.091,43	2.372.283,49	EPPR
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	2.020.791,32	2.237.540,54	EPPR
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	1.466.757,74	1.857.490,40	EPPSR
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	-	7.776.247,29	EPPST
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	3.017.614,99	3.294.484,12	EPPSD
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	2.460.413,76	2.648.031,58	EPPR
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	2.241.541,53	2.603.480,83	EPPR
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	2.022.361,88	2.359.097,76	EPPR
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	2.234.805,74	2.467.039,23	EPPR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	2.126.473,70	2.298.288,42	EPPR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	5.257.632,66	5.927.726,34	EPPT
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	15.911.699,15	17.278.686,66	EPPST
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1.528.289	1.667.391,31	EPPSR
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	-	1.604.329,06	EPPSR
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	1.099.203	1.200.102,11	EPPSR
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	1.200.406	1.308.034,46	EPPSR
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1.302.829	1.408.847,94	EPPSR
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1.094.078	1.223.977,21	EPPSR
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1.421.483	1.596.788,07	EPPSR
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	1.021.873	1.078.527,06	EPPSR
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	1.108.554,67	1.323.550,46	EPPSR
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	6.629.012,74	7.876.465,53	EPPST
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	6.448.781,09	8.217.540,64	EPPST
155	Papua	Kab. Jayawijaya	1.335.189,28	1.592.730,33	EPPSR
156	Papua	Kab. Mimika	-	2.050.000,00	EPPR

Catatan/Note :1) Tidak termasuk Minyak Bumi dan Gas/Excluding Oil and Gas

Keterangan :

EPP : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - PDRB Perkapita

Dibelakang **EPP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	4.125.138,8	
Stand. Dev	2.108.158,9	
Median	3.473.354,9	
EPPST	6.233.297,7	
EPPT	5.179.218,2	6.233.297,7
EPPSD	3.071.059,4	5.179.218,2
EPPR	3.071.059,4	2.016.979,9
EPPSR	2.016.979,9	

Lampiran 4.3.2.1.1.B Indikator PDRB Perkapita

No.	Propinsi	Kabupaten	PDRB Perkapita		Intensitas
			1999	2000	
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	3.167.328,50	3.898.328,27	EPPSD
2	Sumatera Utara	Kota Medan	5.245.532,45	6.243.836,32	EPPT
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	6.444.669,56	7.015.872,41	EPPST
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	5.096.207,83	5.880.761,33	EPPT
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	6.313.320,44	6.292.784,15	EPPT
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	4.837.854,55	5.831.603,63	EPPT
7	Sumatera Barat	Kota Padang	8.170.343,039	9.944.962,43	EPPST
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	8.499.590,944	9.417.793,50	EPPST
9	Riau	Kota Batam	8.096.190,932	15.026.326,44	EPPST
10	Riau	Kota Pekanbaru	3.634.946,245	5.470.006,85	EPPT
11	Riau	Kota Dumai	-	3.858.259,06	EPPSD
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	5.423.745,05	6.536.403,34	EPPST
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	-	4.713.491,17	EPPSD
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	3.461.501,83	3.920.043,75	EPPSD
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	5.231.505,19	6.491.944,12	EPPST
16	Banten	Kota Tangerang	-	10.903.584,07	EPPST
17	Banten	Kota Cilegon	-	9.374.307,00	EPPST
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	19.767.326,10	22.613.756,07	EPPST
19	Jawa Barat	Kota Bandung	6.228.926,06	6.733.921,91	EPPST
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	4.785.493,21	5.414.307,81	EPPT
21	Jawa Barat	Kota Bogor	3.350.477,81	3.593.391,38	EPPSD
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	12.811.605,13	13.916.151,62	EPPST
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	3.710.482,93	4.113.020,38	EPPSD
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	2.774.684,48	3.027.990,69	EPPR
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	7.782.800,78	8.805.002,74	EPPST
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	2.018.852,77	2.188.225,37	EPPR
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	4.785.512,89	5.531.956,92	EPPT
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	7.189.956,04	8.024.751,01	EPPST
29	Jawa Timur	Kota Kediri	41.879.290,94	48.922.514,31	EPPST
30	Jawa Timur	Kota Malang	9.455.943,42	7.914.313,40	EPPST
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	2.863.738,82	4.781.770,15	EPPSD
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	4.919.478,85	5.194.295,90	EPPT
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	11.471.674,78	14.031.725,12	EPPST
34	Jawa Timur	Kota Madiun	3.531.933,51	3.950.994,58	EPPSD
35	Bali	Kota Denpasar	5.925.999,54	6.500.274,69	EPPST
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	19.566.322,62	21.017.581,11	EPPST
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	9.964.508,83	11.136.830,62	EPPST
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	5.513.131,09	6.724.625,29	EPPST
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	4.571.798,27	5.021.300,97	EPPSD
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	-	2.278.060,50	EPPR
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	4.540.788,83	5.380.348,70	EPPT
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	2.792.857,11	3.691.850,95	EPPSD
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	8.704.162,59	9.635.054,01	EPPST
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2.366.207	2.590.793,25	EPPR

Catatan/Note :1) Tidak termasuk Minyak Bumi dan Gas/Excluding Oil and Gas

Keterangan :

EPP : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - PDRB Perkapita

Dibelakang **EPP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	4.125.138,8	
Stand. Dev	2.108.158,9	
Median	3.473.354,9	
EPPST	6.233.297,7	
EPPT	5.179.218,2	6.233.297,7
EPPSD	3.071.059,4	5.179.218,2
EPPR	3.071.059,4	2.016.979,9
EPPSR	2.016.979,9	

Lampiran 4.3.2.1.2.A Indikator Pertumbuhan PDRB

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kabupaten	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	SUMUT	Kab. Asahan	10,29	10,29	8,81	8,81	1,05	1,05	5,29	5,29	6,14	6,14	5,08	5,08	6,11	6,11	EPGST	EPGST
2	SUMUT	Kab. Dairi	10,85	10,85	6,61	6,61	2,45	2,45	0,30	0,30	7,58	7,58	5,47	5,47	5,54	5,54	EPGT	EPGST
3	SUMUT	Kab. Deli Serdang	6,55	6,55	9,49	9,49	(8,90)	(8,90)	3,98	3,98	5,29	5,29	3,84	3,84	3,38	3,38	EPGSD	EPGSD
4	SUMUT	Kab. Langkat	7,13	7,59	(7,31)	4,75	(1,22)	0,17	0,11	1,46	2,31	3,32	1,27	3,14	0,38	3,41	EPGSR	EPGSD
5	SUMUT	Kab. Simalungun	6,52	6,52	4,90	4,90	(2,76)	(2,76)	4,85	4,85	3,88	3,88	4,74	4,74	3,69	3,69	EPGSD	EPGSD
6	SUMUT	Kab. Tanah Karo	9,50	9,50	7,55	7,55	0,72	0,72	5,60	5,60	5,46	5,46	4,01	4,01	5,47	5,47	EPGT	EPGST
7	SUMUT	Kab. Labuhan Batu	12,28	12,28	9,96	9,96	1,20	1,20	4,94	4,94	6,00	6,00	5,12	5,12	6,58	6,58	EPGST	EPGST
8	SUMUT	Kab. Tapanuli Utara	(42,73)	(42,73)	5,80	5,80	(5,64)	(5,64)	2,43	2,43	3,62	3,62	4,33	4,33	(5,36)	(5,36)	EPGSR	EPGSR
9	SUMBAR	Kab. Pesisir Selatan	7,12	7,12	4,23	4,23	(4,81)	(4,81)	1,23	1,23	2,30	2,30	3,26	3,26	2,22	2,22	EPGSD	EPGR
10	SUMBAR	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	7,52	7,52	4,82	4,82	(3,38)	(3,38)	1,31	1,31	3,66	3,66	3,51	3,51	2,91	2,91	EPGSD	EPGSD
11	SUMBAR	Kab. Pasaman	7,29	7,29	4,28	4,28	(3,19)	(3,19)	1,50	1,50	3,03	3,03	3,43	3,43	2,72	2,72	EPGSD	EPGSD
12	SUMBAR	Kab. Solok	7,80	7,80	4,83	4,83	(3,74)	(3,74)	1,52	1,52	2,43	2,43	3,46	3,46	2,72	2,72	EPGSD	EPGSD
13	RIAU	Kab. Bengkalis	(6,99)	7,92	0,96	5,07	18,70	1,75	3,00	4,06	-94,08	-64,23	4,70	4,70	(12,29)	(6,79)	EPGSR	EPGSR
14	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	7,28	7,28	5,43	5,43	0,19	0,19	4,58	4,58	2,89	2,89	4,16	4,16	4,09	4,09	EPGSD	EPGSD
15	RIAU	Kab. Kampar	4,50	7,68	1,99	6,17	(34,98)	(2,05)	3,22	3,60	-85,35	-77,63	(19,59)	(27,84)	(21,70)	(15,01)	EPGSR	EPGSR
16	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5,43	5,43	5,43	5,43	EPGT	EPGST
17	RIAU	Kab. Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6,18	6,18	6,18	6,18	EPGST	EPGST
18	RIAU	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6,55	6,55	6,55	6,55	EPGST	EPGST
19	JAMBI	Kab. Batanghari	9,08	7,96	4,27	4,30	(6,44)	(5,97)	1,85	-	-47,84	-47,78	4,24	5,40	(5,81)	(7,22)	EPGSR	EPGSR
20	JAMBI	Kab. Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	EPGSD	EPGSD
21	JAMBI	Kab. Kerinci	8,20	8,20	3,02	3,02	(5,39)	(5,39)	3,03	3,03	3,23	3,23	3,79	3,79	2,65	2,65	EPGSD	EPGSD
22	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6,65	4,39	6,65	4,39	EPGST	EPGT
23	JAMBI	Kab. Tebo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3,17	3,17	3,17	3,17	EPGSD	EPGSD
24	SUMSEL	Kab. Muara Enim	8,21	10,68	2,87	4,67	(0,95)	(2,28)	3,19	2,82	-4,31	-13,34	1,72	2,82	1,79	0,89	EPGR	EPGSR
25	SUMSEL	Kab. Musi Banyuasin	7,27	8,71	1,76	3,96	(2,55)	(6,56)	3,91	1,84	-54,43	-57,34	3,19	2,93	(6,81)	(7,74)	EPGSR	EPGSR
26	SUMSEL	Kab. Musi Rawas	7,87	8,95	7,60	10,06	(6,60)	(9,53)	2,86	2,88	-22,96	-30,19	4,78	5,06	(1,08)	(2,13)	EPGSR	EPGSR
27	SUMSEL	Kab. Ogan Kemiling Ilir	10,10	10,10	5,08	5,08	(2,36)	(2,36)	(0,40)	(0,40)	3,38	3,38	4,13	3,90	3,32	3,28	EPGSD	EPGSD

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kabupaten	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
28	SUMSEL	Kab. Lahat	7,27	7,27	2,30	2,30	(1,20)	(1,20)	1,65	1,65	-22,40	-22,40	4,42	4,42	(1,33)	(1,33)	EPGSR	EPGSR
29	BABEL	Kab. Bangka	12,56	12,56	7,05	7,05	(5,55)	(5,55)	0,60	0,60	4,39	4,39	4,84	4,84	3,98	3,98	EPGSD	EPGSD
30	BABEL	Kab. Belitung	7,49	7,49	3,81	3,81	(3,92)	(3,92)	1,30	1,30	5,52	5,52	6,23	6,23	3,40	3,40	EPGSD	EPGSD
31	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	3,05	3,05	2,20	2,20	(2,19)	(2,19)	1,63	1,63	4,30	4,30	3,97	3,97	2,16	2,16	EPGR	EPGR
32	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	9,24	9,24	(1,49)	(1,49)	4,26	4,26	6,95	6,95	5,56	5,56	3,35	3,35	4,64	4,64	EPGSD	EPGT
33	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	5,52	5,52	2,05	2,05	(7,40)	(7,40)	3,41	3,41	3,84	3,84	3,63	3,63	1,84	1,84	EPGR	EPGR
34	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	2,75	2,75	29,02	18,62	3,43	3,73	11,73	8,37	EPGST	EPGST
35	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	6,23	6,23	2,14	2,14	(41,55)	(41,55)	0,12	0,12	6,00	6,00	3,36	3,36	(3,95)	(3,95)	EPGSR	EPGSR
36	JABAR	Kab. Bandung	10,53	10,53	4,93	4,93	(19,57)	(19,57)	2,97	2,97	5,25	5,28	4,94	4,93	1,51	1,51	EPGR	EPGSR
37	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-	-	1,89	1,89	-7,84	-7,84	3,74	3,74	(0,73)	(0,73)	EPGSR	EPGSR
38	BANTEN	Kab. Lebak	8,88	8,88	2,29	2,29	(9,90)	(9,90)	2,54	2,54	10,73	10,73	4,82	4,82	3,23	3,23	EPGSD	EPGSD
39	BANTEN	Kab. Serang	8,79	8,79	4,32	4,32	(14,42)	(14,42)	0,80	0,80	-47,15	-47,15	3,10	3,10	(7,43)	(7,43)	EPGSR	EPGSR
40	BANTEN	Kab. Tangerang	10,65	10,65	5,95	5,95	(9,26)	(9,26)	2,11	2,11	4,39	4,39	5,09	5,09	3,16	3,16	EPGSD	EPGSD
41	JABAR	Kab. Bekasi	5,07	5,07	6,93	6,93	(21,36)	(21,36)	1,76	1,76	68,86	68,86	4,16	4,13	10,90	10,90	EPGST	EPGST
42	JABAR	Kab. Bogor	11,70	11,70	4,77	4,77	(20,72)	(20,72)	1,59	1,59	-21,07	-21,07	3,61	3,61	(3,35)	(3,35)	EPGSR	EPGSR
43	JABAR	Kab. Ciamis	6,99	6,99	3,67	3,67	(6,55)	(6,55)	1,98	1,98	3,40	3,40	3,60	3,60	2,18	2,18	EPGR	EPGR
44	JABAR	Kab. Cianjur	6,79	6,79	3,69	3,69	(8,83)	(8,83)	2,37	2,37	2,65	2,65	3,49	3,49	1,69	1,69	EPGR	EPGR
45	JABAR	Kab. Cirebon	7,40	7,40	3,37	3,37	(20,77)	(20,77)	3,61	3,61	5,05	5,05	4,88	4,88	0,59	0,59	EPGSR	EPGSR
46	JABAR	Kab. Garut	6,81	6,81	3,03	3,03	(11,64)	(11,64)	2,52	2,52	3,89	3,89	3,42	3,42	1,34	1,34	EPGR	EPGSR
47	JABAR	Kab. Indramayu	31,35	6,95	(6,65)	1,94	(5,43)	(10,49)	(9,79)	-	-0,53	58,57	0,68	0,03	1,60	11,40	EPGR	EPGST
48	JABAR	Kab. Karawang	9,11	9,11	4,52	4,52	(19,79)	(19,79)	5,62	5,62	12,76	12,76	10,84	7,13	3,84	3,23	EPGSD	EPGSD
49	JABAR	Kab. Kuningan	7,01	7,01	3,46	3,46	(5,66)	(5,66)	1,27	1,27	2,80	2,80	3,20	3,20	2,01	2,01	EPGR	EPGR
50	JABAR	Kab. Purwakarta	7,70	7,70	2,09	2,09	(11,69)	(11,69)	1,98	1,98	116,56	116,56	3,64	3,64	20,05	20,05	EPGST	EPGST
51	JABAR	Kab. Sukabumi	8,67	8,67	3,20	3,20	(10,82)	(10,82)	1,64	1,64	12,49	12,51	6,41	6,44	3,60	3,61	EPGSD	EPGSD
52	JABAR	Kab. Sumedang	7,52	7,52	2,88	2,88	(11,79)	(11,79)	2,39	2,39	3,90	3,90	3,32	3,32	1,37	1,37	EPGR	EPGSR
53	JABAR	Kab. Tasikmalaya	7,64	7,64	3,62	3,62	(13,21)	(13,21)	2,27	2,27	11,38	11,38	3,37	3,37	2,51	2,51	EPGSD	EPGR
54	JABAR	Kab. Subang	7,39	7,39	3,28	3,28	(7,17)	(7,17)	2,28	2,28	9,74	4,11	3,90	4,47	3,24	2,39	EPGSD	EPGR
55	JATENG	Kab. Kendal	6,40	6,40	4,32	4,32	(9,30)	(9,30)	2,17	2,17	2,00	2,00	2,86	2,86	1,41	1,41	EPGR	EPGSR

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kabupaten	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
56	JATENG	Kab. Magelang	6,53	6,53	1,17	1,17	(3,14)	(3,14)	1,64	1,64	3,50	3,50	3,91	3,91	2,27	2,27	EPGSD	EPGR
57	JATENG	Kab. Pekalongan	6,84	6,84	3,88	3,88	(8,66)	(8,66)	3,51	3,51	2,52	2,52	4,32	4,32	2,07	2,07	EPGR	EPGR
58	JATENG	Kab. Pemalang	6,98	6,98	4,74	4,74	(1,63)	(1,63)	1,59	1,59	3,71	3,71	3,24	3,24	3,10	3,10	EPGSD	EPGSD
59	JATENG	Kab. Sukoharjo	9,50	9,50	2,78	2,78	(11,23)	(11,23)	1,25	1,25	3,52	3,52	4,05	4,05	1,65	1,65	EPGR	EPGSR
60	JATENG	Kab. Tegal	6,54	6,54	5,45	5,45	(9,02)	(9,02)	2,53	2,53	4,90	4,90	4,65	4,65	2,51	2,51	EPGSD	EPGR
61	JATENG	Kab. Banyumas	4,63	4,63	3,61	3,61	(6,80)	(6,80)	0,53	0,53	4,03	4,03	1,13	1,13	1,19	1,19	EPGR	EPGSR
62	JATENG	Kab. Boyolali	6,55	6,55	2,02	2,02	(9,51)	(9,51)	1,18	1,18	2,06	2,06	3,63	3,63	0,99	0,99	EPGR	EPGSR
63	JATENG	Kab. Cilacap	12,30	22,95	2,13	2,91	14,79	9,42	26,59	-	-23,84	6,92	4,98	4,98	6,16	9,43	EPGST	EPGST
64	JATENG	Kab. Jepara	7,31	7,31	4,31	4,31	0,03	0,03	0,65	0,65	4,63	4,63	4,92	4,92	3,64	3,64	EPGSD	EPGSD
65	JATENG	Kab. Karanganyar	7,97	7,97	3,77	3,77	(11,29)	(11,29)	2,48	2,48	4,51	4,51	1,42	1,42	1,48	1,48	EPGR	EPGSR
66	JATENG	Kab. Klaten	7,12	7,12	2,68	2,68	(11,35)	(11,35)	0,49	0,49	3,98	3,98	4,02	4,02	1,16	1,16	EPGR	EPGSR
67	JATENG	Kab. Kudus	7,57	7,57	(0,37)	(0,37)	(11,79)	(11,79)	0,79	0,79	1,89	1,89	3,18	3,18	0,21	0,21	EPGSR	EPGSR
68	JATENG	Kab. Kebumen	6,23	6,23	2,75	2,75	(13,03)	(13,03)	3,62	3,62	0,31	0,31	1,78	1,78	0,28	0,28	EPGSR	EPGSR
69	D I YOGYA	Kab. Bantul	6,74	6,74	3,02	3,02	(9,42)	(9,42)	1,36	1,36	3,22	3,22	3,10	3,10	1,34	1,34	EPGR	EPGSR
70	DI. YOGYA	Kab. Gunung Kidul	7,15	7,15	3,88	3,88	(7,17)	(7,17)	1,57	1,57	13,32	13,32	2,19	2,19	3,49	3,49	EPGSD	EPGSD
71	JATIM	Kab. Bangkalan	6,46	6,46	4,59	4,59	(0,17)	(0,17)	3,02	3,02	3,24	3,24	3,70	3,70	3,47	3,47	EPGSD	EPGSD
72	JATIM	Kab. Banyuwangi	5,99	5,99	6,49	6,49	(6,11)	(6,11)	1,72	1,72	6,58	6,58	4,69	4,69	3,23	3,23	EPGSD	EPGSD
73	JATIM	Kab. Blitar	6,31	6,31	4,17	4,17	(0,04)	(0,04)	2,09	2,09	1,79	1,79	2,41	2,41	2,79	2,79	EPGSD	EPGSD
74	JATIM	Kab. Kediri	6,89	6,89	4,58	4,58	(0,39)	(0,39)	0,92	0,92	3,96	3,96	2,58	2,58	3,09	3,09	EPGSD	EPGSD
75	JATIM	Kab. Magetan	6,11	6,11	4,43	4,43	(7,89)	(7,89)	1,80	1,80	2,34	2,34	2,71	2,71	1,58	1,58	EPGR	EPGSR
76	JATIM	Kab. Mojokerto	7,18	7,18	4,98	4,98	(8,07)	(8,07)	1,17	1,17	2,96	2,96	3,47	3,47	1,95	1,95	EPGR	EPGR
77	JATIM	Kab. Pamekasan	6,55	6,55	4,15	4,15	(5,21)	(5,21)	(6,31)	(6,31)	1,43	1,43	1,59	1,59	0,37	0,37	EPGSR	EPGSR
78	JATIM	Kab. Pasuruan	7,21	7,21	5,48	5,48	(13,68)	(13,68)	5,77	5,77	-0,41	-0,41	3,91	3,91	1,38	1,38	EPGR	EPGSR
79	JATIM	Kab. Sidoarjo	8,97	8,97	5,02	5,02	(15,92)	(15,92)	1,72	1,72	3,07	3,07	3,66	3,66	1,09	1,09	EPGR	EPGSR
80	JATIM	Kab. Bondowoso	6,99	6,99	5,18	5,18	(4,93)	(4,93)	1,34	1,34	2,13	2,13	1,74	1,74	2,07	2,07	EPGR	EPGR
81	JATIM	Kab. Gresik	10,85	10,85	6,92	6,92	(11,56)	(11,56)	2,02	2,02	3,04	3,04	4,64	4,64	2,65	2,65	EPGSD	EPGSD
82	JATIM	Kab. Jember	10,37	10,37	4,54	4,54	(7,58)	(7,58)	1,89	1,89	3,33	3,33	3,49	3,49	2,67	2,67	EPGSD	EPGSD
83	JATIM	Kab. Jombang	5,89	5,89	3,36	3,36	(13,34)	(13,34)	0,13	0,13	4,27	4,27	2,64	2,64	0,49	0,49	EPGSR	EPGSR

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kabupaten	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
84	JATIM	Kab. Lamongan	6,76	6,76	4,64	4,64	(5,10)	(5,10)	2,15	2,15	2,27	2,27	2,87	2,87	2,27	2,27	EPGSD	EPGR
85	JATIM	Kab. Ponorogo	6,76	6,76	4,13	4,13	(7,36)	(7,36)	1,18	1,18	2,05	2,05	2,77	2,77	1,59	1,59	EPGR	EPGSR
86	JATIM	Kab. Tulungagung	11,82	11,82	4,82	4,82	(6,71)	(6,71)	4,05	4,05	2,50	2,50	4,50	4,50	3,50	3,50	EPGSD	EPGSD
87	BALI	Kab. Badung	9,10	9,10	6,50	6,50	(4,96)	(4,96)	0,57	0,57	4,91	4,91	5,30	5,30	3,57	3,57	EPGSD	EPGSD
88	BALI	Kab. Bangli	7,16	7,16	4,19	4,19	(2,46)	(2,46)	0,46	0,46	2,43	2,43	3,27	3,27	2,51	2,51	EPGSD	EPGR
89	BALI	Kab. Buleleng	7,57	7,57	5,62	5,62	(2,98)	(2,98)	1,08	1,08	3,54	3,54	3,72	3,72	3,09	3,09	EPGSD	EPGSD
90	BALI	Kab. Gianyar	8,24	8,24	6,03	6,03	(2,62)	(2,62)	1,76	1,76	4,70	4,70	4,51	4,51	3,77	3,77	EPGSD	EPGSD
91	BALI	Kab. Jembrana	7,76	7,76	5,01	5,01	(3,77)	(3,77)	0,90	0,90	3,48	3,48	3,36	3,36	2,79	2,79	EPGSD	EPGSD
92	BALI	Kab. Tabanan	7,25	7,25	4,92	4,92	(3,96)	(3,96)	0,58	0,58	2,49	2,49	3,30	3,30	2,43	2,43	EPGSD	EPGR
93	BALI	Kab. Karangasem	7,13	7,13	4,76	4,76	(2,70)	(2,70)	0,71	0,71	2,47	2,47	2,83	2,83	2,53	2,53	EPGSD	EPGR
94	KALBAR	Kab. Kapuas Hulu	8,84	8,84	6,08	6,08	1,33	1,33	2,77	2,77	3,60	3,60	2,94	2,94	4,26	4,26	EPGSD	EPGSD
95	KALBAR	Kab. Ketapang	10,15	10,15	7,44	7,44	(2,89)	(2,89)	2,53	2,53	2,70	2,70	1,79	1,79	3,62	3,62	EPGSD	EPGSD
96	KALBAR	Kab. Pontianak	10,82	10,82	6,33	6,33	(7,42)	(7,42)	0,95	0,95	1,15	1,15	0,82	0,82	2,11	2,11	EPGR	EPGR
97	KALBAR	Kab. Sambas	8,15	8,15	3,93	3,93	3,07	3,07	3,87	3,87	1,38	1,38	4,36	4,36	4,13	4,13	EPGSD	EPGSD
98	KALBAR	Kab. Sanggau	13,93	13,93	10,79	10,79	1,33	1,33	6,14	6,14	6,96	6,96	2,22	2,22	6,89	6,89	EPGST	EPGST
99	KALTENG	Kab. Barito Selatan	9,41	9,41	7,02	7,02	(4,94)	(4,94)	0,97	0,97	1,78	1,78	2,48	2,48	2,79	2,79	EPGSD	EPGSD
100	KALTENG	Kab. Barito Utara	16,80	16,80	7,79	7,79	(6,08)	(6,08)	(5,31)	(5,31)	6,13	6,13	1,24	1,24	3,43	3,43	EPGSD	EPGSD
101	KALTENG	Kab. Kapuas	10,30	10,30	6,17	6,17	(6,45)	(6,45)	(0,55)	(0,55)	1,81	1,81	4,84	4,84	2,69	2,69	EPGSD	EPGSD
102	KALSEL	Kab. Hulu Sungai Selatan	6,48	6,48	3,26	3,26	(4,67)	(4,67)	2,25	2,25	5,64	5,64	3,95	3,95	2,82	2,82	EPGSD	EPGSD
103	KALSEL	Kab. Hulu Sungai Tengah	7,62	7,62	1,64	1,64	(18,06)	(18,06)	0,72	0,72	18,21	18,21	(2,14)	(2,14)	1,33	1,33	EPGR	EPGSR
104	KALSEL	Kab. Hulu Sungai Utara	19,88	20,04	1,30	0,84	(6,45)	(7,41)	2,14	-	-2,17	-2,21	15,53	16,34	5,04	5,52	EPGT	EPGST
105	KALSEL	Kab. Tabalong	13,73	15,17	14,55	9,79	28,91	15,71	13,79	-	7,26	9,26	2,00	5,66	13,37	11,12	EPGST	EPGST
106	KALSEL	Kab. Tanah Laut	8,83	8,83	0,56	0,56	(13,84)	(13,84)	4,31	4,31	6,71	6,71	4,32	4,32	1,81	1,81	EPGR	EPGR
107	KALSEL	Kab. Tapin	8,19	8,19	3,87	3,87	(1,85)	(1,85)	0,17	0,17	26,86	26,86	(11,02)	(11,02)	4,37	4,37	EPGSD	EPGSD
108	KALTIM	Kab. Berau	13,09	13,09	(0,65)	(0,65)	16,76	16,76	6,93	6,93	33,89	12,62	(11,08)	5,72	9,82	9,08	EPGST	EPGST
109	KALTIM	Kab. Kutai	13,34	16,14	3,68	5,06	(1,37)	(4,56)	7,48	-	-47,28	-59,99	5,33	13,22	(3,14)	(6,02)	EPGSR	EPGSR
110	KALTIM	Kab. Pasir	9,73	9,73	5,53	5,53	0,72	0,72	3,54	3,54	33,29	4,22	(17,68)	5,29	5,86	4,84	EPGT	EPGT
111	KALTIM	Kab. Bulungan	8,75	9,07	5,82	7,33	0,91	0,92	5,07	-	-44,83	-49,58	19,39	28,53	(0,82)	(0,75)	EPGSR	EPGSR

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kabupaten	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
112	KALTIM	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	11,88	14,10	11,88	14,10	EPGST	EPGST
113	KALTIM	Kab. Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	36,41	27,35	36,41	27,35	EPGST	EPGST
114	SULUT	Kab. Minahasa	14,98	14,98	6,08	6,08	2,12	2,12	6,63	6,63	7,18	7,18	4,04	4,04	6,84	6,84	EPGST	EPGST
115	SULUT	Kab. Sangihe	10,44	10,44	4,06	4,06	2,43	2,43	3,81	3,81	4,61	4,61	5,72	5,72	5,18	5,18	EPGT	EPGT
116	GORONTALO	Kab. Gorontalo	9,85	9,85	4,62	4,62	(2,44)	(2,44)	3,06	3,06	-34,48	-34,48	5,86	5,86	(2,26)	(2,26)	EPGSR	EPGSR
117	SULTENG	Kab. Banggai	7,80	7,80	182,04	182,04	(4,43)	(4,43)	3,26	3,26	3,53	3,53	5,06	5,06	32,88	32,88	EPGST	EPGST
118	SULTENG	Kab. Toli-Toli	-	-	25,53	25,53	(4,63)	(4,63)	2,91	2,91	12,74	12,74	5,95	5,95	8,50	8,50	EPGST	EPGST
119	SULTENG	Kab. Donggala	8,07	8,07	4,45	4,45	(3,29)	(3,29)	3,42	3,42	4,84	4,84	6,40	6,40	3,98	3,98	EPGSD	EPGSD
120	SULTENG	Kab. Morowali	-	-	8,89	8,89	0,66	0,66	4,76	4,76	3,90	3,90	-	-	4,55	4,55	EPGSD	EPGT
121	SULTENG	Kab. Poso	8,42	8,42	5,15	5,15	(3,40)	(3,40)	2,12	2,12	-4,78	-4,78	-	-	1,50	1,50	EPGR	EPGSR
122	SULTRA	Kab. Buton	5,17	5,17	2,91	2,91	(9,66)	(9,66)	3,20	3,20	5,05	5,05	5,34	5,34	2,00	2,00	EPGR	EPGR
123	SULTRA	Kab. Kolaka	2,23	2,23	6,36	6,36	(1,05)	(1,05)	(0,93)	(0,93)	6,59	6,59	4,95	4,95	3,02	3,02	EPGSD	EPGSD
124	SULSEL	Kab. Luwu	9,34	9,34	2,01	2,01	(4,13)	(4,13)	(64,69)	(64,69)	11,44	11,44	15,93	15,93	(5,02)	(5,02)	EPGSR	EPGSR
125	SULSEL	Kab. Majene	10,81	10,81	4,66	4,66	(6,78)	(6,78)	4,10	4,10	2,02	2,02	3,60	3,60	3,07	3,07	EPGSD	EPGSD
126	SULSEL	Kab. Pangkep	6,39	6,39	11,86	11,86	(6,71)	(6,71)	5,86	5,86	5,03	5,03	4,67	4,67	4,52	4,52	EPGSD	EPGT
127	SULSEL	Kab. Pinrang	6,99	6,99	2,68	2,68	(3,54)	(3,54)	0,97	0,97	4,54	4,54	4,99	4,99	2,77	2,77	EPGSD	EPGSD
128	SULSEL	Kab. Tana Toraja	9,12	9,12	4,68	4,68	(3,38)	(3,38)	1,04	1,04	2,53	2,53	4,02	4,02	3,00	3,00	EPGSD	EPGSD
129	SULSEL	Kab. Bantaeng	8,97	8,97	2,32	2,32	1,95	1,95	3,30	3,30	5,26	5,26	2,23	2,23	4,00	4,00	EPGSD	EPGSD
130	SULSEL	Kab. Barru	6,00	6,00	5,09	5,09	(5,97)	(5,97)	5,59	5,59	-0,39	-0,39	4,58	4,58	2,48	2,48	EPGSD	EPGR
131	SULSEL	Kab. Bone	6,09	6,09	2,30	2,30	(5,98)	(5,98)	2,02	2,02	2,67	2,67	3,36	3,36	1,74	1,74	EPGR	EPGR
132	SULSEL	Kab. Enrekang	6,49	6,49	4,27	4,27	(2,91)	(2,91)	4,78	4,78	3,61	3,61	4,67	4,67	3,48	3,48	EPGSD	EPGSD
133	SULSEL	Kab. Gowa	7,07	7,07	6,39	6,39	(3,04)	(3,04)	3,76	3,76	4,27	4,27	4,49	4,49	3,82	3,82	EPGSD	EPGSD
134	SULSEL	Kab. Jeneponto	12,88	12,88	7,02	7,02	(6,19)	(6,19)	3,13	3,13	3,63	3,63	2,96	2,96	3,91	3,91	EPGSD	EPGSD
135	SULSEL	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-	-	-	16,13	16,13	4,87	4,87	4,76	4,76	8,59	8,59	EPGST	EPGST
136	SULSEL	Kab. Maros	6,25	6,25	4,97	4,97	(6,37)	(6,37)	3,69	3,69	68,26	68,26	16,57	16,57	15,56	15,56	EPGST	EPGST
137	SULSEL	Kab. Selayar	11,48	11,48	5,59	5,59	(2,14)	(2,14)	1,38	1,38	3,13	3,13	2,55	2,55	3,66	3,66	EPGSD	EPGSD
138	SULSEL	Kab. Sinjai	7,22	7,22	3,20	3,20	(4,91)	(4,91)	3,16	3,16	2,32	2,32	4,15	4,15	2,52	2,52	EPGSD	EPGR
139	SULSEL	Kab. Takalar	7,03	7,03	6,51	6,51	(5,15)	(5,15)	3,11	3,11	4,07	4,07	4,12	4,12	3,28	3,28	EPGSD	EPGSD

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kabupaten	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
140	NTB	Kab. Bima	7,52	7,52	4,56	4,56	(2,44)	(2,44)	3,01	3,01	-14,84	-14,84	4,73	4,73	0,42	0,42	EPGSR	EPGSR
141	NTB	Kab. Lombok Barat	7,23	7,23	5,17	5,17	(5,63)	(5,63)	1,61	1,61	-13,89	-13,89	4,72	4,72	(0,13)	(0,13)	EPGSR	EPGSR
142	NTB	Kab. Dompu	7,83	7,83	5,34	5,34	1,08	1,08	7,34	7,34	-13,81	-13,81	5,57	5,57	2,23	2,23	EPGSD	EPGR
143	NTB	Kab. Lombok Timur	8,17	8,17	5,52	5,52	(2,81)	(2,81)	2,33	2,33	-17,71	-17,71	2,54	2,54	(0,33)	(0,33)	EPGSR	EPGSR
144	NTT	Kab. Ende	7,30	7,30	6,25	6,25	(10,24)	(10,24)	5,75	5,75	4,85	4,85	5,24	5,24	3,19	3,19	EPGSD	EPGSD
145	NTT	Kab. Flores Timur	8,44	8,44	3,15	3,15	(7,02)	(7,02)	12,16	12,16	-17,07	-17,07	5,88	5,88	0,92	0,92	EPGR	EPGSR
146	NTT	Kab. Timur Tengah Selatan	3,83	3,83	10,17	10,17	(8,93)	(8,93)	8,72	8,72	4,65	4,65	5,44	5,44	3,98	3,98	EPGSD	EPGSD
147	NTT	Kab. Timur Tengah Utara	7,04	7,04	7,25	7,25	2,67	2,67	(2,72)	(2,72)	3,74	3,74	4,65	4,65	3,77	3,77	EPGSD	EPGSD
148	NTT	Kab. Belu	7,64	7,64	8,92	8,92	(5,64)	(5,64)	4,23	4,23	2,98	2,98	4,29	4,29	3,74	3,74	EPGSD	EPGSD
149	NTT	Kab. Manggarai	6,70	6,70	5,45	5,45	(3,33)	(3,33)	1,84	1,84	3,90	3,90	4,78	4,78	3,22	3,22	EPGSD	EPGSD
150	NTT	Kab. Ngada	4,70	4,70	6,72	6,72	(2,96)	(2,96)	6,00	6,00	5,04	5,04	6,00	6,00	4,25	4,25	EPGSD	EPGSD
151	NTT	Kab. Sumba Barat	4,99	4,99	2,73	2,73	(0,42)	(0,42)	0,42	0,42	3,01	3,01	4,46	4,46	2,53	2,53	EPGSD	EPGR
152	IRJA BARAT	Kab. Fak-Fak	18,24	18,24	3,98	3,98	35,27	35,27	(1,36)	(1,36)	-96,42	-96,42	2,52	2,52	(6,30)	(6,30)	EPGSR	EPGSR
153	IRJA BARAT	Kab. Manokwari	7,98	7,98	6,13	6,13	(10,70)	(10,70)	(1,03)	(1,03)	6,72	6,72	3,33	3,33	2,07	2,07	EPGR	EPGR
154	IRJA BARAT	Kab. Sorong	3,49	7,86	24,11	33,53	3,18	1,05	(25,28)	(23,18)	-28,73	-37,98	0,57	3,57	(3,78)	(2,52)	EPGSR	EPGSR
155	PAPUA	Kab. Jayawijaya	8,31	8,31	4,79	4,79	(1,81)	(1,81)	4,50	4,50	8,52	8,52	7,34	7,34	5,28	5,28	EPGT	EPGT
156	PAPUA	Kab. Mimika	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	(6,20)	(6,20)	(6,20)	(6,20)	EPGSR	EPGSR

Keterangan :

EPG : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - Growth/Pertumbuhan Ekonomi

Dibelakang EPG - ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Keterangan	Dengan Migas		Tanpa Migas	
Rata-rata	3,44		3,49	
Stand. Dev	2,59		1,79	
Interval Intensitas				
EPGST	6,03		5,28	
EPGT	4,73	6,03	4,38	5,28
EPGSD	2,14	4,73	2,59	4,38
EPGR	2,14	0,85	2,59	1,69
EPGSR	0,85		1,69	

Lampiran 4.3.2.1.2.B Indikator Pertumbuhan PDRB

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kota	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	SUMUT	Kota Binjai	9,82	9,82	2,59	2,59	(12,76)	(12,76)	4,44	4,44	6,80	6,80	5,56	5,56	2,74	2,74	EGPSD	EGPSD
2	SUMUT	Kota Medan	9,75	9,75	7,73	7,73	(18,11)	(18,11)	3,43	3,43	5,49	5,49	5,42	5,42	2,28	2,28	EGPSD	EGPR
3	SUMUT	Kota Pematang Siantar	5,22	5,22	6,15	6,15	(4,71)	(4,71)	4,26	4,26	4,72	4,72	6,62	6,62	3,71	3,71	EGPSD	EGPSD
4	SUMUT	Kota Sibolga	18,30	18,30	5,96	5,96	(8,37)	(8,37)	5,19	5,19	5,26	5,26	6,02	6,02	5,39	5,39	EGPT	EGPST
5	SUMUT	Kota Tanjung Balai	9,76	9,76	7,52	7,52	(7,45)	(7,45)	2,57	2,57	4,47	4,47	5,58	5,58	3,74	3,74	EGPSD	EGPSD
6	SUMUT	Kota Tebing Tinggi	7,02	7,02	3,86	3,86	(15,54)	(15,54)	3,12	3,12	2,93	2,93	3,47	3,47	0,81	0,81	EGPSR	EGPSR
7	SUMBAR	Kota Padang	9,12	9,12	6,48	6,48	(7,70)	(7,70)	1,71	1,71	4,18	4,18	4,20	4,20	3,00	3,00	EGPSD	EGPSD
8	SUMBAR	Kota Sawahlunto	(4,93)	(4,93)	2,06	2,06	(4,36)	(4,36)	(5,91)	(5,91)	-6,12	-6,12	(2,49)	(2,49)	(3,63)	(3,63)	EGPSR	EGPSR
9	RIAU	Kota Batam	16,85	16,85	14,76	14,76	3,08	3,08	6,38	6,38	7,72	7,72	6,56	6,56	9,22	9,22	EGPST	EGPST
10	RIAU	Kota Pekanbaru	9,56	9,56	13,32	13,32	(2,48)	(2,48)	(1,65)	(1,65)	16,51	16,51	3,42	3,42	6,45	6,45	EGPST	EGPST
11	RIAU	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4,96	4,96	4,96	4,96	EGPT	EGPT
12	SUMSEL	Kota Palembang	8,44	8,99	5,41	6,46	(11,43)	(12,51)	4,54	2,97	5,32	17,86	4,87	4,87	2,86	4,77	EGPSD	EGPT
13	BABEL	Kota Pangkal Pinang	8,03	8,03	7,54	7,54	(2,54)	(2,54)	1,64	1,64	8,71	8,71	5,36	5,36	4,79	4,79	EGPT	EGPT
14	BENGKULU	Kota Bengkulu	8,12	8,12	4,85	4,85	(3,36)	(3,36)	3,97	3,97	5,54	5,54	5,88	5,88	4,17	4,17	EGPSD	EGPSD
15	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	9,26	9,26	8,49	8,49	(15,10)	(15,10)	3,02	3,02	3,65	3,65	3,13	3,13	2,07	2,07	EGPR	EGPR
16	BANTEN	Kota Tangerang	17,59	17,59	11,06	11,06	(16,76)	(16,76)	2,62	2,62	3,95	3,95	4,34	4,34	3,80	3,80	EGPSD	EGPSD
17	BANTEN	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	8,76	8,76	8,76	8,76	EGPST	EGPST
18	DKI JAKARTA	Kota DKI Jakarta	9,10		5,11		(17,49)		(0,29)		3,99		3,64		0,68		EGPSR	
19	JABAR	Kota Bandung	9,31	9,31	4,47	4,47	(19,69)	(19,69)	2,80	2,80	5,41	5,41	7,34	7,34	1,61	1,61	EGPR	EGPSR
20	JABAR	Kota Bekasi	-	-	5,70	5,70	(20,66)	(20,66)	2,63	2,63	6,95	6,95	5,26	5,26	(0,02)	(0,02)	EGPSR	EGPSR
21	JABAR	Kota Bogor	11,20	11,20	5,09	5,09	(16,65)	(16,65)	3,28	3,28	21,16	21,16	5,61	5,61	4,95	4,95	EGPT	EGPT
22	JABAR	Kota Cirebon	61,66	61,66	6,64	6,64	(5,36)	(5,36)	2,29	2,29	9,12	9,12	4,31	4,31	13,11	13,11	EGPST	EGPST
23	JABAR	Kota Sukabumi	7,27	7,27	3,86	3,86	(17,15)	(17,15)	3,20	3,20	4,82	4,82	5,02	5,02	1,17	1,17	EGPR	EGPSR
24	JATENG	Kota Pekalongan	7,59	7,59	3,32	3,32	(8,13)	(8,13)	3,96	3,96	3,99	3,99	4,30	4,30	2,51	2,51	EGPSD	EGPR
25	JATENG	Kota Semarang	12,77	12,77	9,73	9,73	(18,23)	(18,23)	3,41	3,41	4,97	4,97	5,11	5,11	2,96	2,96	EGPSD	EGPSD
26	JATENG	Kota Tegal	8,28	8,28	3,59	3,59	(6,12)	(6,12)	3,73	3,73	5,11	5,11	5,22	5,22	3,30	3,30	EGPSD	EGPSD

Tahun			Growth 1996		Growth 1997		Growth 1998		Growth 1999		Growth 2000		Growth 2001		Rata-Rata 1996 s/d 2001		Intensitas	
No.	Propinsi	Kota	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
27	JATENG	Kota Surakarta	9,18	9,18	4,22	4,22	(13,93)	(13,93)	1,44	1,44	4,15	4,15	3,93	3,93	1,50	1,50	EGPR	EGPSR
28	DI YOGYA	Kota Jogjakarta	9,11	9,11	4,76	4,76	(11,11)	(11,11)	1,03	1,03	3,60	3,60	3,07	3,07	1,74	1,74	EGPR	EGPR
29	JATIM	Kota Kediri	13,19	13,19	11,81	11,81	(2,49)	(2,49)	1,45	1,45	5,76	5,76	6,01	6,01	5,95	5,95	EGPT	EGPST
30	JATIM	Kota Malang	8,72	8,72	4,96	4,96	(8,78)	(8,78)	1,54	1,54	2,96	2,96	2,30	2,30	1,95	1,95	EGPR	EGPR
31	JATIM	Kota Mojokerto	7,38	7,38	3,34	3,34	(4,50)	(4,50)	1,28	1,28	8,41	8,41	2,34	2,34	3,04	3,04	EGPSD	EGPSD
32	JATIM	Kota Probolinggo	7,20	7,20	3,03	3,03	(7,08)	(7,08)	3,83	3,83	1,27	1,27	1,96	1,96	1,70	1,70	EGPR	EGPR
33	JATIM	Kota Surabaya	10,50	10,50	6,71	6,71	(1,88)	(1,88)	(15,25)	(15,25)	-11,25	-11,25	4,42	4,42	(1,13)	(1,13)	EGPSR	EGPSR
34	JATIM	Kota Madiun	7,73	7,73	6,45	6,45	(5,59)	(5,59)	1,10	1,10	2,67	2,67	3,55	3,55	2,65	2,65	EGPSD	EGPSD
35	BALI	Kota Denpasar	9,15	9,15	6,48	6,48	(5,23)	(5,23)	1,44	1,44	3,15	3,15	3,94	3,94	3,15	3,15	EGPSD	EGPSD
36	KALTIM	Kota Balikpapan	13,12	12,99	2,44	8,25	(0,63)	(1,13)	0,21		3,63	101,78	8,73	7,90	4,58	25,96	EGPSD	EGPST
37	KALTIM	Kota Samarinda	7,39	7,39	5,59	5,59	0,57	0,57	4,71	4,71	6,13	5,32	5,77	6,58	5,03	5,03	EGPT	EGPT
38	SULUT	Kota Bitung	13,77	13,77	7,05	7,05	3,22	3,22	6,64	6,64	44,38	44,38	5,55	5,55	13,44	13,44	EGPST	EGPST
39	SULUT	Kota Manado	10,74	10,74	2,67	2,67	0,32	0,32	1,62	1,62	5,97	5,97	4,57	4,57	4,31	4,31	EGPSD	EGPSD
40	GORONTALO	Kota Gorontalo	9,89	9,89	5,37	5,37	2,71	2,71	4,27	4,27	5,61	5,61	5,94	5,94	5,63	5,63	EGPT	EGPST
41	SULTRA	Kota Kendari	14,14	14,14	12,95	12,95	(1,50)	(1,50)	(1,82)	(1,82)	7,91	7,91	7,84	7,84	6,59	6,59	EGPST	EGPST
42	SULSEL	Kota Pare-Pare	10,78	10,78	7,74	7,74	(8,54)	(8,54)	4,17	4,17	5,60	5,60	6,05	6,05	4,30	4,30	EGPSD	EGPSD
43	N T B	Kota Mataram	10,82	10,82	7,56	7,56	(2,60)	(2,60)	1,29	1,29	-16,81	-16,81	6,59	6,59	1,14	1,14	EGPR	EGPSR
44	N T T	Kota Kupang	-	-	4,27	4,27	(8,51)	(8,51)	5,95	5,95	4,71	4,71	-	-	1,61	1,61	EGPR	EGPSR

Keterangan :

EPG : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - Growth/Pertumbuhan Ekonomi

Dibelakang EPG - ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Keterangan	Dengan Migas		Tanpa Migas	
Rata-rata	3,44		3,49	
Stand.Dev	2,59		1,79	
Interval Intensitas				
EPGST	6,03		5,28	
EPGT	4,73	6,03	4,38	5,28
EPGSD	2,14	4,73	2,59	4,38
EPGR	2,14	0,85	2,59	1,69
EPGSR	0,85		1,69	

Lampiran 4.3.2.1.3.A Indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Propinsi	Kabupaten	I P M		Reduksi Shortfall 1999 - 2002	Intensitas
			1999	2000		
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	65,10	67,00	1,80	EPISD
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	61,10	67,20	2,50	EPISD
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	66,10	68,40	1,90	EPIT
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	67,10	68,30	1,50	EPISD
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	65,10	68,30	2,10	EPISD
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	69,10	70,90	1,80	EPIT
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	64,00	67,30	2,10	EPISD
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	65,70	67,30	1,70	EPISD
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	64,40	65,90	1,60	EPISD
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	61,90	61,50	-1,00	EPISR
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	62,00	64,40	1,80	EPISD
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	61,60	63,70	1,80	EPIR
13	Riau	Kab. Bengkalis	66,90	69,40	2,00	EPIT
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	66,30	67,80	1,60	EPISD
15	Riau	Kab. Kampar	65,30	67,80	1,90	EPISD
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi		66,70		EPISD
17	Riau	Kab. Pelalawan		65,90		EPISD
18	Riau	Kab. Rokan Hulu		64,20		EPISD
19	Jambi	Kab. Batanghari	64,60	66,70	1,80	EPISD
20	Jambi	Kab. Bungo		64,20		EPISD
21	Jambi	Kab. Kerinci	67,50	68,00	1,10	EPISD
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur		65,30		EPISD
23	Jambi	Kab. Tebo		64,90		EPISD
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	63,10	64,20	1,40	EPISD
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	53,80	64,60	2,90	EPISD
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	60,40	62,00	1,60	EPIR
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	59,80	63,10	2,00	EPIR
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	63,10	65,10	1,80	EPISD
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	63,50	64,80	1,50	EPISD
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	65,90	66,60	1,30	EPISD
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	62,00	65,00	2,00	EPISD
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	62,80	63,10	0,90	EPIR
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	63,40	64,40	1,40	EPISD
34	Lampung	Kab. Lampung Timur		65,70		EPISD
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	60,70	66,30	2,40	EPISD
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	66,60	68,80	1,90	EPIT
37	Lampung	Kab. Way Kanan		64,50		EPISD
38	Banten	Kab. Lebak	61,00	61,60	1,10	EPISR
39	Banten	Kab. Serang	60,80	63,70	1,90	EPIR
40	Banten	Kab. Tangerang	63,50	68,40	2,40	EPIT
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	64,70	66,90	1,90	EPISD
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	66,60	65,60	-1,40	EPISD
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	64,80	65,30	1,10	EPISD
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	63,60	64,50	1,30	EPISD
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	61,60	62,40	1,30	EPIR
46	Jawa Barat	Kab. Garut	61,70	62,80	1,40	EPIR
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	56,50	61,20	2,20	EPISR
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	60,90	62,90	1,70	EPIR
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	65,00	65,00	0,40	EPISD
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	64,30	65,60	1,50	EPISD
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	63,20	63,80	1,20	EPIR
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	66,60	67,50	1,40	EPISD
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	65,30	67,10	1,70	EPISD
54	Jawa Barat	Kab. Subang	63,10	63,00	-0,60	EPIR
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	62,10	65,50	2,10	EPISD
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	65,10	67,20	1,80	EPISD

No.	Propinsi	Kabupaten	I P M		Reduksi Shortfall 1999 - 2002	Intensitas
			1999	2000		
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	61,80	63,90	1,80	EPIR
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	60,70	62,20	1,60	EPIR
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	66,50	67,70	1,50	EPISD
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	62,20	63,30	1,40	EPIR
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	66,00	66,70	1,20	EPISD
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	64,40	65,70	1,50	EPISD
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	63,10	65,30	1,80	EPISD
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	65,30	66,90	1,70	EPISD
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	64,50	68,50	2,20	EPIT
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	65,10	67,80	2,00	EPISD
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	66,00	66,90	1,40	EPISD
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	64,90	65,60	1,30	EPISD
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	65,80	68,40	2,00	EPIT
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	63,60	67,10	2,10	EPISD
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	52,40	57,60	2,20	EPISR
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	61,30	62,60	1,50	EPIR
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	63,80	67,40	2,20	EPISD
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	64,20	66,10	1,70	EPISD
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	64,70	67,40	2,00	EPISD
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	64,60	67,70	2,10	EPISD
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	55,50	58,30	1,80	EPISR
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	58,90	61,50	1,90	EPISR
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	69,10	71,70	2,00	EPISD
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	53,40	54,10	1,10	EPISR
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	66,40	69,30	2,10	EPIT
82	Jawa Timur	Kab. Jember	54,90	58,10	1,90	EPISR
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	65,10	66,00	1,40	EPISD
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	61,80	63,90	1,80	EPIR
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	60,40	62,60	1,80	EPIR
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	65,90	67,60	1,70	EPISD
87	Bali	Kab. Badung	68,20	70,10	1,80	EPIT
88	Bali	Kab. Bangli	64,40	66,70	1,90	EPISD
89	Bali	Kab. Buleleng	63,10	63,90	1,30	EPIR
90	Bali	Kab. Gianyar	64,40	67,70	2,10	EPISD
91	Bali	Kab. Jembrana	65,50	68,90	2,10	EPIT
92	Bali	Kab. Tabanan	63,70	70,40	1,80	EPIT
93	Bali	Kab. Karangasem	57,50	59,30	1,60	EPISR
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	60,80	62,70	1,70	EPIR
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	60,80	63,60	1,90	EPIR
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	60,90	64,00	2,00	EPISD
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	55,80	59,30	2,00	EPISR
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	61,00	62,20	1,50	EPIR
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	65,90	67,80	1,80	EPISD
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	67,40	69,60	1,90	EPIT
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	67,10	69,00	1,80	EPIT
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	61,90	64,60	1,90	EPISD
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	61,70	64,70	2,00	EPISD
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	60,60	61,70	1,40	EPISR
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	61,80	63,60	1,60	EPIR
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	62,50	65,90	2,10	EPISD
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	63,90	67,00	2,10	EPISD
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	65,00	67,70	2,00	EPISD
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	65,80	67,80	1,80	EPISD
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	64,70	67,90	2,10	EPISD
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	68,20	69,50	1,60	EPIT
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur		66,10		EPISD

No.	Propinsi	Kabupaten	I P M		Reduksi Shortfall 1999 - 2002	Intensitas
			1999	2000		
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan		67,80		EPISD
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	69,30	72,00	2,10	EPIST
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	68,00	70,10	1,90	EPIT
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	63,30	64,70	1,60	EPISD
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	66,70	67,80	1,50	EPISD
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli		64,20		EPISD
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	60,00	62,40	1,80	EPIR
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali		64,90		EPISD
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	62,60	64,30	1,60	EPISD
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	62,50	62,80	1,00	EPIR
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	62,10	65,30	2,00	EPISD
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	68,00	68,10	0,60	EPISD
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	62,10	64,00	1,70	EPISD
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	62,70	63,80	1,40	EPIR
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	63,50	66,00	1,90	EPISD
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	63,50	67,20	2,20	EPISD
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	60,90	62,60	1,60	EPIR
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	63,10	65,70	1,90	EPISD
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	61,80	63,00	1,50	EPIR
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	67,20	67,30	0,70	EPISD
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	62,70	64,10	1,50	EPISD
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	56,90	57,80	1,30	EPISR
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara		67,90		EPISD
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	61,50	64,00	1,90	EPISD
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	62,10	63,80	1,70	EPIR
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	62,50	64,30	1,70	EPISD
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	60,70	62,30	1,60	EPIR
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	57,30	59,00	1,60	EPISR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	49,90	55,00	2,20	EPISR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	56,20	58,40	1,70	EPISR
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	52,10	56,10	2,00	EPISR
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	55,80	61,30	2,30	EPISR
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	58,10	62,60	2,20	EPIR
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	49,20	57,70	2,60	EPISR
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	53,70	59,50	2,30	EPISR
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	51,80	58,30	2,40	EPISR
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	60,90	60,30	-1,20	EPISR
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	63,20	64,00	1,30	EPISD
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	45,40	53,40	2,40	EPISR
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	67,30	64,30	-2,10	EPISD
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	60,10	58,00	-1,70	EPISR
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	63,90	62,00	-1,70	EPIR
155	Papua	Kab. Jayawijaya	48,70	47,00	-1,50	EPISR
156	Papua	Kab. Mimika		64,80		EPISD
IPM Indonesia			64,3	65,8	1,60	

Catatan :

- 1) Pada tahun 1999 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat merupakan satu kabuapetrn : Tanjung Jabung
- 2) Pada tahun 1999 Kabupaten Tebo dan Bungo merupakan satu kabupaten : Bungo Tebo
- 3) Pada tahun 1999 Kabupaten Toli-toli dan Buol merupakan satu kabupaten : Buol Toli-toli

Keterangan :

EPI : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - IPM

Dibelakang **EPI** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	66,17	
Stand. Dev.	4,45	
EPISD	70,61	
EPIT	68,39	70,61
EPISD	63,94	68,39
EPIR	63,94	61,72
EPISR	61,72	

Lampiran 4.3.2.1.3.B Klasifikasi Indikator Index Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Propinsi	Kota	IPM		Reduksi Shortfall 1999 - 2002	Intensitas
			1999	2000		
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	68,50	71,60	2,10	EPIT
2	Sumatera Utara	Kota Medan	70,80	73,50	2,10	EPIST
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	70,90	74,10	2,20	EPIST
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	68,90	70,70	1,80	EPIT
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	66,80	67,80	1,40	EPISD
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	69,50	71,60	1,90	EPIT
7	Sumatera Barat	Kota Padang	70,40	73,20	2,10	EPIST
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	68,80	70,80	1,90	EPIT
9	Riau	Kota Batam	70,90	73,20	2,00	EPIST
10	Riau	Kota Pekanbaru	71,70	73,40	1,80	EPIST
11	Riau	Kota Dumai		71,50		EPIT
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	68,30	71,20	2,10	EPIT
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	68,00	69,60	1,70	EPIT
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	71,80	72,70	1,50	EPIST
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	68,50	70,50	1,80	EPIT
16	Banten	Kota Tangerang	68,30	72,20	2,30	EPIST
17	Banten	Kota Cilegon		70,70		EPIT
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	72,50	75,60	2,20	EPIST
19	Jawa Barat	Kota Bandung	70,70	73,00	2,00	EPIST
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	68,70	72,80	2,40	EPIST
21	Jawa Barat	Kota Bogor	68,10	69,20	1,50	EPIT
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	69,70	71,90	1,90	EPIST
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	68,40	69,20	1,40	EPIT
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	65,90	68,20	1,90	EPISD
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	70,20	73,60	2,20	EPIST
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	65,30	68,50	2,10	EPIT
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	70,50	73,00	2,00	EPIST
28	DI. Yogyakarta	Kota Jogjakarta	73,40	75,30	1,90	EPIST
29	Jawa Timur	Kota Kediri	68,60	70,80	1,90	EPIT
30	Jawa Timur	Kota Malang	68,00	71,40	2,20	EPIT
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	68,60	72,80	2,40	EPIST
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	65,10	67,70	1,90	EPISD
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	69,30	72,00	2,10	EPIST
34	Jawa Timur	Kota Madiun	68,70	70,70	1,90	EPIT
35	Bali	Kota Denpasar	72,10	74,90	2,20	EPIST
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	70,60	73,00	2,00	EPIST
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	69,10	72,60	2,20	EPIST
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	67,60	70,70	2,10	EPIT
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	72,50	74,20	1,80	EPIST
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	62,40	65,90	4,00	EPISD
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	68,30	70,50	1,90	EPIT
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	69,70	72,30	2,00	EPIST
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	63,10	65,20	1,80	EPISD
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	66,60	70,90	2,40	EPIT
IPM Indonesia			64,3	65,8	1,60	

Keterangan :

EPI : Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - IPM

Dibelakang **EPI** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	66,17	
Stand. Dev.	4,45	
EPIST	70,61	
EPIT	68,39	70,61
EPISD	63,94	68,39
EPIR	63,94	61,72
EPISR	61,72	

Lampiran 4.3.2.2.A Variabel Struktur Ekonomi

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor	
			Primer	Intensitas	Sekunder	Intensitas	Tersier	Intensitas
1	SUMUT	Kab. Asahan	37,17	ESPSD	42,62	ESSST	20,21	ESTSR
2	SUMUT	Kab. Dairi	70,52	ESPST	6,77	ESSR	22,71	ESTSR
3	SUMUT	Kab. Deli Serdang	38,73	ESPSD	36,91	ESST	24,37	ESTR
4	SUMUT	Kab. Langkat	65,79	ESPST	13,90	ESSR	20,31	ESTSR
5	SUMUT	Kab. Simalungun	62,11	ESPT	19,21	ESSSD	18,68	ESTSR
6	SUMUT	Kab. Tanah Karo	66,56	ESPST	4,24	ESSSR	29,21	ESTR
7	SUMUT	Kab. Labuhan Batu	35,14	ESPSD	47,17	ESSST	17,70	ESTSR
8	SUMUT	Kab. Tapanuli Utara	61,85	ESPT	6,83	ESSR	31,32	ESTSD
9	SUMBAR	Kab. Pesisir Selatan	34,62	ESPSD	16,60	ESSSD	48,78	ESTT
10	SUMBAR	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	43,90	ESPSD	16,29	ESSSD	39,81	ESTSD
11	SUMBAR	Kab. Pasaman	43,70	ESPSD	13,09	ESSR	43,21	ESTSD
12	SUMBAR	Kab. Solok	45,78	ESPSD	14,63	ESSSD	39,58	ESTSD
13	RIAU	Kab. Bengkalis	35,65	ESPSD	14,62	ESSSD	49,74	ESTT
14	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	50,84	ESPSD	13,54	ESSR	35,62	ESTSD
15	RIAU	Kab. Kampar	58,87	ESPT	11,35	ESSR	29,77	ESTR
16	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	61,22	ESPT	12,09	ESSR	26,68	ESTR
17	RIAU	Kab. Pelalawan	56,08	ESPT	24,10	ESSSD	19,81	ESTSR
18	RIAU	Kab. Rokan Hulu	65,64	ESPST	10,37	ESSR	23,99	ESTR
19	JAMBI	Kab. Batanghari	42,28	ESPSD	20,21	ESSSD	37,51	ESTSD
20	JAMBI	Kab. Bungo	47,68	ESPSD	9,81	ESSR	42,50	ESTSD
21	JAMBI	Kab. Kerinci	41,48	ESPSD	8,37	ESSR	50,16	ESTT
22	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	68,51	ESPST	9,93	ESSR	21,56	ESTSR
23	JAMBI	Kab. Tebo	58,67	ESPT	7,20	ESSR	34,13	ESTSD
24	SUMSEL	Kab. Muara Enim	88,25	ESPST	4,31	ESSSR	7,44	ESTSR
25	SUMSEL	Kab. Musi Banyuasin	78,12	ESPST	7,88	ESSR	14,00	ESTSR
26	SUMSEL	Kab. Musi Rawas	76,46	ESPST	12,09	ESSR	11,45	ESTSR
27	SUMSEL	Kab. Ogan Kemiling Ilir	45,70	ESPSD	21,31	ESSSD	32,99	ESTSD
28	SUMSEL	Kab. Lahat	47,64	ESPSD	20,94	ESSSD	31,41	ESTSD
29	BABEL	Kab. Bangka	43,67	ESPSD	39,47	ESSST	16,86	ESTSR
30	BABEL	Kab. Belitung	32,90	ESPSD	28,39	ESSSD	38,71	ESTSD
31	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	39,64	ESPSD	10,63	ESSR	49,73	ESTT
32	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	60,57	ESPT	8,93	ESSR	30,50	ESTR
33	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	53,82	ESPT	18,00	ESSSD	28,19	ESTR
34	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	61,72	ESPT	11,56	ESSR	26,73	ESTR
35	LAMPUNG	Kab. Bandung	8,89	ESPSR	63,22	ESSST	27,90	ESTR
36	JABAR	Kab. Lampung Utara	57,61	ESPT	9,13	ESSR	33,26	ESTSD
37	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	62,17	ESPT	11,39	ESSR	26,44	ESTR
38	BANTEN	Kab. Lebak	42,25	ESPSD	13,37	ESSR	44,38	ESTSD
39	BANTEN	Kab. Serang	15,05	ESPSR	60,95	ESSST	24,00	ESTR
40	BANTEN	Kab. Tangerang	9,49	ESPSR	66,55	ESSST	23,96	ESTR
41	JABAR	Kab. Bekasi	2,60	ESPSR	85,44	ESSST	11,96	ESTSR
42	JABAR	Kab. Bogor	13,77	ESPSR	57,39	ESSST	28,84	ESTR
43	JABAR	Kab. Ciamis	33,86	ESPSD	16,82	ESSSD	49,32	ESTT
44	JABAR	Kab. Cianjur	47,45	ESPSD	6,46	ESSR	46,09	ESTSD
45	JABAR	Kab. Cirebon	33,72	ESPSD	20,71	ESSSD	45,58	ESTSD
46	JABAR	Kab. Garut	41,46	ESPSD	12,63	ESSR	45,91	ESTSD
47	JABAR	Kab. Indramayu	66,18	ESPST	19,04	ESSSD	14,77	ESTSR
48	JABAR	Kab. Karawang	24,41	ESPR	36,42	ESST	39,17	ESTSD
49	JABAR	Kab. Kuningan	38,21	ESPSD	10,01	ESSR	51,79	ESTT
50	JABAR	Kab. Purwakarta	10,90	ESPSR	51,94	ESSST	37,16	ESTSD
51	JABAR	Kab. Sukabumi	43,12	ESPSD	18,69	ESSSD	38,19	ESTSD
52	JABAR	Kab. Sumedang	33,67	ESPSD	20,47	ESSSD	45,86	ESTSD
53	JABAR	Kab. Tasikmalaya	27,83	ESPR	18,34	ESSSD	53,84	ESTT
54	JABAR	Kab. Subang	50,87	ESPSD	8,36	ESSR	40,78	ESTSD
55	JATENG	Kab. Kendal	27,41	ESPR	42,77	ESSST	29,82	ESTR
56	JATENG	Kab. Magelang	37,74	ESPSD	24,07	ESSSD	38,19	ESTSD

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor	
			Primer	Intensitas	Sekunder	Intensitas	Tersier	Intensitas
57	JATENG	Kab. Pekalongan	19,59	ESPR	37,28	ESST	43,13	ESTSD
58	JATENG	Kab. Pemalang	38,61	ESPSD	23,25	ESSSD	38,14	ESTSD
59	JATENG	Kab. Sukoharjo	28,29	ESPR	32,41	ESST	39,29	ESTSD
60	JATENG	Kab. Tegal	25,64	ESPR	29,06	ESSSD	45,29	ESTSD
61	JATENG	Kab. Banyumas	29,67	ESPSD	25,49	ESSSD	44,85	ESTSD
62	JATENG	Kab. Boyolali	41,67	ESPSD	14,57	ESSSD	43,75	ESTSD
63	JATENG	Kab. Cilacap	14,33	ESPSR	49,24	ESSST	36,43	ESTSD
64	JATENG	Kab. Jepara	23,49	ESPR	31,83	ESST	44,68	ESTSD
65	JATENG	Kab. Karanganyar	23,40	ESPR	44,88	ESSST	31,72	ESTSD
66	JATENG	Kab. Klaten	23,99	ESPR	31,34	ESST	44,67	ESTSD
67	JATENG	Kab. Kudus	3,95	ESPSR	63,62	ESSST	32,43	ESTSD
68	JATENG	Kab. Kebumen	49,32	ESPSD	11,25	ESSR	39,42	ESTSD
69	DI. YOGYA	Kab. Bantul	30,76	ESPSD	26,60	ESSSD	42,64	ESTSD
70	DI. YOGYA	Kab. Gunung Kidul	43,24	ESPSD	19,21	ESSSD	37,55	ESTSD
71	JATIM	Kab. Bangkalan	43,51	ESPSD	9,75	ESSR	46,74	ESTSD
72	JATIM	Kab. Banyuwangi	57,10	ESPT	6,31	ESSR	36,58	ESTSD
73	JATIM	Kab. Blitar	46,82	ESPSD	6,24	ESSR	46,94	ESTSD
74	JATIM	Kab. Kediri	44,20	ESPSD	14,21	ESSSD	41,59	ESTSD
75	JATIM	Kab. Magetan	41,32	ESPSD	16,92	ESSSD	41,76	ESTSD
76	JATIM	Kab. Mojokerto	28,17	ESPR	34,92	ESST	36,90	ESTSD
77	JATIM	Kab. Pamekasan	63,75	ESPST	5,59	ESSR	30,67	ESTR
78	JATIM	Kab. Pasuruan	31,15	ESPSD	36,88	ESST	31,97	ESTSD
79	JATIM	Kab. Sidoarjo	7,78	ESPSR	56,85	ESSST	35,37	ESTSD
80	JATIM	Kab. Bondowoso	51,87	ESPT	11,65	ESSR	36,48	ESTSD
81	JATIM	Kab. Gresik	13,57	ESPSR	58,55	ESSST	27,88	ESTR
82	JATIM	Kab. Jember	50,52	ESPSD	12,31	ESSR	37,17	ESTSD
83	JATIM	Kab. Jombang	41,38	ESPSD	15,89	ESSSD	42,73	ESTSD
84	JATIM	Kab. Lamongan	53,10	ESPT	9,46	ESSR	37,44	ESTSD
85	JATIM	Kab. Ponorogo	33,83	ESPSD	19,13	ESSSD	47,04	ESTSD
86	JATIM	Kab. Tulungagung	23,37	ESPR	24,10	ESSSD	52,53	ESTT
87	BALI	Kab. Badung	8,52	ESPSR	8,84	ESSR	82,64	ESTST
88	BALI	Kab. Bangli	32,34	ESPSD	13,38	ESSR	54,28	ESTT
89	BALI	Kab. Buleleng	28,08	ESPR	13,32	ESSR	58,60	ESTST
90	BALI	Kab. Gianyar	23,17	ESPR	24,50	ESSSD	52,33	ESTT
91	BALI	Kab. Jembrana	29,56	ESPSD	12,96	ESSR	57,48	ESTST
92	BALI	Kab. Tabanan	37,34	ESPSD	12,40	ESSR	50,26	ESTT
93	BALI	Kab. Karangasem	37,29	ESPSD	12,20	ESSR	50,51	ESTT
94	KALBAR	Kab. Kapuas Hulu	53,53	ESPT	8,99	ESSR	37,48	ESTSD
95	KALBAR	Kab. Ketapang	33,11	ESPSD	25,59	ESSSD	41,31	ESTSD
96	KALBAR	Kab. Pontianak	21,56	ESPR	45,87	ESSST	32,57	ESTSD
97	KALBAR	Kab. Sambas	40,12	ESPSD	14,10	ESSSD	45,78	ESTSD
98	KALBAR	Kab. Sanggau	41,51	ESPSD	31,79	ESST	26,70	ESTR
99	KALTENG	Kab. Barito Selatan	50,51	ESPSD	13,66	ESSR	35,83	ESTSD
100	KALTENG	Kab. Barito Utara	63,54	ESPST	6,57	ESSR	29,89	ESTR
101	KALTENG	Kab. Kapuas	52,56	ESPT	13,48	ESSR	33,96	ESTSD
102	KALSEL	Kab. Hulu Sungai Selatan	44,17	ESPSD	12,01	ESSR	43,82	ESTSD
103	KALSEL	Kab. Hulu Sungai Tengah	40,07	ESPSD	12,94	ESSR	46,99	ESTSD
104	KALSEL	Kab. Hulu Sungai Utara	68,31	ESPST	7,14	ESSR	24,55	ESTR
105	KALSEL	Kab. Tabalong	78,10	ESPST	3,98	ESSSR	17,92	ESTSR
106	KALSEL	Kab. Tanah Laut	42,37	ESPSD	23,18	ESSSD	34,45	ESTSD
107	KALSEL	Kab. Tapin	50,81	ESPSD	9,61	ESSR	39,59	ESTSD
108	KALTIM	Kab. Berau	60,11	ESPT	16,63	ESSSD	23,26	ESTR
109	KALTIM	Kab. Kutai	87,15	ESPST	6,50	ESSR	6,35	ESTSR
110	KALTIM	Kab. Pasir	66,49	ESPST	14,31	ESSSD	19,20	ESTSR
111	KALTIM	Kab. Bulungan	71,34	ESPST	12,86	ESSR	15,80	ESTSR
112	KALTIM	Kab. Kutai Timur	84,55	ESPST	7,45	ESSR	8,00	ESTSR

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor	
			Primer	Intensitas	Sekunder	Intensitas	Tersier	Intensitas
113	KALTIM	Kab. Nunukan	76,88	ESPST	9,09	ESSR	14,04	ESTSR
114	SULUT	Kab. Minahasa	44,68	ESPST	21,79	ESSSD	33,53	ESTSD
115	SULUT	Kab. Sangihe	54,90	ESPT	10,06	ESSR	35,04	ESTSD
116	GORONTALO	Kab. Gorontalo	44,68	ESPST	19,76	ESSSD	35,56	ESTSD
117	SULTENG	Kab. Banggai	56,47	ESPT	15,42	ESSSD	28,11	ESTR
118	SULTENG	Kab. Toli-Toli	54,20	ESPT	13,75	ESSR	32,05	ESTSD
119	SULTENG	Kab. Donggala	57,61	ESPT	13,29	ESSR	29,10	ESTR
120	SULTENG	Kab. Morowali	67,19	ESPST	7,70	ESSR	25,11	ESTR
121	SULTENG	Kab. Poso	46,62	ESPST	17,67	ESSSD	35,70	ESTSD
122	SULTRA	Kab. Buton	37,63	ESPST	15,28	ESSSD	47,09	ESTSD
123	SULTRA	Kab. Kolaka	52,05	ESPT	19,67	ESSSD	28,28	ESTR
124	SULSEL	Kab. Luwu	59,99	ESPT	14,43	ESSSD	25,59	ESTR
125	SULSEL	Kab. Majene	58,58	ESPT	9,39	ESSR	32,03	ESTSD
126	SULSEL	Kab. Pangkep	28,27	ESPR	51,86	ESSST	19,87	ESTSR
127	SULSEL	Kab. Pinrang	68,58	ESPST	7,92	ESSR	23,49	ESTR
128	SULSEL	Kab. Tana Toraja	56,74	ESPT	8,88	ESSR	34,38	ESTSD
129	SULSEL	Kab. Bantaeng	62,17	ESPT	9,46	ESSR	28,37	ESTR
130	SULSEL	Kab. Barru	53,89	ESPT	11,58	ESSR	34,53	ESTSD
131	SULSEL	Kab. Bone	65,41	ESPST	10,76	ESSR	23,83	ESTR
132	SULSEL	Kab. Enrekang	62,15	ESPT	9,11	ESSR	28,74	ESTR
133	SULSEL	Kab. Gowa	52,76	ESPT	10,75	ESSR	36,49	ESTSD
134	SULSEL	Kab. Jeneponto	62,12	ESPT	7,21	ESSR	30,67	ESTR
135	SULSEL	Kab. Luwu Utara	91,52	ESPST	1,71	ESSSR	6,77	ESTSR
136	SULSEL	Kab. Maros	36,50	ESPST	45,33	ESSST	18,17	ESTSR
137	SULSEL	Kab. Selayar	47,75	ESPST	12,75	ESSR	39,50	ESTSD
138	SULSEL	Kab. Sinjai	68,63	ESPST	5,23	ESSSR	26,13	ESTR
139	SULSEL	Kab. Takalar	50,49	ESPST	15,28	ESSSD	34,23	ESTSD
140	N T B	Kab. Bima	50,72	ESPST	6,88	ESSR	42,39	ESTSD
141	N T B	Kab. Lombok Barat	40,25	ESPST	10,83	ESSR	48,92	ESTT
142	N T B	Kab. Dompu	54,89	ESPT	6,99	ESSR	38,12	ESTSD
143	N T B	Kab. Lombok Timur	47,09	ESPST	8,47	ESSR	44,44	ESTSD
144	N T T	Kab. Ende	34,87	ESPST	11,43	ESSR	53,70	ESTT
145	N T T	Kab. Flores Timur	44,79	ESPST	6,20	ESSR	49,01	ESTT
146	N T T	Kab. Timur Tengah Selatan	60,36	ESPT	6,26	ESSR	33,37	ESTSD
147	N T T	Kab. Timur Tengah Utara	57,48	ESPT	9,26	ESSR	33,25	ESTSD
148	N T T	Kab. Belu	46,33	ESPST	7,53	ESSR	46,14	ESTSD
149	N T T	Kab. Manggarai	62,87	ESPST	9,01	ESSR	28,12	ESTR
150	N T T	Kab. Ngada	56,74	ESPT	11,50	ESSR	31,76	ESTSD
151	N T T	Kab. Sumba Barat	62,73	ESPST	6,05	ESSR	31,23	ESTR
152	IRJA BARAT	Kab. Fak-Fak	36,76	ESPST	29,00	ESSSD	34,23	ESTSD
153	IRJA BARAT	Kab. Manokwari	57,98	ESPT	16,67	ESSSD	25,35	ESTR
154	IRJA BARAT	Kab. Sorong	77,76	ESPST	9,20	ESSR	13,05	ESTSR
155	PAPUA	Kab. Jayawijaya	63,77	ESPST	4,36	ESSSR	31,87	ESTSD
156	PAPUA	Kab. Mimika	98,42	ESPST	0,53	ESSSR	1,05	ESTSR

Keterangan :

ESP : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Primer

ESS : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Sekunder

EST : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Tersier

Dibelakang **ESP/ESS/EST** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

	Primer		Sekunder		Tersier	
Rata-rata	39,87		22,31		39,52	
Stan.Dev.	22,45		16,74		16,42	
ST	62,32		39,05		55,94	
T	51,09	62,32	30,68	39,05	47,73	55,94
SD	28,65	51,09	13,94	30,68	31,31	47,73
R	28,65	17,42	13,94	5,56	31,31	23,10
SR	17,42		5,56		23,10	

Lampiran 4.3.2.2.B Variabel Struktur Ekonomi

No.	Propinsi	Kota	Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor		Nilai Tambah Sektor	
			Primer	Intensitas	Sekunder	Intensitas	Tersier	Intensitas
1	SUMUT	Kota Binjai	9,98	ESPSR	39,32	ESSST	50,70	ESTT
2	SUMUT	Kota Medan	4,36	ESPSR	28,66	ESSSD	66,99	ESTST
3	SUMUT	Kota Pematang Siantar	3,72	ESPSR	44,35	ESSST	51,93	ESTT
4	SUMUT	Kota Sibolga	28,18	ESPR	28,25	ESSSD	43,57	ESTSD
5	SUMUT	Kota Tanjung Balai	26,89	ESPR	31,79	ESST	41,33	ESTSD
6	SUMUT	Kota Tebing Tinggi	8,35	ESPSR	34,78	ESST	56,86	ESTST
7	SUMBAR	Kota Padang	5,52	ESPSR	22,56	ESSSD	71,92	ESTST
8	SUMBAR	Kota Sawahlunto	42,47	ESPSD	15,01	ESSSD	42,52	ESTSD
9	RIAU	Kota Batam	2,48	ESPSR	74,82	ESSST	22,70	ESDSR
10	RIAU	Kota Pekanbaru	1,57	ESPSR	22,72	ESSSD	75,71	ESTST
11	RIAU	Kota Dumai	9,09	ESPSR	21,48	ESSSD	69,43	ESTST
12	SUMSEL	Kota Palembang	0,69	ESPSR	46,44	ESSST	52,86	ESTT
13	BABEL	Kota Pangkal Pinang	18,20	ESPR	22,14	ESSSD	59,66	ESTST
14	BENGKULU	Kota Bengkulu	4,57	ESPSR	10,54	ESSR	84,89	ESTST
15	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	3,69	ESPSR	37,77	ESST	58,53	ESTST
16	BANTEN	Kota Tangerang	0,21	ESPSR	61,39	ESSST	38,40	ESTSD
17	BANTEN	Kota Cilegon	3,40	ESPSR	73,54	ESSST	23,06	ESDSR
18	DKI JAKARTA	Kota DKI Jakarta	0,21	ESPSR	36,32	ESST	62,39	ESTST
19	JABAR	Kota Bandung	0,44	ESPSR	38,39	ESST	61,18	ESTST
20	JABAR	Kota Bekasi	1,45	ESPSR	54,47	ESSST	44,08	ESTSD
21	JABAR	Kota Bogor	0,39	ESPSR	38,45	ESST	61,15	ESTST
22	JABAR	Kota Cirebon	0,35	ESPSR	46,61	ESSST	53,04	ESTT
23	JABAR	Kota Sukabumi	4,07	ESPSR	11,04	ESSR	84,88	ESTST
24	JATENG	Kota Pekalongan	13,70	ESPSR	35,28	ESST	51,03	ESTT
25	JATENG	Kota Semarang	1,49	ESPSR	33,53	ESST	64,98	ESTST
26	JATENG	Kota Tegal	15,96	ESPSR	29,42	ESSSD	54,62	ESTT
27	JATENG	Kota Surakarta	1,86	ESPSR	40,97	ESSST	57,17	ESTST
28	DI . YOGYA	Kota Jogjakarta	1,04	ESPSR	20,44	ESSSD	78,52	ESTST
29	JATIM	Kota Kediri	0,20	ESPSR	78,65	ESSST	21,16	ESDSR
30	JATIM	Kota Malang	0,79	ESPSR	42,75	ESSST	56,46	ESTST
31	JATIM	Kota Mojokerto	1,65	ESPSR	27,38	ESSSD	70,98	ESTST
32	JATIM	Kota Probolinggo	10,75	ESPSR	27,31	ESSSD	61,94	ESTST
33	JATIM	Kota Surabaya	0,22	ESPSR	46,41	ESSST	53,38	ESTT
34	JATIM	Kota Madiun	2,57	ESPSR	43,22	ESSST	54,22	ESTT
35	BALI	Kota Denpasar	8,26	ESPSR	18,97	ESSSD	72,77	ESTST
36	KALTIM	Kota Balikpapan	8,34	ESPSR	44,63	ESSST	47,03	ESTSD
37	KALTIM	Kota Samarinda	3,38	ESPSR	37,89	ESST	58,73	ESTST
38	SULUT	Kota Bitung	12,32	ESPSR	39,22	ESSST	48,46	ESTT
39	SULUT	Kota Manado	3,41	ESPSR	19,65	ESSSD	76,94	ESTST
40	GORONTALO	Kota Gorontalo	11,73	ESPSR	12,84	ESSR	75,44	ESTST
41	SULTRA	Kota Kendari	24,60	ESPR	17,35	ESSSD	58,06	ESTST
42	SULSEL	Kota Pare-Pare	9,18	ESPSR	13,86	ESSR	76,96	ESTST
43	N T B	Kota Mataram	4,77	ESPSR	10,40	ESSR	84,83	ESTST
44	N T T	Kota Kupang	6,29	ESPSR	16,64	ESSSD	77,07	ESTST

Keterangan :

ESP : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Primer
ESS : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Sekunder
EST : Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor Tersier
Dibelakang **ESP/ESS/EST** - **ST** : Sangat Tinggi
T : Tinggi
SD : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

	Primer		Sekunder		Tersier	
Rata-rata	39,87		22,31		39,52	
Stan.Dev.	22,45		16,74		16,42	
ST	62,32		39,05		55,94	
T	51,09	62,32	30,68	39,05	47,73	55,94
SD	28,65	51,09	13,94	30,68	31,31	47,73
R	28,65	17,42	13,94	5,56	31,31	23,10
SR	17,42		5,56		23,10	

Lampiran 4.3.3. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas

Lampiran 4.3.3.1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja

Lampiran 4.3.3.1.1.A. Indikator Penduduk Usia Produktif

No.	Propinsi	Kabupaten	Usia Produktif	Jumlah Penduduk	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	615.849	1.013.145	60,79	TSPSK
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	213.829	390.082	54,82	TSPSK
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	1.371.828	2.055.077	66,75	TSPC
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	610.850	882.647	69,21	TSPC
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	483.552	785.720	61,54	TSPSK
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	183.969	301.837	60,95	TSPSK
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	621.358	1.017.309	61,08	TSPSK
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	259.328	415.330	62,44	TSPK
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	218.564	342.236	63,86	TSPK
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	208.488	322.952	64,56	TSPK
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	357.144	570.736	62,58	TSPK
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	249.368	401.208	62,15	TSPSK
13	Riau	Kab. Bengkalis	406.107	562.006	72,26	TSPSB
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	186.964	292.214	63,98	TSPK
15	Riau	Kab. Kampar	178.434	264.152	67,55	TSPC
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	383.581	562.903	68,14	TSPC
17	Riau	Kab. Pelalawan	52.886	121.126	43,66	TSPSK
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	241.983	346.058	69,93	TSPB
19	Jambi	Kab. Batanghari	134.118	194.121	69,09	TSPC
20	Jambi	Kab. Bungo	139.908	221.367	63,20	TSPK
21	Jambi	Kab. Kerinci	202.740	300.861	67,39	TSPC
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	131.781	193.404	68,14	TSPC
23	Jambi	Kab. Tebo	138.960	211.914	65,57	TSPC
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	558.566	925.497	60,35	TSPSK
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	915.269	1.409.792	64,92	TSPC
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	499.390	785.007	63,62	TSPK
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	614.431	909.659	67,55	TSPC
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	377.594	609.549	61,95	TSPSK
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	367.518	596.704	61,59	TSPSK
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	118.520	169.758	69,82	TSPB
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	260.460	392.814	66,31	TSPC
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	251.339	381.425	65,89	TSPC
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	756.965	1.148.455	65,91	TSPC
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	623.997	901.021	69,25	TSPC
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	367.587	540.914	67,96	TSPC
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	3.146.443	4.553.779	69,10	TSPC
37	Lampung	Kab. Way Kanan	191.114	280.247	68,19	TSPC
38	Banten	Kab. Lebak	677.976	1.057.032	64,14	TSPK
39	Banten	Kab. Serang	1.139.760	1.893.188	60,20	TSPSK
40	Banten	Kab. Tangerang	1.841.296	2.783.532	66,15	TSPC
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	1.486.204	2.218.560	66,99	TSPC
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	2.311.525	3.586.296	64,45	TSPK
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	1.022.093	1.468.505	69,60	TSPB
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	1.357.215	2.066.141	65,69	TSPC
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1.055.546	1.583.827	66,65	TSPC
46	Jawa Barat	Kab. Garut	1.308.979	2.052.392	63,78	TSPK
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	1.114.292	1.622.904	68,66	TSPC
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	1.297.717	1.831.674	70,85	TSPB
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	627.977	923.157	68,02	TSPC
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	535.182	802.688	66,67	TSPC
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1.414.595	2.162.830	65,40	TSPC
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	567.977	781.196	72,71	TSPSB
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	1.433.420	2.029.409	70,63	TSPB
54	Jawa Barat	Kab. Subang	967.507	1.313.338	73,67	TSPSB
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	652.804	930.190	70,18	TSPB
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	731.898	1.042.704	70,19	TSPB

No.	Propinsi	Kabupaten	Usia Produktif	Jumlah Penduduk	Rasio	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	641.664	987.004	65,01	TSPC
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	648.348	984.776	65,84	TSPC
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	554.772	754.178	73,56	TSPSB
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	877.832	1.367.992	64,17	TSPK
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	1.078.352	1.513.926	71,23	TSPB
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	606.016	892.314	67,92	TSPC
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1.072.782	1.615.300	66,41	TSPC
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	662.830	982.548	67,46	TSPC
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	551.430	768.660	71,74	TSPB
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	808.764	1.128.482	71,67	TSPB
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	611.586	870.034	70,29	TSPB
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	839.956	1.298.924	64,67	TSPC
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	606.940	840.823	72,18	TSPSB
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	450.800	631.966	71,33	TSPB
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	474.894	734.055	64,69	TSPC
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1.086.477	1.481.067	73,36	TSPSB
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	724.584	1.045.926	69,28	TSPC
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	1.082.886	1.563.282	69,27	TSPC
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	482.685	664.797	72,61	TSPSB
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	615.657	877.212	70,18	TSPB
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	476.952	689.871	69,14	TSPC
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	1.109.976	1.545.411	71,82	TSPSB
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1.369.935	1.880.172	72,86	TSPSB
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	462.504	673.407	68,68	TSPC
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	691.026	982.695	70,32	TSPB
82	Jawa Timur	Kab. Jember	1.568.511	2.149.476	72,97	TSPSB
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	790.125	1.153.572	68,49	TSPC
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	798.252	1.100.463	72,54	TSPSB
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	661.857	919.863	71,95	TSPSB
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	651.315	905.100	71,96	TSPSB
87	Bali	Kab. Badung	280.847	372.502	75,39	TSPSB
88	Bali	Kab. Bangli	147.525	197.080	74,86	TSPSB
89	Bali	Kab. Buleleng	344.249	504.034	68,30	TSPC
90	Bali	Kab. Gianyar	269.257	367.439	73,28	TSPSB
91	Bali	Kab. Jembrana	162.239	232.650	69,74	TSPB
92	Bali	Kab. Tabanan	291.519	404.917	71,99	TSPSB
93	Bali	Kab. Karangasem	238.659	359.290	66,43	TSPC
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	152.424	230.096	66,24	TSPC
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	395.022	584.924	67,53	TSPC
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	560.545	821.584	68,23	TSPC
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	265.161	436.148	60,80	TSPSK
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	307.768	459.024	67,05	TSPC
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	121.317	182.109	66,62	TSPC
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	88.755	145.258	61,10	TSPSK
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	363.210	559.398	64,93	TSPC
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	139.006	208.006	66,83	TSPC
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	181.279	264.309	68,59	TSPC
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	162.256	246.585	65,80	TSPC
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	121.865	171.659	70,99	TSPB
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	197.817	280.777	70,45	TSPB
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	73.617	105.101	70,04	TSPB
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	102.899	149.879	68,65	TSPC
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	286.860	424.890	67,51	TSPC
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	181.438	293.939	61,73	TSPSK
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	103.576	145.316	71,28	TSPB
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	68.304	101.053	67,59	TSPC

No.	Propinsi	Kabupaten	Usia Produktif	Jumlah Penduduk	Rasio	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	59.388	87.024	68,24	TSPC
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	530.268	747.826	70,91	TSPB
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	153.884	226.083	68,07	TSPC
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	310.968	466.824	66,61	TSPC
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	202.626	320.307	63,26	TSPK
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	106.173	188.172	56,42	TSPSK
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	581.403	882.459	65,88	TSPC
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	108.558	169.683	63,98	TSPK
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	122.739	172.617	71,10	TSPB
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	320.554	534.403	59,98	TSPSK
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	233.289	369.178	63,19	TSPK
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	220.616	356.133	61,95	TSPSK
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	64.904	107.604	60,32	TSPSK
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	163.968	239.974	68,33	TSPC
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	233.316	353.073	66,08	TSPC
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	267.696	403.349	66,37	TSPC
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	149.349	229.188	65,16	TSPC
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	72.590	111.020	65,38	TSPC
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	480.536	713.655	67,33	TSPC
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	152.866	232.288	65,81	TSPC
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	400.454	604.482	66,25	TSPC
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	217.770	350.994	62,04	TSPSK
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	318.542	497.882	63,98	TSPK
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	220.092	330.924	66,51	TSPC
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	70.882	99.064	71,55	TSPB
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	71.736	107.604	66,67	TSPC
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	157.990	245.952	64,24	TSPK
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	344.950	543.797	63,43	TSPK
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	436.021	686.027	63,56	TSPK
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	170.814	286.396	59,64	TSPSK
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	676.645	1.070.090	63,23	TSPK
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	168.947	273.963	61,67	TSPSK
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	118.572	194.340	61,01	TSPSK
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	202.212	310.452	65,13	TSPC
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	123.000	205.656	59,81	TSPSK
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	164.517	263.664	62,40	TSPK
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	346.944	598.469	57,97	TSPSK
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	130.380	223.368	58,37	TSPSK
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	171.216	312.420	54,80	TSPSK
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	60.782	96.094	63,25	TSPK
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	150.964	243.898	61,90	TSPSK
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	124.564	200.852	62,02	TSPSK
155	Papua	Kab. Jayawijaya	247.272	381.818	64,76	TSPC
156	Papua	Kab. Mimika	37.846	61.984	61,06	TSPSK

Sumber : Susenas Kor 2002, BPS Pusat

Keterangan :

TSP : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Usia Produktif

Dibelakang **TSP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	67,03			
Standev	4,72			
Median	67,33			
TSPSB	71,76		72,06	
TSPB	69,39	71,76	69,70	72,06
TSPC	64,67	69,39	64,97	69,70
TSPK	64,67	62,31	64,97	62,61
TSPSK	62,31		62,61	

Lampiran 4.3.3.1.1.B. Indikator Penduduk Usia Produktif

No.	Propinsi	Kota	Usia Produktif	Jumlah Penduduk	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	168.974	240.396	70,29	TSPB
2	Sumatera Utara	Kota Medan	1.372.696	2.031.172	67,58	TSPC
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	153.296	228.202	67,18	TSPC
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	74.035	138.489	53,46	TSPSK
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	82.745	134.134	61,69	TSPSK
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	82.745	125.424	65,97	TSPC
7	Sumatera Barat	Kota Padang	523.364	733.828	71,32	TSPB
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	47.888	71.248	67,21	TSPC
9	Riau	Kota Batam	292.275	417.644	69,98	TSPB
10	Riau	Kota Pekanbaru	770.804	1.185.626	65,01	TSPC
11	Riau	Kota Dumai				
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	979.900	1.388.112	70,59	TSPB
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	105.336	150.290	70,09	TSPB
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	177.489	267.525	66,34	TSPC
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	591.668	872.916	67,78	TSPC
16	Banten	Kota Tangerang	1.067.476	1.510.088	70,69	TSPB
17	Banten	Kota Cilegon	329.992	496.580	66,45	TSPC
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	6.178.978	8.404.756	73,52	TSPSB
19	Jawa Barat	Kota Bandung	1.695.208	2.366.792	71,62	TSPB
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	1.318.796	1.846.856	71,41	TSPB
21	Jawa Barat	Kota Bogor	621.486	876.038	70,94	TSPB
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	228.826	338.500	67,60	TSPC
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	227.472	323.606	70,29	TSPB
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	177.126	269.588	65,70	TSPC
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	1.185.296	1.646.492	71,99	TSPSB
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	177.126	264.018	67,09	TSPC
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	368.734	541.404	68,11	TSPC
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	273.315	340.347	80,30	TSPSB
29	Jawa Timur	Kota Kediri	202.020	251.160	80,43	TSPSB
30	Jawa Timur	Kota Malang	624.624	812.448	76,88	TSPSB
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	114.660	152.880	75,00	TSPSB
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	98.280	140.868	69,77	TSPB
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	2.020.200	2.664.480	75,82	TSPSB
34	Jawa Timur	Kota Madiun	89.544	127.764	70,09	TSPB
35	Bali	Kota Denpasar	498.802	682.280	73,11	TSPSB
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	281.340	398.044	70,68	TSPB
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	392.798	559.556	70,20	TSPB
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	123.492	174.660	70,70	TSPB
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	276.504	375.396	73,66	TSPSB
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	115.698	176.676	65,49	TSPC
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	145.900	208.403	70,01	TSPB
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	80.699	129.438	62,35	TSPK
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	224.448	324.648	69,14	TSPC
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	168.444	263.737	63,87	TSPK

Sumber : Susenas Kor 2002, BPS Pusat

Keterangan :

TSP : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Usia Produktif

Dibelakang **TSP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	67,03			
Standev	4,72			
Median	67,33			
TSPSB	71,76		72,06	
TSPB	69,39	71,76	69,70	72,06
TSPC	64,67	69,39	64,97	69,70
TSPK	64,67	62,31	64,97	62,61
TSPSK	62,31		62,61	

Lampiran 4.3.3.1.2.A. Indikator Tenaga Kerja Berijasah SLTP Berpengalaman

No.	Propinsi	Kabupaten	Total Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Minimal SLTP	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	416.079	156.845	37,70	TSSC
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	189.034	109.253	57,80	TSSB
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	766.088	459.678	60,00	TSSB
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	331.744	197.668	59,58	TSSB
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	328.345	186.591	56,83	TSSB
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	161.484	99.956	61,90	TSSSB
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	419.799	157.110	37,43	TSSC
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	289.851	161.768	55,81	TSSB
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	118.608	48.208	40,64	TSSC
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	135.488	44.968	33,19	TSSC
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	252.352	88.228	34,96	TSSC
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	180.456	63.072	34,95	TSSC
13	Riau	Kab. Bengkalis	203.023	81.836	40,31	TSSC
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	137.603	43.773	31,81	TSSK
15	Riau	Kab. Kampar	122.014	69.128	56,66	TSSB
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	217.733	94.779	43,53	TSSC
17	Riau	Kab. Pelalawan	30.708	-		
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	194.502	50.188	25,80	TSSK
19	Jambi	Kab. Batanghari	88.869	31.878	35,87	TSSC
20	Jambi	Kab. Bungo	99.312	42.087	42,38	TSSC
21	Jambi	Kab. Kerinci	152.430	56.358	36,97	TSSC
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	70.812	17.757	25,08	TSSK
23	Jambi	Kab. Tebo	103.062	33.582	32,58	TSSC
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	415.912	108.217	26,02	TSSK
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	643.198	196.400	30,53	TSSK
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	344.146	108.313	31,47	TSSK
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	423.725	91.039	21,49	TSSSK
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	265.484	65.191	24,56	TSSK
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	267.738	56.860	21,24	TSSSK
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	76.210	25.066	32,89	TSSC
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	161.064	87.591	54,38	TSSB
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	197.538	72.270	36,59	TSSC
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	502.139	127.083	25,31	TSSK
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	470.338	162.272	34,50	TSSC
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	209.990	79.035	37,64	TSSC
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	1.673.144	772.038	46,14	TSSC
37	Lampung	Kab. Way Kanan	160.600	53.801	33,50	TSSC
38	Banten	Kab. Lebak	435.024	62.328	14,33	TSSSK
39	Banten	Kab. Serang	648.144	190.804	29,44	TSSK
40	Banten	Kab. Tangerang	980.784	499.572	50,94	TSSC
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	725.881	363.636	50,10	TSSC
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	1.226.533	437.938	35,71	TSSC
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	744.556	121.948	16,38	TSSSK
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	861.340	114.838	13,33	TSSSK
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	564.458	152.834	27,08	TSSK
46	Jawa Barat	Kab. Garut	776.079	168.873	21,76	TSSSK
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	695.978	138.323	19,87	TSSSK
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	710.573	176.446	24,83	TSSK
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	381.543	82.553	21,64	TSSSK
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	329.200	106.206	32,26	TSSC
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	810.269	172.978	21,35	TSSSK
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	349.047	112.681	32,28	TSSC
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	974.910	247.026	25,34	TSSK
54	Jawa Barat	Kab. Subang	617.233	160.157	25,95	TSSK
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	493.502	142.592	28,89	TSSK
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	543.632	208.318	38,32	TSSC

No.	Propinsi	Kabupaten	Total Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Minimal SLTP	Rasio	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	477.906	92.462	19,35	TSSSK
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	435.574	110.286	25,32	TSSK
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	414.408	194.950	47,04	TSSC
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	532.492	100.260	18,83	TSSSK
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	645.006	218.344	33,85	TSSC
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	471.222	178.240	37,83	TSSC
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	719.644	213.888	29,72	TSSK
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	445.600	153.732	34,50	TSSC
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	397.698	125.882	31,65	TSSK
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	562.570	262.904	46,73	TSSC
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	442.258	182.696	41,31	TSSC
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	614.928	170.442	27,72	TSSK
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	437.959	183.825	41,97	TSSC
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	400.042	98.344	24,58	TSSK
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	325.185	42.924	13,20	TSSSK
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	753.984	237.468	31,50	TSSK
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	516.474	148.071	28,67	TSSK
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	734.475	245.889	33,48	TSSC
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	320.901	136.584	42,56	TSSC
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	433.566	150.927	34,81	TSSC
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	393.981	90.930	23,08	TSSK
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	763.224	225.561	29,55	TSSK
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	783.027	474.789	60,64	TSSSB
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	338.247	44.331	13,11	TSSSK
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	463.596	197.946	42,70	TSSC
82	Jawa Timur	Kab. Jember	989.415	251.055	25,37	TSSK
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	512.379	204.582	39,93	TSSC
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	587.475	197.568	33,63	TSSC
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	484.953	142.212	29,32	TSSK
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	469.308	177.198	37,76	TSSC
87	Bali	Kab. Badung	178.856	108.556	60,69	TSSSB
88	Bali	Kab. Bangli	134.683	41.850	31,07	TSSK
89	Bali	Kab. Buleleng	271.131	106.743	39,37	TSSC
90	Bali	Kab. Gianyar	219.088	94.546	43,15	TSSC
91	Bali	Kab. Jembrana	129.141	44.363	34,35	TSSC
92	Bali	Kab. Tabanan	225.406	113.138	50,19	TSSC
93	Bali	Kab. Karangasem	209.211	43.063	20,58	TSSSK
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	113.880	43.216	37,95	TSSC
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	229.257	70.568	30,78	TSSK
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	358.128	126.492	35,32	TSSC
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	203.242	57.377	28,23	TSSK
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	231.848	46.720	20,15	TSSSK
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	94.908	51.329	54,08	TSSB
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	58.626	20.960	35,75	TSSC
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	271.369	107.387	39,57	TSSC
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	107.792	28.939	26,85	TSSK
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	118.571	41.420	34,93	TSSC
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	129.563	22.084	17,04	TSSSK
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	96.197	43.262	44,97	TSSC
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	152.683	36.770	24,08	TSSK
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	61.116	13.427	21,97	TSSSK
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	70.031	28.633	40,89	TSSC
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	162.324	81.136	49,98	TSSC
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	114.131	43.281	37,92	TSSC
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	59.045	19.508	33,04	TSSC
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	37.252	32.027	85,97	TSSSB

No.	Propinsi	Kabupaten	Total Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Minimal SLTP	Rasio	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	40.572	18.228	44,93	TSSC
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	309.299	165.492	53,51	TSSB
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	116.467	36.890	31,67	TSSK
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	168.222	35.904	21,34	TSSSK
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	148.251	56.622	38,19	TSSC
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	60.177	25.629	42,59	TSSC
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	392.460	131.676	33,55	TSSC
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	78.729	17.115	21,74	TSSSK
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	80.685	35.208	43,64	TSSC
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	219.805	77.540	35,28	TSSC
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	162.126	53.638	33,08	TSSC
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	126.754	64.163	50,62	TSSC
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	56.364	17.080	30,30	TSSK
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	112.728	38.430	34,09	TSSC
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	124.661	56.781	45,55	TSSC
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	162.677	66.945	41,15	TSSC
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	94.386	29.369	31,12	TSSK
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	30.744	12.810	41,67	TSSC
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	293.698	56.448	19,22	TSSSK
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	105.042	35.014	33,33	TSSC
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	187.058	66.175	35,38	TSSC
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	112.728	35.014	31,06	TSSK
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	203.252	79.422	39,08	TSSC
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	129.950	59.094	45,47	TSSC
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	40.992	4.270	10,42	TSSSK
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	65.758	20.496	31,17	TSSK
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	87.108	29.890	34,31	TSSC
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	237.213	113.544	47,87	TSSC
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	310.766	70.897	22,81	TSSSK
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	123.894	54.378	43,89	TSSC
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	449.420	121.267	26,98	TSSK
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	131.197	34.479	26,28	TSSK
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	108.732	30.996	28,51	TSSK
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	132.348	14.760	11,15	TSSSK
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	115.620	14.268	12,34	TSSSK
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	129.474	26.150	20,20	TSSSK
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	297.913	54.371	18,25	TSSSK
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	100.368	22.632	22,55	TSSSK
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	150.060	28.044	18,69	TSSSK
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	29.948	19.220	64,18	TSSSB
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	121.558	32.378	26,64	TSSK
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	98.638	24.734	25,08	TSSK
155	Papua	Kab. Jayawijaya	224.956	20.654	9,18	TSSSK
156	Papua	Kab. Mimika	20.264	11.920	58,82	TSSB

Sumber : Susenas Kor 2002, BPS Pusat

Keterangan :

TSS : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Tenaga Kerja Berpendidikan SLTP

Dibelakang **TSS** - **SB** : Sangat Banyak

B : Banyak

C : Cukup

K : Kurang

SK : Sangat Kurang

Rata-rata	41,62	
Stand. Dev	18,77	
TSSSB	60,40	
TSSB	51,01	60,40
TSSC	32,24	51,01
TSSK	32,24	22,85
TSSSK	22,85	

Lampiran 4.3.3.1.2.B. Indikator Tenaga Kerja Berijazah SLTP Berpengalaman

No.	Propinsi	Kota	Total Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Minimal SLTP	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	103.649	57.486	55,46	TSSB
2	Sumatera Utara	Kota Medan	675.896	580.957	85,95	TSSSB
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	99.294	71.422	71,93	TSSSB
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	47.905	23.517	49,09	TSSC
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	37.453	33.969	90,70	TSSSB
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	47.905	24.388	50,91	TSSC
7	Sumatera Barat	Kota Padang	240.196	193.160	80,42	TSSSB
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	32.704	12.848	39,29	TSSC
9	Riau	Kota Batam	192.387	132.002	68,61	TSSSB
10	Riau	Kota Pekanbaru	388.344	328.033	84,47	TSSSB
11	Riau	Kota Dumai				
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	478.956	322.172	67,27	TSSSB
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	56.924	34.048	59,81	TSSB
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	92.250	73.800	80,00	TSSSB
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	294.712	208.692	70,81	TSSSB
16	Banten	Kota Tangerang	604.488	453.932	75,09	TSSSB
17	Banten	Kota Cilegon	166.484	91.948	55,23	TSSB
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	3.267.526	2.520.344	77,13	TSSSB
19	Jawa Barat	Kota Bandung	851.666	648.566	76,15	TSSSB
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	644.504	479.316	74,37	TSSSB
21	Jawa Barat	Kota Bogor	293.818	196.330	66,82	TSSSB
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	116.444	78.532	67,44	TSSSB
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	90.718	58.222	64,18	TSSSB
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	98.032	49.016	50,00	TSSC
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	700.706	454.512	64,86	TSSSB
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	119.198	50.130	42,06	TSSC
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	232.826	128.110	55,02	TSSB
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	137.256	100.149	72,97	TSSSB
29	Jawa Timur	Kota Kediri	125.580	99.372	79,13	TSSSB
30	Jawa Timur	Kota Malang	354.900	246.792	69,54	TSSSB
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	72.072	38.220	53,03	TSSB
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	55.692	24.024	43,14	TSSC
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	1.176.084	869.232	73,91	TSSSB
34	Jawa Timur	Kota Madiun	44.772	38.220	85,37	TSSSB
35	Bali	Kota Denpasar	336.069	248.940	74,07	TSSSB
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	140.149	108.889	77,70	TSSSB
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	212.725	150.376	70,69	TSSSB
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	62.976	40.344	64,06	TSSSB
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	136.776	114.636	83,81	TSSSB
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	46.302	25.998	56,15	TSSB
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	56.086	45.288	80,75	TSSSB
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	37.553	31.161	82,98	TSSSB
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	116.232	64.128	55,17	TSSB
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	102.813	74.695	72,65	TSSSB

Sumber : Susenas Kor 2002, BPS Pusat

Keterangan :

TSS : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Tenaga Kerja Berpendidikan SLTP

Dibelakang **TSS** - **SB** : Sangat Banyak

B : Banyak

C : Cukup

K : Kurang

SK : Sangat Kurang

Rata-rata	41,62	
Stand. Dev	18,77	
TSSSB	60,40	
TSSB	51,01	60,40
TSSC	32,24	51,01
TSSK	32,24	22,85
TSSSK	22,85	

Lampiran 4.3.3.1.3.A. Indikator Rasio Pencari Kerja Terhadap Angkatan Kerja

No.	Propinsi	Kabupaten	Pencari Kerja	Angkatan Kerja	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	38.977	455.056	8,57	TSCC
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	1.884	190.918	0,99	TSCSK
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	130.195	896.283	14,53	TSCSB
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	74.186	405.930	18,28	TSCSB
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	49.514	377.859	13,10	TSCB
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	1.013	162.497	0,62	TSCSK
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	28.667	448.466	6,39	TSCC
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	16.208	215.769	7,51	TSCC
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	21.464	140.072	15,32	TSCSB
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	5.840	141.328	4,13	TSCK
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	17.984	270.336	6,65	TSCC
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	8.760	189.216	4,63	TSCK
13	Riau	Kab. Bengkalis	29.594	232.617	12,72	TSCB
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	6.824	144.427	4,72	TSCK
15	Riau	Kab. Kampar	7.532	122.014	6,17	TSCK
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	27.827	245.560	11,33	TSCC
17	Riau	Kab. Pelalawan	0	30.708		
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	7.590	202.092	3,76	TSCK
19	Jambi	Kab. Batanghari	7.754	88.869	8,73	TSCC
20	Jambi	Kab. Bungo	1.512	100.824	1,50	TSCSK
21	Jambi	Kab. Kerinci	6.648	159.078	4,18	TSCK
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	12.117	82.929	14,61	TSCSB
23	Jambi	Kab. Tebo	5.211	108.273	4,81	TSCK
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	32.567	448.479	7,26	TSCC
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	22.018	665.216	3,31	TSCSK
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	38.318	382.464	10,02	TSCC
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	33.547	457.272	7,34	TSCC
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	22.986	288.470	7,97	TSCC
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	7.202	274.940	2,62	TSCSK
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	8.024	84.234	9,53	TSCC
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	9.159	170.223	5,38	TSCK
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	10.439	207.977	5,02	TSCK
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	62.887	565.026	11,13	TSCC
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	29.436	499.774	5,89	TSCK
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	19.052	229.042	8,32	TSCC
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	320.394	1.993.538	16,07	TSCSB
37	Lampung	Kab. Way Kanan	4.818	165.418	2,91	TSCSK
38	Banten	Kab. Lebak	63.600	498.624	12,76	TSCB
39	Banten	Kab. Serang	96.708	744.852	12,98	TSCB
40	Banten	Kab. Tangerang	185.448	1.166.232	15,90	TSCSB
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	113.695	839.576	13,54	TSCB
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	235.557	1.462.090	16,11	TSCSB
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	68.464	813.020	8,42	TSCC
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	118.394	979.734	12,08	TSCB
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	116.108	680.566	17,06	TSCSB
46	Jawa Barat	Kab. Garut	110.905	886.984	12,50	TSCB
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	65.883	761.861	8,65	TSCC
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	126.983	837.556	15,16	TSCSB
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	53.738	435.281	12,35	TSCB
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	35.501	364.701	9,73	TSCC
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	113.359	923.628	12,27	TSCB
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	55.473	404.520	13,71	TSCB
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	109.381	1.084.291	10,09	TSCC
54	Jawa Barat	Kab. Subang	48.322	665.555	7,26	TSCC
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	16.710	510.212	3,28	TSCSK
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	30.078	573.710	5,24	TSCK

No.	Propinsi	Kabupaten	Pencari Kerja	Angkatan Kerja	Rasio	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	28.964	506.870	5,71	TSCK
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	28.964	464.538	6,24	TSCK
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	13.368	427.776	3,13	TSCSK
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	76.866	609.358	12,61	TSCB
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	71.296	716.302	9,95	TSCC
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	17.824	489.046	3,64	TSCK
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	72.410	792.054	9,14	TSCC
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	11.140	456.740	2,44	TSCSK
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	18.938	416.636	4,55	TSCK
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	36.762	599.332	6,13	TSCK
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	27.850	470.108	5,92	TSCK
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	25.622	640.550	4,00	TSCK
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	23.761	461.720	5,15	TSCK
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	8.340	408.382	2,04	TSCSK
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	29.967	355.152	8,44	TSCC
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	32.025	786.009	4,07	TSCK
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	27.657	544.131	5,08	TSCK
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	36.414	770.889	4,72	TSCK
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	27.510	348.411	7,90	TSCC
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	27.615	461.181	5,99	TSCK
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	16.569	410.550	4,04	TSCK
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	48.657	811.881	5,99	TSCK
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	78.855	861.882	9,15	TSCC
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	6.636	344.883	1,92	TSCSK
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	41.769	505.365	8,27	TSCC
82	Jawa Timur	Kab. Jember	61.593	1.051.008	5,86	TSCK
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	38.577	550.956	7,00	TSCC
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	25.473	612.948	4,16	TSCK
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	39.984	524.937	7,62	TSCC
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	25.305	494.613	5,12	TSCK
87	Bali	Kab. Badung	15.764	194.620	8,10	TSCC
88	Bali	Kab. Bangli	1.227	135.910	0,90	TSCSK
89	Bali	Kab. Buleleng	11.154	282.285	3,95	TSCK
90	Bali	Kab. Gianyar	3.993	223.081	1,79	TSCSK
91	Bali	Kab. Jembrana	7.518	136.659	5,50	TSCK
92	Bali	Kab. Tabanan	6.752	232.158	2,91	TSCSK
93	Bali	Kab. Karangasem	5.369	214.580	2,50	TSCSK
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	6.424	120.304	5,34	TSCK
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	36.517	265.774	13,74	TSCB
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	37.936	396.064	9,58	TSCC
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	14.465	217.707	6,64	TSCC
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	16.936	248.784	6,81	TSCC
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	6.172	101.080	6,11	TSCK
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	553	59.179	0,93	TSCSK
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	16.768	288.137	5,82	TSCK
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	7.358	115.150	6,39	TSCC
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	29.119	147.690	19,72	TSCSB
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	7.348	136.911	5,37	TSCK
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	2.728	98.925	2,76	TSCSK
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	12.431	165.114	7,53	TSCC
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	3.241	64.357	5,04	TSCK
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	4.957	74.988	6,61	TSCC
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	22.530	184.854	12,19	TSCB
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	7.510	121.641	6,17	TSCK
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	5.344	64.389	8,30	TSCC
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	588	37.840	1,55	TSCSK

No.	Propinsi	Kabupaten	Pencari Kerja	Angkatan Kerja	Rasio	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	1.176	41.748	2,82	TSCSK
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	29.796	339.095	8,79	TSCC
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	9.486	125.953	7,53	TSCC
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	23.094	191.316	12,07	TSCB
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	7.296	155.547	4,69	TSCK
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	7.032	67.209	10,46	TSCC
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	43.152	435.612	9,91	TSCC
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	4.890	83.619	5,85	TSCK
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	5.868	86.553	6,78	TSCC
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	22.528	242.333	9,30	TSCC
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	8.111	170.237	4,76	TSCK
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	10.882	137.636	7,91	TSCC
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	1.981	56.364	3,51	TSCSK
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	21.350	134.078	15,92	TSCSB
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	13.334	137.995	9,66	TSCC
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	18.293	180.970	10,11	TSCC
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	10.497	104.883	10,01	TSCC
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	13.664	44.408	30,77	TSCSB
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	44.272	337.970	13,10	TSCB
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	7.686	112.728	6,82	TSCC
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	42.729	229.787	18,60	TSCSB
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	5.124	117.852	4,35	TSCK
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	25.620	228.872	11,19	TSCC
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	16.805	146.755	11,45	TSCC
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	4.270	45.262	9,43	TSCC
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	0	65.758		
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	10.248	97.356	10,53	TSCC
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	20.111	257.324	7,82	TSCC
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	10.632	321.398	3,31	TSCSK
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	9.573	133.467	7,17	TSCC
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	31.244	480.664	6,50	TSCC
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	5.729	136.926	4,18	TSCK
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	2.460	111.192	2,21	TSCSK
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	3.444	135.792	2,54	TSCSK
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	492	116.112	0,42	TSCSK
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	5.202	134.676	3,86	TSCK
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	11.073	308.986	3,58	TSCSK
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1.968	102.336	1,92	TSCSK
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	5.904	155.964	3,79	TSCK
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	1.882	31.830	5,91	TSCK
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	3.168	124.726	2,54	TSCSK
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	4.768	103.406	4,61	TSCK
155	Papua	Kab. Jayawijaya	4.226	229.182	1,84	TSCSK
156	Papua	Kab. Mimika	3.576	23.840	15,00	TSCSB

Sumber : Susenas Kor 2002, BPS Pusat

Keterangan :

TSC : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Pencari Kerja

Dibelakang **TSC** - **SB** : Sangat Banyak

B : Banyak

C : Cukup

K : Kurang

SK : Sangat Kurang

Rata-Rata	9,09	
Stand. Dev	5,43	
TSCSB	14,52	
TSCB	11,80	14,52
TSCC	6,37	11,80
TSCK	6,37	3,66
TSCSK	3,66	

Lampiran 4.3.3.1.3.B. Indikator Rasio Pencari Kerja Terhadap Angkatan Kerja

No.	Propinsi	Kota	Pencari Kerja	Angkatan Kerja	Rasio	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	7.839	111.488	7,03	TSCC
2	Sumatera Utara	Kota Medan	143.715	819.611	17,53	TSCSB
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	8.710	108.004	8,06	TSCC
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	4.355	41.808	10,42	TSCC
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	10.452	58.357	17,91	TSCSB
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	10.452	58.357	17,91	TSCSB
7	Sumatera Barat	Kota Padang	57.892	298.088	19,42	TSCSB
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	5.840	38.544	15,15	TSCSB
9	Riau	Kota Batam	11.776	204.163	5,77	TSCK
10	Riau	Kota Pekanbaru	60.311	448.655	13,44	TSCB
11	Riau	Kota Dumai				
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	81.260	560.216	14,51	TSCSB
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	6.916	63.840	10,83	TSCC
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	12.915	105.165	12,28	TSCB
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	62.832	357.544	17,57	TSCSB
16	Banten	Kota Tangerang	74.712	679.200	11,00	TSCC
17	Banten	Kota Cilegon	42.712	209.196	20,42	TSCSB
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	549.356	3.816.882	14,39	TSCB
19	Jawa Barat	Kota Bandung	151.648	1.003.314	15,11	TSCSB
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	81.240	725.744	11,19	TSCC
21	Jawa Barat	Kota Bogor	75.824	369.642	20,51	TSCSB
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	27.080	143.524	18,87	TSCSB
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	18.956	109.674	17,28	TSCSB
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	8.912	106.944	8,33	TSCC
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	93.576	794.282	11,78	TSCB
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	14.482	133.680	10,83	TSCC
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	24.508	257.334	9,52	TSCC
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	11.970	149.226	8,02	TSCC
29	Jawa Timur	Kota Kediri	18.564	144.144	12,88	TSCB
30	Jawa Timur	Kota Malang	41.496	396.396	10,47	TSCC
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	13.104	85.176	15,38	TSCSB
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	8.736	64.428	13,56	TSCB
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	114.660	1.290.744	8,88	TSCC
34	Jawa Timur	Kota Madiun	12.012	56.784	21,15	TSCSB
35	Bali	Kota Denpasar	31.348	367.417	8,53	TSCC
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	43.243	183.392	23,58	TSCSB
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	29.124	241.849	12,04	TSCB
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	16.728	79.704	20,99	TSCSB
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	24.600	161.376	15,24	TSCSB
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	17.652	63.954	27,60	TSCSB
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	11.871	67.957	17,47	TSCSB
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	7.990	45.543	17,54	TSCSB
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	18.036	134.268	13,43	TSCB
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	15.995	118.808	13,46	TSCB

Sumber : Susenas Kor 2002, BPS Pusat

Keterangan :

TSC : Tenaga Kerja - Ketersediaan - Pencari Kerja

Dibelakang **TSC** - **SB** : Sangat Banyak

B : Banyak

C : Cukup

K : Kurang

SK : Sangat Kurang

Rata-Rata	9,09	
Stand. Dev	5,43	
TSCSB	14,52	
TSCB	11,80	14,52
TSCC	6,37	11,80
TSCK	6,37	3,66
TSCSK	3,66	

Lampiran 4.3.3.2. Variabel Biaya Tenaga Kerja

Lampiran 4.3.3.2.1.A. Indikator Biaya Tenaga Kerja Berdasarkan Aturan Formal

No.	Propinsi	Kabupaten	UMP/K 2002	UMP/K 2003	Rata-rata UMP/K 2003	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	-	549.549	549.549	TBRST
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	-	549.549	549.549	TBRST
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	510.400	549.549	549.549	TBRST
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	510.400	549.549	549.549	TBRST
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	510.400	549.549	549.549	TBRST
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	-	549.549	549.549	TBRST
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	-	549.549	549.549	TBRST
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	501.120	549.549	549.549	TBRST
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	385.000	435.000	435.000	TBRSD
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	385.000	435.000	435.000	TBRSD
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	385.000	435.000	435.000	TBRSD
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	385.000	435.000	435.000	TBRSD
13	Riau	Kab. Bengkalis	394.000	437.500	437.500	TBRSD
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	394.000	437.500	437.500	TBRSD
15	Riau	Kab. Kampar	394.000	437.500	437.500	TBRSD
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	394.000	437.500	437.500	TBRSD
17	Riau	Kab. Pelalawan	405.000	405.000	405.000	TBRSD
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	394.000	437.500	437.500	TBRSD
19	Jambi	Kab. Batanghari	304.000	390.000	390.000	TBRR
20	Jambi	Kab. Bungo	304.000	390.000	390.000	TBRR
21	Jambi	Kab. Kerinci	304.000	390.000	390.000	TBRR
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	304.000	390.000	390.000	TBRR
23	Jambi	Kab. Tebo	304.000	390.000	390.000	TBRR
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	331.500	403.500	472.494	TBRSD
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	331.500	403.500	472.494	TBRSD
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	331.500	403.500	472.494	TBRSD
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	331.500	403.500	472.494	TBRSD
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	331.500	403.500	472.494	TBRSD
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	-	393.254	393.254	TBRSD
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	-	396.750	396.750	TBRSD
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	295.000	330.000	330.000	TBRSR
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	310.000	350.000	350.000	TBRSR
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	310.000	350.000	350.000	TBRSR
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	310.000	350.000	350.000	TBRSR
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	310.000	350.000	350.000	TBRSR
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	470.500	537.500	537.500	TBRST
37	Lampung	Kab. Way Kanan	310.000	350.000	350.000	TBRSR
38	Banten	Kab. Lebak	-	475.000	475.000	TBRT
39	Banten	Kab. Serang	-	606.000	606.000	TBRST
40	Banten	Kab. Tangerang	590.000	628.675	628.675	TBRST
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	575.500	631.000	631.000	TBRST
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	576.169	600.944	600.944	TBRST
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	283.500	337.000	337.000	TBRSR
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	300.000	330.000	346.625	TBRSR
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	340.000	370.000	370.000	TBRR
46	Jawa Barat	Kab. Garut	285.000	330.000	330.000	TBRSR
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	331.200	420.000	420.000	TBRSD
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	530.015	585.000	585.000	TBRST
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	281.000	325.000	325.000	TBRSR
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	485.000	524.000	524.000	TBRST
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	281.000	321.000	352.365	TBRR
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	470.000	537.000	537.000	TBRST
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	290.000	345.000	345.000	TBRSR
54	Jawa Barat	Kab. Subang	350.000	405.000	405.000	TBRSD
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	330.000	377.500	377.500	TBRR
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	320.200	362.000	362.000	TBRR

No.	Propinsi	Kabupaten	UMP/K 2002	UMP/K 2003	Rata-rata UMP/K 2003	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	322.800	375.000	375.000	TBRR
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	336.150	380.000	380.000	TBRR
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	327.900	370.500	370.500	TBRR
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	321.700	365.000	365.000	TBRR
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	324.000	372.600	372.600	TBRR
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	316.500	357.500	357.500	TBRR
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	321.700	360.000	360.000	TBRR
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	332.250	376.000	376.000	TBRR
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	328.100	375.000	375.000	TBRR
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	317.550	358.000	358.000	TBRR
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	336.250	384.000	384.000	TBRR
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	324.300	348.800	348.800	TBRSR
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	321.750	360.000	360.000	TBRR
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	321.750	360.000	360.000	TBRR
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	330.000	390.000	390.000	TBRR
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	267.500	319.400	319.400	TBRSR
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	267.950	295.000	295.000	TBRSR
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	361.250	415.000	415.000	TBRSD
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	260.000	292.500	292.500	TBRSR
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	443.000	497.100	497.100	TBRT
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	300.000	400.000	400.000	TBRSD
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	453.000	430.000	430.000	TBRSD
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	453.000	516.500	516.500	TBRST
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	250.000	300.000	300.000	TBRSR
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	453.000	516.500	516.500	TBRST
82	Jawa Timur	Kab. Jember	315.500	384.000	384.000	TBRR
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	304.512	398.000	398.000	TBRSD
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	273.737	328.450	328.450	TBRSR
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	252.000	282.000	282.000	TBRSR
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	290.000	332.500	332.500	TBRSR
87	Bali	Kab. Badung	385.000	430.000	430.000	TBRSD
88	Bali	Kab. Bangli	341.000	410.000	410.000	TBRSD
89	Bali	Kab. Buleleng	341.000	410.000	410.000	TBRSD
90	Bali	Kab. Gianyar	345.000	423.000	423.000	TBRSD
91	Bali	Kab. Jembrana	341.000	417.500	417.500	TBRSD
92	Bali	Kab. Tabanan	341.000	410.000	410.000	TBRSD
93	Bali	Kab. Karangasem	341.000	410.000	410.000	TBRSD
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	380.000	400.000	400.000	TBRSD
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	380.000	400.000	400.000	TBRSD
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	380.000	400.000	400.000	TBRSD
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	380.000	400.000	400.000	TBRSD
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	380.000	400.000	400.000	TBRSD
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	362.000	425.000	452.763	TBRSD
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	362.000	425.000	425.000	TBRSD
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	362.000	425.000	425.000	TBRSD
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	362.000	425.000	425.000	TBRSD
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	362.000	425.000	425.000	TBRSD
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	362.000	425.000	425.000	TBRSD
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	377.500	425.000	459.172	TBRSD
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	377.500	425.000	425.000	TBRSD
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	377.500	425.000	425.000	TBRSD
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	500.000	540.000	618.333	TBRST
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	500.000	540.000	540.000	TBRST
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	500.000	540.000	540.000	TBRST
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	500.000	540.000	540.000	TBRST
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	500.000	540.000	540.000	TBRST

No.	Propinsi	Kabupaten	UMP/K 2002	UMP/K 2003	Rata-rata UMP/K 2003	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	500.000	540.000	540.000	TBRST
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	438.000	495.000	495.000	TBRT
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	438.000	495.000	495.000	TBRT
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	375.000	410.000	410.000	TBRSD
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	350.000	410.000	410.000	TBRSD
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	350.000	410.000	410.000	TBRSD
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	350.000	410.000	410.000	TBRSD
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	350.000	410.000	410.000	TBRSD
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	350.000	410.000	410.000	TBRSD
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	375.000	415.000	405.000	TBRSD
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	375.000	415.000	405.000	TBRSD
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	375.000	415.000	415.000	TBRSD
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	375.000	415.000	415.000	TBRSD
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	375.000	415.000	415.000	TBRSD
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	375.000	415.000	415.000	TBRSD
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	375.000	415.000	415.000	TBRSD
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	375.000	415.000	415.000	TBRSD
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	375.000	415.000	415.000	TBRSD
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	375.000	415.000	415.000	TBRSD
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	375.000	415.000	415.000	TBRSD
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	375.000	415.000	415.000	TBRSD
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	375.000	415.000	415.000	TBRSD
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	375.000	415.000	415.000	TBRSD
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	375.000	415.000	415.000	TBRSD
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	375.000	415.000	415.000	TBRSD
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	375.000	415.000	415.000	TBRSD
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	375.000	415.000	415.000	TBRSD
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	320.000	375.000	375.000	TBRR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	320.000	375.000	375.000	TBRR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	320.000	375.000	375.000	TBRR
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	320.000	375.000	375.000	TBRR
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	330.000	-	330.000	TBRSR
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	330.000	-	330.000	TBRSR
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	330.000	-	330.000	TBRSR
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	330.000	-	330.000	TBRSR
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	330.000	-	330.000	TBRSR
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	330.000	-	330.000	TBRSR
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	330.000	-	330.000	TBRSR
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	330.000	-	330.000	TBRSR
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	530.000	-	530.000	TBRST
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	530.000	-	530.000	TBRST
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	530.000	-	530.000	TBRST
155	Papua	Kab. Jayawijaya	530.000	-	530.000	TBRST
156	Papua	Kab. Mimika	530.000	-	530.000	TBRST

Keterangan :

TBR : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Formal

Dibelakang **TBR** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	433.258	
Stand. Dev	81.446	
TBRST	514.704	
TBRT	473.981	514.704
TBRSD	392.535	473.981
TBRR	392.535	351.812
TBRSR	351.812	

Lampiran 4.3.3.2.1.B. Indikator Biaya Tenaga Kerja Berdasarkan Aturan Formal

No.	Propinsi	Kota	UMP/K 2002	UMP/K 2003	Rata-rata UMP/K 2003	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	487.200	549.549	549.549	TBRST
2	Sumatera Utara	Kota Medan	510.400	549.549	549.549	TBRST
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	496.480	549.549	549.549	TBRST
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	510.400	549.549	549.549	TBRST
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	496.480	549.549	549.549	TBRST
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	491.840	535.300	549.549	TBRST
7	Sumatera Barat	Kota Padang	385.000	435.000	435.000	TBRSD
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	385.000	435.000	435.000	TBRSD
9	Riau	Kota Batam	-	555.000	621.667	TBRST
10	Riau	Kota Pekanbaru	394.000	437.500	437.500	TBRSD
11	Riau	Kota Dumai	394.000	437.500	437.500	TBRSD
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	331.500	403.500	472.494	TBRSD
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	-	405.272	405.272	TBRSD
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	295.000	330.000	330.000	TBRSR
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	310.000	350.000	350.000	TBRSR
16	Banten	Kota Tangerang	590.000	628.675	628.675	TBRST
17	Banten	Kota Cilegon	-	635.000	635.000	TBRST
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	591.266	631.554	631.554	TBRST
19	Jawa Barat	Kota Bandung	471.000	538.000	538.000	TBRST
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	575.500	631.000	631.000	TBRST
21	Jawa Barat	Kota Bogor	576.169	576.169	576.169	TBRST
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	315.000	375.000	375.000	TBRR
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	310.000	395.500	395.500	TBRSD
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	332.850	375.000	375.000	TBRR
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	343.250	400.000	400.000	TBRSD
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	326.900	364.000	364.000	TBRR
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	333.300	378.000	378.000	TBRR
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	321.750	360.000	360.000	TBRR
29	Jawa Timur	Kota Kediri	361.250	415.000	415.000	TBRSD
30	Jawa Timur	Kota Malang	443.000	497.100	497.100	TBRT
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	415.000	478.500	478.500	TBRT
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	400.000	445.000	445.000	TBRSD
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	453.200	516.750	516.750	TBRST
34	Jawa Timur	Kota Madiun	260.000	305.000	305.000	TBRSR
35	Bali	Kota Denpasar	385.000	427.500	427.500	TBRSD
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	500.000	540.000	540.000	TBRST
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	500.000	540.000	540.000	TBRST
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	438.000	495.000	495.000	TBRT
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	438.000	495.000	495.000	TBRT
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	375.000	410.000	410.000	TBRSD
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	375.000	415.000	405.000	TBRSD
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	375.000	415.000	415.000	TBRSD
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	320.000	375.000	375.000	TBRR
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	330.000	-	330.000	TBRSR

Keterangan :

TBR : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Formal

Dibelakang **TBR** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	433.258	
Stand. Dev	81.446	
TBRST	514.704	
TBRT	473.981	514.704
TBRSD	392.535	473.981
TBRR	392.535	351.812
TBRSR	351.812	

Lampiran 4.3.3.2.2.A. Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual

No.	Propinsi	Kabupaten	Rata-Rata Upah Tenaga Kerja	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	534.241	TBDR
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	396.021	TBDSR
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	628.436	TBDSD
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	757.476	TBDSD
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	567.503	TBDSD
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	629.273	TBDSD
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	565.238	TBDSD
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	756.040	TBDSD
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	740.510	TBDSD
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	656.508	TBDSD
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	442.234	TBDSR
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	595.909	TBDSD
13	Riau	Kab. Bengkalis	765.977	TBDSD
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	1.101.269	TBDST
15	Riau	Kab. Kampar	1.302.388	TBDST
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	741.085	TBDSD
17	Riau	Kab. Pelalawan		
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	774.719	TBDSD
19	Jambi	Kab. Batanghari	592.057	TBDSD
20	Jambi	Kab. Bungo	527.656	TBDR
21	Jambi	Kab. Kerinci	494.978	TBDR
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	774.722	TBDSD
23	Jambi	Kab. Tebo	566.881	TBDSD
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	733.395	TBDSD
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	535.138	TBDR
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	605.418	TBDSD
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	533.509	TBDR
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	414.919	TBDSR
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	761.989	TBDSD
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	396.036	TBDSR
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	549.784	TBDR
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	501.111	TBDR
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	550.754	TBDR
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	634.808	TBDSD
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	582.171	TBDSD
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	724.798	TBDSD
37	Lampung	Kab. Way Kanan	561.281	TBDSD
38	Banten	Kab. Lebak	467.571	TBDR
39	Banten	Kab. Serang	627.816	TBDSD
40	Banten	Kab. Tangerang	764.928	TBDSD
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	731.960	TBDSD
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	698.264	TBDSD
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	405.505	TBDSR
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	426.255	TBDSR
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	627.695	TBDSD
46	Jawa Barat	Kab. Garut	548.554	TBDR
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	693.406	TBDSD
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	731.820	TBDSD
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	467.056	TBDR
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	879.761	TBDT
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	494.275	TBDR
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	695.973	TBDSD
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	479.003	TBDR
54	Jawa Barat	Kab. Subang	411.953	TBDSR
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	532.479	TBDR
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	444.096	TBDR

No.	Propinsi	Kabupaten	Rata-Rata Upah Tenaga Kerja	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	632.657	TBDS
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	466.898	TBDR
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	549.617	TBDR
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	453.446	TBDR
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	526.106	TBDR
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	511.230	TBDR
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	824.130	TBDT
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	527.636	TBDR
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	454.148	TBDR
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	717.227	TBDS
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	502.056	TBDR
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	452.198	TBDR
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	482.848	TBDR
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	451.005	TBDR
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	529.756	TBDR
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	370.399	TBDS
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	403.443	TBDS
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	548.982	TBDR
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	768.446	TBDS
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	574.296	TBDS
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	454.321	TBDR
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	460.010	TBDR
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	766.859	TBDS
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	277.109	TBDS
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	553.408	TBDR
82	Jawa Timur	Kab. Jember	495.096	TBDR
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	537.588	TBDR
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	468.712	TBDR
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	431.290	TBDS
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	453.954	TBDR
87	Bali	Kab. Badung	684.704	TBDS
88	Bali	Kab. Bangli	614.459	TBDS
89	Bali	Kab. Buleleng	632.985	TBDS
90	Bali	Kab. Gianyar	511.559	TBDR
91	Bali	Kab. Jembrana	568.229	TBDS
92	Bali	Kab. Tabanan	674.888	TBDS
93	Bali	Kab. Karangasem	621.044	TBDS
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	857.292	TBDT
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	735.687	TBDS
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	708.450	TBDS
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	574.867	TBDS
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	729.815	TBDS
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	716.922	TBDS
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1.356.154	TBDST
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	763.024	TBDS
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	666.663	TBDS
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	510.555	TBDR
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	408.770	TBDS
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	826.341	TBDT
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	613.729	TBDS
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	408.333	TBDS
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1.136.125	TBDST
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	935.114	TBDST
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	858.558	TBDT
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	773.351	TBDS
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	1.710.993	TBDST

No.	Propinsi	Kabupaten	Rata-Rata Upah Tenaga Kerja	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	639.929	TBDSD
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	766.292	TBDSD
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	604.611	TBDSD
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	436.577	TBDSR
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	454.150	TBDR
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	794.270	TBDT
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	549.393	TBDR
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	481.200	TBDR
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	513.885	TBDR
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	573.206	TBDSD
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	616.363	TBDSD
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	529.752	TBDR
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	415.200	TBDSR
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	904.490	TBDST
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	933.904	TBDST
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	584.822	TBDSD
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	511.594	TBDR
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	593.833	TBDSD
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	689.635	TBDSD
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	1.072.143	TBDST
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	740.479	TBDSD
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	546.783	TBDR
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	526.290	TBDR
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	821.447	TBDT
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	305.556	TBDSR
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	448.333	TBDR
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	417.741	TBDSR
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	529.222	TBDR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	496.475	TBDR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	535.703	TBDR
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	338.986	TBDSR
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	621.727	TBDSD
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	656.175	TBDSD
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	1.347.450	TBDST
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	403.513	TBDSR
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	741.934	TBDSD
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	580.931	TBDSD
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	545.650	TBDR
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	371.890	TBDSR
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	1.091.307	TBDST
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	1.005.937	TBDST
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	953.478	TBDST
155	Papua	Kab. Jayawijaya	763.324	TBDSD
156	Papua	Kab. Mimika	1.164.121	TBDST

Keterangan :

TBD : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Aktual

Dibelakang **TBD** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	664.456	
Stand. Dev	221.777	
TBDST	886.233	
TBDT	775.345	886.233
TBDSD	553.567	775.345
TBDR	553.567	442.679
TBDSR	442.679	

Lampiran 4.3.3.2.2.B. Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual

No.	Propinsi	Kabupaten	Rata-Rata Upah Tenaga Kerja	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	770.069	TBDSD
2	Sumatera Utara	Kota Medan	870.927	TBDT
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	654.326	TBDSD
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	1.260.000	TBDST
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	621.175	TBDSD
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	552.393	TBDR
7	Sumatera Barat	Kota Padang	827.983	TBDT
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	504.775	TBDR
9	Riau	Kota Batam	756.678	TBTSD
10	Riau	Kota Pekanbaru	1.105.306	TBDST
11	Riau	Kota Dumai		
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	972.464	TBDST
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	900.207	TBDST
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	703.469	TBDSD
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	641.392	TBDSD
16	Banten	Kota Tangerang	1.249.789	TBDST
17	Banten	Kota Cilegon	842.021	TBDT
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	936.428	TBDST
19	Jawa Barat	Kota Bandung	872.624	TBDT
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	1.466.794	TBDST
21	Jawa Barat	Kota Bogor	883.189	TBDT
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	580.562	TBDSD
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	542.214	TBDR
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	598.643	TBDSD
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	690.734	TBDSD
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	462.464	TBDR
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	781.507	TBDT
28	DI. Yogyakarta	Kota Jogjakarta	670.654	TBDSD
29	Jawa Timur	Kota Kediri	602.615	TBDSD
30	Jawa Timur	Kota Malang	942.109	TBDST
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	499.346	TBDR
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	435.115	TBDSR
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	651.222	TBDSD
34	Jawa Timur	Kota Madiun	1.069.119	TBDST
35	Bali	Kota Denpasar	1.164.585	TBDST
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1.036.219	TBDST
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	949.317	TBDST
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	979.378	TBDST
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	1.161.455	TBDST
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	625.518	TBDSD
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	590.913	TBDSD
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	1.100.146	TBDST
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	656.742	TBDSD
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	530.695	TBDR

Keterangan :

TBD : Tenaga Kerja - Biaya Tenaga Kerja - Biaya Aktual
Dibelakang **TBD** - **ST** : Sangat Tinggi
T : Tinggi
SD : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

Rata-rata	664.456	
Stand. Dev	221.777	
TBDST	886.233	
TBDT	775.345	886.233
TBDSD	553.567	775.345
TBDR	553.567	442.679
TBDSR	442.679	

Lampiran 4.3.3.3.A. Indikator Produktivitas Tenaga Kerja

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai Tambah Industri (Juta Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja Industri (Orang)	Produktivitas	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kab. Asahan	3.734.722,02	35.209	106.072.936	TPPST
2	Sumatera Utara	Kab. Dairi	5.184,40	3.484	1.488.060	TPPSR
3	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	2.780.396,33	103.393	26.891.534	TPPSD
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	585.010,87	27.086	21.598.275	TPPR
5	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	721.599,60	26.338	27.397.661	TPPSD
6	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	31.228,45	2.613	11.951.186	TPPR
7	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	3.320.326,64	14.040	236.490.501	TPPST
8	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	13.690,27	1.013	13.514.580	TPPR
9	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	173.853,55	1.716	101.313.258	TPPST
10	Sumatera Barat	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	96.732,61	5.840	16.563.803	TPPR
11	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	120.325,36	5.756	20.904.336	TPPR
12	Sumatera Barat	Kab. Solok	148.646,46	1.752	84.843.870	TPPST
13	Riau	Kab. Bengkalis	179.547,57	17.591	10.206.786	TPPR
14	Riau	Kab. Indragiri Hilir	259.648,48	24.006	10.815.983	TPPR
15	Riau	Kab. Kampar	87.663,36	19.593	4.474.218	TPPSR
16	Riau	Kab. Kuantan Singingi	59.329,78	6.824	8.694.282	TPPR
17	Riau	Kab. Pelalawan	157.600,08	30.122	5.232.094	TPPSR
18	Riau	Kab. Rokan Hulu	53.211,31	7.355	7.234.712	TPPR
19	Jambi	Kab. Batanghari	138.005,74	2.091	65.999.876	TPPT
20	Jambi	Kab. Bungo	45.469,51	5.061	8.984.294	TPPR
21	Jambi	Kab. Kerinci	51.690,60	4.836	10.688.710	TPPR
22	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	137.813,49	3.324	41.460.135	TPPSD
23	Jambi	Kab. Tebo	18.971,46	10.422	1.820.328	TPPSR
24	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	153.907,00	10.540	14.602.182	TPPR
25	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	286.322,00	42.112	6.799.060	TPPR
26	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	194.946,00	14.382	13.554.860	TPPR
27	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Kemiling Ilir	334.375,00	43.122	7.754.163	TPPR
28	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	196.588,00	956	205.635.983	TPPST
29	Bangka Belitung	Kab. Bangka	1.408.048,00	9.394	149.888.014	TPPST
30	Bangka Belitung	Kab. Belitung	279.643,00	5.120	54.617.773	TPPT
31	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	11.252,00	3.609	3.117.761	TPPSR
32	Lampung	Kab. Lampung Barat	28.616,00	1.310	21.844.275	TPPR
33	Lampung	Kab. Lampung Selatan	438.812,00	44.561	9.847.445	TPPR
34	Lampung	Kab. Lampung Timur	192.548,00	51.480	3.740.249	TPPSR
35	Lampung	Kab. Lampung Utara	73.920,00	7.062	10.467.290	TPPR
36	Jawa Barat	Kab. Bandung	12.972.430,22	487.823	26.592.494	TPPSD
37	Lampung	Kab. Way Kanan	39.320,00			
38	Banten	Kab. Lebak	280.922,62	5.088	55.212.779	TPPT
39	Banten	Kab. Serang	3.645.759,00	120.072	30.363.107	TPPSD
40	Banten	Kab. Tangerang	8.678.171,00	289.300	29.997.134	TPPSD
41	Jawa Barat	Kab. Bekasi	27.034.051,42	213.764	126.466.811	TPPST
42	Jawa Barat	Kab. Bogor	5.601.552,92	256.881	21.806.023	TPPR
43	Jawa Barat	Kab. Ciamis	461.068,61	93.895	4.910.470	TPPSR
44	Jawa Barat	Kab. Cianjur	169.966,69	57.716	2.944.880	TPPSR
45	Jawa Barat	Kab. Cirebon	543.861,67	85.853	6.334.801	TPPR
46	Jawa Barat	Kab. Garut	579.982,64	72.864	7.959.797	TPPR
47	Jawa Barat	Kab. Indramayu	2.859.819,69	68.802	41.565.938	TPPSD
48	Jawa Barat	Kab. Karawang	3.060.027,00	115.557	26.480.672	TPPSD
49	Jawa Barat	Kab. Kuningan	67.477,77	21.326	3.164.108	TPPSR
50	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	2.396.990,22	57.800	41.470.419	TPPSD
51	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1.093.753,10	144.417	7.573.576	TPPR
52	Jawa Barat	Kab. Sumedang	496.485,16	95.417	5.203.320	TPPSR
53	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	530.720,21	149.155	3.558.179	TPPSR
54	Jawa Barat	Kab. Subang	248.595,00	33.174	7.493.670	TPPR
55	Jawa Tengah	Kab. Kendal	1.672.519,77	63.498	26.339.724	TPPSD
56	Jawa Tengah	Kab. Magelang	580.495,90	108.058	5.372.077	TPPSR

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai Tambah Industri (Juta Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja Industri (Orang)	Produktivitas	Intensitas
57	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	901.850,22	106.944	8.432.920	TPPR
58	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	541.677,93	40.104	13.506.830	TPPR
59	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	758.624,97	86.892	8.730.665	TPPR
60	Jawa Tengah	Kab. Tegal	588.900,50	84.664	6.955.737	TPPR
61	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	618.744,42	109.172	5.667.611	TPPSR
62	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	364.563,89	90.234	4.040.205	TPPSR
63	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	9.362.072,33	99.146	94.427.131	TPPST
64	Jawa Tengah	Kab. Jepara	897.941,86	213.888	4.198.187	TPPSR
65	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	1.172.755,49	84.664	13.851.879	TPPR
66	Jawa Tengah	Kab. Klaten	774.790,56	151.504	5.113.994	TPPSR
67	Jawa Tengah	Kab. Kudus	5.832.745,65	176.012	33.138.341	TPPSD
68	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	214.738,35	150.390	1.427.877	TPPSR
69	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	462.233,00	90.536	5.105.516	TPPSR
70	DI. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	297.944,00	22.965	12.973.830	TPPR
71	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	77.156,92	18.921	4.077.846	TPPSR
72	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	265.574,90	57.393	4.627.305	TPPSR
73	Jawa Timur	Kab. Blitar	90.843,38	37.674	2.411.302	TPPSR
74	Jawa Timur	Kab. Kediri	406.287,36	80.472	5.048.804	TPPSR
75	Jawa Timur	Kab. Magetan	143.251,21	15.456	9.268.324	TPPR
76	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	1.003.382,55	105.546	9.506.590	TPPR
77	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	13.147,21	19.908	660.398	TPPSR
78	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	1.351.165,84	215.082	6.282.096	TPPSR
79	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	6.525.148,33	286.860	22.746.804	TPPSD
80	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	91.262,45	29.925	3.049.706	TPPSR
81	Jawa Timur	Kab. Gresik	5.166.875,09	129.507	39.896.493	TPPSD
82	Jawa Timur	Kab. Jember	450.897,90	121.359	3.715.406	TPPSR
83	Jawa Timur	Kab. Jombang	365.738,50	60.480	6.047.264	TPPSR
84	Jawa Timur	Kab. Lamongan	183.099,69	37.737	4.851.994	TPPSR
85	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	162.011,56	78.414	2.066.105	TPPSR
86	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	708.711,72	91.539	7.742.183	TPPR
87	Bali	Kab. Badung	115.399,13	18.277	6.313.899	TPPR
88	Bali	Kab. Bangli	64.492,91	26.956	2.392.525	TPPSR
89	Bali	Kab. Buleleng	230.017,86	26.301	8.745.594	TPPR
90	Bali	Kab. Gianyar	443.901,91	78.678	5.642.008	TPPSR
91	Bali	Kab. Jembrana	92.945,66	26.592	3.495.249	TPPSR
92	Bali	Kab. Tabanan	128.403,68	24.204	5.305.060	TPPSR
93	Bali	Kab. Karangasem	101.192,83	38.713	2.613.924	TPPSR
94	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	15.499,62	584	26.540.449	TPPSD
95	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	301.004,02	37.463	8.034.701	TPPR
96	Kalimantan Barat	Kab. Pontianak	1.975.140,94	39.133	50.472.515	TPPSD
97	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	212.173,32	22.110	9.596.261	TPPR
98	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	621.939,43	3.504	177.494.130	TPPST
99	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	59.682,57	1.659	35.975.027	TPPSD
100	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	59.839,23	1.864	32.102.591	TPPSD
101	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	148.993,33	5.967	24.969.554	TPPSD
102	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	53.809,16	26.744	2.012.009	TPPSR
103	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	60.398,33	11.998	5.034.034	TPPSR
104	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	72.487,80	31.234	2.320.798	TPPSR
105	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	20.593,63	2.738	7.521.415	TPPR
106	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	281.609,59	14.786	19.045.691	TPPR
107	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	19.823,93	5.556	3.568.021	TPPSR
108	Kalimantan Timur	Kab. Berau	365.463,50	8.619	42.402.077	TPPSD
109	Kalimantan Timur	Kab. Kutai	506.180,00	18.265	27.713.113	TPPSD
110	Kalimantan Timur	Kab. Pasir	216.818,76	12.348	17.559.019	TPPR
111	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	87.263,00	1.042	83.745.681	TPPST
112	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	34.467,06	9.378	3.675.310	TPPSR

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai Tambah Industri (Juta Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja Industri (Orang)	Produktivitas	Intensitas
113	Kalimantan Timur	Kab. Nunukan	256,00	588	435.374	TPPSR
114	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	269.863,00	26.210	10.296.185	TPPR
115	Sulawesi Utara	Kab. Sangihe	32.658,00	4.743	6.885.515	TPPR
116	Gorontalo	Kab. Gorontalo	116.818,00	13.254	8.813.792	TPPR
117	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	83.374,35	6.357	13.115.361	TPPR
118	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	59.160,30	7.730	7.653.337	TPPR
119	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	247.035,00	17.208	14.355.823	TPPR
120	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	27.783,44	1.467	18.938.951	TPPR
121	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	81.693,70	1.956	41.765.695	TPPSD
122	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	59.894,87	12.382	4.837.253	TPPSR
123	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	318.115,35	2.306	137.951.149	TPPST
124	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	122.306,91	10.937	11.182.857	TPPR
125	Sulawesi Selatan	Kab. Majene	17.998,96	854	21.076.066	TPPR
126	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	665.945,92	4.270	155.959.232	TPPST
127	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	67.266,44	1.653	40.693.551	TPPSD
128	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	36.374,37	3.416	10.648.235	TPPR
129	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	17.253,31	1.653	10.437.574	TPPR
130	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	22.534,86	2.562	8.795.808	TPPR
131	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	157.211,63	5.978	26.298.366	TPPSD
132	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	24.617,59	1.618	15.214.827	TPPR
133	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	77.081,48	5.978	12.894.192	TPPR
134	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	14.764,28	4.270	3.457.677	TPPSR
135	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	34.006,19	854	39.819.895	TPPSD
136	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	671.623,45	854	786.444.321	TPPST
137	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	18.281,71	2.764	6.614.222	TPPR
138	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	10.936,20	2.127	5.141.608	TPPSR
139	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	58.294,47	854	68.260.504	TPPT
140	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	37.972,42	16.809	2.259.053	TPPSR
141	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	49.973,21	27.569	1.812.660	TPPSR
142	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	20.772,50	9.109	2.280.437	TPPSR
143	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	125.737,02	55.531	2.264.267	TPPSR
144	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	9.483,83	31.595	300.169	TPPSR
145	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	4.937,81	17.712	278.783	TPPSR
146	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Selatan	5.375,64	836	6.430.190	TPPR
147	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timur Tengah Utara	5.714,67	3.936	1.451.898	TPPSR
148	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	7.744,76	15.744	491.918	TPPSR
149	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	7.670,53	10.052	763.085	TPPSR
150	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	8.011,81	3.444	2.326.309	TPPSR
151	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	7.096,45	2.460	2.884.737	TPPSR
152	Irian Jaya Barat	Kab. Fak-Fak	67.483,95	5.960	11.322.810	TPPR
153	Irian Jaya Barat	Kab. Manokwari	59.061,09	3.552	16.627.559	TPPR
154	Irian Jaya Barat	Kab. Sorong	120.091,89	596	201.496.460	TPPST
155	Papua	Kab. Jayawijaya	2.537,01	540	4.698.167	TPPSR
156	Papua	Kab. Mimika	3.330,10	675	4.933.485	TPPSR

Keterangan :

TPP : Tenaga Kerja - Produktivitas - Tenaga Kerja

Dibelakang **TPP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

SD : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah

Rata-rata	37.700.454	(150-9,8Jt)
Stand. Dev	31.386.959	(150-9,8Jt)
TPPST	69.087.413	
TPPT	53.393.933	69.087.413
TPPSD	22.006.975	53.393.933
TPPR	22.006.975	6.313.495
TPPSR	6.313.495	

Lampiran 4.3.3.3.B. Indikator Produktivitas Tenaga Kerja

No.	Propinsi	Kota	Nilai Tambah Industri (Juta Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja Industri (Orang)	Produktivitas	Intensitas
1	Sumatera Utara	Kota Binjai	299.308,46	5.226	57.272.954	TPPT
2	Sumatera Utara	Kota Medan	3.498.314,61	77.519	45.128.480	TPPSD
3	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	708.617,94	19.162	36.980.375	TPPSD
4	Sumatera Utara	Kota Sibolga	60.932,33	1.599	38.106.523	TPPSD
5	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	227.796,24	3.484	65.383.536	TPPT
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	193.086,14	5.226	36.947.214	TPPSD
7	Sumatera Barat	Kota Padang	1.276.393,30	24.048	53.076.900	TPPSD
8	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	50.678,94	6.424	7.889.001	TPPR
9	Riau	Kota Batam	5.121.683,48	47.626	107.539.652	TPPST
10	Riau	Kota Pekanbaru	228.311,23	32.362	7.054.917	TPPR
11	Riau	Kota Dumai	23.557,69	13.015,09	1.810.029	TPPSR
12	Sumatera Selatan	Kota Palembang	4.495.955,00	43.976	102.236.561	TPPST
13	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	83.447,00	7.182	11.618.908	TPPR
14	Bengkulu	Kota Bengkulu	29.886,00	1.845	16.198.374	TPPR
15	Lampung	Kota Bandar Lampung	1.511.533,00	21.692	69.681.588	TPPT
16	Banten	Kota Tangerang	10.712.522,00	267.152	40.098.977	TPPSD
17	Banten	Kota Cilegon	4.925.693,82	44.848	109.830.847	TPPST
18	DKI Jakarta	Kota DKI Jakarta	41.276.000,00	420.156,00	98.239.701	TPPST
19	Jawa Barat	Kota Bandung	5.429.132,32	223.410	24.301.205	TPPSD
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	4.693.941,00	150.294	31.231.726	TPPSD
21	Jawa Barat	Kota Bogor	803.241,57	63.638	12.622.043	TPPR
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	1.711.580,71	14.894	114.917.464	TPPST
23	Jawa Barat	Kota Sukabumi	47.994,63	16.248	2.953.879	TPPSR
24	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	395.961,84	21.166	18.707.448	TPPR
25	Jawa Tengah	Kota Semarang	4.265.998,26	207.204	20.588.397	TPPR
26	Jawa Tengah	Kota Tegal	198.763,93	8.912	22.302.954	TPPSD
27	Jawa Tengah	Kota Surakarta	985.606,12	54.586	18.056.024	TPPR
28	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	451.711,00	18.354	24.611.038	TPPSD
29	Jawa Timur	Kota Kediri	12.834.822,64	28.392	452.057.715	TPPST
30	Jawa Timur	Kota Malang	2.961.459,61	85.176	34.768.710	TPPSD
31	Jawa Timur	Kota Mojokerto	97.661,38	16.380	5.962.233	TPPSR
32	Jawa Timur	Kota Probolinggo	296.738,30	5.460	54.347.674	TPPT
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	16.229.452,84	248.976	65.184.808	TPPT
34	Jawa Timur	Kota Madiun	219.124,03	6.552	33.443.839	TPPSD
35	Bali	Kota Denpasar	445.701,60	35.497	12.556.036	TPPR
36	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	4.137.292,67	13.025	317.642.431	TPPST
37	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	2.107.931,12	56.365	37.397.873	TPPSD
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	234.019,00	8.364	27.979.316	TPPSD
39	Sulawesi Utara	Kota Manado	167.364,00	12.792	13.083.490	TPPR
40	Gorontalo	Kota Gorontalo	26.420,63	2.904	9.098.014	TPPR
41	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	95.631,28	9.946	9.615.049	TPPR
42	Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	15.928,20	799	19.935.169	TPPR
43	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	122.176,04	11.523	10.602.798	TPPR
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	44.611,72	7.557	5.903.364	TPPSR

Keterangan :

TPP : Tenaga Kerja - Produktivitas - Tenaga Kerja

Dibelakang **TPP** - **ST** : Sangat Tinggi

T : Tinggi

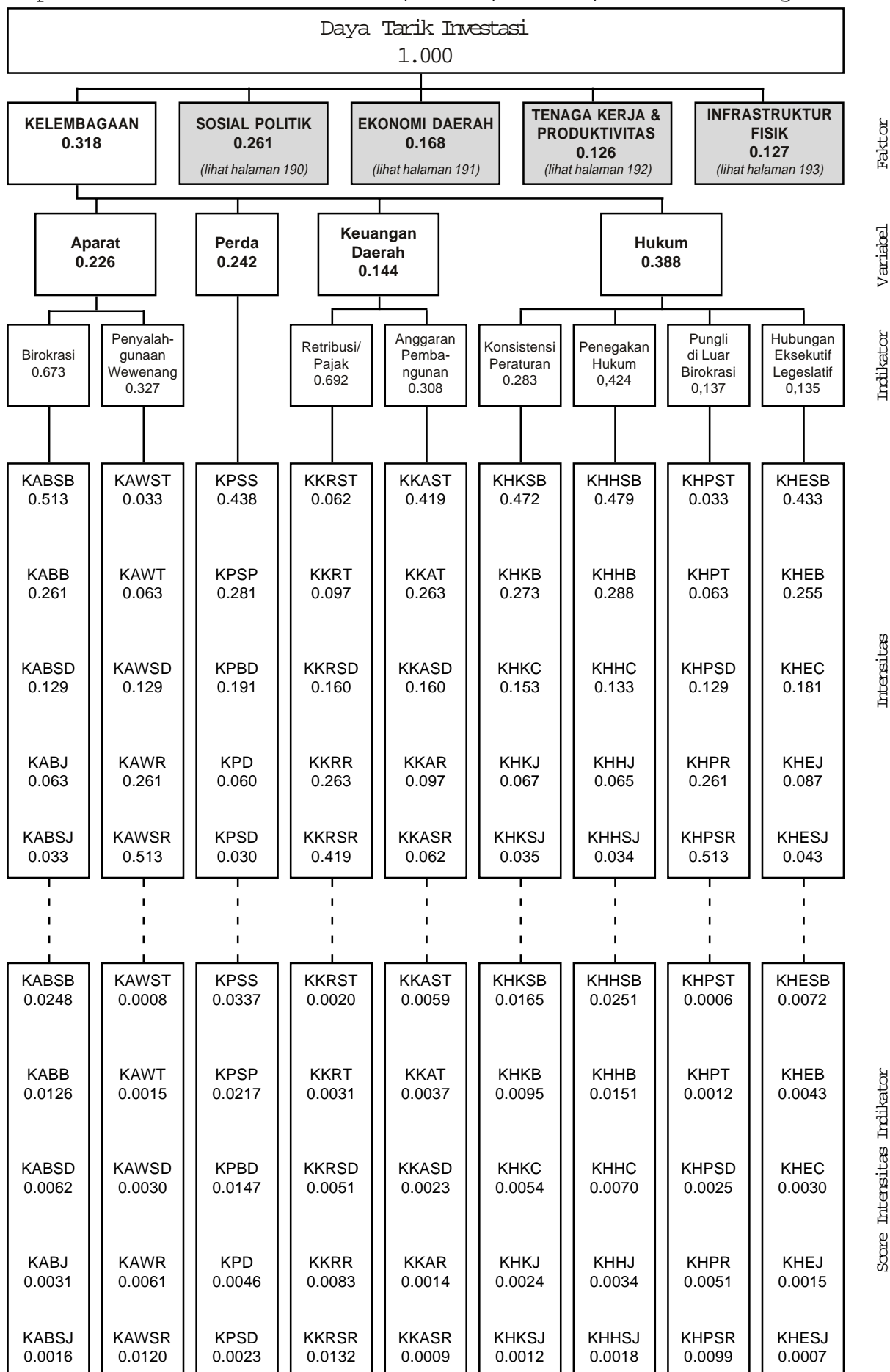
SD : Sedang

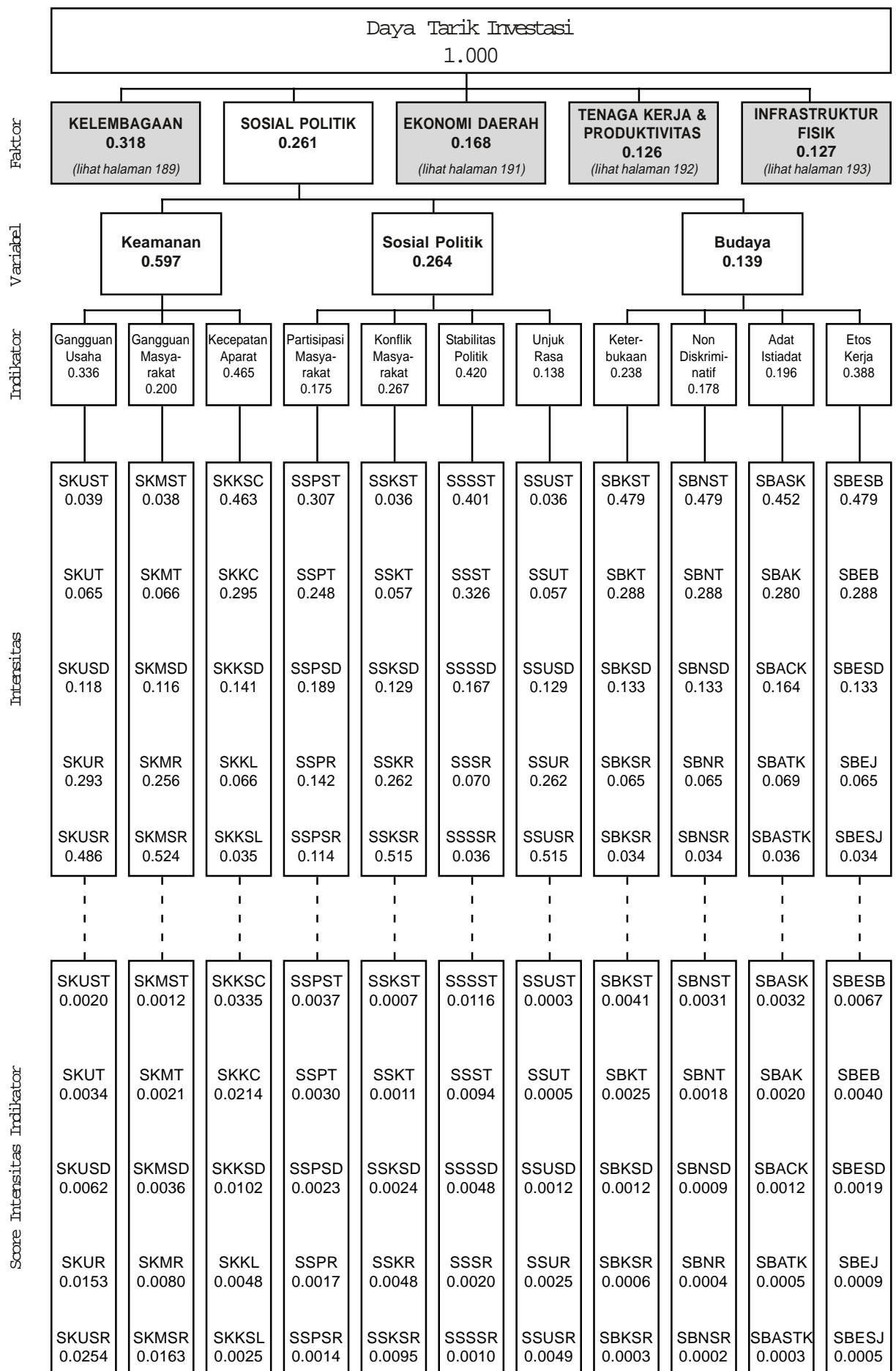
R : Rendah

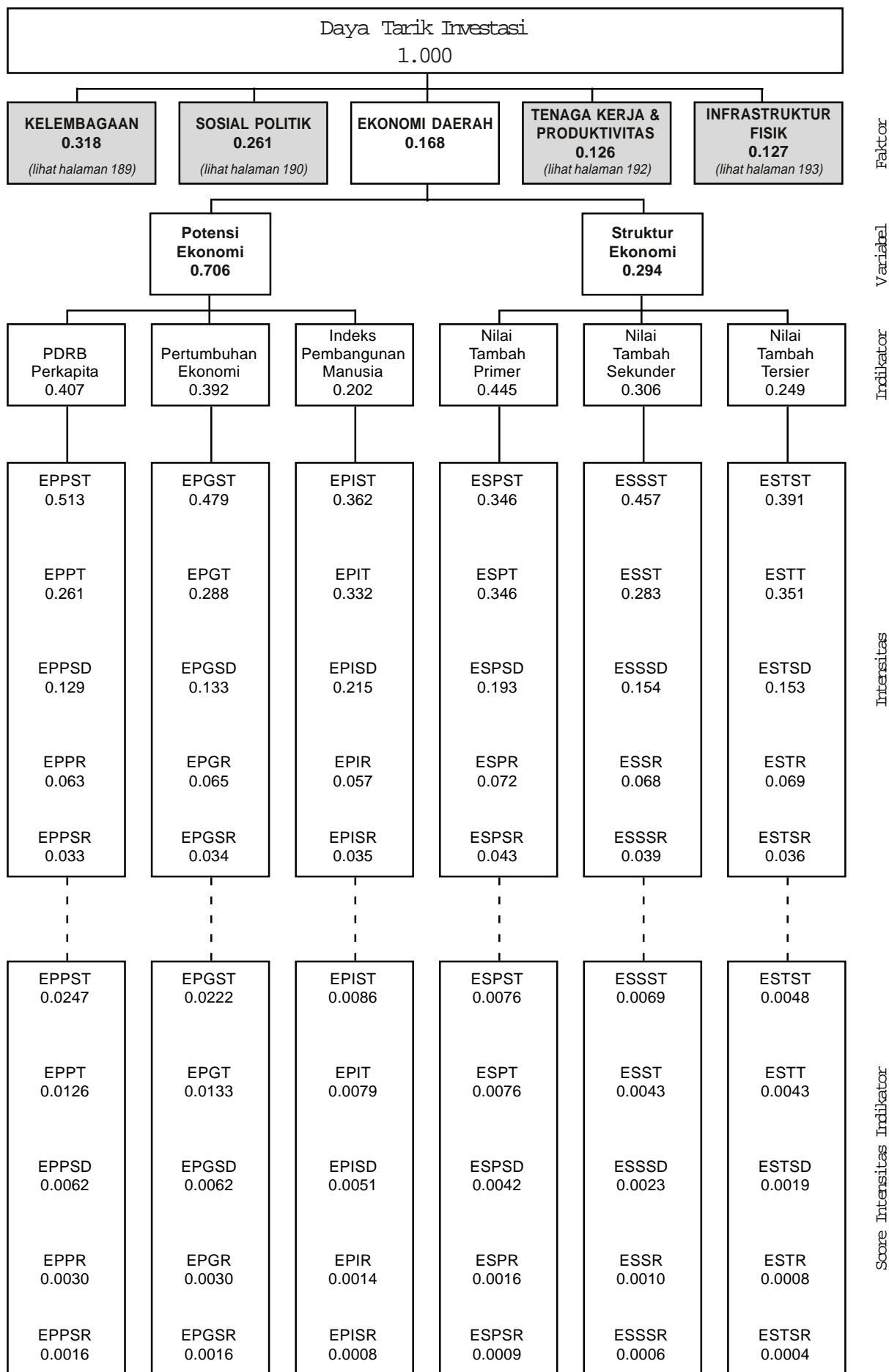
SR : Sangat Rendah

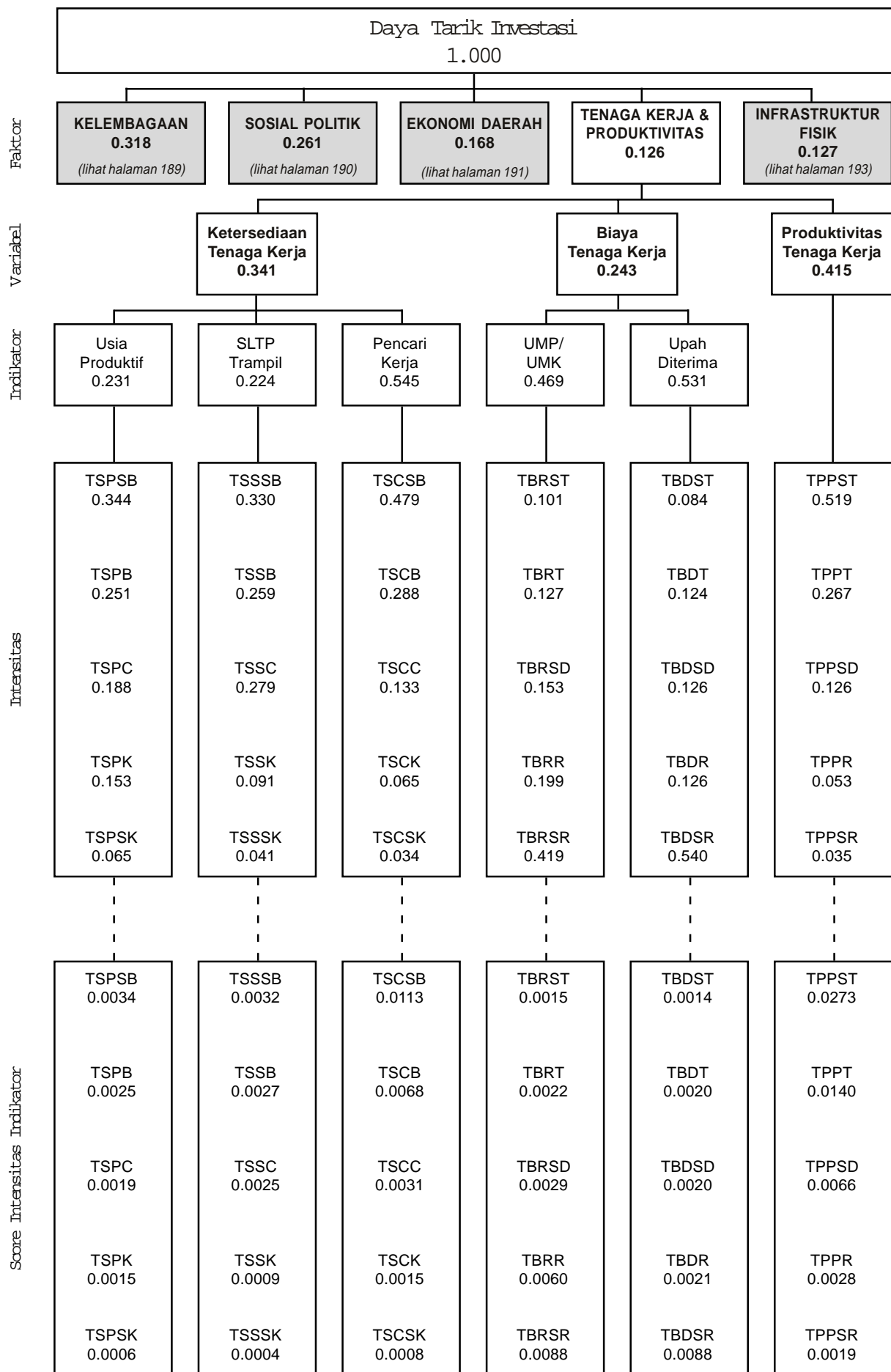
Rata-rata	37.700.454	(150-9,8Jt)
Stand. Dev	31.386.959	(150-9,8Jt)
TPPST	69.087.413	
TPPT	53.393.933	69.087.413
TPPSD	22.006.975	53.393.933
TPPR	22.006.975	6.313.495
TPPSR	6.313.495	

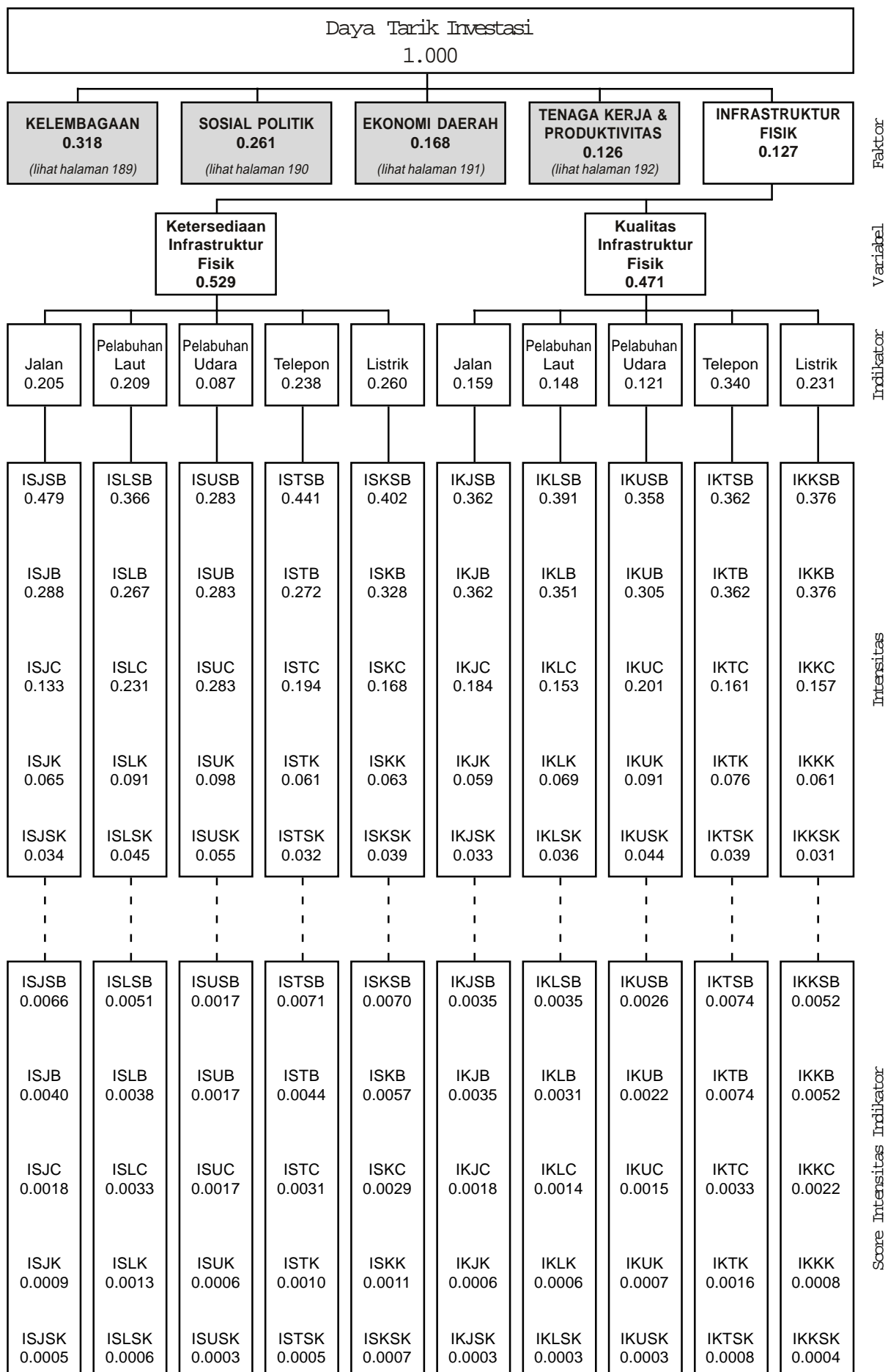
Lampiran 4.4. Hirarki dan Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkatan











Sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian pada bagian III.B.3.1.; indikator pemeringkatan ditentukan melalui studi literatur, lokakarya terbatas para ahli, dan hasil pemeringkatan KPPOD tahun 2001. Hasil tersebut diolah lagi oleh sejumlah ahli terbatas dalam suatu *panel judgment* yang menghasilkan hasil akhir indikator dan hirarki pemeringkatan.

Selanjutnya dengan pengolahan hasil pembobotan indikator dari *judgement* para ahli sebagaimana dijelaskan pada bagian III.3.1.1. ditentukan bobot indikator (skala penting tidaknya tiap indikator) terhadap daya tarik investasi suatu daerah, sebagaimana ditampilkan hasilnya dalam bagan lampiran 4.1.

Dalam bagan hirarki pemeringkatan pada lampiran 4.1 kita bisa lihat 5 faktor penentu daya tarik investasi suatu daerah, dilengkapi dengan bobotnya masing masing. Apabila kita jumlahkan keseluruhan bobot masing masing faktor (level pertama dari hirarki pemeringkatan) maka jumlah yang dihasilkan harus 1 (satu).

Demikian juga dengan jumlah bobot seluruh variabel yang tercakup dalam faktor yang sama (level kedua hirarki pemeringkatan) harus berjumlah 1 (satu).

Hal yang sama juga berlaku untuk bobot indikator indikator dalam satu variabel yang sama (level ketiga hirarki pemeringkatan) juga harus berjumlah 1 (satu).

Terakhir, bobot intensitas intensitas dalam tiap indikator yang sama (level keempat hirarki pemeringkatan) juga berjumlah 1 (satu).

Bila kita melihat pada turunan selanjutnya dibawah level intensitas (untuk memudahkan, sebut saja level kelima); maka kita akan melihat bahwa **nilai intensitas (bukan bobot intensitas)** yang terlihat pada level kelima, contoh untuk **indikator birokrasi** dengan intensitas **KABSB** (singkatan dari Kelembagaan - Aparat - Birokrasi

- Sangat Baik) adalah **0.0248**. Jumlah keseluruhan nilai intensitas tertinggi untuk setiap indikator dari 42 (empat puluh dua) indikator pemeringkatan adalah 1 (satu).

Dengan mengambil contoh **indikator birokrasi** di atas, nilai intensitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai **0.0248** adalah nilai intensitas KABSB dimana untuk indikator **'Birokrasi'** yang dinilai **'sangat baik'** akan menghasilkan nilai 0.0248. Sedangkan bila untuk indikator yang sama dinilai **'sangat jelek'** KABSIJ (singkatan dari Kelembagaan - Aparat - Birokrasi - Sangat Jelek) maka menghasilkan nilai **0.0016**.

2. Nilai **0.0248** tersebut didapat dari perkalian antar bobot:

$$\text{intensitas} \times \text{indikator} \times \text{variabel} \times \text{faktor} \\ 0.513 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0248$$

3. Pada lampiran 5.11. nilai **0.0062** pada indikator **'Birokrasi'** dari Kota Sawahlunto yang dinilai **'baik'** dengan notasi KABB (singkatan dari Kelembagaan - Aparat - Birokrasi - Baik), didapat dari perkalian antar bobot:

$$\text{intensitas} \times \text{indikator} \times \text{variabel} \times \text{faktor} \\ 0.126 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0062$$

(Catatan: perbedaan digit hanya karena faktor pembulatan)

Penghitungan dengan cara yang sama juga dilakukan pada intensitas dari indikator indikator lainnya untuk menghasilkan nilai intensitas tiap indikator pemeringkatan.

Jumlah kumulatif nilai intensitas dari ke 42 (empat puluh dua) indikator pemeringkatan menghasilkan nilai total, yang kemudian dibandingkan antar daerah untuk mendapatkan hasil urutan peringkat total. Bila suatu daerah mendapatkan nilai intensitas tertinggi untuk tiap indikator dari semua 42 (empat puluh dua) indikator pemeringkatan, maka nilai totalnya harus 1 (satu).

Untuk peringkat per kategori maka nilai intensitas yang dijumlahkan berdasarkan intensitas intensitas dari kategori spesifik yang dimaksud. Misalnya peringkat nilai Kelembagaan merupakan perbandingan nilai kumulatif dari indikator indikator yang masuk pada faktor Kelembagaan saja.

Lampiran 4.6. Hasil Pembobotan (Score) Intensitas Indikator dengan Metode AHP
 Lampiran 4.6.1 Hasil Pembobotan (Score) Intensitas Indikator dengan Metode AHP 156 Kabupaten di Indonesia
 Lampiran 4.6.1.1 Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Kelembagaan 156 Kabupaten di Indonesia

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah- gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
1	SULAWESI SELATAN	(8) KAB. JENEPONTO	0,0248	0,0120	0,0368	0,0217	0,0031	0,0023	0,0054	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,1136
2	SUMATERA BARAT	(11) KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	0,0248	0,0120	0,0368	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1134
3	RIAU	(22) KAB. PELALAWAN	0,0248	0,0030	0,0278	0,0147	0,0132	0,0059	0,0191	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,1113
4	JAWA BARAT	(18) KAB. CIANJUR	0,0248	0,0120	0,0368	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,1086
5	SULAWESI SELATAN	(6) KAB. ENREKANG	0,0248	0,0060	0,0308	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1074
6	BALI	(4) KAB. JEMBRANA	0,0126	0,0120	0,0246	0,0217	0,0051	0,0009	0,0060	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1068
7	KALIMANTAN TENGAH	(7) KAB. BARITO UTARA	0,0248	0,0008	0,0256	0,0147	0,0051	0,0059	0,0110	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1058
8	JAWA BARAT	(9) KAB. TASIKMALAYA	0,0248	0,0060	0,0308	0,0147	0,0031	0,0009	0,0040	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1040
9	JAMBI	(20) KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0,0248	0,0120	0,0368	0,0147	0,0051	0,0037	0,0088	0,0054	0,0251	0,0099	0,0030	0,0434	0,1037
10	JAWA TIMUR	(2) KAB. MAGETAN	0,0248	0,0120	0,0368	0,0046	0,0051	0,0014	0,0065	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1024
11	JAWA BARAT	(5) KAB. KUNINGAN	0,0248	0,0030	0,0278	0,0217	0,0020	0,0009	0,0029	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,1021
12	BALI	(21) KAB. TABANAN	0,0126	0,0060	0,0186	0,0217	0,0083	0,0023	0,0106	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,1006
13	BALI	(13) KAB. BANGLI	0,0126	0,0120	0,0246	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1003
14	NUSA TENGGARA TIMUR	(15) KAB. ENDE	0,0126	0,0120	0,0246	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0165	0,0251	0,0099	0,0030	0,0545	0,1003
15	JAWA BARAT	(1) KAB. PURWAKARTA	0,0248	0,0120	0,0368	0,0217	0,0083	0,0014	0,0097	0,0165	0,0070	0,0051	0,0030	0,0316	0,0998
16	SULAWESI SELATAN	(14) KAB. SINJAI	0,0248	0,0060	0,0308	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,0995
17	KALIMANTAN TIMUR	(3) KAB. BULUNGAN	0,0248	0,0060	0,0308	0,0217	0,0051	0,0059	0,0110	0,0054	0,0251	0,0025	0,0030	0,0360	0,0995
18	KALIMANTAN SELATAN	(23) KAB. TABALONG	0,0126	0,0060	0,0186	0,0147	0,0132	0,0023	0,0155	0,0165	0,0251	0,0025	0,0030	0,0471	0,0959
19	KALIMANTAN SELATAN	(37) KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,0126	0,0030	0,0156	0,0217	0,0051	0,0023	0,0074	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,0944
20	NUSA TENGGARA TIMUR	(75) KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0,0126	0,0120	0,0246	0,0147	0,0031	0,0037	0,0068	0,0165	0,0251	0,0025	0,0030	0,0471	0,0932
21	BANGKA BELITUNG	(27) KAB. BELITUNG	0,0062	0,0120	0,0182	0,0217	0,0132	0,0014	0,0146	0,0095	0,0151	0,0099	0,0030	0,0375	0,0920
22	SULAWESI TENGAH	(10) KAB. BANGGAI	0,0126	0,0126	0,0252	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0165	0,0151	0,0099	0,0030	0,0445	0,0918
23	SULAWESI TENGAH	(45) KAB. TOLI TOLI	0,0126	0,0015	0,0141	0,0147	0,0132	0,0023	0,0155	0,0054	0,0251	0,0099	0,0043	0,0447	0,0890
24	SULAWESI SELATAN	(25) KAB. TANA TORAJA	0,0248	0,0120	0,0368	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0151	0,0051	0,0043	0,0299	0,0888

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah- gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
25	NUSA TENGGARA TIMUR	(43) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0,0062	0,0120	0,0182	0,0147	0,0031	0,0037	0,0068	0,0095	0,0251	0,0099	0,0030	0,0475	0,0872
26	KALIMANTAN TIMUR	(17) KAB. NUNUKAN	0,0248	0,0060	0,0308	0,0046	0,0051	0,0059	0,0110	0,0095	0,0251	0,0025	0,0030	0,0401	0,0865
27	NUSA TENGGARA TIMUR	(26) KAB. BELU	0,0126	0,0120	0,0246	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0095	0,0251	0,0051	0,0030	0,0427	0,0825
28	BALI	(30) KAB. GIANYAR	0,0126	0,0120	0,0246	0,0147	0,0132	0,0037	0,0169	0,0054	0,0070	0,0099	0,0030	0,0253	0,0815
29	RIAU	(42) KAB. ROKAN HULU	0,0248	0,0030	0,0278	0,0147	0,0020	0,0059	0,0079	0,0095	0,0151	0,0025	0,0030	0,0301	0,0805
30	PAPUA	(31) KAB. MANOKWARI	0,0248	0,0030	0,0278	0,0046	0,0051	0,0059	0,0110	0,0165	0,0151	0,0025	0,0030	0,0371	0,0805
31	SULAWESI SELATAN	(21) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0132	0,0037	0,0169	0,0095	0,0151	0,0051	0,0030	0,0327	0,0799
32	J A M B I	(39) KAB. BATANGHARI	0,0248	0,0060	0,0308	0,0147	0,0020	0,0037	0,0057	0,0054	0,0151	0,0051	0,0030	0,0286	0,0798
33	JAWA TIMUR	(73) KAB. BLITAR	0,0126	0,0060	0,0186	0,0046	0,0051	0,0009	0,0060	0,0165	0,0251	0,0051	0,0030	0,0497	0,0789
34	JAMBI	(68) KAB. TEBO	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0020	0,0059	0,0079	0,0095	0,0251	0,0025	0,0030	0,0401	0,0783
35	SULAWESI UTARA	(16) KAB. SANGIHE	0,0126	0,0120	0,0246	0,0046	0,0020	0,0009	0,0029	0,0165	0,0151	0,0099	0,0030	0,0445	0,0766
36	SUMATERA UTARA	(38) KAB. LABUHAN BATU	0,0062	0,0060	0,0122	0,0147	0,0083	0,0023	0,0106	0,0095	0,0251	0,0012	0,0030	0,0388	0,0763
37	SUMATERA SELATAN	(76) KAB. MUSI BANYUASIN	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0132	0,0059	0,0191	0,0054	0,0151	0,0025	0,0030	0,0260	0,0754
38	BANTEN	(47) KAB. LEBAK	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0095	0,0251	0,0025	0,0030	0,0401	0,0747
39	BALI	(34) KAB. BADUNG	0,0062	0,0120	0,0182	0,0147	0,0132	0,0059	0,0191	0,0054	0,0070	0,0051	0,0030	0,0205	0,0725
40	KALIMANTAN TIMUR	(53) KAB. PASIR	0,0126	0,0008	0,0134	0,0217	0,0083	0,0059	0,0142	0,0095	0,0070	0,0025	0,0030	0,0220	0,0713
41	BALI	(48) KAB. KARANG ASEM	0,0062	0,0120	0,0182	0,0046	0,0132	0,0023	0,0155	0,0095	0,0151	0,0051	0,0030	0,0327	0,0710
42	KALIMANTAN TENGAH	(29) KAB. KAPUAS	0,0126	0,0120	0,0246	0,0046	0,0051	0,0037	0,0088	0,0095	0,0151	0,0051	0,0030	0,0327	0,0707
43	SUMATERA BARAT	(62) KAB. PASAMAN	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0095	0,0151	0,0051	0,0043	0,0340	0,0697
44	LAMPUNG	(64) KAB. WAY KANAN	0,0062	0,0120	0,0182	0,0147	0,0051	0,0059	0,0110	0,0054	0,0070	0,0099	0,0030	0,0253	0,0692
45	LAMPUNG	(59) KAB. LAMPUNG BARAT	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0083	0,0037	0,0120	0,0095	0,0151	0,0051	0,0030	0,0327	0,0686
46	SUMATERA UTARA	(56) KAB. DAIRI	0,0062	0,0120	0,0182	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0095	0,0151	0,0025	0,0030	0,0301	0,0684
47	SULAWESI SELATAN	(63) KAB. BARRU	0,0126	0,0030	0,0156	0,0217	0,0051	0,0037	0,0088	0,0054	0,0070	0,0051	0,0030	0,0205	0,0666
48	R I A U	(50) KAB. KAMPAR	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0059	0,0110	0,0095	0,0151	0,0025	0,0043	0,0314	0,0663
49	J A M B I	(90) KAB. BUNGO	0,0126	0,0120	0,0246	0,0046	0,0020	0,0023	0,0043	0,0095	0,0151	0,0051	0,0030	0,0327	0,0662
50	JAWA BARAT	(12) KAB. INDRAMAYU	0,0126	0,0120	0,0246	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0151	0,0025	0,0030	0,0260	0,0658
51	SUMATERA SELATAN	(88) KAB. MUSI RAWAS	0,0126	0,0008	0,0134	0,0217	0,0031	0,0059	0,0090	0,0095	0,0070	0,0012	0,0030	0,0207	0,0648

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah- gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
0.0483	0.0235	0.0771	0.0316	0.0141	0.035	0.0524	0.0194	0.0167	0.3181						
52	BALI	(52) KAB. BULELENG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0083	0,0009	0,0092	0,0095	0,0151	0,0025	0,0043	0,0314	0,0645
53	SULAWESI SELATAN	(24) KAB. BANTAENG	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0031	0,0037	0,0068	0,0095	0,0070	0,0051	0,0030	0,0246	0,0617
54	JAWA TENGAH	(75) KAB. BOYOLALI	0,0062	0,0120	0,0182	0,0147	0,0020	0,0009	0,0029	0,0054	0,0070	0,0099	0,0030	0,0253	0,0611
55	SUMATERA BARAT	(49) KAB. SOLOK	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0070	0,0051	0,0043	0,0218	0,0601
56	SULAWESI SELATAN	(19) KAB. GOWA	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0594
57	SUMATERA SELATAN	(40) KAB. LAHAT	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0051	0,0014	0,0065	0,0095	0,0070	0,0025	0,0030	0,0220	0,0594
58	SULAWESI UTARA	(20) KAB. MINAHASA	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0051	0,0009	0,0060	0,0095	0,0151	0,0025	0,0030	0,0301	0,0585
59	NUSA TENGGARA TIMUR	(115) KAB. MANGGARAI	0,0126	0,0015	0,0141	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0070	0,0025	0,0072	0,0221	0,0583
60	BANGKA BELITUNG	(61) KAB. BANGKA	0,0016	0,0120	0,0136	0,0147	0,0083	0,0037	0,0120	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0582
61	SULAWESI SELATAN	(36) KAB. MAROS	0,0126	0,0015	0,0141	0,0147	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0573
62	SULAWESI SELATAN	(69) KAB. SELAYAR	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0051	0,0037	0,0088	0,0024	0,0070	0,0051	0,0030	0,0175	0,0566
63	SULAWESI SELATAN	(60) KAB. PINRANG	0,0062	0,0060	0,0122	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0095	0,0070	0,0025	0,0030	0,0220	0,0563
64	J A M B I	(79) KAB. KERINCI	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0562
65	JAWA TIMUR	(55) KAB. SIDOARJO	0,0126	0,0030	0,0156	0,0217	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0034	0,0025	0,0030	0,0113	0,0560
66	SULAWESI SELATAN	(101) KAB. LUWU	0,0062	0,0008	0,0070	0,0217	0,0020	0,0023	0,0043	0,0095	0,0070	0,0012	0,0043	0,0220	0,0550
67	SULAWESI SELATAN	(28) KAB. LUWU UTARA	0,0062	0,0008	0,0070	0,0046	0,0132	0,0023	0,0155	0,0095	0,0070	0,0025	0,0072	0,0262	0,0533
68	BENGKULU	(127) KAB. BENGKULU SELATAN	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0151	0,0099	0,0030	0,0334	0,0532
69	JAWA BARAT	(57) KAB. CIAMIS	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0020	0,0009	0,0029	0,0054	0,0151	0,0025	0,0030	0,0260	0,0528
70	KALIMANTAN TIMUR	(82) KAB. KUTAI KERTANEGARA	0,0126	0,0030	0,0156	0,0046	0,0083	0,0059	0,0142	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0523
71	PAPUA	(46) KAB. SORONG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0054	0,0151	0,0006	0,0030	0,0241	0,0523
72	KALIMANTAN BARAT	(85) KAB. SAMBAS	0,0062	0,0060	0,0122	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0522
73	SUMATERA SELATAN	(67) KAB. MUARA ENIM	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0132	0,0023	0,0155	0,0024	0,0070	0,0012	0,0030	0,0136	0,0515
74	SUMATERA UTARA	(44) KAB. ASAHAN	0,0016	0,0008	0,0024	0,0217	0,0132	0,0023	0,0155	0,0012	0,0070	0,0006	0,0030	0,0118	0,0514
75	JAWA BARAT	(89) KAB. CIREBON	0,0126	0,0030	0,0156	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0051	0,0030	0,0205	0,0513
76	R I A U	(70) KAB. BENGKALIS	0,0016	0,0030	0,0046	0,0147	0,0132	0,0059	0,0191	0,0054	0,0018	0,0025	0,0030	0,0127	0,0511
77	JAWA BARAT	(71) KAB. GARUT	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0070	0,0051	0,0030	0,0205	0,0504
78	NUSA TENGGARA BARAT	(93) KAB. LOMBOK TIMUR	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0054	0,0070	0,0025	0,0072	0,0221	0,0503

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah-gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
79	NUSA TENGGARA BARAT	(123) KAB. DOMPU	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0070	0,0051	0,0030	0,0205	0,0503
80	SULAWESI TENGGARA	(33) KAB. KOLAKA	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0099	0,0030	0,0253	0,0497
81	NUSA TENGGARA TIMUR	(120) KAB. SUMBA BARAT	0,0126	0,0030	0,0156	0,0046	0,0031	0,0023	0,0054	0,0165	0,0034	0,0012	0,0030	0,0241	0,0497
82	SULAWESI TENGAH	(84) KAB. DONGGALA	0,0062	0,0060	0,0122	0,0147	0,0083	0,0009	0,0092	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0491
83	KALIMANTAN TIMUR	(66) KAB. KUTAI TIMUR	0,0062	0,0060	0,0122	0,0046	0,0083	0,0059	0,0142	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0489
84	NUSA TENGGARA BARAT	(141) KAB. BIMA	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0083	0,0014	0,0097	0,0024	0,0070	0,0025	0,0030	0,0149	0,0485
85	BANTEN	(94) KAB. SERANG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0483
86	JAWA TIMUR	(118) KAB. LAMONGAN	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0483
87	JAWA TENGAH	(92) KAB. KLATEN	0,0031	0,0008	0,0039	0,0147	0,0083	0,0009	0,0092	0,0054	0,0070	0,0006	0,0072	0,0202	0,0480
88	JAWA TENGAH	(102) KAB. KARANG ANYAR	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0478
89	JAWA TENGAH	(41) KAB. TEGAL	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0472
90	JAWA TENGAH	(114) KAB. KEBUMEN	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0054	0,0070	0,0012	0,0030	0,0166	0,0470
91	JAWA TIMUR	(98) KAB. JOMBANG	0,0031	0,0030	0,0061	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0151	0,0051	0,0030	0,0286	0,0467
92	SUMATERA BARAT	(35) KAB. PESISIR SELATAN	0,0126	0,0015	0,0141	0,0046	0,0020	0,0014	0,0034	0,0095	0,0070	0,0051	0,0030	0,0246	0,0467
93	SULAWESI TENGGARA	(111) KAB. BUTON	0,0062	0,0015	0,0077	0,0217	0,0020	0,0023	0,0043	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0467
94	BANTEN	(65) KAB. TANGERANG	0,0016	0,0030	0,0046	0,0217	0,0083	0,0023	0,0106	0,0024	0,0018	0,0025	0,0030	0,0097	0,0466
95	KALIMANTAN TENGAH	(95) KAB. BARITO SELATAN	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0051	0,0059	0,0110	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0464
96	DI. YOGYAKARTA	(121) KAB. GUNUNG KIDUL	0,0031	0,0030	0,0061	0,0147	0,0020	0,0014	0,0034	0,0095	0,0070	0,0025	0,0030	0,0220	0,0462
97	JAWA BARAT	(105) KAB. BANDUNG	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0006	0,0030	0,0160	0,0459
98	JAWA TIMUR	(83) KAB. KEDIRI	0,0016	0,0120	0,0136	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0012	0,0018	0,0051	0,0030	0,0111	0,0459
99	JAWA TENGAH	(51) KAB. CILACAP	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0083	0,0014	0,0097	0,0054	0,0018	0,0012	0,0030	0,0114	0,0450
100	JAWA TIMUR	(134) KAB. BANGKALAN	0,0062	0,0008	0,0070	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0054	0,0070	0,0012	0,0030	0,0166	0,0448
101	R I A U	(101) KAB. INDRAGIRI HILIR	0,0062	0,0008	0,0070	0,0217	0,0020	0,0059	0,0079	0,0012	0,0034	0,0006	0,0030	0,0082	0,0448
102	SUMATERA UTARA	(91) KAB. LANGKAT	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0132	0,0023	0,0155	0,0012	0,0070	0,0006	0,0030	0,0118	0,0444
103	KALIMANTAN TIMUR	(81) KAB. BERAU	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0083	0,0059	0,0142	0,0024	0,0018	0,0006	0,0030	0,0078	0,0444
104	PAPUA	(117)KAB. JAYAWIJAYA	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0051	0,0037	0,0088	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0442
105	RIAU	(81) KAB. KUANTAN SENGGIGI	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0020	0,0059	0,0079	0,0012	0,0070	0,0012	0,0043	0,0137	0,0440

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah- gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
0.0483	0.0235		0.0771	0.0316	0.0141		0.035	0.0524	0.0194	0.0167		0.3181			
106	JAWA BARAT	(32) KAB. BEKASI	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0083	0,0037	0,0120	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0437
107	KALIMANTAN SELATAN	(112) KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0428
108	PAPUA	(116) KAB. MIMIKA	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0132	0,0037	0,0169	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0422
109	JAWA TIMUR	(135) KAB. PASURUAN	0,0016	0,0015	0,0031	0,0147	0,0132	0,0023	0,0155	0,0012	0,0018	0,0025	0,0030	0,0085	0,0418
110	LAMPUNG	(10) KAB. LAMPUNG UTARA	0,0062	0,0060	0,0122	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0070	0,0051	0,0030	0,0175	0,0417
111	JAWA TENGAH	(134) KAB. PEMALANG	0,0031	0,0030	0,0061	0,0147	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0034	0,0025	0,0030	0,0143	0,0411
112	SUMATERA UTARA	(54) KAB. TAPANULI UTARA	0,0016	0,0015	0,0031	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0024	0,0034	0,0099	0,0030	0,0187	0,0408
113	SULAWESI TENGAH	(119) KAB. POSO	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0408
114	JAWA TENGAH	(87) KAB. KUDUS	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0054	0,0034	0,0006	0,0030	0,0124	0,0402
115	JAWA TIMUR	(58) KAB. GRESIK	0,0031	0,0015	0,0046	0,0046	0,0132	0,0014	0,0146	0,0054	0,0070	0,0006	0,0030	0,0160	0,0398
116	KALIMANTAN SELATAN	(109) KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0397
117	SULAWESI TENGAH	(99) KAB. MOROWALI	0,0016	0,0015	0,0031	0,0147	0,0031	0,0037	0,0068	0,0024	0,0070	0,0025	0,0030	0,0149	0,0395
118	NUSA TENGGARA TIMUR	(128) KAB. NGADA	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0024	0,0034	0,0025	0,0030	0,0113	0,0395
119	SUMATERA UTARA	(104) KAB. SIMALUNGUN	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0083	0,0023	0,0106	0,0012	0,0070	0,0006	0,0030	0,0118	0,0395
120	JAWA TIMUR	(133) KAB. BANYUWANGI	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0024	0,0018	0,0012	0,0072	0,0126	0,0384
121	JAWA TENGAH	(96) KAB. KENDAL	0,0062	0,0008	0,0070	0,0046	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0070	0,0006	0,0072	0,0202	0,0378
122	JAWA BARAT	(100) KAB. SUMEDANG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0377
123	JAWA TENGAH	(129) KAB. JEPARA	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0024	0,0034	0,0006	0,0030	0,0094	0,0372
124	SUMATERA SELATAN	(125) KAB. OGAN KOMERING ILIR	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0051	0,0037	0,0088	0,0054	0,0070	0,0006	0,0030	0,0160	0,0371
125	JAWA TENGAH	(136) KAB. BANYUMAS	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0031	0,0009	0,0040	0,0024	0,0070	0,0012	0,0030	0,0136	0,0369
126	SULAWESI SELATAN	(80) KAB. BONE	0,0031	0,0060	0,0091	0,0147	0,0020	0,0009	0,0029	0,0012	0,0018	0,0025	0,0043	0,0098	0,0365
127	KALIMANTAN SELATAN	(130) KAB. TANAH LAUT	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0018	0,0006	0,0072	0,0120	0,0365
128	SULAWESI SELATAN	(72) KAB. MAJENE	0,0126	0,0008	0,0134	0,0046	0,0051	0,0009	0,0060	0,0054	0,0034	0,0006	0,0030	0,0124	0,0364
129	KALIMANTAN BARAT	(113) KAB. KETAPANG	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0051	0,0059	0,0110	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0363
130	JAWA BARAT	(100) KAB. BOGOR	0,0031	0,0030	0,0061	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0024	0,0070	0,0025	0,0030	0,0149	0,0362
131	JAWA BARAT	(124) KAB. SUKABUMI	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0359
132	PAPUA	(137) KAB. FAKFAK	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0359

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah- gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
0.0483	0.0235		0.0771	0.0316	0.0141		0.035	0.0524	0.0194	0.0167		0.3181			
133	JAWA TENGAH	(122) KAB. MAGELANG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0024	0,0034	0,0025	0,0030	0,0113	0,0357
134	DIYOGYAKARTA	(143) KAB. BANTUL	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0031	0,0009	0,0040	0,0054	0,0034	0,0006	0,0030	0,0124	0,0357
135	JAWA BARAT	(86) KAB. KARAWANG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0070	0,0006	0,0043	0,0143	0,0355
136	SULAWESI SELATAN	(107) KAB. TAKALAR	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0031	0,0014	0,0045	0,0024	0,0034	0,0025	0,0030	0,0113	0,0351
137	KALIMANTAN SELATAN	(125) KAB. TAPIN	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0083	0,0014	0,0097	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0350
138	JAWA TENGAH	(110) KAB. PEKALONGAN	0,0016	0,0015	0,0031	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0024	0,0034	0,0012	0,0030	0,0100	0,0343
139	NUSA TENGGARA BARAT	(138) KAB. LOMBOK BARAT	0,0031	0,0030	0,0061	0,0046	0,0132	0,0014	0,0146	0,0012	0,0018	0,0025	0,0030	0,0085	0,0338
140	KALIMANTAN BARAT	(108) KAB. PONTIANAK	0,0031	0,0015	0,0046	0,0046	0,0132	0,0014	0,0146	0,0012	0,0034	0,0006	0,0043	0,0095	0,0333
141	SUMATERA UTARA	(97) KAB. TANAH KARO	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0051	0,0014	0,0065	0,0054	0,0034	0,0012	0,0030	0,0130	0,0333
142	JAWA TIMUR	(146) KAB. PAMEKASAN	0,0031	0,0008	0,0039	0,0147	0,0031	0,0014	0,0045	0,0012	0,0034	0,0025	0,0030	0,0101	0,0332
143	JAWA TIMUR	(139) KAB. BONDOWOSO	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0051	0,0009	0,0060	0,0024	0,0018	0,0025	0,0030	0,0097	0,0328
144	KALIMANTAN BARAT	(74) KAB. SANGGAU	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0327
145	JAWA BARAT	(78) KAB. SUBANG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0031	0,0014	0,0045	0,0054	0,0034	0,0012	0,0030	0,0130	0,0313
146	KALIMANTAN BARAT	(126) KAB. KAPUAS HULU	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0020	0,0037	0,0057	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0310
147	GORONTALO	(106) KAB. GORONTALO	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0020	0,0014	0,0034	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0287
148	JAWA TIMUR	(144) KAB. JEMBER	0,0031	0,0008	0,0039	0,0046	0,0031	0,0023	0,0054	0,0054	0,0034	0,0012	0,0043	0,0143	0,0282
149	JAWA TIMUR	(140) KAB. MOJOKERTO	0,0016	0,0015	0,0031	0,0046	0,0083	0,0014	0,0097	0,0012	0,0034	0,0025	0,0030	0,0101	0,0275
150	JAWA TENGAH	(132) KAB. SUKOHARJO	0,0016	0,0015	0,0031	0,0046	0,0083	0,0009	0,0092	0,0012	0,0018	0,0012	0,0030	0,0072	0,0241
151	SUMATERA UTARA	(131) KAB. DELI SERDANG	0,0016	0,0008	0,0024	0,0046	0,0083	0,0014	0,0097	0,0012	0,0018	0,0006	0,0030	0,0066	0,0233
152	NUSA TENGGARA TIMUR	(148) KAB. FLORES TIMUR	0,0016	0,0008	0,0024	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0018	0,0012	0,0030	0,0084	0,0228
153	LAMPUNG	(145) KAB. LAMPUNG SELATAN	0,0016	0,0015	0,0031	0,0046	0,0051	0,0014	0,0065	0,0012	0,0018	0,0025	0,0030	0,0085	0,0227
154	LAMPUNG	(142) KAB. LAMPUNG TIMUR	0,0016	0,0008	0,0024	0,0046	0,0051	0,0009	0,0060	0,0012	0,0018	0,0025	0,0030	0,0085	0,0215
155	JAWA TIMUR	(134) KAB. TULUNGAGUNG	0,0016	0,0015	0,0031	0,0046	0,0051	0,0014	0,0065	0,0012	0,0018	0,0006	0,0030	0,0066	0,0208
156	JAWA TIMUR	(147) KAB. PONOROGO	0,0016	0,0008	0,0024	0,0046	0,0051	0,0014	0,0065	0,0012	0,0018	0,0012	0,0030	0,0072	0,0207

Lampiran 4.6.1.2. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Sosial Politik 156 Kabupaten di Indonesia

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	SOSIAL POLITIK													TOTAL SCORE	
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat-istiadat	Etos Kerja		Sub Total Budaya
1	JAWA TIMUR	(2) KAB. MAGETAN	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0041	0,0031	0,0032	0,0067	0,0171	0,1154
2	JAWA BARAT	(1) KAB. PURWAKARTA	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,1138
3	NUSA TENGGARA TIMUR	(26) KAB. BELU	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0023	0,0095	0,0116	0,0049	0,0283	0,0012	0,0002	0,0012	0,0009	0,0035	0,1070
4	SULAWESI SELATAN	(24) KAB. BANTAENG	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0041	0,0031	0,0003	0,0067	0,0142	0,1069
5	JAWA BARAT	(5) KAB. KUNINGAN	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0023	0,0024	0,0048	0,0049	0,0144	0,0012	0,0031	0,0020	0,0067	0,0130	0,1026
6	NUSA TENGGARA TIMUR	(15) KAB. ENDE	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0037	0,0095	0,0094	0,0012	0,0238	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,1024
7	JAWA BARAT	(9) KAB. TASIKMALAYA	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0037	0,0024	0,0048	0,0005	0,0114	0,0041	0,0031	0,0012	0,0067	0,0151	0,1017
8	SULAWESI UTARA	(16) KAB. SANGIHE	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0023	0,0024	0,0094	0,0049	0,0190	0,0012	0,0018	0,0003	0,0019	0,0052	0,0994
9	PAPUA	(31) KAB. MANOKWARI	0,0254	0,0163	0,0335	0,0752	0,0037	0,0024	0,0094	0,0005	0,0160	0,0025	0,0002	0,0032	0,0005	0,0064	0,0976
10	JAWA TENGAH	(41) KAB. TEGAL	0,0153	0,0163	0,0335	0,0651	0,0023	0,0095	0,0048	0,0049	0,0215	0,0025	0,0018	0,0012	0,0040	0,0095	0,0961
11	SULAWESI SELATAN	(6) KAB. ENREKANG	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0095	0,0094	0,0025	0,0237	0,0012	0,0018	0,0020	0,0040	0,0090	0,0958
12	BALI	(4) KAB. JEMBRANA	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0007	0,0116	0,0003	0,0149	0,0041	0,0031	0,0032	0,0040	0,0144	0,0924
13	SULAWESI SELATAN	(8) KAB. JENEPONTO	0,0153	0,0080	0,0335	0,0568	0,0037	0,0095	0,0048	0,0012	0,0192	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,0915
14	KALIMANTAN TIMUR	(17) KAB. NUNUKAN	0,0153	0,0080	0,0335	0,0568	0,0030	0,0048	0,0094	0,0005	0,0177	0,0041	0,0031	0,0020	0,0067	0,0159	0,0904
15	SULAWESI SELATAN	(14) KAB. SINJAI	0,0153	0,0163	0,0335	0,0651	0,0023	0,0011	0,0048	0,0025	0,0107	0,0025	0,0031	0,0020	0,0067	0,0143	0,0901
16	SULAWESI SELATAN	(19) KAB. GOWA	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0011	0,0094	0,0012	0,0140	0,0012	0,0031	0,0005	0,0067	0,0115	0,0886
17	SULAWESI UTARA	(20) KAB. MINAHASA	0,0153	0,0036	0,0335	0,0524	0,0030	0,0048	0,0116	0,0012	0,0206	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,0885
18	KALIMANTAN TENGAH	(29) KAB. KAPUAS	0,0254	0,0036	0,0335	0,0625	0,0037	0,0024	0,0116	0,0005	0,0182	0,0012	0,0004	0,0032	0,0019	0,0067	0,0874
19	KALIMANTAN TIMUR	(3) KAB. BULUNGAN	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0025	0,0009	0,0012	0,0019	0,0065	0,0871
20	SULAWESI TENGAH	(10) KAB. BANGGAI	0,0254	0,0163	0,0102	0,0519	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0032	0,0067	0,0104	0,0854
21	SULAWESI SELATAN	(25) KAB. TANA TORAJA	0,0062	0,0163	0,0335	0,0560	0,0023	0,0048	0,0116	0,0049	0,0236	0,0012	0,0031	0,0005	0,0009	0,0057	0,0853
22	JAWA BARAT	(78) KAB. SUBANG	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0024	0,0094	0,0012	0,0153	0,0025	0,0018	0,0012	0,0005	0,0060	0,0844
23	BALI	(13) KAB. BANGLI	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0011	0,0020	0,0003	0,0057	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,0843
24	SULAWESI SELATAN	(28) KAB. LUWU UTARA	0,0254	0,0080	0,0102	0,0436	0,0023	0,0024	0,0116	0,0049	0,0212	0,0041	0,0031	0,0032	0,0067	0,0171	0,0819
25	SUMATERA BARAT	(35) KAB. PESISIR SELATAN	0,0153	0,0163	0,0335	0,0651	0,0023	0,0011	0,0048	0,0005	0,0087	0,0041	0,0009	0,0012	0,0019	0,0081	0,0819
26	SUMATERA UTARA	(54) KAB. TAPANULI UTARA	0,0254	0,0163	0,0214	0,0631	0,0023	0,0007	0,0048	0,0005	0,0083	0,0041	0,0031	0,0012	0,0019	0,0103	0,0817

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	SOSIAL POLITIK													TOTAL SCORE	
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat- istiadat	Etos Kerja		Sub Total
0.0523	0.0311	0.0724	Keamanan	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	Politik	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141	Budaya	0.2608			
27	R I A U	(50) KAB. KAMPAR	0,0153	0,0036	0,0335	0,0524	0,0023	0,0011	0,0094	0,0005	0,0133	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,0812
28	NUSA TENGGARA TIMUR	(43) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0,0062	0,0080	0,0335	0,0477	0,0023	0,0095	0,0116	0,0049	0,0283	0,0012	0,0004	0,0012	0,0005	0,0033	0,0793
29	JAWA BARAT	(57) KAB. CIAMIS	0,0254	0,0163	0,0102	0,0519	0,0037	0,0024	0,0048	0,0049	0,0158	0,0041	0,0018	0,0020	0,0009	0,0088	0,0765
30	JAWA BARAT	(12) KAB. INDRAMAYU	0,0062	0,0163	0,0335	0,0560	0,0023	0,0024	0,0094	0,0012	0,0153	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0765
31	KALIMANTAN TENGAH	(7) KAB. BARITO UTARA	0,0254	0,0163	0,0102	0,0519	0,0037	0,0024	0,0094	0,0005	0,0160	0,0003	0,0002	0,0003	0,0067	0,0075	0,0754
32	SUMATERA BARAT	(11) KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	0,0254	0,0080	0,0102	0,0436	0,0023	0,0095	0,0020	0,0005	0,0143	0,0041	0,0031	0,0032	0,0067	0,0171	0,0750
33	SULAWESI SELATAN	(69) KAB. SELAYAR	0,0153	0,0163	0,0102	0,0418	0,0023	0,0024	0,0116	0,0049	0,0212	0,0025	0,0031	0,0032	0,0019	0,0107	0,0737
34	SULAWESI SELATAN	(72) KAB. MAJENE	0,0254	0,0080	0,0102	0,0436	0,0023	0,0011	0,0094	0,0005	0,0133	0,0041	0,0031	0,0020	0,0067	0,0159	0,0728
35	SULAWESI TENGGARA	(33) KAB. KOLAKA	0,0254	0,0163	0,0102	0,0519	0,0037	0,0011	0,0048	0,0049	0,0145	0,0006	0,0004	0,0012	0,0019	0,0041	0,0705
36	J A M B I	(39) KAB. BATANGHARI	0,0062	0,0036	0,0335	0,0433	0,0030	0,0048	0,0116	0,0025	0,0219	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0694
37	JAWA BARAT	(18) KAB. CIANJUR	0,0020	0,0080	0,0214	0,0314	0,0037	0,0095	0,0094	0,0012	0,0238	0,0012	0,0031	0,0032	0,0067	0,0142	0,0694
38	SUMATERA SELATAN	(40) KAB. LAHAT	0,0062	0,0021	0,0335	0,0418	0,0023	0,0011	0,0094	0,0025	0,0153	0,0041	0,0009	0,0032	0,0040	0,0122	0,0693
39	LAMPUNG	(59) KAB. LAMPUNG BARAT	0,0254	0,0163	0,0048	0,0465	0,0023	0,0007	0,0094	0,0049	0,0173	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0690
40	JAWA TIMUR	(83) KAB. KEDIRI	0,0034	0,0021	0,0214	0,0269	0,0023	0,0095	0,0094	0,0025	0,0237	0,0041	0,0031	0,0032	0,0067	0,0171	0,0677
41	JAWA BARAT	(71) KAB. GARUT	0,0062	0,0080	0,0214	0,0356	0,0023	0,0024	0,0094	0,0049	0,0190	0,0025	0,0031	0,0032	0,0040	0,0128	0,0674
42	BANGKA BELITUNG	(27) KAB. BELITUNG	0,0254	0,0163	0,0102	0,0519	0,0023	0,0011	0,0048	0,0012	0,0094	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0665
43	PAPUA	(46) KAB. SORONG	0,0254	0,0036	0,0102	0,0392	0,0030	0,0095	0,0094	0,0012	0,0231	0,0012	0,0004	0,0012	0,0009	0,0037	0,0660
44	BALI	(48) KAB. KARANG ASEM	0,0153	0,0080	0,0102	0,0335	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0041	0,0009	0,0012	0,0067	0,0129	0,0639
45	SULAWESI SELATAN	(21) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN	0,0153	0,0080	0,0214	0,0447	0,0037	0,0011	0,0020	0,0003	0,0071	0,0012	0,0018	0,0012	0,0067	0,0109	0,0627
46	GORONTALO	(106) KAB. GORONTALO	0,0254	0,0012	0,0102	0,0368	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0625
47	J A M B I	(79) KAB. KERINCI	0,0062	0,0080	0,0102	0,0244	0,0023	0,0095	0,0116	0,0025	0,0259	0,0012	0,0009	0,0012	0,0067	0,0100	0,0603
48	BALI	(30) KAB. GIANYAR	0,0153	0,0080	0,0214	0,0447	0,0037	0,0011	0,0048	0,0003	0,0099	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0598
49	RIAU	(42) KAB. ROKAN HULU	0,0153	0,0036	0,0102	0,0291	0,0037	0,0048	0,0116	0,0049	0,0250	0,0025	0,0009	0,0003	0,0019	0,0056	0,0597
50	KALIMANTAN SELATAN	(23) KAB. TABALONG	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0048	0,0116	0,0025	0,0212	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0584
51	LAMPUNG	(64) KAB. WAY KANAN	0,0034	0,0012	0,0335	0,0381	0,0023	0,0011	0,0048	0,0003	0,0085	0,0025	0,0009	0,0012	0,0067	0,0113	0,0579
52	KALIMANTAN BARAT	(85) KAB. SAMBAS	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0048	0,0116	0,0005	0,0192	0,0012	0,0009	0,0032	0,0019	0,0072	0,0576
53	BALI	(21) KAB. TABANAN	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0012	0,0009	0,0020	0,0040	0,0081	0,0568

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	SOSIAL POLITIK													TOTAL SCORE	
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat- istiadat	Etos Kerja		Sub Total
0.0523	0.0311	0.0724	Keamanan	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	Politik	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141	Budaya	0.2608			
54	SUMATERA BARAT	(62) KAB. PASAMAN	0,0153	0,0036	0,0048	0,0237	0,0023	0,0048	0,0116	0,0003	0,0190	0,0025	0,0009	0,0020	0,0067	0,0121	0,0548
55	JAWA TENGAH	(75) KAB. BOYOLALI	0,0254	0,0036	0,0102	0,0392	0,0037	0,0007	0,0048	0,0005	0,0097	0,0025	0,0004	0,0003	0,0019	0,0051	0,0540
56	SULAWESI SELATAN	(80) KAB. BONE	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0095	0,0116	0,0012	0,0246	0,0025	0,0009	0,0012	0,0040	0,0086	0,0532
57	RIAU	(22) KAB. PELALAWAN	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0048	0,0094	0,0005	0,0170	0,0025	0,0031	0,0032	0,0067	0,0155	0,0525
58	KALIMANTAN SELATAN	(37) KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0116	0,0049	0,0212	0,0025	0,0009	0,0032	0,0040	0,0106	0,0518
59	BANTEN	(47) KAB. LEBAK	0,0153	0,0080	0,0102	0,0335	0,0023	0,0024	0,0048	0,0025	0,0120	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0515
60	KALIMANTAN TIMUR	(66) KAB. KUTAI TIMUR	0,0062	0,0021	0,0214	0,0297	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0012	0,0004	0,0005	0,0019	0,0040	0,0512
61	SUMATERA UTARA	(56) KAB. DAIRI	0,0034	0,0012	0,0335	0,0381	0,0023	0,0007	0,0048	0,0005	0,0083	0,0012	0,0004	0,0012	0,0019	0,0047	0,0511
62	NUSA TENGGARA TIMUR	(128) KAB. NGADA	0,0153	0,0036	0,0048	0,0237	0,0023	0,0048	0,0116	0,0049	0,0236	0,0012	0,0009	0,0005	0,0009	0,0035	0,0508
63	BALI	(52) KAB. BULELENG	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0095	0,0116	0,0025	0,0259	0,0012	0,0002	0,0012	0,0019	0,0045	0,0504
64	NUSA TENGGARA TIMUR	(120) KAB. SUMBA BARAT	0,0020	0,0036	0,0214	0,0270	0,0023	0,0024	0,0094	0,0049	0,0190	0,0006	0,0004	0,0012	0,0019	0,0041	0,0501
65	R I A U	(70) KAB. BENGKALIS	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0095	0,0116	0,0012	0,0260	0,0006	0,0002	0,0005	0,0009	0,0022	0,0482
66	R I A U	(101) KAB. INDRAGIRI HILIR	0,0062	0,0012	0,0048	0,0122	0,0023	0,0048	0,0116	0,0049	0,0236	0,0041	0,0031	0,0032	0,0019	0,0123	0,0481
67	RIAU	(81) KAB. KUANTAN SENGGIGI	0,0034	0,0021	0,0214	0,0269	0,0023	0,0011	0,0116	0,0012	0,0162	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0473
68	BALI	(34) KAB. BADUNG	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0011	0,0048	0,0003	0,0085	0,0012	0,0009	0,0012	0,0040	0,0073	0,0470
69	NUSA TENGGARA BARAT	(93) KAB. LOMBOK TIMUR	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0030	0,0024	0,0116	0,0049	0,0219	0,0012	0,0018	0,0012	0,0009	0,0051	0,0470
70	JAWA TENGAH	(96) KAB. KENDAL	0,0034	0,0036	0,0102	0,0172	0,0037	0,0048	0,0116	0,0049	0,0250	0,0006	0,0009	0,0012	0,0019	0,0046	0,0468
71	JAMBI	(20) KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0,0034	0,0021	0,0214	0,0269	0,0023	0,0024	0,0094	0,0005	0,0146	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0467
72	SUMATERA SELATAN	(88) KAB. MUSI RAWAS	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0048	0,0048	0,0049	0,0182	0,0041	0,0031	0,0003	0,0009	0,0084	0,0466
73	LAMPUNG	(10) KAB. LAMPUNG UTARA	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0024	0,0048	0,0005	0,0100	0,0025	0,0002	0,0005	0,0019	0,0051	0,0463
74	JAWA TIMUR	(134) KAB. TULUNGAGUNG	0,0020	0,0036	0,0102	0,0158	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0012	0,0009	0,0012	0,0040	0,0073	0,0462
75	JAWA TIMUR	(73) KAB. BLITAR	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0024	0,0094	0,0005	0,0160	0,0012	0,0004	0,0012	0,0067	0,0095	0,0455
76	JAMBI	(68) KAB. TEBO	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0011	0,0094	0,0005	0,0147	0,0025	0,0018	0,0020	0,0040	0,0103	0,0450
77	JAWA TENGAH	(114) KAB. KEBUMEN	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0048	0,0116	0,0012	0,0199	0,0006	0,0009	0,0012	0,0019	0,0046	0,0445
78	SULAWESI SELATAN	(60) KAB. PINRANG	0,0034	0,0036	0,0102	0,0172	0,0030	0,0095	0,0048	0,0012	0,0185	0,0025	0,0031	0,0012	0,0019	0,0087	0,0444
79	SULAWESI SELATAN	(36) KAB. MAROS	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0011	0,0048	0,0005	0,0087	0,0012	0,0009	0,0003	0,0019	0,0043	0,0442
80	JAWA TIMUR	(98) KAB. JOMBANG	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0011	0,0116	0,0025	0,0175	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0435

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	SOSIAL POLITIK													TOTAL SCORE	
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat- istiadat	Etos Kerja		Sub Total
0.0523	0.0311	0.0724	Keamanan	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	Politik	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141	Budaya	0.2608			
81	KALIMANTAN TIMUR	(53) KAB. PASIR	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0116	0,0025	0,0188	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0430
82	JAWA TIMUR	(139) KAB. BONDOWOSO	0,0062	0,0012	0,0025	0,0099	0,0037	0,0095	0,0116	0,0049	0,0297	0,0012	0,0009	0,0003	0,0005	0,0029	0,0425
83	JAWA BARAT	(86) KAB. KARAWANG	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0116	0,0012	0,0260	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0420
84	SULAWESI SELATAN	(101) KAB. LUWU	0,0062	0,0021	0,0025	0,0108	0,0023	0,0095	0,0116	0,0012	0,0246	0,0012	0,0002	0,0012	0,0040	0,0066	0,0420
85	JAWA TENGAH	(132) KAB. SUKOHARJO	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0006	0,0009	0,0005	0,0019	0,0039	0,0414
86	SUMATERA UTARA	(44) KAB. ASAHAN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0025	0,0002	0,0012	0,0009	0,0048	0,0413
87	SUMATERA UTARA	(91) KAB. LANGKAT	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0025	0,0002	0,0012	0,0009	0,0048	0,0413
88	SUMATERA UTARA	(104) KAB. SIMALUNGUN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0025	0,0002	0,0012	0,0009	0,0048	0,0413
89	JAWA TENGAH	(102) KAB. KARANG ANYAR	0,0034	0,0012	0,0102	0,0148	0,0023	0,0007	0,0116	0,0003	0,0149	0,0012	0,0031	0,0032	0,0040	0,0115	0,0412
90	JAWA TENGAH	(122) KAB. MAGELANG	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0094	0,0012	0,0153	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0405
91	SULAWESI TENGAH	(45) KAB. TOLI TOLI	0,0062	0,0036	0,0025	0,0123	0,0037	0,0095	0,0048	0,0049	0,0229	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0404
92	SULAWESI SELATAN	(107) KAB. TAKALAR	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0030	0,0007	0,0116	0,0012	0,0165	0,0012	0,0009	0,0012	0,0005	0,0038	0,0403
93	JAWA BARAT	(100) KAB. SUMEDANG	0,0062	0,0080	0,0102	0,0244	0,0023	0,0024	0,0048	0,0049	0,0144	0,0003	0,0002	0,0003	0,0005	0,0013	0,0401
94	J A M B I	(90) KAB. BUNGO	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0048	0,0049	0,0144	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0396
95	JAWA TENGAH	(92) KAB. KLATEN	0,0020	0,0012	0,0048	0,0080	0,0023	0,0011	0,0116	0,0005	0,0155	0,0041	0,0031	0,0020	0,0067	0,0159	0,0394
96	NUSA TENGGARA TIMUR	(115) KAB. MANGGARAI	0,0034	0,0021	0,0048	0,0103	0,0023	0,0095	0,0116	0,0025	0,0259	0,0006	0,0009	0,0012	0,0005	0,0032	0,0394
97	JAWA BARAT	(124) KAB. SUKABUMI	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
98	KALIMANTAN BARAT	(126) KAB. KAPUAS HULU	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
99	KALIMANTAN BARAT	(113) KAB. KETAPANG	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
100	KALIMANTAN BARAT	(74) KAB. SANGGAU	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
101	KALIMANTAN TENGAH	(95) KAB. BARITO SELATAN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
102	KALIMANTAN SELATAN	(109) KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
103	KALIMANTAN SELATAN	(112) KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
104	KALIMANTAN SELATAN	(125) KAB. TAPIN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
105	SULAWESI TENGAH	(84) KAB. DONGGALA	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
106	SULAWESI TENGGARA	(111) KAB. BUTON	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
107	PAPUA	(137) KAB. FAKFAK	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	SOSIAL POLITIK														TOTAL SCORE
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat- istiadat	Etos Kerja	Sub Total	
0.0523	0.0311	0.0724	Keamanan	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	Politik	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141	Budaya	0.2608			
108	PAPUA	(117) KAB. JAYAWIJAYA	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
109	PAPUA	(116) KAB. MIMIKA	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
110	SUMATERA BARAT	(49) KAB. SOLOK	0,0062	0,0036	0,0025	0,0123	0,0023	0,0095	0,0116	0,0012	0,0246	0,0006	0,0002	0,0005	0,0009	0,0022	0,0391
111	LAMPUNG	(145) KAB. LAMPUNG SELATAN	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0011	0,0094	0,0003	0,0131	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0383
112	SUMATERA SELATAN	(125) KAB. OGAN KOMERING ILIR	0,0034	0,0036	0,0102	0,0172	0,0023	0,0024	0,0094	0,0025	0,0166	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0380
113	JAWA TIMUR	(55) KAB. SIDOARJO	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0011	0,0020	0,0005	0,0073	0,0012	0,0009	0,0012	0,0067	0,0100	0,0373
114	JAWA TIMUR	(147) KAB. PONOROGO	0,0034	0,0021	0,0025	0,0080	0,0023	0,0048	0,0116	0,0049	0,0236	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0368
115	JAWA TENGAH	(110) KAB. PEKALONGAN	0,0034	0,0012	0,0102	0,0148	0,0023	0,0024	0,0116	0,0003	0,0166	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0366
116	JAWA TIMUR	(58) KAB. GRESIK	0,0020	0,0021	0,0025	0,0066	0,0037	0,0048	0,0116	0,0049	0,0250	0,0012	0,0009	0,0005	0,0019	0,0045	0,0361
117	DIY	(121) KAB. GUNUNG KIDUL	0,0062	0,0080	0,0102	0,0244	0,0023	0,0011	0,0048	0,0003	0,0085	0,0003	0,0004	0,0005	0,0019	0,0031	0,0360
118	SUMATERA SELATAN	(67) KAB. MUARA ENIM	0,0034	0,0036	0,0025	0,0095	0,0023	0,0024	0,0094	0,0012	0,0153	0,0041	0,0018	0,0012	0,0040	0,0111	0,0359
119	JAWA BARAT	(89) KAB. CIREBON	0,0020	0,0036	0,0102	0,0158	0,0023	0,0024	0,0094	0,0003	0,0144	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0354
120	KALIMANTAN TIMUR	(81) KAB. BERAU	0,0020	0,0021	0,0048	0,0089	0,0037	0,0048	0,0116	0,0049	0,0250	0,0003	0,0002	0,0005	0,0005	0,0015	0,0354
121	JAWA TENGAH	(87) KAB. KUDUS	0,0034	0,0036	0,0102	0,0172	0,0037	0,0011	0,0048	0,0012	0,0108	0,0025	0,0009	0,0020	0,0019	0,0073	0,0353
122	NUSA TENGGARA BARAT	(138) KAB. LOMBOK BARAT	0,0062	0,0036	0,0048	0,0146	0,0023	0,0024	0,0094	0,0025	0,0166	0,0012	0,0004	0,0012	0,0009	0,0037	0,0349
123	KALIMANTAN BARAT	(108) KAB. PONTIANAK	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0023	0,0048	0,0116	0,0012	0,0199	0,0003	0,0002	0,0005	0,0005	0,0015	0,0348
124	BANTEN	(94) KAB. SERANG	0,0034	0,0021	0,0048	0,0103	0,0030	0,0024	0,0116	0,0049	0,0219	0,0003	0,0004	0,0012	0,0005	0,0024	0,0346
125	JAWA BARAT	(32) KAB. BEKASI	0,0020	0,0021	0,0048	0,0089	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0041	0,0002	0,0020	0,0019	0,0082	0,0346
126	BANGKA BELITUNG	(61) KAB. BANGKA	0,0020	0,0021	0,0102	0,0143	0,0023	0,0095	0,0020	0,0049	0,0187	0,0003	0,0002	0,0005	0,0005	0,0015	0,0345
127	JAWA BARAT	(100) KAB. BOGOR	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0011	0,0048	0,0012	0,0094	0,0012	0,0004	0,0012	0,0019	0,0047	0,0341
128	JAWA TENGAH	(129) KAB. JEPARA	0,0062	0,0021	0,0025	0,0108	0,0023	0,0024	0,0116	0,0005	0,0168	0,0025	0,0009	0,0012	0,0019	0,0065	0,0341
129	JAWA TIMUR	(144) KAB. JEMBER	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0006	0,0004	0,0003	0,0019	0,0032	0,0341
130	SULAWESI TENGAH	(99) KAB. MOROWALI	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0037	0,0095	0,0116	0,0005	0,0253	0,0003	0,0002	0,0003	0,0019	0,0027	0,0337
131	NUSA TENGGARA BARAT	(123) KAB. DOMPU	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0030	0,0007	0,0048	0,0012	0,0097	0,0012	0,0009	0,0012	0,0005	0,0038	0,0335
132	SULAWESI SELATAN	(63) KAB. BARRU	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0011	0,0048	0,0012	0,0094	0,0006	0,0009	0,0005	0,0019	0,0039	0,0333
133	SUMATERA UTARA	(97) KAB. TANAH KARO	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0048	0,0005	0,0100	0,0006	0,0004	0,0012	0,0009	0,0031	0,0331
134	KALIMANTAN TIMUR	(82) KAB. KUTAI KERTANEGARA	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0037	0,0048	0,0116	0,0005	0,0206	0,0025	0,0009	0,0012	0,0019	0,0065	0,0328

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	SOSIAL POLITIK													TOTAL SCORE	
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat- istiadat	Etos Kerja		Sub Total
0.0523	0.0311	0.0724	Keamanan	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	Politik	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141	Budaya	0.2608			
135	JAWA TENGAH	(134) KAB. PEMALANG	0,0034	0,0036	0,0048	0,0118	0,0023	0,0024	0,0094	0,0003	0,0144	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0322
136	BENGKULU	(127) KAB. BENGKULU SELATAN	0,0034	0,0036	0,0102	0,0172	0,0023	0,0011	0,0048	0,0025	0,0107	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0321
137	BANTEN	(65) KAB. TANGERANG	0,0062	0,0021	0,0102	0,0185	0,0023	0,0024	0,0048	0,0003	0,0098	0,0003	0,0004	0,0012	0,0019	0,0038	0,0321
138	JAWA TIMUR	(118) KAB. LAMONGAN	0,0034	0,0036	0,0025	0,0095	0,0023	0,0024	0,0116	0,0005	0,0168	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0315
139	JAWA TENGAH	(51) KAB. CILACAP	0,0020	0,0021	0,0048	0,0089	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0006	0,0009	0,0012	0,0019	0,0046	0,0310
140	SULAWESI TENGAH	(119) KAB. POSO	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0011	0,0094	0,0005	0,0147	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0307
141	JAWA TIMUR	(133) KAB. BANYUWANGI	0,0034	0,0036	0,0025	0,0095	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0006	0,0002	0,0005	0,0019	0,0032	0,0302
142	SUMATERA SELATAN	(76) KAB. MUSI BANYUASIN	0,0034	0,0021	0,0048	0,0103	0,0023	0,0024	0,0116	0,0005	0,0168	0,0006	0,0002	0,0012	0,0005	0,0025	0,0296
143	NUSA TENGGARA TIMUR	(75) KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0023	0,0095	0,0048	0,0049	0,0215	0,0006	0,0002	0,0005	0,0009	0,0022	0,0294
144	JAWA TIMUR	(146) KAB. PAMEKASAN	0,0034	0,0012	0,0025	0,0071	0,0023	0,0024	0,0116	0,0025	0,0188	0,0003	0,0009	0,0003	0,0019	0,0034	0,0293
145	JAWA TIMUR	(134) KAB. BANGKALAN	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0023	0,0024	0,0116	0,0025	0,0188	0,0003	0,0009	0,0012	0,0019	0,0043	0,0288
146	NUSA TENGGARA BARAT	(141) KAB. BIMA	0,0034	0,0021	0,0102	0,0157	0,0023	0,0011	0,0048	0,0003	0,0085	0,0003	0,0002	0,0020	0,0009	0,0034	0,0276
147	JAWA TENGAH	(136) KAB. BANYUMAS	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0023	0,0024	0,0116	0,0005	0,0168	0,0003	0,0009	0,0012	0,0019	0,0043	0,0268
148	JAWA BARAT	(105) KAB. BANDUNG	0,0062	0,0036	0,0048	0,0146	0,0023	0,0024	0,0048	0,0012	0,0107	0,0003	0,0002	0,0005	0,0005	0,0015	0,0268
149	JAWA TIMUR	(135) KAB. PASURUAN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0023	0,0007	0,0048	0,0003	0,0081	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0257
150	SUMATERA UTARA	(38) KAB. LABUHAN BATU	0,0034	0,0021	0,0025	0,0080	0,0023	0,0024	0,0048	0,0012	0,0107	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0239
151	JAWA TIMUR	(140) KAB. MOJOKERTO	0,0020	0,0012	0,0048	0,0080	0,0037	0,0007	0,0020	0,0003	0,0067	0,0012	0,0009	0,0020	0,0040	0,0081	0,0228
152	KALIMANTAN SELATAN	(130) KAB. TANAH LAUT	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0037	0,0048	0,0048	0,0005	0,0138	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0221
153	DIY	(143) KAB. BANTUL	0,0034	0,0012	0,0025	0,0071	0,0023	0,0011	0,0048	0,0003	0,0085	0,0006	0,0004	0,0012	0,0019	0,0041	0,0197
154	NUSA TENGGARA TIMUR	(148) KAB. FLORES TIMUR	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0037	0,0024	0,0048	0,0003	0,0112	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0195
155	LAMPUNG	(142) KAB. LAMPUNG TIMUR	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0023	0,0024	0,0048	0,0005	0,0100	0,0006	0,0004	0,0012	0,0009	0,0031	0,0188
156	SUMATERA UTARA	(131) KAB. DELI SERDANG	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0023	0,0024	0,0048	0,0005	0,0100	0,0006	0,0002	0,0003	0,0005	0,0016	0,0173

Lampiran 4.6.1.3. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Ekonomi Daerah 156 Kabupaten di Indonesia

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
											0.0481
										0.1676	
1	SUMATERA UTARA	(44) KAB. ASAHAN	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0042	0,0069	0,0004	0,0115	0,0635
2	SUMATERA UTARA	(38) KAB. LABUHAN BATU	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0042	0,0069	0,0004	0,0115	0,0635
3	KALIMANTAN TIMUR	(81) KAB. BERAU	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0076	0,0023	0,0008	0,0107	0,0627
4	JAWA BARAT	(1) KAB. PURWAKARTA	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0617
5	JAWA TENGAH	(51) KAB. CILACAP	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0617
6	KALIMANTAN TIMUR	(66) KAB. KUTAI TIMUR	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0610
7	SULAWESI SELATAN	(28) KAB. LUWU UTARA	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0076	0,0006	0,0004	0,0086	0,0606
8	JAWA BARAT	(32) KAB. BEKASI	0,0247	0,0222	0,0051	0,0520	0,0009	0,0069	0,0004	0,0082	0,0602
9	JAWA BARAT	(12) KAB. INDRAMAYU	0,0247	0,0222	0,0008	0,0477	0,0076	0,0023	0,0004	0,0103	0,0580
10	KALIMANTAN SELATAN	(23) KAB. TABALONG	0,0247	0,0222	0,0014	0,0483	0,0076	0,0006	0,0004	0,0086	0,0569
11	KALIMANTAN TIMUR	(53) KAB. PASIR	0,0247	0,0133	0,0051	0,0431	0,0076	0,0023	0,0004	0,0103	0,0534
12	SULAWESI TENGAH	(99) KAB. MOROWALI	0,0247	0,0133	0,0051	0,0431	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0525
13	JAMBI	(20) KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0,0247	0,0133	0,0051	0,0431	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0521
14	SUMATERA UTARA	(97) KAB. TANAH KARO	0,0126	0,0222	0,0079	0,0427	0,0076	0,0006	0,0008	0,0090	0,0517
15	SULAWESI TENGAH	(45) KAB. TOLI TOLI	0,0126	0,0222	0,0051	0,0399	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0504
16	KALIMANTAN TENGAH	(7) KAB. BARITO UTARA	0,0247	0,0062	0,0079	0,0388	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0482
17	JAWA TIMUR	(58) KAB. GRESIK	0,0247	0,0062	0,0079	0,0388	0,0009	0,0069	0,0008	0,0086	0,0474
18	BALI	(34) KAB. BADUNG	0,0247	0,0062	0,0079	0,0388	0,0009	0,0010	0,0048	0,0067	0,0455
19	SULAWESI UTARA	(20) KAB. MINAHASA	0,0062	0,0222	0,0086	0,0370	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0454
20	KALIMANTAN SELATAN	(37) KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,0126	0,0222	0,0008	0,0356	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0450
21	JAWA TIMUR	(55) KAB. SIDOARJO	0,0247	0,0016	0,0086	0,0349	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0446
22	SULAWESI TENGAH	(10) KAB. BANGGAI	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0076	0,0023	0,0008	0,0107	0,0442
23	RIAU	(22) KAB. PELALAWAN	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0076	0,0023	0,0004	0,0103	0,0438
24	KALIMANTAN TIMUR	(3) KAB. BULUNGAN	0,0247	0,0016	0,0079	0,0342	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0432
25	RIAU	(81) KAB. KUANTAN SENGGIGI	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0429
26	LAMPUNG	(142) KAB. LAMPUNG TIMUR	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0429

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
27	SUMATERA UTARA	(56) KAB. DAIRI	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0425
28	KALIMANTAN TIMUR	(17) KAB. NUNUKAN	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0425
29	JAWA TENGAH	(87) KAB. KUDUS	0,0247	0,0016	0,0051	0,0314	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0411
30	SUMATERA SELATAN	(76) KAB. MUSI BANYUASIN	0,0247	0,0016	0,0051	0,0314	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0404
31	KALIMANTAN TIMUR	(82) KAB. KUTAI KERTANEGARA	0,0247	0,0016	0,0051	0,0314	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0404
32	SUMATERA SELATAN	(67) KAB. MUARA ENIM	0,0247	0,0016	0,0051	0,0314	0,0076	0,0006	0,0004	0,0086	0,0400
33	RIAU	(42) KAB. ROKAN HULU	0,0030	0,0222	0,0051	0,0303	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0397
34	PAPUA	(31) KAB. MANOKWARI	0,0247	0,0030	0,0008	0,0285	0,0076	0,0023	0,0008	0,0107	0,0392
35	KALIMANTAN BARAT	(74) KAB. SANGGAU	0,0062	0,0222	0,0014	0,0298	0,0042	0,0043	0,0008	0,0093	0,0391
36	SULAWESI SELATAN	(36) KAB. MAROS	0,0062	0,0222	0,0051	0,0335	0,0042	0,0006	0,0004	0,0052	0,0387
37	SULAWESI TENGAH	(84) KAB. DONGGALA	0,0247	0,0016	0,0014	0,0277	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0371
38	PAPUA	(46) KAB. SORONG	0,0247	0,0016	0,0014	0,0277	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0367
39	BANGKA BELITUNG	(61) KAB. BANGKA	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0042	0,0069	0,0004	0,0115	0,0354
40	SULAWESI UTARA	(16) KAB. SANGIHE	0,0030	0,0133	0,0079	0,0242	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0347
41	SULAWESI TENGGARA	(33) KAB. KOLAKA	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0076	0,0023	0,0008	0,0107	0,0346
42	NUSA TENGGARA BARAT	(93) KAB. LOMBOK TIMUR	0,0247	0,0016	0,0008	0,0271	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0342
43	SUMATERA UTARA	(91) KAB. LANGKAT	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0329
44	BANGKA BELITUNG	(27) KAB. BELITUNG	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0323
45	BALI	(30) KAB. GIANYAR	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0016	0,0023	0,0043	0,0082	0,0321
46	KALIMANTAN BARAT	(108) KAB. PONTIANAK	0,0126	0,0030	0,0051	0,0207	0,0016	0,0069	0,0019	0,0104	0,0311
47	KALIMANTAN TENGAH	(95) KAB. BARITO SELATAN	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0310
48	KALIMANTAN TENGAH	(29) KAB. KAPUAS	0,0062	0,0062	0,0079	0,0203	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0308
49	BALI	(4) KAB. JEMBRANA	0,0062	0,0062	0,0079	0,0203	0,0042	0,0010	0,0048	0,0100	0,0303
50	SULAWESI SELATAN	(21) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN	0,0062	0,0133	0,0014	0,0209	0,0016	0,0069	0,0004	0,0089	0,0298
51	SUMATERA UTARA	(131) KAB. DELI SERDANG	0,0062	0,0062	0,0079	0,0203	0,0042	0,0043	0,0008	0,0093	0,0296
52	BANTEN	(65) KAB. TANGERANG	0,0062	0,0062	0,0079	0,0203	0,0009	0,0069	0,0008	0,0086	0,0289
53	SUMATERA UTARA	(104) KAB. SIMALUNGUN	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0076	0,0023	0,0004	0,0103	0,0278

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
							0.0219	0.0151	0.0123		
			0.0481	0.0463	0.0239		0.0219	0.0151	0.0123		0.1676
54	J A M B I	(79) KAB. KERINCI	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0270
55	SULAWESI SELATAN	(60) KAB. PINRANG	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0269
56	NUSA TENGGARA BARAT	(123) KAB. DOMPU	0,0126	0,0030	0,0008	0,0164	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0269
57	KALIMANTAN BARAT	(126) KAB. KAPUAS HULU	0,0062	0,0062	0,0014	0,0138	0,0076	0,0010	0,0043	0,0129	0,0267
58	LAMPUNG	(59) KAB. LAMPUNG BARAT	0,0030	0,0133	0,0014	0,0177	0,0076	0,0006	0,0008	0,0090	0,0267
59	BALI	(21) KAB. TABANAN	0,0062	0,0030	0,0079	0,0171	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0266
60	R I A U	(70) KAB. BENGKALIS	0,0062	0,0016	0,0079	0,0157	0,0042	0,0023	0,0043	0,0108	0,0265
61	JAWA TENGAH	(102) KAB. KARANG ANYAR	0,0062	0,0016	0,0079	0,0157	0,0016	0,0069	0,0019	0,0104	0,0261
62	DIY	(121) KAB. GUNUNG KIDUL	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0259
63	PAPUA	(117) KAB. JAYAWIJAYA	0,0016	0,0133	0,0008	0,0157	0,0076	0,0006	0,0019	0,0101	0,0258
64	JAWA TIMUR	(134) KAB. TULUNGAGUNG	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0016	0,0023	0,0043	0,0082	0,0257
65	SUMATERA BARAT	(35) KAB. PESISIR SELATAN	0,0062	0,0030	0,0051	0,0143	0,0042	0,0023	0,0043	0,0108	0,0251
66	JAWA BARAT	(57) KAB. CIAMIS	0,0062	0,0030	0,0051	0,0143	0,0042	0,0023	0,0043	0,0108	0,0251
67	JAMBI	(68) KAB. TEBO	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0248
68	SULAWESI SELATAN	(72) KAB. MAJENE	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0248
69	SULAWESI SELATAN	(25) KAB. TANA TORAJA	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0248
70	SULAWESI SELATAN	(19) KAB. GOWA	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0248
71	R I A U	(101) KAB. INDRAGIRI HILIR	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0246
72	J A M B I	(90) KAB. BUNGO	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0246
73	KALIMANTAN SELATAN	(109) KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0246
74	KALIMANTAN SELATAN	(125) KAB. TAPIN	0,0062	0,0062	0,0051	0,0175	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0246
75	JAWA BARAT	(105) KAB. BANDUNG	0,0062	0,0016	0,0079	0,0157	0,0009	0,0069	0,0008	0,0086	0,0243
76	BALI	(13) KAB. BANGLI	0,0062	0,0030	0,0051	0,0143	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0238
77	SULAWESI SELATAN	(6) KAB. ENREKANG	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0237
78	SUMATERA UTARA	(54) KAB. TAPANULI UTARA	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0234
79	NUSA TENGGARA TIMUR	(128) KAB. NGADA	0,0016	0,0062	0,0051	0,0129	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0234
80	JAWA TIMUR	(83) KAB. KEDIRI	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0227

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
							0.0219	0.0151	0.0123		
			0.0481	0.0463	0.0239		0.0219	0.0151	0.0123		0.1676
81	KALIMANTAN SELATAN	(130) KAB. TANAH LAUT	0,0062	0,0030	0,0051	0,0143	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0227
82	JAWA TENGAH	(96) KAB. KENDAL	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0016	0,0069	0,0008	0,0093	0,0222
83	SUMATERA BARAT	(49) KAB. SOLOK	0,0062	0,0062	0,0014	0,0138	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0222
84	KALIMANTAN BARAT	(113) KAB. KETAPANG	0,0062	0,0062	0,0014	0,0138	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0222
85	JAWA TENGAH	(129) KAB. JEPARA	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0221
86	JAWA TIMUR	(140) KAB. MOJOKERTO	0,0062	0,0030	0,0051	0,0143	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0221
87	LAMPUNG	(145) KAB. LAMPUNG SELATAN	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0076	0,0023	0,0008	0,0107	0,0218
88	SUMATERA BARAT	(11) KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	0,0062	0,0062	0,0008	0,0132	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0216
89	JAWA BARAT	(86) KAB. KARAWANG	0,0062	0,0062	0,0014	0,0138	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0216
90	KALIMANTAN BARAT	(85) KAB. SAMBAS	0,0062	0,0062	0,0008	0,0132	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0216
91	SULAWESI SELATAN	(63) KAB. BARRU	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0216
92	PAPUA	(116) KAB. MIMIKA	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0076	0,0006	0,0004	0,0086	0,0215
93	SUMATERA BARAT	(62) KAB. PASAMAN	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0214
94	JAWA TIMUR	(73) KAB. BLITAR	0,0030	0,0062	0,0051	0,0143	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0214
95	J A M B I	(39) KAB. BATANGHARI	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0213
96	SUMATERA SELATAN	(40) KAB. LAHAT	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0213
97	SULAWESI TENGAH	(119) KAB. POSO	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0213
98	BALI	(52) KAB. BULELENG	0,0062	0,0062	0,0014	0,0138	0,0016	0,0010	0,0048	0,0074	0,0212
99	JAWA TIMUR	(133) KAB. BANYUWANGI	0,0030	0,0062	0,0014	0,0106	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0211
100	DIY	(143) KAB. BANTUL	0,0030	0,0016	0,0079	0,0125	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0209
101	JAWA TENGAH	(132) KAB. SUKOHARJO	0,0062	0,0016	0,0051	0,0129	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0207
102	JAWA BARAT	(5) KAB. KUNINGAN	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0206
103	SULAWESI SELATAN	(14) KAB. SINJAI	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0205
104	SULAWESI SELATAN	(101) KAB. LUWU	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0076	0,0023	0,0008	0,0107	0,0204
105	LAMPUNG	(10) KAB. LAMPUNG UTARA	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0202
106	SULAWESI SELATAN	(24) KAB. BANTAENG	0,0030	0,0062	0,0014	0,0106	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0200
107	JAWA TENGAH	(122) KAB. MAGELANG	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0195

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
0.0481	0.0463	0.0239		0.0219	0.0151	0.0123		0.1676			
108	JAWA BARAT	(9) KAB. TASIKMALAYA	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0016	0,0023	0,0043	0,0082	0,0193
109	BENGKULU	(127) KAB. BENGKULU SELATAN	0,0016	0,0030	0,0051	0,0097	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0192
110	R I A U	(50) KAB. KAMPAR	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0191
111	BALI	(48) KAB. KARANG ASEM	0,0062	0,0030	0,0008	0,0100	0,0042	0,0006	0,0043	0,0091	0,0191
112	NUSA TENGGARA TIMUR	(43) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0,0016	0,0062	0,0008	0,0086	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0191
113	NUSA TENGGARA TIMUR	(75) KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0,0016	0,0062	0,0008	0,0086	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0191
114	SUMATERA SELATAN	(125) KAB. OGAN KOMERING ILIR	0,0030	0,0062	0,0014	0,0106	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0190
115	JAWA BARAT	(124) KAB. SUKABUMI	0,0030	0,0062	0,0014	0,0106	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0190
116	SULAWESI SELATAN	(107) KAB. TAKALAR	0,0030	0,0062	0,0014	0,0106	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0190
117	JAWA TENGAH	(110) KAB. PEKALONGAN	0,0062	0,0030	0,0014	0,0106	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0184
118	JAWA BARAT	(100) KAB. BOGOR	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0009	0,0069	0,0008	0,0086	0,0183
119	SUMATERA SELATAN	(88) KAB. MUSI RAWAS	0,0062	0,0016	0,0014	0,0092	0,0076	0,0010	0,0004	0,0090	0,0182
120	JAWA BARAT	(18) KAB. CIANJUR	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0182
121	JAWA BARAT	(100) KAB. SUMEDANG	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0181
122	JAWA TENGAH	(75) KAB. BOYOLALI	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0181
123	JAWA TIMUR	(2) KAB. MAGETAN	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0181
124	JAWA TIMUR	(98) KAB. JOMBANG	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0181
125	NUSA TENGGARA TIMUR	(15) KAB. ENDE	0,0016	0,0062	0,0008	0,0086	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0181
126	SULAWESI SELATAN	(8) KAB. JENEPONTO	0,0016	0,0062	0,0008	0,0086	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0180
127	NUSA TENGGARA TIMUR	(115) KAB. MANGGARAI	0,0016	0,0062	0,0008	0,0086	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0180
128	JAWA TIMUR	(118) KAB. LAMONGAN	0,0030	0,0030	0,0014	0,0074	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0179
129	BANTEN	(94) KAB. SERANG	0,0062	0,0016	0,0014	0,0092	0,0009	0,0069	0,0008	0,0086	0,0178
130	LAMPUNG	(64) KAB. WAY KANAN	0,0016	0,0016	0,0051	0,0083	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0177
131	JAWA BARAT	(78) KAB. SUBANG	0,0062	0,0030	0,0014	0,0106	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0177
132	SULAWESI SELATAN	(69) KAB. SELAYAR	0,0030	0,0062	0,0014	0,0106	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0177
133	JAWA TENGAH	(134) KAB. PEMALANG	0,0016	0,0062	0,0014	0,0092	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0176
134	JAWA TENGAH	(92) KAB. KLATEN	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0175

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
							0.0219	0.0151	0.0123		
			0.0481	0.0463	0.0239		0.0219	0.0151	0.0123		0.1676
135	BANTEN	(47) KAB. LEBAK	0,0030	0,0062	0,0008	0,0100	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0171
136	JAWA TIMUR	(134) KAB. BANGKALAN	0,0030	0,0062	0,0008	0,0100	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0171
137	JAWA TIMUR	(144) KAB. JEMBER	0,0030	0,0062	0,0008	0,0100	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0171
138	SULAWESI SELATAN	(80) KAB. BONE	0,0030	0,0030	0,0014	0,0074	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0168
139	KALIMANTAN SELATAN	(112) KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,0030	0,0016	0,0051	0,0097	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0168
140	JAWA TENGAH	(136) KAB. BANYUMAS	0,0016	0,0016	0,0051	0,0083	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0167
141	GORONTALO	(106) KAB. GORONTALO	0,0016	0,0016	0,0051	0,0083	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0167
142	PAPUA	(137) KAB. FAKFAK	0,0016	0,0016	0,0051	0,0083	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0167
143	JAWA TIMUR	(139) KAB. BONDOWOSO	0,0016	0,0030	0,0008	0,0054	0,0076	0,0010	0,0019	0,0105	0,0159
144	JAWA TIMUR	(135) KAB. PASURUAN	0,0030	0,0016	0,0008	0,0054	0,0042	0,0043	0,0019	0,0104	0,0158
145	SULAWESI TENGGARA	(111) KAB. BUTON	0,0030	0,0030	0,0014	0,0074	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0158
146	NUSA TENGGARA TIMUR	(26) KAB. BELU	0,0016	0,0062	0,0008	0,0086	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0157
147	JAWA TENGAH	(114) KAB. KEBUMEN	0,0016	0,0016	0,0051	0,0083	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0154
148	NUSA TENGGARA BARAT	(138) KAB. LOMBOK BARAT	0,0030	0,0016	0,0008	0,0054	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0149
149	NUSA TENGGARA TIMUR	(120) KAB. SUMBA BARAT	0,0016	0,0030	0,0008	0,0054	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0148
150	JAWA BARAT	(89) KAB. CIREBON	0,0030	0,0016	0,0014	0,0060	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0144
151	NUSA TENGGARA TIMUR	(148) KAB. FLORES TIMUR	0,0016	0,0016	0,0014	0,0046	0,0042	0,0010	0,0043	0,0095	0,0141
152	JAWA TIMUR	(146) KAB. PAMEKASAN	0,0016	0,0016	0,0008	0,0040	0,0076	0,0010	0,0008	0,0094	0,0134
153	JAWA BARAT	(71) KAB. GARUT	0,0030	0,0016	0,0014	0,0060	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0131
154	JAWA TIMUR	(147) KAB. PONOROGO	0,0016	0,0016	0,0014	0,0046	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0130
155	NUSA TENGGARA BARAT	(141) KAB. BIMA	0,0030	0,0016	0,0008	0,0054	0,0042	0,0010	0,0019	0,0071	0,0125
156	JAWA TENGAH	(41) KAB. TEGAL	0,0016	0,0030	0,0014	0,0060	0,0016	0,0023	0,0019	0,0058	0,0118

Lampiran 4.6.1.4. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas 156 Kabupaten di Indonesia

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk-tivitas	
1	SUMATERA BARAT	(35) KAB. PESISIR SELATAN	0,0015	0,0027	0,0113	0,0155	0,0060	0,0088	0,0148	0,0273	0,0576
2	SULAWESI SELATAN	(21) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0060	0,0014	0,0074	0,0273	0,0506
3	JAWA BARAT	(32) KAB. BEKASI	0,0019	0,0027	0,0068	0,0114	0,0015	0,0088	0,0103	0,0273	0,0490
4	SULAWESI TENGGARA	(33) KAB. KOLAKA	0,0015	0,0027	0,0015	0,0057	0,0060	0,0088	0,0148	0,0273	0,0478
5	KALIMANTAN BARAT	(74) KAB. SANGGAU	0,0019	0,0004	0,0031	0,0054	0,0060	0,0088	0,0148	0,0273	0,0475
6	SUMATERA BARAT	(49) KAB. SOLOK	0,0006	0,0027	0,0015	0,0048	0,0060	0,0088	0,0148	0,0273	0,0469
7	KALIMANTAN TIMUR	(3) KAB. BULUNGAN	0,0025	0,0027	0,0031	0,0083	0,0015	0,0088	0,0103	0,0273	0,0459
8	SUMATERA UTARA	(38) KAB. LABUHAN BATU	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0015	0,0088	0,0103	0,0273	0,0440
9	BANGKA BELITUNG	(61) KAB. BANGKA	0,0006	0,0004	0,0008	0,0018	0,0060	0,0088	0,0148	0,0273	0,0439
10	SULAWESI SELATAN	(36) KAB. MAROS	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0020	0,0080	0,0273	0,0430
11	SUMATERA SELATAN	(40) KAB. LAHAT	0,0006	0,0009	0,0031	0,0046	0,0060	0,0021	0,0081	0,0273	0,0400
12	JAWA TENGAH	(51) KAB. CILACAP	0,0019	0,0009	0,0031	0,0059	0,0029	0,0020	0,0049	0,0273	0,0381
13	SUMATERA UTARA	(44) KAB. ASAHAN	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0015	0,0020	0,0035	0,0273	0,0372
14	SULAWESI SELATAN	(63) KAB. BARRU	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0335
15	SULAWESI SELATAN	(19) KAB. GOWA	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0335
16	J A M B I	(39) KAB. BATANGHARI	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0029	0,0088	0,0117	0,0140	0,0334
17	PAPUA	(46) KAB. SORONG	0,0006	0,0009	0,0015	0,0030	0,0015	0,0014	0,0029	0,0273	0,0332
18	BANTEN	(65) KAB. TANGERANG	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0328
19	JAWA BARAT	(105) KAB. BANDUNG	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0328
20	SUMATERA UTARA	(131) KAB. DELI SERDANG	0,0019	0,0025	0,0113	0,0157	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0326
21	JAMBI	(20) KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0,0019	0,0009	0,0113	0,0141	0,0029	0,0088	0,0117	0,0066	0,0324
22	JAWA BARAT	(86) KAB. KARAWANG	0,0025	0,0009	0,0113	0,0147	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0316
23	SULAWESI SELATAN	(80) KAB. BONE	0,0019	0,0004	0,0068	0,0091	0,0060	0,0088	0,0148	0,0066	0,0305
24	R I A U	(70) KAB. BENGKALIS	0,0034	0,0027	0,0068	0,0129	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0305
25	BANGKA BELITUNG	(27) KAB. BELITUNG	0,0025	0,0027	0,0031	0,0083	0,0060	0,0021	0,0081	0,0140	0,0304
26	SULAWESI SELATAN	(107) KAB. TAKALAR	0,0015	0,0027	0,0031	0,0073	0,0060	0,0021	0,0081	0,0140	0,0294

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk-tivitas	
											0.1263
27	KALIMANTAN BARAT	(108) KAB. PONTIANAK	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0088	0,0148	0,0066	0,0291
28	SUMATERA UTARA	(91) KAB. LANGKAT	0,0019	0,0025	0,0113	0,0157	0,0015	0,0088	0,0103	0,0028	0,0288
29	JAWA BARAT	(100) KAB. BOGOR	0,0015	0,0027	0,0113	0,0155	0,0015	0,0088	0,0103	0,0028	0,0286
30	JAWA BARAT	(89) KAB. CIREBON	0,0019	0,0009	0,0113	0,0141	0,0029	0,0088	0,0117	0,0028	0,0286
31	KALIMANTAN TENGAH	(29) KAB. KAPUAS	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0060	0,0088	0,0148	0,0066	0,0275
32	KALIMANTAN TENGAH	(95) KAB. BARITO SELATAN	0,0019	0,0025	0,0015	0,0059	0,0060	0,0088	0,0148	0,0066	0,0273
33	BALI	(34) KAB. BADUNG	0,0034	0,0032	0,0031	0,0097	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0273
34	KALIMANTAN BARAT	(113) KAB. KETAPANG	0,0019	0,0009	0,0068	0,0096	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0272
35	BANTEN	(47) KAB. LEBAK	0,0015	0,0004	0,0068	0,0087	0,0022	0,0020	0,0042	0,0140	0,0269
36	JAWA BARAT	(12) KAB. INDRAMAYU	0,0019	0,0004	0,0031	0,0054	0,0060	0,0088	0,0148	0,0066	0,0268
37	SUMATERA UTARA	(104) KAB. SIMALUNGUN	0,0006	0,0025	0,0068	0,0099	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0268
38	JAWA TIMUR	(55) KAB. SIDOARJO	0,0034	0,0032	0,0031	0,0097	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0266
39	KALIMANTAN SELATAN	(112) KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0258
40	RIAU	(81) KAB. KUANTAN SENGGIGI	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0253
41	SULAWESI SELATAN	(25) KAB. TANA TORAJA	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0253
42	BANTEN	(94) KAB. SERANG	0,0006	0,0009	0,0068	0,0083	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0252
43	JAWA BARAT	(100) KAB. SUMEDANG	0,0034	0,0027	0,0068	0,0129	0,0015	0,0088	0,0103	0,0019	0,0251
44	KALIMANTAN SELATAN	(130) KAB. TANAH LAUT	0,0025	0,0009	0,0031	0,0065	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0241
45	BALI	(52) KAB. BULELENG	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0237
46	BALI	(21) KAB. TABANAN	0,0034	0,0027	0,0008	0,0069	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0236
47	BALI	(4) KAB. JEMBRANA	0,0025	0,0027	0,0015	0,0067	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0234
48	SUMATERA BARAT	(11) KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	0,0015	0,0027	0,0015	0,0057	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0233
49	SUMATERA SELATAN	(88) KAB. MUSI RAWAS	0,0015	0,0009	0,0031	0,0055	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0231
50	SULAWESI TENGGARA	(111) KAB. BUTON	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0231
51	SULAWESI TENGAH	(119) KAB. POSO	0,0025	0,0027	0,0031	0,0083	0,0060	0,0020	0,0080	0,0066	0,0229
52	LAMPUNG	(64) KAB. WAY KANAN	0,0019	0,0027	0,0008	0,0054	0,0018	0,0088	0,0106	0,0066	0,0226
53	JAWA TIMUR	(2) KAB. MAGETAN	0,0034	0,0027	0,0031	0,0092	0,0018	0,0088	0,0106	0,0028	0,0226

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk- tivitas	
54	KALIMANTAN SELATAN	(109) KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,0019	0,0009	0,0031	0,0059	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0226
55	RIAU	(42) KAB. ROKAN HULU	0,0025	0,0009	0,0015	0,0049	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0225
56	SUMATERA SELATAN	(67) KAB. MUARA ENIM	0,0006	0,0009	0,0031	0,0046	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0222
57	KALIMANTAN BARAT	(85) KAB. SAMBAS	0,0006	0,0009	0,0031	0,0046	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0222
58	SULAWESI UTARA	(20) KAB. MINAHASA	0,0025	0,0025	0,0031	0,0081	0,0022	0,0088	0,0110	0,0028	0,0219
59	SULAWESI SELATAN	(28) KAB. LUWU UTARA	0,0015	0,0027	0,0031	0,0073	0,0060	0,0020	0,0080	0,0066	0,0219
60	BALI	(13) KAB. BANGLI	0,0034	0,0009	0,0008	0,0051	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0218
61	SULAWESI SELATAN	(60) KAB. PINRANG	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0014	0,0074	0,0066	0,0217
62	RIAU	(22) KAB. PELALAWAN	0,0006	0,0009	0,0031	0,0046	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0213
63	LAMPUNG	(10) KAB. LAMPUNG UTARA	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0018	0,0088	0,0106	0,0028	0,0211
64	KALIMANTAN TIMUR	(82) KAB. KUTAI KERTANEGARA	0,0019	0,0027	0,0068	0,0114	0,0015	0,0014	0,0029	0,0066	0,0209
65	KALIMANTAN BARAT	(126) KAB. KAPUAS HULU	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0060	0,0020	0,0080	0,0066	0,0207
66	JAWA TIMUR	(140) KAB. MOJOKERTO	0,0025	0,0027	0,0015	0,0067	0,0022	0,0088	0,0110	0,0028	0,0205
67	JAWA TENGAH	(92) KAB. KLATEN	0,0025	0,0027	0,0015	0,0067	0,0029	0,0088	0,0117	0,0019	0,0203
68	SUMATERA UTARA	(54) KAB. TAPANULI UTARA	0,0015	0,0025	0,0031	0,0071	0,0015	0,0088	0,0103	0,0028	0,0202
69	GORONTALO	(106) KAB. GORONTALO	0,0019	0,0004	0,0068	0,0091	0,0060	0,0021	0,0081	0,0028	0,0200
70	BALI	(48) KAB. KARANG ASEM	0,0019	0,0004	0,0008	0,0031	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0198
71	JAMBI	(68) KAB. TEBO	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0029	0,0088	0,0117	0,0019	0,0197
72	SULAWESI UTARA	(16) KAB. SANGIHE	0,0019	0,0009	0,0031	0,0059	0,0022	0,0088	0,0110	0,0028	0,0197
73	PAPUA	(116) KAB. MIMIKA	0,0006	0,0025	0,0113	0,0144	0,0015	0,0014	0,0029	0,0019	0,0192
74	LAMPUNG	(142) KAB. LAMPUNG TIMUR	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0018	0,0088	0,0106	0,0019	0,0186
75	SULAWESI TENGAH	(84) KAB. DONGGALA	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0185
76	JAWA TIMUR	(58) KAB. GRESIK	0,0025	0,0027	0,0031	0,0083	0,0015	0,0020	0,0035	0,0066	0,0184
77	JAWA BARAT	(78) KAB. SUBANG	0,0034	0,0009	0,0031	0,0074	0,0060	0,0021	0,0081	0,0028	0,0183
78	JAWA TENGAH	(110) KAB. PEKALONGAN	0,0019	0,0004	0,0015	0,0038	0,0029	0,0088	0,0117	0,0028	0,0183
79	SUMATERA BARAT	(62) KAB. PASAMAN	0,0015	0,0027	0,0031	0,0073	0,0060	0,0021	0,0081	0,0028	0,0182
80	JAWA TENGAH	(87) KAB. KUDUS	0,0025	0,0027	0,0015	0,0067	0,0029	0,0020	0,0049	0,0066	0,0182

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk- tivitas	
81	KALIMANTAN TENGAH	(7) KAB. BARITO UTARA	0,0006	0,0027	0,0008	0,0041	0,0060	0,0014	0,0074	0,0066	0,0181
82	SULAWESI SELATAN	(6) KAB. ENREKANG	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0014	0,0074	0,0028	0,0179
83	JAWA BARAT	(1) KAB. PURWAKARTA	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0015	0,0020	0,0035	0,0066	0,0178
84	SUMATERA UTARA	(97) KAB. TANAH KARO	0,0006	0,0032	0,0008	0,0046	0,0015	0,0088	0,0103	0,0028	0,0177
85	JAWA TIMUR	(98) KAB. JOMBANG	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0176
86	KALIMANTAN TIMUR	(17) KAB. NUNUKAN	0,0019	0,0027	0,0008	0,0054	0,0015	0,0088	0,0103	0,0019	0,0176
87	SULAWESI TENGAH	(45) KAB. TOLI TOLI	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0172
88	KALIMANTAN TIMUR	(81) KAB. BERAU	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0015	0,0014	0,0029	0,0066	0,0172
89	SULAWESI SELATAN	(101) KAB. LUWU	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0172
90	SULAWESI SELATAN	(69) KAB. SELAYAR	0,0025	0,0004	0,0031	0,0060	0,0060	0,0021	0,0081	0,0028	0,0169
91	JAWA BARAT	(124) KAB. SUKABUMI	0,0019	0,0004	0,0068	0,0091	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0168
92	BALI	(30) KAB. GIANYAR	0,0034	0,0027	0,0008	0,0069	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0168
93	KALIMANTAN SELATAN	(23) KAB. TABALONG	0,0025	0,0027	0,0008	0,0060	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0168
94	SULAWESI SELATAN	(24) KAB. BANTAENG	0,0019	0,0009	0,0031	0,0059	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0167
95	SULAWESI TENGAH	(10) KAB. BANGGAI	0,0015	0,0027	0,0015	0,0057	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0165
96	JAWA TENGAH	(41) KAB. TEGAL	0,0015	0,0004	0,0068	0,0087	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0164
97	SUMATERA SELATAN	(125) KAB. OGAN KOMERING ILIR	0,0019	0,0004	0,0031	0,0054	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0162
98	JAWA TIMUR	(83) KAB. KEDIRI	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0160
99	NUSA TENGGARA TIMUR	(26) KAB. BELU	0,0015	0,0004	0,0015	0,0034	0,0018	0,0088	0,0106	0,0019	0,0159
100	JAWA TENGAH	(96) KAB. KENDAL	0,0025	0,0009	0,0008	0,0042	0,0029	0,0020	0,0049	0,0066	0,0157
101	JAWA TIMUR	(135) KAB. PASURUAN	0,0034	0,0009	0,0015	0,0058	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0157
102	NUSA TENGGARA TIMUR	(15) KAB. ENDE	0,0006	0,0009	0,0015	0,0030	0,0018	0,0088	0,0106	0,0019	0,0155
103	PAPUA	(117) KAB. JAYAWIJAYA	0,0019	0,0004	0,0008	0,0031	0,0015	0,0088	0,0103	0,0019	0,0153
104	JAWA BARAT	(71) KAB. GARUT	0,0015	0,0004	0,0068	0,0087	0,0018	0,0020	0,0038	0,0028	0,0153
105	R I A U	(50) KAB. KAMPAR	0,0019	0,0025	0,0015	0,0059	0,0060	0,0014	0,0074	0,0019	0,0152
106	JAWA TENGAH	(136) KAB. BANYUMAS	0,0025	0,0027	0,0031	0,0083	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0151
107	JAWA BARAT	(18) KAB. CIANJUR	0,0019	0,0004	0,0068	0,0091	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0149

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk- tivitas	
108	JAWA BARAT	(5) KAB. KUNINGAN	0,0019	0,0004	0,0068	0,0091	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0148
109	NUSA TENGGARA TIMUR	(148) KAB. FLORES TIMUR	0,0006	0,0009	0,0008	0,0023	0,0018	0,0088	0,0106	0,0019	0,0148
110	JAWA TENGAH	(132) KAB. SUKOHARJO	0,0034	0,0027	0,0008	0,0069	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0146
111	SUMATERA SELATAN	(76) KAB. MUSI BANYUASIN	0,0019	0,0009	0,0008	0,0036	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0144
112	D.I.YOGYAKRTA	(143) KAB. BANTUL	0,0034	0,0027	0,0015	0,0076	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0144
113	KALIMANTAN SELATAN	(125) KAB. TAPIN	0,0025	0,0004	0,0015	0,0044	0,0060	0,0021	0,0081	0,0019	0,0144
114	NUSA TENGGARA TIMUR	(115) KAB. MANGGARAI	0,0006	0,0004	0,0008	0,0018	0,0018	0,0088	0,0106	0,0019	0,0143
115	JAWA TIMUR	(146) KAB. PAMEKASAN	0,0019	0,0009	0,0015	0,0043	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0142
116	SULAWESI TENGAH	(99) KAB. MOROWALI	0,0015	0,0004	0,0015	0,0034	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0142
117	JAWA TIMUR	(134) KAB. TULUNGAGUNG	0,0034	0,0027	0,0015	0,0076	0,0018	0,0020	0,0038	0,0028	0,0142
118	R I A U	(101) KAB. INDRAGIRI HILIR	0,0015	0,0009	0,0015	0,0039	0,0060	0,0014	0,0074	0,0028	0,0141
119	NUSA TENGGARA BARAT	(141) KAB. BIMA	0,0015	0,0027	0,0031	0,0073	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0141
120	J A M B I	(79) KAB. KERINCI	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0138
121	KALIMANTAN SELATAN	(37) KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,0019	0,0004	0,0015	0,0038	0,0060	0,0021	0,0081	0,0019	0,0138
122	SULAWESI SELATAN	(14) KAB. SINJAI	0,0019	0,0009	0,0008	0,0036	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0135
123	JAWA TENGAH	(122) KAB. MAGELANG	0,0025	0,0027	0,0015	0,0067	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0135
124	JAWA TIMUR	(118) KAB. LAMONGAN	0,0034	0,0027	0,0015	0,0076	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0133
125	NUSA TENGGARA BARAT	(123) KAB. DOMPU	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0029	0,0021	0,0050	0,0019	0,0133
126	JAWA TIMUR	(147) KAB. PONOROGO	0,0034	0,0009	0,0031	0,0074	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0132
127	SULAWESI SELATAN	(72) KAB. MAJENE	0,0006	0,0009	0,0008	0,0023	0,0060	0,0021	0,0081	0,0028	0,0132
128	SULAWESI SELATAN	(8) KAB. JENEPONTO	0,0006	0,0009	0,0015	0,0030	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0129
129	JAWA TENGAH	(75) KAB. BOYOLALI	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0129
130	J A M B I	(90) KAB. BUNGO	0,0015	0,0027	0,0008	0,0050	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0127
131	LAMPUNG	(59) KAB. LAMPUNG BARAT	0,0019	0,0027	0,0015	0,0061	0,0018	0,0020	0,0038	0,0028	0,0127
132	JAWA TENGAH	(102) KAB. KARANG ANYAR	0,0025	0,0009	0,0015	0,0049	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0126
133	JAWA TIMUR	(144) KAB. JEMBER	0,0034	0,0009	0,0015	0,0058	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0126
134	LAMPUNG	(145) KAB. LAMPUNG SELATAN	0,0019	0,0009	0,0031	0,0059	0,0018	0,0020	0,0038	0,0028	0,0125

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk- tivitas	
135	NUSA TENGGARA BARAT	(93) KAB. LOMBOK TIMUR	0,0015	0,0009	0,0031	0,0055	0,0029	0,0021	0,0050	0,0019	0,0124
136	JAWA BARAT	(9) KAB. TASIKMALAYA	0,0025	0,0009	0,0031	0,0065	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0122
137	JAWA TENGAH	(129) KAB. JEPARA	0,0019	0,0027	0,0008	0,0054	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0122
138	JAWA TIMUR	(134) KAB. BANGKALAN	0,0019	0,0004	0,0031	0,0054	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0122
139	JAWA TENGAH	(134) KAB. PEMALANG	0,0019	0,0009	0,0015	0,0043	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0120
140	D.I. YOGYAKARTA	(121) KAB. GUNUNG KIDUL	0,0025	0,0009	0,0008	0,0042	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0119
141	PAPUA	(137) KAB. FAKFAK	0,0015	0,0032	0,0015	0,0062	0,0015	0,0014	0,0029	0,0028	0,0119
142	JAWA BARAT	(57) KAB. CIAMIS	0,0025	0,0004	0,0031	0,0060	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0118
143	BENGKULU	(127) KAB. BENGKULU SELATAN	0,0019	0,0025	0,0015	0,0059	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0116
144	JAWA TIMUR	(133) KAB. BANYUWANGI	0,0034	0,0009	0,0015	0,0058	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0116
145	KALIMANTAN TIMUR	(53) KAB. PASIR	0,0006	0,0027	0,0015	0,0048	0,0015	0,0020	0,0035	0,0028	0,0111
146	KALIMANTAN TIMUR	(66) KAB. KUTAI TIMUR	0,0019	0,0032	0,0008	0,0059	0,0015	0,0014	0,0029	0,0019	0,0107
147	JAWA TIMUR	(73) KAB. BLITAR	0,0019	0,0009	0,0015	0,0043	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0101
148	JAWA TENGAH	(114) KAB. KEBUMEN	0,0019	0,0009	0,0015	0,0043	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0100
149	NUSA TENGGARA BARAT	(138) KAB. LOMBOK BARAT	0,0015	0,0004	0,0008	0,0027	0,0029	0,0020	0,0049	0,0019	0,0095
150	SUMATERA UTARA	(56) KAB. DAIRI	0,0006	0,0025	0,0008	0,0039	0,0015	0,0021	0,0036	0,0019	0,0094
151	NUSA TENGGARA TIMUR	(43) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0,0019	0,0004	0,0008	0,0031	0,0018	0,0014	0,0032	0,0028	0,0091
152	JAWA TIMUR	(139) KAB. BONDOWOSO	0,0019	0,0004	0,0008	0,0031	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0089
153	NUSA TENGGARA TIMUR	(120) KAB. SUMBA BARAT	0,0006	0,0004	0,0015	0,0025	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0083
154	PAPUA	(31) KAB. MANOKWARI	0,0006	0,0009	0,0008	0,0023	0,0015	0,0014	0,0029	0,0028	0,0080
155	NUSA TENGGARA TIMUR	(75) KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0,0006	0,0004	0,0008	0,0018	0,0018	0,0021	0,0039	0,0019	0,0076
156	NUSA TENGGARA TIMUR	(128) KAB. NGADA	0,0006	0,0004	0,0008	0,0018	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0075

Lampiran 4.6.1.5. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Infrastruktur Fisik 156 Kabupaten di Indonesia

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter-sediaan Infra-struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra-struktur	
1	JAWA TIMUR	(58) KAB. GRESIK	0,0040	0,0051	0,0017	0,0071	0,0070	0,0249	0,0035	0,0031	0,0022	0,0074	0,0052	0,0214	0,0463
2	JAWA BARAT	(32) KAB. BEKASI	0,0040	0,0051	0,0017	0,0071	0,0057	0,0236	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0052	0,0222	0,0458
3	BALI	(30) KAB. GIANYAR	0,0066	0,0038	0,0017	0,0044	0,0070	0,0235	0,0035	0,0031	0,0026	0,0074	0,0052	0,0218	0,0453
4	JAWA TENGAH	(41) KAB. TEGAL	0,0066	0,0051	0,0006	0,0071	0,0057	0,0251	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0448
5	SULAWESI SELATAN	(19) KAB. GOWA	0,0005	0,0038	0,0017	0,0071	0,0070	0,0201	0,0035	0,0031	0,0022	0,0074	0,0052	0,0214	0,0415
6	JAWA BARAT	(18) KAB. CIANJUR	0,0040	0,0033	0,0017	0,0071	0,0057	0,0218	0,0035	0,0006	0,0026	0,0074	0,0052	0,0193	0,0411
7	SULAWESI SELATAN	(36) KAB. MAROS	0,0040	0,0038	0,0017	0,0044	0,0057	0,0196	0,0035	0,0031	0,0022	0,0074	0,0052	0,0214	0,0410
8	BANTEN	(65) KAB. TANGERANG	0,0018	0,0051	0,0017	0,0044	0,0057	0,0187	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0052	0,0222	0,0409
9	JAWA TIMUR	(2) KAB. MAGETAN	0,0066	0,0013	0,0006	0,0071	0,0070	0,0226	0,0018	0,0006	0,0022	0,0074	0,0052	0,0172	0,0398
10	SULAWESI SELATAN	(8) KAB. JENEPONTO	0,0009	0,0033	0,0017	0,0071	0,0070	0,0200	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0397
11	BALI	(21) KAB. TABANAN	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0057	0,0178	0,0035	0,0031	0,0026	0,0074	0,0052	0,0218	0,0396
12	JAWA BARAT	(5) KAB. KUNINGAN	0,0040	0,0033	0,0017	0,0071	0,0070	0,0231	0,0018	0,0014	0,0007	0,0074	0,0052	0,0165	0,0396
13	JAWA BARAT	(12) KAB. INDRAMAYU	0,0040	0,0013	0,0006	0,0044	0,0070	0,0173	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0052	0,0222	0,0395
14	SULAWESI SELATAN	(14) KAB. SINJAI	0,0018	0,0033	0,0017	0,0071	0,0057	0,0196	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0393
15	SULAWESI SELATAN	(24) KAB. BANTAENG	0,0009	0,0033	0,0003	0,0071	0,0070	0,0186	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0383
16	SUMATERA BARAT	(11) KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	0,0018	0,0033	0,0017	0,0044	0,0070	0,0182	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0379
17	BALI	(52) KAB. BULELENG	0,0018	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0169	0,0035	0,0014	0,0026	0,0074	0,0052	0,0201	0,0370
18	JAWA TENGAH	(110) KAB. PEKALONGAN	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0057	0,0178	0,0035	0,0006	0,0022	0,0074	0,0052	0,0189	0,0367
19	JAWA BARAT	(9) KAB. TASIKMALAYA	0,0018	0,0013	0,0017	0,0071	0,0070	0,0189	0,0035	0,0006	0,0007	0,0074	0,0052	0,0174	0,0363
20	JAWA TENGAH	(92) KAB. KLATEN	0,0040	0,0013	0,0017	0,0044	0,0057	0,0171	0,0035	0,0006	0,0022	0,0074	0,0052	0,0189	0,0360
21	SUMATERA BARAT	(49) KAB. SOLOK	0,0009	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0160	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0357
22	JAWA TENGAH	(96) KAB. KENDAL	0,0040	0,0038	0,0017	0,0031	0,0057	0,0183	0,0035	0,0031	0,0022	0,0033	0,0052	0,0173	0,0356
23	SULAWESI SELATAN	(80) KAB. BONE	0,0005	0,0033	0,0017	0,0071	0,0057	0,0183	0,0006	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0168	0,0351
24	BANTEN	(47) KAB. LEBAK	0,0018	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0169	0,0035	0,0035	0,0026	0,0033	0,0052	0,0181	0,0350
25	SULAWESI SELATAN	(6) KAB. ENREKANG	0,0005	0,0013	0,0017	0,0071	0,0070	0,0176	0,0018	0,0006	0,0022	0,0074	0,0052	0,0172	0,0348
26	SULAWESI SELATAN	(60) KAB. PINRANG	0,0009	0,0033	0,0006	0,0044	0,0057	0,0149	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0346

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter-sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
27	JAWA BARAT	(100) KAB. BOGOR	0,0040	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0191	0,0035	0,0035	0,0026	0,0033	0,0022	0,0151	0,0342
28	JAWA BARAT	(1) KAB. PURWAKARTA	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0057	0,0178	0,0018	0,0035	0,0026	0,0033	0,0052	0,0164	0,0342
29	BALI	(13) KAB. BANGLI	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0070	0,0165	0,0035	0,0031	0,0026	0,0033	0,0052	0,0177	0,0342
30	SULAWESI TENGAH	(10) KAB. BANGGAI	0,0005	0,0033	0,0003	0,0071	0,0057	0,0169	0,0018	0,0014	0,0015	0,0074	0,0052	0,0173	0,0342
31	BANTEN	(94) KAB. SERANG	0,0018	0,0051	0,0017	0,0031	0,0029	0,0146	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0022	0,0192	0,0338
32	SULAWESI UTARA	(20) KAB. MINAHASA	0,0009	0,0038	0,0017	0,0044	0,0057	0,0165	0,0018	0,0031	0,0022	0,0074	0,0022	0,0167	0,0332
33	BALI	(34) KAB. BADUNG	0,0066	0,0038	0,0017	0,0031	0,0029	0,0181	0,0035	0,0031	0,0026	0,0033	0,0022	0,0147	0,0328
34	JAWA BARAT	(89) KAB. CIREBON	0,0040	0,0038	0,0017	0,0031	0,0057	0,0183	0,0035	0,0014	0,0007	0,0033	0,0052	0,0141	0,0324
35	JAWA BARAT	(86) KAB. KARAWANG	0,0040	0,0038	0,0017	0,0044	0,0029	0,0168	0,0035	0,0035	0,0026	0,0033	0,0022	0,0151	0,0319
36	JAWA TIMUR	(98) KAB. JOMBANG	0,0040	0,0013	0,0017	0,0031	0,0057	0,0158	0,0035	0,0014	0,0022	0,0033	0,0052	0,0156	0,0314
37	JAWA BARAT	(71) KAB. GARUT	0,0018	0,0013	0,0006	0,0044	0,0057	0,0138	0,0035	0,0006	0,0007	0,0074	0,0052	0,0174	0,0312
38	BALI	(48) KAB. KARANG ASEM	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0057	0,0152	0,0035	0,0014	0,0026	0,0033	0,0052	0,0160	0,0312
39	BALI	(4) KAB. JEMBRANA	0,0040	0,0038	0,0017	0,0010	0,0057	0,0162	0,0035	0,0031	0,0026	0,0033	0,0022	0,0147	0,0309
40	JAWA BARAT	(100) KAB. SUMEDANG	0,0040	0,0013	0,0006	0,0031	0,0057	0,0147	0,0018	0,0006	0,0007	0,0074	0,0052	0,0157	0,0304
41	JAWA TIMUR	(55) KAB. SIDOARJO	0,0040	0,0038	0,0017	0,0031	0,0029	0,0155	0,0035	0,0031	0,0022	0,0033	0,0022	0,0143	0,0298
42	SULAWESI SELATAN	(72) KAB. MAJENE	0,0009	0,0033	0,0006	0,0044	0,0057	0,0149	0,0035	0,0006	0,0022	0,0033	0,0052	0,0148	0,0297
43	KALIMANTAN TENGAH	(7) KAB. BARITO UTARA	0,0005	0,0013	0,0003	0,0071	0,0057	0,0149	0,0006	0,0006	0,0007	0,0074	0,0052	0,0145	0,0294
44	SUMATERA SELATAN	(67) KAB. MUARA ENIM	0,0040	0,0013	0,0017	0,0044	0,0029	0,0143	0,0018	0,0014	0,0022	0,0074	0,0022	0,0150	0,0293
45	JAWA TENGAH	(75) KAB. BOYOLALI	0,0040	0,0013	0,0017	0,0031	0,0057	0,0158	0,0035	0,0006	0,0022	0,0016	0,0052	0,0131	0,0289
46	SUMATERA UTARA	(54) KAB. TAPANULI UTARA	0,0009	0,0013	0,0006	0,0044	0,0057	0,0129	0,0003	0,0006	0,0022	0,0074	0,0052	0,0157	0,0286
47	JAWA TENGAH	(87) KAB. KUDUS	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0150	0,0035	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0276
48	SULAWESI UTARA	(16) KAB. SANGIHE	0,0009	0,0038	0,0006	0,0010	0,0057	0,0120	0,0035	0,0031	0,0022	0,0016	0,0052	0,0156	0,0276
49	SULAWESI SELATAN	(63) KAB. BARRU	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0150	0,0035	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0276
50	SUMATERA SELATAN	(40) KAB. LAHAT	0,0009	0,0006	0,0006	0,0071	0,0029	0,0121	0,0018	0,0014	0,0022	0,0074	0,0022	0,0150	0,0271
51	JAWA TENGAH	(136) KAB. BANYUMAS	0,0040	0,0013	0,0006	0,0031	0,0029	0,0119	0,0035	0,0006	0,0022	0,0033	0,0052	0,0148	0,0267
52	NUSA TENGGARA TIMUR	(75) KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0,0009	0,0013	0,0006	0,0044	0,0029	0,0101	0,0018	0,0006	0,0015	0,0074	0,0052	0,0165	0,0266
53	JAWA TENGAH	(122) KAB. MAGELANG	0,0040	0,0013	0,0017	0,0031	0,0057	0,0158	0,0035	0,0006	0,0022	0,0016	0,0022	0,0101	0,0259

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter-sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
54	JAWA TIMUR	(118) KAB. LAMONGAN	0,0040	0,0051	0,0017	0,0010	0,0029	0,0147	0,0035	0,0014	0,0022	0,0016	0,0022	0,0109	0,0256
55	SULAWESI TENGGARA	(33) KAB. KOLAKA	0,0005	0,0013	0,0017	0,0071	0,0029	0,0135	0,0006	0,0006	0,0007	0,0074	0,0022	0,0115	0,0250
56	SUMATERA UTARA	(131) KAB. DELI SERDANG	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0119	0,0018	0,0031	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0245
57	SULAWESI SELATAN	(107) KAB. TAKALAR	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0119	0,0018	0,0031	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0245
58	JAWA TENGAH	(114) KAB. KEBUMEN	0,0018	0,0013	0,0006	0,0031	0,0057	0,0125	0,0035	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0118	0,0243
59	NUSA TENGGARA TIMUR	(15) KAB. ENDE	0,0009	0,0051	0,0017	0,0031	0,0011	0,0119	0,0006	0,0014	0,0007	0,0074	0,0022	0,0123	0,0242
60	SULAWESI SELATAN	(21) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN	0,0005	0,0038	0,0006	0,0044	0,0029	0,0122	0,0035	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0118	0,0240
61	JAWA BARAT	(57) KAB. CIAMIS	0,0018	0,0013	0,0006	0,0031	0,0029	0,0097	0,0035	0,0014	0,0007	0,0033	0,0052	0,0141	0,0238
62	JAWA TENGAH	(129) KAB. JEPARA	0,0040	0,0033	0,0017	0,0010	0,0029	0,0129	0,0035	0,0014	0,0022	0,0016	0,0022	0,0109	0,0238
63	JAWA BARAT	(124) KAB. SUKABUMI	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0132	0,0018	0,0006	0,0026	0,0033	0,0022	0,0105	0,0237
64	JAWA TENGAH	(51) KAB. CILACAP	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0128	0,0018	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0109	0,0237
65	JAWA TIMUR	(135) KAB. PASURUAN	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0128	0,0018	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0109	0,0237
66	JAWA TENGAH	(102) KAB. KARANG ANYAR	0,0040	0,0013	0,0017	0,0031	0,0029	0,0130	0,0018	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0101	0,0231
67	JAWA TENGAH	(132) KAB. SUKOHARJO	0,0040	0,0033	0,0017	0,0010	0,0029	0,0129	0,0035	0,0006	0,0022	0,0016	0,0022	0,0101	0,0230
68	NUSA TENGGARA BARAT	(138) KAB. LOMBOK BARAT	0,0018	0,0038	0,0017	0,0031	0,0007	0,0111	0,0035	0,0031	0,0015	0,0033	0,0004	0,0118	0,0229
69	KALIMANTAN TIMUR	(82) KAB. KUTAI KERTANEGARA	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0119	0,0018	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0109	0,0228
70	SUMATERA SELATAN	(125) KAB. OGAN KOMERING ILIR	0,0009	0,0033	0,0017	0,0044	0,0029	0,0132	0,0018	0,0014	0,0022	0,0033	0,0008	0,0095	0,0227
71	KALIMANTAN SELATAN	(130) KAB. TANAH LAUT	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0011	0,0106	0,0018	0,0031	0,0015	0,0033	0,0022	0,0119	0,0225
72	KALIMANTAN TENGAH	(29) KAB. KAPUAS	0,0005	0,0033	0,0006	0,0031	0,0029	0,0104	0,0003	0,0014	0,0007	0,0074	0,0022	0,0120	0,0224
73	SULAWESI TENGAH	(84) KAB. DONGGALA	0,0005	0,0038	0,0017	0,0031	0,0011	0,0102	0,0018	0,0031	0,0015	0,0033	0,0022	0,0119	0,0221
74	JAWA TIMUR	(140) KAB. MOJOKERTO	0,0040	0,0033	0,0017	0,0010	0,0029	0,0129	0,0018	0,0014	0,0022	0,0016	0,0022	0,0092	0,0221
75	SUMATERA UTARA	(97) KAB. TANAH KARO	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0119	0,0018	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0101	0,0220
76	JAWA TIMUR	(133) KAB. BANYUWANGI	0,0018	0,0038	0,0006	0,0031	0,0029	0,0122	0,0006	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0097	0,0219
77	R I A U	(70) KAB. BENGKALIS	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0101	0,0006	0,0031	0,0022	0,0033	0,0022	0,0114	0,0215
78	SULAWESI SELATAN	(28) KAB. LUWU UTARA	0,0009	0,0013	0,0006	0,0031	0,0011	0,0070	0,0035	0,0031	0,0022	0,0033	0,0022	0,0143	0,0213
79	JAWA BARAT	(78) KAB. SUBANG	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0150	0,0006	0,0006	0,0026	0,0016	0,0008	0,0062	0,0212
80	NUSA TENGGARA TIMUR	(43) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0,0009	0,0013	0,0006	0,0031	0,0029	0,0088	0,0006	0,0006	0,0015	0,0074	0,0022	0,0123	0,0211

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter- sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
81	LAMPUNG	(10) KAB. LAMPUNG UTARA	0,0009	0,0013	0,0017	0,0031	0,0029	0,0099	0,0035	0,0031	0,0007	0,0016	0,0022	0,0111	0,0210
82	SUMATERA UTARA	(56) KAB. DAIRI	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0119	0,0006	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0089	0,0208
83	R I A U	(50) KAB. KAMPAR	0,0018	0,0038	0,0017	0,0005	0,0029	0,0107	0,0018	0,0031	0,0022	0,0008	0,0022	0,0101	0,0208
84	GORONTALO	(106) KAB. GORONTALO	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0011	0,0106	0,0018	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0102	0,0208
85	JAWA TIMUR	(73) KAB. BLITAR	0,0018	0,0013	0,0006	0,0005	0,0070	0,0112	0,0006	0,0006	0,0022	0,0008	0,0052	0,0094	0,0206
86	DIY	(143) KAB. BANTUL	0,0040	0,0013	0,0017	0,0005	0,0029	0,0104	0,0035	0,0006	0,0022	0,0016	0,0022	0,0101	0,0205
87	NUSA TENGGARA TIMUR	(26) KAB. BELU	0,0005	0,0013	0,0003	0,0071	0,0007	0,0099	0,0006	0,0006	0,0015	0,0074	0,0004	0,0105	0,0204
88	JAWA TENGAH	(134) KAB. PEMALANG	0,0040	0,0013	0,0006	0,0005	0,0029	0,0093	0,0035	0,0014	0,0022	0,0016	0,0022	0,0109	0,0202
89	JAWA TIMUR	(134) KAB. BANGKALAN	0,0009	0,0033	0,0003	0,0031	0,0029	0,0105	0,0006	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0097	0,0202
90	SULAWESI TENGAH	(119) KAB. POSO	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0011	0,0106	0,0018	0,0006	0,0015	0,0033	0,0022	0,0094	0,0200
91	KALIMANTAN SELATAN	(125) KAB. TAPIN	0,0005	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0097	0,0018	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0102	0,0199
92	R I A U	(101) KAB. INDRAGIRI HILIR	0,0018	0,0038	0,0006	0,0031	0,0011	0,0104	0,0018	0,0031	0,0022	0,0016	0,0004	0,0091	0,0195
93	JAWA BARAT	(105) KAB. BANDUNG	0,0040	0,0013	0,0017	0,0010	0,0029	0,0109	0,0035	0,0006	0,0007	0,0016	0,0022	0,0086	0,0195
94	SULAWESI TENGGARA	(111) KAB. BUTON	0,0009	0,0038	0,0006	0,0031	0,0011	0,0095	0,0006	0,0031	0,0007	0,0033	0,0022	0,0099	0,0194
95	PAPUA	(46) KAB. SORONG	0,0005	0,0051	0,0017	0,0031	0,0007	0,0111	0,0006	0,0031	0,0007	0,0033	0,0004	0,0081	0,0192
96	BANGKA BELITUNG	(27) KAB. BELITUNG	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0029	0,0124	0,0018	0,0006	0,0007	0,0033	0,0004	0,0068	0,0192
97	KALIMANTAN SELATAN	(109) KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,0005	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0097	0,0018	0,0006	0,0015	0,0033	0,0022	0,0094	0,0191
98	KALIMANTAN SELATAN	(112) KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,0005	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0097	0,0018	0,0006	0,0015	0,0033	0,0022	0,0094	0,0191
99	J A M B I	(90) KAB. BUNGO	0,0018	0,0006	0,0003	0,0031	0,0029	0,0087	0,0018	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0102	0,0189
100	KALIMANTAN SELATAN	(37) KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,0005	0,0013	0,0017	0,0031	0,0029	0,0095	0,0018	0,0006	0,0015	0,0033	0,0022	0,0094	0,0189
101	SUMATERA BARAT	(62) KAB. PASAMAN	0,0009	0,0006	0,0003	0,0031	0,0029	0,0078	0,0018	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0109	0,0187
102	JAWA TIMUR	(144) KAB. JEMBER	0,0040	0,0013	0,0003	0,0010	0,0029	0,0095	0,0018	0,0014	0,0022	0,0016	0,0022	0,0092	0,0187
103	KALIMANTAN BARAT	(108) KAB. PONTIANAK	0,0018	0,0038	0,0017	0,0010	0,0011	0,0094	0,0003	0,0031	0,0022	0,0033	0,0004	0,0093	0,0187
104	JAWA TIMUR	(147) KAB. PONOROGO	0,0040	0,0013	0,0006	0,0010	0,0029	0,0098	0,0018	0,0006	0,0022	0,0016	0,0022	0,0084	0,0182
105	SULAWESI SELATAN	(25) KAB. TANA TORAJA	0,0009	0,0006	0,0006	0,0044	0,0029	0,0094	0,0018	0,0006	0,0022	0,0033	0,0008	0,0087	0,0181
106	KALIMANTAN BARAT	(74) KAB. SANGGAU	0,0005	0,0033	0,0003	0,0031	0,0011	0,0083	0,0006	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0097	0,0180
107	PAPUA	(116) KAB. MIMIKA	0,0005	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0097	0,0006	0,0014	0,0007	0,0033	0,0022	0,0082	0,0179

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter- sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175		0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139					
108	KALIMANTAN TIMUR	(3) KAB. BULUNGAN	0,0009	0,0038	0,0017	0,0031	0,0007	0,0102	0,0003	0,0014	0,0022	0,0033	0,0004	0,0076	0,0178
109	KALIMANTAN TIMUR	(53) KAB. PASIR	0,0005	0,0038	0,0017	0,0010	0,0007	0,0077	0,0006	0,0031	0,0022	0,0033	0,0008	0,0100	0,0177
110	KALIMANTAN BARAT	(113) KAB. KETAPANG	0,0009	0,0033	0,0003	0,0031	0,0011	0,0087	0,0003	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0086	0,0173
111	JAWA TIMUR	(83) KAB. KEDIRI	0,0040	0,0013	0,0006	0,0010	0,0011	0,0080	0,0035	0,0006	0,0022	0,0016	0,0008	0,0087	0,0167
112	SUMATERA UTARA	(44) KAB. ASAHAN	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0007	0,0097	0,0003	0,0031	0,0022	0,0008	0,0004	0,0068	0,0165
113	SULAWESI SELATAN	(101) KAB. LUWU	0,0009	0,0013	0,0006	0,0031	0,0011	0,0070	0,0018	0,0014	0,0022	0,0033	0,0008	0,0095	0,0165
114	NUSA TENGGARA BARAT	(93) KAB. LOMBOK TIMUR	0,0009	0,0038	0,0017	0,0010	0,0007	0,0081	0,0018	0,0031	0,0015	0,0016	0,0004	0,0084	0,0165
115	JAWA TIMUR	(134) KAB. TULUNGAGUNG	0,0040	0,0006	0,0006	0,0005	0,0029	0,0086	0,0018	0,0006	0,0022	0,0008	0,0022	0,0076	0,0162
116	KALIMANTAN TIMUR	(17) KAB. NUNUKAN	0,0005	0,0033	0,0003	0,0031	0,0007	0,0079	0,0018	0,0006	0,0022	0,0033	0,0004	0,0083	0,0162
117	SUMATERA SELATAN	(76) KAB. MUSI BANYUASIN	0,0009	0,0033	0,0017	0,0010	0,0011	0,0080	0,0018	0,0014	0,0022	0,0016	0,0008	0,0078	0,0158
118	KALIMANTAN SELATAN	(23) KAB. TABALONG	0,0005	0,0013	0,0003	0,0031	0,0029	0,0081	0,0018	0,0003	0,0015	0,0033	0,0008	0,0077	0,0158
119	KALIMANTAN TENGAH	(95) KAB. BARITO SELATAN	0,0005	0,0033	0,0003	0,0031	0,0011	0,0083	0,0006	0,0006	0,0007	0,0033	0,0022	0,0074	0,0157
120	PAPUA	(137) KAB. FAKFAK	0,0005	0,0033	0,0006	0,0031	0,0011	0,0086	0,0006	0,0006	0,0003	0,0033	0,0022	0,0070	0,0156
121	DIY	(121) KAB. GUNUNG KIDUL	0,0018	0,0013	0,0017	0,0005	0,0029	0,0082	0,0006	0,0006	0,0022	0,0016	0,0022	0,0072	0,0154
122	KALIMANTAN BARAT	(126) KAB. KAPUAS HULU	0,0009	0,0013	0,0003	0,0031	0,0011	0,0067	0,0003	0,0006	0,0022	0,0033	0,0022	0,0086	0,0153
123	JAWA TIMUR	(139) KAB. BONDOWOSO	0,0018	0,0013	0,0003	0,0005	0,0029	0,0068	0,0018	0,0014	0,0022	0,0008	0,0022	0,0084	0,0152
124	RIAU	(22) KAB. PELALAWAN	0,0009	0,0038	0,0017	0,0005	0,0007	0,0076	0,0006	0,0031	0,0022	0,0008	0,0008	0,0075	0,0151
125	J A M B I	(79) KAB. KERINCI	0,0009	0,0006	0,0003	0,0031	0,0029	0,0078	0,0018	0,0014	0,0015	0,0016	0,0008	0,0071	0,0149
126	LAMPUNG	(145) KAB. LAMPUNG SELATAN	0,0009	0,0038	0,0017	0,0005	0,0011	0,0080	0,0018	0,0031	0,0007	0,0008	0,0004	0,0068	0,0148
127	SUMATERA UTARA	(104) KAB. SIMALUNGUN	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0007	0,0097	0,0003	0,0014	0,0022	0,0008	0,0004	0,0051	0,0148
128	BENGKULU	(127) KAB. BENGKULU SELATAN	0,0009	0,0033	0,0017	0,0010	0,0007	0,0076	0,0035	0,0006	0,0015	0,0008	0,0004	0,0068	0,0144
129	SUMATERA UTARA	(38) KAB. LABUHAN BATU	0,0009	0,0013	0,0003	0,0010	0,0029	0,0064	0,0006	0,0014	0,0022	0,0016	0,0022	0,0080	0,0144
130	J A M B I	(39) KAB. BATANGHARI	0,0009	0,0033	0,0017	0,0005	0,0029	0,0093	0,0006	0,0014	0,0015	0,0008	0,0008	0,0051	0,0144
131	JAWA TIMUR	(146) KAB. PAMEKASAN	0,0018	0,0013	0,0003	0,0005	0,0029	0,0068	0,0006	0,0014	0,0022	0,0008	0,0022	0,0072	0,0140
132	SUMATERA UTARA	(91) KAB. LANGKAT	0,0009	0,0033	0,0017	0,0031	0,0007	0,0097	0,0003	0,0006	0,0022	0,0008	0,0004	0,0043	0,0140
133	LAMPUNG	(64) KAB. WAY KANAN	0,0009	0,0006	0,0003	0,0010	0,0029	0,0057	0,0006	0,0031	0,0007	0,0016	0,0022	0,0082	0,0139
134	PAPUA	(117) KAB. JAYAWIJAYA	0,0005	0,0013	0,0006	0,0031	0,0011	0,0066	0,0006	0,0006	0,0003	0,0033	0,0022	0,0070	0,0136

NO.	PROPINSI	KABUPATEN	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter- sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175		0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139					
135	RIAU	(42) KAB. ROKAN HULU	0,0009	0,0006	0,0003	0,0031	0,0007	0,0056	0,0006	0,0031	0,0022	0,0016	0,0004	0,0079	0,0135
136	SUMATERA BARAT	(35) KAB. PESISIR SELATAN	0,0009	0,0013	0,0017	0,0005	0,0007	0,0051	0,0035	0,0014	0,0022	0,0008	0,0004	0,0083	0,0134
137	SULAWESI SELATAN	(69) KAB. SELAYAR	0,0009	0,0038	0,0003	0,0010	0,0007	0,0067	0,0018	0,0006	0,0022	0,0016	0,0004	0,0066	0,0133
138	SULAWESI TENGAH	(99) KAB. MOROWALI	0,0005	0,0038	0,0006	0,0005	0,0007	0,0061	0,0018	0,0014	0,0015	0,0016	0,0008	0,0071	0,0132
139	JAMBI	(20) KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0,0005	0,0033	0,0017	0,0005	0,0007	0,0067	0,0018	0,0014	0,0015	0,0008	0,0004	0,0059	0,0126
140	NUSA TENGGARA TIMUR	(120) KAB. SUMBA BARAT	0,0009	0,0033	0,0017	0,0005	0,0011	0,0075	0,0006	0,0014	0,0007	0,0016	0,0008	0,0051	0,0126
141	RIAU	(81) KAB. KUANTAN SENGGIGI	0,0009	0,0006	0,0003	0,0005	0,0007	0,0030	0,0018	0,0031	0,0022	0,0008	0,0008	0,0087	0,0117
142	KALIMANTAN TIMUR	(81) KAB. BERAU	0,0005	0,0033	0,0003	0,0005	0,0007	0,0053	0,0006	0,0014	0,0022	0,0016	0,0004	0,0062	0,0115
143	NUSA TENGGARA TIMUR	(148) KAB. FLORES TIMUR	0,0009	0,0038	0,0017	0,0005	0,0007	0,0076	0,0006	0,0014	0,0007	0,0008	0,0004	0,0039	0,0115
144	BANGKA BELITUNG	(61) KAB. BANGKA	0,0009	0,0033	0,0017	0,0005	0,0007	0,0071	0,0018	0,0006	0,0007	0,0008	0,0004	0,0043	0,0114
145	NUSA TENGGARA BARAT	(141) KAB. BIMA	0,0005	0,0038	0,0017	0,0005	0,0007	0,0072	0,0006	0,0014	0,0007	0,0008	0,0004	0,0039	0,0111
146	NUSA TENGGARA BARAT	(123) KAB. DOMPU	0,0009	0,0033	0,0017	0,0005	0,0007	0,0071	0,0006	0,0014	0,0007	0,0008	0,0004	0,0039	0,0110
147	JAMBI	(68) KAB. TEBO	0,0018	0,0013	0,0006	0,0005	0,0007	0,0049	0,0018	0,0014	0,0015	0,0008	0,0004	0,0059	0,0108
148	SULAWESI TENGAH	(45) KAB. TOLI TOLI	0,0009	0,0033	0,0006	0,0005	0,0007	0,0060	0,0006	0,0014	0,0015	0,0008	0,0004	0,0047	0,0107
149	NUSA TENGGARA TIMUR	(115) KAB. MANGGARAI	0,0009	0,0033	0,0017	0,0005	0,0007	0,0071	0,0003	0,0014	0,0007	0,0008	0,0004	0,0036	0,0107
150	KALIMANTAN BARAT	(85) KAB. SAMBAS	0,0005	0,0013	0,0003	0,0010	0,0007	0,0038	0,0003	0,0006	0,0022	0,0033	0,0003	0,0067	0,0105
151	LAMPUNG	(142) KAB. LAMPUNG TIMUR	0,0009	0,0006	0,0003	0,0005	0,0011	0,0034	0,0018	0,0031	0,0007	0,0008	0,0004	0,0068	0,0102
152	LAMPUNG	(59) KAB. LAMPUNG BARAT	0,0009	0,0006	0,0003	0,0005	0,0007	0,0030	0,0018	0,0031	0,0007	0,0008	0,0004	0,0068	0,0098
153	SUMATERA SELATAN	(88) KAB. MUSI RAWAS	0,0009	0,0006	0,0003	0,0005	0,0007	0,0030	0,0018	0,0014	0,0022	0,0008	0,0004	0,0066	0,0096
154	PAPUA	(31) KAB. MANOKWARI	0,0005	0,0033	0,0006	0,0005	0,0007	0,0056	0,0006	0,0014	0,0003	0,0008	0,0004	0,0035	0,0091
155	NUSA TENGGARA TIMUR	(128) KAB. NGADA	0,0009	0,0033	0,0006	0,0005	0,0007	0,0060	0,0003	0,0006	0,0007	0,0008	0,0004	0,0028	0,0088
156	KALIMANTAN TIMUR	(66) KAB. KUTAI TIMUR	0,0005	0,0006	0,0003	0,0005	0,0007	0,0026	0,0006	0,0006	0,0022	0,0008	0,0004	0,0046	0,0072

Lampiran 4.6.2 Hasil Pembobotan (Score) Intensitas Indikator dengan Metode AHP 44 Kota di Indonesia

Lampiran 4.6.2.1. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Kelembagaan 44 Kota di Indonesia

NO.	PROPINSI	KOTA	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah-gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
1	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0,0126	0,0120	0,0246	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0151	0,0099	0,0030	0,0334	0,0801
2	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0,0126	0,0030	0,0156	0,0217	0,0020	0,0037	0,0057	0,0095	0,0151	0,0025	0,0030	0,0301	0,0731
3	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0083	0,0023	0,0106	0,0095	0,0151	0,0012	0,0030	0,0288	0,0703
4	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	0,0126	0,0120	0,0246	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0095	0,0151	0,0025	0,0030	0,0301	0,0699
5	BANTEN	KOTA CILEGON	0,0126	0,0030	0,0156	0,0147	0,0132	0,0023	0,0155	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0637
6	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	0,0126	0,0061	0,0187	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0095	0,0070	0,0025	0,0015	0,0205	0,0613
7	R I A U	KOTA DUMAI	0,0031	0,0030	0,0061	0,0217	0,0083	0,0059	0,0142	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0599
8	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	0,0062	0,0061	0,0123	0,0147	0,0031	0,0023	0,0054	0,0054	0,0070	0,0099	0,0043	0,0266	0,0590
9	R I A U	KOTA BATAM	0,0062	0,0061	0,0123	0,0046	0,0083	0,0059	0,0142	0,0054	0,0151	0,0025	0,0030	0,0260	0,0571
10	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0,0062	0,0008	0,0070	0,0217	0,0083	0,0059	0,0142	0,0054	0,0034	0,0012	0,0030	0,0130	0,0559
11	GORONTALO	KOTA GORONTALO	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0020	0,0023	0,0043	0,0054	0,0070	0,0051	0,0030	0,0205	0,0557
12	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0083	0,0014	0,0097	0,0095	0,0070	0,0025	0,0030	0,0220	0,0556
13	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0132	0,0037	0,0169	0,0054	0,0070	0,0006	0,0030	0,0160	0,0553
14	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0,0062	0,0061	0,0123	0,0147	0,0083	0,0009	0,0092	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0541
15	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0,0126	0,0030	0,0156	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0054	0,0151	0,0025	0,0030	0,0260	0,0536
16	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0,0062	0,0030	0,0092	0,0217	0,0083	0,0009	0,0092	0,0054	0,0034	0,0012	0,0030	0,0130	0,0531
17	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	0,0126	0,0008	0,0134	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0503
18	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	0,0031	0,0015	0,0046	0,0217	0,0083	0,0014	0,0097	0,0054	0,0018	0,0025	0,0043	0,0140	0,0500
19	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0,0031	0,0008	0,0039	0,0147	0,0132	0,0009	0,0141	0,0054	0,0018	0,0025	0,0072	0,0169	0,0496
20	BALI	KOTA DENPASAR	0,0031	0,0030	0,0061	0,0147	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0025	0,0030	0,0179	0,0493
21	R I A U	KOTA PEKAN BARU	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0083	0,0023	0,0106	0,0054	0,0070	0,0006	0,0030	0,0160	0,0490
22	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0083	0,0014	0,0097	0,0095	0,0034	0,0051	0,0072	0,0252	0,0487

NO.	PROPINSI	KOTA	KELEMBAGAAN												TOTAL SCORE
			Aparatur & Pelayanan			Peraturan Daerah	Keuangan Daerah			Kepastian Hukum					
			Birokrasi	Penyalah- gunaan wewenang	Sub Total Aparat & Pelayanan		Retribusi/ Pajak	Pemb./ APBD	Sub Total Keuangan Daerah	Konsistensi Peraturan	Penegakan Hukum	Pungli Luar Birokrasi	Eksekutif - Legislatif	Sub Total Kepastian Hukum	
0.0483	0.0235		0.0771	0.0316	0.0141		0.035	0.0524	0.0194	0.0167					
23	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	0,0031	0,0008	0,0039	0,0147	0,0083	0,0014	0,0097	0,0054	0,0070	0,0006	0,0072	0,0202	0,0485
24	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	0,0062	0,0120	0,0182	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0024	0,0070	0,0025	0,0030	0,0149	0,0483
25	BENGKULU	KOTA BENGKULU	0,0062	0,0030	0,0092	0,0147	0,0051	0,0014	0,0065	0,0024	0,0070	0,0025	0,0043	0,0162	0,0466
26	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0,0031	0,0008	0,0039	0,0147	0,0083	0,0009	0,0092	0,0024	0,0070	0,0006	0,0072	0,0172	0,0450
27	BANTEN	KOTA TANGERANG	0,0031	0,0008	0,0039	0,0147	0,0132	0,0037	0,0169	0,0024	0,0018	0,0006	0,0030	0,0078	0,0433
28	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	0,0016	0,0030	0,0046	0,0147	0,0020	0,0037	0,0057	0,0012	0,0018	0,0099	0,0030	0,0159	0,0409
29	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	0,0126	0,0015	0,0141	0,0046	0,0031	0,0023	0,0054	0,0054	0,0070	0,0012	0,0030	0,0166	0,0407
30	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0083	0,0037	0,0120	0,0024	0,0034	0,0006	0,0030	0,0094	0,0407
31	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0083	0,0059	0,0142	0,0024	0,0070	0,0012	0,0030	0,0136	0,0401
32	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0,0031	0,0015	0,0046	0,0147	0,0083	0,0009	0,0092	0,0024	0,0034	0,0025	0,0030	0,0113	0,0398
33	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	0,0062	0,0015	0,0077	0,0147	0,0020	0,0023	0,0043	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0397
34	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	0,0062	0,0008	0,0070	0,0046	0,0083	0,0014	0,0097	0,0054	0,0070	0,0012	0,0043	0,0179	0,0392
35	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0083	0,0014	0,0097	0,0012	0,0018	0,0006	0,0072	0,0108	0,0376
36	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0083	0,0014	0,0097	0,0054	0,0034	0,0012	0,0043	0,0143	0,0363
37	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0051	0,0059	0,0110	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0363
38	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0,0031	0,0030	0,0061	0,0046	0,0083	0,0059	0,0142	0,0024	0,0034	0,0025	0,0030	0,0113	0,0362
39	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0,0016	0,0015	0,0031	0,0147	0,0051	0,0023	0,0074	0,0012	0,0034	0,0025	0,0030	0,0101	0,0353
40	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0051	0,0059	0,0110	0,0012	0,0018	0,0006	0,0030	0,0066	0,0347
41	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0,0062	0,0015	0,0077	0,0046	0,0051	0,0023	0,0074	0,0024	0,0070	0,0006	0,0030	0,0130	0,0327
42	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0,0016	0,0008	0,0024	0,0147	0,0051	0,0037	0,0088	0,0012	0,0018	0,0006	0,0030	0,0066	0,0325
43	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	0,0062	0,0030	0,0092	0,0046	0,0031	0,0023	0,0054	0,0012	0,0034	0,0025	0,0030	0,0101	0,0293
44	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0,0031	0,0030	0,0061	0,0046	0,0083	0,0023	0,0106	0,0012	0,0018	0,0006	0,0030	0,0066	0,0279

Lampiran 4.6.2.2. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Sosial Politik 44 Kota di Indonesia

NO.	PROPINSI	KOTA	SOSIAL POLITIK														TOTAL SCORE
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total Keamanan	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat-istiadat	Etos Kerja	Sub Total Budaya	
0.0523	0.0311	0.0724		0.012	0.0184	0.0289	0.0095		0.0086	0.0064	0.0071	0.0141					
1	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	0,0254	0,0080	0,0214	0,0548	0,0030	0,0095	0,0048	0,0049	0,0222	0,0025	0,0018	0,0012	0,0005	0,0060	0,0830
2	GORONTALO	KOTA GORONTALO	0,0254	0,0080	0,0214	0,0548	0,0030	0,0024	0,0116	0,0025	0,0195	0,0025	0,0018	0,0005	0,0019	0,0067	0,0810
3	R I A U	KOTA BATAM	0,0153	0,0036	0,0214	0,0403	0,0023	0,0095	0,0116	0,0025	0,0259	0,0006	0,0009	0,0012	0,0019	0,0046	0,0708
4	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0030	0,0095	0,0116	0,0025	0,0266	0,0041	0,0031	0,0032	0,0067	0,0171	0,0637
5	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0095	0,0116	0,0025	0,0259	0,0012	0,0004	0,0012	0,0019	0,0047	0,0618
6	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	0,0153	0,0080	0,0102	0,0335	0,0023	0,0095	0,0048	0,0049	0,0215	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0602
7	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0,0062	0,0080	0,0214	0,0356	0,0030	0,0024	0,0116	0,0012	0,0182	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0590
8	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0,0153	0,0036	0,0102	0,0291	0,0023	0,0095	0,0048	0,0025	0,0191	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0534
9	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0,0034	0,0021	0,0102	0,0157	0,0023	0,0095	0,0116	0,0025	0,0259	0,0012	0,0009	0,0020	0,0040	0,0081	0,0497
10	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	0,0062	0,0080	0,0102	0,0244	0,0023	0,0011	0,0094	0,0049	0,0177	0,0012	0,0009	0,0012	0,0040	0,0073	0,0494
11	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0037	0,0024	0,0048	0,0003	0,0112	0,0012	0,0018	0,0020	0,0019	0,0069	0,0493
12	R I A U	KOTA DUMAI	0,0062	0,0036	0,0101	0,0199	0,0023	0,0095	0,0116	0,0005	0,0239	0,0012	0,0004	0,0012	0,0019	0,0047	0,0485
13	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0,0062	0,0021	0,0102	0,0185	0,0023	0,0095	0,0116	0,0012	0,0246	0,0006	0,0009	0,0012	0,0009	0,0036	0,0467
14	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0116	0,0025	0,0188	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0448
15	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0094	0,0049	0,0190	0,0012	0,0009	0,0012	0,0019	0,0052	0,0442
16	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0,0062	0,0036	0,0214	0,0312	0,0023	0,0024	0,0048	0,0005	0,0100	0,0003	0,0002	0,0005	0,0005	0,0015	0,0427
17	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0,0062	0,0036	0,0025	0,0123	0,0037	0,0095	0,0116	0,0025	0,0273	0,0006	0,0002	0,0012	0,0005	0,0025	0,0421
18	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	0,0062	0,0021	0,0102	0,0185	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0420
19	BALI	KOTA DENPASAR	0,0062	0,0036	0,0048	0,0146	0,0023	0,0024	0,0116	0,0025	0,0188	0,0012	0,0009	0,0020	0,0040	0,0081	0,0415
20	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0023	0,0024	0,0116	0,0005	0,0168	0,0006	0,0004	0,0012	0,0009	0,0031	0,0399
21	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0012	0,0238	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0398
22	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0,0062	0,0036	0,0048	0,0146	0,0023	0,0024	0,0116	0,0049	0,0212	0,0006	0,0009	0,0012	0,0009	0,0036	0,0394

NO.	PROPINSI	KOTA	SOSIAL POLITIK													TOTAL SCORE	
			Keamanan				Sosial Politik					Budaya					
			Gangguan Usaha	Gangguan Masyarakat	Kecepatan Aparat	Sub Total	Partisipasi Masyarakat	Konflik Masyarakat	Stabilitas Politik	Unjuk Rasa	Sub Total Sosial Politik	Terbuka	Non Diskriminatif	Adat- istiadat	Etos Kerja		Sub Total
0.0523	0.0311	0.0724	Keamanan	0.012	0.0184	0.0289	0.0095	Politik	0.0086	0.0064	0.0071	0.0141	Budaya	0.2608			
23	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
24	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
25	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
26	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	0,0020	0,0012	0,0102	0,0134	0,0037	0,0095	0,0094	0,0005	0,0231	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0391
27	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0007	0,0094	0,0005	0,0143	0,0012	0,0004	0,0012	0,0019	0,0047	0,0390
28	R I A U	KOTA PEKAN BARU	0,0020	0,0012	0,0048	0,0080	0,0030	0,0095	0,0116	0,0025	0,0266	0,0006	0,0004	0,0012	0,0019	0,0041	0,0387
29	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	0,0062	0,0021	0,0102	0,0185	0,0023	0,0011	0,0094	0,0012	0,0140	0,0012	0,0018	0,0005	0,0005	0,0040	0,0365
30	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	0,0034	0,0012	0,0048	0,0094	0,0023	0,0095	0,0116	0,0005	0,0239	0,0006	0,0004	0,0003	0,0019	0,0032	0,0365
31	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0,0062	0,0036	0,0025	0,0123	0,0023	0,0048	0,0116	0,0012	0,0199	0,0006	0,0009	0,0012	0,0009	0,0036	0,0358
32	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	0,0062	0,0036	0,0025	0,0123	0,0023	0,0048	0,0116	0,0012	0,0199	0,0012	0,0009	0,0003	0,0009	0,0033	0,0355
33	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0,0020	0,0021	0,0102	0,0143	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0006	0,0009	0,0012	0,0009	0,0036	0,0354
34	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0,0034	0,0021	0,0102	0,0157	0,0037	0,0095	0,0020	0,0012	0,0164	0,0003	0,0004	0,0012	0,0009	0,0028	0,0349
35	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0,0062	0,0036	0,0048	0,0146	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0347
36	BENGKULU	KOTA BENGKULU	0,0020	0,0021	0,0102	0,0143	0,0023	0,0024	0,0116	0,0012	0,0175	0,0006	0,0009	0,0005	0,0005	0,0025	0,0343
37	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	0,0062	0,0036	0,0102	0,0200	0,0037	0,0011	0,0020	0,0005	0,0073	0,0025	0,0009	0,0012	0,0019	0,0065	0,0338
38	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	0,0034	0,0021	0,0102	0,0157	0,0023	0,0024	0,0094	0,0003	0,0144	0,0012	0,0002	0,0012	0,0009	0,0035	0,0336
39	BANTEN	KOTA TANGERANG	0,0034	0,0021	0,0102	0,0157	0,0030	0,0024	0,0048	0,0012	0,0114	0,0006	0,0009	0,0012	0,0009	0,0036	0,0307
40	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0,0020	0,0012	0,0025	0,0057	0,0023	0,0024	0,0116	0,0025	0,0188	0,0012	0,0009	0,0020	0,0019	0,0060	0,0305
41	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0,0034	0,0021	0,0048	0,0103	0,0023	0,0011	0,0094	0,0003	0,0131	0,0025	0,0009	0,0012	0,0019	0,0065	0,0299
42	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	0,0062	0,0036	0,0048	0,0146	0,0037	0,0011	0,0048	0,0012	0,0108	0,0012	0,0009	0,0012	0,0009	0,0042	0,0296
43	BANTEN	KOTA CILEGON	0,0034	0,0021	0,0102	0,0157	0,0023	0,0011	0,0048	0,0025	0,0107	0,0003	0,0002	0,0012	0,0005	0,0022	0,0286
44	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0,0034	0,0012	0,0048	0,0094	0,0023	0,0024	0,0048	0,0005	0,0100	0,0003	0,0002	0,0012	0,0009	0,0026	0,0220

Lampiran 4.6.2.3. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Ekonomi Daerah 44 Kota di Indonesia

NO.	PROPINSI	KOTA	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
1	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0,0247	0,0222	0,0086	0,0555	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0676
2	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0,0247	0,0222	0,0079	0,0548	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0669
3	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	0,0247	0,0222	0,0086	0,0555	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0652
4	R I A U	KOTA BATAM	0,0247	0,0222	0,0086	0,0555	0,0009	0,0069	0,0004	0,0082	0,0637
5	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0,0247	0,0222	0,0079	0,0548	0,0009	0,0069	0,0004	0,0082	0,0630
6	BANTEN	KOTA CILEGON	0,0247	0,0222	0,0079	0,0548	0,0009	0,0069	0,0004	0,0082	0,0630
7	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0,0247	0,0133	0,0079	0,0459	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0580
8	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	0,0247	0,0133	0,0086	0,0466	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0566
9	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	0,0247	0,0062	0,0086	0,0395	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0516
10	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0,0126	0,0222	0,0079	0,0427	0,0016	0,0023	0,0048	0,0087	0,0514
11	R I A U	KOTA PEKAN BARU	0,0126	0,0222	0,0086	0,0434	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0514
12	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0,0247	0,0062	0,0086	0,0395	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0495
13	BANTEN	KOTA TANGERANG	0,0247	0,0062	0,0086	0,0395	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0492
14	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	0,0126	0,0222	0,0079	0,0427	0,0016	0,0023	0,0019	0,0058	0,0485
15	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	0,0247	0,0030	0,0079	0,0356	0,0009	0,0069	0,0048	0,0126	0,0482
16	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0,0247	0,0062	0,0086	0,0395	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0475
17	BALI	KOTA DENPASAR	0,0247	0,0062	0,0086	0,0395	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0475
18	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	0,0247	0,0016	0,0086	0,0349	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0470
19	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0,0247	0,0030	0,0079	0,0356	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0456
20	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0,0247	0,0016	0,0086	0,0349	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0449
21	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	0,0247	0,0016	0,0086	0,0349	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0449
22	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0,0247	0,0030	0,0086	0,0363	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0443

NO.	PROPINSI	KOTA	EKONOMI DAERAH								TOTAL SCORE
			Potensi Ekonomi				Struktur Ekonomi				
			PDRB Perkapita	Tumbuh	IPM	Sub Total Potensi Ekonomi	Nilai Tambah Primer	Nilai Tambah Sekunder	Nilai Tambah Tersier	Sub Total Struktur Ekonomi	
											0.0481
23	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	0,0247	0,0016	0,0079	0,0342	0,0042	0,0023	0,0019	0,0084	0,0426
24	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0,0247	0,0016	0,0051	0,0314	0,0009	0,0010	0,0048	0,0067	0,0381
25	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	0,0062	0,0133	0,0079	0,0274	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0374
26	GORONTALO	KOTA GORONTALO	0,0030	0,0222	0,0051	0,0303	0,0000	0,0010	0,0048	0,0058	0,0361
27	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	0,0062	0,0133	0,0079	0,0274	0,0016	0,0023	0,0048	0,0087	0,0361
28	R I A U	KOTA DUMAI	0,0062	0,0133	0,0079	0,0274	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0354
29	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0,0126	0,0016	0,0086	0,0228	0,0009	0,0069	0,0048	0,0126	0,0354
30	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0,0126	0,0016	0,0086	0,0228	0,0009	0,0069	0,0019	0,0097	0,0325
31	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0,0062	0,0062	0,0079	0,0203	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0324
32	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0,0062	0,0062	0,0079	0,0203	0,0009	0,0069	0,0043	0,0121	0,0324
33	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	0,0126	0,0030	0,0086	0,0242	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0322
34	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	0,0126	0,0016	0,0079	0,0221	0,0009	0,0043	0,0048	0,0100	0,0321
35	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	0,0126	0,0062	0,0051	0,0239	0,0016	0,0043	0,0019	0,0078	0,0317
36	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0,0062	0,0062	0,0086	0,0210	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0290
37	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	0,0062	0,0062	0,0086	0,0210	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0290
38	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	0,0126	0,0030	0,0051	0,0207	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0287
39	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	0,0062	0,0062	0,0086	0,0210	0,0009	0,0010	0,0048	0,0067	0,0277
40	BENGKULU	KOTA BENGKULU	0,0062	0,0062	0,0086	0,0210	0,0009	0,0010	0,0048	0,0067	0,0277
41	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0,0030	0,0062	0,0079	0,0171	0,0009	0,0023	0,0043	0,0075	0,0246
42	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0,0030	0,0030	0,0051	0,0111	0,0042	0,0043	0,0043	0,0128	0,0239
43	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	0,0062	0,0016	0,0079	0,0157	0,0009	0,0010	0,0048	0,0067	0,0224
44	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0,0030	0,0016	0,0079	0,0125	0,0009	0,0023	0,0048	0,0080	0,0205

Lampiran 4.6.2.4. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas 44 Kota di Indonesia

NO.	PROPINSI	KOTA	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk-tivitas	
1	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0,0034	0,0032	0,0068	0,0134	0,0060	0,0088	0,0148	0,0273	0,0555
2	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0,0019	0,0032	0,0113	0,0164	0,0029	0,0088	0,0117	0,0273	0,0554
3	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0060	0,0014	0,0074	0,0273	0,0517
4	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0015	0,0014	0,0029	0,0273	0,0472
5	BANTEN	KOTA CILEGON	0,0019	0,0025	0,0113	0,0157	0,0015	0,0020	0,0035	0,0273	0,0465
6	R I A U	KOTA BATAM	0,0025	0,0032	0,0015	0,0072	0,0015	0,0088	0,0103	0,0273	0,0448
7	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0,0019	0,0032	0,0113	0,0164	0,0018	0,0088	0,0106	0,0140	0,0410
8	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	0,0006	0,0032	0,0113	0,0151	0,0015	0,0088	0,0103	0,0140	0,0394
9	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0346
10	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	0,0025	0,0027	0,0068	0,0120	0,0060	0,0021	0,0081	0,0140	0,0341
11	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	0,0034	0,0032	0,0031	0,0097	0,0015	0,0088	0,0103	0,0140	0,0340
12	GORONTALO	KOTA GORONTALO	0,0019	0,0025	0,0113	0,0157	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0333
13	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0,0025	0,0025	0,0031	0,0081	0,0015	0,0088	0,0103	0,0140	0,0324
14	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0060	0,0020	0,0080	0,0066	0,0316
15	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0,0034	0,0032	0,0068	0,0134	0,0060	0,0088	0,0148	0,0028	0,0310
16	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0,0034	0,0032	0,0031	0,0097	0,0029	0,0088	0,0117	0,0066	0,0280
17	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0022	0,0014	0,0036	0,0066	0,0272
18	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0015	0,0020	0,0035	0,0066	0,0271
19	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0060	0,0020	0,0080	0,0019	0,0269
20	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0018	0,0014	0,0032	0,0066	0,0268
21	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0060	0,0020	0,0080	0,0028	0,0267
22	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	0,0019	0,0032	0,0113	0,0164	0,0015	0,0020	0,0035	0,0066	0,0265

NO.	PROPINSI	KOTA	TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS								TOTAL SCORE
			Ketersediaan Tenaga Kerja				Biaya Tenaga Kerja				
			Usia Produktif	SLTP	Pencari Kerja	Sub Total Ketersediaan Tenaga Kerja	UMP/ IHK	Upah Aktual/IHK	Sub Total Biaya Tenaga Kerja	Produk- tivitas	
23	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	0,0015	0,0032	0,0113	0,0160	0,0060	0,0014	0,0074	0,0028	0,0262
24	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	0,0019	0,0027	0,0113	0,0159	0,0015	0,0020	0,0035	0,0066	0,0260
25	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0,0019	0,0025	0,0068	0,0112	0,0029	0,0088	0,0117	0,0028	0,0257
26	BENGKULU	KOTA BENGKULU	0,0019	0,0032	0,0068	0,0119	0,0018	0,0088	0,0106	0,0028	0,0253
27	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	0,0019	0,0032	0,0031	0,0082	0,0015	0,0088	0,0103	0,0066	0,0251
28	R I A U	KOTA DUMAI	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0060	0,0088	0,0148	0,0019	0,0244
29	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	0,0034	0,0032	0,0113	0,0179	0,0022	0,0014	0,0036	0,0028	0,0243
30	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0,0034	0,0025	0,0113	0,0172	0,0022	0,0020	0,0042	0,0019	0,0233
31	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	0,0025	0,0032	0,0113	0,0170	0,0015	0,0020	0,0035	0,0028	0,0233
32	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	0,0034	0,0032	0,0068	0,0134	0,0015	0,0014	0,0029	0,0066	0,0229
33	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0029	0,0088	0,0117	0,0028	0,0222
34	R I A U	KOTA PEKAN BARU	0,0019	0,0032	0,0068	0,0119	0,0060	0,0014	0,0074	0,0028	0,0221
35	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	0,0025	0,0025	0,0031	0,0081	0,0060	0,0014	0,0074	0,0066	0,0221
36	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	0,0025	0,0032	0,0068	0,0125	0,0015	0,0014	0,0029	0,0066	0,0220
37	BALI	KOTA DENPASAR	0,0034	0,0032	0,0031	0,0097	0,0060	0,0014	0,0074	0,0028	0,0199
38	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	0,0034	0,0032	0,0031	0,0097	0,0022	0,0014	0,0036	0,0066	0,0199
39	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0,0019	0,0027	0,0031	0,0077	0,0029	0,0020	0,0049	0,0066	0,0192
40	BANTEN	KOTA TANGERANG	0,0025	0,0032	0,0031	0,0088	0,0015	0,0020	0,0035	0,0066	0,0189
41	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0,0025	0,0032	0,0031	0,0088	0,0015	0,0014	0,0029	0,0066	0,0183
42	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0,0015	0,0032	0,0068	0,0115	0,0018	0,0020	0,0038	0,0019	0,0172
43	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	0,0006	0,0027	0,0031	0,0064	0,0015	0,0014	0,0029	0,0066	0,0159
44	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0,0019	0,0025	0,0031	0,0075	0,0029	0,0020	0,0049	0,0028	0,0152

Lampiran 4.6.1.5. Hasil Pembobotan (Score) Indikator, Variabel, Faktor Infrastruktur Fisik 44 Kota di Indonesia

NO.	PROPINSI	KOTA	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter-sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
1	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	0,0009	0,0033	0,0017	0,0005	0,0007	0,0071	0,0018	0,0014	0,0015	0,0008	0,0022	0,0077	0,0148
2	BENGKULU	KOTA BENGKULU	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0007	0,0106	0,0035	0,0006	0,0015	0,0016	0,0004	0,0076	0,0182
3	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0110	0,0003	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0087	0,0197
4	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	0,0018	0,0051	0,0017	0,0005	0,0011	0,0102	0,0035	0,0031	0,0022	0,0008	0,0004	0,0100	0,0202
5	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0,0018	0,0038	0,0017	0,0031	0,0007	0,0111	0,0003	0,0031	0,0022	0,0033	0,0008	0,0097	0,0208
6	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0110	0,0018	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0102	0,0212
7	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0110	0,0035	0,0031	0,0026	0,0016	0,0004	0,0112	0,0222
8	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0128	0,0003	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0094	0,0222
9	GORONTALO	KOTA GORONTALO	0,0005	0,0038	0,0017	0,0031	0,0011	0,0102	0,0035	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0228
10	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0,0018	0,0038	0,0017	0,0031	0,0007	0,0111	0,0035	0,0031	0,0022	0,0033	0,0004	0,0125	0,0236
11	R I A U	KOTA PEKAN BARU	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0128	0,0018	0,0014	0,0026	0,0033	0,0022	0,0113	0,0241
12	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	0,0040	0,0033	0,0017	0,0031	0,0011	0,0132	0,0035	0,0006	0,0015	0,0033	0,0022	0,0111	0,0243
13	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	0,0018	0,0033	0,0017	0,0031	0,0029	0,0128	0,0035	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0119	0,0247
14	R I A U	KOTA DUMAI	0,0018	0,0051	0,0017	0,0031	0,0029	0,0146	0,0006	0,0035	0,0015	0,0033	0,0022	0,0111	0,0257
15	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0,0066	0,0033	0,0006	0,0031	0,0029	0,0165	0,0018	0,0014	0,0007	0,0033	0,0022	0,0094	0,0259
16	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	0,0018	0,0033	0,0017	0,0044	0,0029	0,0141	0,0035	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0119	0,0260
17	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0,0066	0,0013	0,0017	0,0031	0,0029	0,0156	0,0035	0,0014	0,0015	0,0033	0,0022	0,0119	0,0275
18	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0,0018	0,0051	0,0017	0,0044	0,0029	0,0159	0,0035	0,0031	0,0022	0,0033	0,0008	0,0129	0,0288
19	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	0,0066	0,0038	0,0017	0,0031	0,0011	0,0163	0,0035	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0289
20	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	0,0018	0,0006	0,0003	0,0071	0,0057	0,0155	0,0035	0,0003	0,0003	0,0074	0,0022	0,0137	0,0292
21	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0,0040	0,0033	0,0017	0,0044	0,0029	0,0163	0,0018	0,0014	0,0022	0,0074	0,0022	0,0150	0,0313
22	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0,0066	0,0033	0,0017	0,0044	0,0029	0,0189	0,0035	0,0014	0,0022	0,0033	0,0022	0,0126	0,0315

NO.	PROPINSI	KOTA	INFRASTRUKTUR FISIK												TOTAL SCORE
			Ketersediaan Infrastruktur Fisik						Kualitas Infrastruktur Fisik						
			Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Keter- sediaan Infra- struktur	Jalan	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Udara	Telepon	Listrik	Sub Total Kualitas Infra- struktur	
0.0138	0.0141	0.0058	0.016	0.0175		0.0095	0.0089	0.0073	0.204	0.0139					
23	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	0,0018	0,0051	0,0017	0,0044	0,0057	0,0187	0,0018	0,0031	0,0026	0,0033	0,0022	0,0130	0,0317
24	BANTEN	KOTA TANGERANG	0,0066	0,0033	0,0017	0,0044	0,0029	0,0189	0,0035	0,0014	0,0026	0,0033	0,0022	0,0130	0,0319
25	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0,0066	0,0038	0,0006	0,0044	0,0057	0,0211	0,0035	0,0014	0,0007	0,0033	0,0022	0,0111	0,0322
26	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	0,0018	0,0051	0,0017	0,0044	0,0029	0,0159	0,0018	0,0035	0,0015	0,0074	0,0022	0,0164	0,0323
27	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0,0040	0,0038	0,0017	0,0044	0,0057	0,0196	0,0018	0,0014	0,0015	0,0033	0,0052	0,0132	0,0328
28	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0,0040	0,0033	0,0017	0,0044	0,0029	0,0163	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0022	0,0167	0,0330
29	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0,0040	0,0013	0,0006	0,0044	0,0057	0,0160	0,0035	0,0006	0,0007	0,0074	0,0052	0,0174	0,0334
30	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0,0040	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0191	0,0018	0,0031	0,0015	0,0074	0,0022	0,0160	0,0351
31	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	0,0018	0,0051	0,0017	0,0044	0,0029	0,0159	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0022	0,0192	0,0351
32	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	0,0018	0,0051	0,0017	0,0044	0,0029	0,0159	0,0035	0,0035	0,0015	0,0074	0,0052	0,0211	0,0370
33	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0,0009	0,0051	0,0017	0,0044	0,0029	0,0150	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0052	0,0222	0,0372
34	BALI	KOTA DENPASAR	0,0066	0,0051	0,0017	0,0031	0,0057	0,0222	0,0035	0,0035	0,0026	0,0033	0,0022	0,0151	0,0373
35	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0,0066	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0217	0,0035	0,0014	0,0026	0,0033	0,0052	0,0160	0,0377
36	BANTEN	KOTA CILEGON	0,0066	0,0051	0,0017	0,0031	0,0029	0,0194	0,0035	0,0035	0,0022	0,0074	0,0022	0,0188	0,0382
37	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0,0018	0,0038	0,0017	0,0071	0,0057	0,0201	0,0035	0,0031	0,0026	0,0074	0,0022	0,0188	0,0389
38	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0,0066	0,0038	0,0017	0,0044	0,0029	0,0194	0,0035	0,0031	0,0026	0,0074	0,0052	0,0218	0,0412
39	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	0,0066	0,0033	0,0017	0,0044	0,0057	0,0217	0,0035	0,0014	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0414
40	R I A U	KOTA BATAM	0,0040	0,0051	0,0017	0,0071	0,0057	0,0236	0,0018	0,0035	0,0026	0,0074	0,0052	0,0205	0,0441
41	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	0,0040	0,0038	0,0017	0,0071	0,0070	0,0236	0,0035	0,0031	0,0015	0,0074	0,0052	0,0207	0,0443
42	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	0,0066	0,0038	0,0017	0,0071	0,0057	0,0249	0,0018	0,0031	0,0022	0,0074	0,0052	0,0197	0,0446
43	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	0,0066	0,0038	0,0017	0,0071	0,0070	0,0262	0,0035	0,0035	0,0022	0,0074	0,0052	0,0218	0,0480
44	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	0,0066	0,0038	0,0017	0,0071	0,0070	0,0262	0,0035	0,0035	0,0026	0,0074	0,0052	0,0222	0,0484

Kajian produk hukum daerah (peraturan daerah, SK Kepala Daerah, dll), dilakukan dengan melihat tingkat kebermasalahan setiap produk hukum tersebut. Tingkat kebermasalahan produk hukum daerah dikelompokkan menjadi empat tingkat, sebagai berikut :

I. Tidak Bermasalah :

Tidak ditemukan adanya permasalahan sama sekali, atau kesalahan yang ditemukan tidak cukup signifikan, misalnya kesalahan pengetikan, redaksional, dan sebagainya. Dengan kesalahan seperti di atas dianggap tidak bermasalah, sepanjang kesalahan tersebut tidak menimbulkan pemasalah yuridis, substansial, dan prinsip.

II. Bermasalah Yuridis :

Merupakan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan pelanggaran ketentuan yuridis yang sifatnya tidak substansial dan prinsip, seperti :

1. Relevansi Acuan Yuridis : apabila acuan yuridis yang digunakan sebagai dasar pertimbangan perda tidak relevan dengan apa yang diatur dalam perda yang bersangkutan. Sebagai contoh Perda yang mengatur tentang peternakan menggunakan UU, PP, yang mengatur tentang Pertambangan sebagai salah satu dasar konsiderannya, dan sebagainya.
2. Acuan Yuridis Tidak Up to date : apabila acuan yuridis yang digunakan oleh perda sudah tidak up to date lagi (sudah diganti/dirubah/tidak berlaku). Sebagai contoh Perda Pajak dan Retribusi yang ditetapkan pada tahun 2001, menggunakan konsideran yuridis UU No.18 Tahun 1997.
3. Kelengkapan Yuridis : secara material ada beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 dan

66 Tahun 2001. Seperti :

a. Perda Pajak Sekurang-kurangnya mengatur:

- 1) Nama, obyek, dan subyek pajak;
- 2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- 3) Wilayah pemungutan;
- 4) Masa pajak;
- 5) Penetapan;
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan;
- 7) Kadaluwarsa;
- 8) Sanksi administratif; dan
- 9) Tanggal mulai berlaku.

b. Perda Retribusi Sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

- 1) Nama, obyek, dan subyek Retribusi;
- 2) Golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- 3) Struktur dan besarnya tarif;
- 4) Wilayah pungutan;
- 5) Tata cara pemungutan;
- 6) Sanksi administratif;
- 7) Tata cara penagihan; dan
- 8) Tanggal berlaku.

Untuk Perda yang termasuk bermasalah YURIDIS rekomendasi yang diberikan adalah di "REVISI" / "DILENGKAPI", dengan disertai / disebutkan secara jelas usulan revisi atau bagian-bagian yang perlu direvisi. Misalnya : penghilangan atau penambahan pasal-pasal tertentu.

III. Bermasalah Subtansi :

Merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan substansial seperti ketidaksesuaian antara tujuan dan isi yang diatur, kejelasan obyek,

subyek, hak dan kewajiban para pihak, prosedur, standar pelayanan, filosofi pungutan, prinsip golongan, dan sebagainya, seperti berikut :

1. Diskoneksi antara Tujuan dan Isi : antara tujuan yang hendak dicapai, (yang termuat dalam bagian tujuan perda / pengaturan) tidak sesuai dengan materi yang diatur dalam pasal-pasal yang lainnya. Contoh : Perda yang dibuat dengan tujuan untuk perlindungan / pelestarian lingkungan hidup, ternyata dalam pasal-pasal yang lain semata-mata hanya mengatur tentang perdagangan / usaha usaha tertentu dan hanya untuk peningkatan PAD semata (kehutanan, limbah, dlsb) dan tidak ada pasal-pasal yang baik secara eksplisit maupun implisit mengatur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan obyek : obyek pungutan / perda tidak dideskripsikan secara jelas sehingga mengakibatkan *gray area* yang mengakibatkan multiinterpretatif.
3. Kejelasan Subyek : subyek pungutan / perda tidak dideskripsi secara jelas sehingga mengakibatkan *gray area* yang mengakibatkan multiinterpretatif.
4. Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungut (Subyek dari Pemberlakuan Perda) maupun Pemerintah : Tidak dijelaskan / diatur (secara tegas) mengenai hak dan kewajiban wajib pungut (subyek yang dituju dari pemberlakuan perda) maupun hak dan kewajiban dari penda, sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum.
5. Kejelasan Prosedur dan Birokrasi (standar pelayanan) : perda tidak mengatur (tidak secara jelas) tentang prosedur dan birokrasi yang menyangkut standar pelayanan, seperti waktu pelayanan, persyaratan, biaya (struktur tarif), dan sebagainya.
6. Filosofi dan Prinsip Pungutan (Pajak, Retribusi, Golongan Retribusi, Sumbangan, dlsb) : Peraturan mengenai pungutan (pajak, retribusi) tidak sesuai dengan filosofi dasar atau prinsip dasar dari berbagai pungutan tersebut, seperti tidak adanya kontraprestasi secara langsung (tidak ada pelayanan / imbal balik jasa) dalam perda tentang retribusi. Demikian juga kesalahan dalam penetapan golongan retribusi, yang dapat mengakibatkan kesalahan secara teknis (misalnya penentuan dasar dan struktur

tarif) maupun substansi dari pungutan yang bersangkutan.

Untuk produk hukum yang termasuk dalam kategori bermasalah SUBSTANSI direkomendasikan untuk di "REVISI" atau "DITINJAU ULANG". Untuk produk hukum yang direkomendasikan untuk ditinjau ulang, perlu dilakukan investigasi lebih jauh tentang pasal-pasal krusial / bermasalah.

IV. Bermasalah Prinsip:

Bermasalah secara prinsip merupakan pelanggaran terhadap berbagai prinsip secara makro, seperti berdampak negatif terhadap perekonomian, bertentangan dengan kepentingan umum, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, pelanggaran kewenangan, dan lain-lain, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Prinsip Kesatuan Wilayah Ekonomi (free internal trade) : Perda melanggar Kesatuan Wilayah Ekonomi, yang memandang negara sebagai satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisah-pisahkan, daerah dipandang sebagai bagian integral dalam kesatuan wilayah, sehingga perpindahan barang dan atau jasa / perdagangan dalam negeri (antar daerah) bebas dari hambatan baik tarif maupun non tarif. Pelanggaran atas prinsip ini mengakibatkan terancamnya keutuhan wilayah perekonomian nasional.
2. Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat (monopoli, oligopoli, monopsoni, kemitraan wajib, dlsb) : Perda mengakibatkan berkurangnya / hilangnya akses dan kesempatan yang sama bagi tiap lapisan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha / terlibat dalam kegiatan usaha tertentu, dan menutup persaingan secara sehat dari masing-masing pihak karena adanya monopoli, oligopoli dll, atau adanya peraturan mengenai kemitraan wajib yang dapat mengakibatkan (bertendesi) peluang praktek KKN maupun mengakibatkan hubungan yang tidak seimbang, atau ketergantungan dari masing-masing pihak.
3. Berdampak Negatif terhadap Perekonomian : Peraturan dalam perda yang mengakibatkan adanya tambahan biaya (ekonomi biaya tinggi) bagi kalangan dunia usaha maupun masyarakat karena, struktur tarif yang tidak wajar, double taxation baik dengan peraturan perpajakan yang lebih tinggi (pusat) maupun tumpang tindih dengan peraturan lain yang sejajar, sehingga

menpungutan tersebut mengakibatkan terganggunya perekonomian (terhambatnya perkembangan usaha, bahkan mematikan perekonomian usaha, menghalangi kesempatan masyarakat untuk menabung dll).

- 4 Menghalangi / Mengurangi Kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses (melanggar kepentingan umum) : Perda mengakibatkan terganggunya kehidupan / kepentingan umum masyarakat atau mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang seharusnya dapat mereka peroleh, (ekonomi, politik, kebebasan beragama, dan sebagainya).
- 5 Pelanggaran Kewenangan Pemerintahan : Perda mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi kewenangannya sebagai daerah otonom, atau merupakan kewenanga tingkat pemerintahan yang lebih tinggi atau di bawahnya.

Untuk produk hukum daerah yang melanggar baik satu atau lebih atas persoalan "PRINSIP" direkonendasikan untuk "DIBATALKAN".

Lampiran 5.2 Contoh Kajian Peraturan Daerah

No.	Produk Hukum Daerah	TINJAUAN			Rekomendasi	Keterangan
		Bentuk/Obyek	Harmonisasi dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi atau Produk Hukum lainnya	Kepentingan Umum		
	1	2	3	4	5	6
	Perda Kab. Mimika No. 32 Tahun 2002 tentang Retri ijin usaha perdagangan hewan, bahan asal hewan, pemotongan hewan, dan sarana produksi peternakan	<p>Obyek retribusi: setiap jenis ijin usaha yang dikeluarkan untuk setiap jenis usaha peternakan yang memperoleh ijin untuk melakukan usaha.</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasar jenis usaha peternakan.</p> <p>Besarnya retribusi: Ò Pemasokan hewan Rp 500.000/thn Ò Pemasokan bahan-bahan asal hewan Rp 300/thn, dst.</p>	<p>Perda ini tidak cukup jelas dalam menerangkan maksudnya. Misalnya, ia menyamakan saja ukuran penggunaan jasa dan tarif yang sama-sama berdasar jenis usaha.</p> <p>Ketidakjelasan yang lebih mendasar adalah penetapan besaran retribusi yang tidak menerangkan jumlah satuan yang dimaksud. Pemasokan hewan sebesar Rp 500.000/thn, misalnya, tidak cukup jelas apakah per ekor, atau per satuan apa?</p>	<p>Problem yang juga amat krusial adalah Perda ini memberlakukan kebijakan perijinan dan pungutan atas lalu lintas komoditas (ternak), sesuatu yang tidak tepat dalam konteks kesatuan ekonomi Indonesia dan prinsip perdagangan domestik yang bebas.</p> <p>Selain itu, pungutan ini tidak disertai pengaturan/ perincian tentang kontraprestasi apa yang akan diterima oleh wajib retribusi. Apakah ijin itu dalam bentuk pemeriksaan kesehatan ternak/ daging ternak yang masuk, atau apa?</p>	Dibatalkan	Ditetapkan 6 September 2002

Appendix 3 Research Data

Appendix 3.1 List of Data, Type of Data, and Source of Data Used in Rating

NO.	FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	TYPE OF DATA	SOURCE OF DATA
A. REGULATION AND GOVERNMENT SERVICE FACTOR			
1. Variable of Legal Certainty			
1	Legal Consistency	Primary Data	Perception of Business Community
2	Legal Enforcement	Primary Data	Perception of Business Community
3	Extortion/Criminal Activity	Primary Data	Perception of Business Community
4	Executive - Legislative Relations	Primary Data	Perception of Business Community
2. Variable of Quality of Civil Service			
5	Quality of Civil Service	Primary Data	Perception of Business Community
6	Use of Authority	Primary Data	Perception of Business Community
3. Variable of Regional Finance			
7	Ratio of Retribution to Tax	Secondary Data	Regency/City Regional Budget Year 2002-2003
8	Ratio of Development Budget to APBD	Secondary Data	Regency/City Regional Budget Year 2002-2003
4. Variable of Regional Regulation			
9	Legal Product of the Region (Tax and Retribution)	Analysis of Regional Regulation	Regency/City Regional Regulations, Decisions of the Regents
B. SOCIO-POLITICAL FACTOR			
1. Variable of Security			
10	Business Security	Primary Data	Perception of Business Community
11	Community Security	Primary Data	Perception of Business Community
12	Quick Response of Security Officers in Handling Security Issues	Primary Data	Perception of Business Community
2. Variable of Socio-Political Condition			
13	Public Participation	Primary Data	Perception of Business Community
14	Social Conflict	Primary Data	Perception of Business Community
15	Political Stability	Primary Data	Perception of Business Community
16	Intensity of Demonstration/Strike	Primary Data	Perception of Business Community
3. Variable of Socio-Cultural Condition			
17	Community Openness toward Business Community	Primary Data	Perception of Business Community
18	Absence of Non-Discriminatory Culture	Primary Data	Perception of Business Community
19	Custom & Tradition	Primary Data	Perception of Business Community
20	Community's Working Ethos	Primary Data	Perception of Business Community
C. REGIONAL ECONOMIC DYNAMISM FACTOR			
1. Variable of Economic Potential			
21	GRDP Percapita	Secondary Data	Regencies/Cities' GRDP per capita Year 2001
22	Regional Economic Growth (HDI)	Secondary Data	Regencies/Cities' GRDP based on Constant Price Year 1996 - 2001
23	Human Development Index	Secondary Data	Regencies/Cities' HDI Year 2002
2. Variable of Economic Structure			
24	Value Added per Sector	Secondary Data	Regencies/Cities GRDP based on Current Price Year 2001
25	Value Added of Secondary Sectors Current Price Year 2001	Secondary Data	Regencies/Cities GRDP based on Current Price Year 2001
26	Value Added of Tertiary Sectors	Secondary Data	Regencies/Cities GRDP based on Current Price Year 2001
D. LABOR & PRODUCTIVITY FACTOR			
1. Variable of Manpower Availability			
27	Ratio of Productive-Age Population over Total Population	Secondary Data	Central Bureau of Statistics: National Census Year 2002
28	Ration of Workers with Junior High School Educational Background to Total Labor Force	Secondary Data	Central Bureau of Statistics: National Census Year 2002
29	Ration of Job Seeker over Labor Force National Census Year 2002	Secondary Data	Central Bureau of Statistics:

NO.	FACTOR - VARIABLE - INDICATOR	TYPE OF DATA	SOURCE OF DATA
2. Variable of Labor Cost			
30	Normative Labor Wage	Secondary Data	Ministry of Manpower and Transmigration: List of Provincial/City Minimum Wage in Indonesia Year 2003
31	Actual Labor Wage	Secondary Data	Central Bureau of Statistics: National Census Year 2002
3. Variable of Labor Productivity and Quality			
32	Productivity (Ratio of Value Added of Manufacturing Sector over Total Workers in Manufacturing Sector)	Secondary Data	Central and Regional Bureau of Statistics: GRDP based on Constant Price Year 2001; National Manpower Census Year 2002
E. PHYSICAL INFRASTRUCTURE FACTOR			
1. Variable of Physical Infrastructure Availability			
33	Availability of Road	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
34	Availability of Sea Port	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
35	Availability of Airport	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
36	Availability of Telephone	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
37	Availability of Electricity	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
2. Variable of Infrastructure Quality			
38	Quality of Streets	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
39	Sea Port Accessibility and Type	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
40	Airport Accessibility and Type	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
41	Quality of Telephone Service	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures
42	Quality of Electricity Service	Primary and Secondary Data	Perception of Business Community; Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/ Cities and Provinces in Figures

Appendix 4 Factor, Variables, and Indicators, Rating Intensity

Appendix 4.1 List of Factors - Variables - Indicators

NO.	FACTORS - VARIABLE - INDICATORS	REMARK	MEASUREMENT AND DATA USED
A. REGULATION AND GOVERNMENT SERVICE FACTOR			
1. Variable of Legal Certainty			
1	Consistency	Measures the certainty, clarity, and consistency in enforcement of regional regulations and other policies regulating business	Perception of Business Community
2	Law Enforcement	Measures legal certainty such as protection on work contract and ownership right, consistency of court decisions especially those related to business	Perception of Business Community
3	Extortion/Criminal Activity	Portrays regional government's settlement of illegal practice in levy conducted by people or group of people outside bureaucracy that disturbs business	Perception of Business Community
4	Executive - Legislative Relations	Captures problems caused by poor relations between DPRD and Regional Government	Perception of Business Community
2. Variable of Quality of Civil Service			
5	Quality of Civil Service	Measures the quality of government service and professionalism of government apparatus in providing service to business community	Perception of Business Community
6	Use of Authority	Measures the distortion of regional government apparatus in providing service to business community	Perception of Business Community
3. Variable of Regional Finance			
7	Structure of Levies Imposed by Regional Government to Business Community	Analyzes the structure of levies applicable in the region, especially regional tax and regional retribution	Ratio of Retribution to Tax in APBD
8	Regional Government's Commitment in Providing Supporting Facility for Business Community	Measures the commitment of regional government in developing physical infrastructure needed to support business activities manifested in fund allocation in development budget	Ratio of Development Budget to APBD
4. Variable of Regional Regulation			
9	Legal Product of the Region (Tax and Retribution)	Assesses the quality of policies/legal products made by regional government (regional regulations, Decision of Regent/Mayor, etc.) especially those related to business community. Several aspects are examined from those regulations such as juridical aspect, philosophy, substance, principles, and effects that might produce by said legal products. Regulations related to service, levy, pricing, labor, and so on are the focus.	Analysis on the Problem of Regional Regulation
B. SOCIO-POLITICAL FACTOR			
1. Variable of Security			
10	Business Security	Measures security disturbance to business community	Perception of Business Community
11	Community Security	Measures sense of security and disturbance to community around business site	Perception of Business Community
12	Quick Response of Security Officers in Handling Security Issues	Measures the quality of security officers in handling security disturbance, and guarantee and protection provided by security officers in the region	Perception of Business Community
2. Variable of Socio-Political Condition			
13	Public Participation	Measures the openness of the bureaucracy for public participation or participation of business community in policy formulation especially those related to their concern. Measures public access in control of policy implementation	Perception of Business Community
14	Social Conflict	Measures the extent to which social conflict surrounding influences business activity	Perception of Business Community
15	Political Stability	Measures the extent to which political conflict in the regions influences business activity	Perception of Business Community

NO.	FACTORS - VARIABLE - INDICATORS	REMARK	MEASUREMENT AND DATA USED
16	Intensity of Demonstration/Strike	Measures the extent to which demonstrations disturb business activity	Perception of Business Community
3. Variable of Socio-Cultural Condition			
17	Community Openness toward Business Community	Measures the capacity of people in supporting business activity in terms of their openness to business community, investment and people from outside the region coming in to do business or to work	Perception of Business Community Perception of Business Community
18	Absence of Non-Discriminatory Culture	Measures the capacity of surrounding people in terms of their non-discriminatory attitude in relation to ethnic, religion, gender, race, etc.	Perception of Business Community
19	Custom & Tradition	Measures the society's values and customs in terms of their conduciveness and orientation to productivity	Perception of Business Community
20	Community's Working Ethos	Measures the capacity of people, business community, and workers in the regions in terms of their working ethos and readiness to fair competition	
C. REGIONAL ECONOMIC DYNAMISM FACTOR			
1. Variable of Economic Potential			
21	GRDP Percapita	Measures welfare in terms of average income of people	Regency/City GRDP per Capita
22	Regional Economic Growth	Measures regional economic potential in terms of their potential growth	Regency/City GRDP Growth Rate Year 1996-2001
23	Human Development Index (HDI)	Measures welfare and productivity, as well as quality of people's life in the region	Human Development Index (HDI)
2. Variable of Economic Structure			
24	Value Added of Primary Sectors	Measures the extent to which the regional economy is relying on natural resources	Value Added of Primary Sectors (Ratio of GRDP of Primary Sectors apart from Agriculture to Total GRDP)
25	Value Added of Secondary Sectors	Measures the extent to which people are accustomed with productive activity in manufacturing activities	Value Added of Secondary Sectors (Ratio of GRDP of Secondary Sectors to Total GRDP)
26	Value Added of Tertiary Sectors	Measures the capacity of financial institutions, trading and service in the region	Value Added of Tertiary Sectors (Ratio of GRDP of Tertiary Sectors to Total GRDP)
D. LABOR AND PRODUCTIVITY FACTOR			
1. Variable of Manpower Availability			
27	Productive-Age Labor Availability	Measures the size of productive-age population of workers needed in business activities	Ratio of Productive-Age Population over Total Population
28	Availability of skilled Workers with at least Junior High School Educational Background	Measures the availability of workers having experience as workers in formal business organization	Ratio of Workers of at least Junior High School to Total Labor Force
29	Availability of Job Seeker	Measures the availability of job seekers to fill up jobs required in business activities	Ratio of Job Seeker to Labor Force
2. Variable of Labor Cost			
30	Normative Labor Wage	Measures average level of compensation for all workers as regulated officially which is the cost that must be shouldered by businessmen	Provincial/City Minimum Wage
31	Actual Labor Wage	Measures labor cost based on sectors to be shouldered by businessmen	Actual Salary
3. Variable of Labor Productivity			
32	Labor Productivity	Measures the productivity of workers in manufacturing sectors	Ratio of Value Added of Manufacturing Sector to Total Workers in Manufacturing Sector

NO.	FACTORS - VARIABLE - INDICATORS	REMARK	MEASUREMENT AND DATA USED
E. PHYSICAL INFRASTRUCTURE FACTOR			
1. Variable of Infrastructure Availability			
33	Availability of Road	Measures the availability of infrastructure for land transportation	Ratio of the Length of the Streets in the City/Regency over Region's area; Perception of Business Community
34	Availability of Sea Port	Measures the availability of infrastructure for sea transportation	Availability or Distance to Sea Port (Km); Perception of Business Community
35	Availability of Airport	Measures the availability of infrastructure for air transportation	Availability or Distance to Airport (Km); Perception of Business Community
36	Availability of Telephone	Measures the availability of communication facility	Number of Telephone Lines per Capita; Perception of Business Community
37	Availability of Electricity	Measures the availability of electricity as source of power for business activity	Production of Electricity/KWH of Available Electricity ; Perception of Business Community
2. Variable of Infrastructure Quality			
38	Quality of Road	Measures the quality of physical infrastructure in the region as support for business activity	Ratio of the Length of Road with Good Quality over Total Length of Road; Perception of Business Community
39	Sea Port Accessibility and Type	Measures access, smoothness, and capacity of sea transportation facilities as support for business activity	Type and Capacity of Sea Port and Average Departure per Week; Perception of Business Community
40	Airport Accessibility and Type	Measures access and smoothness of air transportation facility in the region as support for business activity	Type of Airport and Average Flight per Week; Perception of Business Community
41	Quality of Telephone Service	Measures the quality of communication facilities in the region	Perception of Business Community; Regency/City and Province in Figures
42	Quality of Electricity Service	Measures the quality of energy sources as support for business activities	Perception of Business Community; Regency/City and Province in Figures

Appendix 4.2 Intensity Classification Method

Each indicator was given categories of intensity (Extremely High, High, Moderate, Low, Extremely Low and so forth) used to rate existing statistical data before it was processed using the 'expert choice' software based on the AHP method. The classification of indicator into levels of intensity was done following the method below:

A. Intensity Classification System for Indicator

The factors determining the attractiveness of a region to investment was evaluated by, first, determining the categories of intensity of each indicator, for instance, High, Moderate, Low and Extremely Low. The classification of each indicator was determined using these two approaches: (1) A Method (Mean method) and (2) B Method (Distribution Method).

A Method

(Mean Method) is a method used to compare the value of each area against the mean value of the entire regions. The closer the value of an area in proportion to the mean weighed value of the entire areas, the closer the region is in relation to the average value of the entire regions in terms of such indicator. The more the regions showing this level of intensity closer to the average value the better the distribution of the regions.

B Method

(Distribution Method) is a mean method that takes into account the distribution of the data. The classification of the indicator using this method was adjusted based on the skewness and kurtosis of the curve of data distribution.

Basically, both methods employ certain reference value as a basis in the determination of the level of intensity of each indicator. For the positive indicators, the smaller the value of the indicator compared to the reference value, the lower the intensity of the indicator. Meanwhile, the bigger the value of the indicator compared to the reference value, the higher the intensity of said indicator.

B. Reference Value

Each indicator has different reference value that depends on the method used:

In **A method**, for instance, the reference value is based on the mean value of indicator. For example, to classify the intensity of FDRB indicator per capita in one regency, reference value is calculated based on the mean value of FDRB per capita for the entire regencies/cities.

In **B method**, reference value is based on the mean value of indicator by paying attention to distribution and form of *standard deviation, kurtosis and skewness*.

C. Rationale for Using Method

1. A Method is used:

- If the value of the indicators (suppose the value of GDP per capita or value for GDP growth rate) in more regions is closer to the mean value, it means that the value among regions is evenly distributed.
- In normal distribution/condition, mean = median = mode.

2. B Method is used if the values of an indicator used in the determination of regional attractiveness to investment are highly unevenly distributed. Part of the values of a concerned indicator is skewed to the left, some parts are to the right, while some others distributed around the normal distribution. Therefore, to classify the intensity of such an indicator, attention should be given to the skewness and kurtosis.

D. Intensity Classification System for Various Kinds of B Method

In application, B method is developed into several forms namely B, B1, B2, B3 and B4. Intensity classification systems for each of B method are as follows:

Table 1:
Classification of Intensity for B Method

Intensity	Interval of Value	
	Positive Indicator	Negative Indicator
Extremely High	$\delta \geq X + SD$	$\delta \leq X - SD$
High	$X + \frac{1}{2} SD \leq \delta < X + SD$	$X - \frac{1}{2} SD \leq \delta < X - SD$
Moderate	$X - \frac{1}{2} SD \leq \delta < X + \frac{1}{2} SD$	$X - \frac{1}{2} SD < \delta \leq X + \frac{1}{2} SD$
Low	$X - \frac{1}{2} SD < \delta \leq X - SD$	$X + \frac{1}{2} SD < \delta \leq X + SD$
Extremely Low	$\delta < X - SD$	$\delta > X + SD$

Note : δ = Indicator Value; \bar{X} = Mean; SD = Standard Deviation

Table 2:
Classification of Intensity for B1 Method

Intensity	Interval of Value	
	Positive Indicator	Negative Indicator
Extremely High	$\delta \geq X + \alpha_4 SD$	$\delta \leq X - \alpha_4 SD$
High	$X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD \leq \delta < X + \alpha_4 SD$	$X - \frac{1}{2} SD \leq \delta < X - \alpha_4 SD$
Moderate	$X - \frac{1}{2} \alpha_4 SD \leq \delta < X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD$	$X - \frac{1}{2} \alpha_4 SD < \delta \leq X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD$
Low	$X - \frac{1}{2} \alpha_4 SD < \delta \leq X - \alpha_4 SD$	$X + \frac{1}{2} \alpha_4 SD < \delta \leq X + \alpha_4 SD$
Extremely Low	$\delta < X - \alpha_4 SD$	$\delta > X + \alpha_4 SD$

Note : δ = Indicator Value; \bar{X} = Mean; α_4 = Kurtosis; SD = Standard Deviation

Table 3:
Classification of Intensity for B2 Method

Intensity	Interval of Value	
	Positive Indicator	Negative Indicator
Extremely High	$\delta \geq X + \alpha_3 SD$	$\delta \leq X - \alpha_3 SD$
High	$X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD \leq \delta < X + \alpha_3 SD$	$X - \frac{1}{2} SD \leq \delta < X - \alpha_3 SD$
Moderate	$X - \frac{1}{2} \alpha_3 SD \leq \delta < X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD$	$X - \frac{1}{2} \alpha_3 SD < \delta \leq X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD$
Low	$X - \frac{1}{2} \alpha_3 SD < \delta \leq X - \alpha_3 SD$	$X + \frac{1}{2} \alpha_3 SD < \delta \leq X + \alpha_3 SD$
Extremely Low	$\delta < X - \alpha_3 SD$	$\delta > X + \alpha_3 SD$

Note : δ = Indicator Value; \bar{X} = Mean; α_3 = Skewness; SD = Standard Deviation

Table 4:
Classification of Intensity for B3 Method

Intensity	Interval of Value	
	Positive Indicator	Negative Indicator
Extremely High	$\delta \geq X + Met$	$\delta \leq X - Met$
High	$X + \frac{1}{2} Met \leq \delta < X + Met$	$X - \frac{1}{2} Met \leq \delta < X - Met$
Moderate	$X - \frac{1}{2} Met \leq \delta < X + \frac{1}{2} Met$	$X - \frac{1}{2} Met < \delta \leq X + \frac{1}{2} Met$
Low	$X - \frac{1}{2} Met < \delta \leq X - Met$	$X + \frac{1}{2} Met < \delta \leq X + Met$
Extremely Low	$\delta < X - Met$	$\delta > X + Met$

Note : δ = Indicator Value; \bar{X} = Mean; Met = ($\alpha_4 * SD$) if $\alpha_4 \leq 3$, and Met = ($\alpha_3 * SD$) if $\alpha_4 > 3$,

Table 5:
Classification of Intensity for B4 Method

Intensity	Interval of Value	
	Positive Indicator	Negative Indicator
Extremely High	$\delta \geq X + \text{Rat}$	$\delta \leq X - \text{Rat}$
High	$X + \frac{1}{2} \text{Rat} \leq \delta < X + \text{Rat}$	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} \leq \delta < X - \text{Rat}$
Moderate	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} \leq \delta < X + \frac{1}{2} \text{Rat}$	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} < \delta \leq X + \frac{1}{2} \text{Rat}$
Low	$X - \frac{1}{2} \text{Rat} < \delta \leq X - \text{Rat}$	$X + \frac{1}{2} \text{Rat} < \delta \leq X + \text{Rat}$
Extremely Low	$\delta < X - \text{Rat}$	$\delta > X + \text{Rat}$

Note : δ = Indicator Value; \bar{X} = Mean; Met = $((\alpha_3 + \alpha_4)/2 \text{ R SD})$

E. Formulas

1 Mean

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2 Standard Deviation

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

3 Kurtosis

$$\alpha_4 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{S^4}$$

4 Skewness

$$\alpha_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{S^3}$$

Rating indicators were determined and developed through study of literature, experts' choice, and KPPOD's research result in 2001. The result was conferred with several experts through panel judgement then producing the final indicators and their structure. Afterwards, the structure of indicators produced by experts through panel judgment as explained in part III.3.1.1. was then weighed (the level of the importance of each indicator) to measure the level of attractiveness of an area to investment, as presented in chart 4.4.

The hierarchy of factors, variables, and indicators in chart 4.4. illustrates the five significant factors determining the attractiveness of an area to investment and the weight assigned to each. The total weight of all factors (the first level in the hierarchy) must be 1 (one).

Likewise the total weight of all variables under the respective factor (the second level in the hierarchy) must be 1 (one).

The same process applies for the weight of indicators under one variable (the third level in the hierarchy) wherein the total weight is 1 (one).

The total weight for the intensity assigned to each indicator (the fourth level in the hierarchy) was likewise set at one.

Looking at the next level, below the intensity level (to make it simple, just call it the fifth level), we will find **intensity score (not intensity weight)** in the fifth level. For example, under **government service indicator** there is **KABSB** intensity (abbreviation of Regulation and Government Service - Apparatus - Bureaucracy - Excellent), with a score of **0.0248**. The total of the entire intensity score for each indicator from 42 (forty-two) indicators is 1 (one).

Using the above **government service indicator** as sample, the score of its intensity is calculated as follows:

- 1 The score **0.0248** is **KABSB** intensity score where "**Government Service**" indicator, which is valued '**excellent**', produces a score of 0.0248.

Meanwhile, when the indicator is valued '**extremely bad**' that is represented by **KABSJ** (abbreviation of Regulation and Government Service - Apparatus - Bureaucracy - Extremely Bad), it produce a score of **0.0016**.

- 2 The score **0.0248** is obtained by multiplying the weights for the following:

$$\text{intensity} \times \text{indicator} \times \text{variable} \times \text{factor} \\ 0.513 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0248$$

- 3 In Appendix 4.6.2.1. the score 0.0062 given to '**Government Service**' indicator for **Sawahlunto City** equivalent to '**fair**' rating under **KABSD** (which stands for Regulation and Government Service Factor - Apparatus - Bureaucracy - Fair), was obtained by multiplying the weights of the following:

$$\text{intensity} \times \text{indicator} \times \text{variable} \times \text{factor} \\ 0.126 \times 0.673 \times 0.226 \times 0.318 = 0.0062$$

(Note: the result was rounded off)

The same calculation was done for the intensity of other indicators to produce intensity score of each indicator.

The total cumulative intensity score of 42 (forty-two) indicators represents the total score, which is used in the comparison between one area to other areas to get the ranking of total score. An area that obtained the highest possible intensity score for all 42 (forty-two) indicators was given a total score of 1 (one).

Ranking per specific factor was done through calculation of the intensity score intended factor. For example, the ranking in terms of regulation and government service factor was conducted by comparing the cumulative score of indicators under the regulation and government service factor.

Appendix 5.1 Guideline in Analyzing Regional Regulation

The regions' legal products (Regional Regulation, Decree of the Regent/Mayor, etc.) is analyzed by looking as its problem levels, classified into four categories:

I. Non-Problematic

This category is given to those regional products showing no problem at all or not showing any significant problem such as typographical error, grammar, etc. Such incremental problems are just considered non-problematic so long as no juridical, substantial, and principle problems are found.

II. Juridically-Problematic

This category is for those regional products showing problems related to the violation of juridical provisions, which are not substantial and principle in nature. The likely problems are as follows:

1. Irrelevance of Juridical Reference

The juridical reference used in the consideration of regional regulation is not relevant with the substance regulated in such regulation. Regional Regulation for Animal Husbandry, for example, uses Law or Government Regulation on Mining as its reference.

2. Out of Date Juridical Reference

The juridical reference used is out of date because it has been amended or no longer applicable. For example, a regional regulation on regional tax or regional retribution stipulated in 2001 still uses Law Number 18 Year 1997 as its juridical reference while it has been amended by a new one.

3. Juridical Incompleteness

There are some requirements for a regional regulation on regional tax or regional retribution to be considered complete as regulated in Law Number 34 Year 2000 and Government Regulation Number 65 and 66 Year 2001 such as:

a Regional Regulation on Regional Tax, at least, should regulate the following subjects:

- 1) Name, object, and subject of tax;
- 2) Basis of imposition, tariff, and calculation method;
- 3) Area of collection;
- 4) Tax period;
- 5) Stipulation;
- 6) Payment and collection procedures;
- 7) Expiration;
- 8) Administrative sanction; and
- 9) Date of effective implementation.

b Regional Regulation on retribution, at least, should regulate the following:

- 1) Name, object, and subject of retribution;
- 2) Categorization, method in measuring service utility level;
- 3) Structure and amount of tariff;
- 4) Area of collection;
- 5) Collection procedure;
- 6) Administrative sanction;
- 7) Claim procedure; and
- 8) Date of effective implementation.

Regional regulations with juridical problems were recommended for REVISION or PERFECTION, specified with clear recommendation on what should be revised or perfected. For example, several articles may necessarily be removed or added.

III. Substantially-Problematic

This category refers to the violation of substantial provisions such as discrepancy between the objective and the content, unclear definition of object and/or subject and/or rights and obligations of the parties involved, unclear procedures, unclear service standards, violation to the philosophy of user charges, categorization, and so on. Specified problems and their operational definitions are as follows:

1. Discrepancy between the objective and the content

Provisions provided in the succeeding articles are not consistent with the objective as defined in the previous article. For example, a regional regulation may be composed for the protection of the environment as stated in the article on the objective of the regulation but in most of the articles it simply regulates matters related to trading or tariff oriented to accumulation of Original Regional Revenue (PAD).

2. Unclear definition of object

A regional regulation does not provide any clear description on the object subjected to levy letting it as a gray area wherein multiple interpretations may be developed and violation on it may be triggered.

3. Unclear definition of subject

A regional regulation does not provide any clear description on the subject of levy letting it as a gray area wherein multiple interpretations may be developed and violation on it may be triggered

4. Unclear definition of the rights and obligations of both taxpayer or retribution payer and government:

Rights and obligations of the taxpayer or retribution payer and that of the government are not clearly defined, leading to law ambiguity.

5. Unclear procedures and service standards

A regional regulation does not provide any clear description on the procedures and service standards such as deadline, requirements, tariff, and so on.

6. Philosophy and principles of levy (tax, retribution, classification, contribution, etc.)

Regulation of levy (tax or retribution) is not compatible with the philosophy of such kind of levy. Regional regulation on retribution, for example, perhaps does not provide any provision on the direct benefit supposed to be enjoyed by retribution payer. A certain regional regulation on retribution may wrongly define the category it belongs, leading to wrong stipulation of tariff stipulation basis and structure).

observance on the separation of authority, and so on. The problems of this kind and their operational definitions are as follows:

1. Violation to the principle of Free Internal Trade

A regional regulation violates the principle of Free Internal Trade, considering a country as an integrated, indivisible economic unit wherein regions are simply integral part of it and wherein inter-regional flow of goods and services is free from any tariff and non-tariff barriers. Violation to this principle simply means threat to economic unity.

2. Violation to the principle of Fair Business Competition (monopoly, oligopoly, monopsony, mandatory partnership, etc.)

A regional regulation leads to the decreased or lost of access or opportunity of a certain group of people to a certain business due to the existence of unfair provisions, which are monopoly or oligopoly in nature. It may be in the form of mandatory partnership that is susceptible to corruption, collusion, and nepotism, and unfair to some parties.

3. Negative impact to the economy

A regional regulation causes high cost economy for the business community and the whole community because of unfair tariff, and double taxation (the same tax object has been imposed with tax through other regulations either in the national level or regional level). This imposition limits the development of the business and the opportunity of the people to save.

4. Violation of public interest

A regional regulation curb the opportunity for the people to have access on resources and conditions they are entitled to (in terms of economy, politics, religious freedom, etc.)

5. Violation of authority

A regional regulation regulates matters beyond or not under the level of authority of concerned regional government. It is the authority of a higher or lower level of the government.

The regional products with SUBSTANTIAL problems are recommended for REVISION or REVIEW. Problematic articles to be reviewed should be indicated.

The regional regulations with these PRINCIPLE problems shall be recommended for CANCELLATION.

IV. Principally-Problematic

This category refers to the violation of principles agreed in the national level such as avoidance of a negative impact on the economy, respect to public interest, justice, high consideration to people's capability,